

**KEBERKAITAN ANTARA ANTESEDEN, PENILAIAN
KEADILAN PROSEDURAL, PENILAIAN KeadILAN
DISTRIBUIT, DAN DAMPAKNYA**



Oleh:
Faturachman

UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2002

Naskah ini telah disetujui oleh:



Prof. Dr. Bimo Walgito
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Saparinah Sadli
Pembimbing Pendamping



Dr. Djamaludin Ancok
Pembimbing Pendamping

Untuk:

Saudara-saudaraku korban ketidakadilan.

Untuk orang-orang tercinta:

Ambar Widaningrum

Alifa Prasasti Rahmaningrum

Asa Shaliha Rahmaningrum

Ibu Hj. Siti Mubaedah

Bapak H. Daldiri

Ibu Setyowati (alm.)

Bapak Sudar

PRAKATA

Sebelum proposal disertasi ini ditulis, penulis dan banyak orang Indonesia pada umumnya peduli dengan masalah keadilan yang tidak mudah diwujudkan. Secara akademis, penulis mulai dikenalkan lebih intens dengan topik keadilan ketika belajar program master di Universitas Flinders pada Profesor Norman T. Feather. Selanjutnya, penulis menjadi lebih peduli dengan masalah ini, baik dalam tataran teori maupun fenomena yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini semua terdorong oleh keyakinan penulis bahwa keadilan merupakan nilai-nilai hidup yang harus dijalankan demi kebaikan bersama. Sayangnya, keadilan sebagai dasar untuk mencapai kehidupan yang luhur sering berubah peran menjadi tujuan yang sepertinya tidak pernah bisa dicapai. Meskipun demikian, penulis berusaha untuk tidak frustrasi melihat kenyataan yang demikian itu. Bekerja dalam bidang akademis penulis mengupayakan kehidupan yang berkeadilan dengan menyusun disertasi ini sebagai langkah penting.

Tersusunnya disertasi ini adalah hasil kerja keras penulis, tetapi semua ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Begitu banyak orang dan lembaga, baik yang secara langsung maupun tidak membantu dan bekerjasama dengan penulis untuk menyusun disertasi ini. Penulis juga merasa sulit untuk mengidentifikasi siapa atau lembaga mana yang lebih berperan. Oleh karenanya, urutan ungkapan terima kasih di bawah ini mohon tidak diartikan urutan pentingnya pihak-pihak yang disebut. Mereka adalah pihak-pihak yang berperan penting sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing penyusunan disertasi ini. Prof. Dr. Dalil Adisubroto almarhum yang mulanya sebagai pembimbing utama adalah orang dengan begitu banyak kebaikan sehingga penulis tidak pernah merasa kehilangan motivasi untuk terus menyelesaikan tugas ini. Dalam proses konsultasi berbagai respons dan masukannya selalu membuat penulis berbesar hati, suasana psikologis yang sangat

dibutuhkan untuk menyelesaikan disertasi ini. Prof. Dr. Bimo Walgito sebagai pembimbing utama pengganti dengan kebesaran hati mau menerima limpahan tugas di sela-sela kesibukannya yang telah menumpuk. Penulis sangat terkesan dengan caranya membimbing yang membuat penulis merasa yakin dengan langkah-langkah yang telah ditempuh. Prof. Dr. Saparinah Sadli adalah pembimbing yang banyak memberi inspirasi pada penulis untuk mengembangkan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan isu gender, isu yang sangat sarat dengan ketidakadilan. Dorongan yang diberikan juga mempercepat penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Dr. Djamaluddin Ancok telah berperan sebagai mentor yang selalu memiliki cara untuk memacu penulis belajar dan menghasilkan karya, termasuk disertasi ini. Kepada semua pembimbing yang disebutkan di atas, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Karya ini juga makin tajam berkat kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak khususnya kolega senior di Fakultas Psikologi dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Selanjutnya, tanpa masukan dari anggota tim penilai yang terdiri dari Prof. Dr. Asip F. Hadipranata, Dr. Johana E. Prawitasari, dan Dr. Sugiyanto, tim duapuluh khususnya Prof. Dr. Sri Mulyani Martaniah, MA. dan Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., serta tim penguji lain yaitu Prof. Dr. Ir. Boma Wikan Tyoso, M.Sc., Prof. Dr. Suryo Guritno, Prof. Dr. Sunyoto Usman, dan Prof. Dr. Bambang Poernomo, karya ini rasanya kurang sempurna. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih.

Sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, penulis merasa berhutang budi banyak pada lembaga ini, khususnya dalam memberi kesempatan dan kemudahan agar disertasi ini bisa selesai. Kepada pimpinan di bawah dekan Drs. H.M. Bachroni, SU dan Drs. Saifuddin Azwar, MA, sesama staf, karyawan, dan mahasiswa yang banyak memberi dorongan, bantuan, atau stimulasi pada penulis hingga disertasi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih banyak. Selain bekerja di Fakultas Psikologi UGM, penulis juga bekerja di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan yang sangat banyak berjasa pada penulis, baik sebelum maupun selama menulis disertasi ini.

Kepada Dr. Agus Dwiyanto dan Drs. Sukamdi, MSc. selaku pimpinan, juga kepada staf peneliti, asisten, dan karyawan penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tanpa kedua lembaga ini rasanya sulit sekali penulis mencapai posisi seperti sekarang ini.

Salah satu kesulitan dalam menempuh program pendidikan adalah dana. Penulis menjadi orang yang sangat beruntung karena Yayasan Pendidikan Internasional yang menyalurkan beasiswa Ford Foundation telah mencukupi semua dana yang dibutuhkan untuk mengikuti program doktor ini. Dalam berbagai kesempatan, penulis selalu bertanya: apa yang bisa saya balas atas kebaikan kedua yayasan ini? Maafkanlah bila penulis sampai saat ini hanya berusaha bekerja sesuai dengan rencana yang saya ajukan dan belum bisa membalas kebaikannya. Terima kasih banyak diucapkan atas beasiswanya, juga atas terjalinnya hubungan yang baik, khususnya dengan mBak Fenty Setiasih yang penuh pengertian. Terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Rosalia Sciortino yang mendukung diperolehnya dana beasiswa dari Yayasan Pendidikan Internasional.

Ucapan terima kasih yang tidak terkira juga kami sampaikan kepada masyarakat di Kalitengah, Gadungan, Canan, Pandes, Birit, dan Sukoharjo, khususnya mereka yang menjadi responden atau informan. Penulis juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu aktivitas mereka untuk merespon pertanyaan yang diajukan, baik oleh penulis maupun para asisten. Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada para pamong desa di enam desa tersebut yang telah membantu memberi izin dan informasi yang sangat bermanfaat. Kepada pihak PTPN X, khususnya para mandor dan *sinder*, juga tidak lupa diucapkan terima kasih.

Penulis tidak mungkin melakukan penelitian ini tanpa bantuan asisten, baik untuk wawancara mendalam pada studi kasus, uji coba, wawancara dalam survai, manajemen data, analisis data, maupun *setting* laporan. Mereka adalah Nuh, Tantin, Moordiningsih, Wenty, Indrayanti, Agus Wahid, Novi, Ita, Fajar,

Vera, Leny, Zul, Chandra, Nanik, Hasnah, dan Sonny. Secara khusus kepada mBak Hanti yang telah membantu dalam manajemen data, mBak Harti yang membantu manajemen naskah, mBak Sugihastuti yang menyunting bahasa, mBak Wiwid yang mengoreksi kepastakaan, Dana dan tim komputer serta timnya mBak Ika yang selalu memberi bantuan teknis, juga diucapkan terima kasih banyak. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pengelola dan karyawan Program Pascasarjana, Ketua, sekretaris dan sekretariat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada atas segala bantuan dan kebaikannya.

Selama proses penulisan disertasi ini, penulis mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk berkunjung dan kontak dengan para ahli di negeri Belanda. Hal itu terjadi karena bantuan Prof. Frans Hüsken dari Universitas Nijmegen dan tim *Social Security Project*, baik yang berada di Belanda maupun di Indonesia. Kepada anggota lain dari proyek itu, Prof. Ben White, Prof. Jan Breman, semua staf dan manajemen Amsterdam School for Social Science Research, juga kepada Dr. Irwan Abdullah, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis juga menjalin hubungan yang begitu baik dengan Dr. Kees van den Bos dari Universitas Leiden, yang kemudian pindah ke Free University Amsterdam. Atas segala keterbukaan dan bantuan literaturnya yang begitu banyak diucapkan terima kasih.

Kepada Ambar Widaningrum, istri yang paling banyak berperan sebagai pasangan diskusi untuk penulisan disertasi ini dan juga teman seperjuangan untuk bertahan hidup, meniti karir, berbagi duka dan ceria, berbagi kerja dan cinta, serta semua yang telah dijalani bersama, penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ini bersama cinta. Kepada Alifa Prasasti Rahmaningrum dan Asa Shaliha Rahmaningrum, penulis mengucapkan terima kasih atas cinta dan dorongannya. Kedua buah hati ini juga menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang tidak pernah henti. Kepada kedua anakku yang sangat cantik-cantik pula kupersembahkan karya ini.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis. Kepada ibu Hj. Siti Mubaidah dan bapak H. Daldiri, kepada almarhumah

ibu Setyowati dan bapak Sudar, penulis hanya dapat berterima kasih atas segalanya yang sulit disebut satu per satu. Begitu banyak mereka memberi pada penulis, tetapi terlalu sedikit yang dapat penulis berikan pada mereka. Semoga Allah membalasnya dengan sorga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Danasri dan keluarga Hadisoemarto atas dorongannya dan atas pengertiannya selama penulis absen dari berbagai kegiatan keluarga yang penuh kehangatan demi tugas ini.

Kepada semua orang yang telah membantu penelitian dan penulisan, tetapi penulis tidak dapat menyebutnya satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf karena tidak menyebutkan nama-namanya. Semoga mereka yang telah berjasa tidak merasa dikecilkan jasanya karena penulis tidak menyebutkan nama-namanya.

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan yang tidak sebatas pada proses penulisan disertasi ini, tetapi selama-lamanya akan selalu dirasakan. Maha besar Engkau atas segalanya.

Semoga karya ini bermanfaat.

Yogyakarta, April 2002

Faturochman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENGANTAR	1
A. Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	19
C. Manfaat Penelitian	20
D. Keaslian Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kajian Psikologi tentang Keadilan	24
B. Keadilan Prosedural	27
1. Model Kepentingan Pribadi	29
2. Model Nilai-Nilai Kelompok	31
C. Keadilan Distributif	35
1. Distribusi Secara Proporsional	37
2. Distribusi Merata	38
3. Distribusi berdasarkan Kebutuhan	38
4. Distribusi berdasarkan Permintaan dan Penawaran di Pasar	39
5. Distribusi yang Mengutamakan dan Menguntungkan Orang Lain	40
6. Kepentingan Bersama di atas Kepentingan Pribadi	40

D.	Keadilan Interaksional	45
1.	Penghargaan	47
2.	Netralitas	48
3.	Kepercayaan	48
E.	Penilaian Keadilan	51
1.	Penilaian Sosial	52
2.	Faktor Pengaruh Penilaian Sosial	55
3.	Teori Perbandingan Sosial	60
4.	Teori Atribusi	63
5.	Teori Referensi Kognisi	65
6.	Teori Heuristik Penilaian Keadilan	68
F.	Anteseden Penilaian Keadilan	74
1.	Anteseden Penilaian Keadilan Prosedural	75
2.	Anteseden Penilaian Keadilan Distributif	77
G.	Dampak Penilaian Keadilan	82
H.	Integrasi Model Penilaian Keadilan	87
1.	Model Umum	87
2.	Gender dan Model Penilaian Keadilan	92
I.	Dasar Teori dan Hipotesis	96
BAB III	METODE PENELITIAN	108
A.	Rancangan Penelitian	108
B.	Penelitian Lapangan: Studi Kasus dan Survei	110
1.	Variabel Penelitian	111
2.	Teknik dan Alat Pengambil Data	115
3.	Area Penelitian	129
4.	Informan dan Responden	132
5.	Rancangan Analisis	143
C.	Penelitian Skenario	149
1.	Rancangan Penelitian Skenario	150
2.	Subjek Penelitian	154
3.	Rancangan Analisis Data	157
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	159
A.	Masalah-Masalah Keadilan	160
1.	Hubungan Buruh-Majikan	160
2.	Hubungan Sosial Masyarakat: Mekanisme Bantuan	165
3.	Hubungan Petani dengan PTPN X	169
B.	Deskripsi Variabel Psikologi	191
C.	Model Penilaian Keadilan	195

D. Dinamika Penilaian Keadilan	215
1. Model Heuristik Penilaian Keadilan	216
2. Perbedaan Kepuasan dan Indikasi Kepentingan Pribadi	232
E. Pembahasan Umum	240
F. Keterbatasan Penelitian	244
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	247
A. Kesimpulan	247
B. Rekomendasi	251
1. Saran Umum	251
2. Rekomendasi bagi Pemegang Otoritas	253
3. Rekomendasi bagi Praktisi Hukum	256
4. Rekomendasi bagi Masyarakat dan Penguasa Lokal	259
5. Rekomendasi bagi Peneliti Lain	261
RINGKASAN	263
SUMMARY	309
DAFTAR PUSTAKA	349
LAMPIRAN	363

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Hasil Seleksi Item dan Uji Reliabilitas Internal Skala-Skala Pengukuran	129
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Desa Penelitian dan Jenis Kelamin	135
Tabel 3.3 Status Pernikahan berdasarkan Jenis Kelamin Responden	136
Tabel 3.4 Daftar Informan Wawancara Mendalam dan Latar Belakangnya	137
Tabel 3.5 Rata-Rata Usia, Jumlah Anak, dan Anggota Rumah Tangga berdasarkan Jenis Kelamin Responden	138
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin Responden	139
Tabel 3.7 Pekerjaan Utama berdasarkan Jenis Kelamin Responden	140
Tabel 3.8 Rata-Rata Pendapatan dan Pengeluaran per Bulan berdasarkan Jenis Kelamin Responden	141
Tabel 3.9 Rata-Rata Luas Rumah dan Lahan berdasarkan Jenis Kelamin Responden	142
Tabel 3.10 Jenis Tembakau yang Ditanam di Lahan berdasarkan Jenis Kelamin Responden	142
Tabel 3.11 Ringkasan Rancangan Skenario	152
Tabel 3.12 Rancangan Analisis Variansi untuk Penilaian Keadilan Penelitian Skenario	157
Tabel 4.1 Kepuasan Pemilik Sawah dengan Uang Bagi Hasil, Uang Jaminan, dan Bonus yang Diterima dari PTPN ..	183
Tabel 4.2 Kepuasan Pemilik Sawah dengan Penyerahan Lahan, Waktu Penyerahan, dan Lama Diserahkan kepada PTPN untuk Ditanami Tembakau	186
Tabel 4.3 Kepuasan Pemilik Sawah Sesudah Tanah Digunakan untuk Penanaman Tembakau PTPN	188
Tabel 4.4 Rata-Rata dan Deviasi Standar Variabel-Variabel Psikologis berdasarkan Jenis Kelamin	192

Tabel 4.5	Hasil Analisis Variansi untuk Harapan berdasarkan Jenis Kelamin	195
Tabel 4.6	Efek Langsung, Tidak Langsung, dan Total Variabel-Variabel dalam Model	203
Tabel 4.7	Ringkasan Hasil Uji Model-Model yang Dikembangkan dalam Penelitian	214
Tabel 4.8	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural	216
Tabel 4.9	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif	217
Tabel 4.10	Perbedaan Penilaian Keadilan Distributif Antarpasangan Distribusi dan Signifikansi Perbedaannya	218
Tabel 4.11	Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Prosedur Terlebih Dulu	220
Tabel 4.12	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu	220
Tabel 4.13	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu	221
Tabel 4.14	Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu	222
Tabel 4.15	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu	222
Tabel 4.16	Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu	223
Tabel 4.17	Koefisien Korelasi antara Penilaian Keadilan Prosedural dengan Distributif berdasar Variabel Independen dan Taraf Signifikasinya	226
Tabel 4.18	Korelasi antara Penilaian Keadilan Prosedural dengan Penilaian Keadilan Distributif dan Signifikasinya pada Tingkat Kepuasan yang Berbeda	234
Tabel 4.19	Efek Langsung (Beta) pada Tingkat Kepuasan yang Berbeda	234

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Umum Penilaian Keadilan Menurut Tyler	89
Gambar 2.2 Pengembangan Model Penilaian Keadilan	99
Gambar 3.1 Model-Model Penelitian untuk Pembuktian Teori ...	108
Gambar 3.2 Rancangan Analisis Jalur Model Penilaian Keadilan	145
Gambar 3.3 Model Regresi Ganda Multivariat Anteseden Penilaian Keadilan	146
Gambar 4.1 Model Regresi Penilaian Keadilan	196
Gambar 4.2 Model Resiprokal Penilaian Keadilan berdasar Hasil Analisis	198
Gambar 4.3 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis dengan Asumsi Keadilan Prosedural Berpengaruh terhadap Keadilan Distributif	201
Gambar 4.4 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis dengan Asumsi Ada Efek Keadilan Distributif terhadap Keadilan Prosedural	205
Gambar 4.5 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis pada Perempuan	209
Gambar 4.6 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis pada Laki-Laki	213
Gambar 4.7 Rata-Rata Penilaian Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif pada Masing-Masing Skenario .	224
Gambar 4.8 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Rendah	235
Gambar 4.9 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Sedang	236
Gambar 4.10 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Tinggi	237

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Contoh Transkrip Wawancara	363
B. Alat Pengumpul Data Survei	405
C. Hasil Uji Konsistensi Internal	415
D. Skenario	424
E. Hasil-Hasil Analisis Model Persamaan Struktural	438
F. Hasil-Hasil Analisis Variansi	493

INTISARI

Keadilan merupakan salah satu landasan yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah ketidakadilan muncul karena secara konseptual keadilan sering tidak didefinisikan secara jelas dan secara empiris sistem keadilan yang dianut tidak diterapkan atau dilanggar. Sementara itu, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan akan menghasilkan efek positif dan ketidakadilan membawa dampak negatif. Disertasi ini dirancang untuk menemukan data empiris tentang model penilaian keadilan, khususnya untuk melihat dinamika keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif. Penelitian yang dilakukan meliputi studi kasus, survai, dan penelitian skenario. Dari studi kasus didapatkan bukti bahwa keadilan menjadi problem, baik dalam relasi sosial horizontal maupun vertikal. Ketidakadilan sering dikonstruksi secara kultural, struktural, dan personal. Dari survai diperoleh model keadilan yang menonjol, yaitu model penilaian keadilan relasional. Dalam model ini, cara-cara orang memperlakukan orang lain yang sering disebut keadilan interaksional, menjadi faktor paling penting yang berperan terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif. Hasil lain menunjukkan bahwa peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibanding peran sebaliknya. Dari penelitian skenario, juga ditemukan hasil serupa. Dari penelitian survai dan skenario, diperoleh bukti bahwa model nilai-nilai kelompok dalam penilaian keadilan paling sesuai di lapangan. Model kepentingan pribadi dalam penilaian keadilan muncul ketika ketidakpuasan menonjol. Dalam model yang terakhir ini, peran penilaian keadilan distributif menjadi menonjol.

ABSTRACT

Justice is a fundamental feature of human life. The issues of justice have been of importance since conceptual and empirical aspects of it have not been agreed on what the systems of justice should be. On the other hand, psychological studies have shown convincingly that when people experienced just or unjust events it would affect subsequent measures such as satisfaction, resentment and protest. This study was designed to find the empirical data of justice matters, to find the model of perceived justice especially the relations between procedural and distributive justice, and to describe the relations between objective and perceived justice. To address such goals, the author conducted three studies: case study, survey, and scenario study. The findings of case study show that justice matters in horizontal as well as vertical social relations. Unjust occurs because it is culturally, structurally, and personally constructed. From the survey the author found a general model of perceived justice called relational-dominated justice model. In this model enacted interpersonal treatment or interactional justice has greater influence to procedural justice and distributive justice than other antecedents. The effect of procedural justice toward distributive justice is greater than the reverse while these justices contribute significantly to satisfaction. In the scenario study it is shown, again, that the effect of procedural justice toward distributive justice is greater than the reverse. The author also found that heuristic judgment did not fully appear when relational model of justice was introduced and become the applied system. The findings of survey and scenario studies suggest that the group-value model of justice is applicable. However, the self-interest model of justice exists when people were less satisfied. In the later model the role of distributive justice is more important than it is in the group value model.

BAB I

PENGANTAR

A. Perumusan Masalah

Sebelum terjadi krisis moneter dan ekonomi, banyak ahli dan lembaga-lembaga internasional memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harus diakui bahwa pada waktu itu pembangunan telah membawa banyak kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator kesejahteraan. Antara tahun 1980-1990, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar pada angka enam persen per tahun seperti yang diindikasikan oleh produk domestik bruto (World Bank, 2001). Pertumbuhan sebesar ini menunjukkan prestasi yang sangat gemilang. Berbagai sektor ikut menyumbang kemajuan di bidang ekonomi tersebut, terutama sektor industri dan jasa sehingga Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara industri baru. Sejalan dengan ini, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang sangat berarti dalam sepuluh tahun terakhir, diperkirakan berlipat ganda dari sekitar 500 menjadi 1100 dolar Amerika Serikat (World Bank, 1998). Hasil pembangunan juga tercermin dalam indikator lain, seperti membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik (2000a), angka kematian bayi pada tahun 1990 sebesar 63 menurun menjadi 56 pada tahun 1996, pada periode yang sama angka harapan hidup meningkat dari 62,6 menjadi 63,2 per seribu kelahiran. Masih menurut sumber yang sama, beberapa indikator pendidikan juga mengalami kenaikan, misalnya, pada tahun 1997 sekitar 95 persen penduduk laki-laki dan perempuan usia 7-12 tahun telah bersekolah pada sekolah dasar, mengalami kenaikan sekitar 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Pembangunan selama tiga dasa warsa lebih ternyata tidak cukup kokoh untuk melewati perubahan yang drastis seperti krisis moneter. Hal ini terbukti dengan merosotnya perekonomian secara tajam dalam beberapa bulan krisis dan

berlanjut hingga akhir tahun 2001 ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lapangan kerja yang menyempit mengakibatkan pengangguran terbuka bertambah dari 4,7 persen pada tahun 1997 menjadi 6,4 persen pada tahun 1999. Biaya hidup yang meningkat terus menyebabkan daya beli masyarakat turun sehingga mereka lebih mengonsentrasikan pengeluaran pada konsumsi. Indikatornya, dalam kurun waktu 1997-1999, persentase pengeluaran untuk makanan naik dari 59,5 persen menjadi 62,7 persen (BPS, 2000a). Sistem distribusi berbagai kebutuhan ongkosnya mengalami kenaikan sehingga berbagai kebutuhan naik harganya dan sulit terjangkau oleh kelompok kurang mampu (*Kompas*, 18 Juni 2001). Hampir semua lapisan masyarakat mengalami kesulitan seperti itu (Effendi, 1998).

Berbagai upaya mengatasi krisis telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Secara ekonomi upaya ini ada hasilnya. Salah satu indikasinya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2000 sebesar 4,8 persen (Dick, 2001). Pada sisi lain masih banyak masalah yang belum dapat diselesaikan akibat krisis yang berkembang ke berbagai dimensi. Indikatornya antara lain adalah tingkat putus sekolah yang meningkat (Cameron, 2001) dan bertambahnya tingkat pengangguran (Dhanani & Islam, 2001; Manning, 2001). Dari segi sosial dan politik, tampak bahwa tingkat keamanan cenderung turun dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga memburuk (Dick, 2001).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemimpin nasional yang sekarang ternyata belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi. Kekhawatiran akan memburuknya keadaan terus berlanjut (Hasil Jejak Pendapat *Kompas*, 30 April 2001). Indikator kualitas hidup penduduk seperti yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia terbukti menurun pada periode 1996-1999 (BPS, 2000a). Sementara itu, masalah sosial dan politik tidak mereda bahkan sering meningkat. Kegerahan sosial dalam bentuk protes terjadi di mana-mana. Kriminalitas yang dilakukan secara individual dan penjarahan atau perusakan secara beramai-ramai

masih terus dilakukan. Konflik horizontal secara terbuka dalam skala relatif kecil seperti tawuran antarkelompok remaja, dan skala yang lebih besar, misalnya perkelahian massal antarkampung, kekerasan antarsuku di Maluku dan Kalimantan Barat secara substansial masih terus muncul (*Kompas*, 28 Pebruari, 2001; *Kompas*, 30 Maret 2001; Pangkahila, 2001; Soemardjan, 2001). Pada tingkat lembaga tinggi dan elit politik, terjadi pertikaian terus. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap pemimpin, lembaga negara, pemerintahan, dan lembaga sosial rendah (*Kompas*, 27 Maret 2001; Subagyo, 2001). Masih banyak lagi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang belum terselesaikan (Darwin 1998; Faturochman, 2000; Pratikno, 1998). Tidak mengherankan bila muncul pesimisme yang menyebutkan bahwa bangsa ini sedang menuju pada kehancuran.

Melihat keadaan yang demikian itu, orang lantas mencari penyebabnya. Harus diakui bahwa penyebabnya sangat banyak dan sangat kompleks (Sumartana, 1998). Dari sekian banyak penyebab, salah satunya adalah kurang diperhatikannya masalah keadilan sebagai salah satu dasar pembangunan. Buktinya, kemajuan yang dicapai pada masa Orde Baru tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sektor industri mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara sektor pertanian tumbuh sangat lambat (Dick, 2001). Kemajuan ekonomi di kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan di desa (Wiradi, 2000). Dari sisi wilayah, Jawa mengalami kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Segmentasi kemajuan ini juga terjadi antara kelompok pengusaha besar, menengah, kecil, dan pekerja, bahkan antara laki-laki dan perempuan (Dick, 2001; Cameron, 2001). Karenanya, tidaklah mengherankan bila dalam satu perusahaan ada seseorang yang berpendapatan puluhan bahkan ratusan juta rupiah sebulan, sementara ada sekelompok pekerja yang hanya diberi upah sekitar lima ribu rupiah per hari (Tim *Prisma*, 1992). Negara yang kaya raya dengan sumber alam ini ternyata telah dikuasi sekelompok kecil orang. Mereka

menikmati begitu banyak aset negara dengan memonopoli begitu banyak kegiatan ekonomi (lihat Dick, 2001; Effendi, 1986; Sjahrir, 1986). Kesenjangan dan ketidakadilan itu ternyata berakar pada praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pelaku pembangunan (lihat Mubyarto, 1999). Kondisi yang demikian ini jelas merapuhkan struktur pembangunan yang telah menyedot begitu banyak sumber daya. Pada sisi lain, saat itu faktor stabilitas politik dan keamanan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada waktu itu secara sosial psikologis tidak tercipta rasa aman (Dick, 2001). Ketika sampai pada puncaknya, rasa tidak aman dan berbagai masalah ekonomi, politik, sosial, dan psikologis mendorong keberanian untuk melakukan perubahan yang drastis yang kemudian disebut reformasi.

Proses tersebut bertujuan untuk menekan dan memaksa penguasa meletakkan kekuasaan untuk diganti oleh pemimpin lain. Kelompok yang melakukannya dengan intensif pada waktu terjadinya gerakan reformasi tahun 1977 adalah mahasiswa. Mereka memrotes penguasa dengan cara melakukan demonstrasi dalam bentuk massa. Fenomena seperti ini secara psikologis merupakan cerminan dari deprivasi yang dirasakan masyarakat. Dalam penelitian psikologi sosial yang dilakukan di Filipina (Gonzalez-Intal, 1990) dan Kanada (Guimond & Dube-Simard, 1983), misalnya, ditemukan bahwa salah satu sumber utama protes massa dalam skala yang besar itu adalah rasa ketidakadilan yang muncul pada massa tersebut. Harus diakui bahwa dalam sejarah banyak tercatat adanya protes dan pemberontakan yang dilandasi upaya menegakkan dan memperjuangkan keadilan (Rahardjo, 1994). Dengan kata lain, ketidakadilan mendorong munculnya protes dan pemberontakan. Protes yang terus membesar hingga terjadinya pergantian rezim, seperti lengsernya Soeharto dari kursi presiden, antara lain dilandasi oleh upaya untuk menegakkan keadilan.

Banyak orang mulai sadar bahwa permasalahan keadilan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu begitu banyak. Ketika Orde Baru masih

berkuasa, secara sistematis ketidakadilan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomis, para pengusaha besar yang jumlahnya sangat sedikit menguasai modal atau aset yang sangat besar sementara ada jutaan rakyat miskin yang tidak memiliki modal secara berarti (Effendi, 1986; Sjahrir, 1986). Para pengusaha menjadi begitu kaya karena pemerintah pada waktu itu memberi fasilitas begitu banyak mulai dari kesempatan untuk monopoli, pengucuran modal yang begitu besar dengan bunga yang ringan hingga jaminan akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Sebaliknya, penduduk miskin seperti pedagang sektor informal dan petani berlahan sempit kurang mendapat kemudahan atau bahkan tidak ada kemudahan sama sekali (Mubyarto, 1999; Wiradi, 2000). Begitu banyak cerita yang mencerminkan ketidakadilan. Di sini tercermin juga bahwa kekuasaan pemerintah yang begitu besar menyebabkan rakyat menderita. Pemegang kekuasaan menjadi sumber ketidakadilan (Van den Bos, 2001; Van den Bos dkk., 1998a).

Kini, meskipun upaya perubahan telah dilakukan, berbagai bentuk ketidakadilan masih terus terjadi. Lapisan atas dalam strata sosial, ekonomi, atau politik tetap mementingkan diri mereka sendiri dan hukum rimba berlaku (Dick, 2001). Lapisan bawah dibiarkan berjalan sendiri. Jarak antara kedua lapisan yang hidup dalam satu negara kesatuan dibiarkan begitu saja (Mubyarto, 1999). Upaya untuk menggandeng satu dengan lainnya tidak jelas antara ada dan tidak ada. Idealnya, dalam suatu negara atau masyarakat, tidak terjadi hal seperti itu, tetapi ini kondisi yang sangat sulit dicapai.

Ada faktor lain penyebab itu semua. Bagi sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan sering tidak tahu harus memulai dari mana dan bagaimana caranya. Mereka bergerak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, atau kepentingannya. Hal ini menyebabkan terjadinya euforia yang bila tanpa dilandasi pemikiran cermat dan kritis akan menyebabkan terjadinya anarki. Fenomena ini sudah terjadi dan tampaknya akan terus berlangsung di masa

mendatang. Tujuan mewujudkan keadilan, demokrasi, pemerintahan yang bersih, kehidupan sosial yang harmonis, pertumbuhan ekonomi, atau lainnya justru menjadi tidak jelas.

Tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan bersama-sama meskipun antara satu dengan lainnya saling terkait. Penelitian ini difokuskan pada keadilan sebagai salah satu permasalahan mendasar karena prinsip-prinsip keadilan seharusnya diterapkan untuk mencapai kondisi masyarakat dan negara yang ideal. Paparan sebelumnya menunjukkan sebagian dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip keadilan secara tepat. Dalam psikologi, ada dua hal yang sering dibicarakan dalam membahas prinsip keadilan, yaitu prosedur dan distribusi. Prosedur adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, di antaranya adalah ketetapan untuk distribusi. Di sini yang dimaksud prinsip distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan. Berkaitan dengan upaya pemerataan, pada umumnya yang disorot adalah distribusi yang adil. Diasumsikan bahwa terjadinya kesenjangan bersumber pada distribusi sumber daya yang kurang adil. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan perlu diterapkan prinsip-prinsip keadilan distributif. Permasalahannya, banyak prinsip keadilan distributif yang satu dengan lainnya tidak selalu selaras. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dimaksud harus didasarkan pada berbagai pertimbangan. Secara singkat pertimbangan yang dimaksudkan setidaknya meliputi kondisi sosial yang ada pada saat itu (Hagerty, 2000; Schmidt 1991), nilai-nilai yang dianut (Deutsch, 1975; Feather, 1994; Peterson, 1994), dan tujuan yang hendak dicapai (Corning, 2000; Tornblom, 1977). Kondisi sosial yang ada perlu dicermati dengan seksama agar pemilihan prinsip keadilan distributif yang akan diterapkan dapat benar-benar menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada. Demikian pula, tujuan yang hendak dicapai perlu diformulasikan secara tepat sehingga lebih mengena pada sasaran.

Walaupun prinsip distribusi yang diterapkan dinilai oleh pembuat rumusan memadai dan adil untuk diterapkan, setiap individu yang peduli dengannya bisa menanggapinya secara berbeda. Karenanya, kondisi objektif ini dapat berbenturan dengan kepentingan individu. Pemberian upah pekerja yang didasarkan pada prinsip kebutuhan, misalnya melalui penentuan upah minimum provinsi (UMP), dianggap tidak sesuai karena produktivitas pekerja tidak dipertimbangkan, padahal para pekerja itu selalu dituntut untuk produktif (Faturachman, 1995; 1996). Sementara itu, prinsip proporsional dalam telaah gender untuk memecahkan masalah-masalah perempuan dinilai belum saatnya diterapkan karena kriteria untuk membagi mengakibatkan keuntungan yang lebih besar bagi laki-laki (Martin & Jurik, 1996). Ketika posisi, kesempatan, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan telah sejajar dan bias-bias kriteria tidak ada, maka prinsip proporsional dapat diterapkan.

Kemajuan dalam berbagai bidang juga mempunyai konsekuensi pada masalah keadilan. Tuntutan masyarakat tidak sebatas pada distribusi yang adil, tetapi juga pada proses penentuan distribusi tersebut (Lind & Tyler, 1988). Dalam terminologi keadilan, hal ini dikenal sebagai keadilan prosedural. Masalah ini tampaknya semakin dirasakan penting karena letaknya yang strategis, dalam arti dapat mendahului distribusi itu sendiri. Tampaknya keadilan prosedural ini memiliki pengaruh sosial yang lebih besar dibandingkan dengan keadilan distributif, terutama ketika suatu komunitas atau masyarakat telah berada pada tingkat pengetahuan dan kesejahteraan yang relatif tinggi.

Proses penentuan distribusi secara konseptual tidak berbeda jauh dengan proses pengambilan keputusan. Pada tingkat individu, proses ini banyak berkaitan dengan proses kognitif, termasuk pemrosesan informasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa prosedur atau proses pada tingkat individu disebut adil bila individu tersebut bijak (Mas'udi, 1991; Staudinger, 1996; Staudinger & Baltes, 1996). Sementara pada tingkat kelompok maupun komunitas, proses tersebut

dinamikanya lebih kompleks. Di sini setiap individu dapat mengedepankan kepentingannya sehingga mereka yang merasa kepentingannya tidak terakomodasikan mungkin menilai bahwa prosedur tersebut tidak adil (Faturachman, 1997). Untuk dikatakan adil dalam suatu proses atau prosedur, setidaknya setiap anggota kelompok atau komunitas diberi kesempatan untuk mengemukakan dan dihargai pendapatnya (Lind & Tyler, 1988). Pada setiap individu ada sisi lain selain pemuasan diri yang akan menjadi pertimbangan penilaian. Tidak semua orang mengedepankan kepentingan pribadi dalam upaya meraih tujuan. Keselarasan dalam hidup bersama merupakan salah satu aspek penting dari keadilan. Dengan demikian, keadilan memiliki dua sisi, yaitu personal dan sosial.

Keadilan juga memiliki dimensi objektif dan subjektif (Johnson dkk., 1995). Dilihat secara objektif, bila suatu distribusi telah dipilih dan diterapkan secara standar dapat dikatakan adil. Secara subjektif, keadaan seperti ini belum tentu dikatakan adil. Banyak faktor sosial psikologis yang berpengaruh sehingga suatu penilaian dikatakan adil secara subjektif. Penelitian ini menekankan pada faktor sosial psikologis yang subjektif yang berkaitan dengan keadilan tanpa mengabaikan faktor-faktor objektif lainnya. Namun, sebelum diuraikan lebih lanjut tentang posisi psikologi dalam analisis keadilan, berikut ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan penelitian tentang keadilan. Hal ini dilakukan karena pada setiap penelitian, termasuk penelitian ini, idealnya mengandung setidaknya dua tujuan sekaligus, yaitu praktis dan teoretis. Untuk itu, permasalahan praktis dan empiris di lapangan sebagai latar belakang penelitian sama pentingnya dengan permasalahan teoretis seperti yang akan dipaparkan di bawah ini.

Pada awalnya, kajian tentang keadilan banyak dikaji dalam filsafat (Gorr, 1995; Rosenberg, 1995; Temkin, 1995). Bila keadilan merebak pada masalah sosial sehingga sering disebut keadilan sosial, yang sering dirujuk justru keadilan

ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ahli-ahli yang pendapatnya sering dikutip ketika membahas keadilan sosial adalah John Rawls (1971; Ujan 2001) dan Adam Smith (dalam Keraf, 1996) yang banyak mengkaji permasalahan ekonomi. Tampaknya perkembangan kajian keadilan tidak mudah dilepaskan dari masalah ekonomi karena salah satu bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, paling mudah dikaji dengan menggunakan tolok ukur ekonomi. Tidak berarti bahwa kajian keadilan dengan fokus masalah nonekonomi tidak muncul. Hampir semua bidang telah memasukkan kajian keadilan seperti organisasi (Greenberg, 1996; Master & Smith, 1987; Vermunt & Steensma, 1991), kesehatan (Daniels, 1985; Waddell & Petersen, 1994), politik (Gonzales-Intal, 1990; Minton dkk., 1994), gender (Desmarais & Curtis, 1997; Devasia & Devasia, 1990; Martin & Jurik, 1996; Witt & Nye, 1992), dan lingkungan (Clayton & Opotow, 1994).

Dari sejumlah kajian yang ada, aspek psikologi hampir tidak pernah absen dibicarakan dalam kajian-kajian keadilan yang akhir-akhir ini muncul. Hal ini tidak lepas dari karakteristik keadilan yang selalu menggunakan standar relatif, melibatkan orang lain, dan sangat tergantung pada penilaian orang. Dari sisi ini, justru dapat dikatakan bahwa kajian psikologis tentang keadilan dapat merambah ke berbagai bidang. Adapun fokus kajian untuk penilaian keadilan pada umumnya berkisar pada insentif yang meliputi upah dan hadiah (Feather, 1990) dan disinsentif yang meliputi denda dan hukuman (Ball dkk., 1994; Feather, 1996; Ohoitumur, 1997), baik berupa uang, barang, jasa, akses, kedudukan, maupun yang lain.

Dalam psikologi sosial pembahasan dan penelitian tentang keadilan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh reaksi individu berkaitan dengan prinsip yang diterapkan (Greenberg, 1996). Hal ini dibuktikan dengan munculnya teori *distributive justice* dari Homann dan *equity theory* dari Adams serta Walster dan kawan-kawan pada tahun enam puluhan dan awal tujuh puluhan (lihat kajian Colquitt, 2001; Thornblom, 1977). Dalam sosiologi, teori deprivasi relatif bahkan

muncul lebih awal, pada akhir tahun empat puluhan, yang pertama kali dicetuskan oleh Stouffer dan kawan-kawan (lihat kajian Crosby, 1982). Kajian-kajian tersebut berkaitan erat dengan reaksi terhadap sistem distribusi yang diterapkan. Belakangan, muncul kajian dan penelitian yang berkaitan dengan reaksi terhadap prosedur untuk menentukan prinsip keadilan yang diterapkan. Kajian dan penelitian itu terintegrasi dalam upaya menemukan model penilaian keadilan (lihat Lind & Tyler, 1988; Tyler, 1989, 1994).

Secara psikologis reaksi terhadap keadilan akan membawa dampak positif, sedangkan ketidakadilan menimbulkan reaksi psikologis negatif. Ketidakadilan sering didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak. Akibatnya akan timbul rasa seperti tidak senang dan marah. Perkembangan teori deprivasi relatif jelas mengarah pada tindakan destruktif pada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Namun, ketidakadilan tidak hanya sebatas itu. Apabila ada pihak yang tidak mendapatkan haknya, biasanya ada pihak yang diuntungkan. Mereka ini ternyata juga mengalami masalah psikologis. Reaksi yang muncul di antaranya adalah rasa bersalah. Reaksi psikologis akibat ketidakadilan tersebut tidak selamanya muncul dalam bentuk perilaku negatif atau destruktif. Banyak konsep dan model dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang muncul dari penerapan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak penerapan prinsip keadilan, terutama keadilan distributif, merupakan satu bagian penting dalam perkembangan penelitian tentang keadilan (lihat Berkowitz dkk, 1987; Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Feather, 1990; Gonzales-Intal, 1990; Greenberg, 1990; Guimond & Dube-Simard, 1983; Mark & Folger, 1984).

Berkembang juga penelitian-penelitian tentang penerapan prinsip distribusi yang dinilai adil. Secara garis besar penelitian tentang penerapan prinsip distribusi yang adil menekankan pada dua hal, yaitu gender dan orientasi kehidupan sosial seseorang. Menurut para peneliti, prinsip distribusi yang sesuai

dengan laki-laki tidak selalu sesuai dengan perempuan (lihat Desmarais & Curtis, 1997; Faturachman, 1995; Jackson dkk., 1992; Martin & Jurik, 1996, Witt & Nye, 1992). Sementara itu, orientasi individualistik dan kolektivitas diyakini jelas-jelas berpengaruh terhadap penerapan prinsip distribusi yang dipilih (lihat Chen, 1995; Deutsch, 1975; Feather, 1992, 1994; Leung & Kabanoff, 1995; Murphy-Berman, dkk., 1984; Rohrbaugh dkk., 1980; Tornblom, 1977; Yamagishi, 1984). Selaras dengan penelitian-penelitian itu, banyak juga penelitian yang menganalisis latar belakang dan motivasi seseorang dalam menerapkan prinsip distribusi yang mereka pilih (lihat Master & Smith, 1987; Reis, 1987; Vermunt & Steensma, 1991).

Di tengah-tengah perkembangan penelitian tentang penilaian keadilan distributif, muncul analisis tentang penilaian keadilan prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat terpisahkan dari penilaian keadilan distributif (Greenberg, 1996; Thibaut & Walker, 1975). Pola perkembangan penelitian penilaian keadilan prosedural tidak banyak berbeda dengan pola perkembangan penelitian penilaian keadilan distributif. Perkembangan kajian dan penelitian penilaian keadilan prosedural meliputi latar belakang dan motivasi penilaian keadilan prosedural (Tyler, 1994), kajian atas bentuk dan dinamika prosedur itu sendiri (Bond & Leung, 1992; Lind & Tyler, 1988; Thomson dkk., 1996; Tyler, 1989), dan dampak prosedur dan penilaian keadilan prosedural (Gilliland, 1994; Greenberg, 1987).

Pada awalnya, penelitian-penelitian tentang penilaian keadilan distributif terpisah dengan penelitian-penelitian tentang penilaian keadilan prosedural. Dalam salah satu tulisannya, Greenberg (1996) merekomendasi kepada peneliti lain untuk segera mengintegrasikan keduanya. Ada satu asumsi kuat bahwa alokasi atau distribusi pada umumnya ditentukan melalui prosedur tertentu. Berkaitan dengan itu, sering disimpulkan bahwa keadilan prosedural akan menentukan keadilan distributif (Brockner dkk., 1994). Dapat pula dikatakan

bahwa secara psikologis keadilan prosedural dinilai lebih penting dibandingkan dengan keadilan distributif. Ternyata, beberapa hasil penelitian (lihat Folger dkk., 1983; Greenberg, 1996) menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Disimpulkan bahwa orang pada umumnya tidak peduli pada prosedur selama mereka mendapatkan bagian yang memuaskan. Artinya, keadilan prosedural tidak dipermasalahkan selama ada penilaian bahwa distribusinya sudah dinilai adil. Beberapa penelitian (Greenberg, 1996; Van den Bos dkk., 1997a, 1997b) justru mengindikasikan bahwa penilaian tentang keadilan prosedural dapat dipengaruhi oleh penilaian tentang keadilan distributif.

Tampaknya ketidakjelasan hubungan kausalitas antara kedua penilaian keadilan tersebut disebabkan keduanya dilihat secara eksklusif. Dengan kata lain, penelitian tersebut tidak mengintegrasikan anteseden dan efek dari kedua penilaian keadilan secara bersama dan komprehensif. Kemungkinan besar keterkaitan keduanya dipengaruhi baik oleh anteseden maupun efeknya, di samping secara natural prosedur akan mempengaruhi distribusi.

Untuk mengetahui pola hubungan antara keduanya, rasanya tidak cukup hanya dengan menganalisis hubungan keduanya itu saja. Setiap penilaian keadilan memiliki anteseden. Penilaian keadilan juga membawa dampak psikologis yang kemungkinan berbeda untuk setiap jenis keadilan. Oleh karena itu, relevan kiranya untuk melibatkan anteseden tersebut dalam mengkaji keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Ada kemungkinan bahwa keterkaitan keduanya ikut dipengaruhi oleh masing-masing antesedennya.

Implikasi dari penelitian, termasuk penelitian ini, biasanya mengarah pada dua hal, yaitu untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Karena penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan konteks organisasi perusahaan, masyarakat yang mengambil keuntungan dari penelitian seperti itu lebih terbatas. Akhir-akhir ini ada upaya

memperluas sudut pandang dan cakupan psikologi dalam penelitian keadilan (lihat misalnya Corning, 2000; Garonzik dkk., 2000; Hagerty, 2000; Van den Bos & Miedema, 2000). Ada beberapa alasan atas pernyataan ini, dua di antaranya dijelaskan berikut ini.

Pertama, fokus kajian keadilan pada prosedur dan distribusi menjawab sebagian permasalahan sosial, yaitu pada relasi sosial yang cenderung bersifat formal dan pola hubungan vertikal. Persoalan keadilan tidak terbatas pada relasi sosial formal dan vertikal. Ada pola relasi sosial yang sifatnya horizontal, bahkan di dalam relasi sosial formal sekalipun ada pola relasi sosial horizontal. Dalam kajian keadilan dikenal keadilan komutatif (Surbakti, 1993) dan keadilan interaksional (Dirks, 1999; Donovan dkk., 1998) yang cenderung terjadi pada pola relasi horizontal dibanding vertikal.

Kedua, konteks sosial sering kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan dalam kajian psikologi tentang keadilan. Beberapa peneliti (Hamel dkk., 1993; Lind & Early, 1992) mengingatkan pentingnya konteks dalam penelitian psikologi tentang keadilan. Perkembangan situasi yang sangat dinamis akhir-akhir ini merupakan konteks tersendiri dari penelitian ini. Tidak kalah pentingnya adalah konteks lokal (Schmidt, 1991) di tempat penelitian, termasuk penelitian untuk disertasi ini, dilakukan.

Memadukan dua hal di atas, penelitian ini mempermasalahkan juga keadilan dalam relasi sosial horizontal selain dalam relasi sosial vertikal. Permasalahan keadilan apakah yang ada dalam relasi sosial vertikal dan horizontal tersebut? Bahwa penelitian ini selanjutnya lebih memfokuskan pada relasi sosial vertikal dengan menekankan pada keadilan prosedural dan distributif, hal itu didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, seperti dikatakan terdahulu permasalahan yang selama ini muncul banyak bersumber pada pemegang kekuasaan (Magnis-Suseno, 2001). Rakyat lebih banyak berperan sebagai subjek yang justru sering menjadi korban dari ketidakberesan pada pemegang kekuasaan.

Artinya, dalam hubungan vertikal seperti itu sering terjadi ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan pada mereka yang berada di posisi bawah. Kedua, dalam konteks yang lebih luas, persoalan relasi sosial vertikal lebih menonjol saat ini. Perubahan besar yang sedang terjadi di negara ini sebagian besar menyangkut masalah ini. Dengan berbagai istilah seperti demokratisasi dan partisipasi masyarakat yang merupakan indikasi dari upaya perubahan pola relasi sosial yang *terlalu vertikal* menjadi *cenderung horizontal*, berarti format hubungan vertikal yang selama ini ada dirasakan tidak efektif. Ketiga, dengan mengkaji keadilan dalam pola relasi vertikal ini, hal ini berarti akan menyumbangkan pemikiran bagi pembentukan format yang dapat diterima berbagai pihak sekaligus untuk memecahkan persoalan yang ada.

Seperti dikatakan sebelumnya, masalah ketidakadilan lebih banyak menimpa kelompok yang tergolong lemah, baik secara ekonomis, sosial, maupun politis. Dilihat dari sektor pekerjaan, pertanian adalah sektor yang tergolong lemah secara ekonomis, sosial, dan politis (Fauzi, 1997; Fauzi, 1999; Wiradi, 2000). Orang-orang yang bekerja di dalamnya, yaitu petani, secara ekonomi juga tergolong lemah (lihat *Kompas*, 14 Agustus 2000; 11 September 2000; 12 September 2000). Dilihat dari segi penghasilan, mereka adalah kelompok yang tergolong paling rendah. Sebagai produsen pangan, mereka justru yang sering mengalami kelaparan sementara kelompok yang bekerja di sektor lain, biasanya di perkotaan, tidak pernah tertimpa bencana kelaparan (Wiradi, 2000). Hasil kajian *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) seperti dikutip *Kompas* (19 Januari 2001) menyebutkan bahwa antara September 1999 hingga Agustus 2000 Indeks Nilai Tukar Petani Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan fakta itu dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan petani selama periode tersebut. Masih banyak lagi masalah yang dapat dipaparkan yang mencerminkan penderitaan petani (lihat Fauzi, 1999; Wiradi, 2000).

Secara garis besar, ada dua pandangan terhadap masalah tersebut di atas (Fauzi, 1999; Wiradi, 2000). Menurut pandangan pertama, sektor pertanian adalah sektor yang memang sulit berkembang. Pandangan ini didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu lahan pertanian yang sempit, sumberdaya petani yang rendah, dan teknologi pertanian yang diterapkan kurang memadai. Karenanya, berbagai upaya untuk meningkatkan sektor ini akan sulit mendapatkan hasil yang tinggi. Pandangan ini disanggah oleh pandangan kedua yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam sektor pertanian itu sendiri. Permasalahan muncul karena pemerintah tidak cukup serius dan mau berpihak kepada petani. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pertanian padi di Indonesia yang hampir seluruhnya dikerjakan petani kecil merupakan usaha tani yang efisien. Hasil Penelitian Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (dalam *Kompas*, 14 Agustus 2000) menunjukkan bahwa pertanian padi di Indonesia adalah yang paling efisien di Asia Tenggara dan Selatan. Produktivitas padi sawah Indonesia adalah 4.442 kilogram per hektar, sementara Asia Tenggara dan Selatan secara berturut-turut adalah 3.120 dan 3.053 kilogram per hektar. Di samping itu, dari segi biaya produksi padi, biaya di Indonesia relatif sama dengan biaya di Filipina dan Thailand, yaitu 8 sen dollar AS per kilogram. Dipandang dari sudut luasnya lahan garapan, hasil kalkulasi juga menunjukkan bahwa petani kecil justru menunjukkan kecenderungan lebih efisien dibanding petani dengan lahan luas. Hal lain lagi yang tidak kalah pentingnya adalah penyerapan tenaga kerja. Meskipun pembangunan sektor industri dan jasa begitu gencar, sampai saat ini sektor pertanian ternyata menyerap tenaga kerja paling banyak dibanding sektor lain (BPS, 2000b).

Lemahnya posisi petani dapat dilihat di berbagai tempat dengan berbagai permasalahannya. Salah satunya adalah di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di sana petani melakukan hubungan dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara X unit Tembakau Klaten (Faturachman, 1998b; Padmo, 1998;

Margono, 1998). Para petani, tepatnya pemilik sawah, dikatakan lemah posisinya karena mereka tidak dapat mengontrol miliknya sendiri. Secara periodik, mereka diharuskan menyerahkan lahannya untuk digunakan dalam penanaman tembakau yang dikelola PTPN X. Perusahaan milik negara ini menggunakan struktur birokrasi yang ada, mulai dari Bupati hingga perangkat desa, untuk menguasai lahan milik penduduk. Keberhasilan penguasaan lahan ini di masa Orde Baru didukung oleh lembaga lain, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kelompok tani. Begitu sistematisnya upaya penguasaan tersebut menyebabkan pemilik sawah tidak dapat berbuat banyak meskipun menyangkut nasibnya sendiri.

Penguasaan tanah adalah awal dari rangkaian terampasnya hak pemilik sawah. Di antara masalah-masalah dalam hubungan tersebut, adalah imbalan atas pemindahan kekuasaan tanah tersebut. Pada umumnya, imbalan tersebut lebih kecil dari semestinya. Hal ini terjadi karena PTPN X bekerjasama dengan struktur birokrasi serta pendukung lainnya yang sepenuhnya memegang kekuasaan untuk menentukan imbalan tersebut. Secara formal, pemilik sawah diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau bernegosiasi dengan PTPN X, tetapi hal itu sebatas formalitas untuk dijadikan justifikasi terhadap penguasaan yang dilakukan dan bukan merupakan proses yang wajar dan demokratis.

Sejak tahun 1998, ada perubahan hubungan antara kedua pihak tersebut. Penguasaan lahan yang dilakukan melalui cara koersif tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Sikap kritis dan keberanian masyarakat setempat mulai muncul. Negosiasi antara petani dengan PTPN X tampak mulai dinamis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bila sebelumnya tidak ada proses yang wajar sehingga tidak ada keadilan prosedural yang tentunya akan menyebabkan ketidakadilan distributif, maka sejak waktu itu prosedur dan distribusinya mulai terbuka untuk dinilai.

Dengan latar belakang dan konteks lokal penelitian ini, yang mengambil komunitas pemilik sawah dalam berhubungan dengan PTPN X, bila dikaitkan dengan perkembangan penelitian keadilan dari sudut psikologi, maka ada beberapa hal yang menarik untuk ditindaklanjuti. Pertama, kepedulian pemilik sawah dengan permasalahan yang mereka hadapi menjadi pijakan untuk melihat permasalahan lebih lanjut. Sejauh ini, petani menjadi kelompok yang gigih bertahan hidup (Faturochman, 1998b; Fauzi, 1999; Kutanegara, 1998; Wiradi, 2000), tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan, misalnya, mogok sehingga banyak pihak akan terkena dampak negatifnya (*Kompas*, 19 Januari 2001). Adanya kepedulian akan membawa kemudahan untuk tindak lanjut yang lain. Kedua, kondisi objektif dan penilaian subjektif adalah dua hal yang berbeda dan dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Idealnya, kedua hal tersebut selaras dan tidak berbeda secara mencolok. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji persamaan atau perbedaan antara kondisi objektif dengan penilaian yang subjektif, tetapi secara kualitatif keduanya akan diperbandingkan. Ketiga, hubungan pemilik sawah dengan PTPN X telah berlangsung lama (Padmo, 1994). Sejarah yang panjang itu akan berpengaruh terhadap kondisi saat ini, khususnya pada pemilik sawah. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan pendekatan sejarah, tidak berarti mengabaikan masalah historis ini. Catatan sejarah yang didapatkan akan digunakan untuk kontekstualisasi penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi. Berbagai variabel psikologis yang dikaji seperti penilaian keadilan, harapan, dan kepuasan sebagai reaksi atas keadilan yang dirasakan dinilai tidak dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa memperhatikan catatan tersebut. Khusus untuk penilaian keadilan yang dalam berbagai literatur disebutkan memiliki banyak variasi prinsip, dan dalam penelitian ini menjadi fokus kajian, perlu diperhatikan secara lebih serius. Sekali lagi, hal ini dilakukan untuk memperoleh interpretasi yang cermat sekaligus terkait dengan implikasi teori dan

praktisnya. Upaya ini pernah dilakukan beberapa kali (lihat Stroessner & Heuer, 1996; Van den Bos, 1996, 1999, 2001).

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang diformulasikan berikut ini. Pertama, relasi sosial dalam masyarakat dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Permasalahan keadilan apasajakah yang muncul dalam relasi sosial horizontal dan vertikal di wilayah penelitian ini? Bagaimana dinamika keadilan dan ketidakadilan yang muncul tersebut?

Kedua, berangkat dari kajian awal tentang hubungan petani dengan PTPN X yang telah dipaparkan dalam bagian terdahulu, dapat diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana hubungan antara petani dengan PTPN X? Bagaimana proses-proses dalam hubungan tersebut dan ketentuan distribusi yang ada dinilai? Bagaimana reaksi pemilik sawah atas hubungan tersebut? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penilaian tersebut? Bagaimana dinamika hubungan antara berbagai faktor yang ada? Beberapa pertanyaan ini akan menjadi bahan untuk melakukan eksplorasi dalam penelitian ini sekaligus jawaban atasnya akan menjadi bagian dari kontekstualisasi penelitian disertasi ini. Selanjutnya, dengan menggunakan konteks yang sama dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik seperti berikut ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian keadilan distributif? Faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian keadilan prosedural? Bagaimana keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif? Apa dampak penilaian keadilan prosedural dan distributif?

Ketiga, dari uraian terdahulu, telah disebutkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif bisa timbal balik dan besarnya pengaruh yang satu terhadap yang lain tidak konsisten. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa hubungan kausalitas penilaian keadilan prosedural dan distributif tidak konsisten? Apakah ada pola

hubungan yang lebih umum? Bila tidak, kapan satu pola hubungan berlaku sementara pola yang lain tidak?

Keempat, permasalahan ketidakkonsistenan hubungan sebab-akibat penilaian keadilan prosedural dan distributif sering memunculkan keraguan terhadap objektivitas dan konsistensi penilaian keadilan itu sendiri. Bila permasalahan ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, dapat berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana dinamika penilaian keadilan? Apakah bias selalu muncul dalam penilaian keadilan? Faktor apa yang berpengaruh terhadap munculnya bias dalam penilaian keadilan? Bagaimana mengendalikan bias yang muncul tersebut?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini ada dua. Pertama adalah untuk menemukan pola hubungan yang jelas antara anteseden, penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif, dan dampaknya. Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan dan keterkaitan berbagai konsep serta teori yang ada, tujuan tersebut dikembangkan untuk mendapatkan model yang komprehensif tentang penilaian keadilan.

Kedua adalah untuk menemukan dinamika penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif sebagai suatu proses kognitif. Sebagai salah satu proses kognitif, penilaian keadilan mempunyai dinamika yang spesifik. Berdasarkan asumsi ini, maka perlu kiranya penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dinamika psikologis penilaian keadilan.

Di samping dua tujuan utama tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan lain dan tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk:

1. mengidentifikasi bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan;

2. menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan prosedural;
3. menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan distributif;
4. menganalisis efek penilaian keadilan prosedural dan distributif;
5. menguji objektivitas dan dinamika penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif dan pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif serta pengaruh sebaliknya.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan utama dan tujuan-tujuan tambahan yang dikemukakan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan teori. Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan praktis.

Secara teoritis, model penilaian keadilan masih terus berkembang dan belum ada konsep yang cukup komprehensif untuk memahami keadilan, khususnya dari sudut pandang psikologi. Meskipun Tyler (1989, 1994) telah mengajukan beberapa alternatif dari model penilaian keadilan, sebagian besar darinya belum diuji secara empiris. Hal serupa terjadi pada pengembangan teori tentang dinamika kognitif dari proses penilaian keadilan. Penelitian-penelitian yang dilakukan Van den Bos dan kawan-kawan (lihat Van den Bos 1996; 1999; Van den Bos dkk., 1997; Van den Bos & Van Prooijen, 2000) berusaha mengembangkan Teori Heuristik Penilaian Keadilan dan Teori Referensi Kognitif secara intensif. Cukup banyak yang dapat dijelaskan dari penelitian-penelitian itu, tetapi konteksnya terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori penilaian keadilan, baik dari segi model penilaiannya maupun dari segi pemahaman tentang proses kognitifnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia yang kultur dan struktur masyarakatnya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kondisi yang demikian diyakini berpengaruh terhadap penilaian keadilan secara subjektif. Untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di sini, penelitian ini akan menggali data secara kontekstual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, survai, dan eksperimen. Dilihat dari segi metodologinya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu model penelitian yang komprehensif dalam memahami penilaian keadilan. Demikian juga, dalam hal metode analisis datanya, khususnya dalam analisis data survai yang direncanakan menggunakan teknik analisis yang sedang berkembang saat ini, yaitu menggunakan model persamaan struktural. Penggunaan metode ini tidak semata-mata didasarkan pada keperluan analisis, tetapi juga untuk menunjukkan kegunaan praktisnya sehingga orang lain yang memiliki rancangan yang serupa dapat belajar dari sini. Sejauh ini, teknik analisis ini dinilai cukup canggih, tetapi tidak cukup mudah dipahami. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lain untuk memahaminya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Pertama, penelitian ini dapat digunakan untuk memahami baik persoalan keadilan maupun ketidakadilan. Maksudnya, konsep tentang keadilan tidak cukup dipahami. Konsekuensinya, upaya untuk merumuskan keadilan mengalami kesulitan apalagi menerapkan rumusan itu. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam membuat rumusan tentang keadilan. Dengan adanya rumusan tersebut, maka berbagai kebijakan dapat dirumuskan secara adil. Lebih dari itu, model penilaian keadilan yang ditemukan dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan, baik makro maupun mikro menyangkut format keadilan sebagai salah satu dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti yang dituangkan dalam dasar negara Indonesia.

Kedua, dari model penilaian keadilan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor penyebab sesuatu dinilai adil atau tidak adil sekaligus akibat yang ditimbulkannya. Temuan tentang faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan rasa keadilan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bila sesuatu dinilai adil, maka akan muncul dampak positif dan sesuatu yang dinilai tidak adil akan menyebabkan dampak negatif. Dengan diketahuinya faktor pengaruh dan dampak penilaian keadilan, maka upaya optimalisasi rasa keadilan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan, program, ataupun perlakuan.

Ketiga, temuan dari penelitian ini yang menyangkut konsistensi keadilan secara objektif dengan keadilan dari sisi subjektif dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan dalam perumusan sistem yang adil. Bila diasumsikan bahwa objektivitas dan subjektivitas keadilan itu konsisten, maka penggunaan secara substitutif maupun komplementer dari keduanya sebagai landasan kebijakan tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti. Sebaliknya, bila tidak ada konsistensi dari keduanya, maka perlu ada formulasi yang berbeda dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut keadilan.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa penelitian ini diharapkan merupakan sumbangan psikologi dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil.

D. Keaslian Penelitian

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, penelitian tentang keadilan masih terus berkembang. Di antara para penggagas dan peneliti, baik tentang keadilan maupun penilaian keadilan, banyak yang justru melontarkan gagasan baru berkaitan dengan topik-topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Greenberg (1996) dan Van den Bos (1996) mendorong para peneliti untuk menemukan jawaban yang pasti tentang hubungan penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Tyler (1989, 1994) dan Colquitt (2001)

mengembangkan dimensi keadilan secara psikologis. Lebih lanjut, Tyler mengembangkan model keadilan dan jenis-jenis atau spesifikasi dari model tersebut. Sementara itu, proses kognitif penilaian keadilan juga terus diteliti. Di antara mereka yang meneliti proses kognitif penilaian keadilan ini, Folger (1987) dan Van den Bos (1999) adalah orang-orang yang sangat intensif mengembangkannya.

Penelitian ini secara prinsip didasari oleh topik-topik bahasan itu. Secara operasional, untuk mengembangkannya dalam penelitian ini, ketiganya disintesaikan dan disesuaikan dengan keadaan pada wilayah penelitian dengan melakukan studi kasus. Hasil studi kasus ini dikembangkan untuk survai, sedangkan hasil survai dikembangkan untuk penelitian skenario yang menggunakan konsep eksperimen. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat terjamin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Psikologi tentang Keadilan

Dalam psikologi sosial dan ilmu-ilmu sosial lainnya, ada dua hal penting yang sering dievaluasi atau dinilai berkaitan dengan pengalaman dan interaksi sosial, yaitu apa yang mereka dapatkan dan bagaimana proses sosial yang mereka alami. Tidak semua orang memikirkan dan mempermasalahkan keduanya. Sebagian menilai bahwa yang didapatkan adalah hal yang paling penting, sementara yang lain menilai bahwa proses dan prosedur yang dilalui lebih penting (Greenberg, 1996). Polarisasi penilaian ini melahirkan dua kajian yang berbeda, yaitu tentang distribusi dan prosedur. Pada perkembangannya, istilah prosedur dinilai terlalu sempit pengertiannya. Dalam proses sosial, selain ada prosedur, terdapat juga interaksi sosial. Hal yang terakhir ini melengkapi dua hal terdahulu sehingga kajian yang banyak berkembang menyangkut tiga hal, yaitu distribusi, prosedur, dan interaksi.

Salah satu unsur penting dalam kajian tiga hal tersebut adalah keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan bagian moralitas, tetapi pada sisi lain keadilan telah dirumuskan dalam aturan-aturan yang baku dan harus dilaksanakan dengan ketat. Secara umum keadilan digambarkan sebagai suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi (Lind & Tyler, 1988). Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya (Keraf, 1996). Pemahaman akan makna keadilan sering lebih menekankan pada distribusi yang adil dibandingkan dengan prosedur dan interaksi yang adil, yang selanjutnya akan disebut keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional¹.

¹ Dalam penelitian ini digunakan istilah keadilan interaksional mengikuti pendapat Tyler (1989, 1994). Ahli lain (Colquitt, 2001) menyebutnya keadilan interpersonal. Istilah relasional akan

Norma-norma tentang hak dan kelayakan sering dilihat dari sisi yang diberikan atau yang diterima dan kurang menekankan pada sisi proses atau prosedur dalam suatu lembaga atau komunitas. Hal inilah, antara lain, yang mendorong makin derasnya kajian tentang keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Beberapa ahli berpendapat (Miceli dkk., 1991; Minton dkk., 1994) bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada tiga hal tersebut. Keadilan juga dapat dilihat pada sistem yang lebih luas, yang sering disebut keadilan sistem.

Keadilan distributif, prosedural, dan interaksional adalah bagian terpenting dari keadilan sosial. Keadilan sistem hampir tidak pernah dijadikan bagian dari keadilan sosial yang dikaji dari sudut pandang psikologi. Meskipun demikian, untuk memahami keadilan secara luas, berikut ini dipaparkan secara ringkas tentang keadilan sistem yang dimaksud dan pada pembahasan selanjutnya tidak lagi dipermasalahkan.

Sistem dapat dikatakan sebagai pola-pola umum yang digunakan atau mendasari prosedur dan distribusi atau pertukaran serta mengatur relasi-relasi sosial. Sistem setara dengan kebijakan umum, yang kemudian direalisasikan sekaligus sebagai dasar dalam menentukan prosedur, pengaturan pembagian, dan pengaturan relasi-relasi sosial. Pembagian status kerja dalam perusahaan, misalnya, dapat dikatakan sebagai sistem karena di dalam setiap tingkatan pada perusahaan tersebut ada prosedur, relasi-relasi sosial, dan distribusi yang berbeda. Pembagian tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pertimbangan kebijakan lain. Keadilan sistem berkait erat dengan struktur yang ada. Oleh karena itu, kriteria keadilan ini cenderung stabil sejalan dengan struktur yang berlaku.

Keadilan sosial mempunyai dua sisi, yaitu objektif dan subjektif. Keadilan objektif berkaitan dengan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar normatif

digunakan untuk mendeskripsikan model penilaian keadilan, yaitu model yang mencerminkan dominansi peran penilaian keadilan interaksional.

yang berlaku sehingga bias dan prasangka bisa direduksi seminimal mungkin. Di sini ketentuan distribusi ataupun prosedur sesuai dengan norma yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada sisi lain, keadilan subjektif berkaitan dengan kapasitas distribusi ataupun prosedur untuk membangkitkan penilaian keadilan oleh pihak-pihak yang terkena norma tersebut. Pada sisi objektif keadilan diukur berdasarkan pada norma yang berlaku, sedangkan pada sisi subjektif prinsip keadilan dinilai menurut pendapat individu. Keduanya bersumber pada aspek yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tatanan moral. Disertasi ini lebih menekankan pada keadilan subjektif dibandingkan dengan keadilan objektif dengan tidak mengabaikan yang disebut terakhir itu. Dalam bidang hukum keadilan juga diupayakan seobjektif mungkin yang dalam praktiknya pencarian keadilan dilakukan karena ada ketidaksepakatan atau konflik antara dua pihak. Di sini peran pejabat (hakim) adalah memberi keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dengan kata lain, pejabat mendistribusikan keadilan, sehingga disebut keadilan distributif.

Pada bagian berikut ini akan diuraikan tiga keadilan yang berkembang dalam psikologi. Keadilan prosedural dan distributif akan diuraikan terlebih dulu karena perannya sebagai variabel dependen disusul dengan keadilan interaksional yang berperan sebagai variabel independen. Keadilan prosedural diuraikan mendahului keadilan distributif yang sering juga dikenal sebagai keadilan substantif dengan asumsi prosedur pada umumnya mendahului distribusi dalam alur masukan-proses-keluaran. Alur seperti ini juga berlaku pada proses kognitif untuk penilaian. Bahwa dalam kenyataan keadilan distribusi sering dibahas lebih dulu sangat mungkin terjadi. Di sini keadilan prosedural dibahas terlebih dulu dibanding keadilan distributif agar konsisten dengan alur dalam proses kognitif yang umum terjadi.

B. Keadilan Prosedural

Bentuk prosedur dan proses sosial akan spesifik sesuai dengan substansinya. Di dalam suatu kelompok, organisasi, ataupun lembaga kemasyarakatan bisa ditemukan berbagai prosedur. Meskipun demikian, ada komponen dan aturan yang universal pada prosedur, demikian juga halnya dengan keadilan prosedural. Dalam kaitan ini, Leventhal (dalam Colquitt, 2001; Colquitt dkk., 2001; Lind & Tyler, 1988) mengidentifikasi enam aturan pokok dalam keadilan prosedural. Bila setiap aturan ini dapat dipenuhi, suatu prosedur dapat dikatakan adil. Enam aturan yang dimaksud diuraikan di bawah ini.

1. **Konsistensi.** Prosedur yang adil harus konsisten baik dari orang satu kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.
2. **Minimalisasi bias.** Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya minimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan, harus dihindarkan.
3. **Informasi yang akurat.** Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus mendasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan lengkap.
4. **Dapat diperbaiki.** Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul.
5. **Representatif.** Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan sub-subkelompok yang ada, secara

prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka. Dalam perkembangan selanjutnya, aspek representatif ini menjadi bagian penting dari model penilaian keadilan prosedural (Lind & Tyler, 1988), yaitu model kepentingan pribadi dan model nilai-nilai kelompok.

6. Etis. Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal di atas terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan adil.

Di samping enam aturan pokok dalam prosedur yang adil tersebut, Leventhal (dalam Lind & Tyler, 1988) juga menyatakan perlunya komponen untuk menegakkan dan menjaga keadilan prosedural. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ada agen yang berfungsi mengumpulkan informasi dan membuat keputusan. Agen ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu prosedur sehingga klaim-klaim yang berkaitan dengannya jelas arahnya.
2. Ada aturan yang jelas dan kriteria yang baku. Hal ini dimaksudkan sebagai standar dalam melakukan evaluasi.
3. Ada tindakan nyata untuk mengumpulkan dan menayangkan informasi. Tanpa aktivitas ini maka penilaian keadilan akan sulit dilakukan.
4. Ada struktur dan hierarki keputusan. Dengan prosedur yang sama akan ditelorkan beberapa hasil dan keputusan. Kedudukan hasil dan keputusan ini harus diatur posisinya sehingga secara sistematis peran masing-masing menjadi jelas. Keputusan yang posisinya lebih tinggi tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang posisinya lebih rendah.

5. Keputusan yang dibuat selalu disampaikan secara terbuka kepada semua pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga netralitas dan minimalisasi bias.
6. Prosedur selalu dijaga agar tetap standar melalui pengawasan dan pemberian sanksi bila ada penyimpangan. Ada mekanisme untuk mengubah prosedur bila prosedur yang diterapkan ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ada dua model keadilan prosedural yang dibahas pada bagian ini. Model pertama dikenal dengan Model Kepentingan Pribadi (*Self Interest Model*) dari Thibaut dan Walker (1975) sedangkan model kedua adalah Model Nilai-Nilai Kelompok (*Group Value Model*) yang dikemukakan oleh Lind dan Tyler (1988). Pembahasan berikut ini dimulai dari model pertama yang kemudian disusul dengan model kedua.

1. Model Kepentingan Pribadi

Pembahasan tentang keadilan prosedural dalam psikologi sosial, antara lain, muncul karena konflik. Pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu orang sering buntu karena tidak ada kesepakatan. Tiap-tiap pihak tidak mau mengalah karena tidak ingin kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Lebih dari itu, orang sering berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya, tetapi juga berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam melakukan interaksi atau transaksi. Sifat egoistis seperti ini merupakan gejala yang banyak ditemukan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan. Untuk mendapatkan itu semua, orang yang terlibat di dalam proses sosial berusaha untuk mengontrolnya.

Keadilan prosedural berkaitan dengan kecilnya tingkat konflik dan ketidakharmonisan dalam kelompok, organisasi, atau institusi sosial. Hal ini adalah pandangan dari sisi keadilan prosedural objektif. Secara subjektif, prosedur

dikatakan adil bila dapat mengakomodasikan kepentingan individu. Permasalahannya ialah ketika setiap individu menginginkan kepentingannya diluluskan, dan kepentingan-kepentingan itu berbeda satu dengan lainnya, maka akan terjadi konflik atau kemacetan (*dispute*). Ketika ini terjadi, pihak-pihak yang berhadapan masih memiliki kesempatan untuk tawar-menawar dalam menyelesaikan masalah meskipun peluang untuk itu tidak besar. Ketika hal ini juga tidak dapat menyelesaikan masalah, salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah dengan melibatkan pihak ketiga.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mencapai prosedur yang adil (Thibaut & Walker, 1975). Pertama, pihak ketiga melakukan mediasi, yaitu memberikan saran bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Kedua, baik pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak ketiga semua harus patuh dengan penyelesaian yang dirumuskan bersama. Dalam proses ini ada tiga pihak yang terlibat. Ketiga, diambil langkah arbitrase, yaitu penyelesaian masalah oleh pihak ketiga dengan mempertimbangkan semua kepentingan setelah tiap-tiap pihak yang terlibat konflik menjelaskan posisinya. Keempat, keputusan otokratis yang merupakan langkah penyelesaian masalah oleh pihak ketiga tanpa mempedulikan informasi-informasi yang dikemukakan oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pada beberapa penelitian (lihat review Lind & Tyler, 1988) ditemukan bahwa langkah arbitrer dinilai oleh pihak-pihak yang terlibat (partisipan) sebagai prosedur yang paling adil. Secara psikologis langkah ini dapat diterima karena individu yang terlibat di dalamnya memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya (*voice*). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam prosedur arbitrer tiap-tiap pihak melakukan kontrol dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, makin besar kontrol yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan ini, makin tinggi pula penilaiannya bahwa prosedur tersebut adil.

Di samping kontrol dalam proses pengambilan keputusan (*decision control*) seperti di atas, ada kontrol lain yang juga penting, yaitu kontrol dalam memberikan informasi yang dibutuhkan (*process control*), terutama untuk mengambil keputusan. Menurut beberapa hasil penelitian (lihat review Tyler, 1989) kontrol proses ini bahkan lebih penting dibandingkan dengan kontrol keputusan. Pada awalnya Thibaut dan Walker (1975) percaya bahwa kontrol proses ini dianggap penting karena dengan demikian individu nantinya dapat menguasai sumber yang diperebutkan. Pada perkembangan selanjutnya proses kontrol ini tetap dianggap penting meskipun orang tersebut tidak dapat menguasai sumber itu atau informasi dan argumen yang disampaikan tidak digunakan dalam menyusun keputusan (Tyler, 1994). Proses kontrol tidak hanya sekedar merupakan instrumen, tetapi menyampaikan informasi dan argumen itu merupakan prasyarat penting terwujudnya rasa keadilan.

Model kepentingan pribadi menekankan keadilan yang orientasi akhirnya adalah hasil. Artinya, kepedulian terhadap keadilan prosedural merupakan sarana untuk mendapatkan bagian yang adil nantinya. Oleh karenanya, model ini juga sering disebut sebagai model keadilan prosedural yang berorientasi hasil (*Outcome-Based Model of Procedural Justice*). Proses yang berlangsung seperti diuraikan di atas pada intinya adalah upaya untuk mendapatkan bagian yang besar dengan melakukan maksimalisasi sumber daya personal, dengan cara melakukan kontrol proses dan pengambilan keputusan. Proses yang terjadi di sini adalah proses pertukaran sosial dan prinsip keadilan yang diterapkan adalah prinsip proporsional (*equity*). Dengan adanya masukan yang berbentuk kontrol, maka hasil yang diperoleh dengan sendirinya akan bertambah besar.

2. Model Nilai-Nilai Kelompok

Salah satu kritik mendasar terhadap model kepentingan pribadi ini adalah pada konflik dan perselisihan sebagai titik tolak dari pengembangan konsep.

Apakah keadilan prosedural tidak dapat tercapai bila tidak ada kontrol? Bagaimana kontrol dapat diterapkan meskipun tidak terjadi perselisihan? Ada beberapa pertanyaan serupa yang dikemukakan oleh pengkritik model ini (Lind & Tyler, 1988). Meskipun demikian, kritik-kritik yang dilontarkan tidak berarti mengabaikan dan menganggap model ini tidak bisa dipertahankan. Kritik-kritik yang ada justru berusaha menemukan kelemahan dari model ini, yang kemudian menelorkan alternatif model. Dari sini justru muncul model yang kedua, yaitu model nilai-nilai kelompok. Secara konseptual model kedua ini sangat kontras dengan model pertama, tetapi pada sisi lain, model ini juga bisa menjadi komplemen dari model pertama.

Berbeda dengan asumsi model kepentingan pribadi, model kedua ini menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Secara alamiah ada dorongan dan upaya agar individu bisa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sementara itu, proses-proses sosial dan prosedur-prosedur dalam interaksi sosial selalu menjadi elemen dari kelompok sosial dan masyarakat. Di dalam kelompok, individu pada dasarnya lebih mengutamakan kebersamaan daripada mementingkan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip partisipasi, kooperasi, dan altruisme akan lebih menonjol dibandingkan dengan egoisme individu meskipun egoisme ini tidak bisa hilang sama sekali.

Menurut pencetusnya, Lind dan Tyler (1988), ada dua elemen penting yang mengarahkan pikiran dan perilaku individu dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pertama adalah identitas kelompok. Setiap kelompok memiliki identitas tersendiri. Identitas inilah yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Kedua adalah prosedur kelompok. Prosedur-prosedur dalam kelompok mengatur kewenangan, proses-proses sosial, dan aktivitas-aktivitas di dalam kelompok. Identitas kelompok menunjukkan bentuk luar dari kelompok, sedangkan prosedur menampakkan sisi dalam kelompok itu.

Model ini juga menganggap bahwa prosedur merupakan norma-norma yang mengatur perlakuan, struktur, dan proses sosial. Karenanya prosedur semestinya sejalan dengan nilai kelompok dan individu anggotanya. Keadilan prosedural menurut model ini pada prinsipnya adalah kesesuaian antara nilai-nilai kelompok dengan prosedur kelompok. Bila keadaan ini telah tercipta, di dalam keadilan prosedural tercakup juga unsur kepatuhan terhadap prosedur. Oleh karena itu, dari sisi anggota kelompok, keadilan ini berpengaruh pada penilaian terhadap pimpinan dan lembaga. Pada sisi lain, pemimpin atau penguasa juga akan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur bagi anggota kelompok. Dengan demikian, terdapat hubungan yang searah antara penilaian terhadap keadilan dengan penilaian terhadap kelompok itu. Dua hal ini berpengaruh secara timbal balik. Kenyataan ini menjadi salah satu aspek penting dalam kajian keadilan prosedural menurut model ini.

Model ini juga berasumsi bahwa individu akan memikirkan hubungan dirinya dengan kelompok, terutama dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan, yang akan terjalin dalam jangka waktu lama. Untuk itu, individu tidak selayaknya mengedepankan kepentingannya sehingga dapat menimbulkan konflik dalam kelompok. Orang juga berusaha memelihara hubungan sosial dalam kelompok. Hal ini dilakukan karena kelompok merupakan sumber untuk validasi diri berupa informasi tentang kelayakan perilaku para anggotanya. Bila validasi ini positif, kelompok secara psikologis juga memberikan hadiah sebagai pengukuh bagi anggotanya. Kelompok juga memberikan dukungan emosional dan rasa kebersamaan. Di samping itu, kelompok juga merupakan sumber berbagai hal yang bersifat material seperti berbagai fasilitas.

Adanya nilai-nilai sosial dalam kelompok, fasilitas, dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dalam kelompok menuntut individu yang terlibat di dalamnya untuk saling menghormati dan berlaku sopan. Selanjutnya Tyler (1989) menambahkan bahwa dalam hubungan antara individu dengan

pemegang otoritas maka individu akan memperhatikan tiga hal, yaitu netralitas, kepercayaan, dan penghargaan. Pemegang otoritas yang netral berarti tidak bias dan menggunakan dasar-dasar faktual dalam mengambil keputusan. Kepercayaan meliputi keyakinan bahwa pemegang otoritas akan memperlakukan individu secara menguntungkan dan tidak sebaliknya. Penghargaan meliputi perlakuan sopan dan respek sehingga individu merasa ditempatkan pada status yang tinggi. Perkembangan lebih lanjut dari kajian ini dimasukkan secara khusus dalam tema kajian tentang keadilan interaksional².

Keadilan interaksional ini dikembangkan lagi oleh Tyler (1989, 1994) melalui beberapa penelitian dan akhirnya disimpulkan bahwa tiga aspek itu, netralitas, kepercayaan, dan penghargaan berkaitan erat dengan keadilan prosedural, tetapi bukan bagian dari keadilan prosedural. Hal yang menarik dari pengembangan model oleh Tyler ini adalah sintesis dari berbagai variabel yang berkaitan dengan penilaian keadilan prosedural sehingga menjadi model yang komprehensif. Berdasarkan teori-teori yang ada, Tyler setuju dengan sebagian pendapat Leventhal tentang unsur pokok dalam keadilan prosedural. Dari enam unsur di atas, Tyler menyebut tiga yang paling penting, yaitu konsistensi, akurasi, dan etika. Tiga lainnya tidak disertakan karena dianggap sebagai variabel yang berbeda dengan keadilan prosedural. Tyler juga sependapat dengan Thibaut dan Walker tentang kontrol proses dan kontrol keputusan. Dua hal ini diposisikan sebagai variabel di luar keadilan prosedural, tepatnya sebagai anteseden penilaian keadilan prosedural. Dari kajian yang dilakukan, masih ada anteseden penting dari penilaian keadilan prosedural, yaitu penilaian keadilan interaksional. Keterkaitan yang erat antara penilaian keadilan interaksional dengan keadilan prosedural disebut Model Relasional, sementara keterkaitan yang erat kontrol dengan penilaian keadilan prosedural disebut Model Kontrol. Kedua model yang disebut

² Kajian lebih detil tentang keadilan interaksional dipaparkan dalam sub bab D pada bab ini.

terakhir ini muncul dalam konteks yang berbeda dan berkaitan dengan orientasi individual yang dominan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Di luar dua anteseden itu, Tyler (1994) mengidentifikasi satu variabel lagi yang dapat menjelaskan keadilan prosedural. Variabel yang dimaksudkan terkait erat dengan aspek kontrol, tetapi bukan kontrol itu sendiri. Sama dengan asumsi perlunya kontrol, orang akan berpikir dan berusaha untuk memaksimalkan yang akan atau mungkin ia dapatkan. Upaya ini tidak cukup bila hanya dilakukan dengan kontrol. Salah satu hal yang sangat penting adalah investasi atau modal. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, harus ditanamkan modal yang besar pula. Modal yang dimaksudkan bisa berupa materi, waktu, tenaga, dan lainnya. Investasi dan modal ini pada dasarnya adalah sumber daya sehingga penggabungan dari keduanya membentuk satu model baru yang disebut Model Orientasi Sumber Daya (*Resource-Based Model*).

C. Keadilan Distributif

Keadilan distributif didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli dari berbagai bidang. Filosof Aristoteles (dikutip Keraf, 1996; Surbakti, 1993) berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi fungsi-fungsi atau peran di antara anggota masyarakat. Banyak hal bisa didistribusikan dalam masyarakat, seperti jabatan, uang, atau kekayaan di antara anggotanya. Pendapat ini berbeda dengan ekonom Adam Smith (dikutip Keraf, 1996) yang menyatakan bahwa keadilan distributif terdiri dari tindakan-tindakan yang bermaksud baik bagi orang lain dalam bentuk memberikan miliknya untuk orang lain, memperkenankan orang lain menggunakan hak milik itu, melakukan karitas dan kemurahan hati bagi orang lain. Dua pendapat di atas berbeda secara prinsip meskipun keduanya membedakan keadilan distributif dengan keadilan pertukaran karena Adam Smith membatasi lingkup keadilan distributif secara lebih sempit dibandingkan dengan Aristoteles. Dalam pengertian yang pertama, keadilan

distributif tidak sepihak, tetapi bisa juga interaktif karena berbagai hal yang didistribusikan ada yang milik pribadi dan sebagian milik bersama. Perbedaan ini tampaknya berpangkal dari dasar pemikiran masing-masing. Adam Smith dikenal sebagai tokoh yang sangat setuju dengan konsep hak milik meskipun Aristoteles juga demikian. Adam Smith tampak lebih menonjol dalam membela hak pribadi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila ia berpendapat bahwa keadilan distributif terbatas pada tindakan yang dilandasi oleh kemurahan hati, tindakan karitatif, dan rasa belas kasihan (lihat juga argumen Lomasky, 1995).

Hampir semua kajian psikologi mendefinisikan lingkup keadilan distributif lebih luas daripada pengertian Adam Smith. Keadilan distributif dalam psikologi meliputi segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antarpasangan (Yamagishi, 1984). Dijelaskan juga bahwa keadilan distributif yang dimaksudkan tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran.

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu (Deutsch, 1975). Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi di sini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran, atau keuntungan. Meskipun demikian, distribusi yang dimaksudkan juga meliputi ongkos atau biaya dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman juga masuk dalam cakupan keadilan distributif karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama, tetapi sebagian yang lain lebih suka menggolongkannya sebagai keadilan korektif (*corrective justice*).

Pada periode awal kajian keadilan dari sudut pandang psikologi (lihat Deutsch, 1975; Tornblom, 1977) keadilan distributif dan prosedural tidak dibedakan secara tegas. Oleh karena itu, dalam menginventarisasi sumber-sumber rasa ketidakadilan distributif, Deutsch memasukkan ketidakadilan dalam prosedur

pengambilan keputusan. Karena keadilan prosedural telah dibahas tersendiri, pembahasan selanjutnya dibatasi pada lingkup keadilan distributif. Menurut Deutsch (1975), keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi (Deutsch, 1975; Feather, 1990, 1994; Rasisnski, 1987; Reis, 1987; Rohrbaugh dkk., 1980; Thornblom, 1977). Setiap nilai mempunyai tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi diuraikan di bawah ini.

1. Distribusi Secara Proporsional

Menurut *Equity Theory* dari Adams (dalam Thornblom, 1977), keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. Ketika seseorang melakukan perbandingan dan dia mendapati bahwa perbandingan tersebut menjadi lebih besar atau lebih kecil, dia akan menilainya tidak adil. Namun, bila seseorang mendapatkan bahwa dari perbandingan tersebut proporsi yang diterima dirinya lebih besar, ada kemungkinan bahwa hal itu lebih ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan dengan bila proporsi yang diterimanya lebih rendah daripada yang semestinya.

Prinsip proporsional ini sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, sumbangan yang diberikan seseorang harus terukur. Perbandingan sumbangan antara satu orang dan orang lain dalam perusahaan, misalnya, juga sering sulit dilakukan. Tukang sapu dan juru ketik, misalnya, akan sulit dibandingkan. Maka dari itu, pemberlakuan prinsip ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu ketika tolok ukur untuk masukan dan keluaran sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip ini dalam pelaksanaannya sering berubah, misalnya proporsi dipertimbangkan hanya berdasarkan kemampuan atau usaha (lihat Reis, 1987). Seorang ahli atau konsultan yang memberikan saran pada suatu lembaga atau perusahaan dibayar mahal sekali meskipun saran tersebut belum dioperasionalisasikan dan belum ada hasil yang diperoleh. Pada sisi lain, para peneliti yang melakukan berbagai percobaan yang memperoleh bayaran tinggi dikatakan adil meskipun mereka belum menghasilkan apa pun. Pembayaran yang mahal itu dikatakan adil karena sebanding dengan upaya yang dilakukan.

2. Distribusi Merata

Dalam prinsip distribusi ini setiap orang yang terlibat akan menerima pembagian yang sama dengan orang lain. Bila prinsip ini digunakan, variasi penerimaan antara satu orang dengan lainnya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Dimungkinkan ada variasi bila ada jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian dalam satu organisasi atau kelompok. Variasi itu terjadi antarkelompok, bukan di dalam setiap kelompok. Prinsip ini juga sulit diterapkan. Kritik paling banyak datang berkaitan dengan pengabaian terhadap potensi dan produktivitas kerja. Orang yang lebih pandai, terampil, atau produktif mestinya mendapat imbalan lebih tinggi, sementara prinsip ini tidak terlalu mempertimbangkannya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa prinsip ini tepat diterapkan pada pola hubungan bukan kerja, misalnya keluarga. Dalam suasana kerja, prinsip ini dapat diterapkan bila orientasinya adalah keharmonisan hubungan sesama pekerja.

3. Distribusi berdasarkan Kebutuhan

Prinsip ketiga mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Di sini dapat diinterpretasi bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhannya maka makin besar upah yang diterima. Sayangnya, kebutuhan yang

harus dipenuhi berdasarkan prinsip ini kurang jelas dan belum ada kesepakatan umum. Prinsip ini menjadi pertimbangan dalam pemberian upah pekerja/buruh di Indonesia. Kebutuhan yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan fisik minimum. Karena prinsip ini tidak tegas menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi, kritik juga datang kepada ketentuan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM). Menurut para kritisi (lihat Aritonang, 1992; Tim Prisma, 1994) KFM sebagai standar pembayaran dinilai terlalu rendah. Orang yang tercukupi kebutuhan fisiknya, apalagi standar minimum, hanya mampu bertahan hidup, tetapi tidak bisa berkembang. Di negara yang menganut paham negara kesejahteraan, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh negara meskipun orang yang bersangkutan tidak bekerja. Para penganggur, kelompok jompo, dan orang cacat menerima jaminan sosial setara dengan KFM. Bila mereka bekerja, upah yang diterima tentu jauh lebih besar daripada jaminan itu. Kritik lain terhadap konsep di atas mendasarkan pada pentingnya produktivitas yang berkaitan dengan distribusi hasil. Ada bukti-bukti bahwa makin tinggi bagian yang diterima akan makin tinggi pula produktivitasnya. Oleh karena itu, kebutuhan sebagai dasar distribusi dinilai kurang memotivasi orang untuk lebih produktif.

4. Distribusi berdasarkan Permintaan dan Penawaran di Pasar

Mekanisme pasar sering dinilai tidak tepat sebagai dasar untuk menyusun formulasi keadilan. Mekanisme tersebut adalah bagian penting dari kapitalisme yang sering diidentikkan dengan kekuasaan di tangan pihak yang kuat. Mereka yang kuat cenderung untuk terus memperkuat diri dan tidak mau mendistribusikan bagiannya untuk pihak lain. Namun, relasi sosial tidak semuanya berpola searah (Komter, 1996), sebagian besar di antaranya justru berbentuk pertukaran (Ekeh, 1974). Oleh karena itu, keadilan juga harus dibangun berdasarkan prinsip timbal balik (Adam Smith dalam Keraf, 1996; Surbakti, 1993).

Di antara konsep mekanisme pasar yang dapat diterapkan untuk memformulasikan keadilan adalah permintaan dan penawaran. Konsep permintaan sejalan dengan kebutuhan seperti disebutkan terdahulu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan, tetapi tidak selamanya dapat dikatakan demikian. Ketika persediaan (penawaran) benar-benar tidak ada maka tidak dapat dikatakan sebagai tidak adil. Sebaliknya, penawaran yang berlebihan tanpa melihat permintaannya maka akan menimbulkan ketidakadilan juga. Untuk menjaga agar mekanisme ini tetap adil dan tidak berubah menjadi sistem kapitalisme yang membuta, Smith (dalam Keraf, 1995) mengusulkan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung.

5. Distribusi yang Mengutamakan dan Menguntungkan Orang Lain

Tidak semua orang memiliki potensi, dapat berusaha, dan memperoleh hasil dari usahanya. Orang cacat, orang sakit, anak-anak, lanjut usia, yatim piatu, miskin, dan sejenisnya adalah kelompok orang yang seharusnya disantuni. Tanpa santunan dari pihak yang lebih beruntung atau dari negara serta lembaga sosial, mereka akan sulit bertahan hidup. Salah satu prinsip keadilan distributif menggunakan konsep karitatif. Nilai-nilai agama, sosial, dan budaya di berbagai belahan bumi menekankan pentingnya bantuan karitatif sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial (Lomasky, 1995; Rahardjo, 1994). Mengingat pentingnya masalah ini sebagai bagian dari masalah keadilan, beberapa negara secara tegas menempatkan kesejahteraan sebagai bagian dari ideologi (George & Wilding, 1992).

6. Kepentingan Bersama di atas Kepentingan Pribadi

Hakikat keadilan adalah keadilan sosial. Keadilan tidak dapat diformulasikan tanpa ada konteks sosialnya. Orang yang mengatakan, "*Saya harus adil pada diri sendiri*" pada dasarnya memformulasikan keadilan sosial bila

keadilan bagi dirinya yang dimaksudkan berdasarkan pada perbandingan dengan orang lain. Permasalahannya, keadilan adalah salah satu pilar yang menjaga berlangsungnya kehidupan sosial. Persoalan keadilan menjadi pelik ketika ada pertentangan antara mengutamakan kepentingan pribadi (Thibaut & Walker, 1975) dan kepentingan bersama/sosial (Lind & Tyler, 1988). Pada tingkat individu akan sulit sekali menilai keadilan tanpa menghiraukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, tidaklah realistis menegakkan keadilan tanpa mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Apalagi ketika kepentingan tersebut menyangkut hak-hak asasinya. Meskipun demikian, kompromi yang sering diambil secara umum mengarah pada posisi yang lebih tinggi bagi nilai-nilai kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Prinsip distribusi ini diarahkan untuk menjaga kebersamaan dalam masyarakat sekaligus diarahkan agar individu tetap menjaga moralitas masing-masing (Reis, 1987). Prinsip ini selaras dengan prinsip karitas. Perbedaannya ialah karitas ditujukan pada sekelompok orang yang memiliki persoalan tertentu, sedangkan prinsip ini diterapkan untuk semua anggota masyarakat atau komunitas.

Beberapa prinsip keadilan distributif tersebut adalah prinsip umum yang sering disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Sebagian di antaranya dapat langsung dioperasionalkan, prinsip yang lain merupakan moralitas yang operasionalisasinya bisa bersamaan dengan prinsip-prinsip lain. Masih ada beberapa prinsip lain yang belum disebutkan di atas, tetapi berlaku lebih personal atau hanya pada kondisi yang khusus. Ketika sumber daya yang ada sangat terbatas, misalnya, seseorang bisa menjustifikasi bahwa kebutuhannya harus didahulukan sebagai tindakan yang adil. Sebaliknya, ketika harus menanggung risiko bersama, seseorang cenderung memilih yang terkecil. Pada tingkat individu prinsip keadilan justru bisa bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial pada umumnya. Meskipun demikian, sebagian besar prinsip keadilan masih menekankan pentingnya unsur kebersamaan dan kerja sama.

Dari sekian banyak prinsip keadilan distributif, tiga diantaranya yaitu prinsip proporsional, pemerataan, dan kebutuhan paling banyak dibahas dan diterapkan. Prinsip proporsional bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang berorientasi pada produktivitas. Secara garis besar prinsip ini memberikan kesempatan kepada orang bahwa yang memberi *input* besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Dalam praktiknya, pembagian yang dimaksud bisa dilakukan terlebih dulu. Mereka yang diberi paling banyak nantinya diminta memberikan kembali dalam jumlah yang paling banyak juga. Kedua kemungkinan ini bisa terjadi sebab bagi seseorang yang dijanjikan akan menerima dalam jumlah yang sebanding dengan masukannya tidak secara otomatis dia akan menyetujuinya. Pertama-tama ia akan berhitung untung dan ruginya terlibat di sana. Orang mau terlibat bila hasil yang diterima sebanding atau lebih besar daripada yang dia sumbangkan. Pembagian 'hasil' di depan adalah cara untuk meyakinkan perhitungan penerima. Bila tidak, proporsi yang akan diterima nantinya harus jelas.

Persoalannya ialah bagi pihak penerima keadilan distribusi dengan prinsip ini sering dilihat hanya pada sisi masukan atau sumbangan yang ia berikan dan hasil yang diterimanya. Pemikiran egoistis seperti ini sangat mendominasi penilaian keadilan. Dalam prinsip proporsional, proporsi yang dimaksud tidak sebatas pada kontribusi dan hasil satu orang, tetapi ada pihak pembanding dalam hal *input* dan *output* untuk hal yang sama. Hal ini terkait dengan hakikat kedua dari keadilan, yaitu keadilan sosial. Artinya, adil tidak semata-mata memberikan hak kepada yang berhak, tetapi secara sosial dapat dipertanggungjawabkan karena ada dasar pertimbangannya, dalam hal ini orang lain sebagai pembanding.

Hasil-hasil penelitian (Chen, 1995; Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Feather, 1994, 1996) menunjukkan bahwa prinsip proporsional ini cocok untuk situasi kompetitif dan dapat menumbuhkan produktivitas karena prinsip ini mampu menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang

besar dengan tujuan akan mendapatkan imbalan yang besar juga. Pada sisi lain, ada kritik yang cukup tajam terhadap penggunaan prinsip ini. Pertama, prinsip ini bila berjalan dalam tempo yang lama akan mengarah pada akumulasi sumber daya, peran, instrumen, dan hasil pada kelompok yang dapat menguasainya secara efektif, yaitu mereka yang pertama-tama memiliki sumbangan besar sehingga hasilnya juga besar. Sementara itu, individu-individu yang tidak memiliki modal yang besar akan terus mendapatkan bagian yang kecil. Kesenjangan dalam kelompok yang demikian berarti telah terjadi disfungsi kelompok secara ekonomi dan sosial (Deutsch, 1975). Kedua, prinsip ini terlalu menekankan pada aspek ekonomi daripada aspek sosialnya. Pada beberapa kondisi orientasi ekonomi sangat perlu, pada kondisi yang lain aspek sosial mungkin menempati posisi yang penting. Bila semuanya diukur dari segi ekonomi, kehidupan sosial bisa menjadi terganggu. Salah satunya adalah munculnya perasaan teralinalasi.

Kritik itu terkait dengan prinsip persamaan atau pemerataan (ekualitas). Prinsip ini bertujuan untuk memelihara relasi sosial yang serasi. Relasi seperti ini tercipta bila seseorang merasa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Salah satu syarat terbentuknya adalah melalui hubungan yang mutualis. Hubungan mutualis paling mungkin terjadi ketika posisi satu pihak dengan lainnya sejajar (ekual). Dalam posisi sejajar maka distribusinya akan optimum bila menggunakan prinsip kesamaan. Memosisikan semua pihak dan mendistribusikan kepada mereka secara merata tidak hanya akan menyebabkan mereka dihormati, tetapi mendorong mereka untuk mencegah munculnya konflik.

Berbeda dengan prinsip kesamaan yang merupakan upaya untuk membangun dan memelihara suasana kelompok sosial, prinsip distribusi menurut kebutuhan diarahkan untuk memelihara perkembangan dan kesejahteraan personal. Bantuan diperlukan oleh orang yang terkena musibah atau yang membutuhkan. Bantuan tidak sekedar bermakna memberi untuk mencukupi pihak yang menerima, tetapi juga perhatian dan kepercayaan pada pihak lain. Bila ini

dilakukan oleh kelompok sosial dalam bentuk distribusi, harus ada aturan yang jelas pada tingkat mana perkembangan dan kesejahteraan individu diupayakan. Perkembangan dan kesejahteraan individu pada prinsipnya tidak ada batasnya. Sementara itu, distribusi juga harus adil dan tidak bisa diprioritaskan untuk semua anggota kelompok. Batas untuk ini biasanya adalah kebutuhan pokok atau batas bertahan hidup, seperti makan, kesehatan, dan pendidikan. Makin sejahtera suatu kelompok, makin tinggi batas yang dimaksud. Bila distribusi ini melampaui batas ketentuan, prinsip ini justru mengarah pada ketidakadilan sosial.

Tingkat pertama keadilan distributif terletak pada nilai. Pada tingkat nilai, keadilan hanya berlaku sesuai dengan nilai yang dianut. Prinsip pemerataan dapat dikatakan adil karena nilai tersebut dianut. Bagi orang yang tidak menganutnya maka bisa saja dia mengatakan sebagai nilai yang tidak adil. Nilai-nilai keadilan berubah sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Prinsip ekuwal, misalnya, dimaksudkan untuk menjaga kebersamaan dan mengurangi konflik. Prinsip ini tidak cocok untuk meningkatkan prestasi atau dalam situasi kompetisi. Di sini prinsip-prinsip proposional, berdasarkan usaha atau kemampuan, lebih bisa diterima atau dinilai lebih adil. Debat tentang nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan formulasi yang paling tepat telah berjalan begitu lama. Di belakang argumen tentang nilai-nilai keadilan yang diterapkan terdapat ideologi tertentu. Oleh karenanya, sekali lagi, memandang nilai keadilan sesuai dengan konteks setempat lebih mengena tanpa menakarnya dengan nilai-nilai lain. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa dinamika di dalam suatu masyarakat diabaikan. Kritik terhadap pemilihan nilai-nilai keadilan oleh anggota kelompok masyarakat itu masih dimungkinkan sehingga muncul penilaian ketidakadilan.

Tingkatan kedua keadilan distributif terletak pada perumusan nilai-nilai menjadi peraturan. Meskipun satu prinsip keadilan distributif telah disepakati sehingga ketidakadilan pada tingkat nilai tidak muncul, belum tentu keadilan distributif dapat ditegakkan. Untuk operasionalisasi prinsip dan nilai yang dianut,

perlu dibuat aturan yang jelas dan tegas. Misalnya, untuk mendistribusikan upah buruh, prinsip yang dianut adalah besarnya usaha. Agar distribusinya adil, usaha itu harus dijelaskan indikatornya. Bila indikatornya sudah ditemukan, misalnya jumlah baju yang selesai dijahit, selanjutnya harus jelas juga satuan dan kondisi yang dipersyaratkannya. Satuan yang dimaksud misalnya baju hem lengan pendek ukuran sedang tidak termasuk pembuatan lobang kacing baju. Kondisi yang dipersyaratkan misalnya bahan terbuat dari katun polos dengan kualitas sedang dan sebuah baju dikatakan selesai dijahit bila hasilnya sempurna, tanpa cacat jahitan. Keadilan pada tingkat ini dapat tercapai bila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, buruh dan pemilik perusahaan, sepakat dengan aturan yang jelas itu. Bila tidak ada kriteria yang jelas sehingga terbuka peluang untuk saling menggugat, keadilan distribusi tidak bisa tercapai. Jenis, bahan, ukuran, dan model baju akan berpengaruh terhadap hasil usaha pembuatannya. Tanpa peraturan yang jelas tentang hal-hal itu, distribusi upahnya sulit dilaksanakan secara adil.

Tingkatan ketiga keadilan distributif terletak pada implementasi peraturan. Untuk menilai distribusi adil atau tidak, dapat dilihat dari tegaknya peraturan yang diterapkan. Bila peraturan yang disepakati tidak dijalankan sama sekali atau dijalankan sebagian, keadilan distribusi tidak tercapai. Ketidakadilan distributif juga tidak dapat dicapai bila peraturan tidak diterapkan secara konsisten baik antarwaktu maupun antarindividu. Di sini keadilan distribusi sudah bisa dilihat dengan mudah sehingga orang juga tidak sekedar menilai adil tidaknya distribusi, tetapi juga dapat menilai legitimasi pemegang otoritas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan distribusi (Van den Bos, 1999).

D. Keadilan Interaksional

Keadilan yang belum banyak dibahas dalam literatur, terutama bila dibandingkan dengan pembahasan tentang keadilan prosedural dan keadilan

distributif, adalah keadilan interaksional. Beberapa tulisan dan penelitian (Greenberg, 1996; Skarlicki & Folger, 1997; Tyler, 1994) telah membahasnya atau menjadikannya sebagai variabel pengaruh yang berperan menjelaskan variabel lain, tetapi dinamika keadilan interaksional itu tidak banyak disorot. Tampaknya kepedulian terhadap keadilan interaksional berkembang setelah keadilan distributif dan prosedural. Bila dilihat dari perkembangan tentang pembahasan keadilan itu, keadilan interaksional oleh sebagian ahli pernah dijadikan bagian dari keadilan prosedural, padahal pada awalnya keadilan prosedural juga dianggap sebagai bagian dari keadilan distributif. Tidak salah bila keadilan interaksional pernah menjadi bagian dari keadilan prosedural. Asumsi-asumsi dasar dalam keadilan interaksional tidak berbeda dengan keadilan prosedural. Dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok (Tyler, 1994). Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial. Pada kelompoknya, hal ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga merupakan upaya untuk memelihara identitas kelompok. Pandangan ini sama dengan pandangan Teori Identitas Sosial (lihat Hogg & Abrams, 1988), terutama dalam hal identitas kelompok dan status individu di dalam kelompok. Bedanya ialah dalam Teori Identitas Sosial status kelompok lebih diperhatikan, sedangkan status individu dalam kelompok lebih diperhatikan dalam kajian keadilan interaksional.

Salah satu argumen penting keadilan interaksional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cerminan dari sensitivitas sosial kepada penguasa (Skarlicki & Folger, 1997). Namun, rasanya tidak adil juga bila keadilan interaksional hanya dibatasi pada hubungan vertikal antara penguasa dengan bawahan atau anggota kelompok sosial. Oleh

karena itu, sebagian ahli lain (Donovan dkk., 1998; Sztompka, 1999) menilai bahwa interaksi yang horizontal lebih penting dibandingkan dengan relasi vertikal dalam membahas keadilan interaksional. Tampaknya kedua jenis relasi sosial di atas harus sama-sama diperhatikan, tetapi secara kontekstual salah satu mungkin akan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain.

Ada dimensi lain dari keadilan interaksional yang lebih substansial sifatnya. Tyler (1989, 1994) menyebutkan ada tiga hal pokok yang dipedulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional. Tiga aspek tersebut adalah penghargaan, netralitas, dan kepercayaan.

1. Penghargaan

Penghargaan, khususnya penghargaan terhadap status seseorang, tercermin dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa, terhadap anggota kelompok. Isu-isu tentang perlakuan bijak dan sopan, menghargai hak, dan menghormati adalah bagian dari penghargaan. Makin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya maka interaksinya dinilai makin adil. Perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain bisa dalam bentuk kata-kata, sikap, ataupun tindakan. Bentuk-bentuk penghargaan yang positif antara lain adalah respons yang cepat terhadap pertanyaan atau persoalan yang diajukan, apresiasi terhadap pekerjaan orang lain, membantu, memuji atas tindakan yang benar atau hasil yang baik, dan seterusnya. Sebaliknya, memaki, membentak, menyepelkan, mengabaikan, menghina, mengancam, dan membohongi adalah bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan penghargaan (Donovan dkk., 1998).

2. Netralitas

Konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Namun, konsep ini juga bisa diterapkan pada hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan fakta, bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi. Aspek ini juga mengandung makna bahwa dalam melakukan relasi sosial tidak ada perlakuan dari satu pihak yang berbeda-beda terhadap pihak lain. Hal ini akan tampak saat terjadi konflik di dalam kelompok, baik yang bersifat personal, antarkelompok kecil, maupun anggota dengan kelompok (pimpinan). Pemihakan masih dibenarkan bila menunjuk pada norma atau aturan yang sudah disepakati.

3. Kepercayaan

Aspek keadilan interaksional yang paling banyak dikaji adalah kepercayaan. Tampaknya kepercayaan telah menjadi isu tersendiri yang implikasinya dalam kehidupan sosial besar. Ahli sosiologi dan ekonomi, misalnya, menekankan kajian tentang kepercayaan sebagai fenomena institusional. Dengan demikian, kepercayaan biasanya dikonseptualisasikan sebagai fenomena dalam lembaga atau antarlembaga. Sebaliknya, mereka yang mendalami teori kepribadian akan menekankan pada perbedaan individu dalam membahas soal kepercayaan. Menurut pandangan ini, kepercayaan merupakan keyakinan, harapan, atau perasaan yang berakar pada kepribadian yang berkembang dari awal masa pertumbuhan individu yang bersangkutan. Berbeda dengan dua pandangan itu, ahli psikologi sosial melihat kepercayaan dalam hubungan antarindividu dan pada *level* kelompok (kecil). Oleh karenanya, kepercayaan sering didefinisikan sebagai harapan pihak lain dalam melakukan hubungan sosial, yang di dalamnya tercakup risiko yang berasosiasi dengan harapan itu. Artinya, bila seseorang mempercayai orang lain, ketika hal itu tidak

terbukti ia akan menerima konsekuensi negatif seperti merasa dikhianati, kecewa, dan marah (lihat Lewicki & Bunker, 1996). Sztompka (1999) menyebutkan bahwa kepercayaan berarti suatu pertaruhan terhadap hasil di masa depan dengan menyerahkannya pada orang lain.

Dari beberapa kajian yang dirangkum, Lewicki dan Bunker (1996) menyimpulkan bahwa yang menentukan tingkat kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya adalah disposisi individu, situasi, dan pengalaman atau sejarah hubungan kedua pihak. Tampaknya tiga hal ini memegang peran yang sangat penting sehingga dalam berbagai pembahasan tentang kepercayaan ketiganya menjadi dasar atau pijakan. Orang yang tampil tidak meyakinkan, sebagai indikasi rasa percaya diri rendah (disposisi), akan lebih sulit menumbuhkan kepercayaan orang terhadapnya. Situasi yang tidak menentu karena hukum tidak jelas juga menghambat tumbuhnya kepercayaan sesama anggota masyarakat. Sementara pengalaman masa lalu, seperti ditipu oleh seseorang, akan menyebabkan tingkat kepercayaan pada pelakunya menjadi rendah.

Kepercayaan pada atau terhadap orang lain (*trust*) berbeda dengan kepercayaan diri (*confidence*). Perbedaan yang paling mendasar terletak pada persepsi dan atribusi (Meyerson, Weick & Kramer, 1996). Pada *level* individu, keduanya kadang sulit dibedakan, tetapi dengan mengambil posisi **sendiri** atau **dengan orang lain**, keduanya akan mudah dibedakan. Ketika seseorang memiliki kepercayaan terhadap orang lain, dia justru dalam posisi berisiko. Hal ini akan terbukti ketika (berharap) orang lain dapat dipercaya ternyata mengecewakan, risiko itu benar-benar harus ditanggung yang secara psikologis dapat berbentuk rasa frustrasi, marah, atau yang lain. Sementara itu, kepercayaan diri sering menyebabkan seseorang lebih berani untuk mengambil risiko. Di sini justru kepercayaan diatribusikan pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, orang yang percaya diri tidak berarti kurang mempercayai orang lain. Melalui penilaian refleksi, yaitu memandang orang lain berdasarkan pada keadaan diri sendiri, orang

yang percaya diri justru cenderung lebih mempercayai orang lain dibandingkan dengan orang yang kurang percaya diri (Murray dkk., 1998)

Kepercayaan terhadap orang lain dapat dibangun melalui berbagai cara. Dengan cara apa pun kepercayaan dibentuk, proses ini harus menyentuh empat dimensi pokok kepercayaan, yaitu kompetensi, keterbukaan, kepedulian, dan reliabilitas (Mishra, 1996). Orang pada umumnya mempercayai pihak lain karena kompetensinya. Pasien yang berobat ke dokter atau dukun menganggap bahwa dokter atau dukun itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sakitnya meskipun harus melalui media tertentu. Dimensi ini, dan juga dimensi yang lain, sangat kental dengan penilaian subjektif pihak yang mempercayai. Orang yang menilai dukun memiliki kemampuan tinggi dan mempercayainya belum bisa diintervensi oleh pihak ketiga agar dia lebih mengerti bahwa dokter memiliki pengetahuan lebih tinggi sehingga kepercayaannya berpindah dari dukun ke dokter. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi.

Dimensi keterbukaan sering disejajarkan dengan kejujuran meskipun keduanya secara konseptual berbeda. Keduanya terkait erat satu dengan lainnya sehingga dalam tulisan ini keduanya digunakan bersama-sama untuk menjelaskan kepercayaan. Keterbukaan dan kejujuran sering digunakan oleh individu sebagai daya tarik atau untuk menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya. Berbeda dengan dimensi kompetensi yang merupakan daya tarik untuk membangun kepercayaan dalam pola hubungan bisnis, keterbukaan merupakan daya tarik yang mengandung nilai-nilai moral untuk membangun hubungan sosial.

Kepercayaan merupakan salah satu bagian penting dari keadilan interaksional (lihat Brockner & Siegel, 1996; Tyler, 1994; Van den Bos, Wilke & Lind., 1998). Dimensi kepedulian sebagai bagian dari kepercayaan inilah yang paling mencerminkan keadilan interaksional. Kepedulian tidak hanya merupakan bentuk kontrol terhadap oportunistik atau interes pribadi karena secara moral pun memiliki interes pribadi dibenarkan, tetapi yang lebih penting adalah perannya

sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Ketika keseimbangan ini tercapai, risiko yang harus ditanggung oleh pemberi kepercayaan dinilai rendah sehingga ia akan berani meningkatkan lagi kepercayaannya.

Kepercayaan bisa terbentuk melalui kesan pertama. Dalam psikologi sosial kesan awal (*primacy effect*) terbukti besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini (lihat Van den Bos, 1996), termasuk dalam membangun kepercayaan. Beberapa ahli (lihat Kramer & Tyler, 1996; Meyerson, Weick & Kramer, 1996) sependapat bahwa kepercayaan yang kuat terbentuk dari proses hubungan sosial yang terjalin lama dan terus-menerus. Dalam kondisi yang demikian, sangat dimungkinkan adanya tes terhadap pihak-pihak yang akan dipercayai. Dengan mengetahui reliabilitas pihak kedua maka risiko yang harus ditanggung pihak pertama, dengan jalan mempercayai pihak kedua, juga dinilai lebih kecil. Oleh karena itu, ia dapat lebih mempercayainya.

E. Penilaian Keadilan

Berbagai penjelasan tentang keadilan sebelumnya dapat dikatakan sebagai penjelasan keadilan secara normatif. Segala sesuatu yang dikatakan adil seperti pada teori-teori sebelumnya adalah sesuatu yang seharusnya (*ought to be*) atau sebagai suatu moralitas (Colquitt dkk., 2001). Dalam kenyataan, khususnya secara psikologis, sebagian di antaranya hanya bisa dijelaskan sebagai apa adanya (*what is*) pada tatanan psikis individu (Peterson, 1994). Dengan demikian, beberapa konsep bisa diterapkan, tetapi sebagian besar lainnya harus dijelaskan lebih lanjut. Penjelasan yang dimaksud terutama menyangkut proses penilaian yang merupakan proses psikologis pada tingkat individu. Penjelasan berikut ini mengelaborasi penilaian itu sebagai proses psikologi, sedangkan pada bagian berikutnya dibahas tentang penilaian keadilan yang berkembang dalam psikologi.

1. Penilaian Sosial

Penilaian keadilan pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari penilaian sosial. Dalam arti luas penilaian sosial didefinisikan sebagai proses pembentukan penilaian tentang objek, orang, atau peristiwa dari konteks sosial hingga membuahkan hasil yang mempunyai kualitas atau derajat tertentu. Secara sempit penilaian sosial hanya terbatas pada kajian tentang penilaian yang terkait dengan proses-proses psikologis untuk masalah-masalah sosial (Eiser, 1996). Dalam psikologi, proses penilaian secara singkat meliputi pengodean, pengorganisasian, dan penuangan (Fiske & Taylor, 1991).

Kajian tentang penilaian sosial pada awalnya berkembang dari penelitian-penelitian psikofisik. Pada kajian tersebut penilaian dikonsentrasikan pada pengukuran tentang sensasi persepsi. Misalnya, mengukur pendapat tentang berat suatu benda atau kerasnya suara. Isu yang berkembang dalam kajian ini adalah hubungan antara penilaian dengan kenyataan: bagaimana perbedaan kondisi nyata dapat memprediksi penilaian dan bagaimana perbedaan penilaian berpengaruh terhadap perbedaan sensasi?

Perkembangan selanjutnya dari kajian penilaian sosial bersamaan dengan kajian sikap. Pada periode ini penilaian diekspresikan dengan respons-respons yang bergerak antara 'setuju' dan 'tidak setuju' terhadap suatu pernyataan. Respons-respons tersebut mencerminkan sikap favorabel atau tidak favorabel terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. Ide-ide pengembangan dari Thurstone ini ditindaklanjuti oleh Hovland dan Sherif (dalam Eiser, 1996). Mereka berdua mengembangkan beberapa hal penting dalam penilaian sosial. Pertama adalah tingkat adaptasi, yaitu konsep yang menunjukkan perbedaan penilaian terhadap stimulus yang dipengaruhi oleh konteks, terutama adanya stimulus-stimulus lain yang hadir bersamaan. Kedua adalah munculnya kesadaran bahwa berbagai proses psikologi seperti persepsi dan memori banyak dipengaruhi oleh bias-bias seperti

motif dan sikap individu, terutama bila seseorang menunjukkan keterlibatan ego pada suatu isu.

Kedua hal itu berkembang menjadi model penilaian sosial yang disebut kontras asimilasi. Kontras yang pertama dapat terjadi karena perbandingan dengan stimulus lain. Bila stimulus yang dinilai dengan stimulus pembanding berbeda jauh, dapat terjadi polarisasi penilaian. Menurut model ini asimilasi juga terjadi bila seseorang yang melakukan penilaian akan menggunakan referensi subjektif. Di sini penilaian secara implisit dapat menjadi ekstrim karena ada referensi subjektifnya tersebut. Misalnya, ketika seseorang diminta untuk menilai tingkat sukses orang lain yang secara objektif tergolong sedang, dapat saja penilaian tersebut menjadi sangat rendah karena ada peristiwa lain yang menyebabkan munculnya perasaan tidak suka terhadap orang yang dinilai tersebut. Sementara itu, asimilasi dapat terjadi bila suatu stimulus sangat dekat atau mempunyai banyak kesamaan dengan stimulus pembanding. Akibat dari efek asimilasi dan kontras penilaian dapat menjadi unilateral atau bilateral. Apabila keadaan stimulus pembanding yang 'berat' menyebabkan semua penilaian menjadi 'berat', berarti terjadi efek yang unilateral. Sebaliknya, bila stimulus pembanding yang 'berat' menyebabkan semua penilaian menjadi 'ringan', berarti terjadi efek bilateral.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Upshaw (dalam Eiser, 1996) mengajukan konsep yang disebut variasi perspektif. Menurut konsep ini penilaian tidak menggunakan satu stimulus pembanding, tetapi ada pemikiran tentang rentang posisi yang menjadi pertimbangan. Makin lebar rentangnya, makin terbuka kemungkinan seseorang berpendapat pada titik yang moderat. Sebaliknya, makin kecil rentang yang ada, hal itu dapat mendorong orang untuk berpendapat secara ekstrim.

Teori Aksentuasi tentang penilaian (*Accentuation Theory*) yang dikemukakan Eiser (1996) menjelaskan lebih jauh tentang dinamika rentang penilaian sosial. Menurut teori ini, penilaian sosial banyak dipengaruhi oleh kelas

sosial tempat seseorang menjadi anggotanya. Secara kognitif, setiap orang masuk dalam suatu kategori sosial tertentu dan setiap ada stimulus akan mengalami proses kategorisasi dalam kognitif orang yang bersangkutan. Pada proses kategorisasi sering muncul perbedaan antara stimulus yang satu dengan lainnya. Proses tersebut tidak berhenti di situ, tetapi juga ada kecenderungan untuk menekankan perbedaan yang muncul. Proses ini disebut aksentuasi. Dalam proses ini juga terjadi kecenderungan adanya penilaian 'baik' (positif) untuk stimulus yang berkaitan dengan dirinya. Pada sisi lain, dapat juga terjadi kecenderungan untuk menilai lebih ekstrim (negatif) bila bertentangan dengan kategorisasinya. Bila stimulus tersebut tidak bertentangan dengan kategorisasinya, tidak selalu terjadi penilaian yang ekstrim. Meskipun demikian, akan sulit bagi penilai untuk menghindari subjektivitas seperti disebutkan sebab ada kecenderungan pada setiap penilai untuk menunjukkan representasi diri dalam penilaiannya.

Penilaian dengan cara kategorisasi dan komparasi seperti disebutkan sebelumnya tidak hanya berkembang berdasarkan perbandingan antarkategori, tetapi juga di dalam suatu kategori. Dalam satu kelompok akan terbentuk penilaian tentang kondisi standar kelompok tersebut yang akan dijadikan patokan untuk menilai item-item atau individu-individu di dalam kelompok. Misalnya, pada umumnya pelayanan Rumah Sakit A dinilai jelek, sementara pelayanan di Rumah Sakit B dinilai baik. Menunggu giliran diperiksa selama 45 menit di Rumah Sakit A dianggap biasa, sementara itu bila seorang pasien harus menunggu 30 menit untuk diperiksa di Rumah Sakit B, pelayanan seperti ini justru dapat dianggap jelek. Ilustrasi ini mengindikasikan adanya harapan pada seseorang ketika melakukan penilaian terhadap kondisi atau objek tertentu yang dinilai. Harapan tersebut bersumber pada standar yang dibuat. Rumah Sakit B yang memiliki standar 'baik' menumbuhkan harapan pada penilai akan pelayanan yang baik. Kekurangan sedikit saja pada pelayanan di sana akan menghasilkan penilaian 'jelek'.

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian sosial ada empat mekanisme. Pertama, penilaian semata-mata dilandasi oleh subjektivitas. Kedua, penilaian didasarkan pada perbandingan antara objek, orang, atau peristiwa yang dinilai dengan objek, orang, atau peristiwa pembanding. Dalam mekanisme kedua ini masih ada peran unsur subjektivitas. Ketiga, perbandingan yang digunakan tidak semata-mata antarkategori, tetapi juga dalam satu kategori tertentu. Keempat, hubungan sosial antara penilai dengan yang dinilai tidak bersifat mekanistik. Interaksi seseorang dengan lainnya akan menimbulkan proses saling pengaruh. Dalam keadaan seperti ini maka mekanisme penilaian juga dipengaruhi oleh interaksi tersebut.

Di samping proses penilaian seperti di atas, ada juga proses penilaian yang berkaitan dengan sebab-sebab atau penjelasan atas suatu peristiwa. Teori-teori yang mengkaji hal ini dalam psikologi sosial dikenal dengan teori atribusi. Teori-teori tersebut menguji informasi-informasi yang dibutuhkan dan mekanisme keterkaitan antara berbagai informasi tersebut hingga menyebabkan kejadian tertentu (Fiske & Taylor, 1991). Teori-teori atribusi yang berkembang membahas secara khusus tentang *domain* tertentu seperti kesuksesan, perilaku menolong, dan perilaku *koping*. Karena kajian yang seperti itu, dalam bagian ini teori atribusi tidak disertakan sebagai kajian. Model lengkap penilaian keadilan yang dirancang dan diuji dalam penelitian ini, termasuk anteseden dan efek dari keadilan, memiliki kesamaan dengan model pengembangan teori-teori atribusi yang ada. Dengan demikian, teori atribusi tidak cocok untuk membahas penilaian sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.

2. Faktor Pengaruh Penilaian Sosial

Penilaian memiliki rentang tertentu. Penilaian juga dapat mengarah pada suatu titik ekstrim, sementara orang lain dapat menilai hal yang sama pada titik ekstrim yang lain lagi. Polarisasi seperti ini dan perbedaan penilaian pada

umumnya dapat terjadi karena faktor psikologis, seperti sudah disinggung di atas, dapat pula terjadi karena faktor eksternal (Eiser, 1996; Fiske & Taylor, 1991). Jika dirinci lebih lanjut, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penilaian adalah sebagai berikut.

1. Keterlibatan ego. Ketika penilaian dilakukan, penilai akan menggunakan dua kriteria yaitu subjektif atau komparatif dan bila penilai tidak mempunyai kriteria pembandingan, penilaian akan tergantung pada intuisi atau dikendalikan oleh ego. Penilaian yang sangat subjektif seperti ini sering terjadi meskipun faktor pengalaman juga tidak dapat diabaikan. Karena pengaruh ego dalam penilaian seperti ini sangat besar, penilaian yang terjadi tidak semata-mata untuk keperluan sosial, khususnya pihak yang dinilai, tetapi juga demi kepentingan penilai. Pada beberapa kasus justru kepentingan penilai lebih menonjol atau menjadi satu-satunya faktor penentu penilaian.
2. Memori. Penilaian sebagai proses kognitif hasilnya sangat dipengaruhi oleh referensi yang ada dalam kognisi yang merupakan memori seseorang. Pada penilaian psikofisik jelas sekali peran dari memori ini. Orang yang mengangkat benda dan menilai benda lainnya untuk dinilai bobotnya akan menggunakan referensi bobot benda pertama untuk menilai bobot benda kedua. Di sini ada peran memori yang jelas mempengaruhi penilaian. Secara lebih luas lagi peran memori ditunjukkan oleh peran belajar dan peran pengalaman dalam melakukan penilaian. Orang sering membuat penilaian berdasarkan referensi pengalaman masa lalu. Penilaian bahwa pelayanan Rumah Sakit C jelek bisa terjadi karena membandingkannya dengan pelayanan di rumah sakit yang sama setahun lalu.
3. Aksesibilitas terhadap informasi. Salah satu faktor penting dalam melakukan penilaian dengan jalan melakukan perbandingan adalah tersedianya pembandingan tersebut. Orang sering mengalami kesulitan untuk mencari

pembandingan atau referensi. Permasalahan yang ada mungkin tidak terletak pada tidak adanya pembandingan, tetapi karena tidak adanya informasi atas pembandingan tersebut. Untuk penilaian terhadap masalah-masalah sosial, aksesibilitas informasi ini menjadi lebih rumit karena sering terjadi distorsi informasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Menggunakan informasi yang utuh dan mendekati kondisi objektifnya semakin sulit sehingga penilaian juga bertambah sulit yang pada akhirnya bergeser dari yang seharusnya.

4. Norma internal. Setiap orang mempunyai standar atau ukuran-ukuran tertentu untuk menilai sesuatu. Misalnya, harga sebuah motor baru merk tertentu yang secara nasional sama akan dinilai berbeda-beda oleh tiap-tiap individu karena mereka memiliki patokan tersendiri untuk menilainya. Dalam arti yang lebih luas, untuk menilai berbagai hal, ukuran-ukuran tersebut menjadi bagian atau mendasarkan pada norma internal yang ada pada individu. Norma yang dimaksud dapat mengambil referensi dari lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, selalu ada perbedaan-perbedaan norma internal antara seseorang dengan yang lainnya. Akibatnya, dalam menilai juga akan muncul terjadinya perbedaan.
5. Harapan. Norma internal dan norma sosial dapat menumbuhkan harapan pada seseorang agar objek, orang, atau peristiwa menjadi seperti harapannya. Kedekatan atau persamaan antara harapan dengan realitas dapat menyebabkan penilaian meningkat ke arah favorabel. Sebaliknya, makin lebar jarak antara harapan dengan realitas yang ditampilkan oleh objek, orang, atau peristiwa cenderung meningkatkan penilaian ke arah tidak favorabel.
6. *Mood*. Sifat faktor ini temporer. Pada saat *mood* seseorang baik, cenderung terjadi penilaian yang positif, demikian juga sebaliknya. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh stimulus yang dinilainya. Tindak kekerasan seperti

memukul orang hingga berdarah dapat menyebabkan pengamat menjadi tidak suka dengan orang yang memukul tersebut meskipun pada peristiwa itu, misalnya, yang dipukul adalah pencopet. Di sini *mood* pengamat menjadi negatif karena melihat darah.

7. Kepuasan hidup. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor umum dan terkait dengan faktor-faktor lain khususnya *mood*. Banyak orang menjadi sinis terhadap berbagai objek, orang, atau peristiwa karena kecewa dengan kehidupannya. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan hidup tinggi lebih besar kemungkinannya untuk menilai berbagai hal secara positif.

Di samping faktor-faktor internal tersebut, faktor-faktor eksternal, khususnya faktor-faktor sosial ikut berpengaruh terhadap penilaian. Dalam psikologi sosial pengaruh eksternal ini bisa mikro atau individual sifatnya (Cialdini, 1994) ataupun yang lebih makro (Turner, 1991). Beberapa pengaruh eksternal tersebut dijelaskan di bawah ini.

1. Hubungan resiprokal. Penilaian sosial selalu menyangkut orang lain. Oleh karena itu, penilai tidak bisa sepenuhnya mengendalikan penilaian berdasarkan kemauan atau kriteria yang dibuatnya. Proses saling pengaruh antara penilai dengan yang dinilai tidak bisa dihindarkan. Makin memuaskan hubungan timbal balik tersebut, makin favorabel yang diberikan pada pihak yang dinilai.
2. Otoritas. Adanya struktur sosial menyebabkan seseorang kadang-kadang harus berada di bawah kekuasaan orang lain. Bila demikian keadaannya, orang tersebut sering menjadi tidak bebas untuk menilai. Ia kadang-kadang harus menilai sesuai dengan kemauan atasannya. Otoritas tidak sebatas itu saja. Peraturan dan norma-norma sosial juga mengharuskan orang untuk berperilaku, termasuk menilai, sesuai dengan peraturan atau norma tersebut. Dengan demikian, kehidupan sosial seseorang memiliki keterbatasan dalam

menilai sehingga dalam melakukan penilaian dia dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan tersebut.

3. Kelangkaan. Orang sering terpaksa menilai sesuatu secara positif karena terbatasnya pilihan. Istilah 'terbaik di antara yang jelek' mengindikasikan bahwa penilaian tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Apabila hal ini dibarengi dengan keinginan untuk memilikinya, kelangkaan tersebut lebih besar lagi pengaruhnya. Di sini penilai mulai takut apabila menilainya negatif maka orang lain yang menilai positif akan memilikinya.
4. Minoritas. Minoritas dalam psikologi sosial mendapatkan sorotan yang besar karena memiliki kekuatan tersendiri. Nilai-nilai kemanusiaan mengharuskan orang harus menghormati minoritas. Di samping itu, minoritas memberikan warna lain pada konteks sosial. Homogenitas akan mengarahkan pada kesulitan untuk melakukan penilaian.
5. Mayoritas. Banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan peran mayoritas dalam mempengaruhi individu, termasuk dalam proses penilaian. Penilai sering harus mengikuti pendapat mayoritas karena berbagai alasan seperti agar diterima sebagai anggota kelompok dan mencari perlindungan pada kelompok mayoritas.

Teori-teori tentang penilaian keadilan terkait erat dengan penjelasan tentang proses penilaian seperti dipaparkan di atas. Di bawah ini secara rinci dikemukakan teori-teori psikologi yang khusus menyoroti penilaian keadilan. Dari sekian banyak teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan, empat di antaranya dipilih di sini dengan alasan keempatnya merupakan penjelasan yang cukup teruji melalui berbagai penelitian, yaitu Teori Perbandingan Sosial, Teori Referensi Kognisi, Teori Heuristik Penilaian Keadilan, dan Teori Atribusi.

3. Teori Perbandingan Sosial

Pada proses pertukaran, penilaian keadilan lebih mudah dilakukan. Pertukaran dapat dikatakan adil bila kesepakatan untuk memberi dan menerima antara dua pihak terjadi (Komter, 1996). Namun, hal ini pun belum cukup untuk dinilai sebagai adil atau tidak. Seperti disebutkan pada bagian pembahasan tentang proses penilaian secara umum, harga barang yang terlalu mahal bagi seseorang barangkali akan dikatakan tidak adil dalam proses jual beli. Di sini harus ada perbandingan untuk mengatakan bahwa harga barang tersebut mahal sekali. Bila ternyata demikian, barulah dapat dikatakan bahwa harga mahal dan proses pertukaran itu tidak adil.

Prinsip keadilan proporsional (*equity theory*) mengandung unsur pertukaran karena apa yang diperoleh akan sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Menariknya dari prinsip ini adalah adanya perbandingan sosial sehingga yang diterima seseorang sebanding (proporsional) dengan yang diterima orang lain. Kombinasi kriteria pertukaran dan perbandingan sosial menelorkan formulasi penilaian keadilan yang cukup memadai. Sayangnya, keadilan yang dibicarakan di sini tidak sebatas pada keadilan distributif dengan formulasi proporsional seperti dijelaskan. Di samping itu, dalam keadilan distributif masukan atau sumbangan juga sering tidak teramati (ini pula sebabnya hingga tidak disebut keadilan komutatif). Oleh karena itu, kriteria yang digunakan adalah perbandingan sosial seperti yang dijelaskan berikut ini.

Keadilan akan sangat sulit didefinisikan tanpa ada konteks sosial yang jelas. Oleh karena itu, ada yang menyatakan bahwa pembicaraan keadilan selalu dimaksudkan pada keadilan sosial. Seseorang bisa saja mengatakan, "Saya tidak adil terhadap diri saya sendiri", tetapi orang tersebut tetap menggunakan kriteria untuk menilai perlakuan terhadap dirinya sendiri. Cara yang paling mudah untuk itu adalah membandingkan dengan orang lain sebagai referensi. Pembanding bisa orang yang seajar, lebih tinggi, atau lebih rendah dalam hal kemampuan, usaha,

atau hasilnya. Inilah salah satu argumen penting bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial.

Penggunaan perbandingan dengan orang lain dalam menilai keadilan banyak digunakan, terutama, untuk keadilan distributif. Prinsip kesetaraan, proporsional, dan kebutuhan dalam penilaian keadilan distributif sarat dengan perbandingan sosial. Intensitas perbandingan sosial pada setiap prinsip itu berbeda-beda. Di antara ketiganya, prinsip proporsional dianggap paling rasional dan di dalamnya mengandung unsur perbandingan sosial yang paling kompleks.

Salah satu pengembangan teori perbandingan sosial yang digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan dikemukakan oleh Master dan Keil (1987). Menurut mereka, untuk menilai keadilan diperlukan dua informasi penting, yaitu fokus perbandingan dan unit perbandingan (mereka menyebutnya *classes*). Fokus perbandingan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fokus informasi-informasi subjektif dan objektif. Unit perbandingan terdiri dari tiga, yaitu personal, sosial, dan standar referensi.

Dalam melakukan penilaian keadilan dengan cara perbandingan sosial pada umumnya orang menggunakan salah satu fokus. Dalam realitas masih mungkin terjadi perbandingan antara hal yang subjektif dengan hal yang objektif, tetapi orang yang melakukannya merasa membandingkan untuk satu fokus saja. Misalnya, mobil milik A yang mahal itu tidak ada artinya dibandingkan dengan keseriusan B dalam bekerja. Penilaian seperti ini adalah hal yang tidak lumrah, tetapi barangkali yang dimaksudkan oleh penilai adalah ketidakseriusan A dalam bekerja sangat jelek. Penilai mungkin juga berharap bahwa A akan bekerja jauh lebih serius sehingga atribut subjektifnya sesuai dengan atribut objektifnya (memiliki mobil mahal).

Berbeda dengan fokus perbandingan, unit perbandingan bisa diperbandingkan satu dengan lainnya secara bebas. Antara setiap unit yang sama dan antarunit yang berbeda dapat dibandingkan. Personel dapat dibandingkan

dengan personel lain, kelompok sosial, dan standar referensi. Kelompok sosial dapat dibandingkan dengan personel, kelompok sosial lain, standar referensi, dan seterusnya. Secara umum fokus perbandingan dapat berupa baik hal-hal yang objektif seperti jumlah uang yang dimiliki oleh dua orang maupun yang subjektif seperti ketajaman opini antara dua orang ahli. Namun, untuk perbandingan yang melibatkan standar referensi akan mengalami kesulitan membandingkan fokus yang bersifat subjektif.

Perbandingan sosial tidak terbatas pada perbandingan antara dua pihak. Perbandingan dapat melibatkan lebih dari dua pihak sekaligus (perbandingan ganda). Perbandingan sosial juga menyangkut dimensi waktu. Dengan memperhatikan dimensi waktu, perbandingan bahkan bisa dilakukan antarsatu pihak, tetapi berbeda waktu. Mungkin juga terjadi perbandingan ganda dengan satu unit yang sama, tetapi untuk beberapa periode atau antarwaktu yang berbeda-beda.

Salah satu dimensi penting dari perbandingan sosial yang berkaitan erat dengan penilaian keadilan adalah hasil atau akibat dari perbandingan sosial. Secara umum perbandingan sosial akan mengarah pada kesimpulan bahwa di sana terdapat kesamaan atau perbedaan. Di samping itu, hasil perbandingan mungkin juga mengarah pada penilaian positif atau negatif. Hasil-hasil penilaian ini tidak hanya berhenti pada suatu kesimpulan tertentu, misalnya tidak ada perbedaan, tetapi lebih jauh lagi akan membawa pengaruh pada berbagai hal. Secara psikologis akibat perbandingan sosial akan mempengaruhi kognisi, afeksi, dan perilaku yang melakukannya (Master & Keil, 1987). Hasil-hasil dan dampak perbandingan sosial inilah yang akan tertuang dalam penilaian keadilan. Hasil-hasil perbandingan sosial yang menunjukkan ketidakadilan atau negatif cenderung mengarah pada penilaian ketidakadilan. Hasil-hasil yang menunjukkan kesamaan atau positif mendorong orang untuk menilainya sebagai suatu keadilan. Meskipun demikian, hasil-hasil yang positif sekalipun mungkin dapat mengarah

pada penilaian ketidakadilan bila berdampak negatif pada kognisi, afeksi, atau perilaku orang yang melakukan perbandingan sosial. Misalnya, kenaikan tarif listrik secara proporsional dianggap sebagai formulasi yang paling sesuai karena orang kaya yang memasang listrik dengan daya lebih besar tidak layak mendapat subsidi pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan orang miskin yang hanya memasang daya lebih kecil. Namun, akibat dari perbandingan ini adalah pengeluaran rumah tangga (perilaku) pemasang listrik dengan daya besar meningkat. Maka dari itu, dia menjadi tidak puas (afektif) dengan formulasi perbandingan seperti itu. Oleh karenanya, secara personal orang yang bersangkutan mungkin sekali menilainya sebagai ketidakadilan.

4. Teori Atribusi

Penelitian-penelitian atribusi telah dikenal dalam psikologi sosial sebagai upaya untuk menjelaskan penggunaan informasi yang didapat individu dari lingkungannya untuk menyimpulkan sebab-sebab suatu kejadian. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000). Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab-sebab internal individu yang bersangkutan, dan sebab-sebab eksternal yang menyangkut kejadian atau orang yang dinilai tersebut. Sementara itu, penilaian keadilan, antara lain, menyangkut penilaian terhadap prosedur dan distribusi, yang pertama pada umumnya mempengaruhi yang berikutnya.

Menurut Brockner dan Wiesenfeld (1996) ada dua hal yang menjadi pusat kajian dalam atribusi berkaitan dengan penilaian keadilan, yaitu atribusi hasil dan atribusi perilaku. Menurut kedua ahli ini, ada kecenderungan bahwa orang akan membuat atribusi berdasarkan pada harapannya, terutama harapan akan hasil akhir. Apabila hasil akhir sesuai dengan harapannya, atribusinya positif.

Sebaliknya, bila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya, atribusinya cenderung negatif. Berkaitan dengan penilaian keadilan, teori ini menekankan pentingnya distribusi. Distribusi yang sesuai dengan harapan akan dinilai adil dan distribusi yang tidak sesuai dengan harapan akan dinilai tidak adil. Penilaian keadilan prosedural pada prinsipnya juga sama dengan penilaian keadilan distributif. Bedanya ialah harapan orang akan hasil lebih mudah didefinisikan, sementara harapannya terhadap prosedur tidak mudah didefinisikan. Di samping itu, ada keterkaitan antara dua penilaian keadilan ini. Ketika prosedur dan distribusi dinilai adil dan ketika keduanya sama-sama dinilai tidak adil, tidak ada masalah yang berarti. Masalahnya akan muncul bila ada ketidaksejajaran antara keduanya. Meskipun demikian, menurut teori ini individu pada umumnya memandang hasil lebih penting dibandingkan dengan prosedur. Hasil penelitian Schroth dan Shah (2000) menunjukkan bahwa informasi tentang hasil mempengaruhi kesimpulan akan prosedur. Apabila hasilnya mengecewakan, prosedurnya akan dinilai tidak adil meskipun secara objektif prosedur tersebut sebenarnya adil. Sebaliknya, ketika hasilnya memuaskan, prosedurnya cenderung dinilai adil meskipun sesungguhnya prosedur tersebut tidak adil.

Atribusi kedua berkaitan dengan perilaku penilai. Ada kecenderungan yang berbentuk bias pada individu untuk membuat atribusi terhadap keberhasilan sebagai hal yang ditentukan oleh faktor internal, sementara kegagalan diatribusikan pada faktor eksternal. Dalam kaitannya dengan penilaian keadilan, kecenderungan tersebut mengarah pada penilaian bahwa perolehan dari pembagian dapat dianggap tidak terkait dengan prosedur yang mendahuluinya. Maksudnya, ketika seseorang memperoleh hasil yang besar, yang diasosiasikan sebagai keberhasilan, hal itu cenderung diatribusikan pada perilakunya. Sebaliknya, hasil yang rendah yang berasosiasi dengan kegagalan dinilai merupakan akibat dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini, antara lain, adalah prosedur yang mendahului distribusi. Oleh karenanya, menurut teori ini distribusi

yang dinilai tidak adil dapat menyebabkan penilaian tidak adil pula terhadap prosedurnya. Implikasinya ialah bila distribusi dinilai tidak adil, prosedur yang adil cenderung dinilai tidak adil. Bila distribusi tidak adil sementara prosedurnya tidak adil, prosedur yang tidak adil tersebut merupakan justifikasi bahwa diri orang yang bersangkutan bukan penyebabnya. Bias *self serving* seperti ini merupakan bagian dari upaya individu untuk melindungi egonya sekaligus merupakan kecenderungan pada proses atribusi yang memfokuskan pada perilaku dan kurang memperhatikan konteksnya (Schroth & Shah, 2000).

Teori atribusi tentang penilaian keadilan lebih dekat dengan model penilaian keadilan yang beorientasi pada kepentingan pribadi dan cenderung berseberangan dengan model nilai-nilai kelompok (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000). Meskipun teori ini diakui sebagai teori yang banyak membantu untuk memahami perilaku sosial, pendekatannya sangat individualistis. Para ahli juga mengakui bahwa untuk mengaplikasikan teori ini dalam memahami penilaian keadilan disarankan untuk mengkaji berbagai bias yang potensial muncul dalam atribusi (Fiske & Taylor, 1991).

5. Teori Referensi Kognisi

Berbeda dengan pandangan terdahulu, Teori Referensi Kognisi (*Referent Cognition Theory* atau sering disingkat RCT) yang dikemukakan Robert Folger (1987; lihat juga Folger dkk., 1983; Mark & Folger, 1984; Skarlicki & Folger, 1997; Van den Bos & Van Prooijen, 2000) lebih spesifik mengemukakan penilaian keadilan karena secara khusus pula dia mengaitkannya dengan deprivasi relatif. Apabila penilaian berdasar proporsi dan perbandingan berkaitan dengan keadilan distributif, pendapat Folger lebih spesifik lagi, yaitu reaksi terhadap keadilan distributif. Meskipun demikian, secara umum teori ini sangat bermanfaat untuk memahami penilaian keadilan.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan referensi kognisi adalah simulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa atau keadaan yang sesungguhnya ia alami. Menurut teori ini, penilaian keadilan didasarkan pada proses kognitif yang disebut simulasi heuristik, yaitu proses imajinatif tentang berbagai pencapaian yang mungkin didapat. Asumsinya ialah orang melakukan analisis kognitif dengan menggunakan model yang sudah ada dan orang tersebut tinggal mengujinya. Proses pengujian ini adalah simulasi seperti disebutkan di atas. Untuk melalui proses ini, ada tiga hal penting yang terjadi seperti dijelaskan di bawah ini.

Pertama adalah referensi hasil. Konsep ini diartikan sebagai tingkat hasil yang diperoleh seseorang dalam melakukan simulasi kognitif. Ada dua hasil yang dimaksudkan di sini, yaitu imajinatif dan nyata. Referensi hasil dikatakan tinggi bila perolehan yang dibayangkan lebih besar dibandingkan dengan perolehan yang senyatanya. Sebaliknya, referensi hasil dikatakan rendah bila perolehan yang dibayangkan sama atau lebih rendah daripada perolehan yang senyatanya. Dari perbandingan ini mulai bisa dideteksi bahwa referensi hasil yang rendah akan cenderung mengarah pada penilaian adil, sedangkan referensi hasil yang tinggi cenderung mengarah pada penilaian tidak adil. Teori ini ternyata tidak hanya menggunakan konsep ini dalam menilai keadilan. Dua hal lagi secara bersama harus ada dalam proses yang disebut referensi kognisi.

Hal kedua yang menjadi bagian penting dari teori referensi kognisi adalah justifikasi. Konsep ini menekankan pada pentingnya peran peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perolehan imajinatif (referensi hasil) dan perolehan nyata. Justifikasi didefinisikan oleh teori ini sebagai kesesuaian, penerimaan secara moral, atau hubungan yang selaras antara dua hal (Mark & Folger, 1984). Justifikasi tinggi akan muncul bila penyebab hasil nyata secara moral sama atau lebih tinggi (dapat diterima) dibandingkan dengan penyebab bayangan. Sebaliknya, justifikasi yang rendah terjadi bila penyebab hasil nyata secara moral

lebih sulit diterima dibandingkan dengan penyebab imaginatif. Keakuratan justifikasi rendah atau tinggi ini tergantung pada aturan yang ada. Apabila semua aturan secara rinci dan jelas tersurat (eksplisit), justifikasi akan lebih akurat. Sebaliknya, bila aturan yang ada lebih implisit sifatnya, justifikasi bisa menjadi kurang akurat.

Unsur penting ketiga dari teori ini disebut peluang. Konsep ini dikemukakan dengan anggapan bahwa tidaklah cukup seseorang melakukan penilaian berdasarkan apa yang diperoleh sekarang. Kemungkinan perolehan pada masa yang akan datang dinilai tidak kalah pentingnya. Peluang diartikan sebagai prognosa tentang hasil yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang. Peluang yang rendah terjadi bila hasil yang diharapkan diterima pada masa mendatang sama atau lebih rendah daripada yang diperoleh sekarang. Sebaliknya, peluang dikatakan tinggi bila hasil yang diharapkan diterima pada masa mendatang lebih tinggi daripada yang diperoleh sekarang.

Dari ketiga unsur itu dapat diprediksi apakah seseorang cenderung akan menilai adil atau cenderung menilai tidak adil. Penilaian tidak adil dapat diprediksi akan muncul bila referensi hasil tinggi, justifikasi rendah, dan peluang juga rendah. Sebaliknya, bila referensi hasil rendah, justifikasi tinggi, dan peluang tinggi, kemungkinan seseorang menilai adil adalah paling tinggi. Penilaian keadilan mungkin akan bervariasi bila kombinasi dari ketiga unsur dimaksud berbeda dengan dua kombinasi di atas. Sayangnya, teori ini tidak secara eksplisit membuat model penilaian keadilan dari matriks kombinasi ketiganya, yang justru dikemukakan adalah tipe-tipe reaksi sesudah penilaian (Mark & Folger, 1984). Hal ini bisa dimengerti karena, seperti dikemukakan sebelumnya, teori ini secara spesifik menjelaskan deprivasi relatif, bukan teori penilaian keadilan yang lebih luas.

6. Teori Heuristik Penilaian Keadilan

Seperti Teori Referensi Kognisi yang tidak puas dengan Teori Perbandingan Sosial karena memerlukan informasi tentang pihak-pihak lain sebagai pembanding, Teori Heuristik Penilaian Keadilan menganggap bahwa Teori Perbandingan Sosial tidak selalu siap diaplikasikan dalam berbagai keadaan. Teori Heuristik Penilaian Keadilan yang idenya dikemukakan oleh Alland Lind dan dikembangkan oleh Kees Van den Bos dan kawan-kawan (Van den Bos dkk., 1997a, 1997b, 1999) mencari penjelasan tentang penilaian keadilan yang lebih mudah diterapkan dalam berbagai keadaan.

Teori Heuristik Penilaian Keadilan sepenuhnya mengkaji proses kognitif dalam menilai keadilan. Teori ini mengidentifikasi tiga tahap proses kognitif yang masing-masing membicarakan satu fokus perhatian. Pada tiap-tiap tahap tersebut, konsep-konsep keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas memegang peran penting. Tahap pertama disebut sebagai tahap prapembentukan. Tahap kedua disebut tahap pembentukan. Tahap terakhir disebut tahap pascapembentukan.

Isu pokok pada tahap prapenilaian atau isu pentingnya adalah mengapa dan kapan orang peduli dengan keadilan. Seiring dengan isu ini pertanyaan spesifik pada tahap ini adalah apakah seseorang mulai menilai keadilan. Menurut teori ini orang mulai membutuhkan penilaian keadilan ketika mereka peduli dengan problem yang berkaitan dengan saling ketergantungan sosial. Problem relasi sosial ini disebut-sebut sebagai salah satu masalah sosial yang fundamental (Lind, 1995). Secara lebih spesifik masalah yang dimaksud menyangkut eksploitasi terhadap seseorang di dalam kelompok sosial dan eksklusi seseorang dari suatu kelompok. Aspek yang paling berperan di sini adalah otoritas sebab otoritas inilah yang menentukan seseorang dapat atau tidak dapat tereksplorasi atau dikeluarkan. Orang-orang dalam kelompok selalu memperhatikan bagaimana otoritas dapat menjamin posisi mereka dalam kelompok. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, individu akan mencari informasi dan membentuk

atau mendapatkan kesan tentang keterjaminan dari otoritas itu. Dari hasil penelitian (Van den Bos dkk, 1998a) ditunjukkan bahwa informasi yang diperoleh akan menjadi lebih penting bagi individu yang bersangkutan bila otoritas ternyata tidak dapat memberikan jaminan atau tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang mulai peduli dengan keadilan ketika mereka mencari kepastian tentang posisinya dalam kelompok. Bersamaan dengan proses ini tampak pula bahwa orang peduli dengan keadilan karena mereka mencari kepastian tentang jaminan dirinya akan dieksploitasi atau dikeluarkan dari kelompoknya.

Pada tahap kedua, yaitu proses pembentukan penilaian keadilan, isu penting yang dikaji adalah perlakuan yang diterima dari otoritas, baik yang menyangkut prosedural maupun distribusi. Untuk mengetahui apakah dirinya diperlakukan adil atau tidak, individu akan mencari informasi yang relevan dengannya. Informasi yang dimaksud pada dasarnya akan digunakan untuk menilai peran dirinya dalam kelompok itu. Informasi itu meliputi indikator tentang keterlibatan dirinya dalam kelompok, terutama yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan penghargaan orang lain terhadap dirinya. Indikator ini berkaitan dengan penilaian keadilan prosedural, tetapi informasi serupa juga dapat diperoleh dalam distribusi. Penelitian Yamagishi (1984) serta Lalonde dan Silverman (1994) menunjukkan bahwa inklusi dan eksklusi merupakan isu yang penting dalam menilai keadilan distribusi. Dengan menggunakan dua konteks, intrakelompok dan antarkelompok, ditemukan perbedaan yang mencolok dalam hal penilaian keadilan sesuai dengan persepsi tentang proses pengambilan keputusan. Pada konteks intrakelompok yang inklusi dan eksklusi menjadi masalah penting dibandingkan dengan dalam konteks antarkelompok, pencarian informasi berperan lebih penting untuk menentukan penilaian keadilan. Senada dengan hasil penelitian ini, penelitian Smith dkk. (1997) menyebutkan bahwa ketika otoritas berasal dari kelompok sendiri, penilaian keadilan lebih penting

dibandingkan dengan bila otoritas yang dimaksud berasal dari pihak luar. Jadi, penilaian keadilan dibentuk berdasarkan berbagai informasi yang ada sesuai dengan tujuan seperti yang diformulasikan pada tahap pertama.

Pada tahap ketiga hal penting yang terjadi adalah penggunaan atau tindak lanjut dari penilaian keadilan. Setelah tahap pascapenilaian ini dimungkinkan terjadi lagi putaran proses penilaian seperti di atas. Menurut teori ini, sekali individu menentukan penilaian maka ia akan menggunakan penilaian ini untuk menginterpretasi berbagai hal yang terkait yang terjadi kemudian dan sebagai dasar untuk bereaksi terhadap stimulus serupa yang datang kemudian. Penilaian yang dibuat akan dijadikan sebagai tolok ukur dan petunjuk untuk hal-hal lain yang datang kemudian. Penilaian yang telah dikemukakan menjadi bagian yang sangat penting dalam proses-proses berikutnya. Penelitian Lind dkk. (1993), misalnya, menunjukkan bahwa penilaian keadilan jauh lebih besar peranannya dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi dalam menerima usul penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena dalam penelitian tersebut penilaian keadilan dipaparkan lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Penelitian ini menunjukkan pentingnya isu keadilan, sekaligus juga menunjukkan adanya pola berpikir secara heuristik.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan dibutuhkan ketika orang peduli dengan problem yang berkaitan dengan hubungan sosial dan proses-proses yang berhubungan dengan identitas sosial. Secara lebih mendasar lagi kedua masalah sosial tersebut berhubungan dengan kepercayaan bahwa tidak ada pihak lain yang berusaha untuk merugikan dan mengeksploitasi ketika terjadi relasi sosial atau menghentikan penilai untuk berhubungan sosial serta mengeluarkannya dari kelompok. Pihak yang dimaksud dapat merugikan, mengeksploitasi, atau mengeluarkan penilai dari kelompok adalah pemegang otoritas seperti pimpinan kelompok, organisasi, dan masyarakat. Orang cenderung memandang keadilan yang diterapkan pemegang kekuasaan sebagai jaminan atas

posisinya dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Teori ini mengemukakan bahwa pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memecahkan ketidakpastian akibat muncul kesan ketidakpercayaan terhadap pemegang kekuasaan adalah dengan membuat penilaian keadilan yang diterapkan. Pada saat itulah orang mulai membentuk penilaian keadilan. Jadi, pembentukan kesan keadilan merupakan substitusi dalam rangka menentukan bisa tidaknya pemegang kekuasaan dipercaya.

Informasi keadilan akan menjadi penting ketika orang merasa tidak yakin apakah pemegang otoritas dapat dipercaya. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Heuristik Penilaian Keadilan menunjukkan bahwa reaksi orang sangat dipengaruhi oleh informasi tentang keadilan prosedural bila mereka tidak tahu apakah pemegang kekuasaan dapat dipercaya atau tidak (Van den Bos dkk., 1997). Sebaliknya, mereka tidak menggunakan informasi tentang keadilan prosedural bila mereka secara eksplisit diberitahu bahwa pemegang kekuasaan bisa atau tidak bisa dipercaya. Dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa ketika orang tidak memiliki arah yang pasti atau informasi yang jelas tentang kepercayaan terhadap orang lain, pada saat itulah orang mulai membentuk penilaian keadilan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa orang peduli dengan keadilan. Disebutkan bahwa orang peduli dengan keadilan karena mereka ingin mengetahui apakah mereka dapat mempercayai orang lain sehingga tidak dirugikan dalam melakukan interaksi sosial.

Bagaimana penilaian keadilan secara kognitif terbentuk? Untuk menjawab pertanyaan itu Teori Heuristik Penilaian Keadilan juga menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu informasi apa yang digunakan untuk membentuk penilaian keadilan. Menurut teori ini, informasi penting yang digunakan untuk menilai keadilan adalah informasi yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi dari kelompok serta informasi tentang penerimaan dan penolakan kelompok terhadap

cara-cara distribusi yang berlaku. Cara yang mudah untuk menilai ini semua adalah dengan menggunakan kategorisasi kelompok sendiri (*ingroup*) dan kelompok lain (*outgroup*). Ada kecenderungan bahwa orang melakukan penilaian keadilan menjadi lebih penting bila pemegang kekuasaan adalah orang dari kelompoknya (*ingroup*) dibandingkan dengan dari kelompok lain (*outgroup*). Bagi penilai, fakta tentang proses akan lebih mudah dinilai dibandingkan dengan fakta tentang hasil karena mencermati proses dengan sendirinya akan memunculkan pemahaman yang secara kognitif mudah dicerna dan direspons dalam bentuk penilaian. Sejalan dengan ini, Teori Heuristik Penilaian Keadilan menyimpulkan bahwa penilaian terhadap keadilan prosedural lebih mudah dibandingkan dengan penilaian terhadap keadilan distributif.

Penilaian keadilan bukanlah fase akhir sebagai respons atas keadaan di sekitar orang yang bersangkutan. Penilaian ini sering berlanjut dengan proses lain. Oleh karenanya, menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan penilaian keadilan setidak-tidaknya memiliki dua peran. Pertama, penilaian yang telah dibuat dapat digunakan sebagai ukuran menilai relasi-relasi sosial yang terjadi sesudahnya, khususnya yang menyangkut pembagian kekuasaan atau kewenangan dengan orang lain. Apabila penilaian menunjukkan ke arah yang adil, orang tersebut akan lebih mudah untuk berinteraksi lebih lanjut. Sebaliknya, apabila penilaian justru mengarah kepada ketidakadilan, orang tersebut akan lebih enggan untuk berinteraksi lebih lanjut. Kedua, penilaian keadilan akan menjadi pedoman untuk menginterpretasi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Artinya, penilaian yang telah terbentuk secara heuristik mengarahkan pada tindakan-tindakan selanjutnya. Hasil penelitian Lind dkk. (1993) menyebutkan bahwa hasil penilaian keadilan ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi dalam hal penerimaan terhadap suatu usulan.

Salah satu hal penting yang dikembangkan oleh teori ini adalah keterkaitan penilaian keadilan prosedural dengan keadilan distributif (Van den Bos, 1996). Isu

ini dikembangkan karena proses penilaian keadilan ternyata tidak sederhana. Setiap prosedur akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, penilaian keadilan distributif (terhadap hasil) akan dipengaruhi oleh penilaian keadilan prosedural. Hal ini adalah sesuatu yang biasa atau normal terjadi. Pada kenyataannya orang bisa saja menilai prosedur tanpa mengetahui hasil atau menilai hasil tanpa mengetahui prosedurnya terlebih dulu. Berangkat dari kenyataan inilah Teori Heuristik Penilaian Keadilan juga menjelaskan hubungan penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif.

Untuk sampai pada kesimpulan yang meyakinkan tentang hubungan kedua penilaian itu, teori ini juga menguji pengaruh prosedur yang adil dan tidak adil serta hasil yang favorabel dan tidak favorabel. Hal ini dilakukan karena ada asumsi bahwa pengaruh keadilan tidak selalu sama (berbanding terbalik) dengan pengaruh ketidakadilan. Disebutkan pula bahwa ketika prosedur sesuai dengan harapan (adil), orang akan cenderung menilai distribusi lebih adil dibandingkan dengan ketika prosedur tersebut tidak adil. Hal ini berlaku ketika prosedur diketahui dan dinilai terlebih dulu daripada distribusinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika prosedur tersebut dinilai tidak adil, pengaruh penilaian ketidakadilan prosedur secara khusus akan lebih besar terhadap penilaian ketidakadilan distribusi dibandingkan dengan terhadap penilaian distribusi yang adil.

Bagaimana hubungan kedua penilaian tersebut bila distribusi diketahui terlebih dulu dibandingkan dengan prosedurnya? Teori ini menyatakan bahwa secara umum distribusi yang favorabel akan berpengaruh positif terhadap penilaian keadilan distributif. Ketika distribusi diketahui lebih dulu dan distribusi itu favorabel, ada kecenderungan untuk menilai keadilan distributif dan kemudian menilai keadilan prosedural lebih tinggi daripada ketika distribusi tersebut tidak favorabel. Dari urutan penampilan yang berbeda seperti dikemukakan itu dapat disimpulkan bahwa pada urutan yang normal, proses disusul hasil, maka pengaruh penilaian keadilan prosedural berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif

dan ketika hasil diketahui lebih dulu, baik penilaian terhadap keadilan prosedural maupun distributif terpengaruh. Dinamika penilaian keadilan seperti itu telah dibahas dalam uraian tentang Teori Heuristik Penilaian Keadilan.

F. Anteseden Penilaian Keadilan

Seperti dikemukakan, proses penilaian keadilan dapat dikaji berdasar prinsip-prinsip psikologi kognitif. Berikut ini diungkap kembali secara singkat tentang proses kognitif yang dimaksud. Pertama, dalam melakukan penilaian selalu ada proses kognitif seperti umumnya proses persepsi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam proses ini, antara lain, meliputi perhatian, informasi, pengodean, dan penuangan sebagai hasil akhir. Kedua, pada proses seperti ini selalu ada keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah ketersediaan informasi. Sering ditemui bahwa untuk melakukan penilaian dibutuhkan banyak informasi. Kenyataannya justru sering informasi tersebut sangat terbatas jumlah dan kedalamannya. Dalam keadaan yang demikian ini sering terjadi jalan pintas (*shortcut*) proses penilaian. Akibatnya, informasi yang terbatas itu dijadikan bahan penilaian dan dianggap sebagai sumber yang penting. Tentu saja selanjutnya akan ada masalah dalam hal akurasi penilaian. Keterbatasan yang lain sering ditemukan pada kemampuan untuk mengode. Kemampuan indera manusia untuk melakukannya tidak pernah sempurna, sementara gangguan dalam proses itu seperti masuknya informasi lain sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, secara sengaja atau tidak sering terjadi *seleksi* terhadap informasi yang masuk. Di samping itu, dalam proses seperti ini selalu ada pengaruh dari peristiwa atau pengalaman sebelumnya terhadap hasil penilaian. Ketiga, setiap individu memiliki strategi sendiri-sendiri dalam menilai. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah pola berpikir heuristik. Strategi ini pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat penilaian, memaksimalkan informasi yang ada, dan agar lingkungan memberikan kesan baik pada penilai. Keempat, pada proses dan hasil penilaian selalu ada bias. Dalam psikologi sosial

(lihat Brigham, 1991) dikenal berbagai bias dalam menilai. Penilaian keadilan tidak dapat menghindari terjadinya bias-bias tersebut (Stroessner & Heuer, 1996). Dalam bahasa hukum keadaan yang demikian disebut keadilan relatif.

Kesimpulan di atas dapat menimbulkan keraguan terhadap akurasi penilaian keadilan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penilaian tersebut tidak dapat dijadikan pegangan untuk analisis lebih lanjut. Dalam ilmu sosial selalu ada perbedaan data antara nilai-nilai masyarakat, pendapat individu, dan perilaku nyata. Ketiga jenis data itu seharusnya dilihat sebagai data objektif (apa adanya) yang menempel pada objeknya. Artinya, bila norma masyarakat dan perilaku seseorang dianggap sebagai data objektif, penilaian seseorang seharusnya juga dianggap objektif pada tataran orang tersebut. Dengan demikian, penilaian keadilan dalam penelitian ini juga akan disejajarkan dengan data lain. Di sini penilaian keadilan dianggap sebagai teks, sedangkan data lainnya akan dianggap sebagai konteksnya.

1. Anteseden Penilaian Keadilan Prosedural

Pada bagian terdahulu sudah disinggung faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadilan prosedural sesuai dengan model-model yang berkembang. Di sini akan diungkap kembali faktor-faktor tersebut, yang selanjutnya disebut anteseden. Ada dua anteseden pokok dari penilaian keadilan, yaitu kontrol dan penilaian keadilan interaksional. Kontrol dan keadilan tidak akan dibahas panjang karena sebelum ini sudah ada penjelasannya, sementara penilaian keadilan interkasional bahkan telah diuraikan tersendiri secara rinci.

a. Kontrol. Dalam menilai keadilan prosedural, salah satu faktor pengaruhnya adalah interes pribadi. Sejalan dengan bias-bias yang terjadi dalam proses penilaian, kepentingan pribadi juga sering menimbulkan bias dalam penilaian. Sejauh ini dalam psikologi sosial telah dikenal *self serving bias* dan bias egoistik dalam proses atribusi. Penilaian keadilan juga akan cenderung positif

bila sejalan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan atau mendatangkan keuntungan baginya. Jalan untuk mencapainya adalah mempengaruhi atau mengambil peran dalam prosedur yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang ikut mengontrol proses dan isi keputusan pada umumnya akan memberikan penilaian lebih positif dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat (Thibaut & Walker, 1975).

Sudah menjadi sifat manusia bahwa dalam berbagai relasi sosial seseorang berusaha mendapat keuntungan, baik secara materi maupun secara psikis. Teori pertukaran sosial yang dibahas baik dalam psikologi sosial (Thibaut & Kelley, dalam Lind & Tyler, 1988) maupun antropologi (Ekeh, 1974) menjelaskan bahwa pada umumnya orang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan orang lain. Selaras dengan motivasi ini, orang berusaha untuk mencari, mendapatkan, dan memelihara kekuasaan untuk mengontrol yang akan berpengaruh terhadap hasil yang mereka dapatkan dari relasi tersebut. Pada saat yang bersamaan orang juga menyadari bahwa bila setiap orang memiliki kecenderungan yang sama seperti itu, akan terjadi konflik, sementara hubungan sosial yang ada juga harus dijaga. Bila konflik itu benar-benar terjadi, salah satu jalan yang ditempuh adalah melibatkan pihak ketiga. Cara penyelesaian ini dikritik oleh Lind & Tyler (1988) yang beranggapan bahwa konflik itu tidak perlu terjadi bila ada nilai-nilai bersama yang dijunjung dalam suatu relasi sosial. Meskipun demikian, upaya untuk mengontrol itu diakui keberadaannya dan harus dipertimbangkan sebagai suatu variabel yang penting (Tyler, 1989, 1994).

Pandangan tentang posisi kontrol seperti di atas disebut orientasi pada hasil, sementara pendapat lain menyatakan bahwa kontrol juga diperlukan sebagai orientasi pada prosedur (Lind & Tyler, 1988). Pandangan yang kedua ini berkeyakinan bahwa hanya ketika kontrol tinggi, prosedur yang adil dapat

tercapai. Artinya, kontrol diperlukan untuk prosedur itu sendiri, tidak harus dikaitkan dengan kemungkinan hasil yang diperoleh.

b. Keadilan interaksional. Faktor ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai kelompok. Berbeda dengan orientasi kepentingan pribadi, banyak individu yang mempertimbangan kebersamaan sebagai bahan penilaian. Artinya, suatu prosedur akan dinilai adil bila pertimbangan kebersamaan diutamakan. Batas kebersamaan yang dimaksud adalah kelompok. Oleh karena itu, disebut juga sebagai nilai-nilai kelompok (Lind & Tyler, 1988). Nilai-nilai kelompok yang dimaksud meliputi penghargaan terhadap sesama, kepercayaan, dan ketidakberpihakan satu orang kepada orang atau kelompok lain. Ketiganya adalah bagian dari keadilan interaksional.

2. Anteseden Penilaian Keadilan Distributif

Banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam menilai keadilan distributif. Pada bagian ini banyak dikaji faktor-faktor individu yang berpengaruh. Secara garis besar faktor individu yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi faktor psikologis dan nonpsikologis. Meskipun keduanya dibedakan, dalam kenyataan keduanya saling berkaitan dalam mempengaruhi penilaian keadilan.

a. Gender. Masih ditemukan adanya tindakan yang membedakan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam distribusi. Tindakan tersebut pada umumnya menguntungkan laki-laki. Dengan demikian, ada ketidakadilan distributif antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah berjalan sangat lama dan masih terus berjalan. Laki-laki dan perempuan secara sadar atau tidak banyak yang menerima, mengadopsi, dan melakukan hal itu. Ketidakadilan semacam ini, anehnya, justru dinilai sebagai keadilan. Buktinya, beberapa penelitian (lihat Crosby, 1982; Feather, 1990; Jackson dkk., 1992; Witt & Nye, 1992) menemukan bahwa perempuan lebih mudah puas dengan distribusi yang diterima. Mereka lebih mudah pula untuk memberikan penilaian yang adil. Para peneliti itu tampak

kurang memperhatikan konteks yang lebih luas sehingga, sekali lagi, ketidakadilan dikatakan keadilan. Dengan memperhatikan konteks yang lebih luas, termasuk ideologi kesetaraan gender, mereka dapat meluruskan atau menjelaskan *false consciousness* seperti itu.

b. Situasi. Penilaian keadilan juga sangat dipengaruhi oleh konteks atau situasi. Dalam hal ini konteks yang paling relevan adalah tempat kerja orang yang bersangkutan dan suasana saat itu (Platow dkk., 1995). Di bagian terdahulu telah dibicarakan tentang sistem dan prosedur, tetapi ada hal lain lagi yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan distribusi. Di luar itu, berbagai kondisi kerja pada akhirnya akan mempengaruhi penilaian karena keadilan dan kepuasan kerja terkait erat.

c. Karakteristik penilai. Karakteristik tertentu dari individu telah terbukti sangat berperan dalam menilai keadilan (Feather, 1990, 1992, 1994; Peterson, 1994; Rasinski, 1987; Rohrbough dkk., 1980). Mereka yang memiliki sifat hedonis, berorientasi politis, dan ingin cepat maju berbeda dalam menilai keadilan bila dibandingkan dengan orang yang prososial dan spiritualitasnya tinggi. Kelompok pertama biasanya kurang setuju dengan prinsip distribusi ekuil, sementara kelompok kedua justru sebaliknya. Hasil-hasil penelitian tersebut tidak berbeda jauh dengan teori penilaian keadilan prosedural yang menekankan pada kepentingan pribadi pada satu sisi dan nilai-nilai kelompok pada sisi yang lain.

d. Harapan. Faktor psikologis lain yang banyak berkaitan dengan penilaian keadilan distributif adalah harapan. Seperti sudah diketahui, harapan banyak terkait dengan aspek lain seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja. Kesesuaian dan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, misalnya dalam hal imbalan, jelas mempunyai pengaruh terhadap penilaian keadilan. Makin sesuai kenyataan dengan harapan maka makin dirasakan adanya keadilan (Bond & Leung, 1992; Van den Bos dkk., 1998; Tyler, 1994). Makin tinggi pendidikan dan makin banyak pengalaman seseorang akan makin tinggi pula harapannya.

Karenanya, bila mereka mendapatkan upah yang kecil akan merasa diperlakukan tidak adil, sedangkan pengaruh umur terhadap harapan dan penilaian keadilan tidak berbentuk garis lurus. Sampai pada tahap tertentu, hubungan tersebut positif. Setelah seseorang mencapai usia tertentu harapannya akan stabil atau menurun. Karenanya, dalam menilai keadilan juga akan berubah.

Harapan ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Keadilan distributif merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai kesejahteraan. Harapan yang bersifat umum seperti harapan akan tercapainya kesejahteraan dan kedamaian hidup akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Pengaruh tersebut arahnya cenderung negatif karena orang yang terlalu tinggi harapannya, ia menginginkan akan mendapatkan bagian yang besar. Keinginan ini menjadi standar yang tinggi atas distribusi senyatanya. Distribusi yang tidak sesuai dengan standar keinginan itu akan dinilai kurang adil.

Menurut teori harapan dari Fawcett dan de Jong (1981), dikenal dengan *Value-Expectancy Model*, ada pertimbangan-pertimbangan kognitif yang melatarbelakangi perilaku orang yang berupa harapan. Bila dirinci, ada tujuh jenis harapan yang dimaksud. Secara rinci harapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harapan hidup sejahtera. Harapan ini meliputi harapan akan pendapatan yang tinggi dan stabil, jaminan pendapatan pada masa mendatang, dan memiliki akses terhadap berbagai sumber untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
2. Status sosial. Termasuk dalam harapan ini adalah memiliki pekerjaan yang prestisius, terpandang dalam masyarakat, berpendidikan tinggi, dan memiliki pengaruh dalam lingkungannya.
3. Kenyamanan hidup. Kenyamanan yang dimaksud diharapkan datang baik dari lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya. Indikator yang diharapkan, antara lain, adalah rumah yang nyaman, lingkungan tempat

tinggal yang menyenangkan, dan punya waktu luang serta dapat menikmatinya.

4. Stimulasi yang menyenangkan. Beberapa hal yang termasuk dalam harapan ini adalah mengalami dan melakukan hal-hal baru, melihat tempat dan menjumpai orang-orang baru, dapat terus melakukan aktivitas dan memiliki kesibukan yang berarti.
5. Otonomi. Harapan ini meliputi kebebasan pribadi, memiliki privasi, tidak terlalu terikat dengan semua aturan, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
6. Afiliasi. Artinya, orang akan berusaha untuk dapat berafiliasi dengan orang atau kelompok yang diinginkannya dan memiliki keterikatan dengan lingkungan sosialnya.
7. Moralitas. Banyak orang mengharapkan dapat hidup dalam lingkungan yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Di samping itu, orang juga ingin menjaga moralitas yang dipegangnya atau bahkan menyebarkannya bagi orang lain.

Harapan yang bersifat khusus akan menunjuk pada permasalahan atau konteks yang spesifik pada kurun waktu tertentu. Kedua harapan yang sifatnya berbeda tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan keadaannya. Misalnya, pada petani yang sederhana dan hidup di pedesaan akan sulit ditemukan harapan untuk hidup mewah. Pada orang yang telah lanjut usia, harapan akan memperoleh pendidikan formal yang tinggi mungkin tidak cocok bagi mereka dan mereka mengalihkan harapan tersebut untuk anak-anaknya.

e. Kesejahteraan. Kesejahteraan dan harapan menurut model yang dikembangkan oleh Tyler (1994) merupakan bagian dari model yang berorientasi pada sumber daya (*resource-based model*) dalam penilaian keadilan distributif. Para pekerja pada organisasi atau perusahaan kesejahteraan mereka tergantung

pada distribusi sumber daya yang ada. Karenanya, makin tinggi tingkat kesejahteraan yang diperoleh akan mendorong orang untuk menilai distribusi yang ada semakin adil. Pada bagian lain dibahas tentang deprivasi relatif yang sangat erat kaitannya dengan penilaian keadilan distributif serta tingkat kesejahteraan yang didapat.

Secara umum kesejahteraan dapat dicapai bila kebutuhan dasar terpenuhi. Bila kebutuhan-kebutuhan lainnya dapat dipenuhi, tingkat kesejahteraannya makin tinggi. Kesejahteraan yang dimaksud di sini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi tingkatannya dapat dinilai secara psikologis. Dalam literatur sering disebut sebagai kesejahteraan subjektif. Oleh karena itu, orang yang relatif miskin dapat menilai dirinya sejahtera sementara orang yang relatif kaya dapat menilai dirinya tidak sejahtera. Hal ini terjadi karena ada faktor lain yang berpengaruh terhadap penilaian tersebut seperti harapan, tetapi karena secara konseptual keduanya berbeda, di sini juga tetap dipisahkan.

Meskipun secara teoretis kesejahteraan subjektif bisa tidak selaras dengan kondisi objektifnya, secara konsisten hasil-hasil penelitian menunjukkan korelasi keduanya tergolong tinggi (lihat Feist dkk., 1995). Hasil penelitian tersebut memperkuat asumsi bahwa pengukuran kesejahteraan subjektif dapat dijadikan sebagai proksi untuk mengukur kesejahteraan objektif. Lebih penting dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sehingga asumsi-asumsi dasarnya selaras dan konsisten digunakan untuk semua variabel yang dilibatkan.

Banyak indikator kesejahteraan yang dapat dinilai dan menjadi kesejahteraan subjektif. Feist dkk. (1995) membuat beberapa model kesejahteraan subjektif yang terdiri dari beberapa variabel seperti kesehatan, penggunaan waktu, kecukupan uang, gangguan harian yang dirasakan, dan lainnya. Sementara itu, Ryff (1989) mengembangkan variabel kesejahteraan subjektif yang seluruhnya berisi konsep-konsep psikologis seperti penerimaan diri, perkembangan diri, otonomi, cita-cita, dan seterusnya. Dengan menggunakan konsep ini untuk

mengembangkan pemahaman tentang kesejahteraan, Ryff sampai pada salah satu kesimpulan penting yang menyebutkan bahwa konsep-konsep psikologis itu adalah cerminan dari kebahagiaan. Dengan demikian, hasil penelitian yang disebutkan terakhir ini tidak sesuai dengan konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini yang menekankan pada penilaian terhadap indikator kesejahteraan objektif.

Untuk menilai kesejahteraan yang dirasakan oleh individu, penelitian menggunakan indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Indikator tersebut pada dasarnya mengukur kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti konsumsi (pangan), tempat tinggal, pakaian, kesehatan, transportasi, pendidikan anggota keluarga, informasi, rekreasi, dan memberi sumbangan sosial. Kemudian dikembangkan agar sesuai untuk dinilai. Disebutkan oleh Feist dkk. (1995) bahwa ada konsensus umum, bahwa kesejahteraan subjektif mengandung tiga dimensi yaitu perasaan positif, perasaan negatif, dan kepuasan sebagai evaluasi kognitif. Sementara kepuasan akan menjadi satu variabel tersendiri maka penelitian ini mendasarkan pada dua dimensi perasaan itu. Dimensi ini akan ditempatkan pada respons individu. Permasalahannya, kesejahteraan yang dikembangkan di sini berkaitan dengan keberhasilan atau tercapainya kondisi tertentu seperti memenuhi kebutuhan pangan. Agar keduanya dapat digabungkan, dimensi penilaian digeser dari perasaan menjadi penilaian tentang kecukupan. Artinya, perasaan positif akan menjadi penilaian cukup, sementara perasaan negatif menjadi penilaian kurang.

G. Dampak Penilaian Keadilan

Keadilan sering dijadikan sebagai suatu pegangan dalam berbagai bentuknya seperti moralitas, norma, atau peraturan. Pada proses sosial, keadilan bisa menjadi suatu syarat atau keharusan dan, pada sisi lain, keadilan juga bisa menjadi sesuatu yang harus dicapai (tujuan). Kedua sisi keadilan ini berhubungan

erat satu dengan lainnya karena dalam kenyataannya keadilan sulit didapatkan. Seperti dikemukakan pada bagian awal dari disertasi ini, kehidupan dipenuhi oleh ketidakadilan, bukan oleh keadilan. Berangkat dari kenyataan seperti itu pula maka tidak mengherankan bila kajian tentang dampak keadilan dapat dikatakan sangat sedikit, tetapi kajian tentang ketidakadilan dan dampaknya jumlahnya sangat banyak.

Secara esensial tercapainya keadilan adalah sesuatu yang normatif. Oleh karenanya, keadaan yang adil akan berpengaruh besar terhadap terciptanya hubungan sosial yang normatif pula. Hubungan normatif ini digambarkan sebagai hubungan yang serasi dan harmonis. Hubungan sosial yang adil diyakini pula sebagai faktor terbentuknya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Secara psikologis keadilan akan memberikan jaminan atas terciptanya rasa aman (Van den Bos, 2000; Van den Bos & Miedema, 2000). Rasa aman ini sangat penting pada tingkat individu dan pada tingkat komunitas. Berbagai bentuk tindakan sosial yang tergolong melanggar *social order* yang marak akhir-akhir ini adalah akibat kurangnya rasa aman yang dimaksud. Selain itu, rasa keadilan juga terbukti berkaitan dengan produktivitas kerja dan komitmen terhadap perusahaan atau organisasi serta berbagai dampak positif lainnya (Elkins & Philips, 2000; Gilliland, 1994; Greenberg, 1996; Moorman, 1991; Skarlicki & Folger, 1997).

Sebaliknya, ketidakadilan menjadi sebab dari berbagai masalah sosial. Dampak psikologis ketidakadilan telah cukup banyak dikaji. Di antara berbagai kajian tersebut salah satu yang telah menjadi teori tersendiri adalah deprivasi relatif. Dilihat dari sejarah munculnya, istilah ini diambil dari analogi dampak sosial ekonomi ketidakadilan, yaitu kemiskinan (deprivasi) bagi pihak yang diperlakukan tidak adil. Kemiskinan dapat didefinisikan dari dua sisi yaitu absolut dan relatif. Kemiskinan secara ekonomi pada umumnya adalah kemiskinan absolut. Menurut pandangan sosiologis, kemiskinan lebih mudah dipahami bila

membandingkan dengan kondisi atau pihak lain. Hal ini terjadi karena parameter sosial lebih sulit ditetapkan dibandingkan dengan parameter ekonomi.

Psikologi sejalan dengan sosiologi dalam upaya memahami kemiskinan, yaitu menekankan pada kemiskinan atau deprivasi relatif. Bedanya ialah sosiologi menggunakan perbandingan dengan pihak lain (eksternal), sedangkan psikologi lebih menekankan pada perbandingan internal. Oleh karena itu, dalam psikologi hakikat dari deprivasi relatif adalah kondisi psikologis akibat dari tidak terpenuhinya harapan yang terjadi dari serangkaian kejadian. Hasil revidi Crosby (1982, lihat juga Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Gonzales-Intal, 1991; Walker & Pettigrew, 1984) menemukan ada 5 teori deprivasi relatif yang berbeda secara konseptual.

Pertama, Aberle menyatakan bahwa deprivasi relatif adalah kesenjangan antara harapan (*legitimate expectation*) dengan kenyataan. Definisi ini menimbulkan perdebatan, terutama dalam memahami *legitimate expectation*. Pengertiannya bisa harapan yang didasarkan pada kelompok referensi atau harapan orang pada umumnya, tetapi ada juga yang mengartikan sebagai *harapan yang biasanya* dalam arti harapan seperti *yang sebelumnya*. Lebih detail lagi Davis membedakan kelompok referensi, yang diartikan sebagai kelompok sendiri (*in-group*), dengan kelompok lain (*out-group*). Dijelaskan lebih lanjut bahwa deprivasi relatif terjadi bila pembandingnya adalah anggota kelompoknya. Sementara itu, bila pembandingnya anggota kelompok lain, yang terjadi adalah inferioritas sosial. Baik deprivasi relatif maupun kemiskinan sosial terjadi bila kondisinya lebih jelek daripada pembandingnya. Bila kondisinya lebih baik dan pembandingnya adalah kelompok sendiri, terjadi gratifikasi (kepuasan), sedangkan bila pembandingnya kelompok lain, akan muncul perasaan superioritas sosial.

Kedua, Runciman memformulasikan munculnya deprivasi relatif bila seseorang (1) tidak mempunyai X, (2) dia tahu orang lain mempunyai X, (3) dia

menginginkan X, (4) dia merasa layak dan mampu memiliki X. Menurut Runciman, deprivasi ada dua, yaitu deprivasi egoistikal dan deprivasi fraternal. Deprivasi egoistikal terjadi bila seseorang merasa kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan orang lain dalam kelompoknya. Sementara deprivasi fraternal terjadi bila seseorang menilai kondisi kelompoknya lebih jelek dibandingkan dengan kelompok lain. Ada kemungkinan bahwa seseorang merasakan keduanya sehingga dia mengalami deprivasi ganda.

Ketiga, Ted Robert Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai perasaan yang muncul akibat terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Secara matematis dia memformulasikannya sebagai berikut.

$$RD = \frac{Ve - Vc}{Ve}$$

RD : *relative deprivation*

Ve : *value expectations*

Vc : *value capabilities*

Dijelaskan lebih lanjut, menurut Gurr ada tiga bentuk deprivasi. Pertama, deprivasi penurunan (*decremental deprivation*) terjadi bila nilai-nilai harapan kelompok tidak berubah, tetapi kemampuan kelompok menurun. Kedua, deprivasi aspirasional yang akan muncul bila kemampuan kelompok tidak berubah, tetapi harapan kelompok meningkat. Ketiga, deprivasi progresif dapat terjadi bila kedua unsurnya berubah, yaitu terjadi penurunan kemampuan sementara harapannya justru meningkat. Dari penjelasan ini tampak bahwa model yang dikemukakan Gurr tampak lebih dinamis dibandingkan dengan yang lain.

Keempat, menurut Robin Williams deprivasi relatif terjadi bila ada diskrepansi atau kesenjangan antara apa yang dimiliki seseorang dengan apa yang diinginkan. Meskipun demikian, William membedakannya dengan kekecewaan

yang disebabkan tidak terwujudnya harapan, bukan keinginan. Di sini William juga memasukkan pentingnya perbandingan sosial sehingga muncul deprivasi. Oleh karena itu, ia mencontohkan bahwa wujud dari deprivasi yang paling kentara adalah protes sosial. Ditambahkan lagi bahwa menurutnya deprivasi lebih banyak terjadi secara kolektif daripada individual.

Kelima, Faye Crosby sendiri menyetarakan deprivasi dengan perasaan kesal dan perasaan tidak puas yang bentuk spesifik darinya adalah rasa marah. Secara khusus, Crosby menekankan kajiannya pada deprivasi egoistikal seperti yang dikemukakan Runciman. Menurut Crosby, deprivasi egoistikal terhadap objek X akan terjadi bila lima prasyarat berikut terpenuhi: (1) orang yang tidak memiliki X menginginkan X itu; (2) orang tersebut melihat ada orang lain yang punya X; (3) menjunjung tinggi X; (4) menurutnya, dia layak mendapatkan X; (5) dia tidak merasa bersalah hingga menyebabkan gagal punya X. Perasaan deprivasi akan makin besar bila pengalaman gagal menggapai X, terutama pada masa lalu, menyebabkan timbulnya rasa kehilangan yang besar. Di samping itu, bila makin banyak orang yang memiliki X serta makin tinggi tuntutan lingkungannya, akan makin besar juga deprivasinya. Satu catatan yang menarik dari pendapat Crosby adalah tekanan bahwa tidak selamanya deprivasi berakibat negatif, bisa juga positif. Sementara para ahli yang lain (Gonzales-Intal, 1991; Mark & Folger, 1984) pada umumnya menyatakan bahwa deprivasi berdampak negatif dan mendorong tindakan destruktif.

Seperti dikatakan sebelumnya, deprivasi relatif pada dasarnya merupakan kondisi psikologis yang tidak menguntungkan. Memahami deprivasi seperti itu akan lebih mudah dilihat dari simtom atau gejala psikologisnya dibandingkan dengan melihat formulasi rumit seperti yang dijelaskan oleh para ahli. Beberapa ahli (Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Gonzales-Intal, 1991; Folger, Rosenfield & Robinson 1983; Mark & Folger, 1984; Walker & Pettigrew, 1984) setuju bila deprivasi diukur dari kondisi psikologis seperti marah, tidak puas,

cemburu, putus asa, tidak bahagia, dan lain-lain. Namun, mereka memberikan catatan bahwa aspek psikologis tersebut dapat disebut deprivasi bila terkait dengan keadilan.

Secara operasional penelitian tentang dampak ketidakadilan lebih banyak terfokus pada kepuasan terhadap perlakuan yang dialami berkaitan dengan suatu relasi sosial (lihat Greenberg, 1996; Van den Bosch dkk., 1998). Kepuasan terhadap perlakuan tentu berkaitan juga dengan prosedur dan distribusinya. Tampaknya kepuasan ini secara konseptual cukup mewakili berbagai indikator deprivasi relatif dan secara metodologis cukup memadai dan mudah dioperasionalkan sebagai variabel untuk mengukur dampak keadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dampak keadilan akan diukur melalui kepuasan terhadap keadaan yang dihadapi oleh pihak yang bersangkutan.

H. Integrasi Model Penilaian Keadilan

1. Model Umum

Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan tentang anteseden penilaian keadilan prosedural dan anteseden penilaian keadilan distributif, keterkaitan antara kedua penilaian keadilan, dan dampaknya. Secara teoretis semua faktor yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dapat berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Sebaliknya, berbagai faktor pengaruh keadilan distributif juga bisa berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural (lihat Tyler, 1994). Meskipun demikian, ada perbedaan kekuatan pengaruh dari tiap-tiap anteseden bila disilangkan ke penilaian keadilan yang lain. Sementara itu, efek dari keadilan prosedural maupun distributif pada dasarnya sama, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan (Greenberg, 1996; Tyler, 1994). Dengan demikian, dapat dibuat suatu model integratif tentang penilaian keadilan. Untuk membentuk model yang integratif ini, ada satu masalah yang belum banyak dibicarakan

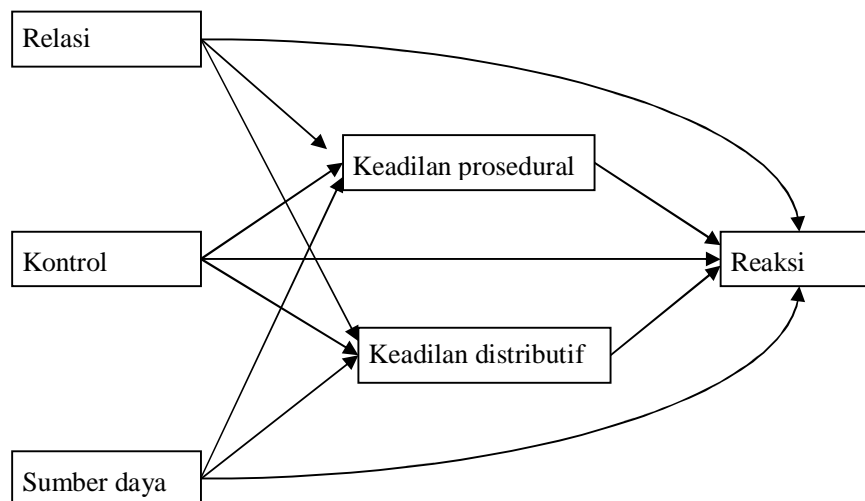
sebelumnya yaitu keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dulu keterkaitan antara keduanya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada tiga pola keterkaitan antara keadilan prosedural dengan distributif. Pertama, ini paling banyak diyakini, keadilan prosedural berperan menjelaskan keadilan distributif (Brockner dkk., 1994; Greenberg, 1987; Gilliland, 1994; Moorman, 1991). Diasumsikan bahwa dalam prosedur yang adil maka ada pembagian (*share*) untuk mengontrol prosedur tersebut. Kontrol yang dimaksudkan di sini ada dua bentuk yaitu kontrol terhadap masukan dan kontrol terhadap keputusan. Dalam sistem peradilan, misalnya, prosedurnya dikatakan adil bila penuntut dan pembela secara seimbang mempunyai kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan (masukan). Sementara itu, pada proses pengadilan pembela dan penuntut tidak memiliki kontrol langsung terhadap keputusan. Kontrol yang dimaksudkan memang masih ada. Bentuknya adalah naik banding. Berbeda dengan keadilan dalam organisasi, kontrol terhadap keputusan di sini biasanya berbentuk keterlibatan beberapa pihak dalam mengambil keputusan secara langsung.

Kedua, keadilan prosedural tidak memiliki peran yang berarti terhadap keadilan distributif. Ketika hasil telah memuaskan, orang biasanya tidak lagi mempermasalahkan prosedur, bahkan ditemukan bahwa dalam keadaan demikian penilaian terhadap keadilan distributif dapat berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural (Greenberg, 1996). Pendapat kedua ini tidak sepenuhnya menolak pendapat pertama. Hal ini terjadi karena kepentingan pribadi berpengaruh besar terhadap penilaian keadilan (Burgoyne dkk., 1993; Diekmann dkk., 1997). Ketika interes itu dapat diaktualisasikan dalam prosedur yang berbentuk kontrol terhadap masukan dan keputusan, keadilan prosedural lebih berperan menerangkan keadilan distributif. Sebaliknya, ketika interesnya telah terpuaskan oleh hasil, peran tersebut tidak besar. Ketika terjadi hubungan yang sebaliknya, keadilan distributif mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, hal

ini merupakan akibat atau pengaruh dari *illusory correlations* dan *self serving bias* (Stroessner & Heuer, 1996).

Ketiga, keadilan prosedural dan distributif memiliki faktor-faktor penentu yang sama dan mungkin juga berbeda, faktor-faktor penentu inilah yang menjelaskan hubungan antara dua penilaian keadilan di atas. Meskipun faktor pengaruhnya berbeda, reaksi terhadap keadilan prosedural maupun distributif pada umumnya sama, setidaknya-tidaknya bermuara pada satu reaksi psikologi tertentu seperti kepuasan (Tyler, 1994). Pendapat ketiga ini sekaligus memacu untuk segera mengintegrasikan model-model yang ada. Secara skematis hubungan antarvariabel yang terlibat dapat dilihat dalam Gambar 2.1. Skema tersebut dapat dikatakan komprehensif karena antara keadilan prosedural dan distributif tidak hanya ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi juga pengaruhnya terhadap aspek lain.



Gambar 2.1
Model Umum Penilaian Keadilan Menurut Tyler
 (Sumber: Tyler, 1994, h.853.)

Model yang dikemukakan oleh Tyler ini bukanlah model yang kaku. Ketiga faktor penting yang berpengaruh (sumber daya, kontrol, dan relasi) tidak selamanya berperan dalam porsi yang sama. Perubahan kekuatan pengaruh anteseden menyebabkan munculnya model yang berbeda-beda. Ketika ketiganya berperan dengan porsi yang cukup seimbang, modelnya disebut *Saturated Justice Model*. Hasil-hasil penelitian yang menyebutkan bahwa hasil yang tinggi mempengaruhi penilaian keadilan prosedural termasuk dalam *Resources-Only Justice Model* atau *Resource-Dominated Justice Model*. Akan terbentuk *Self Interest Model* bila kontrol yang dimaksudkan mempengaruhi penilaian keadilan distributif dalam porsi yang besar. Bila kontrol berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan distributif dalam porsi yang seimbang, modelnya disebut *Dual-Process Justice Model*. Model-model inilah yang kiranya belum terformulasi dengan baik dalam penelitian-penelitian terdahulu sehingga penelitian yang satu dengan yang lain tampak tidak konsisten seperti dikemukakan oleh Gilliland (1994, hlm. 692):

The most interesting hypotheses focus on interaction between distributive and procedural justice components of fairness perceptions ... but the findings have not been consistent.

Ketiga penjelasan tentang hubungan penilaian keadilan prosedural dan distributif tersebut mengacu pada penelitian yang sebagian besar dilakukan di lapangan. Karenanya, faktor-faktor sosial dan personal banyak mempengaruhi penilaian keadilan, baik prosedural maupun distributif. Penjelasan yang spesifik psikologis diperoleh dari hasil-hasil penelitian di laboratorium (untuk review lihat Van den Bos dkk., 1997a, 1997b) seperti telah dikemukakan dalam teori heuristik penilaian keadilan. Menurut teori ini, pada dasarnya orang tidak mudah menilai keadilan, setidaknya-tidaknya sering muncul rasa tidak yakin akan penilaiannya itu. Untuk mengatasi hal ini, orang pada umumnya mengacu pada kesan yang diperoleh. Kesan inilah yang sebenarnya dijadikan pedoman untuk menilai.

Masalahnya adalah apabila orang tersebut diminta menilai keadilan prosedural dan distributif bersama-sama, penilaian akan sulit dilakukan. Bila teori ini diterapkan untuk menjelaskan kerangka pemikiran Tyler (1994) di atas, dapat diprediksikan bahwa secara umum penilaian tentang keadilan prosedural akan mempengaruhi penilaian tentang keadilan distributif. Hal ini disebabkan informasi tentang prosedur tersebut dapat menjadi alat diagnosis adanya distribusi yang adil. Artinya, dengan ditanyai tentang anteseden dari proses atau prosedur maka orang akan lebih mudah menilai prosedurnya, selanjutnya ia merasa lebih mudah pula untuk menilai distribusinya.

Kerangka pemikiran ini meyakinkan kerangka pemikiran heuristik lebih lanjut bahwa bila seseorang telah menentukan pendapatnya, pendapat itu akan dijadikan pedoman untuk mengemukakan pendapat lebih lanjut. Bila hal ini diterapkan untuk melihat hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan distributif, penilaian yang terdahululah yang akan memberikan dampak pada penilaian berikutnya. Jadi, bila orang ditanya dan memberikan penilaian tentang keadilan distributif terlebih dulu, penilaian ini dapat mempengaruhi penilaian tentang keadilan prosedural. Sebaliknya, bila orang tersebut telah menilai keadilan prosedural terlebih dulu, penilaian ini akan mempengaruhi penilaian tentang distribusinya. Meskipun demikian, penelitian Van den Bos dkk. (1997b) menunjukkan bahwa pengaruh penilaian tentang proses terhadap distribusi lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh penilaian tentang distribusi terhadap penilaian tentang proses.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam menganalisis variabel-variabel yang terkait dengan keadilan dari sudut pandang psikologi adalah dampak dari keadilan, terutama keadilan prosedural. Sejauh ini dampak keadilan telah cukup banyak dikaji, tetapi keadilan yang dimaksud lebih menekankan keadilan distributif (lihat Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Faturachman, 1998a; Feather, 1990; Greenberg, 1990; Guimond & Dube-Simard, 1983; Leung

dkk., 1993; Mark & Folger, 1984; Petta & Walker, 1992; Walker & Pettigrew, 1984). Karenanya, agar lebih lengkap, penelitian ini juga akan melihat dampak psikologis kedua keadilan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, dengan melihat dampak dari keduanya kemungkinan pola hubungan antara keadilan prosedural dan distributif dapat dijelaskan. Dampak yang banyak dikaji selama ini adalah kepuasan terhadap prosedur dan distribusi. Dampak inilah yang sering berpengaruh terhadap penilaian keadilan. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa bila pembagian yang diperoleh telah memberikan kepuasan yang tinggi, hal ini akan menilai prosedurnya sebagai hal yang adil. Sebaliknya, orang yang kecewa karena suatu distribusi, mungkin ia menilai bahwa prosedurnya tidak adil. Seperti dalam memberikan penilaian, kepuasan ini akan lebih mudah dirasakan dan dideteksi bila ada pembandingan seperti dijelaskan dalam teori ekuitas dan privasi relatif. Bila dalam menilai tidak ada pembandingan, terutama untuk distribusi, menurut Van den Bos dkk. (1997a), penilaian keadilan distributif akan merupakan fungsi dari penilaian keadilan prosedural.

2. Gender dan Model Penilaian Keadilan

Gender sebagai definisi (konstruksi) sosial yang membedakan peran, kedudukan, perilaku, dan perbedaan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan dalam penilaian sosial. Banyak teori dan kajian psikologi (misalnya Beall & Sternberg, 1993; Jackson dkk., 1992) yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Dari berbagai kajian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa psikodinamika gender berlangsung sejak individu dilahirkan hingga akhir hayatnya. Adapun latar belakang dari dinamika itu bermula dari asumsi adanya perbedaan secara biopsikologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dijadikan dasar untuk memberi atribut yang berbeda antara keduanya. Karenanya, laki-laki mempelajari dan mengadopsi maskulinitas

yang memiliki ciri dominan dan *self-reliance*, sementara perempuan belajar dan menginternalisasi femininitas sehingga menjadi suka mengalah dan hangat.

Kategorisasi seperti disebutkan itu disosialisasikan dan harus diterima oleh individu yang akan melekat sebagai bagian dari karakteristik kepribadiannya. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan tersebut, berbagai hal yang menyangkut kehidupan dikaitkan dengan atribut tersebut seperti pekerjaan-pekerjaan tertentu yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada pembatasan dalam hal peran yang dinilai cocok bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, stereotipe laki-laki dan perempuan yang ada harus diterima dan diinternalisasi oleh individu. Apabila ini benar-benar terjadi maka secara kognitif akan terbentuk *schema* gender. Skema ini akan diperkuat oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan berperilaku, menempati posisi, dan berperan secara berbeda (Cross & Markus, 1993; Korabik, 1997). Dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pembedaan ini terus berlangsung hingga mengarah pada diskriminasi yang merugikan perempuan.

Keadaan laki-laki dan perempuan yang demikian itu dapat menyebabkan munculnya perbedaan dalam penilaian sosial di antara mereka. Penilaian sosial sebagai proses kognitif berpeluang besar menjadi bias karena perbedaan dan pembedaan tersebut. Beberapa bias yang dimaksud di antaranya adalah bias fundamental, bias konsensus, dan *self-fulfilling prophecy* (Geis, 1993). Bias fundamental terjadi ketika atribut dikenakan secara tidak konsisten pada laki-laki dan perempuan. Dalam hal kesuksesan, misalnya, laki-laki yang sukses dinilai sebagai konsekuensi dari kemampuannya, namun bagi perempuan hal itu dianggap karena peran pihak luar. Dalam hal konsensus bisa terjadi juga bias karena, misalnya, banyaknya perempuan yang tidak bekerja sering diterima sebagai akibat ketidakmampuan mereka. Konsensus ini dapat mengalahkan pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak bekerja karena tidak ada atau kurangnya kesempatan yang diberikan kepada mereka. Konsensus seperti ini bisa

menjadi bias karena di dalamnya tidak dilakukan pengujian secara kritis dan sifat dari konsensus memang demikian. Sementara itu, bias *self-fulfilling prophecy* terjadi karena ada konsekuensi timbal balik antara keyakinan (kognitif) dan perilaku. Keyakinan bahwa perempuan lemah menyebabkan seseorang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, perempuan yang posisinya rendah dibiarkan karena perempuan dianggap lemah.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berawal dari penekanan pada perbedaan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan tersebut menjadi bagian dari cara pandang dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Karena kuatnya sistem kemasyarakatan dan budaya yang berlaku menyebabkan laki-laki dan, khususnya, perempuan menerima perbedaan itu. Pada sisi lain, mulai muncul kesadaran di antara kelompok-kelompok yang peduli keadilan bahwa sistem yang ada dinilai tidak adil sehingga perempuan mengalami deprivasi (Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984). Oleh karena itu munculah berbagai upaya untuk mengubah sistem yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara lebih adil. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya itu belum sepenuhnya mencapai hasil. Oleh karena itu masalah gender ini masih berpengaruh besar terhadap dinamika psikologis seperti dalam penilaian sosial.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam melakukan penilaian sosial karena skema kognitif yang terbentuk berbeda (Cross & Markus, 1993). Perbedaan tersebut dapat terjadi juga karena ada perubahan orientasi yang akhir-akhir ini terjadi. Beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi, di antaranya, diuraikan berikut ini.

Pertama, laki-laki sering lebih berorientasi pada hal-hal instrumental sedangkan perempuan lebih menekankan ekspresivitas (Korabik, 1997). Orientasi instrumental pada laki-laki dapat mengarahkan mereka untuk lebih menekankan pencapaian seperti kesejahteraan yang dapat membawanya pada kepuasan.

Ekspresivitas pada perempuan bisa berarti bahwa akan lebih menghayati berbagai hal yang dialami secara tahap demi tahap.

Kedua, deprivasi yang lebih berat dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki bisa menyebabkan mereka memiliki harapan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupannya (Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1983; Devasia & Devasia, 1990). Besarnya harapan bila dikaitkan dengan ekspresivitas memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kepuasan pada setiap langkah yang dijalani. Laki-laki yang pada umumnya menempati posisi lebih baik akan mengupayakan pada pencapaian target dan menilai kepuasan dari keberhasilannya.

Ketiga, skema maskulinitas berasosiasi dengan orientasi keterpisahan sedangkan skema feminitas berasosiasi dengan orientasi keterkaitan (Cross & Markus, 1993). Laki-laki yang menggunakan skema maskulinitas dapat dengan mudah berpikir dan bertindak secara berbeda-beda. Laki-laki mungkin lebih sedikit mengalami disonansi kognitif. Sebaliknya, perempuan lebih berorientasi pada keterkaitan yang akan mengarahkan pada upaya-upaya untuk keselarasan. Dalam menilai dan berpendapat laki-laki mungkin kurang memperhatikan konsistensi.

Keempat, kesempatan (akses) dan kontrol antara laki-laki dan perempuan berbeda di mana perempuan memilikinya secara lebih terbatas dibanding laki-laki (Abdullah, 2001). Penilaian terhadap akses dan kontrol pada laki-laki tentunya akan berbeda dibandingkan pada perempuan.

Kelima, gender sebagai kategorisasi membuka peluang terjadi perbandingan di antara kedua kategori yang ada. Kenyataan menunjukkan bahwa laki-laki menjadi pihak yang mendominasi perempuan. Hal ini akan membawa dampak pada proses penilaian sosial yang melibatkan perbandingan. Penilaian yang dilakukan oleh perempuan bisa dibatasi oleh adanya dominasi laki-laki sehingga untuk hal-hal tertentu perempuan bisa terhambat dalam menilai. Dengan

kata lain, perempuan akan lebih terbatas dalam menilai dibanding laki-laki (Jackson dkk., 1992).

Adanya perbedaan-perbedaan dalam penilaian sosial antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi sosial membuka peluang terjadinya perbedaan model dalam penilaian keadilan. Sayangnya, sejauh ini belum ada studi yang mengungkap permasalahan ini yang dapat digunakan untuk memprediksi perbedaan model penilaian keadilan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, uraian terdahulu dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa model penilaian keadilan pada laki-laki akan berbeda dengan model penilaian keadilan pada perempuan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengeksplorasi model pada laki-laki dan perempuan tanpa memformulasikannya dalam hipotesis karena belum kuatnya dasar teori dan masih terbatasnya hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan hipotesis.

I. Dasar Teori dan Hipotesis

Model integratif yang awalnya dikembangkan oleh Tyler (1989, 1994) dalam operasionalisasi penelitian mengalami perubahan. Dalam penelitian ini model tersebut akan dimodifikasi juga.

Salah satu kesulitan untuk mengoperasionisasikan model integratif seperti dalam Gambar 2.1 adalah mendefinisikan sumber daya. Di dalam suatu lembaga atau organisasi kadang-kadang sumber daya yang dimiliki sulit dihitung, bahkan banyak orang yang tidak dapat mengidentifikasi sumber daya yang dia miliki atau yang ada di sekitarnya. Di samping itu, sumber daya yang dimiliki bersama-sama sering tidak bisa diakses oleh sebagian orang yang memilikinya. Oleh karena itu, variabel ini perlu dioperasionisasikan lebih lanjut. Di samping itu, ada beberapa variabel pengaruh seperti yang dikemukakan di bagian depan yang belum terakomodasikan di dalam model yang dirancang itu. Tyler (1994)

melakukan modifikasi terhadap model tersebut menjadi seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Dalam penelitiannya, Tyler (1994) mendefinisikan secara operasional sumber daya tersebut menjadi dua variabel yaitu, pertama, variabel harapan yang sering dijadikan sebagai referensi penilaian keadilan seperti dikemukakan dalam teori deprivasi relatif (Crosby, 1982) dan kedua adalah persepsi tentang kesejahteraan, khususnya tingkat pendapatan, yang dicapai pada saat itu. Dilihat dari konteks penelitian yang dilakukan pada kerja sama antara pemilik sawah dengan PTPN X, penilaian sumber daya secara objektif sulit dilakukan karena akses pemilik sawah terhadap perusahaan perkebunan ini sangat kecil (lihat Margono, 1998). Kesulitan serupa ini dialami juga oleh Tyler (1994) dalam melakukan penelitiannya sehingga dia memutuskan untuk memodifikasi model tersebut dengan memecah sumber daya menjadi dua variabel seperti disebutkan itu. Dengan memasukkan variabel kesejahteraan dan harapan berarti masih ada anteseden lain yang secara teoretis berpengaruh, yaitu gender, situasi, dan karakteristik penilai seperti yang dikemukakan dalam paparan terdahulu, tetapi tidak dimasukkan dalam model ini. Penelitian ini mengumpulkan data tentang gender, situasi pada saat penelitian, dan karakteristik demografis penilai. Namun, ketiganya tidak dimasukkan dalam model ini karena acuannya adalah pendapat Tyler (1989, 1994) yang memadukan sedikitnya empat teori. Dalam menjelaskan anteseden penilaian keadilan distributif ia menggunakan *resource-based model*. Dalam menganalisis anteseden penilaian keadilan prosedural ia menggunakan model kepentingan pribadi dan model nilai-nilai kelompok. Ketika menjelaskan dampak penilaian keadilan ia menggunakan teori deprivasi relatif.

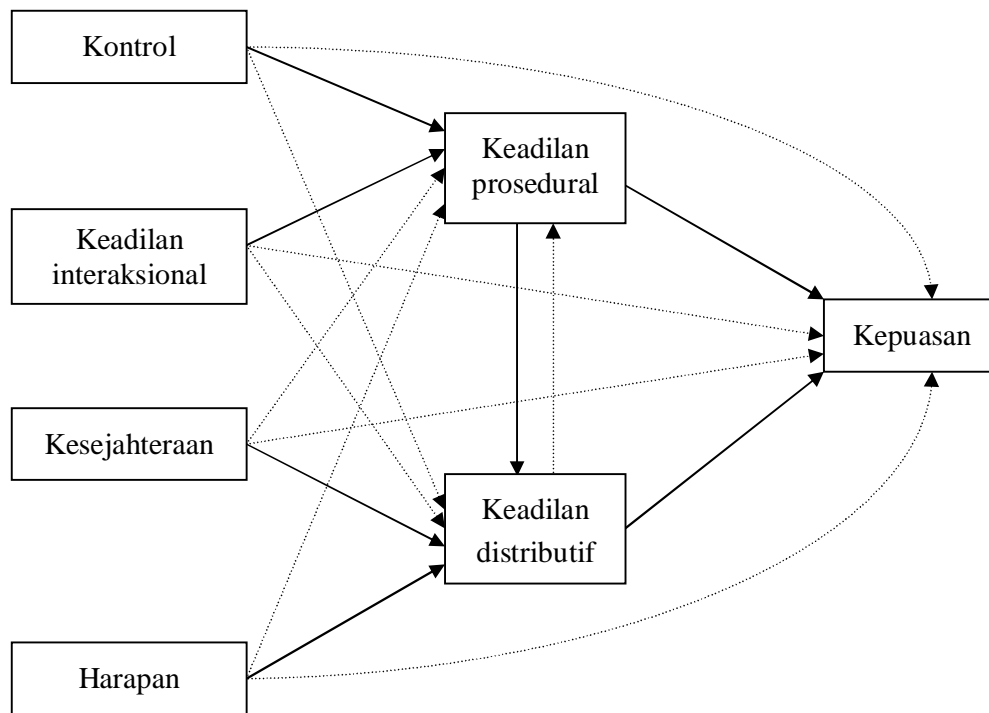
Dalam penelitian ini variabel gender dianalisis untuk membedakan model penilaian pada kelompok laki-laki dan perempuan. Perbedaan model pada kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah merupakan cara yang sering diterapkan dalam analisis sejenis penelitian ini (lihat Arbuckle & Wothke, 1999).

Di samping itu, secara kualitatif isu *gender* dikaji juga. Analisis situasi juga akan dilakukan secara kualitatif sebagai salah satu bagian terpenting dari upaya kontekstualisasi penelitian. Sementara itu, karakteristik demografis penilai akan dideskripsikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman kontekstual penilaian keadilan dalam penelitian ini. Karakteristik psikologis tidak dijadikan sebagai bagian dari penelitian, khususnya dalam model penilaian keadilan karena rancangan penelitiannya berbeda. Maksudnya, dalam penelitian-penelitian terdahulu (misalnya Feather, 1990; 1992; 1994) kategori karakteristik psikologis yang menonjol dikaitkan dengan pilihan atau kategori distribusi tertentu. Variabel ini cocok untuk penelitian diferensial atau korelasional yang lebih sederhana. Secara teknis, apabila akan dimasukkan dalam penelitian ini, perlu ada perubahan desain penelitian, tetapi tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan anteseden penilaian keadilan prosedural, model yang digunakan dalam penelitian ini tidak berbeda dengan kerangka teoretis yang dijelaskan sebelumnya. Menurut teori yang berorientasi pada kepentingan pribadi, anteseden yang pokok dari penilaian keadilan prosedural adalah kontrol. Sementara itu, menurut pandangan yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok persoalan relasi menjadi anteseden utama dari penilaian keadilan prosedural. Dalam kajian lain, persoalan relasi ini disamakan dengan keadilan interaksional (lihat Masterson, 2001; Skarlicki & Folger, 1997). Oleh karena itu, variabel relasi seperti dalam Gambar 2.1 selanjutnya dalam penelitian ini disebut penilaian keadilan interaksional (Gambar 2.2). Dalam model yang dibangun ini penilaian keadilan interaksional berperan sebagai anteseden penilaian keadilan prosedural seperti halnya kontrol.

Meskipun demikian, model terakhir yang dikembangkan oleh Tyler ini belum mengaitkan secara langsung penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif seperti yang dipikirkan Gilliland (1994). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengaitkan keduanya sebagai fokus analisis.

Dengan demikian, dasar-dasar teori yang ada dan kondisi di lapangan dapat disinkronisasi dalam model yang lebih realistis dan komprehensif sebagai sintesis dan modifikasi dari kajian, teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Pada Gambar 2.2³ peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif digambarkan lebih kuat (ditandai dengan garis solid) dibandingkan dengan sebaliknya (ditandai dengan garis putus-putus) karena secara teoretis dan berdasarkan hasil penelitian memang demikian.



Gambar 2.2
Pengembangan Model Penilaian Keadilan
 (Sesudah Tyler, 1994, h.856)

Keadilan bukan merupakan tujuan akhir dari suatu proses dalam kehidupan masyarakat (Magnis-Suseno, 2001). Model yang dikembangkan dalam

³ Untuk memudahkan pemahaman, dalam gambar pengaruh antarvariabel dibuat lengkap. Gambar yang demikian disebut model *saturated*.

penelitian ini juga menganggapnya demikian. Menurut teori deprivasi relatif, keadilan akan menimbulkan kepuasan dan ketidakadilan akan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, baik penilaian keadilan prosedural maupun penilaian keadilan akan memiliki efek terhadap kepuasan.

Dari kajian teori di bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural tidak dapat lepas dari keterlibatan orang lain dan peran orang yang bersangkutan, terutama dalam melakukan kontrol. Sementara itu, penilaian keadilan distributif lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang didapatkan dan harapan. Dari kajian teori dan hasil-hasil penelitian seperti dikemukakan di bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif memiliki anteseden yang berbeda (dalam Gambar 2.2 ditandai dengan garis tebal), walaupun ada variabel yang berpengaruh pada kedua penilaian keadilan besarnya pengaruh tersebut akan berbeda dan cenderung lebih kecil (dalam Gambar 2.2 ditandai dengan garis putus-putus). Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis pertama (**hipotesis 1**):

Anteseden penilaian keadilan distributif berbeda dengan anteseden keadilan prosedural.

Hipotesis di pertama itu sifatnya masih umum. Salah satu teori keadilan prosedural menyebutkan bahwa faktor penting yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural adalah kontrol. Berbeda dengan teori yang berorientasi pada kepentingan pribadi tersebut, model nilai-nilai kelompok lebih menekankan pentingnya penilaian keadilan interaksional dalam penilaian keadilan prosedural. Dalam praktiknya (lihat Tyler, 1994), kedua faktor itu secara bersama-sama dapat mempengaruhi penilaian keadilan prosedural. Oleh karena itu, khusus yang berkaitan dengan anteseden penilaian keadilan prosedural, hipotesis pertama ini dapat dispesifikasi menjadi dua hipotesis di bawah ini.

Hipotesis 1a:

Kontrol sebagai anteseden mempunyai efek yang positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Hipotesis 1b:

Penilaian keadilan interaksional sebagai anteseden mempunyai efek yang positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Berbeda dengan penilaian keadilan prosedural yang dikaji dari dua sudut pandang dan menelorkan dua teori dan masing-masing mengemukakan anteseden yang berbeda, sejauh pengetahuan peneliti baru ada satu teori yang menjelaskan anteseden penilaian keadilan distributif, yaitu model yang berorientasi pada sumber daya. Menurut model ini ada satu faktor utama atau anteseden yang menjelaskan penilaian keadilan distributif, yaitu penilaian tentang sumber daya yang ada yang secara operasional dipecah menjadi dua variabel, yaitu kesejahteraan dan harapan (Tyler, 1994). Dengan demikian, masing-masing dari kedua variabel tersebut akan berperan terhadap penilaian keadilan distributif dengan arah pengaruh yang berbeda seperti yang dibahas dalam teori deprivasi relatif, kesejahteraan efeknya positif, sedangkan harapan efeknya negatif. Oleh karena itu, hipotesis pertama di atas, khususnya yang berkaitan dengan penilaian keadilan distributif, dapat juga dispesifikasikan seperti terlihat di bawah ini.

Hipotesis 1c:

Kesejahteraan merupakan anteseden yang efeknya positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Hipotesis 1d:

Harapan merupakan anteseden yang efeknya negatif dan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Pada tingkat individu, pemberian atau distribusi apa pun akan didahului oleh proses-proses pengkajian, termasuk proses pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sosial, proses-proses tersebut identik dengan prosedur. Hal ini juga berlaku dalam penilaian keadilan. Penilaian terhadap prosedur pada umumnya dilakukan terlebih dulu dan penilaian terhadap distribusi dilakukan kemudian. Dengan demikian, penilaian keadilan distributif besar kemungkinannya dipengaruhi oleh penilaian keadilan prosedural. Kemungkinan ini dibenarkan dan dibuktikan oleh konsep berpikir heuristik (Van den Bos, 1996, 1999, 2001). Khusus berkaitan dengan penilaian keadilan, teori heuristik menambahkan bahwa penilaian terhadap prosedur lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penilaian terhadap distribusi. Penilaian yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan bila ada perbandingan. Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan psikologi tentang keadilan distributif seringkali dikaitkan dengan konsep-konsep perbandingan sosial (Folger dkk., 1983; Mark & Folger, 1984; Master & Smith, 1987). Lebih mudahnya menilai keadilan prosedural dibandingkan dengan menilai keadilan distributif memberikan peluang meningkatnya peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif sejalan dengan teori heuristik.

Pola hubungan antara penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif diyakini bukan merupakan hubungan yang satu arah (Brockner & Wiesenfield, 1996; Van den Bos dkk., 1998b). Dari model interes pribadi dalam penilaian keadilan prosedural terbukti bahwa penilaian tersebut banyak dipengaruhi oleh upaya untuk mendapatkan keuntungan (Lind & Tyler, 1988). Dari sinilah muncul pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Kepentingan pribadi yang terpuaskan akan meningkatkan penilaian keadilan distributif. Peningkatan ini akan membawa imbas terhadap penilaian keadilan prosedural.

Bila keduanya berhubungan secara timbal balik, selanjutnya harus diketahui besarnya masing-masing pengaruh. Disebutkan di atas bahwa pengaruh

penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif setidaknya karena dua hal yaitu urutan kejadian yang umumnya menempatkan prosedur lebih dulu dan secara heuristik prosedur lebih mudah dinilai sehingga kemungkinan menjadi referensi untuk menilai keadilan distributif. Sementara itu, pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural sesungguhnya hanya salah satu bagian dari orientasi pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif akan lebih besar daripada pengaruh sebaliknya. Dengan demikian dapat diajukan **hipotesis kedua** sebagai berikut.

Bila hubungan kedua keadilan ini dilihat secara timbal balik, efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar daripada efek penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural.

Pemberian penilaian merupakan proses kognitif. Untuk sampai pada penilaian itu, kaidah-kaidah pemrosesan informasi akan ikut berpengaruh. Dalam proses ini dibutuhkan banyak informasi untuk sampai pada suatu penilaian. Permasalahannya ialah informasi yang dibutuhkan tersebut tidak selalu tersedia, walaupun tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam keadaan demikian, menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan (Van den Bos dkk., 1997a, 1997b) dan teori perbandingan sosial (lihat Master dan Smith, 1987), orang biasanya akan mencari pembanding sebagai dasar penilaian. Bila informasi tentang pembanding ini pun tidak ada, penilai akan berusaha seobjektif mungkin dalam menilai meskipun menggunakan *norma* subjektifnya sebagai dasar menilai. Menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan, untuk mencapai hal ini, individu akan menggunakan referensi yang ada yaitu menilai keadilan prosedural berdasarkan prosedur objektifnya dan menilai keadilan distributif berdasarkan distribusi (hasil) objektifnya. Oleh karena itu, salah satu proposisi teori ini menyebutkan bahwa penilaian keadilan prosedural dipengaruhi oleh prosedur objektifnya dan penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh kondisi objektif distribusinya. Artinya, pada

umumnya orang akan menilai adil suatu prosedur bila secara objektif prosedur tersebut adil dan menilai suatu distribusi adil bila secara objektif distribusinya adil, demikian juga bila keadaan objektifnya tidak adil, penilaiannya juga tidak adil.

Sesuai dengan penjelasan itu maka dapat dirumuskan **hipotesis ketiga** sebagai berikut.

Secara objektif prosedur akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural dan distribusi akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Prosedur yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur yang tidak adil dan distribusi yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang tidak adil.

Teori Heuristik Penilaian Keadilan menyebutkan bahwa menilai keadilan prosedural lebih mudah dilakukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa prosedur yang adil lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan distribusi yang adil dan orang peduli dengan keadilan karena ingin mendapatkan kepastian (Van den Bos, 1996; Van den Bos & Miedema, 2000), termasuk kepastian dalam mendapatkan bagian (distribusi) yang adil. Masalah urutan penilaian menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan juga menjadi faktor yang penting. Pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap keadilan distributif tidak terjadi semata-mata karena baik sifat naturalistik maupun kepastian yang lebih besar diperoleh dari prosedur sehingga orang dapat mendiagnosis keadilan distributif berdasarkan keadilan prosedural, tetapi juga karena faktor urutan. Hal ini menjadi bagian penting dari proses kognitif yang cenderung mencerna informasi berdasarkan urutan masuknya informasi tersebut. Oleh karena itu, bila prosedur diketahui lebih dulu, prosedur yang dimaksud tidak hanya akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural, tetapi juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan

distributif. Kesimpulan ini dijadikan sebagai **hipotesis keempat** yang diformulasikan ulang sebagai berikut.

Ketika prosedur diketahui lebih dulu, prosedur yang dimaksud akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Prosedur yang adil akan menyebabkan distribusi dinilai lebih adil dibanding prosedur yang tidak adil.

Apakah urutan informasi seperti disebutkan di atas akan mempunyai efek bila distribusi diketahui lebih dulu dan penilaian keadilan distributif dilakukan lebih dulu? Teori Heuristik Penilaian Keadilan menyimpulkan bahwa ketika penilaian keadilan prosedural dilakukan lebih dulu daripada keadilan distributif, penilaian keadilan prosedural akan ikut terpengaruh (Van den Bos, 1996). Dugaan serupa dikemukakan dalam teori atribusi tentang penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000). Sayangnya pandangan ini belum banyak dibuktikan kecuali oleh satu hasil penelitian (Van den Bos, 1996). Di samping itu, kesimpulan tersebut juga mengandalkan konsep manajemen kesan (Greenberg, 1996) dan kesan awal (Van den Bos dkk., 1998b). Lebih dari itu, hal serupa akan terjadi bila kepentingan pribadi menonjol (Lind & Tyler, 1988). Faktor terakhir inilah yang tampaknya paling berperan. Sebaliknya, bila ini terjadi, secara kognitif akan terjadi disonansi (Festinger, 1954). Sementara itu individu pada umumnya berusaha untuk menghindari disonansi kognitif (Festinger, 1969; Harmon-Jones dkk., 1996). Senada dengan pendapat ini, menurut teori referensi kognitif (Folger, 1987; Folger dkk., 1983; Mark & Folger, 1984; Skarlicki, 1997) setiap individu berusaha untuk menilai keadilan seobjektif mungkin. Apabila referensi hasil untuk menilai keadilan prosedural dan distributif tidak cukup atau memadai, penilai dapat menjustificasinya berdasarkan nilai-nilai atau moralitas yang ada dan orang tersebut berupaya agar penilaiannya membawa konsekuensi positif baginya pada masa depan. Hal ini semua berbeda dengan orientasi kepentingan pribadi yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan. Oleh karena itu, berbeda dengan proposisi teori heuristik penilaian keadilan hasil

penelitian Van den Bos (1996) dan teori atribusi tentang penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000), penelitian ini menguji **hipotesis kelima** yang diformulasikan sebagai berikut.

Bila tidak ada indikasi kepentingan pribadi yang menonjol, distribusi dan penilaian keadilan distributif yang dilakukan sebelum mengetahui prosedurnya tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Penilaian keadilan merupakan konsep yang berbeda dengan kepuasan terhadap prosedur maupun distribusi. Keduanya memiliki korelasi yang tinggi (Tyler, 1994; Van den Bos dkk., 1997a). Kepuasan yang dimaksud juga tidak hanya sebatas kepuasan terhadap prosedur maupun distribusinya. Dalam relasi sosial yang formal, di antaranya disebut sebagai kontrak sosial seperti sewa lahan, maka kepuasan dari relasi sosial atau kontrak sosial secara lebih luas juga akan muncul. Kepuasan akan terdiri dari kepuasan terhadap prosedur, terhadap distribusi, dan terhadap relasi atau kontrak sosial.

Menurut orientasi kepentingan pribadi, individu mengutamakan kepentingannya sendiri dalam menilai keadilan prosedural maupun distributif. Ketika kepentingan pribadinya terpenuhi, ia akan menilainya sebagai sesuatu yang adil. Kepentingan pribadi ini sebagian besar terpenuhi melalui perolehan yang besar dari suatu distribusi. Dalam keadaan begini ia akan mendapatkan kepuasan yang tinggi. Pada sisi lain, interes pribadi yang tinggi pada umumnya mengarahkan pada kurangpedulian terhadap hal lain, seperti prosedur, asalkan ia diuntungkan. Keuntungan-keuntungan ini akan tercermin dalam kepuasannya. Maka dari itu, diajukan **hipotesis keenam** sebagai berikut.

Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang atau rendah.

Seperti hipotesis pertama, hipotesis ini secara spesifik dapat dibagi lagi hingga menjadi dua bagian seperti berikut ini.

Hipotesis 6a:

Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang.

Hipotesis 6b:

Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut rendah.

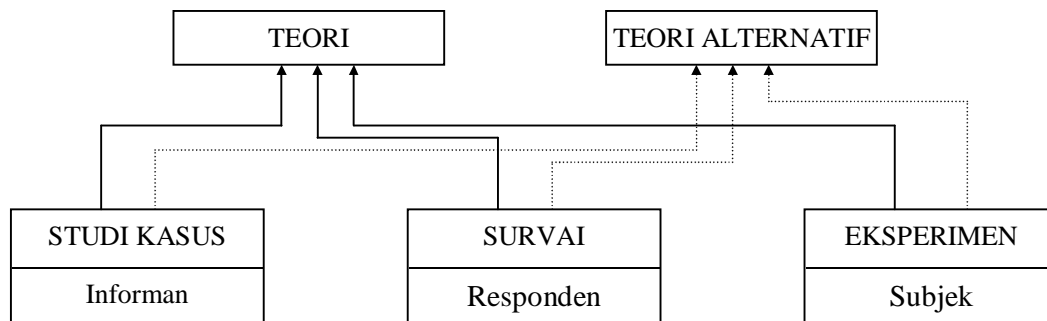
Perlu digarisbawahi bahwa hipotesis-hipotesis di atas pada dasarnya merupakan bagian dari model penilaian keadilan. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ini yang merupakan pembuktian dari beberapa hipotesis bila dirangkai kembali dalam suatu model yang integratif, akan didapatkan model yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini akan sesuai dengan tujuan utama penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Orang sering mempertanyakan kebenaran suatu teori berdasar pada fakta-fakta yang sifatnya kasuistik. Bila suatu kasus menunjukkan gejala yang tidak sejalan dengan suatu teori, orang mulai melihat pada teori alternatif (rival). Meskipun demikian, hasil studi kasus sering dianggap kurang kuat untuk menyusun teori baru. Hal ini disebabkan lingkup dan analisis dalam studi kasus terbatas meskipun mendalam. Oleh karena itu, studi kasus lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung suatu teori atau sebagai langkah awal dari pembuktian baik pada suatu teori maupun teori rivalnya. Survai dinilai lebih memadai untuk membuktikan atau menyusun teori dalam ilmu sosial. Meskipun demikian, masih ada kelemahan dalam survai, terutama menyangkut pengecualian-pengecualian dalam penerapan teori. Setiap teori selalu ada pengecualiannya. Akan sulit untuk menguji pengecualian ini bila dilakukan di lapangan. Agar pengecualian dapat muncul, salah satu cara adalah melalui manipulasi atau memberikan perlakuan tertentu. Untuk melakukan ini, studi yang paling tepat adalah melalui eksperimen. Berdasarkan argumen seperti inilah, Yin (1994) menyarankan penggunaan tiga jenis penelitian untuk menyusun atau membuktikan teori (Gambar 3.1).



Gambar 3.1
Model-Model Penelitian untuk Pembuktian Teori
(Sumber: Yin, 1994, h. 31)

Berdasar pada kajian teoretis, ada beberapa model keterkaitan antara keadilan prosedural dan keadilan distributif, baik sebagai faktor penentu (anteseden atau secara operasional disebut variabel bebas) maupun sebagai bagian yang dipengaruhi faktor lain (variabel tergantung). Untuk membuktikan bahwa salah satu teori atau model lebih bisa diterima dibandingkan dengan teori atau model lainnya, penelitian ini juga mengikuti pendapat Yin (1994). Secara sepintas kerangka tersebut mensyaratkan pemberlakuan tiga bentuk penelitian yang isinya sama. Penerapan ketiganya dalam penelitian ini tidak demikian sebab hal itu hanya dapat dilakukan untuk penelitian sederhana yang menggunakan analisis deskriptif atau bivariat. Untuk penelitian yang menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks, hal seperti itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, tiap-tiap penelitian dapat menjadi komplemen dari yang lainnya. Dalam penelitian ini penggunaan ketiganya juga dimaksudkan untuk saling melengkapi sebab bila penelitian ini dilakukan hanya dengan menggunakan kancah lapangan, sebagian hipotesisnya tidak terjawab, demikian juga bila hanya mengandalkan pada eksperimen. Karenanya, studi akan menggunakan dua jenis penelitian lapangan, yaitu studi kasus dan survai, serta penelitian skenario yang berdesain eksperimen. Studi kasus dilakukan paling awal, disusul survai dan penelitian skenario. Penelitian skenario dipilih sebagai pengganti eksperimen karena beberapa alasan. Pertama, keduanya menggunakan prinsip dasar yang sama seperti pembatasan variabel dan melakukan manipulasi variabel-variabel independen yang dilibatkan. Secara prinsip keduanya tidak berbeda. Kedua, penelitian skenario biasa digunakan dalam pengembangan psikologi sosial, termasuk penelitian tentang penilaian seperti atribusi dan penilaian keadilan (lihat misalnya Feather, 1992, 1994, 1996). Secara teknis penelitian skenario kalah canggih dengan eksperimen, tetapi keandalannya diakui para peneliti (Greenberg, 1996). Ketiga, penelitian skenario ini digunakan juga karena masih menggunakan prinsip-prinsip eksperimen, tetapi secara teknis lebih mudah dilaksanakan dan biaya untuk melaksanakannya lebih murah.

Studi kasus merupakan langkah awal untuk memberikan gambaran dan memetakan isu-isu yang berkaitan dengan kajian dan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian survai ditujukan untuk membuktikan hipotesis pertama, kedua, dan keenam, sedangkan penelitian skenario dilakukan untuk menguji hipotesis ketiga, keempat, dan kelima.

Urutan penelitian juga dimaksudkan agar penelitian yang lebih awal dapat digunakan untuk masukan pada penelitian berikutnya. Dengan demikian, studi kasus digunakan untuk mengembangkan survai dan penelitian skenario, penelitian survai juga digunakan untuk mengembangkan penelitian skenario. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya bukan merupakan satu-satunya pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, survai dan penelitian skenario juga dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada. Berdasarkan alur yang dirancang ini maka penelitian yang lebih akhir dapat juga menjadi bagian dari elaborasi atas temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya.

B. Penelitian Lapangan: Studi Kasus dan Survai

Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk menguji hipotesis sekaligus untuk menyesuaikan konsep-konsep yang ada dengan konteks sosial setempat. Langkah ini dilakukan sesuai dengan pendapat salah seorang pencetus teori keadilan sosial (Rawls, 1971) dan peneliti-peneliti berikutnya (misalnya Colquitt dkk., 2001; Lind & Early, 1992; Schmidt, 1991) yang menyebutkan bahwa implementasi dari prinsip keadilan sangat bergantung pada dinamika masyarakat setempat. Secara rinci penelitian lapangan ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan distributif dan pola-pola prosedur yang digunakan yang diterapkan di wilayah penelitian;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi penerapan prinsip keadilan distributif dan prosedural; selanjutnya

determinan tersebut akan diuji pengaruhnya secara statistik sehingga konsep dan teori tersebut tervalidasi dan meyakinkan;

- c. menguji hubungan antara keadilan prosedural dengan distributif; dan
- d. mengidentifikasi pengaruh kepentingan pribadi pada hubungan keadilan prosedural dan distributif; selanjutnya keterkaitan antara penilaian terhadap keadilan prosedural dan distributif dengan variabel-variabel lain dianalisis dengan teknik statistik.

Tujuan pertama tidak terkait dengan salah satu hipotesis, tetapi sangat penting untuk melihat konteks setempat yang berperan sangat penting dalam setiap penelitian, termasuk penelitian keadilan (lihat Schmidt, 1991). Sementara itu, tujuan kedua akan menjawab hipotesis pertama penelitian, tujuan ketiga akan digunakan untuk menguji hipotesis kedua, dan tujuan keempat merupakan upaya untuk menguji hipotesis kelima.

1. Variabel Penelitian

Dari kajian teoretis, beberapa variabel penelitian yang dapat dilibatkan dalam penelitian survai, antara lain, didasarkan pada model yang dikemukakan Tyler (1994) dan dikembangkan lebih lanjut hingga seperti terlihat dalam Gambar 2.2. Secara garis besar variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini meliputi variabel anteseden penilaian keadilan, penilaian keadilan, dan variabel kepuasan sebagai salah satu dampak atau reaksi dari keadilan.

- a. Variabel anteseden penilaian keadilan:
 - 1) kesejahteraan
 - 2) harapan
 - 3) kontrol
 - 4) penilaian keadilan interaksional

- b. Variabel penilaian keadilan:
 - 1) penilaian keadilan distributif
 - 2) penilaian keadilan prosedural
- c. Kepuasan terhadap kerja sama yang dijalin.

Kesejahteraan hidup biasanya dilihat dari dua perspektif, yaitu objektif dan subjektif. Perspektif pertama merupakan indikator sosial ekonomi, sedangkan perspektif kedua merupakan pandangan atas taraf hidup yang dirasakan secara individual. Dalam penelitian ini kesejahteraan diungkap berdasarkan pada tolok ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2001a) meskipun hanya diambil beberapa indikator, tidak semuanya. Kesejahteraan yang diukur sebatas pada yang dilihat dari perspektif subjektif, di sini disebut penilaian kesejahteraan, yang memiliki empat aspek utama yaitu kebutuhan dasar, akses pada pelayanan umum, akses pada informasi dan hiburan, aspek hubungan sosial, serta aspek kesejahteraan umum. Secara operasional kesejahteraan diukur dengan skala kesejahteraan yang mencerminkan tercukupinya aspek-aspek tersebut. Makin tercukupi aspek-aspek tersebut berarti makin sejahtera, makin sedikit aspek-aspek tersebut tercukupi berarti tingkat kesejahteraannya rendah.

Harapan merupakan salah satu latar belakang psikologis yang sangat penting untuk menilai keadilan. Dalam teori deprivasi relatif (Crosby, 1982), harapan dan penilaian keadilan merupakan faktor penting dari analisis deprivasi relatif. Harapan dapat didefinisikan sebagai nilai atau posisi tertentu yang ingin dicapai. Harapan sering dikaitkan dengan proyeksi hasil akhir, tetapi harapan dapat juga berkaitan dengan proses yang diidealkan. Makin tinggi hasil akhir diinginkan atau proses yang diidealkan berarti makin tinggi harapannya. Dalam penelitian ini harapan merupakan keinginan dari penilai terhadap pihak lain yang dinilai keadilannya. Yang dimaksud harapan adalah keinginan pemilik sawah pada perbaikan kesejahteraan hidupnya termasuk dari sumber daya yang dimiliki

(sawah), baik bila digarap sendiri maupun bila disewa oleh pihak lain (khususnya pemerintah melalui PTPN X). Secara operasional harapan diukur dengan skala yang disusun oleh peneliti. Tinggi-rendahnya harapan dilihat dari skor skala yang merupakan jumlah respons responden terhadap butir-butir skala yang disediakan. Makin besar angkanya berarti makin tinggi harapan responden dan makin kecil angkanya berarti makin rendah harapannya.

Kontrol pada dasarnya terdiri dari dua hal, yaitu kontrol terhadap masukan dan proses. Kontrol terhadap masukan adalah keterlibatan seseorang dalam menentukan keberadaan bahan-bahan yang dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kontrol ini berbeda dengan kontrol keputusan yang merupakan partisipasi dan keterlibatan langsung orang yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan seperti dalam adu argumentasi dan melalui penghitungan suara (*voting*). Secara operasional besar kecilnya variabel kontrol ini akan terlihat dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala kontrol. Makin besar angka yang diperoleh dari pengukuran dengan skala tersebut berarti makin besar kontrol responden terhadap masukan dan hasil pengambilan keputusan tersebut.

Variabel penilaian keadilan interaksional terdiri dari tiga penilaian penting. Pertama adalah netralitas yang meliputi kejujuran dan rendahnya bias. Netralitas juga dicerminkan oleh keterbukaan dalam menyampaikan isu yang dimaksud. Makin dianggap jujur, makin sedikit bias, dan makin terbuka seseorang akan dianggap makin netral. Kedua adalah kepercayaan yang berarti memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk terlibat dan menggunakan kesempatan serta memperoleh keuntungan dalam berhubungan baik dengan orang lain maupun dalam suatu proses. Di samping itu, kepercayaan juga dicerminkan oleh berat atau ringannya orang dalam memberikan kesempatan tersebut. Ketiga adalah penghargaan yang diartikan sebagai perlakuan yang mencerminkan respek, kepedulian, dan kesantunan terhadap orang lain. Makin respek, peduli, dan sopan terhadap orang lain berarti makin tinggi penghargaan yang diberikan. Secara

operasional keadilan interaksional akan diukur berdasarkan nilai total butir-butir skala keadilan interaksional yang terdiri dari tiga aspek tersebut. Makin besar skor totalnya berarti responden menilai keadilan interaksional makin tinggi.

Penilaian keadilan prosedural merupakan evaluasi terhadap prosedur yang ditempuh untuk melakukan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini antara pemilik sawah dengan PTPN X. Kriteria untuk penilaian keadilan prosedural adalah etis, sesuai dengan aturan, ada standar yang konsisten dalam prosedur, memanfaatkan informasi yang akurat, mempertimbangkannya dari berbagai segi, memanfaatkan umpan balik, dan ada penjelasan dalam prosedur tersebut. Penilaian ini akan diukur dengan menggunakan skala keadilan prosedural. Total skor skala tersebut menunjukkan tinggi-rendahnya penilaian keadilan responden.

Penilaian keadilan distributif merupakan evaluasi terhadap distribusi yang berlaku. Ada dua kriteria pokok untuk menilai keadilan distributif. Pertama adalah dengan melakukan perbandingan dengan orang lain. Distribusi dinilai adil bila pembagian yang diterima seseorang sebanding dengan yang diterima orang lain. Kriteria kedua berkaitan dengan karakteristik dan upaya individu yang bersangkutan. Beberapa kriteria ini, antara lain, menyangkut usaha atau tenaga yang dikeluarkan, tanggung jawab, pengalaman, kecanggihan, dan dampak negatif yang harus ditanggung. Bila distribusi yang diterima sebanding dengan kriteria-kriteria tersebut, akan dinilai adil. Secara operasional hasil penilaian ini tercermin dalam skor total skala keadilan distributif. Makin besar skornya berarti makin tinggi penilaian keadilan distributifnya.

Kepuasan yang dimaksud di sini adalah kepuasan pemilik sawah terhadap kerja sama dengan PTPN X seperti yang tercermin baik dalam prosedur maupun distribusi yang diterapkan. Kepuasan di sini diposisikan sebagai representasi dari berbagai bentuk reaksi terhadap kerja sama yang ada. Artinya, makin rendah berbagai reaksi negatifnya akan semakin tinggi kepuasannya. Dalam penelitian ini

kepuasan akan dilihat dari skor total skala kepuasan, kepuasan yang tinggi tercermin dari skor total yang tinggi dan kepuasan yang rendah dilihat dari skor yang rendah juga.

2. Teknik dan Alat Pengambil Data

Untuk mencapai tujuan di atas dilakukan pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara untuk studi kasus dan angket untuk survai. Wawancara yang dilakukan untuk studi kasus merupakan wawancara semiterstruktur dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Adapun fokus masalah yang ditanyakan berkaitan dengan berbagai hal yang terkait dengan permasalahan keadilan dalam kehidupan masyarakat setempat, termasuk masalah kontrak sewa tanah tersebut dan aspek sosial psikologisnya, terutama penilaian tentang keadilan dalam kontrak.

Untuk keperluan survai, data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan skala pengukuran psikologi. Teknik pengisian angket dan skala variabel-variabel psikologis tidak diserahkan kepada responden, tetapi pertanyaan-pertanyaannya dibacakan dan responsnya dicatat oleh asisten lapangan. Cara seperti ini diyakini sebagai cara yang akurat untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pertama dari penelitian lapangan, yaitu mengidentifikasi permasalahan keadilan di wilayah penelitian, prinsip-prinsip keadilan distributif, dan pola-pola prosedur yang digunakan serta yang diterapkan pada relasi antara pemilik sawah dengan PTPN X. Dari wawancara ini diharapkan didapatkan gambaran yang jelas tentang pola bagi hasil dalam kerja sama yang dimaksud dan tanggapan-tanggapan pemilik sawah terhadap pola dan besarnya bagi hasil yang diterima. Kontrak antara pemilik tanah dengan PTPN X sebagai suatu hubungan yang formal tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas, tetapi hal ini belum tentu diterima secara jelas dan seragam oleh para pemilik sawah. Ada latar belakang

tertentu yang menyebabkan perbedaan penilaian itu. Ada pemilik yang mengandalkan lahannya sebagai sumber pendapatan, sementara pemilik yang lain hanya menganggapnya sebagai aset atau tabungan. Kelompok pertama pada umumnya menggarap sawah miliknya, bahkan ada yang menyewa kepunyaan orang lain, dan mengandalkan kehidupan pada hasil pengolahan tersebut. Bila lahan itu harus disewakan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan pendapatan dan curahan waktunya untuk menggarap sawah. Hal ini berbeda dengan kelompok kedua yang sebagian besar tidak menggarap sawah miliknya. Mereka sebenarnya bukan petani dan tidak mengandalkan pendapatan dari hasil pengolahan sawah. Lahan miliknya kemudian disewakan kepada orang lain dan hasil sewa itu berfungsi sebagai pendapatan tambahan. Penghasilan pokok mereka bisa berasal dari gaji sebagai pegawai, berdagang, atau memberikan jasa. Hal ini adalah salah satu contoh kemungkinan perbedaan latar belakang yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan.

b. Pedoman wawancara. Ada dua arah wawancara yang dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi masalah keadilan secara umum dan masalah keadilan pada relasi petani dengan PTPN X. Untuk mengidentifikasi masalah keadilan secara umum, hal-hal pokok yang ditanyakan adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan sosial dan interpersonal setempat, baik dalam relasi sosial horizontal maupun vertikal.
2. Pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan dari permasalahan tersebut (nomor 1).
3. Perkembangan permasalahan ditinjau dari perkembangan waktu dan antarlokasi yang berdekatan.
4. Faktor-faktor pengaruh atau penyebab munculnya permasalahan.
5. Cara-cara dan dinamika penyelesaian permasalahan yang selama ini ada atau diupayakan oleh masyarakat setempat.

Hal-hal pokok yang ditanyakan untuk mengungkap berbagai informasi yang berkaitan dengan relasi pemilik sawah dengan PTPN X adalah sebagai berikut:

1. Waktu penyerahan sawah kepada PTPN X:
 - a. pengalaman menyerahkan sawah
 - b. luas sawah yang diserahkan
 - c. jangka waktu penggarapan sawah
 - d. saat sawah harus mulai diserahkan dan masalah-masalahnya
 - e. saat sawah dikembalikan dan masalah-masalahnya
2. Proses sewa:
 - a. pemberitahuan dari penyewa
 - b. penentuan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat
 - c. penentuan imbalan sewa
 - d. kompensasi lain di luar sewa
 - e. kemungkinan pelanggaran
 - f. sanksi atau denda yang ada.
3. Keterlibatan pemilik dalam proses sewa sawah:
 - a. keterlibatan modal, tenaga, dan pikiran
 - b. efektivitas keterlibatan tersebut
 - c. komitmen yang harus dicurahkan berkaitan dengan kontrak.
4. Perhitungan-perhitungan ekonomis:
 - a. jumlah uang sewa yang diterima
 - b. perbandingan hasil sewa oleh PTPN dengan hasil sewa oleh pihak lain
 - c. perbandingan hasil sewa oleh PTPN dengan hasil bila digarap sendiri

- d. perbandingan-perbandingan ongkos tenaga pada pengelolaan yang berbeda-beda
 - e. keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan pola-pola pengelolaan yang berbeda-beda (bentuk atau kontur tanah, kandungan tanah, benturan waktu produksi).
5. Aspirasi-aspirasi dari pemilik:
- a. keinginan bebas atau terikat dengan kontrak
 - b. keinginan dan upaya untuk meningkatkan hasil dari sewa sawah
 - c. keinginan untuk terlibat lebih dalam selama proses penanaman tembakau
 - d. keluhan dan protes yang pernah disampaikan
 - e. orientasi ekonomis dan sosial usaha/penanaman tembakau
 - f. dasar-dasar penentuan harga sewa
 - g. akomodasi terhadap keinginan pemilik sawah
 - h. sumbangan ekonomis yang diberikan kepada masyarakat.
6. Keuntungan dan kerugian yang dirasakan pemilik sawah:
- a. pemanfaatan waktu berkaitan dengan musim
 - b. pemanfaatan tenaga
 - c. kesempatan mengembangkan komoditas lain
 - d. peningkatan/penurunan produktivitas lahan

c. Angket. Untuk survai digunakan angket dan skala pengukuran psikologis. Isi angket ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang responden dan kondisi sosial ekonominya atau sering disebut variabel sosial demografis.

Angket digunakan untuk mendata variabel-variabel objektif yang tercakup dalam variabel-variabel sosial demografis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. jenis kelamin
2. umur
3. pendidikan
4. pekerjaan
5. pendapatan responden
6. pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
7. jumlah anggota keluarga dan rumah tangga
8. kepemilikan

Masalah validitas dan reliabilitas pengukuran variabel-variabel dengan menggunakan angket tersebut pada umumnya terletak pada cara atau teknis bertanya. Oleh karena itu, dalam menanyakannya dibuat protokol yang jelas tentang prosedur dan teknik pengambilan data sehingga data yang didapat cukup andal. Protokol yang dimaksud sebagian besar diambil dari cara-cara yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik yang secara teratur dan sudah berpengalaman melakukan pendataan sejenis. Dalam penelitian ini protokol diberikan kepada pengambil data dan dijelaskan menjelang pengambilan data dalam sesi penjelasan dan pelatihan. Meskipun cara-cara tersebut dilakukan sedapat mungkin sesuai dengan protokol, dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan asisten pengambil data beberapa kali melakukan kesalahan dalam mendata. Untuk meminimalisasi kesalahan tersebut, dilakukan penyuntingan oleh seorang pengawas lapangan yang tugasnya melakukan pengecekan terhadap setiap jawaban dalam angket. Apabila ditemui kesalahan, pendata harus memperbaiki dengan jalan menanyakan kembali kepada responden yang bersangkutan.

d. Skala. Di samping itu, ada skala pengukuran psikologis yang akan digunakan mengukur penilaian keadilan dan berbagai latar belakangnya. Skala ini dikembangkan berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan dari hasil studi kasus, khususnya dalam

mengembangkan item-itemnya. Dengan demikian, skala yang terdiri dari beberapa pernyataan (item) yang disesuaikan kondisi setempat akan direspons oleh responden berdasar pilihan jawaban yang tersedia yang masing-masing berskala empat. Skala digunakan untuk mengukur variabel-variabel psikologis yang meliputi:

1. penilaian tentang kesejahteraan rumah tangga
2. harapan
3. kontrol
4. penilaian keadilan interaksional
5. penilaian keadilan prosedural
6. penilaian keadilan distributif
7. kepuasan terhadap kerjasama

e. Skala kesejahteraan. Seperti disebutkan, penilaian kesejahteraan memiliki empat aspek utama yaitu kebutuhan dasar, akses pada pelayanan umum, akses pada informasi dan hiburan, aspek hubungan sosial, serta aspek kesejahteraan umum. Secara rinci penilaian kesejahteraan ini diungkap melalui beberapa butir berikut ini.

Kebutuhan dasar:

1. pendapatan rumah tangga
2. keadaan tempat tinggal
3. kemampuan memenuhi konsumsi
4. kemampuan memenuhi kebutuhan pakaian
5. kemampuan membiayai kesehatan

Akses pada pelayanan umum:

1. kemampuan membiayai transportasi

2. kemampuan membiayai pendidikan anggota rumah tangga

Akses informasi dan hiburan:

1. kemampuan mendapat informasi
2. kemampuan membiayai rekreasi

Hubungan sosial: diukur dengan satu item, yaitu kemampuan memberi sumbangan

Umum: diukur dengan satu item yaitu keadaan rumah tangga secara umum.

Skala kesejahteraan yang disusun berdasarkan pertimbangan di atas terdiri dari 11 item. Setiap item direspons oleh responden dengan memilih salah satu dari empat jawaban yang tersedia. Seperti disebutkan bahwa pengukuran kesejahteraan mengukur terpenuhinya berbagai kebutuhan. Agar sesuai dengan tujuan itu, pilihan jawab yang disediakan berkisar antara sangat kurang, kurang, cukup, dan sangat cukup. Semua item favorabel dan untuk memberikan nilai jawaban bergerak dari 1 hingga 4, 1 untuk jawaban sangat kurang dan 4 untuk jawaban sangat cukup.

f. Skala harapan. Harapan yang diungkap secara garis besar terdiri dari dua hal, yaitu harapan umum dan harapan khusus. Harapan umum berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang diungkap dari item-item kesejahteraan dengan perubahan formulasi pengukuran. Sementara harapan khusus dikaitkan dengan fokus penelitian ini, yaitu kebebasan memanfaatkan sawahnya sendiri setiap saat dan meningkatnya pendapatan dari hasil sawah.

Umum:

1. kesejahteraan meningkat
2. pendapatan bertambah

3. mampu memenuhi kebutuhan pokok
4. mampu mencukupi kebutuhan sekunder
5. terdandang di masyarakat
6. cukup waktu istirahat
7. meningkatkan keterampilan
8. menambah pengetahuan

Khusus:

1. pendapatan dari sawah meningkat
2. bebas menggarap sawah setiap saat

Skala harapan tersusun atas 10 item. Setiap item akan diberi bobot nilai dan total nilai skala harapan merupakan penjumlahan dari semua item yang nantinya digunakan setelah dilakukan seleksi item. Pilihan jawaban setiap item terdiri dari 4 kemungkinan yaitu kecil sekali, kecil, besar, dan besar sekali yang secara berurutan pula diberi bobot 1, 2, 3 dan 4. Semua item dalam skala ini juga favorabel.

g. Skala kontrol. Kontrol terdiri dari dua hal, yaitu kontrol proses dan keputusan menyangkut kerja sama pemilik sawah dengan PTPN X. Kontrol proses ini merupakan instrumen yang secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil. Kontrol proses adalah kesempatan yang diberikan kepada pemilik sawah untuk terlibat dalam menyampaikan bahan-bahan pertimbangan dan bukti-bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Orang yang memiliki kontrol proses merasa bahwa argumennya dihargai dan dipakai sehingga dia merasa berperan dalam mengambil keputusan. Kontrol keputusan adalah kesempatan dan hak yang diberikan kepada pemilik sawah untuk mengontrol dan mempengaruhi keputusan yang dibuat dan implementasi dari keputusan tersebut. Kedua kontrol tersebut dalam penelitian ini disatukan menjadi satu variabel yang disebut kontrol.

Tersusun 14 item skala kontrol yang semuanya favorabel. Pada setiap item yang berbentuk pernyataan disediakan empat respons alternatif yang disediakan bagi responden. Alternatifnya mulai dari kecil sekali, kecil, besar, hingga besar sekali. Secara berurutan pula bobot jawaban alternatif tersebut adalah 1, 2, 3, dan 4. Total nilai dari semua item yang terseleksi dari skala ini merupakan tinggi-rendahnya kontrol yang dapat dilakukan oleh responden.

h. Skala keadilan interaksional. Keadilan interaksional terdiri dari tiga aspek yaitu penghargaan, kepercayaan dan netralitas atau ketidakberpihakan. Penghargaan adalah perlakuan secara sopan, respek, dan hormat. Berbagai perlakuan kasar dan sewenang-wenang merupakan kebalikan dari aspek-aspek yang disebutkan itu sehingga dinilai tidak menghargai. Kepercayaan meliputi keyakinan bahwa pihak lain tidak akan memperlakukannya yang berakibat pada kerugian. Kepercayaan ini diberikan pada pihak lain untuk periode tertentu ke depan. Netralitas adalah perlakuan tanpa bias dan tidak memihak yang didasarkan pada fakta sehingga keputusan yang dibuat secara objektif berkualitas. Netralitas tidak selalu sejalan dengan keinginan untuk mendapat keuntungan (favorabel).

Aspek netralitas terdiri dari 5 item, kepercayaan terdiri dari 7 item, dan penghargaan terdiri dari 6 item sehingga jumlah item skala ini adalah 18 buah. Beberapa item bersifat favorabel dan beberapa yang lain tidak favorabel. Semua item berbentuk pernyataan dan akan direspons dengan empat alternatif yang telah disediakan. Untuk aspek netralitas dan penghargaan, alternatifnya adalah sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Untuk item-item favorabel, bobot respons tersebut secara berurutan adalah 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk item-item tidak favorabel bobot responsnya adalah 4, 3, 2, dan 1. Nilai total dari item-item yang terseleksi dari skala ini mencerminkan tinggi rendahnya penilaian keadilan relasional.

i. Skala keadilan prosedural. Keadilan prosedural menurut Levental (dalam Lind & Tyler, 1988) memiliki enam faktor, yaitu konsistensi, tidak bias

(berpihak), akurasi, tidak menyimpang, representatif, dan etis. Namun, dalam perkembangan selanjutnya faktor-faktor tersebut menjadi konsep tersendiri atau menjadi bagian dari konsep lain dalam pembahasan yang berkaitan dengan keadilan. Oleh karenanya, Lind dan Tyler (1988) berpendapat bahwa ada tiga faktor yang bisa diandalkan sebagai faktor keadilan prosedural, yaitu konsistensi, akurasi, dan etika. Konsistensi, seperti dalam keadilan distributif, berkaitan dengan perjalanan waktu dan dari orang ke orang. Akurasi adalah tahap-tahap dalam prosedur yang jelas dan meyakinkan. Etika yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian dengan aturan standar, etika, dan moralitas. Kebalikannya, antara lain, meliputi cara-cara yang meremehkan, menyakiti, curang, atau memata-matai.

Skala ini terdiri atas 15 item yang sebagian favorabel dan sebagian lain tidak favorabel. Total nilai skala ini merupakan penjumlahan dari respons semua item terseleksi yang bobotnya berkisar antara 1 hingga 4. Respons yang disediakan untuk setiap item yang berbentuk pernyataan kemungkinannya adalah sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai.

j. Skala keadilan distributif. Keadilan distributif menggunakan aspek-aspek perbandingan: pihak perbandingan (diri-orang lain) dan waktu perbandingan (masa lalu-sekarang). Secara personal, perbandingan dengan diri sendiri mencakup harapan akan hasil yang dalam keadilan distributif sejajar dengan kebutuhan. Perbandingan dengan orang lain dalam keadilan distributif bisa menggunakan kaidah kesetaraan (*equality*) atau proposional (*equity*). Namun, secara operasional dua konsep terakhir ini dapat juga diterapkan untuk perbandingan dengan diri sendiri, tetapi hasil yang dibandingkan berbeda bentuknya.

Seperti halnya pada skala penilaian keadilan prosedural, skala ini terdiri dari item-item yang sebagian favorabel dan lainnya tidak favorabel. Pilihan responsnya juga sama, sementara jumlah item yang dikembangkan sebanyak 16

buah. Jumlah dari semua respons tersebut merupakan skor total dari penilaian keadilan distributif.

k. Skala kepuasan. Kepuasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kepuasan terhadap berbagai hal yang dilakukan oleh PTPN X berkaitan dengan sewa tanah milik penduduk. Seperti dikemukakan pada bagian awal, ada beberapa hal yang menjadi kepedulian penduduk. Dalam penelitian ini kepuasan diukur berdasarkan masalah yang muncul tersebut sebagai item atau pernyataan, sedangkan responden diminta menyatakan kepuasannya terhadap hal-hal tersebut. Seperti disebutkan pada bagian terdahulu bahwa kepuasan juga merepresentasikan reaksi terhadap permasalahan yang dihadapi, yang meliputi perasaan-perasaan negatif dan positif. Oleh karena itu, skala kepuasan ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek perasaan yang muncul dan kepuasan. Pengungkapan keduanya disesuaikan dengan pengalaman selama melakukan kerja sama dengan pihak PTPN X.

Dua aspek skala kepuasan tersebut disusun berbeda, baik dalam hal bentuk item maupun responsnya. Aspek perasaan disusun dalam beberapa item yang berupa pertanyaan yang menyangkut bentuk-bentuk perasaan, sedangkan responsnya menyangkut frekuensi munculnya perasaan tersebut yang bergerak dari sangat jarang, jarang, sering, dan sangat sering. Aspek kedua yang langsung mengungkap kepuasan terdiri dari item-item yang berupa pernyataan dengan alternatif respons mulai dari sangat mengecewakan, mengecewakan, memuaskan, dan sangat memuaskan. Pada kedua aspek tersebut respons setiap itemnya bergerak antara 1 hingga 4 yang disesuaikan dengan favorabilitas item. Dari respons-respons item yang terseleksi dijumlahkan hingga diperoleh skor total kepuasan.

l. Validitas dan reliabilitas skala pengukur. Semua skala pengukuran variabel penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas skala pengukur menggunakan validitas konstruksi. Selanjutnya dilakukan seleksi item skala dengan mempertimbangkan korelasi item-total. Item akan digunakan dalam skala

bila korelasinya dengan total cukup kuat (0,25). Sementara itu uji reliabilitas menggunakan perhitungan konsistensi internal alpha.

Untuk mendapatkan alat ukur yang andal, konstruk tiap-tiap variabel di atas dijabarkan dalam item-item skala pengukuran. Langkah pertama ini dilakukan dengan jalan membuat daftar berbagai hal (poin) yang tercakup dalam variabel atau aspek-aspeknya. Selanjutnya poin-poin yang ada disesuaikan dengan konteks penelitian sehingga relevansi pengukuran menjadi lebih tinggi. Kontekstualisasi skala ini dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari studi kasus yang sudah dilakukan. Langkah kontekstualisasi ini sangat penting karena dari sebagian data studi kasus menunjukkan bahwa penduduk setempat akan sulit mencerna konsep, ide, atau bahkan pernyataan yang tidak familiar. Karenanya pula, setelah item-item semua skala tersusun dirasa perlu untuk dilakukan uji coba isi dan bahasa yang digunakan dalam skala. Langkah ini dikenakan pertama-tama pada asisten lapangan yang sudah membantu melakukan studi kasus. Pada waktu itu sudah ada masukan yang konstruktif untuk memperbaiki item-itemnya. Beberapa item yang diperbaiki pada umumnya ialah karena menggunakan kata, ungkapan, atau kalimat yang tidak mudah dipahami, kemungkinan menimbulkan kekaburan pengertian, atau pengertian yang berbeda dengan yang dimaksudkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba teks dan konteks skala kepada responden. Hal ini hanya dilakukan kepada empat responden. Sekali lagi pada tahap ini juga diperoleh masukan untuk perbaikan item-item dalam skala.

Setelah alat ukur disusun, langkah berikutnya adalah menetapkan item-item yang dapat disatukan menjadi alat ukur tersebut. Cara yang biasa digunakan untuk ini adalah melakukan uji konsistensi internal skala pengukuran tersebut. Secara teknis dalam paket SPSS/PC+ digunakan analisis reliabilitas yang di dalamnya terkandung dua parameter yang digunakan di sini, yaitu korelasi item-total dan koefisien Alpha. Kedua parameter tersebut digunakan karena

berhubungan erat. Makin tinggi korelasi tiap-tiap item dengan total maka makin tinggi pula koefisien Alphanya. Oleh karena itu, agar skala pengukuran yang disusun cukup andal, diperlukan item-item yang mempunyai korelasi dengan total setidaknya 0,25. Bila hasil uji coba ada item yang mempunyai korelasi lebih rendah daripada itu, dalam analisis selanjutnya item tersebut tidak dimasukkan.

Uji coba dilakukan di wilayah yang sama dengan wilayah penelitian dan menggunakan responden yang karakteristiknya juga sama dengan survai. Hasil pencarian responden untuk uji coba dilakukan dengan cara menghubungi secara individual dan diperoleh 89 orang. Selanjutnya, jumlah inilah yang digunakan untuk analisis data uji coba.

m. Seleksi item-item skala pengukur. Data-data dari uji coba terhadap skala pengukur dianalisis untuk menyeleksi item-item yang digunakan dalam survai. Di bawah ini dipaparkan hasil analisis yang dimaksud, sedangkan hasil lengkap analisisnya terdapat pada Lampiran.

Untuk skala kesejahteraan yang itemnya berjumlah 11 buah (E1-E11), terdapat satu item yang korelasinya dengan total lebih rendah daripada 0,25, yaitu item nomor 7 (E7). Dengan mengeluarkan item ini dari analisis diperoleh koefisien alpha sebesar 0,85. Oleh karena itu, dalam pengambilan data dan analisis selanjutnya item yang digunakan jumlahnya tinggal 10 buah.

Skala pengukuran harapan pada awalnya terdiri dari 10 buah (F1-F10). Hasil analisis uji coba terhadap skala ini menunjukkan dua item (F6 dan F10) berkorelasi rendah dengan totalnya (di bawah 0,25). Setelah kedua item tersebut dikeluarkan dari analisis diperoleh koefisien alpha sebesar 0,77. Untuk selanjutnya skala pengukuran ini hanya terdiri dari 8 item.

Skala pengukuran kontrol pada awalnya terdiri dari 14 item (G1-G14). Hasil analisis terhadap data uji coba menunjukkan bahwa semua item memiliki koefisien korelasi yang tinggi dengan total. Koefisien alphanya juga tergolong

tinggi, yaitu 0,87. Berdasarkan hasil analisis tersebut semua item dalam skala ini digunakan untuk pengambilan data dan analisis lebih lanjut.

Skala penilaian keadilan interaksional yang disusun dari 18 item (H1-H5, I1-I7, J1-J6) dalam analisis uji coba menunjukkan ada tiga item (H3, I3 dan J5) yang korelasinya dengan total kurang dari 0,25. Setelah ketiga item tersebut dikeluarkan dari skala diperoleh koefisien alpha sebesar 0,77. Angka ini tidak berbeda banyak dengan koefisien sebelum ketiga item itu dikeluarkan. Meskipun demikian pada pengumpulan data selanjutnya kedua item dikeluarkan dari skala agar konsisten dengan tujuan seleksi item.

Skala pengukuran penilaian keadilan prosedural pada terdiri dari 15 item. Hasil analisis uji coba menunjukkan bahwa semua item memiliki koefisien korelasi dengan total yang tinggi. Di samping itu, diperoleh koefisien alpha yang juga tinggi, yaitu 0,89. Oleh karena itu, semua item dalam skala ini digunakan dalam pengumpulan data dan analisis lebih lanjut.

Penilaian keadilan distributif yang pada mulanya tersusun atas 16 item (L1-L16) dalam analisis uji coba ditemukan 3 item gugur (L5, L10, L13). Dari tiga belas item yang terseleksi diperoleh koefisien alpha sebesar 0,91. Dalam penelitian selanjutnya tiga belas item itulah yang digunakan untuk mengukur penilaian keadilan distributif.

Skala kepuasan terhadap kerja sama antara petani dengan PTPN terdiri dari 17 item. Hasil analisis uji coba diperoleh koefisien item dengan total yang tinggi pada setiap itemnya. Koefisien alpha untuk skala yang terdiri dari tujuh item ini adalah sebesar 0,91. Untuk selanjutnya skala ini tidak mengalami perubahan.

Rangkuman hasil seleksi item dan analisis reliabilitas skala dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Hasil Seleksi Item dan Uji Reliabilitas Internal Skala-Skala Pengukuran

Skala	Jumlah item awal	Nomor item gugur	Jumlah item akhir	Koefisien reliabilitas
Kesejahteraan	11	E7	10	0,846
Harapan	09	-	09	0,775
Kontrol	14	-	14	0,870
Keadilan interaksional	18	H3, I3, J5	15	0,766
Keadilan prosedural	15	-	15	0,891
Keadilan distributif	16	L5, L10, L13	13	0,844
Kepuasan	17	-	17	0,913

3. Area Penelitian

Penelitian lapangan ini mengkaji satu kelompok masyarakat yang ada pada wilayah tertentu. Fokus kajian penilaian keadilan dalam psikologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerja sama antara dua pihak, yaitu antara petani pemilik sawah dengan PT. Perkebunan Nusantara X Unit Tembakau Klaten (disingkat PTPN X). Sejak zaman pemerintahan Belanda petani di sekitar Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten diharuskan menyewakan tanahnya kepada penguasa melalui perusahaan tembakau untuk ditanami tembakau. Pada saat penelitian akan dilakukan petani juga harus melakukan hal serupa melalui Surat Keputusan Bupati Klaten yang dikeluarkan setiap tahun. Berdasarkan SK Bupati Klaten No. 525.2/1049/1997 dan No. 525.2/454/1997 tampak bahwa pihak petani dan PTPN X harus melakukan kerja sama. Secara singkat ketentuan itu menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, petani sebagai pemilik sawah harus menyerahkan tanah kepada PTPN X untuk ditanami jenis tembakau yang sesuai dengan kondisi tanahnya. Kedua, pada setiap desa pemilik sawah dikelompokkan menjadi dua dan setiap tahun secara bergantian hanya ada satu kelompok yang diharuskan menyerahkan lahan untuk ditanami tembakau. Ketiga, selama tidak dalam proses penanaman tembakau, lahan tersebut boleh dikerjakan

oleh petani. Dalam satu tahun masih ada sisa beberapa bulan untuk ditanami jenis tanaman lain oleh petani atau pemilik. Keempat, sebagai imbalan, petani akan mendapatkan pembagian uang sesuai dengan produktivitas dan luas lahan pada tahun itu. Kelima, untuk mengoptimalkan produksi tembakau, petani diminta terlibat dalam pengolahan lahan. Keterlibatan yang dimaksud bisa dalam bentuk kontrol proses penanaman yang tidak mendapatkan imbalan langsung seperti mengawasi irigasi, pemupukan, dan penimbangan hasil. Selain itu, dimungkinkan adanya keterlibatan yang memerlukan energi tindakan langsung seperti mencangkul, membersihkan lahan, menyemprot hama, memetik, dan lainnya dengan diberi imbalan sesuai dengan upah yang berlaku di bawah koordinasi perusahaan (PTPN X).

Kontrak antara petani dengan perusahaan tembakau di atas sangat sesuai dengan arah penelitian ini yang mengkaji prosedur dan distribusi sekaligus. Di luar ketentuan bahwa petani harus menyerahkan sawah untuk digarap pihak PTPN, mereka masih memiliki kewenangan dalam mengontrol prosedur, terutama hal-hal yang teknis. Salah satu hal yang belum jelas dalam ketentuan tersebut adalah kesempatan petani untuk mengontrol keputusan yang terkait dengan pembagian yang nantinya akan mereka terima. Penelitian di lapangan nantinya diharapkan dapat mengungkap fakta objektifnya. Di samping itu, diharapkan kajian penilaian keadilan seperti pada penelitian ini juga menjadi komplemen kajian objektif itu.

Ada alasan lain untuk memilih wilayah ini. Di antaranya adalah tersedianya dokumen hasil-hasil penelitian terdahulu. Sejauh ini telah cukup banyak penelitian yang dilakukan di sekitar wilayah ini meskipun masalah yang diteliti bukan aspek psikologis. Masalah-masalah yang diteliti di antaranya ialah tentang sejarah pemanfaatan lahan (Roll, 1983), sejarah penanaman tembakau (Padmo, 1994), dan pekerja wanita dalam industri rumah tangga (Susilastuti dan Partini, 1990). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak ahistori karena

beberapa data yang telah dikumpulkan pada penelitian sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial setempat.

Penelitian ini dilakukan di enam desa dari wilayah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, yaitu Sukorejo, Birit, Pandes, Gadungan, Canan, dan Kalitengah. Keenam desa tersebut adalah wilayah yang ditanami tembakau oleh PTPN X wilayah tembakau Klaten. Enam desa tersebut sering disebut juga sebagai kota Kecamatan Wedi. Di kecamatan ini masih ada 13 desa lain yang lahannya tidak ditanami tembakau. Luas Kecamatan Wedi adalah 2.438 hektar. Keenam desa yang dijadikan wilayah penelitian luasnya adalah 726 hektar atau sekitar 30 persen dari wilayah kecamatan, yang terdiri dari 450 ha tanah basah (sawah) dan 276 ha tanah kering. Seluruh sawah di Desa Kalitengah dan Gadungan menggunakan sistem pengairan teknis. Di Desa Sukorejo, Birit, dan Canan sebagian besar sawahnya menggunakan sistem pengairan teknis, sementara di Pandes sebagian besar pengairannya adalah semiteknis.

Pemilik sawah yang lahannya ditanami tembakau tersebut merupakan komunitas yang memiliki karakteristik seperti anggota masyarakat setempat pada umumnya. Meskipun mereka secara kolektif melakukan kerja sama dengan PTPN X, kelompok itu lebih tepat disebut sebagai komunitas daripada organisasi karena dalam kelompok yang anggotanya berjumlah cukup besar tersebut prinsip-prinsip organisasi tidak berjalan dengan baik sehingga sebagian besar anggotanya juga tidak merasakannya sebagai organisasi, apalagi melihat pada sejarah persewaan tanah untuk penanaman tembakau yang telah berjalan ratusan tahun.

Penduduk keenam desa berjumlah 21.625 orang atau sekitar 41 persen dari penduduk wilayah kecamatan dan terdapat 4.727 rumah tangga. Kepadatan penduduk di enam desa, terutama Gadungan dan Kalitengah, lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain karena dua desa tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi penduduk Wedi.

Secara umum, sebagian besar penduduk di Kecamatan Wedi masih mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, tetapi juga dari produk domestik bruto di kecamatan tersebut. Berdasarkan data tahun 1996 (BPS Kabupaten Klaten, 1996) diperoleh gambaran bahwa sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling besar memberikan sumbangan bagi PDRB setempat, disusul lapangan usaha perdagangan, industri, dan jasa. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pertanian, khususnya kegiatan mengolah sawah, masih menjadi tumpuan usaha masyarakat setempat. Dari enam desa penelitian, dua di antaranya tidak begitu menonjol sektor pertaniannya, yaitu Kalitengah dan Gadungan. Di Kalitengah dan Gadungan sekitar separo wilayah dan penduduknya banyak yang melakukan aktivitas pada sektor pertanian, tetapi sebagian lainnya pada sektor perdagangan dan industri. Industri yang menonjol di wilayah ini adalah industri pakaian jadi.

4. Informan dan Responden

Individu sebagai sumber data primer sering diistilahkan secara berbeda-beda menurut jenis penelitiannya. Istilah informan pada umumnya digunakan untuk studi eksplorasi atau penelitian yang bertujuan khusus seperti studi kasus. Informan ini secara sengaja dipilih karena mereka dinilai mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan informasi khusus tersebut, dalam hal ini adalah kontrak kerja sama antara petani dengan PTPN X. Responden sering digunakan dalam survai. Di sini para responden diminta menjawab atau merespons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi respons tersebut pada umumnya sudah tersedia pilihannya. Sementara itu, istilah subjek sering digunakan pada penelitian eksperimental dan penelitian skenario. Mereka adalah orang yang dikenai perlakuan dalam eksperimen atau penelitian skenario tersebut.

Sumber data penelitian lapangan ini adalah orang yang dianggap mengetahui dan dapat mengungkapkan permasalahan setempat dan orang yang memiliki sawah dan pernah menyewakan sawahnya kepada PTPN X. Mereka yang terlibat dalam persoalan pada umumnya tergolong usia dewasa. Pertimbangan lain adalah jenis kelamin. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, masalah gender ikut berpengaruh terhadap penilaian keadilan, terutama keadilan distributif. Karenanya, baik pria maupun wanita dilibatkan dalam penelitian ini. Permasalahannya ialah pemilikan sawah cenderung diatasnamakan kepada laki-laki daripada wanita. Di samping berbagai masalah, pertanian semakin sedikit melibatkan perempuan (Suratiah, 1990). Oleh karena itu, pertimbangan kondisi di lapangan tentang pemilikan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan pemilihan responden.

Untuk wawancara dalam rangka studi kasus diperlukan 10 orang informan. Jumlah ini dinilai cukup sebagai sumber data kualitatif untuk menjawab baik tujuan penelitian yang bersifat deskriptif maupun dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan angket dan skala yang disusun untuk mengungkap data kuantitatif dari survai. Informan ini dicari secara purposif. Kriteria yang digunakan untuk memilih informan di samping mempunyai pengalaman dalam kerja sama dengan PTPN X, dinilai mengetahui banyak informasi tentang masalah-masalah sosial setempat, dan akan dicari beberapa orang dengan latar belakang sosial ekonomis yang berbeda. Ada informan utama lain yang tidak langsung memiliki pengalaman kerja sama dengan PTPN X, tetapi dapat memberikan informasi tentang pola-pola keadilan yang terdapat pada masyarakat di sana. Wawancara dilakukan oleh peneliti (Faturochman) dan seorang asisten peneliti. Asisten ini dipilih berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu berpendidikan sarjana ilmu sosial, menguasai metode penelitian kualitatif, dan berpengalaman melakukan wawancara mendalam. Ketiga kriteria tersebut terpenuhi, dua di antaranya memiliki nilai lebih karena dia adalah seorang pengajar metode

penelitian kualitatif dan mempunyai pengalaman penelitian di wilayah Wedi. Pada tahap awal tugasnya, asisten berdampingan dengan peneliti untuk melakukan suatu wawancara dengan maksud menjaga kualitas wawancara yang dilakukannya, termasuk wawancara yang dilakukannya sendiri.

Pada tahap pengambilan data survai dengan menggunakan angket diperlukan responden sekitar 500 orang. Diharapkan pengambilan data melalui angket dapat dilakukan berdasarkan teknik acak (*random*) dari sejumlah orang yang memenuhi kriteria dan yang akan dibuat daftarnya terlebih dulu. Kriteria yang paling pokok sesuai dengan fokus penelitian adalah memiliki sawah yang disewa oleh PTPN X setidaknya-tidaknya sekali dalam dua tahun terakhir.

Dalam praktiknya, pengambilan responden dalam penelitian adalah sebagai berikut. Dari seluruh pemilik sawah yang ada pada daftar pemilik yang disusun oleh aparat desa dicek ulang dengan jalan menanyakan kepada tiap ketua kelompok tani pada setiap dusun. Aktivitas pendataan awal ini dapat mengidentifikasi 753 pemilik sawah yang tinggal di enam desa penelitian. Angka ini jauh di bawah angka resmi yang tercatat pada setiap desa yang totalnya 1.543. Ada beberapa kemungkinan terjadinya hal itu. Di antaranya adalah ketidakjelasan status kepemilikan karena proses pengalihan hak seperti pewarisan dan jual beli, pindah tempat tinggal, dan pemilikan ganda (seseorang memiliki lebih dari satu petak sekaligus, tetapi tercatat beberapa kali). Dari sejumlah itu, diambil 500 orang sebagai responden. Caranya adalah dengan mengambil 65 persen dari daftar nama yang terdapat pada urutan pertama. Apabila ada orang dalam kelompok 65 persen pertama dalam daftar tidak dapat dijadikan responden, nama berikutnya dalam daftar yang dijadikan responden. Masih ada kemungkinan calon responden ini batal menjadi responden. Mereka adalah orang yang sakit atau terlalu tua, pergi atau tidak ada di tempat selama tiga kali kunjungan, pindah tempat tinggal, kepemilikan sawah sudah dialihkan ke orang lain, tetapi belum teridentifikasi sebelumnya, memiliki sawah lebih dari satu tempat sehingga hanya bisa

diwawancara sekali, sibuk dan tidak bisa diwawancara selama periode penelitian, dan tidak dapat ditemui.

Dari rencana mendapatkan 500 responden, hanya 475 responden yang dapat diwawancarai. Empat responden tidak diperhitungkan dalam analisis karena sebagian besar datanya tidak didapatkan. Mereka adalah responden yang mengalami kesulitan memahami pertanyaan atau tidak dapat menjawabnya. Oleh karena itu, akhirnya hanya ada 471 responden yang datanya dipaparkan pada uraian selanjutnya (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Responden
berdasarkan Desa Penelitian dan Jenis Kelamin

Desa		Perempuan	Laki-laki	Total
Canan	n	30	104	134
	%	24,8	29,7	28,5
Gadungan	n	14	41	55
	%	11,6	11,7	11,7
Birit	n	13	61	74
	%	10,7	17,4	15,7
Kalitengah	n	15	43	58
	%	12,4	12,3	12,3
Pandes	n	21	41	62
	%	17,4	11,7	13,2
Sukoharjo	n	28	60	88
	%	23,1	17,1	18,7
Total	N	121	350	471
	%	100,0	100,0	100,0

a. Latar belakang responden. Sebagian besar responden penelitian ini berstatus menikah pada saat penelitian dilakukan (Tabel 3.3). Hanya ada 2,5 persen dari seluruh responden yang belum menikah. Mereka yang pernah menikah, tetapi pada saat penelitian dilakukan sudah berstatus janda/duda baik

karena cerai maupun ditinggal mati pasangan adalah sebesar 19,3 persen. Kelompok yang terakhir ini sebagian besar sudah berusia lanjut (di atas 60 tahun).

Tabel 3.3
Status Pernikahan berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Status Nikah		Perempuan	Laki-laki	Total
Nikah	n	68	300	368
	%	56,2	85,7	78,1
Belum nikah	n	6	6	12
	%	5,6	1,7	2,5
Janda/duda	n	47	44	91
	%	38,8	12,6	19,3
Total	N	121	350	471
	%	100,0	100,0	100,0

b. Gambaran informan studi kasus. Studi kasus untuk mengidentifikasi permasalahan keadilan di lokasi penelitian difokuskan pada deskripsi pengalaman dan pendapat responden seperti yang diformulasikan dalam pedoman wawancara. Untuk mengungkap hal itu diperlukan beberapa informan dan tidak setiap informan diberi pertanyaan yang sama. Informan-informan utama mendapat pertanyaan sebanyak mungkin melalui wawancara mendalam. Sementara itu, ada beberapa informan yang tidak diwawancarai secara mendalam, tetapi ditanya beberapa hal yang terkait dengan pengalaman dan kemampuannya menjelaskan fenomena yang ada. Informan utama yang dapat diwawancarai secara mendalam berjumlah 10 orang. Sebagian besar dari informan ini adalah laki-laki (8 orang) tetapi ada dua wawancara yang disertai dengan pasangan (istri) responden. Keterbatasan ini terjadi karena ketika mencari informan yang akan diwawancarai untuk masalah-masalah sosial sering peneliti mengarah pada informan laki-laki. Tampaknya masalah-masalah sosial (publik), termasuk isu yang berkaitan dengan perempuan, dikuasai oleh laki-laki.

Dilihat dari pekerjaannya, informan yang diwawancarai cukup mewakili masyarakat setempat. Mereka terdiri dari petani, pedagang, pengusaha, buruh, pamong desa, pegawai negeri dan swasta, penyewa tanah, dan mandor perkebunan tembakau. Di antara 10 informan tersebut, tujuh di antaranya memiliki sawah, tiga lainnya tidak memiliki sawah dan menggarapnya, tetapi mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan masalah keadilan. Dari segi usia, sebagian besar informan tergolong kelompok tua (di atas 40 tahun), ada seorang informan yang tergolong muda. Dari enam desa yang diteliti, informan yang diwawancara secara mendalam terbatas dari empat desa dengan Kalitengah sebagai desa yang paling banyak informannya. Hal ini terjadi karena awal penelitian dilakukan di desa ini dan ketika identifikasi masalah berkembang, di tiga desa lain ditemukan masalah-masalah yang tidak berbeda dengan tiga desa sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa informan yang bukan utama diambil dari tiga desa lain tersebut.

Tabel 3.4
Daftar Informan Wawancara Mendalam dan Latar Belakangnya

Nama	J. Kelamin	Aktivitas utama	Desa
Ny. Ruk	Perempuan	Pedagang	K. Tengah
Ny. Sis	Perempuan	Petani & pedagang	K. Tengah
Wid	Laki-laki	Buruh jahit	K. Tengah
Bah	Laki-laki	Petani & mandor	K. Tengah
Muh	Laki-laki	Pengusaha konveksi	K. Tengah
Suh	Laki-laki	Guru negeri	Canan
Mar	Laki-laki	Petani	Gadungan
Mas	Laki-laki	PN & ketua klp tani	Birit
Suk	Laki-laki	Pamong desa & petani	Gadungan
Nit	Laki-laki	Karyawan swasta & petani	Canan
Ari	Laki-laki	Aktivis	Gadungan

Catatan: nama disamarkan

c. Karakteristik demografis responden. Rata-rata usia responden penelitian ini tergolong tua (57,6 tahun). Tingginya rata-rata usia responden ini setidak-tidaknya karena dua hal. Pertama, sebagian besar responden penelitian adalah pemilik sawah. Mereka mendapatkan lahan tersebut dengan dua cara, mendapatkan warisan atau membeli. Penerima warisan pada umumnya adalah orang yang sudah dewasa dan pembeli sawah adalah mereka yang secara ekonomis sudah mapan. Sejalan dengan siklus hidup, penerima warisan dan yang mapan secara ekonomis pada umumnya juga kelompok dewasa. Kedua, sebagian besar pengelola dan pemilik lahan pertanian adalah golongan usia dewasa. Kelompok usia yang lebih muda lebih tertarik dengan sektor pekerjaan lain.

Responden yang pernah menikah rata-rata anaknya empat. Sementara itu, rata-rata jumlah anggota rumah tangga juga empat. Tidak setiap anak responden tinggal serumah karena mereka sudah berkeluarga sendiri, tetapi juga ditemukan dalam beberapa rumah tangga terdapat bentuk keluarga luas (*extended family*) dan ada beberapa keluarga yang tinggal bersama orang yang bukan anggota keluarga seperti pembantu, penyewa kamar (kos), dan pekerja yang tinggal di sana.

Tabel 3.5
Rata-Rata Usia, Jumlah Anak, dan Anggota Rumah Tangga
berdasarkan Jenis Kelamin Responden

	Perempuan	Laki-laki	Total
Umur (dalam tahun)	56,0	58,1	57,6
Jumlah anak	4,0	3,9	3,9
Anggota rumah tanga	3,9	4,0	4,0

Proporsi terbesar dari responden, sebanyak 41,3 persen, tidak pernah tamat sekolah dasar (SD). Bila digabung dengan kelompok yang hanya menamatkan SD (24,7 persen), ada sekitar dua pertiga responden yang berpendidikan rendah dan tidak berpendidikan formal sama sekali. Fenomena ini berkaitan dengan usia responden yang relatif tua. Seperti data statistik pada umumnya (BPS, 2000b),

kelompok penduduk usia tua berpendidikan rendah. Selain itu, data dalam Tabel 3.6 juga menunjukkan bahwa responden perempuan yang berpendidikan rendah proporsinya lebih besar. Data ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang berbasis pada masalah gender ditemukan dalam banyak aspek kehidupan.

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Pendidikan		Perempuan	Laki-laki	Total
Tidak tamat SD	n	66	128	194
	%	54,5	36,7	41,3
Lulus SD	n	28	88	116
	%	23,1	25,2	24,7
Lulus SLTP	n	13	39	52
	%	10,7	11,2	11,1
Lulus SMU	n	9	63	72
	%	7,4	18,0	15,3
Perguruan Tinggi	n	5	31	32
	%	4,1	8,9	6,8
Total	N	121	349	470
	%	100,0	100,0	100,0

Catatan: Seorang responden tidak dapat menjawab.

d. Kondisi sosial ekonomis responden. Di samping karena sebagian besar responden adalah kelompok usia tua, rendahnya tingkat pendidikan responden juga berkaitan dengan pekerjaan yang digeluti. Pada Tabel 3.7 ditunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden bekerja di sektor pertanian. Selama ini sektor pertanian berasosiasi dengan pekerja berpendidikan rendah (Sekolah Dasar atau lebih rendah). Seperti sudah disebutkan, mereka yang muda dan berpendidikan relatif tinggi cenderung mencari pekerjaan di sektor lain, seperti perdagangan, industri, dan jasa.

Tabel 3.7
Pekerjaan Utama berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Kelompok pekerjaan		Perempuan	Laki-laki	Total
Pertanian	n	54	314	368
	%	44,6	89,7	78,1
Nonpertanian	n	45	35	80
	%	37,2	10,0	17,0
Tidak bekerja	n	22	1	23
	%	18,2	0,3	4,9
Total	N	121	350	471
	%	100,0	100,0	100,0

Dari Tabel 3.7 ditemukan sejumlah responden dengan pekerjaan utama di luar sektor pertanian. Karena memiliki sawah berarti mereka juga memiliki pendapatan dari sektor pertanian, baik dengan cara menggarapnya maupun dengan jalan menyewakannya. Pada umumnya responden penelitian ini memiliki pekerjaan lain di samping pekerjaan utama. Hal ini dilakukan karena penghasilan dari pekerjaan utama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melakukan pekerjaan tambahan adalah strategi untuk bertahan hidup. Cara seperti ini tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Pada kelompok responden perempuan yang sebagian juga berperan sebagai kepala rumah tangga, bekerja rangkap masih belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga (Tabel 3.8). Dalam keadaan demikian maka strategi lain yang digunakan adalah mengerahkan anggota keluarga lain untuk bekerja (lihat Faturochman, 1998b; Sulistyastuti & Faturochman, 2000). Dengan mengerahkan anggota rumah tangga untuk aktif secara ekonomi, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi, bahkan sebagian di antaranya mampu menyalurkan pendapatan untuk ditabung, yang berarti tingkat kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

Dari data-data tentang pendapatan dan pengeluaran tersebut juga bisa dihitung rasio pengeluaran dan pendapatan serta proporsi pengeluaran untuk makan dari pengeluaran total. Dua hal ini adalah indikator yang sering digunakan

untuk melihat taraf kesejahteraan rumah tangga (BPS, 2000a). Dari perhitungan diperoleh angka 1,54 untuk rasio pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga dan proporsi pengeluaran untuk makan dibandingkan dengan pengeluaran total adalah 0,64. Data-data ini sepertinya tidak selaras satu dengan lainnya. Pada satu sisi ada sisa pendapatan rumah tangga yang berarti tingkat kesejahteraan tergolong baik, pada sisi lain proporsi pengeluaran untuk makan masih tergolong besar yang mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mencermati kondisi di wilayah penelitian pada saat penelitian berlangsung. Pada saat itu krisis ekonomi masih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di sana. Krisis ini menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, timbul atau terjadi meningkatnya ketidakpastian hidup. Respons yang dilakukan untuk menghadapinya, antara lain, adalah dengan memperketat pengeluaran dan mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan pokok (makan) dan menyiapkan tabungan untuk digunakan pada saat-saat mendadak diperlukan (Sulistiyastuti & Faturachman, 2000; Kutanegara & Nootembom, 2000). Dengan demikian, dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok pada umumnya dapat dipenuhi, tetapi tingkat kesejahteraan mereka tidak tergolong tinggi.

Tabel 3.8
Rata-Rata Pendapatan dan Pengeluaran per Bulan
berdasarkan Jenis Kelamin Responden
(dalam rupiah)

	Perempuan	Laki-laki	Total
Pendapatan			
Pekerjaan utama responden	199 450	303 880	277 050
Pendapatan total responden	283 070	427 020	390 040
Pendapatan total rumah tangga	592 630	608 290	604 260
Pengeluaran rumah tangga			
Untuk makan	212 130	227 960	223 890
Untuk nonmakan	148 310	149 220	149 060
Total pengeluaran	360 020	386 840	379 950

Kesimpulan di atas diperkuat dengan data-data kepemilikan rumah dan tanah. Pada umumnya responden memiliki lahan pertanian (sawah) sekitar sepertiga hektar. Pemilikan lahan seluas itu untuk usaha pertanian tidak tergolong berpenghasilan tinggi meskipun cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu pula, dapat dimengerti bila responden juga bekerja di sektor lain untuk menambah penghasilan. Dari sejumlah lahan itu, setiap dua tahun sekali harus diserahkan pada PTPN X untuk penanaman tembakau. Rata-rata sawah yang digunakan untuk penanaman tembakau itu adalah satu *patok* menurut ukuran setempat (sekitar 2000 meter persegi) bagi setiap responden. Ada dua jenis tembakau yang ditanam di sawah responden yaitu jenis NO (Na Oogst) dan VBN (Vorstenland Bawah Naungan) dengan perbedaan luas lahan antara keduanya tidak terlalu banyak, demikian juga responden yang menyewakan sawah untuk kedua jenis tanaman tersebut (Tabel 3.9 dan Tabel 3.10).

Tabel 3.9
Rata-Rata Luas Rumah dan Lahan berdasarkan Jenis Kelamin Responden
(dalam meter persegi)

Area	Perempuan	Laki-laki	Total
Rumah	227	247	242
Tanah kering	294	432	396
Tanah basah	3316	3527	3472
Sawah	3224	3415	3365
Sawah disewa PTPN	2142	2108	2117

Tabel 3.10
Jenis Tembakau yang Ditanam di Lahan
berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Tembakau		Perempuan	Laki-laki	Total
NO	n	56	203	259
	%	46,3	58,0	55,0
VBN	n	65	147	212
	%	53,7	42,0	45,0
Total	N	121	350	471
	%	100,0	100,0	100,0

5. Rancangan Analisis

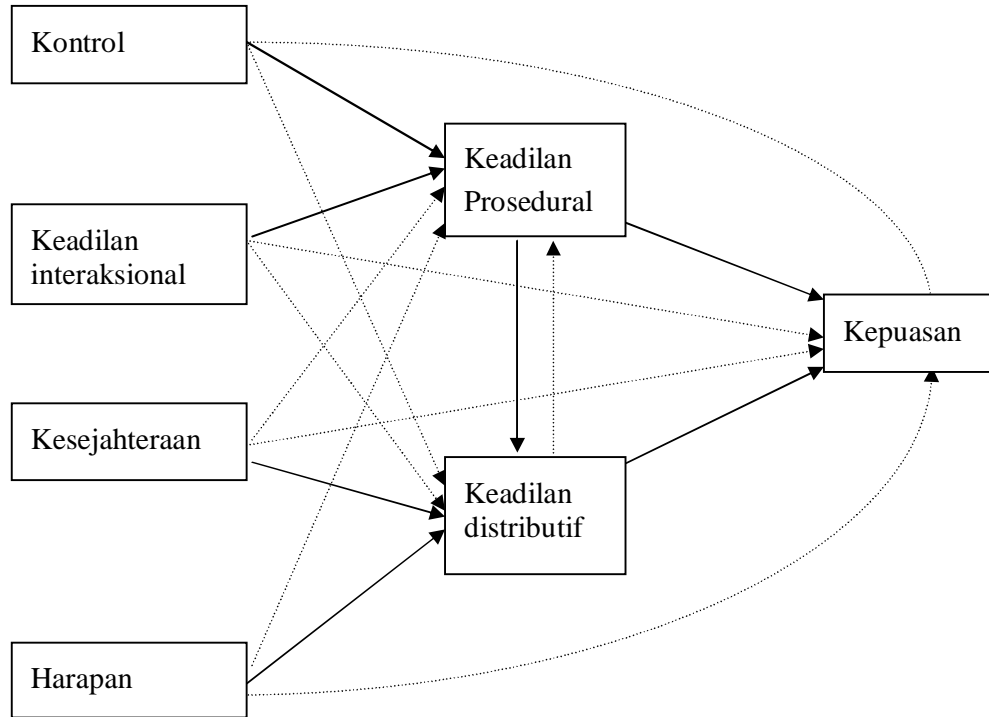
Seperti disebutkan bahwa sebagian besar data wawancara adalah kualitatif. Data ini merupakan narasi, dalam bentuk transkrip hasil wawancara, yang dianalisis dengan teknik analisis isi. Sebagian data wawancara juga dapat dikuantifikasikan, tetapi karena tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena, data ini juga dideskripsikan secara kuantitatif sebagai fakta atau ilustrasi atas permasalahan yang dipaparkan.

Data angket survai dan skala pengukuran psikologis berupa data kuantitatif. Untuk menguji hipotesis pertama digunakan teknik analisis model persamaan struktural (*structural equation model*), khususnya analisis jalur, yang terdiri dari tiga variabel dependen dan empat variabel independen (Gambar 3.2). Artinya, dalam analisis ini semua variabel dianggap sebagai variabel manifes (*observed variables*), bukan sebagai variabel laten. Model-model persamaan struktural ada yang terdiri dari variabel manifes, variabel laten, dan campuran dari keduanya. Di sini semua variabel diperlakukan sebagai variabel manifes karena beberapa alasan. Pertama, secara teoretis model awal yang dikembangkan dan diuji menganggap semuanya sebagai variabel manifes (Tyler, 1994). Kedua, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui proses validasi konstruk, seleksi item, dan uji konsistensi internal. Dengan demikian, eror yang disebabkan oleh pengukuran sudah terdeteksi sejak awal. Ketiga, variabel-variabel tersebut dideskripsikan terlebih dulu sehingga akan lebih mudah memahaminya bila diperlakukan sebagai variabel manifes. Apabila variabelnya adalah variabel laten, penjelasan deskripsinya menjadi makin rumit. Misalnya, untuk menjelaskan apakah distribusinya adil maka dengan menggunakan angka rata-rata atau median dari nilai total skala penilaian keadilan distributif akan lebih mudah dibandingkan dengan, misalnya menjelaskan tiap-tiap item atau faktornya seperti bila menggunakan variabel laten. Keempat, terkait dengan alasan ketiga, model yang terdiri dari tujuh variabel manifes ini lebih mudah dijelaskan dibandingkan

dengan menggunakan lebih banyak variabel manifes yang kemudian disusun menjadi variabel laten.

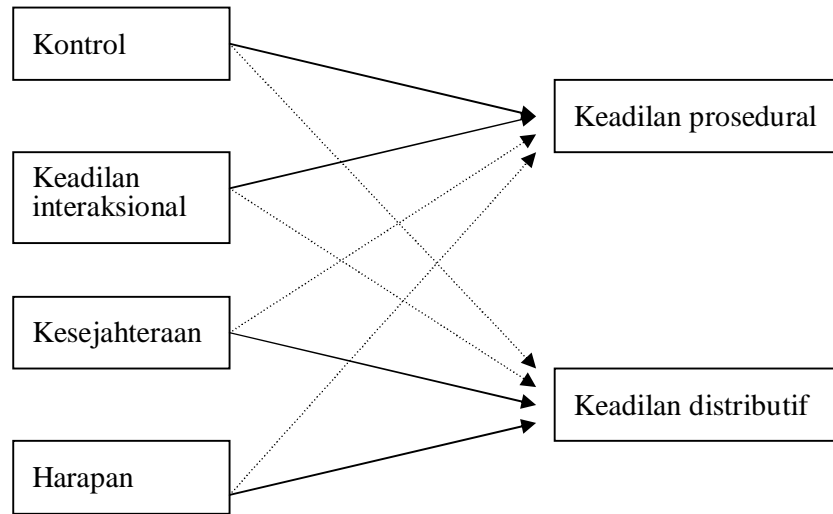
Analisis ini terdiri dari dua langkah dan menggunakan dua perangkat lunak. Pertama adalah langkah menganalisis data kasar untuk diolah menjadi matriks korelasi antarvariabel. Langkah ini dibantu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi yang ada. Langkah kedua adalah menguji model dengan menggunakan data berupa matriks korelasi antarvariabel yang terlibat. Untuk keperluan analisis menggunakan perangkat lunak Lisrel versi 7 (Joreskog & Sorbom, 1989).

Dari pengujian model tersebut tampak besarnya sumbangan (estimasi) setiap anteseden terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif dengan melihat besarnya nilai gamma. Apabila efek kesejahteraan terhadap penilaian keadilan distributif (gamma kesejahteraan-keadilan distributif) lebih besar daripada efeknya terhadap penilaian keadilan prosedural (gamma kesejahteraan-keadilan prosedural) dan efek harapan terhadap keadilan distributif (gamma harapan-keadilan distributif) lebih besar dibandingkan dengan efek harapan terhadap penilaian keadilan prosedural (gamma harapan-keadilan prosedural) sementara efek kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural (gamma kontrol-keadilan prosedural) lebih besar daripada efek harapan terhadap penilaian keadilan distributif) dan efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural (gamma keadilan interaksional-keadilan prosedural) lebih besar dibandingkan dengan efeknya terhadap penilaian keadilan distributif (gamma keadilan interaksional-keadilan distributif), hipotesis pertama terbukti. Dari analisis dengan model ini hipotesis kedua juga dapat dibuktikan. Caranya adalah dengan membandingkan dua efek (beta) yang ada dalam model tersebut. Apabila efek (beta) penilaian keadilan prosedural-keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan efek (beta) penilaian keadilan distributif-keadilan prosedural, hipotesis kedua terbukti.



Gambar 3.2
Rancangan Analisis Jalur Model Penilaian Keadilan

Pada dasarnya rancangan analisis seperti terlihat pada Gambar 3.2 dilakukan untuk menguji model secara keseluruhan, tetapi juga dapat untuk melihat keterkaitan seperti pada hipotesis pertama dan kedua. Di samping itu, kedua hipotesis ini juga bisa dibuktikan dengan membuat model lain yang merupakan bagian dari model di atas. Model yang dimaksud dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 3.3 untuk membuktikan hipotesis pertama dan kedua.



Gambar 3.3
Model Regresi Ganda Multivariat Anteseden Penilaian Keadilan

Dalam rangka membuktikan hipotesis pertama dengan menggunakan model seperti terlihat pada Gambar 3.3 maka diperlukan analisis yang disebut regresi ganda multivariat (Joreskog & Sorbom, 1989). Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah Lisrel versi 7. Cara membuktikan hipotesis pertama dan kedua dengan menggunakan model ini sama dengan analisis jalur di atas.

Model persamaan struktural digunakan dalam penelitian ini karena beberapa alasan.

1. Model ini dapat digunakan untuk menguji keterkaitan beberapa variabel sekaligus tanpa perlu melakukan reduksi yang disebabkan oleh keterbatasan teknis. Salah satu keunggulan yang jelas dapat diamati dari model ini adalah kemampuannya melibatkan lebih dari satu variabel dependen dan memungkinkannya berbagai arah hubungan antarvariabel (tidak harus searah).

2. Keterkaitan antarvariabel yang dilibatkan dapat dilihat sekaligus. Dengan menggunakan model ini maka efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total suatu variabel terhadap variabel lain dapat dilihat sekaligus. Model ini bahkan menunjukkan juga besarnya pengaruh variabel lain yang tidak terlibat dalam model.
3. Model ini dapat menunjukkan kesesuaian antara hipotesis dengan data. Dengan ditunjukkan kesesuaian/ketidaksesuaian data dengan model dan adanya indikator efek satu variabel terhadap variabel lain maka dengan mudah pula dapat dibentuk model-model lain hingga ditemukannya model yang paling sesuai.

Seperti pada pengujian statistik pada umumnya, model persamaan struktural yang dirancang (hipotesis) dalam suatu penelitian juga harus diuji kesesuaiannya dengan data. Beberapa ketentuan pengujian model (Bollen & Long, 1993; Joreskog, 1993; Joreskog & Sorbom, 1989; Saris & Stronkhorst, 1984) adalah sebagai berikut.

1. Derajat kebebasan agar model dapat diterima harus sama dengan atau lebih besar dari nol.
2. Model akan diterima apabila hipotesis nol diterima. Artinya, tidak ada perbedaan antara model hipotetik dengan data. Secara statistik hipotesis nol diterima bila χ^2 kuadratnya tidak signifikan.
3. Indeks kecocokan model (*goodness of fit index*, GFI) bergerak antara 0 sampai 1. Makin tinggi angkanya makin sesuai modelnya. GFI mendekati atau sama dengan 1 berarti modelnya mendekati atau sempurna.
4. GFI dihitung tanpa mempertimbangkan derajat kebebasan sehingga perlu dikoreksi dengan mempertimbang besar kecilnya derajat kebebasan. Dalam program Lisrel perhitungan ini dikenal sebagai indeks kecocokan model yang disesuaikan (*adjusted goodness of fit index*, AGFI)

5. Akar kuadrat rata-rata residu (*the root mean squared residual*, RMSR) mendekati nol berarti ada kesesuaian antara model dengan data. Makin kecil angkanya makin sesuai modelnya. Ketentuan ini didasarkan pada asumsi bahwa kesesuaian model dengan data akan tercapai bila residunya mendekati nol. RMSR dihitung berdasarkan residu yang ada. Sayangnya belum ada kesepakatan tentang besarnya angka RMSR untuk menilai ketepatan model. Ketentuan yang dapat dibuat untuk mengupayakan mendapat model yang RMSR-nya mendekati nol. Ukuran ini berguna untuk membandingkan beberapa model. Bila ada beberapa model, keputusan dapat diambil dengan melihat pada perbedaan RMSR. Model dengan RMSR terkecil dapat dikatakan yang paling sesuai dengan data.

Apabila suatu model dinilai sesuai, langkah selanjutnya adalah melihat efek atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain seperti yang digambarkan dalam model. Seperti disebutkan, ada tiga jenis efek dari suatu variabel ke variabel lain yaitu efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total. Parameter untuk mengukur efek langsung disebut gamma dan beta. Gamma adalah efek langsung dari variabel independen ke variabel dependen, sedangkan beta adalah efek langsung dari variabel dependen ke variabel dependen lain. Di samping ketiga efek tersebut, pengaruh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam model juga akan tampak, yaitu melalui parameter yang disebut psi. Ketiga parameter ini dapat diuji signifikansinya. Menurut Joreskog dan Sorbom (1989, hal. 112) untuk melihat signifikansi parameter tersebut, harus dilihat berdasarkan harga-t yang merupakan hasil pembagian parameter tersebut dengan standar kesalahannya. Bila harga-t antara -1,96 dan 1,96, parameter tersebut tidak signifikan. Sebaliknya, bila harga-t lebih kecil dari -1,96 atau lebih besar dari 1,96, meniadakannya akan menyebabkan model menjadi jelek atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Sementara itu, untuk membuktikan hipotesis keenam perlu dilakukan pemilahan responden berdasarkan tingkat kepuasan dan membandingkan

koefisien korelasi keadilan prosedural dengan keadilan distributif untuk kelompok responden dengan tingkat kepuasan tinggi, sedang, dan rendah. Apabila pada kelompok responden dengan tingkat kepuasan tinggi ditemukan koefisien korelasi kedua variabel lebih rendah dibandingkan pada kelompok responden dengan tingkat kepuasan sedang dan rendah, hipotesis keempat terbukti. Untuk itu, hipotesis keempat ini dibuktikan dengan menggunakan teknik analisis korelasi bivariat (*product-moment*) dan signifikansi perbedaan koefisien ketiganya akan dihitung pula. Analisis korelasi menggunakan perangkat lunak SPSS, sedangkan analisis perbedaan korelasi dilakukan secara manual.

Hipotesis keenam juga dapat dibuktikan dengan menggunakan model persamaan struktural. Caranya adalah dengan membuat model yang sama untuk tiga kelompok responden, yaitu kelompok yang tingkat kepuasannya tinggi, sedang, dan rendah. Dari tiga model yang terbentuk tersebut tampak efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif untuk tiap-tiap model. Apabila hipotesis ini terbukti, efek yang dimaksud paling rendah pada kelompok dengan tingkat kepuasan tinggi. Berbeda dengan ketika menggunakan analisis korelasi yang perbedaan koefisiennya dapat diuji satu dengan lainnya, di sini perbedaan tersebut tidak dapat diuji. Meskipun demikian, analisis ini tetap digunakan agar kesimpulan yang ditarik lebih meyakinkan.

C. Penelitian Skenario

Dari penelitian lapangan dapat diketahui hubungan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif secara umum. Secara teoretis ada pola khusus pada hubungan antara keduanya seperti pada hipotesis ketiga, keempat, dan kelima. Untuk menguji hipotesis ketiga hingga kelima tersebut, diperlukan manipulasi situasi sehingga pola hubungan antara keduanya menjadi jelas. Dalam rangka inilah dilakukan penelitian skenario.

Penelitian skenario ini sering digunakan pada penelitian-penelitian psikologi sosial dengan berbagai topik, termasuk keadilan (Feather 1990, 1992, 1996). Ada beberapa ulasan terhadap model penelitian ini (Greenberg, 1996; Lind & Tyler, 1988). Intinya menyebutkan bahwa penelitian skenario ini menggunakan konsep dasar eksperimen dengan kecanggihan yang mendekati eksperimen. Keunggulan penelitian ini adalah kepraktisannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksperimen dan survai. Sementara itu, penelitian ini dapat memanipulasi variabel seperti halnya dalam eksperimen, sedangkan dalam survai atau studi kasus hal itu tidak dapat dilakukan.

1. Rancangan Penelitian Skenario

Ada tiga hal yang diuji dalam penelitian skenario ini. Pertama adalah pengaruh prosedur terhadap penilaian keadilan prosedural dan pengaruh distribusi terhadap penilaian keadilan distributif. Kedua adalah pengaruh prosedur terhadap penilaian keadilan distributif. Ketiga adalah pengaruh distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural. Menurut teori heuristik penilaian keadilan dari Van den Bosch dalam menilai keadilan, orang akan berusaha menggunakan informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan. Apabila bahan-bahan pertimbangan itu tersedia, tidak akan ada masalah dalam membuat penilaian. Permasalahan akan muncul bila bahan pertimbangan yang dimaksud tidak ada. Menurut teori heuristik tersebut, dalam keadaan demikian orang akan berusaha agar dia tampak konsisten dengan perbuatan, sikap, atau pendapat sebelumnya. Tesis ini telah terbukti dalam menguji keterkaitan antara pendapat tentang keadilan distributif dengan keadilan prosedural. Salah satu penemuan teori ini menyebutkan bahwa penilaian tentang keadilan distributif mempengaruhi penilaian prosedural karena orang menilai keadilan distributif terlebih dulu daripada menilai keadilan prosedural. Dijelaskan lebih lanjut bahwa keadilan objektif pengaruhnya bisa kalah oleh upaya untuk konsisten dalam menilai keadilan.

Dalam penelitian skenario ini dilakukan manipulasi dalam hal urutan pemberian penilaian keadilan oleh subjek. Manipulasi ini terdiri dari dua urutan. Urutan pertama adalah prosedur dan penilaian keadilan prosedural yang diikuti distribusi dan penilaian keadilan distributif. Urutan lain adalah distribusi dan penilaian keadilannya yang diikuti prosedur dan penilaian keadilannya. Untuk menguji besarnya pengaruh urutan terhadap penilaian keadilan prosedural dibandingkan dengan kondisi senyatanya, dilakukan juga manipulasi prosedur menjadi dua kategori yaitu adil dan tidak adil. Hasil penelitian survai menunjukkan bahwa model keadilan prosedural yang berkembang adalah model nilai-nilai kelompok, yang kemudian disebut sebagai model keadilan yang didominasi orientasi relasional². Oleh karena itu, manipulasi prosedur menggunakan model temuan ini. Prosedur yang adil adalah relasi yang wajar, sedang prosedur yang tidak adil dimanipulasi dalam bentuk relasi yang disertai kemarahan dan sanksi.

Penelitian yang dilakukan ini menguji keterkaitan antara penilaian keadilan distributif dengan keadilan prosedural, tetapi manipulasi yang dijelaskan di atas baru pada urutan kedua penilaian dan manipulasi keadilan prosedural. Masih diperlukan satu manipulasi lagi, yaitu terhadap distribusi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian yang dimaksudkan untuk membuktikan pengaruh besar kecilnya distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif. Menurut model penilaian keadilan yang berorientasi pada sumber daya dan model penilaian keadilan yang berorientasi pada identitas kelompok (Tyler, 1994) hasil yang tinggi, yang dicerminkan oleh tingkat kepuasan, mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, keadilan distributif, dan hubungan antara keduanya. Dalam penelitian skenario ini yang dimanipulasi bukan kepuasannya, tetapi

² Hasil lengkap sebagai dasar rancangan eksperimen terdapat pada bab hasil-hasil penelitian khususnya bagian tentang model-model penilaian keadilan.

perbedaan distribusi dibandingkan dengan keadaan pada umumnya (normatif). Bentuk manipulasi perbedaan tersebut bisa lebih kecil, sama, atau lebih besar.

Ketiga pengujian dilakukan bersama-sama sehingga penelitian skenario yang dimaksud ada dua belas yang merupakan operasionalisasi dari tiga manipulasi yang manipulasi pertama (urutan penilaian) terdiri dari dua kemungkinan, manipulasi kedua (prosedur) terdiri dari dua kemungkinan, dan manipulasi ketiga (besarnya hasil dibanding *norma*) terdiri dari tiga kemungkinan. Secara singkat penelitian skenario tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Ringkasan Rancangan Skenario

Urutan Penilaian	Prosedur	Kemungkinan hasil dibanding hasil normal		
		Lebih Besar	Sama	Lebih Kecil
Distributif-Prosedural	Adil	Skenario I	Skenario II	Skenario III
	Tidak adil	Skenario IV	Skenario V	Skenario VI
Prosedural-Distributif	Adil	Skenario VII	Skenario VIII	Skenario IX
	Tidak adil	Skenario X	Skenario XI	Skenario XII

Isi atau skenario dikembangkan dari temuan-temuan studi lapangan³. Hasil temuan ini tidak langsung diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan penelitian skenario, khususnya pemahaman subjek penelitian terhadap skenario yang dimaksud. Untuk keperluan tersebut, hasil penelitian lapangan didiskusikan dengan beberapa orang yaitu ahli sosial ekonomi pertanian, mahasiswa pertanian, dan mahasiswa psikologi. Permasalahan yang dikaji dalam langkah ini meliputi besar-kecilnya hasil pertanian, khususnya hasil kerja sama pemilik sawah dengan PTPN, simplifikasi

³ Dalam Bab IV dideskripsikan tentang permasalahan hubungan antara pemilik sawah dengan PTPN. Bagian inilah yang menjadi dasar penyusunan skenario eksperimen.

hasil pertanian tersebut dalam bentuk angka-angka yang mudah dicerna, dan perlakuan yang diterima petani dari penguasa. Diskusi tersebut merupakan kajian atas kelayakan skenario yang disusun yang menyangkut variasi prosedur dan pembagian hasil (distribusi).

Secara teknis pelaksanaan penelitian skenario yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada setiap subjek diminta untuk secara sungguh-sungguh terlibat dalam kegiatan ini dengan jalan mencermati stimulus yang mereka hadapi dan meresponsnya. Stimulus disajikan dalam bentuk vinyet yang dimasukkan dalam amplop dan respons dilakukan dengan jalan memberikan lingkaran pada angka yang sesuai dengan jawabannya. Kepada subjek akan diberikan tiga vinyet, yaitu berisi informasi umum, informasi tentang hasil pada umumnya dan informasi hasil yang bisa didapat subjek yang diikuti dengan penilaian terhadap keadilan distributif, dan informasi tentang prosedur yang diikuti dengan penilaian terhadap keadilan prosedural. Vinyet tentang informasi umum selalu dimasukkan dalam amplop pertama bersama dengan informasi berikutnya (bisa berupa informasi tentang prosedur atau distribusi). Vinyet terakhir dimasukkan dalam amplop kedua. Tiap-tiap amplop akan diberikan bersama-sama, tetapi amplop pertama harus dibuka dan diisi terlebih dulu, kemudian jawaban dimasukkan ke dalam amplop kembali dan ditutup dengan lem. Amplop kedua tidak boleh dibuka sebelum isi amplop pertama selesai dikerjakan dan ditutup. Perbedaan satu skenario dengan lainnya terdapat pada urutan penampilan informasi dan penilaian serta isi informasinya yang disesuaikan dengan kategori seperti pada Tabel 3.11. Untuk lebih jelasnya, dalam kotak berikut ini ditunjukkan contoh vinyet yang dimaksudkan.

CONTOH VINYET

SKENARIO V

Urutan : Distributif-Prosedur
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : tidak adil

Vinyet I

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan sehingga dalam setahun sawah Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

Vinyet II

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **tiga juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat adil

Vinyet III

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah, pemilik harus menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat adil

Catatan:

Vinyet I dan III dimasukkan dalam satu amplop

2. Subjek Penelitian

Idealnya, subjek penelitian ini merupakan representasi dari responden penelitian lapangan. Dengan demikian, karakteristik subjek penelitian seharusnya sama dengan karakteristik responden penelitian lapangan. Meskipun demikian, penelitian skenario ini lebih memfokuskan pada proses kognitif sebagai dasar dari

teori heuristik penilaian keadilan. Pada berbagai penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya variasi karakteristik subjek penelitian diabaikan karena implementasi dari penelitian skenario akan lebih mengarah pada kajian teoretis. Sebagian besar penelitian skenario dilakukan di kampus dengan mahasiswa sebagai subjeknya. Pembuktian terhadap hipotesis melalui penelitian skenario ini juga lebih menekankan pada pembuktian teori. Oleh karenanya, model seperti itu juga akan diterapkan dalam penelitian skenario di sini.

Untuk keperluan penelitian ini dibutuhkan 360 subjek yang akan dibagi menjadi 12 kelompok penelitian skenario sehingga tiap-tiap skenario akan diikuti oleh 30 subjek. Subjek adalah mahasiswa di dua Fakultas Psikologi yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Wangsa Manggala. Dua lembaga ini dipilih secara purposif untuk mewakili universitas negeri dan swasta yang tidak dikelola oleh yayasan keagamaan dan sekaligus memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Proses penentuan subjek adalah sebagai berikut. Pertama, agar subjek tidak terlalu banyak menduga arah atau tujuan penelitian, dipilih kelompok mahasiswa yang belum banyak belajar teori-teori psikologi. Untuk itu, pilihan pertama adalah kelompok mahasiswa tahun-tahun awal kuliah (tahun pertama dan kedua) pada setiap universitas terpilih. Kedua, pengambilan data dilakukan secara kolektif dan cara yang paling memungkinkan untuk ini adalah mengidentifikasi matakuliah-matakuliah yang pesertanya adalah mahasiswa tahun pertama. Langkah pertama dan kedua ini mungkin kurang selaras dengan maksud itu karena banyak mahasiswa bukan tahun pertama dan kedua yang tergabung dalam satu kelas dengan mahasiswa tahun pertama sebagai konsekuensi diterapkannya perkuliahan sistem kredit. Sementara itu, mengeluarkan mereka dari pelaksanaan pengambilan data dapat berpengaruh pada kesediaan dan keseriusan kelompok yang terpilih sebagai subjek. Di samping itu, ada kemungkinan target jumlah subjek di atas tidak terpenuhi karena kesulitan pengambilan data. Oleh karena itu, sejumlah subjek yang telah lebih dari dua

tahun kuliah termasuk dalam penelitian ini asalkan mereka mengambil kuliah-kuliah tersebut. Ketiga, pembagian subjek dalam kelompok-kelompok skenario dilakukan secara acak. Caranya adalah dengan mengacak kedua belas skenario yang disiapkan dan setiap subjek akan menerima hasil pengacakan tersebut untuk kemudian terlibat dalam salah satunya. Keempat, proses dan hasil pelaksanaan penelitian dinilai sebelum dipastikan data dari tiap-tiap subjek dianalisis. Pada setiap materi atau isi skenario ada item untuk menilai kemampuan subjek memahami materi skenario. Subjek yang berindikasi tidak memahaminya dikeluarkan dan diupayakan dicarikan gantinya. Pada tahap ini ditemukan sebanyak 58 dari 362 subjek yang berindikasi tidak memahami materi skenario, yaitu mereka yang tidak memahami skenario dengan benar berdasarkan isian pada kartu kontrol. Untuk menggantikannya diperoleh 70 subjek yang mengikuti proses pengumpulan data tambahan. Dari sejumlah itu, sebanyak 54 subjek dapat menggantikannya, sedangkan 16 lainnya juga berindikasi tidak memahami isi skenario. Dengan demikian, terdapat 358 subjek yang datanya dianalisis dalam penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa subjek harus memahami skenario secara benar sebab kalau tidak, mereka tidak akurat dalam mempertimbangan distribusi tersebut adil atau tidak.

Dari sejumlah subjek tersebut, subjek penelitian dari Universitas Gadjah Mada sebanyak 93 orang, Universitas Wangsa Manggala 264 orang, dan seorang subjek tidak memberikan keterangan asal universitasnya. Perbandingan jumlah ini cukup proporsional dengan jumlah mahasiswa yang diterima masing-masing universitas pada tahun pelaksanaan penelitian. Subjek perempuan lebih banyak (241 orang atau 67,3 persen) dibandingkan dengan laki-laki (110 orang atau 30,7 persen), dan tujuh orang tidak mengisi identitas jenis kelaminnya. Masa kuliah mereka rata-rata masih tergolong awal, yaitu tahun pertama sebanyak 208 orang (58,1 persen), tahun kedua sebanyak 111 orang (31 persen), tahun ketiga atau lebih sebanyak 33 orang (9,2 persen), dan 6 orang (1,7 persen) tidak memberikan

identitas tahun kuliah. Rata-rata usia subjek penelitian adalah 19,9 tahun dengan kisaran antara 18 tahun (termuda) hingga 35 tahun (tertua).

3. Rancangan Analisis Data

Penilaian keadilan prosedural dan distributif akan diukur melalui skala yang prinsipnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan, "Seberapa adilkah prosedur/distribusi tersebut?" Jawaban merupakan rentangan angka yang skornya dibuat antara 0 hingga 10. Makin tinggi angkanya mencerminkan makin tinggi penilaian keadilannya.

Untuk melihat konsistensi hubungan penilaian keadilan prosedural dan distributif, data kuantitatif dianalisis dengan teknik korelasi *product moment* antara kedua variabel tersebut. Hasil korelasi antara kedua penilaian keadilan dilakukan pada tiap-tiap skenario. Untuk melihat efek prosedur dan distribusi pada penilaian keadilan prosedur dan penilaian keadilan distribusi, digunakan teknik analisis variansi. Sesuai dengan hipotesis ketiga, keempat, dan kelima rancangan analisis variansinya menggunakan dua variabel independen seperti terlihat pada Tabel 3.12. Model analisis ini digunakan lima kali, yang tujuannya ialah untuk menganalisis pengaruh kedua variabel independen terhadap dua variabel dependen dengan dua perbedaan urutan informasi.

Tabel 3.12
Rancangan Analisis Variansi untuk Penilaian Keadilan Penelitian Skenario

Prosedur	Distribusi		
	Lebih Besar	Sama	Lebih Kecil
Adil			
Tidak adil			

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan mengacu pada taraf signifikansi. Hipotesis akan diterima bila taraf signifikansi lebih kecil atau

sama dengan 5 persen ($p \leq 0,050$)⁴. Cara ini sesungguhnya masih kontroversial (lihat Mardapi, 2000; Sugiyanto, 2000; Suryabrata, 2000), tetapi dalam penelitian ini digunakan dengan alasan praktis agar lebih mudah menarik kesimpulan. Meskipun demikian, dalam penyampaian hasil analisis angka-angka signifikansi ditulis apa adanya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang akan menggunakan cara lain dalam menarik kesimpulan. Di samping itu, harga-harga statistik juga ditulis apa adanya dan juga digunakan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan kekuatan peran variabel-variabel yang dilihat.

⁴ Dalam pelaporan taraf signifikansi akan ditulis tiga angka di belakang koma dengan pembulatan pada angka ketiga agar tidak diinterpretasikan tanpa ada peluang kesalahan kecuali pada pelaporan tentang signifikansi kai-kuadrat yang angka-angka hasil perolehannya memang bulat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil-hasil penelitian yang dikelompokkan menjadi empat bagian. Bagian pertama menjelaskan masalah-masalah keadilan yang ditemukan dari penelitian lapangan, khususnya studi kasus, yang diungkap melalui pengamatan dan wawancara. Untuk memperkuat hasil studi kasus, survai juga diarahkan untuk mengungkap masalah-masalah keadilan dengan fokus yang lebih spesifik, yaitu dalam relasi antara pemilik sawah dengan PTPN X. Bagian ini membahas masalah keadilan lain, yaitu dalam relasi buruh dengan majikan dan dalam pemberian bantuan. Dua masalah yang disebutkan terakhir ini dipaparkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sebagian besar datanya dapat dilihat pada Lampiran A. Bagian kedua mendeskripsikan variabel psikologis yang diungkap melalui survai dan pengukuran. Variabel-variabel psikologis ini dianalisis juga pada bagian berikutnya untuk menemukan model penilaian keadilan yang sesuai dengan data lapangan. Hasil pengujian model-model penilaian keadilan secara lengkap disertakan pada Lampiran E. Bagian selanjutnya menguraikan dinamika penilaian keadilan. Dinamika pertama mendasarkan pada teori heuristik penilaian keadilan. Data-data dari penelitian skenario digunakan untuk menguji dinamika penilaian keadilan menurut teori heuristik. Dalam pengujian ini indikasi kepentingan pribadi tidak dimunculkan. Sementara itu, pada dinamika selanjutnya justru dimunculkan indikasi kepentingan pribadi untuk menemukan model penilaian keadilan. Dinamika penilaian keadilan yang terakhir ini dipaparkan berdasarkan data penelitian survai.

A. Masalah-Masalah Keadilan

Di antara banyak masalah keadilan, ada tiga masalah keadilan dalam relasi sosial sehari-hari yang dapat diidentifikasi dengan jelas dari pengamatan di lapangan. Pertama adalah masalah hubungan kerja, khususnya antara pemilik perusahaan konveksi dengan pekerjanya atau buruh jahitnya. Kedua adalah pemberian bantuan sosial di antara penduduk setempat yang dikenal dengan istilah *nyumbang*. Masalah keadilan ketiga ditemukan dalam hubungan pemilik sawah dengan PTPN yang menyewa sawah mereka untuk ditanami tembakau. Di luar ketiga hal tersebut masih banyak ditemukan ketidakadilan, tetapi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ketiganya termasuk paling menonjol di samping pada ketiganya terdapat pola hubungan sosial yang berbeda. Ada satu masalah ketidakadilan yang persisten dalam kehidupan masyarakat setempat, yaitu masalah yang bersumber pada ketimpangan gender. Di sini masalah ketimpangan gender dibahas sekaligus ketika membicarakan ketidakadilan pada relasi buruh-majikan dan pada persoalan sumbangan. Masalah ketimpangan gender dalam pertanian dan kaitannya dengan relasi pemilik sawah-PTPN ada juga, tetapi membutuhkan analisis yang lebih dalam. Secara kultural dan struktural dalam bidang pemilikan sawah dan pengelolaannya telah terjadi ketimpangan 'yang terlalu jelas' yang ditandai oleh termarjinalisasinya perempuan pada sektor ini (Suratiah, 1990). Data-data yang menyangkut masalah ini, yang diungkap melalui perempuan, diwarnai oleh pengondisian yang selama ini mereka alami sehingga kemungkinan besar berupa penilaian yang didasarkan pada kesadaran yang bias (*false consciousness*).

1. Hubungan Buruh-Majikan

Masalah dalam hubungan kerja buruh-majikan ditemukan di mana-mana (lihat *Prisma*, Nomor 3, 1992). Di wilayah penelitian cukup lama majikan atau pemilik perusahaan konveksi memperlakukan buruh jahit mereka secara tidak adil

(lihat Susilastuti dan Partini, 1990). Hubungan kedua pihak ini merupakan hubungan vertikal dengan majikan pada posisi di atas dan buruh pada posisi di bawah. Posisi majikan yang berada di atas itu bisa dilihat dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu pemberian pekerjaan bagi buruh dan penentuan upah.

Buruh jahit, dalam bahasa setempat disebut *gerji*, dipekerjakan atau tidak sangat tergantung pada juragan. Di tiga desa dari enam desa wilayah penelitian ini dengan Kalitengah sebagai pusatnya, pemilik perusahaan konveksi memberikan kesempatan pada buruh jahit untuk mengerjakan tugas borongan (dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *order*) dengan sistem dikerjakan di rumah. Pengusaha memiliki bahan pakaian, memotong, dan menjual produknya. Buruh jahit mengambil bahan yang sudah dipotong, menjahitnya, dan setelah jadi diserahkan kembali ke perusahaan. Pekerjaan menjahit dilakukan di rumah masing-masing buruh jahit. Semua beban dan risiko yang berkaitan dengan proses menjahit ini ditanggung oleh buruh. Pemilik perusahaan hanya membayar ongkos jahit sesuai dengan jumlah pakaian yang diselesaikan oleh buruh jahit.

Pemilik perusahaan menentukan dua hal pokok yang sekaligus merupakan sumber masalah keadilan. Pertama, pemilik mempunyai wewenang penuh untuk memberikan pekerjaan kepada buruh jahit. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan produksi pakaian jadi yang cukup besar di daerah ini akibat permintaan pasar yang menurun. Akibatnya mudah diduga, volume pekerjaan berkurang dan buruh belum tentu mendapat *order* atau pekerjaan dari juragannya. Pada saat krisis seperti ini dan pada musim sepi *order* pada umumnya, buruh jahit hampir tidak mungkin mendapat pekerjaan dari pengusaha lain karena sebagian besar perusahaan yang ada di sana mengalami masalah yang sama. Sekalipun ada perusahaan yang masih berproduksi, mereka tidak memerlukan buruh baru. Nasib buruh jahit yang banyak ditentukan oleh majikan dalam hal mendapat pekerjaan ini diperburuk oleh tuntutan loyalitas buruh kepada majikannya. Artinya, pada umumnya buruh tidak boleh memiliki lebih dari satu juragan.

Sebaliknya, pada saat permintaan akan pakaian meningkat, pemilik perusahaan akan dengan segera minta kesediaan para buruh jahit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Masa seperti ini makin jarang terjadi, tetapi bila keadaan ini benar-benar terjadi, buruh jahit tidak bisa menolaknya. Akibatnya, mereka akan bekerja dengan beban yang berat untuk kurun waktu yang terbatas. Dilihat dari besarnya produksi yang dihasilkan dan juga pendapatannya, pada masa seperti itu mereka mendapatkan hasil yang cukup banyak, tetapi produktivitas pekerja ini sesungguhnya cenderung menurun. Akan lebih buruk lagi bila dilihat dari sisi risiko yang harus mereka tanggung. Dengan cara bekerja seperti itu kondisi tubuh mereka menjadi lebih rentan.

Persoalan kedua berkaitan dengan upah. Sistem borongan menjahit pakaian menempatkan posisi buruh untuk menyediakan modal dan menanggung risiko lebih besar. Dilihat dari sisi ongkos produksi, buruh harus menanggung biaya pembelian benang, jarum jahit yang sering patah, listrik sebagai tenaga penggerak mesin jahit, dan harus memiliki mesin jahit sebagai modal. Selama melakukan pekerjaan itu, semua risiko akibat pekerjaan ditanggung oleh buruh. Akibat dari pekerjaan seperti sakit dan kecelakaan bukan menjadi tanggungan pemilik perusahaan. Bila ada produk yang cacat, buruh juga harus menggantinya. Cukup banyak buruh yang harus mengganti bahan pakaian akibat kesalahan dalam proses pembuatannya.

Semua proses tersebut merupakan hal yang biasa dalam kerja. Permasalahannya ialah ongkos atau upah yang diterima buruh tergolong rendah meskipun tanpa harus menanggung risiko seperti disebutkan di atas. Sebagai ilustrasi berikut ini disampaikan data pada tiga kurun waktu (lihat Susilastuti & Partini, 1990; Faturochman, 1998). Pada sekitar tahun 1960 buruh di sana mendapat upah per hari setara dengan 15 kilogram beras. Pada sekitar tahun 1990, hasil kerja sehari seorang buruh jahit setara dengan 5 kilogram beras. Pada saat penelitian ini dilakukan, akhir tahun 1998, seorang buruh kerja sehari penuh bisa

mendapatkan uang sekitar Rp7,000,00. Jumlah ini masih kotor, belum dikurangi biaya untuk benang, listrik, dan jarum jahit. Harga beras pada waktu itu sekitar Rp2.500,00 per kilogram. Dengan demikian, rata-rata per hari buruh jahit hanya mendapatkan uang bersih kira-kira setara dengan 2,5 kilogram beras. Hitungan terakhir ini didasarkan pada jam kerja penuh dalam sehari. Pada kenyataannya, seperti disebut sebelumnya, cukup banyak buruh yang tidak mendapatkan pekerjaan dalam beberapa hari, bahkan ada yang dalam sebulan terakhir tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Dilihat dari sudut keadilan, ada beberapa masalah yang bisa dikaji lebih lanjut. Pertama, keterikatan buruh dengan pengusaha tidak diimbangi dengan jaminan akan mendapatkan pekerjaan. Hal ini belum sampai pada masalah upah. Buruh sangat tergantung dengan majikan. Dalam hubungan vertikal seperti itu sangat besar peluang terjadinya ketidakadilan. Ditilik dari sudut keadilan interaksional, posisi buruh yang rendah ini mencerminkan kurangnya penghargaan oleh pengusaha terhadap buruh. Apabila buruh lepas seperti ini diberi kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan lain, khususnya dari juragan lain, hubungan tersebut tidak lagi mutlak vertikal dan keadilan lebih mungkin ditegakkan.

Kedua, sistem kerja borongan, yang mirip dengan sistem kontrak, pada dasarnya merupakan cara untuk menyejajarkan dua pihak, pemberi dan penerima pekerjaan. Dalam sistem ini ada aturan yang jelas tentang tanggung jawab dan hak antara kedua belah pihak. Namun, dalam hubungan kerja buruh dengan majikan sering dijumpai ketidaksetaraan tanggung jawab dan hak sejak awal hubungan kerja itu dimulai (lihat Faturochman, 1995). Hal serupa ditemukan dalam penelitian ini. Upaya untuk menyejajarkan posisi keduanya tidak mungkin karena sejak awal buruh sangat tergantung dengan majikannya. Dengan demikian, tidak ada pembagian dalam berbagai hal positif seperti keuntungan, tetapi sebaliknya terjadi pelimpahan tanggung jawab yang lebih besar pada buruh.

Ketiga, nilai upah riil yang terus menurun seperti yang disebutkan terdahulu menunjukkan kurangnya perhatian pada kebutuhan buruh oleh pihak pengusaha. Salah satu konsep keadilan distributif adalah adil berdasarkan kebutuhan. Artinya, suatu distribusi atau pertukaran dikatakan adil bila penerima mendapatkan setara dengan kebutuhannya. Konsep ini oleh sebagian orang diyakini cocok diterapkan bagi kelompok berpenghasilan rendah seperti buruh. Bila ada jaminan bahwa selama terikat dengan perusahaan setiap saat buruh mendapatkan pekerjaan, pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kenyataan banyaknya buruh yang kurang termanfaatkan (*underemployed*) menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bila diupah sebesar yang berlaku sekarang.

Keempat, buruh jahit di lokasi penelitian sebagian besar adalah perempuan. Salah satu faktor pendorong digunakannya sistem borongan yang dikerjakan di rumah adalah upaya untuk meningkatkan status ekonomi perempuan. Sebelumnya perempuan dihadapkan pada dua pilihan yaitu bekerja, yang dikonotasikan dengan meninggalkan rumah, atau di rumah melakukan pekerjaan domestik yang secara sosial, ekonomis, dan kultural kurang dihargai. Setelah mereka menjahit di rumah sendiri, tugas-tugas domestik tidak berkurang. Dengan demikian, mereka harus mengerjakan dua hal sekaligus. Beban berat perempuan ini merupakan masalah struktural dan kultural yang harus dihadapi perempuan karena kelemahan konsep yang dikenal dengan istilah *women in development* (Abdullah, 2001). Dalam kaitannya dengan hubungan kerja buruh-majikan, perempuan harus menerima lagi perlakuan tidak adil. Hasil penelitian (lihat juga Susilastuti & Partini, 1990) menunjukkan bahwa pada umumnya perempuan menerima upah yang lebih kecil dibandingkan dengan pria. Kemungkinan adanya perbedaan upah karena perbedaan jenis pekerjaan memang ada, tetapi dari beberapa kasus yang dijumpai perbedaan upah tersebut juga terjadi karena semata-mata jenis kelamin pekerja. Buktinya adalah suami istri yang

sama-sama bekerja sebagai buruh pada juragan yang sama mendapatkan upah yang berbeda. Bila suami yang mendapatkan pekerjaan, dia akan diupah lebih tinggi dibandingkan dengan bila istri yang mendapatkannya padahal dalam mengerjakan biasanya suami istri tersebut melakukannya bersama dan hal ini diketahui oleh pemberi pekerjaan. Diskriminasi terhadap perempuan ini berjalan terus tanpa ada usaha untuk mengubahnya sebagai akibat tidak sensitifnya pemberi kerja dengan persoalan gender.

2. Hubungan Sosial Kemasyarakatan: Mekanisme Bantuan

Permasalahan keadilan kedua yang ditemukan di wilayah penelitian adalah bersumber pada hubungan sosial kemasyarakatan. Sudah menjadi fenomena umum bahwa dalam masyarakat terjadi mekanisme *menyumbang* yang merupakan salah satu bentuk jaminan sosial (*social security*) agar terjadi keharmonisan sosial. Secara garis besar bantuan atau menyumbang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketika ia mengadakan hajatan.

Ketika kesulitan dialami pada kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, kepada siapa mereka minta bantuan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mudah didapat dari lapangan. Ada dua hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hal ini. Pertama, sejauh ini pengeluaran rumah tangga untuk memberikan bantuan kepada orang lain dirasakan cukup berat. Kedua, hampir semua orang merasakan kesulitan ekonomi sehingga sulit mencari sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk membantu. Meskipun demikian, kesulitan ekonomi rumah tangga pada umumnya mendapat bantuan dari keluarga luas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme bantuan lebih menonjol pada keluarga luas dibandingkan dengan komunitas sekitar tempat tinggal yang tidak ada hubungan keluarga. Salah satu indikatornya adalah besarnya jumlah uang yang disumbangkan. Sumbangan untuk famili selalu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan untuk tetangga atau kawan kerja, kurang lebih dua kali lipat.

Indikator yang lain adalah tembusnya batas administratif seperti dusun, desa, atau kecamatan. Sumbangan untuk famili tidak mengenal batas wilayah, tetapi lebih menekankan pada kedekatan hubungan keluarga.

Penemuan ini agak berbeda dengan temuan Rahardjo (1979) yang menyebutkan bahwa tetangga lebih berperan dalam pemberian pertolongan. Dikatakan agak berbeda karena dalam sumbangan yang berkaitan dengan siklus hidup, kecelakaan dan pembangunan rumah keduanya menunjukkan kecenderungan yang sama, sedangkan perbedaan yang paling menonjol adalah dalam hal pemberian bantuan untuk kesulitan ekonomi. Tampaknya perbedaan ini banyak disebabkan oleh masalah metodologi. Pertama, pada penelitian Rahardjo ditanyakan tentang 'permintaan tolong', sedangkan pada penelitian ini ditanyakan 'memberi' dan 'menerima'. Kedua, penelitian ini mengelaborasi sumbangan, khususnya dalam lingkup keluarga. Dari proses inilah diperoleh informasi lebih detail, seperti jumlah rupiah yang disumbangkan dan intensitas keterlibatannya. Ketiga, penelitian ini dapat merekam jaringan pemberian sumbangan sehingga polanya semakin jelas (lihat Faturochman, 1998).

Dilihat dari frekuensinya, sumbangan paling sering diberikan berkaitan dengan siklus hidup. Di wilayah penelitian sumbangan ini meliputi peristiwa *mitoni* (tujuh bulan kehamilan), kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian, selamatan 40 hari kematian, 100 hari, setahun, dan 1000 hari peringatan kematian. Di samping berkaitan dengan siklus hidup, ada dua bentuk sumbangan yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain, yaitu zakat dan bantuan untuk kecelakaan. Khusus di bagian bantuan untuk membangun rumah, terlihat juga cukup menonjol.

Bentuk sumbangan yang paling populer adalah uang dan barang. Sumbangan yang berkaitan dengan siklus hidup lebih menonjol dalam bentuk barang. Sumbangan untuk kelahiran, *mitoni*, peringatan kematian 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1.000 hari kematian pada umumnya berbentuk barang.

Sementara untuk sunatan, pernikahan, dan sumbangan langsung saat kematian berbentuk uang. Namun, bila dicermati barang yang disumbangkan pada akhirnya akan dijual oleh penerima. Barang yang umum diberikan adalah gula pasir sehingga tidak mungkin disimpan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, sering dinilai sumbangan itu setara dengan sejumlah uang tertentu.

Barang yang disumbangkan kepada famili dalam acara atau peristiwa yang berbeda dengan yang disebutkan di atas pada umumnya bukan gula, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun demikian bentuk sumbangan untuk keluarga juga pada umumnya berupa uang, sedangkan sumbangan untuk pembangunan rumah biasanya berupa tenaga. Tenaga sukarela dalam membangun rumah berlangsung antara 2--3 hari, sesudahnya pembangunan diteruskan oleh pemilik rumah dan tukang yang dibayar. Barang juga diberikan untuk sumbangan ini, sebagian besar berupa bahan mentah (beras).

Secara umum bantuan bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Bila dicermati, ada pertimbangan yang lebih khusus daripada hal itu. Sumbangan untuk famili pada umumnya didasari oleh kewajiban. Sumbangan pada saat keluarga lain tertimpa kematian juga cukup besar pertimbangan kewajibannya, sementara sumbangan untuk kecelakaan di samping pertimbangan kewajiban, juga karena rasa iba atau kasihan. Sumbangan untuk tetangga yang meliputi peristiwa siklus hidup dan pembangunan rumah lebih banyak didasari oleh alasan resiprositas. Berbeda dengan pertimbangan kewajiban dan perasaan iba, pemberian sumbangan yang berasosiasi dengan pertimbangan resiprositas justru dirasakan berat. Kesimpulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa waktu antara menyumbang dan menerima sumbangan dalam proses pertukaran seperti itu sulit diketahui. Bagi rumah tangga muda akan lebih banyak memberikan daripada menerima sumbangan. Pada saat ia menerima sumbangan, nilainya kemungkinan sudah berbeda sama sekali dengan nilai ketika ia menyumbang. Logika seperti

inilah yang tampaknya menjadi dasar penilaian berat ringannya serta penilaian keadilan dari proses pertukaran resiprositas.

Hal serupa ditemukan untuk pertukaran dan bantuan yang diwujudkan secara berbeda. Dalam kasus bantuan tenaga untuk membangun rumah, misalnya, sebagian besar yang terlibat adalah bukan orang kaya. Orang kaya yang berpartisipasi dalam kegiatan itu memberikannya dalam bentuk benda atau uang. Secara ekonomis barang atau uang yang diberikan bisa setara dengan upah untuk tenaga bantuan itu. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu. Bantuan seperti ini tidak hanya bermakna meringankan beban dan pertukaran, tetapi juga kebersamaan. Penggantian tenaga dengan uang berarti menghilangkan makna kebersamaan. Di sini ada masalah keadilan dalam arti keadilan interaksional, yaitu penghargaan pada kelompok yang lebih miskin sekaligus penghargaan bagi adat istiadat yang berlaku.

Kenyataan seperti ini tampak lebih menonjol ketika pelakunya adalah perempuan. *Rewang* atau bantuan tenaga ketika ada hajatan atau musibah sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Waktu yang dicurahkan untuk melakukan pekerjaan ini pun tergolong lama, bisa lebih dari satu hari. Frekuensi melakukan kegiatan ini lebih banyak daripada frekuensi terlibat dalam *sambatan* pembangunan atau renovasi rumah yang melibatkan laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk tenaga lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Dalam analisis gender, isu yang menonjol di sini adalah marjinalisasi perempuan. Kata *rewang* berarti memosisikan perempuan pada peran sosial yang diatribusikan sebagai tempat yang tidak penting. Atribusi seperti ini mengingkari kenyataan bahwa yang mereka kerjakan adalah bagian penting dalam rangkaian kegiatan secara keseluruhan. Pada saat yang sama laki-laki menjalankan peran sosial yang lebih tinggi seperti menerima tamu atau duduk di bagian depan dalam suatu peristiwa hajatan.

Sumbangan juga dirasakan berat, dan merupakan ungkapan yang sesungguhnya mencerminkan ketidakadilan karena bagi penduduk yang kurang mampu seolah-olah harus memberikan sumbangan sebanding dengan jumlah yang diberikan oleh orang kaya. Prinsip pemerataan tidak tepat digunakan. Memang ada toleransi atau permakluman dari masyarakat bila orang yang kurang mampu memberikan sumbangan dalam jumlah yang lebih kecil atau tidak menyumbang sama sekali. Namun, masih dirasakan adanya tekanan sosial bila perkecualian ini dilakukan. Kenyataan ini menjadi sangat ironis karena sumbangan yang sering dipadankan sebagai toleransi dalam prakteknya justru memberlakukan intoleransi.

3. Hubungan Petani dengan PTPN X

Penanaman tembakau di sekitar Kecamatan Wedi dan di sekitar Klaten telah berlangsung sangat lama. Pada saat penelitian ini berlangsung, ada enam desa di Kecamatan Wedi yang areal sawahnya ditanami tembakau. Desa-desa tersebut adalah Kalitengah, Gadungan, Canan, Birit, Pandes, dan Sukorejo. Penanaman tembakau di wilayah ini dilakukan di sawah-sawah milik penduduk dan sawah kas desa. Diperkirakan area yang ditanami tembakau pada setiap tahun adalah seluas 450 hektar.

Ada dua jenis tembakau yang ditanam di wilayah ini, yaitu VBN dan NO. Kedua jenis itu masih merupakan varitas *vorstenland*. Perbedaan yang nyata terlihat pada proses penanaman. Tembakau VBN (singkatan dari *Vorstenland* Bawah Naungan) ditanam mulai Maret hingga September, sedangkan NO (singkatan dari *Na Oogst*) ditanam antara Juni sampai Desember. Secara fisik kedua jenis tembakau itu berbeda ketika tanaman masih tumbuh di sawah. Seperti namanya, VBN ditanam di sawah dengan jalan dinaungi atau dilindungi jaring atau kasa. Fungsi pelindung ini adalah untuk menghindari tanaman dari gangguan hama tertentu dan untuk mengatur jatuhnya butir-butir air ketika hujan sehingga pohon tidak roboh.

Penanaman tembakau di wilayah ini telah mengalami beberapa kali perubahan sistem. Perubahan yang dimaksud menyangkut penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk tembakau. Dari sejumlah sistem yang pernah ada dapat dikelompokkan menjadi dua seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Sistem kolektif. Sistem ini berlangsung antara tahun 1962 hingga 1969. Dalam sistem ini pemilik sawah menyerahkan lahan kepada Perusahaan Nasional Perkebunan (PNP). Penyerahan yang dimaksud bersifat wajib sesuai dengan Surat Keputusan Bupati. Meskipun lahannya diserahkan, pemilik/petani aktif dalam mengusahakan penanaman tembakau yang meliputi pembukaan area, pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, petik atau panen, pengeringan, dan penyerahan tembakau kepada PNP. Dalam sistem ini petani mendapat uang dari dua sumber, yaitu tembakau dan upah kerja. Upah diterima setelah tahapan kerja selesai dan hasil tembakau dibayar setelah penimbangan. Ketentuan upah kerja dan harga tembakau ditentukan oleh pihak pemerintah.

b. Sistem sewa dan bagi hasil. Pada setiap desa areal tanah dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan B. Penanaman tembakau setiap tahun dilakukan secara bergantian di antara dua bagian itu. Dengan demikian, setiap tahun di wilayah ini ada sebagian sawah yang ditanami tembakau dan ada sebagian lainnya yang dimanfaatkan petani untuk ditanami tanaman pangan. Sistem ini dikenal dengan *glebagan*. Hingga tahun 1998, pemilik sawah di wilayah ini diharuskan menyerahkan lahan ke Perseoran Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN) untuk ditanami tembakau setiap dua tahun sekali sesuai dengan giliran antara A dan B.

Kerja sama antara pihak PTPN dengan pemilik sawah merupakan kombinasi antara bagi hasil dan kontrak sewa. Kedua belah pihak mengatakan bahwa kerja sama itu merupakan bagi hasil, tetapi dalam implementasi di lapangan unsur kontraknya cukup besar. Pola kerja sama yang berlangsung hingga saat penelitian berlangsung dikenal dengan istilah Intensifikasi Tembakau *Vorsten*

Landen (ITVL) yang secara resmi dimulai sejak tahun 1983. Rupa-rupanya sistem sewa masih tampak dalam kerja sama itu karena sebelumnya mereka menggunakan sistem yang jelas-jelas merupakan pola sewa lahan. Sistem yang dimaksud dikenal dengan nama Sistem Sewa yang berlangsung antara tahun 1970-1979 dan Sistem ITV pada tahun 1979-1982 (Madenar, 1999).

Kerja sama antara pemilik sawah dengan PTPN dalam sistem ITVL setiap tahunnya diawali dengan adanya Surat Keputusan Bupati yang isinya mengharuskan pemilik menyerahkan sawahnya untuk ditanami tembakau. Karena proses ini telah berjalan bertahun-tahun, pemilik pada umumnya sudah tahu akan hal ini. Surat keputusan itu bagi pemilik sawah hanya merupakan tanda bahwa mereka diharuskan menyerahkan sawahnya atau tidak (dari pengalaman selama ini keharusan itu selalu ada). Mereka harus mempersiapkan sawahnya sebelum diserahkan kepada PTPN. Pada dasarnya persiapan yang dimaksud adalah mengosongkan lahan dari berbagai jenis tanaman pangan yang sengaja ditanam petani. Oleh karena itu, petani harus memperhitungkan betul kapan mereka menanam dan memetik hasilnya. Bila pada batas waktu tanam tembakau dimulai di sawah masih ada tanaman milik petani, mereka berisiko tidak mendapatkan hasil karena padi milik petani dibabat PTPN. Kasus pembabatan pernah terjadi beberapa kali. Untuk menghindari peristiwa itu, PTPN dan kelompok tani biasanya mengumumkan batas waktu mulai menanam, terutama padi, sehingga waktu panen nantinya jatuh sebelum mulai penanaman tembakau.

Waktu penyerahan lahan ini merupakan salah satu masalah penting bagi petani. Meskipun mereka telah mengetahui dan berpengalaman dalam kerja sama itu, penanaman komoditas pertanian masih sangat tergantung dengan musim dan cuaca. Awal musim tanam padi, misalnya, sering harus mundur karena curah hujan belum cukup, sementara irigasi juga tidak selalu lancar. Dalam keadaan demikian, petani tidak dapat mengerjakan sawah sesuai dengan jadwal dan kemungkinan besar bertabrakan dengan waktu penyerahan lahan kepada PTPN.

Mereka berhadapan dengan risiko untuk merugi. Ilustrasi berikut ini merupakan penjelasannya.

Misalnya, tanah harus diserahkan kepada PTPN pada tanggal 30 bulan Maret. Untuk mengantisipasi ini, petani harus menanam padi paling lambat tanggal 30 Desember tahun sebelumnya karena umur padi rata-rata 70 hari dan pengolahan sebelum tanam atau sesudah padi tua adalah sekitar 20 hari. Kadang-kadang petani mengalami kesulitan untuk menanam padi pada tanggal 30 Desember. Masalah paling besar sebenarnya dialami pada musim tanam sebelumnya. Agar pada tanggal 30 Desember sawah sudah ditanami padi, penanaman sebelumnya harus dilakukan pada akhir bulan September atau awal Oktober. Kenyataannya ialah pada bulan ini curah hujan sering belum mencukupi. Mereka mungkin baru bisa menanam sawahnya pada November. Akibatnya, panen menjadi terlambat dan pada akhir Desember penanaman berikutnya belum bisa dilakukan.

Untuk mengatasi masalah di atas, baik petani maupun PTPN sama-sama melakukan upaya agar pihak pemilik sawah tidak rugi. Petani biasanya menanam sawahnya dengan jenis tanaman lain, seperti tanaman-tanaman palawija, yang umurnya lebih pendek. Bila tidak memungkinkan menanam atau petani enggan menanamnya, mereka dapat menyerahkan sawah ke PTPN lebih awal dan pihak PTPN memberikan kompensasi untuk itu yang dikenal dengan istilah *ajon-ajon*.

Setelah sawah diserahkan kepada PTPN, tanah diolah atau dibentuk berdasarkan keperluan. Untuk itu, empang diratakan sehingga seluruh tanah menjadi rata dan yang tampak menonjol adalah patok-patok tanda batas pemilikan. Di samping itu, juga dibuat saluran air baru yang lebarnya 40 sentimeter, dalamnya sekitar 60 sentimeter dengan jarak satu dengan lainnya sekitar 20 meter. Dengan demikian, bentuk lahan berubah setelah PTPN mengerjakannya untuk ditanami tembakau.

Selama lahan digarap oleh pihak PTPN, petani tidak berhak untuk mengelolanya sama sekali. Pada waktu itu pengelolaan tanah dilakukan oleh buruh dan diawasi oleh mandor yang bertanggung jawab kepada PTPN. Pemilik sawah, dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok tani, mulai terlibat lagi setelah musim petik daun tembakau tiba. Daun tembakau yang dipetik dibawa ke los-los pengeringan sebelum dibawa ke pabrik yang terdapat di Desa Gadungan untuk diolah lebih lanjut. Setelah tembakau kering lalu dibawa ke gudang pabrik untuk ditimbang terlebih dulu. Pada waktu penimbangan, ketua kelompok tani ikut mencatat. Total produksi tembakau setiap wilayah akan menjadi pertimbangan pokok pada bagi hasil antara PTPN dengan pemilik sawah. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Dalam satu wilayah, hasil tembakau kering dijumlah. Setelah jumlah produksi ditemukan lalu dikalikan dengan harga tembakau yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, ditemukan produksi total pada satu wilayah dalam satuan rupiah. Angka ini kemudian dibagi dengan luas wilayah itu sehingga ditemukan angka produktivitas per satuan luas (meter persegi). Pemilik sawah akan menerima bagi hasil berdasarkan luas lahan yang dimilikinya.

Untuk mempermudah pemahaman bagi hasil yang dimaksud, berikut ini dipaparkan ilustrasi perhitungannya.

Misalkan satu wilayah terdiri dari 10 hektar sawah. Total produksi wilayah tersebut 14.000 kilogram tembakau kering. Harga tembakau ditetapkan Rp4.100,00 per kilogram. Rata-rata luas setiap petak sawah adalah 1.800 meter persegi. Seorang petani (A) memiliki sepetak sawah. Uang yang diterima dari penanaman tembakau adalah sebagai berikut.

Produktivitas lahan: $14.000 \text{ kg} \times \text{Rp}4.100,00 = \text{Rp}60.200.000,00$

Hasil per meter persegi: $60.200.000 : 100.000 \text{ meter persegi} = \text{Rp}602,0$

Uang yang diterima A: $\text{Rp}602,00 \times 1.800 = \text{Rp}1.083.600,00$

Setelah panen tembakau selesai, tanah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Bentuk tanah yang telah berubah setelah ditanami tembakau harus

dikembalikan seperti sediakala, tetapi ini tidak dilakukan oleh PTPN. Mereka hanya memberikan biaya ‘pengembalian tanah’ yang besarnya ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Pada waktu penelitian berlangsung, misalnya, besarnya biaya yang diberikan kepada petani adalah Rp15.000,00 per patok.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada titik-titik penting dalam penggunaan tanah petani oleh PTPN untuk ditanami tembakau, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) kontrak dan pemberian uang muka,
- 2) penyerahan tanah dari pemilik ke PTPN,
- 3) pengolahan tanah oleh PTPN hingga panen tembakau usai,
- 4) penghitungan hasil panen,
- 5) pengembalian tanah kepada pemilik sawah,
- 6) pemberian uang ‘pengembalian tanah’ kepada pemilik,
- 7) penentuan harga tembakau, dan
- 8) pembayaran bagi hasil dari penanaman tembakau.

c. Permasalahan relasional. Dalam berbagai literatur (lihat Fauzi, 1999; Wiradi, 2000), pemilikan tanah di Indonesia dan khususnya di Jawa merupakan masalah yang kompleks. Di wilayah penelitian ini juga ditemukan hal serupa. Meskipun penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara pemilik sawah dengan pihak PTPN, masalah yang ditemukan di lapangan lebih luas daripada yang dibayangkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama, dalam hal pertanahan pemerintah¹ selalu ikut campur. Sebagai pemegang kekuasaan dan penegak hukum, pemerintah memiliki hak yang besar untuk terlibat, tetapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan itu justru sering menimbulkan masalah. Dalam kasus ini juga tampak bahwa

¹ Hasil penelitian Margono (1998) menyebutkan bahwa semua aparat pemerintah, TNI, dan polisi dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa termasuk di dalamnya.

pemerintah banyak mencampurinya. Hampir pada semua titik penting di atas pihak pemerintah ikut mencampurinya. Idealnya ialah pemerintah yang diwakili aparatur dan lembaga-lembaga di tingkat bawah menjadi penghubung pada hubungan antara dua pihak itu. Hal yang tampak menonjol di lapangan justru terjadi koalisi antara PTPN dengan aparatur setempat dalam menghadapi (berhubungan dengan) petani (Margono, 1998).

Kedua, struktur masyarakat yang cenderung hierarkhis menyebabkan munculnya kepentingan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Definisi yang umum untuk menyebut petani adalah mereka yang curahan waktu aktivitas ekonominya paling banyak digunakan untuk kegiatan pertanian. Berdasarkan definisi ini di wilayah pertanian ditemukan tiga kelompok tani, yaitu pemilik yang sekaligus mengerjakan atau menggarap lahan pertanian, penggarap, tetapi bukan pemilik (biasanya penggarap menyewa sawah kepada pemilik), dan buruh tani (pekerja dari pemilik sawah). Karena penelitian ini mengonsentrasikan pada pemilik sawah, petani yang diteliti secara mendalam adalah kelompok pertama. Di lapangan ditemukan kategori lain yang juga disorot dalam penelitian ini. Mereka itu adalah pemilik, tetapi bukan petani karena aktivitasnya lebih banyak di luar bidang pertanian atau bahkan mereka selalu menyewakan sawahnya kepada pihak lain (petani penggarap atau PTPN). Pemilik tanah yang bukan petani ini memiliki status, pada umumnya, lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik sekaligus penggarap, penggarap, dan buruh. Bagi mereka menyewakan lahan kepada PTPN atau penggarap dinilai sama saja. Secara ekonomis menyewakan kepada PTPN lebih menguntungkan, tetapi mereka mendapatkan keuntungan sosial yang tinggi ketika menyewakan kepada penggarap. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kepentingan di antara pemilik lahan. Ketika berhadapan dengan pihak PTPN perbedaan itu dapat menyebabkan kurang efektifnya penerapan strategi negosiasi.

Ketiga, hubungan petani dengan PTPN telah melewati sejarah yang panjang, yaitu lebih dari satu abad. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tinggi, terutama di Kalitengah dan Gadungan, tidak lepas dari peran perusahaan tembakau (yang sekarang menjadi PTPN) di masa lalu (Padmo, 1998). Puncak kemakmuran masyarakat di wilayah ini sebagai sumbangan dari perusahaan yang dimaksud terjadi pada tahun 1920-an. Akumulasi modal dari hasil tembakau pada waktu itu mendorong masyarakat setempat untuk membuka usaha baru dan menjadi kaya seperti munculnya toko emas serta perusahaan konveksi yang masih tampak hingga sekarang. Ada ikatan historis dan psikologis antara masyarakat setempat dengan PTPN. Ikatan yang dimaksud masih terus berlangsung hingga kini. Hal ini juga terjadi karena pihak PTPN memegang peran sosial di sekitar perusahaan. Sumbangan finansial dan sosial terus diberikan dalam bentuk, misalnya, pembangunan sarana fisik milik desa atau masyarakat setempat dan pemanfaatan sarana fisik (gedung dan masjid milik perusahaan) untuk kegiatan masyarakat setempat.

Keempat, sebagai perusahaan yang cukup besar kinerja PTPN justru sering hanya dilihat dari bagian-bagiannya. Dalam hal penggunaan tanah milik penduduk setempat, pemilik hanya berhubungan dengan aparat desa sebagai mediator dan *sinder* atau mandor. Beberapa kasus seperti bertindak galak terhadap pekerja menunjukkan bahwa mereka sering bertindak yang tidak sesuai dengan kebijakan PTPN. Hal-hal seperti ini mengganggu pola hubungan PTPN dengan pemilik, terutama penilaian pemilik terhadap perusahaan.

d. Permasalahan menurut pemilik sawah. Beberapa catatan di atas perlu diperhatikan karena paparan berikut ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pemilik sawah. Ada beberapa catatan khusus yang disertakan dalam uraian berikut ini untuk menilai objektivitasnya, tetapi pada kesempatan lain fakta yang dipaparkan sepenuhnya mengandalkan pada pendapat pemilik sawah.

Secara sepintas kerja sama antara keduanya lebih menguntungkan pihak PTPN. Bahkan, ada kecenderungan pemilik merasa ‘dirugikan’ oleh PTPN (lihat Faturochman, 1998; Margono, 1998). Kesimpulan ini didasarkan pada perhitungan bahwa pemilik juga menggarap sawah miliknya. Seperti dikatakan di atas, cukup banyak pemilik yang tidak menggarap sawah miliknya. Mereka justru mendapatkan hasil yang lebih besar bila sawahnya disewa oleh PTPN dibandingkan bila disewa oleh petani penggarap.

Ya ... saya tidak menggarap, duduk manis mendapat sejuta lebih bila dipakai PTPN. Bila digarap orang sedikit lebih rendah. Namun, petani harus profesional ... mereka harus menjadi profesional (Ari, Gadungan).

Sebaliknya, bagi penggarap yang tidak memiliki sawah sendiri, penanaman tembakau itu menghilangkan kesempatan untuk memperoleh hasil yang cukup besar.

Bila ditanami tembakau, saya mencari sawah dari tempat lain untuk digarap. Kalau bagian A ditanami tembakau, saya sewa B, atau ke desa lain (Ny. Sis, Kalitengah).

Dengan menggunakan referensi pemilik sekaligus penggarap sawah, berapa besar bagi hasil yang mereka harapkan? Pada umumnya mereka berharap bahwa hasil dari tembakau sebanding dengan hasil dari menanam padi. Alasannya, padi adalah komoditas paling aman, relatif aman terhadap serangan hama dan perubahan cuaca. Dilihat dari hasilnya, menanam padi berarti pendapatannya moderat, lebih besar dibandingkan dengan jagung dan lebih kecil dibandingkan dengan melon. Tuntutan mereka rasional sekaligus mereka mengambil jalan tengah. Berikut ini dikemukakan beberapa perhitungan yang dilakukan petani.

Dengan harga tembakau Rp4.300,00 sekilo, produksipun namung 12 kuintal. Jadi, petani menerima Rp800.000,00 per patok. Meniko tawar-menawar ... dados pun wonten etang-etangane. Kalau maksimal (produksinya) bisa mencapai

pendapatan sejuta dua ratus ribu. Kalau padi 2 musim tanam, per patok satu juta per musim (Suk, Gadungan).

Lha cara etangan petani, nek digarap piyambak puniko ... sata 8 wulan, Maret dumugi Oktober rak 8 wulan, cara pantun pun kalih panen tambah sesasi. Mangka sakniki paling kathah niku sata angsal arto 800-900 ewu. Nek niku 8 sasi ditanemi pantun piyambak, sak panen meh sayuta sapunika. Wingi, rong oyotan (dua kali panen) pun 1,5 juta. Dipendet ragat 300. Rak taksih sejuta punjul (Mar, Gadungan).

Tuntutan petani agar selama sawahnya digunakan untuk menanam tembakau menghasilkan sejumlah uang yang sama dengan ketika mereka menanam padi ternyata tidak mudah tercapai. Pada masa sebelumnya, hasil perhitungan antara dua jenis komoditi yang ditanam itu akan sesuai bila menggunakan patokan perbandingan produktivitas padi dibandingkan dengan tembakau adalah 4:1. Artinya, harga satu kilogram tembakau sebanding dengan harga empat kilogram gabah. Penentuan harga ini tampaknya berdasarkan pada asumsi bahwa harga gabah, sebagai patokan, tidak berubah-ubah secara mencolok dan pemerintah juga membeli gabah dengan sistematis. Pada kenyataannya, harga gabah di pasaran sering lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan yang ditentukan pemerintah. Dengan perubahan harga seperti ini, petani dirugikan. Anehnya, ketika harga gabah dinaikkan cukup tinggi, menjadi Rp1.000,00 per kilogram, dan petani menginginkan formulasi 4:1, PTPN menolak. Apalagi beberapa bulan sesudah itu terdengar lagi kenaikan harga gabah, negoisasi harga juga menjadi tersendat-sendat. Hingga saat ini tampaknya penghasilan dari sawah bila ditanami tembakau dinilai mengecewakan oleh sebagian besar pemilik (lihat juga Tabel 4.1). Agar mereka bisa mencapai tuntutan, dibentuk kelompok petani yang dapat memperjuangkan kepentingannya, terutama dalam hal harga.

Saya punya satu analisa berdasarkan padi, bersih itu fitnya ketemu Rp5.900,00 (per kilo tembakau VBN). Kalau sebatas itu 'kan saya nggak punya nilai tambah, lha njut saya bulatkan enam ribu yang berarti hanya empat kali harga gabah kering. Saya harus punya nilai tambah, lalu saya lima kalikan gabah kering. Saya pikir lima kali harga gabah kering PTP belum tentu menuruti. Kalau nanti

tawar menawar basis saya empat kali gabah kering plus sepuluh persen nilai tambah, itu basis saya. Jadi, ini sederhana supaya dong negosiasinya. Ini kan sangat proposional, tidak hanya mencari keuntungan untuk petani saja. PTP itu juga mencari keuntungan untuk devisa negara, sekaligus membiayai karyawan dan buruhnya (Ari, Gadungan).

Analisis informan Ari itu tidak hanya menggunakan produktivitas lahan sebagai bahan perhitungan, tetapi juga menggunakan analisis perbandingan produktivitas padi dengan tembakau ditambah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang diistilahkannya sebagai nilai tambah. Informan ini adalah orang yang ditunjuk oleh kelompok tani salah satu desa penelitian untuk melakukan negosiasi dengan PTPN dalam menentukan harga tembakau. Sejak pertengahan tahun 1998 ada upaya dari berbagai pihak untuk menetapkan harga tembakau sebelum dilakukan kontrak penggunaan dan penyerahan lahan kepada PTPN. Negosiasi yang dimaksud tidak hanya untuk harga, tetapi juga masalah lain. Namun, yang dianggap paling penting adalah masalah harga ini.

Ada juga pemikiran pada sebagian kecil orang untuk yang menginginkan bagi hasil berdasarkan pada harga tembakau di pasar dikurangi biaya produksi. Namun, keinginan seperti ini disadari juga oleh mereka sebagai keinginan yang tidak mendesak sama sekali. Bagi sebagian besar pemilik, keinginan seperti ini malah dianggap absurd (tidak tahu mekanisme pasar tembakau dan penghitungan biaya produksi).

Harga tembakau yang baik di Jerman 35 dolar, yang jelek 5 dolar. Rata-rata 20 dolar. Saya pikir ongkos produksinya maksimal 60 persen, berarti keuntungannya 'kan 40 persen. Lha kalau petani iki mung njaluk 2 dolar wae, sisane kekno negara, kekno negara Indonesia. Saya ingin argumentasi ke sana. Tapi dua dolar kan Rp15.000,00. Ini kan wah gitu lho. Dulu petani dibawa ke arah ini, tapi malah menjadi beban, pola pikir kami nggak serempak (Ari, Gadungan).

Keinginan untuk meningkatkan pendapatan melalui negosiasi kenaikan harga tembakau sering surut karena ada faktor lain yang menjadi pertimbangan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan disampaikan oleh informan seperti dikutip di bawah ini.

Kalau ditanami padi masih kalah sedikit, tetapi kalau petani sadar bahwa pengangguran menjadi masalah kita bersama, mestinya sudah layaklah sebab dengan adanya tanaman tembakau itu saudara-saudara kita sebagai buruh ada lapangan kerja. Di samping itu, PTP sebagai BUMN juga memberikan kontribusi kepada daerah. Kalau dipikir pada satu pihak kita rugi. Sekarang kalau kita memberi lapangan kerja 'kan terbatas sekali. Kalau PTP ini kan selama tujuh bulan memberi kesempatan kerja (Mas, Birit).

Saya itu sowan ke rumahnya (administratur PTPN Wedi-Birit) minta bantuan kredit. Kemarin juga bilang: 'Pak, ini desa kita mau beli diesel, Pak, kekurangan dana. Bisa nggak bantu-bantu diesel bekas. Iya, katanya'. Kontribusi PTPN banyak sekali, terutama untuk desa saya. Kami nanam sengon minta bantuan 500 bambu. Waktu mesjid bikin tratag, minta bambu lagi. Untuk tujuh belasan minta bantuan juga cair. Ini, mbangun irigasi 315 meter kami sedang mengajukan proposal 3 juta, Insya Allah cair lagi. Jadi, kalau untuk desa sumbangannya besar, kontribusinya besar sekali (Ari, Gadungan).

Dua informan di atas menunjukkan fakta adanya redistribusi. Konsep ini berbeda dengan konsep distribusi seperti tuntutan harga tembakau. Pengaruhnya terhadap negosiasi harga cukup besar. Secara psikologis redistribusi ini menyebabkan petani mengalami disonansi kognitif yaitu antara keinginan menuntut kenaikan harga yang tidak selaras dengan jasa yang diberikan PTPN terhadap masyarakat. Di samping itu, ada juga pertimbangan hubungan baik dengan karyawan, khususnya mandor dan *sinder*.

Kalau ingin menuntut macam-macam sering tidak enak, lha mau bilang sama mandor dan sinder itu nggak enak, wong tiap hari ketemu (Suk, Gadungan).

Berkaitan dengan uang bagi hasil ini, dipermasalahkan juga saat atau waktu menentukan harga per kilo tembakau. Sebelum tahun 1998, harga ditentukan sesudah panen. Agar petani tidak merasa dipermainkan dengan harga,

patokannya adalah empat kali harga gabah kering yang ditentukan pemerintah pada saat panen tembakau berlangsung. Meskipun pertimbangan ini menekankan unsur keterjaminan bagi pemilik, bagi sebagian pemilik dianggap kurang menghargai hak mereka. Mereka menginginkan masalah bagi hasil, termasuk penentuan harganya, sebelum penyerahan tanah. Bila dicermati, upaya ini merupakan bagian dari cara-cara untuk meningkatkan harga tembakau yang akan diterima para pemilik sekaligus menekankan pada sistem kontrak daripada bagi hasil. Dengan cara ini pula mereka bisa menolak permintaan perusahaan untuk menggunakan sawah miliknya ditanami tembakau. Di samping itu, cara ini juga digunakan untuk menekan perusahaan dari segi waktu. Mereka berharap bila waktu tanam sudah semakin dekat, tetapi kesepakatan belum tercapai, perusahaan akan lebih mudah memenuhi permintaan pemilik. Mereka tahu bahwa keterlambatan menanam tembakau berarti menanggung risiko kerugian akibat ketidaktepatan dengan awal musim tanam.

Kami bisa mengerti, seperti yang ditulis di lahan itu paling akhir Maret nyerahke. Kalau ada yang awal April, itu toleransi. Kalau sudah Mei nggak ada toleransi (seorang peserta rapat Kelompok Pemakai Air Gadungan, 29 November 1998).

Setelah ada kesepakatan harga, hal berikutnya yang perlu disepakati adalah jaminan akan hasil penanaman tembakau. Sejauh ini jaminan diperoleh petani dengan adanya uang muka. Pemberian uang muka atas penggunaan lahan petani oleh PTPN tidak akan diminta lagi meskipun penanaman tembakau gagal total. Bagi pemilik sawah jaminan ini tidak hanya diartikan sebagai jaminan semata-mata, tetapi juga berarti tersedianya dana selama mereka tidak menggarap sawah. Bila tidak ada uang muka, mereka harus menunggu hasil selama 6 hingga 8 bulan. Bila selama masa itu mereka tidak memiliki penghasilan lain, ekonomi rumah tangga menjadi kacau. Besarnya jaminan ini sekarang menjadi salah satu aspek yang diperjuangkan.

Yang paling pokok memang masalah harga, sesudah itu pengolahan tanah pascapanen, orok-orok dan sebagainya, kemudian ketiga jaminan. Jaminan minimal 12 kuintal. Dulu 4, 8, 9 dan terakhir 10 kuintal. Kami mau 12 kuintal (Ari, Gadungan).

Data survai menunjukkan bahwa sekitar 70 persen responden puas dengan uang jaminan yang selama ini diterima (Tabel 4.1). Pada masa lalu, uang jaminan itu tidak banyak berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan. Pada masa itu uang jaminan lebih berperan sebagai ‘tanda jadi’ karena harga tembakau dan jumlah uang yang akan diterima ditentukan sesudah panen. Namun, bagi pemilik yang kurang mampu atau kritis dalam menganalisis uang jaminan tersebut dinilai mengecewakan. Dengan uang jaminan yang kecil berarti selama sawah dipakai untuk menanam tembakau, perputaran uang mereka berhenti atau terhambat. Mereka inilah (sekitar 30 persen) yang berusaha agar uang jaminan ditingkatkan.

Dalam suatu pertemuan, sebagian besar anggota kelompok tani menuntut pemberian uang muka sebesar harga yang disepakati dikalikan dengan produksi tembakau sebanyak 13 kuintal untuk setiap hektar. Mengingat produksi tembakau selama ini berkisar antara 12 hingga 15 kuintal per hektar, tuntutan sebesar itu sama artinya dengan pembayaran di muka. Bila pada panen tahun 1998 produksi tembakau per hektar hanya 12 kuintal, permintaan itu tidak hanya sebagai pembayaran di muka, tetapi sebagai jaminan akan tingginya produksi dan akhirnya juga meningkatnya pendapatan petani. Hal ini terungkap dari pernyataan seorang informan.

Jaminan napa? Petani tetep men rugi. Lha nek sakniki model hama ... nek diitung, paling mboten 400 [dari hasil padi]. Nek ditanemi sata apik kok ming 800-900 [untuk selama 2 kali musim padi](Mar, Gadungan)

Ada satu lagi bentuk materi yang diterima petani ketika tanah mereka ditanami tembakau, yaitu bonus. Pemberian bonus ini terhitung sangat jarang

diterima oleh petani. Menurut mereka bonus sering diterima oleh staf dan karyawan PTPN. Sesudah panen tahun 1998, petani mendapatkan bonus. Bentuknya sebagian besar adalah cangkul. Ternyata bonus ini tidak memuaskan petani. Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa sekitar 78 persen pemilik sawah merasa tidak puas dengan bonus yang diterima. Di antara responden juga ada yang merasa tidak mendapatkan bonus (5 orang).

Saya mendengar PTP X, dari direksi, staf, karyawan, mantri, dan mandor dapat bonus. Direksi 16 juta, staf itu 7 juta, mandor 2 juta, karyawan 150 ribu. Mana bonusnya petani? (Ari, Gadungan).

Bonus apa? Nggak ... nggak berarti (Suh, Canan).

Ada bonus, dulu pernah ada. Kemarin juga ada, tapi saya rasa kecil (Suk, Gadungan).

Tabel 4.1
Kepuasan Pemilik Sawah dengan Uang Bagi Hasil, Uang Jaminan,
dan Bonus yang Diterima dari PTPN

Masalah		Kecewa	Puas	Total
Uang bagi hasil	%	69,4	30,6	100
	N	327	144	471
Uang jaminan	%	30,1	69,9	100
	N	142	329	471
Bonus	%	78,3	21,7	100
	N	265	101	466*

* Jumlah responden berkurang karena ada yang tidak menjawab.

Model bagi hasil berarti ada pembagian keuntungan dan risiko sekaligus. Keuntungan akan meningkat bila produktivitas juga meningkat. Karenanya, pemilik lahan peduli dengan produktivitas penanaman tembakau. Salah satu ukuran untuk menilai produktivitas yang diinginkan pemilik lahan adalah dua puluh kuintal tembakau kering per hektar. Selama ini rata-rata hasilnya baru mencapai sekitar empat belas kuintal per hektar. Bagi pemilik lahan target ini akan tercapai bila pengolahan lahan diupayakan secara maksimal. Caranya adalah

dengan menerapkan baku teknis pengolahan yang meliputi pengolahan lahan (pembuatan saluran atau got, *gebrus*, dan *dangir*), pemupukan, dan pengelolaan saat panen (usai petik dan pengeringan).

Seperti dikatakan sebelumnya, waktu penyerahan lahan kepada PTPN bagi pemilik kadang menimbulkan masalah, demikian juga lamanya waktu yang digunakan untuk menanam tembakau. Bila petani harus menyerahkan tanahnya lebih awal, mereka menerima kompensasi akan hal itu (*ajon-ajon*) yang besarnya sekitar Rp15.000,00 per bulan untuk setiap patok (sekitar 1.800 meter persegi). Jumlah ini terhitung sangat kecil. Sementara itu, lamanya waktu yang digunakan dipermasalahkan karena petani menjadi 'pengganggu' selama tanahnya ditanami tembakau. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa selama ini petani yang tidak mempunyai pekerjaan lain sebagian tergolong setengah menganggur. Selama penanaman tembakau terbuka peluang untuk menjadi buruh perkebunan, tetapi pada umumnya mereka enggan karena harus terikat dengan waktu dan secara psikologis merasa kurang enak menjadi buruh di tanah milik sendiri. Khusus bagi pemilik sawah yang ditanami tembakau jenis VBN, menyerahkan sawah pada bulan Maret berarti mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari panen *gadu* yang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan panen musim *rendeng*. Waktu penyerahan itu bagi sebagian pemilik sawah (41 persen), terutama yang sawahnya ditanami tembakau VBN, menimbulkan kekecewaan (lihat Tabel 4.2).

Permasalahannya, pada saat panen kalau VBN itu waktunya nanggung, bulan sepuluh, bulan itu biasanya sulit air, kita ndak bisa menanam, menanam baru dilakukan pada bulan dua belas. Itu yang pertama, yang kedua bermasalah juga karena penyerahan jadi lebih awal (Mas, Birit).

Jangka waktu penanaman tembakau, NO adalah 6 bulan dan VBN 8 bulan, bagi sepertiga pemilik sawah (lihat Tabel 4.2) menyebabkan munculnya kekecewaan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kesempatan untuk mendapatkan

tambahan pendapatan dari pengolahan sawah selama masa ditanami tembakau. Di samping itu, bagi pemilik yang biasa menggarap lahan sendiri, selama enam hingga delapan bulan mereka menjadi berkurang aktivitasnya.

Selama ditanami tembakau jangan hanya dihitung kehilangan kesempatan menanam padi atau apa di sawah. Saya biasanya menanam kacang panjang di pematang sawah. Lha pas ditanami tembakau ya kami juga nggak bisa dapat tambahan hasil. Kemarin saya dapat 150 ribu hanya dari kacang panjang yang ditanam di pematang (suara peserta pertemuan kelompok pengguna air Gadungan, 29 November 1998).

Tanam padi itu sambilan. Kerjanya hanya waktu nyangkul, tanam, matun dan mupuk. Kalau 6 bulan tidak nggarap sawah ya jadi kehilangan kesempatan nyambi (Bah, Kalitengah).

Sudah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa sebelum tahun 1998 penyerahan lahan kepada PTPN secara bergiliran adalah wajib. Setiap tahun Bupati Klaten mengeluarkan Surat Keputusan yang isi pokoknya adalah kewajiban menyerahkan lahan dan kerja sama yang diinginkan oleh pemerintah antara petani dengan PTPN. Karena ketentuan-ketentuan yang diterapkan disusun oleh pihak pemerintah, kerja sama itu lebih tepat disebut sebagai paksaan atau perintah untuk patuh. Lebih dari separo responden kecewa karena dipaksa menyerahkan lahannya (Tabel 4.2). Kekecewaan tersebut terungkap dari berbagai pernyataan pemilik sawah, di antaranya dikutip seperti terlihat di bawah ini.

Biasanya tinggal perintah, terus ke lurah. Pihak PTPN berhubungan dengan lurah, masa ini kena mbako, petani disuruh ... lewat RT-RT. Idealnya kalau ada sesuatu dirembug. Ini tinggal dawuh saja (Suh, Canan).

Menawi mriki kados dene peksan, kok. Tiyang mriki mung nggih ajrih ... ngaten ... pun, lha menawi mungel teng pemerintah mangke trus tersangkut ... mangke 'PKI kowe!'. Ontene ming ajrih thok. Dadi kados dene ... tertekan. Bentuke nggih sok-sok ngajak koramil napa polisi teng kelurahan ... nek sajake angel nggawa polisi siji ... koramil. Nek saged ngaten nggih kepengin ... sedoyo nggih kepengin mboten sah ditanemi sata. Ampuna dipekso niku jane petani niku mboten angsal. Siti kulo ditanemi VBN, menawi

ken milih ... milih NO, ning umpami bebas ... pilih mboten ditanemi sata (Mar, Gadungan).

Pada masa OrdeBaru itu SK Bupati itu 'kan seolah-olah semua jajaran atau bawahan harus mengamalkan SK Bupati, dari camat sampai lurah. Petani sudah tidak bisa merubah lagi karena terpuruk dalam SK itu. Bagaimanapun juga nek bukan jiwa pejuang, bukan ahli politik mesti ndak berani ... kekuatan pada saat itu seolah-olah adalah mutlak. Sekarang ada pemberdayaan hak demokratis ... kan ada. Itu ada jaminan hukumnya. Kalau bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau belum bisa menerima semua pihak bisa ke kantor Bimas, asisten Diperta, sama Bupati. Kalau semua belum bisa menerima, mungkin diajukan sampai di pengadilan. Sekarang PTP tidak bisa mengharuskan tanam tembakau, tidak bisa. Kalau cocok silahkan. Nanam boleh, kalau tidak mau tidak apa. Makanya besok hari apa akan ada pertemuan dalam bentuk perjanjian yang komprehensif, menyeluruh. Kalau kemarin rembug dengan PTP hanya kesepakatan masalah harga. Untuk tahun yang akan datang ini semua akan dilibatkan dalam perjanjian itu, ya keikutsertaan PKL, ya dalam teknisnya, sampai masalah harga (Mas, Birit).

Tabel 4.2

Kepuasan Pemilik Sawah dengan Penyerahan Lahan, Waktu Penyerahan, dan Lama Diserahkan kepada PTPN untuk Ditanami Tembakau

Masalah		Kecewa	Puas	Total
Keharusan menyerahkan	%	51,4	48,6	100
	N	242	229	471
Saat penyerahan	%	41,4	58,6	100
	N	195	276	471
Lama diserahkan	%	34,3	65,7	100
	N	161	309	470*

* Jumlah responden berkurang karena ada yang tidak menjawab.

Setelah sawah ditanami tembakau, PTPN biasanya menanam orok-orok sebagai upaya untuk menjaga kesuburan tanah. Bagi sebagian petani (lihat Tabel 4.3) ada masalah dalam proses pemeliharaan kesuburan ini. Tanaman orok-orok yang ada dinilai kurang banyak dan kurang terpelihara.

Sak bibar ditanemi sata ... cengkar. Kathah erosine. Umpami sakniki sata, didangir, kering, dibedol, dilep, lamine katut ... kantong lemah napa jenenge ... ampas ... sarine padha keli (Mar, Gadungan)

Mestinya orok-orok diserahkan saja ke petani. Biar kita yang menanam, kasih benihnya saja. Jumlahnya ditambah. Tiga kali lipat (mantan Lurah).

Orok-oroke dipangan mendo, pun ... mboten kalap (Mar, Gadungan).

Sesudah itu sawah diserahkan kembali kepada pemilik. Pada saat itu bentuk tanah tidak siap untuk ditanami oleh petani, empang belum ada, dan saluran air masih ada di tengah-tengah lahan. Bagi sebagian besar petani (75 persen) bentuk tanah yang tidak siap tanam ini mengecewakan (Tabel 4.3). Untuk mengembalikan lahan hingga siap ditanami diperlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Menurut petani untuk mengembalikan tanah seperti sedia kala, diperlukan waktu sekitar dua minggu. Sementara itu, PTPN hanya memberikan uang untuk mengembalikan tanah sebesar Rp40.000,00 per patok. Apabila pekerjaan ini diserahkan pada buruh, diperlukan sekitar Rp70.000,00. Dengan demikian, penggarap sawah harus menambah Rp30.000,00. Bagi mereka hal ini jelas menjadi masalah yang tidak diinginkan.

[Biaya pengembalian]...kurang, untuk pemulihan tanah harus ditingkatkan..setiap kita mengadakan pertemuan dengan PTP mesti itu diminta karena tidak sesuai. Paling ndak kalau untuk pemulihan itu 6 hari. Buruh itu satu hari 'kan 5 ribu masih ngingoni, ngei wedang, total 7 ribuan. Kalau 15 ribu [dari PTP] itu hanya untuk 2 hari, dua hari nggak selesai. Paling ndak .. minim sekali 30 ribu (catt: luas lahan 1.800 meter atau 1 patok)(Suk, Gadungan).

Ya memang yang masih menjadi kendala adalah pemulihan tanah. Kemarin-kemarin ini istilahnya PTP hanya memberi sumbangan. Sumbangan itu besarnya 35 ribu (catt: luas lahan 5.000 meter). Permintaan petani 3 kali lipat, itu pun kalau diterapkan secara hari kerja belum mengena. Kalau yang memenuhi target adalah 60 ribu per patok (Mas, Birit).

Apakah perubahan besar ini bisa dirasakan oleh dan dimanfaatkan oleh petani? Dalam suatu pertemuan dengan beberapa perwakilan kelompok tani, peneliti bertanya: “Seandainya Bapak-Bapak (semua laki-laki) keberatan tanahnya ditanami tembakau, apakah berani menolak kontrak kerja sama dengan PTPN?” Ternyata tidak ada jawaban atas pertanyaan ini. Setelah diskusi panjang, pertanyaan tersebut juga tidak dijawab. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika permintaan harga tembakau tidak dipenuhi, PTPN memasang harga di bawah tuntutan, dan negosiasi antara kelompok tani dengan PTPN mengalami jalan buntu, kesepakatan yang diambil adalah menyerahkan keputusan pada setiap pemilik sawah. Artinya, mereka yang mau dengan harga dari PTPN dapat menjalin kerja sama atau menyerahkan lahan, sedangkan yang menolak tidak perlu menyerahkan lahan. Anehnya, hampir semua pemilik menyerahkan lahan itu. Mengapa?

Kita sedang berjuang. Saya ibaratkan perjuangan ini dengan makan bubur panas di atas piring. Cara terbaik memakannya adalah menyendok bubur dari pinggir terus ke tengah. Lama-lama bubur ini akan habis. Saya yakin perjuangan ini akan berhasil. Ini baru awal, kok (Dan, Pandes).

Tabel 4.3
Kepuasan Pemilik Sawah Setelah Tanah Digunakan
untuk Penanaman Tembakau PTPN

Permasalahan		Kecewa	Puas	Total
Kesuburan	%	35,5	64,5	100
	N	167	304	471
Bentuk tanah	%	74,9	25,1	100
	N	353	118	471
Biaya pembenahan	%	88,7	11,3	100
	N	418	53	471

d. Pertimbangan-pertimbangan PTPN. Agar informasi yang dipaparkan lebih seimbang, berikut ini diuraikan beberapa pandangan pihak PTPN dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sewa kontrak sawah untuk ditanami tembakau. Namun, sebelum diuraikan lebih lanjut perlu juga disampaikan bahwa ada informasi yang sulit diungkap, terutama yang menyangkut penentuan harga tembakau per satuannya.

Anggapan bahwa hubungan kedua pihak itu merupakan hubungan yang seimbang cukup kuat di lingkungan PTPN dan pemerintah setempat. Mereka juga menganggap bahwa pola yang diterapkan adalah pola bagi hasil. Tujuannya adalah agar pemilik sawah ikut aktif dalam pengelolaan tanaman tembakau. Dengan bagi hasil, pemilik akan ikut terlibat dalam proses penanaman, khusus dalam mengawasinya. Keterlibatan atau pengawasan itu dirasakan perlu sebab dengan demikian kualitas pengelolaannya terjamin, yang pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas tembakau yang tinggi pula. Seperti diketahui bahwa produktivitas dalam arti nilai jual tembakau sangat tergantung dengan kualitasnya. Untuk mencapainya, harus dilakukan sejak sebelum benih ditanam, yang meliputi pengelolaan tanah, pemupukan, pembuatan saluran air, penyemprotan hama, pemetikan, pengeringan, cara membawa, dan lainnya. Ketidakpedulian terhadap ini semua menyebabkan kualitas tembakau menjadi buruk dan harga jual rendah sehingga pemilik sawah juga akan memperoleh bagian yang kecil.

Pada waktu harga tembakau ditetapkan sebesar empat kali lipat harga gabah kering, pertimbangan yang digunakan adalah produktivitas lahan. Satu hektar sawah setiap panen menghasilkan sekitar 3 ton gabah kering. Bila satu musim tanam tembakau sebanding dengan dua kali panen padi, produktivitas lahan dihargai 6 ton gabah. Hasil penanaman tembakau per hektar untuk panen yang baik sekitar satu setengah ton tembakau kering. Hal ini berarti bahwa berat timbangan hasil padi dalam jangka waktu tanam yang sama sebanding dengan empat kali berat timbangan tembakau. Maka dari itu, nilai uang per kilo tembakau

sebanding dengan empat kilo gabah. Angka-angka yang digunakan untuk penghitungan hasil padi ini adalah angka bersih, sudah dikurangi ongkos produksi. Berkaitan dengan upaya melibatkan pemilik dalam mengontrol proses penanaman tembakau seperti dijelaskan sebelumnya, mereka dapat menambah pendapatan dari lahan itu bila mau menjadi pekerja waktu tembakau ditanam.

Pihak PTPN merasa perlu untuk menjamin semua risiko dan kerusakan yang terjadi selama sawah ditanami tembakau. Bentuknya adalah uang muka bagi hasil, uang *ajon-ajon*, dan biaya pengembalian lahan. Pada saat penelitian ini berlangsung PTPN bahkan akan meningkatkan uang muka hingga setara dengan lima puluh persen perkiraan hasil total. Namun, dalam hal *ajon-ajon* dan biaya pengembalian tanah PTPN belum mau memberikan kompensasi yang lebih tinggi karena keduanya tidak langsung berkaitan dengan produktivitas lahan.

Dari sejarahnya upaya penggunaan sawah ini selalu tidak memuaskan dalam hal penentuan transaksi antara kedua belah pihak. Penentuan bagi hasil dengan menggunakan kesepakatan harga tembakau sebagai patokan antara petani dengan PTPN merupakan masalah yang pelik. Tembakau yang ditanam di sana sebagai komoditas ekspor harganya mengalami perubahan yang sering sulit diramal. Berbeda dengan pada waktu permintaan tembakau dunia belum bisa tercukupi oleh produsen, yang harganya ditentukan oleh produsen, pada saat ini produksi tembakau dunia telah mencukupi permintaan. Dengan adanya peraturan dan kampanye antirokok yang makin gencar, permintaan akan tembakau diramalkan akan terus menurun (*Kompas*, 12 September 2000).

Penurunan permintaan akan tembakau sekaligus juga penurunan harga tembakau terjadi antara tahun 1990--1995. Sesudahnya hingga sekarang ada kecenderungan naiknya permintaan tembakau Indonesia. Hal ini disebabkan produksi tembakau dari Amerika Selatan mengalami penurunan cukup banyak akibat dari perubahan iklim yang merugikan petani tembakau di sana (*Kompas*, 12 September 2000). Kenaikan permintaan ini pun terbatas pada tembakau dengan

kualitas baik atau sangat baik. Apabila produksi tembakau dari Amerika Selatan pulih, permintaan akan tembakau Indonesia bisa jadi kembali turun dan harga pun bisa jatuh. Pangsa pasar yang sempit dikuasi ini hanya bisa dipertahankan bila kualitas tembakau yang dihasilkan tetap tinggi. Hal ini pun konon tidak cukup. Pabrik-pabrik cerutu yang membeli tembakau dari Indonesia tidak mudah menerima harga penawaran dari produsen seperti PTPN. Mereka berusaha menekan harga tembakau serendah mungkin karena mereka juga mempelajari seluk-beluk penanaman tembakau, termasuk ongkos produksinya.

Dengan demikian, dalam hal harga tembakau PTPN menghadapi dua kendala atau risiko sekaligus, yaitu fluktuasi harga internasional dan kualitas produksi tembakaunya. Risiko pertama dan kedua saling terkait karena permintaan dan harga tembakau lebih mudah dinegosiasi bila kualitasnya terjamin. Hal itu pun tidak cukup sebab persaingan dengan produsen lain dan keinginan pembeli tidak dapat dikendalikan oleh PTPN sebagai salah satu produsen tembakau. Kualitas tembakau diupayakan setinggi mungkin oleh PTPN dan pada waktu bersamaan PTPN juga harus siap menghadapi risiko perubahan harga yang tidak bisa dikendalikannya. Dalam rangka minimalisasi risiko inilah PTPN tidak berani menawarkan harga yang tinggi dalam transaksi bagi hasil dengan pemilik sawah yang lahannya ditanami tembakau.

B. Deskripsi Variabel Psikologi

Seperti disebutkan pada bagian awal dari bab ini, deskripsi variabel psikologi diungkap melalui survai yang skalanya juga dikembangkan berdasarkan studi kasus. Oleh karena itu, beberapa penjelasan tentang kondisi psikologis ini juga dikaitkan dengan hasil-hasil dari studi kasus. Dari tujuh variabel psikologis yang dianalisis dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 tampak bahwa rata-rata empirik untuk semua variabel tersebut lebih rendah daripada rata-rata hipotesisnya. Ada beberapa justifikasi berkaitan dengan

rendahnya rata-rata variabel tersebut. Sebagian justifikasi yang dimaksud datanya telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Data tersebut dikemukakan kembali berkaitan dengan temuan ini.

Tabel 4.4
Rata-Rata dan Deviasi Standar Variabel-Variabel Psikologis
berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel		Perempuan	Laki-laki	Total	Hipotetis
Kesejahteraan	Rata-rata	24,01	24,25	24,21	25,00
	Deviasi	3,09	2,77	2,83	
Harapan	Rata-rata	21,51	22,16	21,99	22,50
	Deviasi	2,61	2,67	2,67	
Kontrol	Rata-rata	32,11	32,42	32,34	35,00
	Deviasi	5,96	5,41	5,55	
Keadilan interaksional	Rata-rata	36,22	36,18	36,19	37,50
	Deviasi	3,34	3,87	3,76	
Keadilan prosedural	Rata-rata	36,82	35,81	36,11	37,50
	Deviasi	4,24	4,83	4,70	
Keadilan distributif	Rata-rata	30,77	30,52	30,57	32,50
	Deviasi	3,38	4,08	3,91	
Kepuasan	Rata-rata	42,13	41,37	41,56	42,50
	Deviasi	5,61	6,18	6,04	

Persepsi tentang kesejahteraan yang relatif rendah ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan responden dan keluarganya tergolong tidak tinggi. Salah satu data yang dimaksud adalah rata-rata proporsi pengeluaran untuk makan dari pengeluaran total yang juga relatif tinggi (rata-rata 0,64) yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan yang paling besar adalah makan. Dalam keadaan yang demikian bisa dikatakan bahwa persepsi tentang tingkat kesejahteraan terkait dengan kondisi objektifnya.

Harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik juga tergolong rendah karena dari hasil observasi yang sebagian diungkapkan pada bagian

terdahulu dan hasil penelitian lain (Faturachman, 1998) menunjukkan bahwa pada saat itu permasalahan ekonomi khususnya dirasakan sangat berat. Harga-harga bahan kebutuhan hidup meningkat, sementara persediaannya di pasar tidak cukup, dan pendapatan anggota masyarakat cenderung menurun serta ada yang hilang atau tidak berpendapatan sama sekali selama beberapa minggu. Sebagian di antara responden penelitian ada yang merasa sangat sulit meskipun untuk sekedar bertahan hidup. Keadaan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang tergolong miskin. Mereka yang berkecukupan pun merasakannya. Pada waktu itu beberapa usaha, seperti perusahaan pakaian jadi, mengalami masa yang sangat sulit karena harga bahan baku meningkat tajam sementara produknya tidak laku dijual.

Kontrol yang dapat dilakukan oleh pemilik sawah, yaitu dalam pengambilan keputusan dan dalam proses yang lain, juga rendah. Secara objektif pemilik sawah sulit sekali secara langsung berhubungan dengan PTPN. Ketua kelompok tani dan perangkat desa adalah pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan pihak PTPN. Para pemilik sawah bisa menyampaikan gagasannya (*voice*) melalui ketua kelompok atau perangkat desa. Pihak PTPN membuka diri bagi keterlibatan pemilik sawah pada proses penanaman tembakau. Tujuan kontrol petani dalam proses ini adalah peningkatan produktivitas hasil penanaman tembakau agar pendapatan yang mereka peroleh juga meningkat. Permasalahannya adalah pemilik sawah telah begitu lama tidak diberi kesempatan untuk terlibat. Mereka dibiasakan untuk mengikuti semua perintah penguasa, termasuk dalam berhubungan dengan PTPN. Sebagian di antara mereka kemudian menjadi apatis terhadap masalah ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pemilik sawah menilai bahwa efektivitas kontrol ini tergolong rendah. Sementara itu, kontrol yang dilakukan sering dinilai menghabiskan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, mereka lebih suka bila langsung mendapatkan hasil yang memadai tanpa perlu melakukan kontrol.

Penilaian keadilan interaksional juga tergolong rendah. Seperti dikatakan di atas bahwa pihak PTPN dengan pemilik sawah jarang melakukan interaksi secara langsung. Jajaran pejabat PTPN setempat lebih banyak berhubungan dengan para elite desa. Peluang terbesar terjadinya interaksi antara pihak PTPN dengan anggota masyarakat adalah melalui para mandor (*sinder*). Ada kesan yang cukup kuat bahwa mereka memosisikan diri lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Kesan ini akan makin jelas bila pekerja di area yang ditanami tembakau adalah anggota masyarakat di wilayah itu. Pola hubungan yang dibangun cenderung pada pola patron-klien. Dalam keadaan yang demikian maka akan sulit terjadi interaksi yang adil dengan indikasi penghargaan, kepercayaan, dan netralitas. Sebagian besar dari mandor tersebut berasal dari wilayah lain, bukan dari Kecamatan Wedi. Bagi warga setempat, keadaan ini dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan dan kepercayaan PTPN terhadap masyarakat di sana.

Rendahnya penilaian keadilan prosedural dan distributif dalam proses sewa sawah oleh PTPN telah dipaparkan cukup komprehensif di bagian terdahulu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ketika diungkap kembali rata-rata menyatakan bahwa tingkat keadilannya rendah. Seiring dengan itu, maka kepuasan yang tinggi akan sulit dicapai. Di tempat lain, masih dalam wilayah Klaten, ketidakpuasan yang muncul diekspresikan dalam bentuk protes dan perusakan terhadap tempat pengeringan tembakau sebagai fasilitas milik PTPN.

Ditinjau dari angka rata-ratanya, variabel psikologis yang dideskripsikan menunjukkan perbedaan yang tidak mencolok antara laki-laki dan perempuan. Bila dilihat angka-angka dalam Tabel 4.4 perbedaan yang tampak paling mencolok antara laki-laki dan perempuan ada pada penilaian keadilan prosedural. Namun, perbedaan tersebut secara statistik tidak signifikan. Perbedaan yang signifikan justru ditemukan pada harapan (Tabel 4.5). Laki-laki memiliki harapan yang lebih tinggi (22,16) dibandingkan dengan perempuan (21,51). Secara teoretis

dan empiris temuan ini dapat dijelaskan dari beberapa segi. Ditinjau dari konsep deprivasi relatif, hasil-hasil penelitian (Crosby, 1982; Faturochman, 1996) menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengalami deprivasi dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu mekanisme mengurangi deprivasi adalah dengan menurunkan harapan. Bukan hanya itu, secara kultural dan struktural perempuan juga diharuskan menerima kondisi yang tidak menguntungkan (Abdullah, 2001; Fakhri, 1996). Artinya, perempuan dikondisikan untuk memiliki harapan yang tidak setinggi laki-laki. Bukti-bukti akan hal ini cukup banyak. Dalam bidang pertanian, misalnya, makin hari peran perempuan makin berkurang (Suratijah, 1990). Data ini konsisten dengan data-data yang dipaparkan dalam studi kasus di bagian terdahulu dari laporan ini yang menunjukkan bahwa perempuan mengalami kondisi yang kurang menguntungkan yang terus berlanjut dampaknya, termasuk dampak psikologisnya seperti yang ditunjukkan dengan rendahnya harapan mereka.

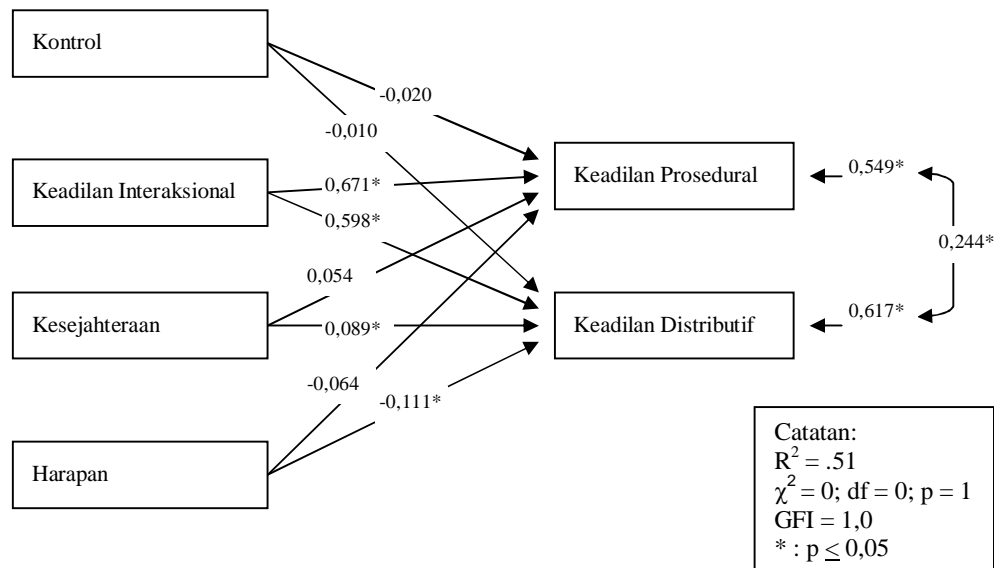
Tabel 4.5
Hasil Analisis Variansi untuk Harapan berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Antar	38,04	1	38,04	5,40	0,021
Dalam	3303,95	469	7,04	-	-
Eror	3341,99	470	-	-	-

C. Model Penilaian Keadilan

Dari hasil analisis dengan menggunakan model regresi multivariat tampak bahwa anteseden penilaian keadilan prosedural dan distributif cenderung berbeda seperti terlihat pada Gambar 4.1. Ada tiga anteseden yang berperan dalam menjelaskan penilaian keadilan distributif, yaitu kesejahteraan yang memiliki efek

signifikan ($\gamma = 0,089$; $p = 0,011$), harapan yang efeknya signifikan ($\gamma = -0,111$; $p = 0,010$), dan penilaian keadilan interaksional yang efeknya juga sangat signifikan ($\gamma = 0,598$; $p = 0,001$). Khusus untuk variabel harapan, efeknya terhadap penilaian keadilan distributif negatif. Artinya, harapan yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya penilaian keadilan distributif. Penilaian keadilan interaksional juga berperan besar dan sangat signifikan ($\gamma = 0,671$; $p = 0,001$) terhadap penilaian keadilan prosedural dan merupakan satu-satunya antesenden penilaian keadilan prosedural dalam model ini.



Gambar 4.1
Model Regresi Penilaian Keadilan

Model regresi ini juga menunjukkan koefisien determinasi total sebesar 0,51. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model ini maka kedua penilaian keadilan tersebut secara bersama-sama dijelaskan oleh keempat antesedennya sebesar 51 persen. Bila sendiri-sendiri, penilaian keadilan prosedural dapat diprediksi dari keempat variabel tadi dengan koefisien determinasi sebesar 0,45.

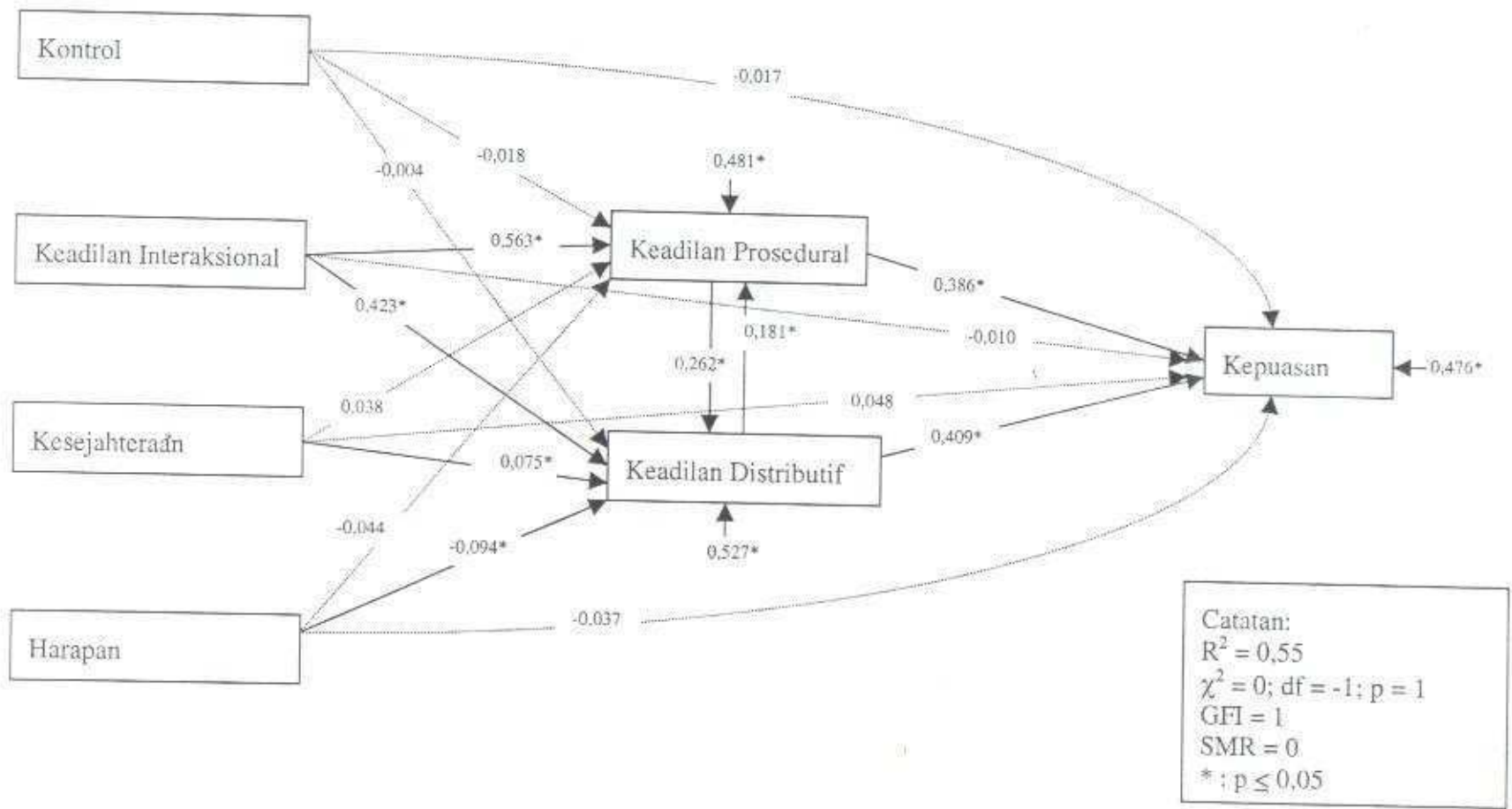
Sementara itu, penilaian keadilan distributif dapat diprediksi oleh keempat variabel itu dengan koefisien determinasi sebesar 0,38. Dengan demikian, ada eror sebesar 0,55 pada penilaian keadilan prosedural dan ada eror sebesar 0,62 pada penilaian keadilan distributif. Di samping itu, ada korelasi yang signifikan antara eror penilaian keadilan prosedural dengan eror penilaian keadilan distributif yang angkanya sebesar 0,244. Dari angka-angka tersebut dapat dibuat persamaan regresi, baik untuk penilaian keadilan prosedural maupun penilaian keadilan distributif seperti terlihat di bawah ini.

$$\text{PK Prosedural} = 0,054 \text{ Kesejahteraan} - 0,064 \text{ Harapan} - 0,020 \text{ Kontrol} \\ + 0,671 \text{ PK Interaksional} + 0,549$$

$$\text{PK Distributif} = 0,089 \text{ Kesejahteraan} - 0,111 \text{ Harapan} - 0,010 \text{ Kontrol} \\ + 0,598 \text{ PK Interaksional} + 0,617$$

Seperti disebutkan di atas, hanya sebagian dari keempat variabel yang diprediksikan berperan terhadap penilaian keadilan prosedural dan distributif. Dalam keadaan seperti ini, menurut Joreskog dan Sorbom (1989), perlu ada perubahan model. Salah satu caranya adalah dengan mereduksi variabel yang perannya kecil dan tidak signifikan. Namun, hal ini akan dilakukan nanti untuk mencari model yang terlihat parameter tertinggi. Sementara dalam model ini secara keseluruhan menunjukkan parameter yang memadai seperti yang ditunjukkan oleh angka kai kuadrat yang dapat digunakan untuk menolak hipotesis nihil dan indeks kecocokan (GFI) yang sempurna (satu).

Seperti direncanakan, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan model yang berbeda. Model yang dimaksudkan adalah seperti yang dikemukakan pada bagian teori yang merupakan modifikasi model dari Tyler (1994) yang sejak awal juga sudah dirancang untuk penelitian ini. Hasil analisis dengan menggunakan model ini (Gambar 4.2 dan Lampiran E) diuraikan di bawah ini.



Gambar 4.2
 Model Resiprokal Penilaian Keadilan berdasar Hasil Analisis

Pertama, hasil analisis menunjukkan uji kai kuadrat ($\chi^2 = 0$; $p = 1$), indeks ketepatan yang sempurna ($GFI = 1$) sehingga tidak perlu ada perhitungan untuk penyesuaian ($AGFI$), dan $RMSR$ yang harganya 0.

Kedua, total koefisien determinan model ini adalah 0,55 yang berarti bahwa variabel-variabel yang dilibatkan dalam model dapat menjelaskan 55 persen varian yang ada. Model ini juga dapat menjelaskan penilaian keadilan prosedural sebesar 52 persen, keadilan distributif sebesar 47 persen, dan kepuasan sebesar 52 persen.

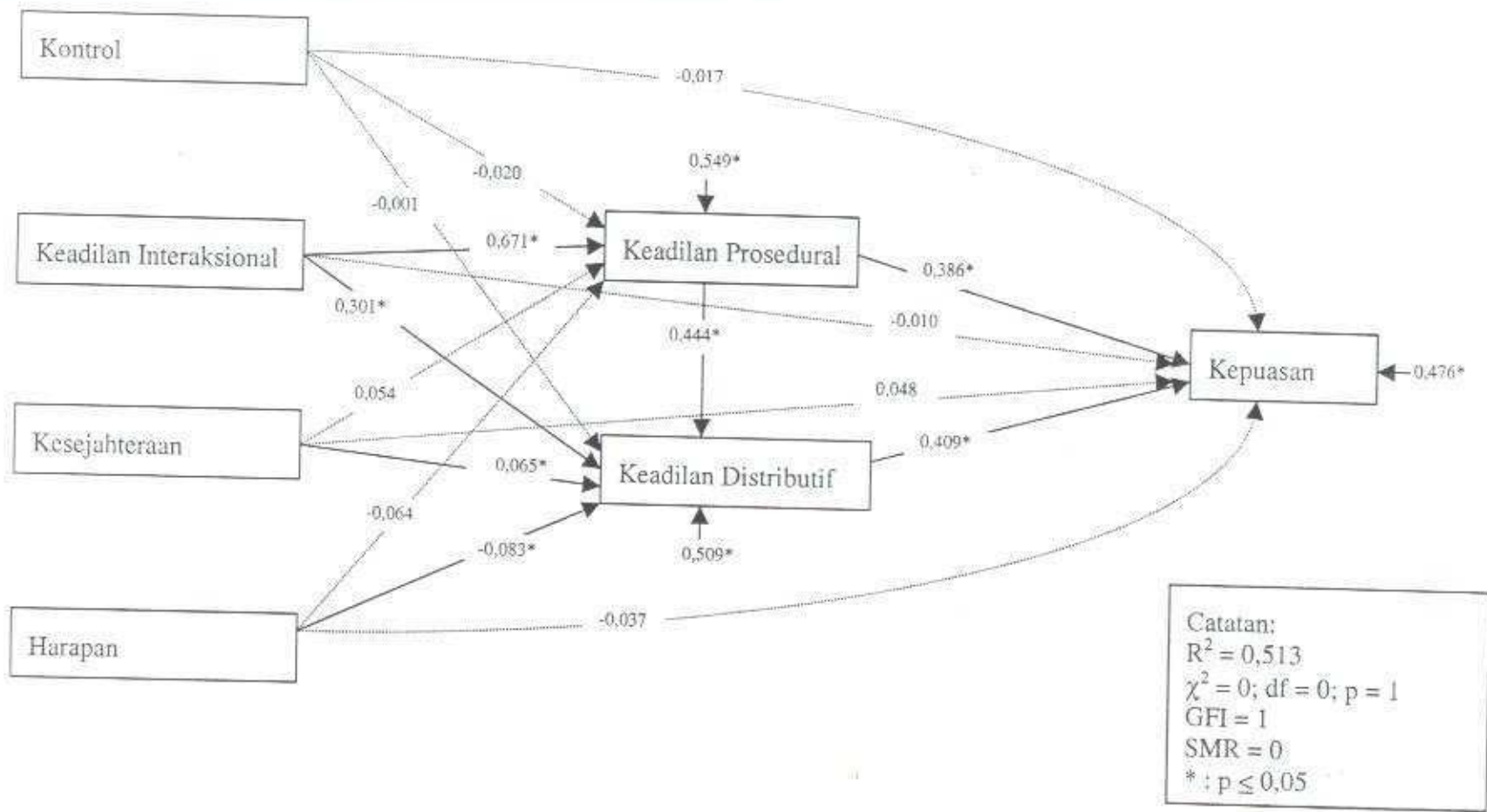
Ketiga, seperti pada model sebelumnya, dari keempat antesenden ternyata kesejahteraan dan harapan memiliki efek yang signifikan serta penilaian keadilan interaksional yang efeknya sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif dan hanya satu prediktor, yaitu penilaian keadilan interaksional, yang sangat signifikan efeknya terhadap penilaian keadilan prosedural.

Keempat, dibandingkan dengan kesejahteraan ($\gamma = 0,075$) dan harapan ($\gamma = -0,094$), efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar ($\gamma = 0,423$). Kesejahteraan dan penilaian keadilan prosedural berperan terhadap penilaian keadilan distributif secara positif, sedangkan peran harapan terhadap penilaian keadilan distributif arahnya negatif. Efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural adalah positif dan cukup besar ($\gamma = 0,563$).

Kelima, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penilaian keadilan prosedural berperan secara positif dan sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Bila hubungan kedua variabel ini resiprokal, efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar ($\beta = 0,262$) dibandingkan dengan efek langsung keadilan penilaian distributif ke penilaian keadilan prosedural ($\beta = 0,181$). Artinya, efek penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan efek penilaian keadilan prosedural.

Dari gambaran tersebut secara sepintas terlihat bahwa model ini memadai, tetapi ada syarat yang tidak dapat dipenuhi agar model ini diterima, yaitu derajat kebebasan hasil perhitungan sebesar -1 , padahal syarat minimalnya adalah 0 . Dengan demikian, model ini ditolak. Secara teoretis (Saris & Stronkhorst, 1984: 138), dalam model awal ini tidak seharusnya dibuat pola hubungan resiprokal antara penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif karena dalam model hipotetis yang diuji terdapat antesenden yang sama. Oleh karena itu, modifikasi model ini akan diawali dari perubahan hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Hubungan tersebut akan dibuat searah, tidak lagi resiprokal, dan data-data dari model yang ditolak ini dapat dijadikan pedoman untuk mengubahnya. Dari hasil analisis yang tidak memenuhi syarat (Gambar 4.2) tampak bahwa efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan efek penilaian keadilan distributif ke penilaian keadilan prosedural. Oleh karena itu, modifikasi pertama akan dilakukan dengan jalan menghilangkan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Untuk membuktikan adanya perbedaan besarnya efek penilaian keadilan prosedural pada penilaian keadilan distributif dengan efek penilaian keadilan distributif pada penilaian keadilan prosedural, akan dibuat model lain yang menunjukkan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Selanjutnya, kedua model tersebut dibandingkan untuk melihat perbedaannya.

Hasil analisis dari model yang dimodifikasi tersebut ternyata dapat diterima (Gambar 4.3). Dengan model ini diperoleh angka-angka hasil perhitungan sebagai indikasi kesesuaian model dengan data, yaitu derajat kebebasan 0 , uji kai kuadrat tidak signifikan ($\chi^2 = 0$; $p = 1$), indeks ketepatan (GFI) sebesar 1 , dan RMSR sama dengan 0 .



Gambar 4.3
Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis
dengan Asumsi Keadilan Prosedural Berpengaruh terhadap Keadilan Distributif

Anteseden penilaian keadilan prosedural dan distributif dalam model ini tidak berbeda dengan model-model sebelumnya, demikian juga besarnya efek keduanya terhadap kepuasan. Anteseden penilaian keadilan prosedural hanya satu yaitu penilaian keadilan interaksional, sedangkan anteseden penilaian keadilan distributif yang signifikan ada tiga yaitu kesejahteraan, harapan, dan penilaian keadilan interaksional. Efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural besarnya adalah 0,671 dan efek sebesar ini secara statistik sangat signifikan ($p = 0,001$). Sebagai anteseden, penilaian keadilan interaksional juga mempunyai efek terhadap penilaian keadilan distributif yang sangat signifikan ($p = 0,001$) dengan angka gamma sebesar 0,301, sedangkan efek kesejahteraan yang besarnya 0,065 ($p = 0,048$) dan efek harapan sebesar $-0,083$ ($p = 0,013$) berperan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Koefisien determinan model ini adalah sebesar 0,51 yang berarti bahwa variabel-variabel yang dilibatkan dalam model dapat menjelaskan 51 persen dari varian yang ada. Model ini juga dapat menjelaskan penilaian keadilan prosedural sebesar 45 persen, penilaian keadilan distributif sebesar 49 persen, dan kepuasan sebesar 52 persen. Hal ini berarti pula bahwa dalam model ini ditemukan eror penilaian prosedural sebesar 55 persen, eror penilaian keadilan distributif sebesar 51 persen dan eror kepuasan sebesar 48 persen. Besarnya eror-eror tersebut sedikit-tidaknya disebabkan oleh dua hal (Arbuckle & Wothke, 1999), yaitu ketidaksempurnaan pengukuran dan adanya variabel-variabel lain yang berpengaruh, tetapi dalam analisis tidak dijadikan sebagai variabel pengaruh. Dari hasil uji konsistensi internal terhadap skala pengukur ketiga variabel tersebut ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengukuran. Oleh karena itu, harus diakui bahwa ketidaksempurnaan pengukuran tersebut memiliki kontribusi terhadap eror yang ada. Hal yang sama juga harus diakui berkaitan dengan peran faktor atau variabel pengaruh lain yang tidak dilibatkan dalam model ini. Sebagai ilustrasi, dalam model ini variabel kepuasan memiliki eror paling kecil di antara ketiga

variabel dependen karena, antara lain, sebagai variabel dependen kepuasan memiliki paling banyak variabel penjelas (pengaruh).

Dari model yang telah diuji ini dapat juga dilihat efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungannya tampak pada Tabel 4.6 (hasil analisis pada Lampiran E hlm. 454). Dari tabel tersebut tampak semua anteseden penilaian keadilan memiliki efek tidak langsung terhadap penilaian keadilan distributif dan kepuasan. Konsekuensinya ialah efek total variabel-variabel tersebut meningkat. Memang ada, yaitu kontrol, yang efek langsung maupun efek tidak langsungnya kecil sehingga efek totalnya juga tetap kecil. Fakta ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan model lebih lanjut, yaitu dengan mengeluarkannya dari model. Namun, tidak berarti bahwa model akan lebih baik bila variabel itu dikeluarkan dari model karena, meskipun kecil dan tidak signifikan, variabel ini memiliki peran.

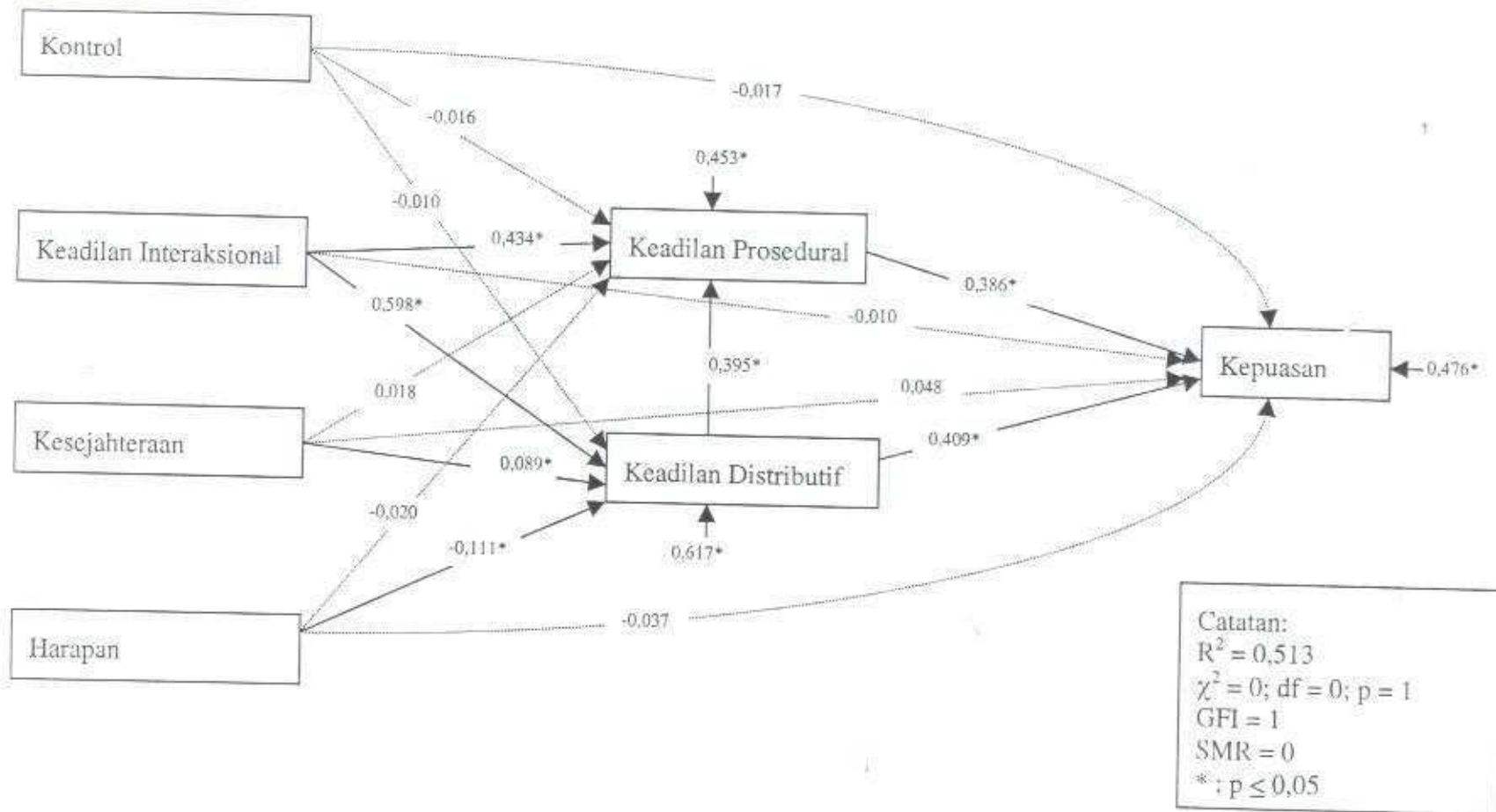
Tabel 4.6
Efek Langsung, Tidak Langsung, dan Total Variabel-Variabel dalam Model

Variabel Pengaruh	Variabel Terpengaruh	Efek		
		Langsung	Tidak langsung	Total
Kesejahteraan	Keadilan Prosedural	0,054	0,000	0,054
Harapan	Keadilan Prosedural	-0,064	0,000	-0,064
Kontrol	Keadilan Prosedural	-0,020	0,000	-0,020
K. Interaksi	Keadilan Prosedural	0,671	0,000	0,671
Kesejahteraan	Keadilan Distributif	0,065	0,024	0,089
Harapan	Keadilan Distributif	-0,083	-0,028	-0,111
Kontrol	Keadilan Distributif	-0,001	-0,009	-0,010
K. Interaksi	Keadilan Distributif	0,301	0,298	0,598
K. Prosedural	Keadilan Distributif	0,444	0,000	0,444
Kesejahteraan	Kepuasan	0,048	0,057	0,106
Harapan	Kepuasan	-0,037	-0,070	-0,107
Kontrol	Kepuasan	-0,017	-0,012	-0,029
K. Interaksi	Kepuasan	-0,010	0,504	0,494
K. Prosedural	Kepuasan	0,386	0,181	0,567
K. Distributif	Kepuasan	0,409	0,000	0,409

Analisis selanjutnya dilakukan untuk menguji model yang mirip dengan model sebelumnya (Gambar 4.3), tetapi penilaian keadilan distributif diasumsikan memiliki efek terhadap penilaian keadilan prosedural. Pengujian model ini merupakan salah satu upaya untuk membuktikan hipotesis tentang keterkaitan penilaian keadilan distributif dengan penilaian keadilan prosedural. Hasil analisis terhadap model ini (Gambar 4.4) menunjukkan bahwa secara statistik model ini juga dapat diterima. Efek variabel satu terhadap variabel lain polanya tidak berbeda jauh dengan model sebelum ini meskipun besarnya masing-masing efek berbeda dengan efek variabel-variabel tersebut pada model sebelum ini. Dengan tujuan untuk melihat besarnya efek penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural dibandingkan dengan efek yang sebaliknya pada model sebelum ini, hasilnya menunjukkan bahwa pada model ini efeknya lebih kecil ($\beta = 0,395$) dibandingkan dengan efek sebaliknya pada model sebelumnya ($\beta = 0,444$).

Berdasarkan pada pengujian terhadap dua model yang mirip ini didapatkan indikator-indikator yang berupa kai kuadrat, indeks kecocokan, dan RMSR yang persis sama. Sementara itu, secara hipotesis penilaian keadilan prosedural efeknya lebih besar terhadap penilaian distributif dibandingkan dengan efek sebaliknya, maka model pada Gambar 4.3 ini digunakan untuk menarik kesimpulan serta untuk melakukan analisis selanjutnya.

Sebelum analisis lebih lanjut dilakukan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari model yang sementara ini dianggap sebagai model terbaik (Gambar 4.3). Pertama, efek kesejahteraan dan harapan terhadap penilaian keadilan distributif terbukti signifikan, berarti bahwa dalam menilai keadilan distributif orientasi pada sumber daya muncul. Hal ini berarti pula bahwa model penilaian keadilan distributif yang berorientasi pada sumber daya (*resource-based model*) terbukti. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa efek kesejahteraan dan harapan tersebut, meskipun signifikan, bobotnya tidak besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap model penilaian keadilan secara keseluruhan.



Gambar 4.4
 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis
 dengan Asumsi Ada Efek Keadilan Distributif terhadap Keadilan Prosedural

Kedua, dari dua anteseden penilaian keadilan prosedural, hanya satu yang efeknya sangat signifikan, yaitu penilaian keadilan interaksional. Bobot efek ini terbilang besar, sementara anteseden yang lain, yaitu kontrol, efeknya kecil ($\gamma = -0,02$) dan tidak signifikan ($p = 0,541$). Dengan hasil ini berarti bahwa teori nilai-nilai kelompok dalam menjelaskan penilaian keadilan prosedural sesuai dengan kondisi di lapangan, sementara teori kepentingan pribadi tidak cocok dengan data yang ada.

Besarnya efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif diikuti oleh efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif yang juga sangat signifikan ($\gamma = 0,301$; $p = 0,001$). Menurut Tyler (1994) secara keseluruhan keadaan seperti ini disebut sebagai Model Penilaian Keadilan yang Didominasi Orientasi Relasional. Dalam penelitian ini penilaian keadilan interaksional tidak hanya berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan distributif, tetapi bobot efeknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kesejahteraan dan harapan. Dengan demikian, Model Penilaian Keadilan yang Didominasi Orientasi Relasional menjadi sangat jelas.

Dari analisis dengan menggunakan dua model di atas, bila dikaitkan dengan hipotesis pertama, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, **hipotesis pertama** yang menyatakan bahwa anteseden penilaian keadilan distributif berbeda dengan anteseden keadilan prosedural **diterima**. Bila dilihat secara lebih spesifik seperti yang diformulasikan ke dalam hipotesis 1a hingga hipotesis 1d, perbedaan anteseden antara hasil analisis dengan hipotesis terdapat beberapa perbedaan seperti yang dikemukakan pada poin berikut ini.

Kedua, **hipotesis 1a** yang menyebutkan bahwa kontrol sebagai anteseden mempunyai efek positif yang signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural **ditolak**. Peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural sangat kecil ($\gamma = -0,02$) dan tidak signifikan ($p = 0,541$).

Ketiga, **hipotesis 1b** yang menyebutkan bahwa penilaian keadilan interaksional sebagai anteseden mempunyai efek positif yang signifikan terhadap

penilaian keadilan prosedural **diterima**. Efek langsung penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural besar ($\gamma = 0,671$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$), bahkan dalam model tersebut efek langsung ini adalah yang terbesar.

Keempat, efek kesejahteraan terhadap penilaian keadilan distributif ($\gamma = 0,065$) signifikan ($p = 0,048$). Dengan demikian, **hipotesis 1c** yang berbunyi kesejahteraan dapat dijadikan sebagai anteseden yang efeknya positif terhadap penilaian keadilan distributif **diterima**.

Kelima, harapan mempunyai efek yang signifikan terhadap penilaian keadilan distributif ($\gamma = -0,083$; $p = 0,013$). Efek harapan terhadap penilaian keadilan distributif ini negatif. Artinya, bila harapan meningkat, penilaian keadilan distributif akan menurun. Berdasarkan hasil analisis ini maka **hipotesis 1d** yang menyatakan bahwa harapan dapat dijadikan sebagai anteseden yang efeknya signifikan dan negatif terhadap penilaian keadilan distributif **diterima**.

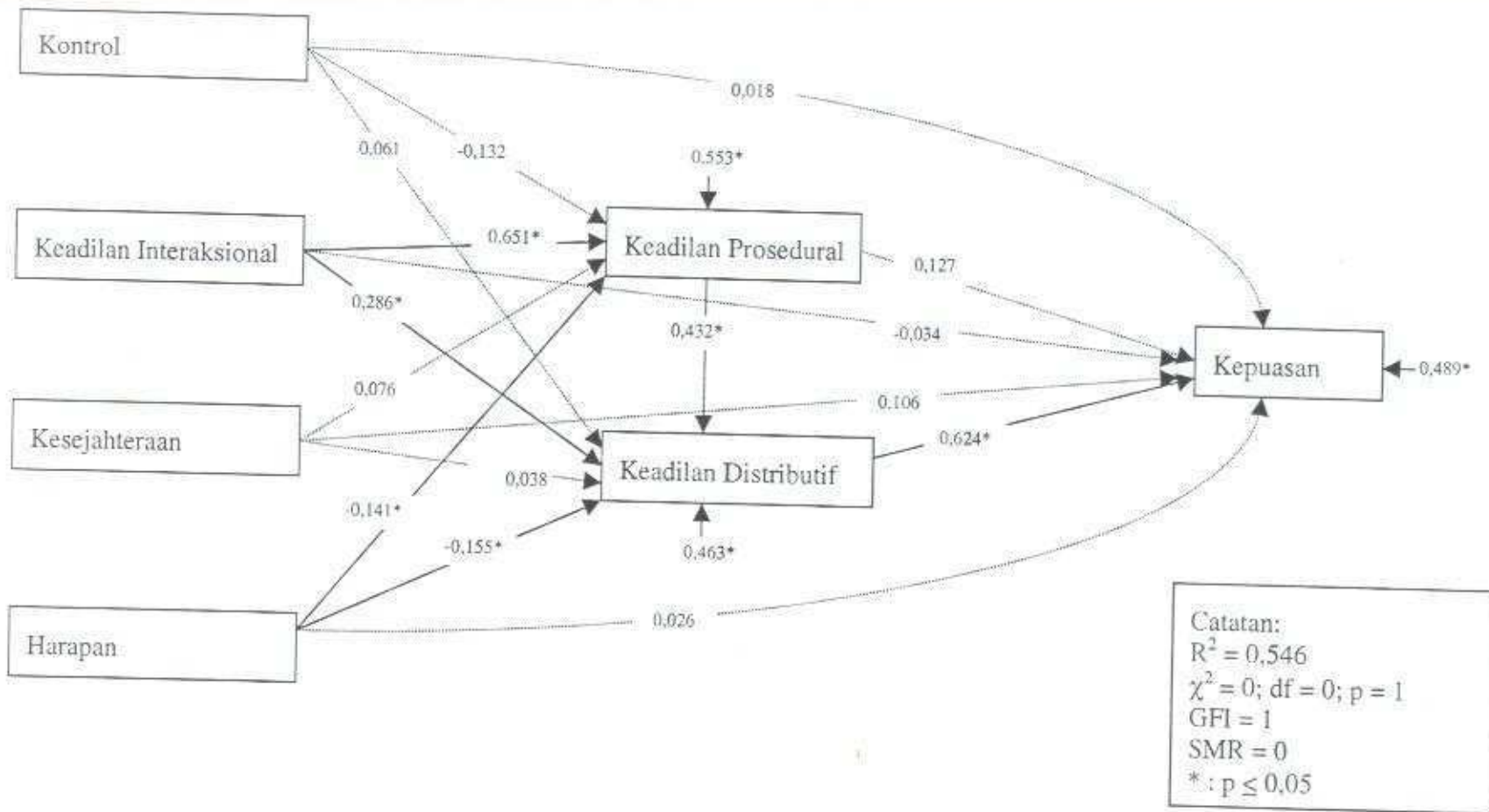
Hipotesis pertama yang berkaitan dengan anteseden penilaian keadilan prosedural dan distributif tidak sepenuhnya sesuai dengan data empiris penelitian ini. Dari empat hipotesis yang lebih spesifik, tiga di antaranya diterima dan satu ditolak. Di samping itu, dengan menguji peran semua variabel independen terhadap variabel dependen, ternyata ditemukan juga efek langsung penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif. Efek tersebut cukup besar dan sangat signifikan ($\gamma = 0,301$; $p = 0,001$).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Dari hasil analisis secara simultan, bahwa melalui hubungan resiprokal maupun dengan pengujian sendiri-sendiri terbukti bahwa efek langsung penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar ($\beta = 0,444$) dibandingkan dengan efek langsung penilaian keadilan distributif terhadap

penilaian keadilan prosedural ($\beta = 0,395$). Dengan demikian, **hipotesis kedua** tersebut **diterima**.

Beberapa ahli (lihat Bollen & Long, 1994; Joreskog, 1994) menyarankan kepada para peneliti yang menggunakan model persamaan struktural untuk mempertimbangkan beberapa model alternatif dibandingkan dengan hanya menguji satu model. Di samping itu, dalam menerapkan model persamaan struktural lazim dilakukan respesifikasi model dengan tujuan untuk menemukan model yang paling sesuai.

Dari analisis yang dilakukan terdahulu terhadap empat model telah dilakukan, yaitu model regresi multivariat dan tiga model analisis jalur. Model pertama (Gambar 4.1) kurang memadai karena erornya lebih besar dibanding model lain. Model kedua (Gambar 4.2) memberikan gambaran yang memadai, tetapi tidak memenuhi syarat statistik sehingga perlu dilakukan modifikasi menjadi model ketiga (Gambar 4.3) dan keempat (Gambar 4.4). Model ketiga secara umum sangat memadai meskipun ada variabel-variabel independen yang pengaruhnya secara langsung terhadap variabel dependen tidak besar dan tidak signifikan. Model keempat dimanfaatkan untuk membandingkannya dengan model ketiga dan hasilnya mengarah pada kesimpulan bahwa model ketiga dijadikan model yang akan dikembangkan lebih lanjut. Analisis tambahan perlu dilakukan dengan menggunakan model ketiga sebagai acuan. Analisis tambahan ini juga menjadi bertambah penting karena seperti dalam studi kasus terdahulu ada isu penting lain berkaitan dengan keadilan yaitu isu gender. Dengan demikian respesifikasi juga akan mempertimbangkan kelompok perempuan dan laki-laki. Harus diakui bahwa untuk menemukan model keadilan yang tepat, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dengan analisis terhadap tiap-tiap kelompok jenis kelamin ini mungkin belum memadai, tetapi karena keterbatasan penelitian ini juga, seperti kelemahan penelitian survai pada umumnya, analisis yang dimaksud baru sampai pada tahap seperti itu.



Gambar 4.5
 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis pada Perempuan

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki model yang dirancang sangat sesuai (Gambar 4.5 dan Gambar 4.6). Hal ini dibuktikan oleh kai kuadrat yang tidak signifikan, indeks kesesuaian yang sempurna ($GFI = 1$), dan SMSR sama dengan 0. Secara kebetulan koefisien determinasi pada kedua kelompok tersebut juga sama, yaitu 0,59 yang dapat digolongkan tinggi.

Pada kelompok perempuan variabel yang berperan langsung terhadap penilaian keadilan prosedural adalah penilaian keadilan interaksional dan peran tersebut tergolong besar ($\gamma = 0,651$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$). Variabel yang berperan terhadap keadilan distributif adalah harapan dan penilaian keadilan interaksional. Peran harapan signifikan dan arahnya negatif ($\gamma = -0,155$; $p = 0,014$). Peran penilaian keadilan interaksional positif ($\gamma = 0,286$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$). Penilaian keadilan prosedural itu berperan secara positif dan sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif ($\beta = 0,432$; $p = 0,001$). Berbeda dengan hasil sebelumnya, penilaian keadilan prosedural pada kelompok perempuan tidak berperan secara signifikan terhadap kepuasan. Keadilan distributif berperan positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan ($\beta = 0,624$; $p = 0,001$).

Dibandingkan dengan model semula yang tidak memisahkan kedua jenis kelamin, ada tiga hal yang cukup mencolok perbedaannya dengan model pada kelompok perempuan. Pertama, pada kelompok perempuan masalah kesejahteraan tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Kedua, penilaian keadilan prosedural tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan, tetapi efek langsung penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan meningkat cukup banyak (nilai beta dari 0,409 menjadi 0,624). Peningkatan efek langsung juga terjadi pada variabel penilaian keadilan interaksional terhadap keadilan prosedural dan harapan terhadap penilaian keadilan distributif, sedangkan efek langsung penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif justru menurun. Ketiga,

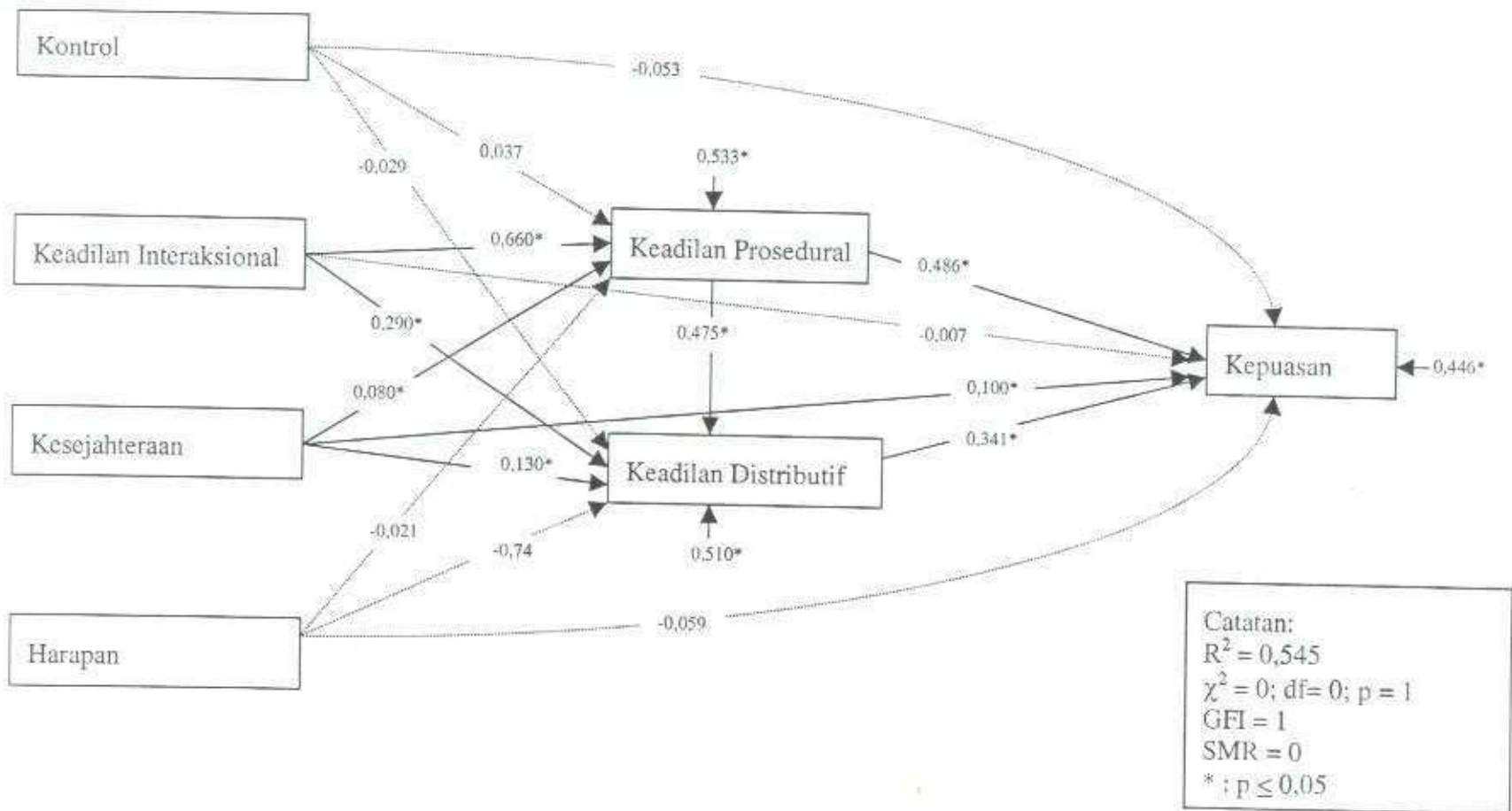
harapan memiliki efek negatif dan yang signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural ($\gamma = -0,141$; $p = 0,041$) di samping efeknya yang positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif ($\gamma = -0,155$; $p = 0,043$).

Pada kelompok laki-laki (Gambar 4.6), anteseden penilaian keadilan prosedural adalah penilaian keadilan interaksional ($\gamma = 0,660$) yang perannya sangat signifikan ($p = 0,001$) dan kesejahteraan ($\gamma = 0,080$) yang perannya signifikan ($p = 0,050$). Keduanya juga menjadi anteseden penilaian keadilan distributif dengan efek kesejahteraan ($\gamma = 0,130$) signifikan ($p = 0,044$) dan efek penilaian keadilan interaksional ($\gamma = 0,290$) tergolong sangat signifikan ($p = 0,001$). Peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif ($\beta = 0,475$) sangat signifikan ($p = 0,001$) dan kedua penilaian keadilan ini berperan secara sangat signifikan terhadap kepuasan dengan bobot beta secara berurutan masing-masing sebesar $0,486$ ($p = 0,001$) dan $0,341$ ($p = 0,001$). Ada satu yang khas pada kelompok laki-laki, yaitu peran kesejahteraan yang signifikan terhadap kepuasan ($\gamma = 0,100$; $p = 0,050$), yang tidak muncul pada model-model lainnya. Sementara itu, kesejahteraan yang pada model kelompok perempuan tidak berperan secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural, pada kelompok ini ternyata efeknya negatif dan sangat signifikan. Pola ini sama dengan pola pada model tanpa pemisahan laki-laki dan perempuan, sementara hal-hal lain pada model laki-laki ini tidak terlalu mencolok perubahannya dibandingkan dengan model tanpa pemisahan. Dengan demikian, dibandingkan dengan model yang tidak membedakan laki-laki dengan perempuan, pada kelompok laki-laki peran kesejahteraan meningkat.

Dari hasil-hasil di atas dapat disimpulkan bahwa model yang dirancang semula sesuai dengan data di lapangan. Baik pada kelompok perempuan, laki-laki, maupun keduanya sekaligus, model yang dirancang dapat diterima. Koefisien determinasi dari ketiga model tersebut tidak berbeda secara mencolok antara yang satu dengan yang lain. Bila dilihat secara lebih detail, model pada kelompok perempuan tampak lebih sederhana karena variabel-variabel yang mempunyai

efek langsung yang signifikan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pada model kelompok laki-laki dan model umum. Sebaliknya, dengan banyaknya variabel yang memiliki efek langsung terhadap variabel lain, model pada kelompok laki-laki tampak paling kompleks. Apabila model umum penilaian keadilan interaksional memiliki efek yang paling menonjol sehingga modelnya dapat disebut model dominasi keadilan relasional, pada kelompok laki-laki peran kesejahteraan bertambah dan pada kelompok perempuan justru peran harapan yang bertambah.

Hasil tersebut tampak sejalan dengan kajian-kajian terdahulu. Dilihat dari skor rata-ratanya berbagai variabel dalam model, perempuan cenderung memiliki harapan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Tabel 4.4). Hal ini terjadi karena perempuan dikonstruksi untuk lebih menerima keadaan meskipun ia diperlakukan tidak adil. Sejauh ini akses perempuan terhadap sumber daya lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki (Abdullah, 2001). Ketidakadilan ini tampak dalam model kelompok perempuan yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya efek kesejahteraan terhadap penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif, dan kepuasan. Sebaliknya, model pada kelompok laki-laki menunjukkan efek kesejahteraan terhadap ketiga variabel tersebut signifikan. Dari model kelompok perempuan juga terlihat bahwa penilaian keadilan prosedural tidak mempunyai efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa perempuan tidak memperoleh kepuasan dari prosedur atau proses yang ada. Dalam kenyataannya, perempuan sering mengalami marginalisasi pada proses pengambilan keputusan (Fakih, 1996). Oleh karena itu, mereka akan sulit mendapatkan kepuasan dari proses tersebut karena tidak banyak mengalaminya. Pada semua model yang sudah diuji, variabel kontrol tidak mempunyai efek langsung yang signifikan terhadap ketiga variabel dependen. Dalam berbagai kajian keadilan, kontrol menjadi variabel penting untuk terciptanya keadilan. Fakta penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dinilai rendah. Hal ini terjadi, antara lain, karena belum efektifnya kontrol seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dipaparkan.



Gambar 4.6
 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis pada Laki-Laki

Upaya selanjutnya adalah melakukan respesifikasi dengan jalan mereduksi variabel-variabel yang efek langsung dan efek totalnya terhadap variabel lain tidak signifikan. Respesifikasi ini dilakukan baik secara umum (tidak memperhatikan jenis kelamin), pada kelompok laki-laki saja, maupun khusus pada kelompok perempuan. Respesifikasi dilakukan dengan jalan mengurangi atau mengeluarkan variabel-variabel yang efeknya kecil dan tidak signifikan. Pengurangan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kecilnya efek variabel.

Dari beberapa kali dilakukan respesifikasi ternyata model Gambar 4.3 memiliki parameter dan signifikansi yang dapat dijadikan dasar untuk menerima model dibandingkan dengan model-model hasil respesifikasi (lihat Tabel 4.7). Oleh karena itu, model awal inilah yang selanjutnya akan digunakan.

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Uji Model-Model yang Dikembangkan dalam Penelitian

Model	Gambar	Deskripsi	Parameter				
			χ^2	p	GFI	SRMR	R ²
1-U	4-1	regresi	0,000	1,000	1,000	0,000	0,51
2-U	4-3	model modifikasi	0,000	1,000	1,000	0,000	0,51
2-P	4-5	model awal-P	0,000	1,000	1,000	0,000	0,55
2-L	4-6	model awal-L	0,000	1,000	1,000	0,000	0,55
3-U		respesifikasi	10,00	0,001	0,994	0,027	0,50
3-P		respesifikasi	15,86	0,035	0,965	0,059	0,50
3-L		respesifikasi	10,23	0,022	0,992	0,020	0,53
4-U		respesifikasi	19,60	0,001	0,988	0,041	0,49
4-P		respesifikasi	18,86	0,001	0,959	0,073	0,46
4-L		respesifikasi	30,13	0,001	0,977	0,035	0,50

Keterangan:

U : kedua jenis kelamin

P : kelompok perempuan

L : kelompok laki-laki

Hasil-hasil analisis di atas menunjukkan peran penilaian keadilan interaksional yang besar dan berarti, sementara kontrol perannya tidak signifikan,

sedangkan kesejahteraan dan harapan perannya signifikan, tetapi kecil. Variabel kesejahteraan dan harapan yang merupakan derivasi dari variabel yang disebut Tyler (1994) sebagai variabel-variabel sumber daya menunjukkan peran yang lebih kecil dibandingkan dengan relasi sosial. Dari uraian terdahulu terungkap bahwa responden sebagian besar tidak dapat mengidentifikasi sumber daya yang dapat mereka akses, terutama sumber daya yang ada pada PTPN. Dalam keadaan yang demikian maka sulit untuk menilai keadilan yang ada. Kesulitan memperoleh akses ini sejalan dengan sulitnya melakukan kontrol. Bahkan, kontrol tersebut dalam kenyataannya terlalu sedikit sehingga efeknya juga akan menjadi kecil. Oleh karena itu, tidak adanya efek kontrol yang signifikan dalam model-model tersebut dapat dimengerti.

D. Dinamika Penilaian Keadilan

Dinamika penilaian keadilan secara teoretis dapat dikaji dengan teori atribusi, teori heuristik, dan teori referensi kognisi seperti dijelaskan pada uraian tentang ketiga teori tersebut pada bagian terdahulu. Hipotesis ketiga, keempat, dan kelima penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji teori heuristik. Sementara itu, khusus dalam pembahasan tentang penilaian keadilan prosedural dikenal model kepentingan pribadi dan model nilai-nilai kelompok. Pada bagian terdahulu telah diuraikan panjang lebar hasil penelitian yang menunjukkan besarnya peran model relasional sebagai bagian penting dari model nilai-nilai kelompok dalam penilaian keadilan. Secara keseluruhan pengujian model-model tersebut tidak menemukan indikasi orientasi kepentingan pribadi yang menonjol. Penelitian ini berusaha menemukan indikasi tersebut dengan menggunakan data yang sama, tetapi menerapkan model atau teknik analisis yang berbeda. Hipotesis keenam penelitian ini merupakan upaya untuk membuktikan adanya indikasi yang dimaksud. Hipotesis ketiga, keempat, dan kelima dibuktikan pada bagian berikut ini, sedangkan hipotesis keenam dibuktikan pada bagian selanjutnya.

1. Model Heuristik Penilaian Keadilan

Dalam rangka mengelaborasi model heuristik penilaian keadilan, dilakukan penelitian dengan menggunakan skenario dan vinyet yang dapat digolongkan sebagai penelitian skenario. Seperti dikemukakan dalam bab metode penelitian, untuk menguji hipotesis ketiga pertama-tama digunakan analisis variansi dua jalur dengan variabel independen prosedur dan hasil sewa serta ada dua variabel dependen, yaitu penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif. Prosedur dibagi menjadi dua juga yaitu melalui prosedur adil (tidak akan dimarahi dan tidak dikenai sanksi) dan prosedur tidak adil (dimarahi dan diberi sanksi bila tidak menurut). Sementara itu, ada tiga distribusi hasil sewa yaitu sewa yang lebih tinggi, sama, dan lebih rendah daripada hasil bila tidak disewa (lahan digarap sendiri).

Dari hasil analisis (Tabel 4.8 dan Tabel 4.9) tampak bahwa prosedur berpengaruh secara sangat signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural ($F_{\text{prosedur}} = 571,76$; $p = 0,001$) maupun terhadap penilaian keadilan distributif ($F_{\text{prosedur}} = 22,05$; $p = 0,001$). Ketika prosedur itu adil, rata-rata penilaian keadilan prosedural lebih tinggi (7,86) dibandingkan dengan ketika prosedurnya tidak adil (2,48). Untuk penilaian keadilan distributif, rata-ratanya ketika prosedur adil juga lebih tinggi (5,77) dibandingkan dengan ketika prosedurnya tidak adil (4,55).

Tabel 4.8
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	2598,38	1	2598,38	571,76	0,001
Distribusi	22,61	2	11,303	2,49	0,085
Prosedur x Distribusi	9,25	2	4,63	1,02	0,362
Eror	1599,67	352	4,545	-	-
Total	13808,00	358	-	-	-

Tabel 4.9
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	135,82	1	135,82	22,05	0,001
Distribusi	357,25	2	178,62	29,07	0,001
Prosedur x Distribusi	7,19	2	3,59	0,58	0,558
Eror	2167,67	352	6,158	-	-
Total	12195,00	358	-	-	-

Di lain pihak, besar kecilnya distribusi hasil sewa berpengaruh dengan sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif (F distribusi = 29,07; $p = 0,001$), tetapi pengaruhnya terhadap penilaian keadilan prosedural tidak signifikan (F distribusi = 2,49; $p = 0,085$). Rata-rata penilaian keadilan prosedural ketika hasil sewa dibandingkan dengan hasil menggarap sendiri lebih besar adalah 5,35, ketika hasil sewa sebanding dengan menggarap sendiri adalah 5,32, dan ketika hasil sewa lebih kecil dibandingkan dengan menggarap sendiri adalah 4,84. Karena hasil uji- F terhadap perbedaan rata-rata ini tidak signifikan, tidak perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dalam bentuk uji pasangan antarkategori. Sementara itu, penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa dibandingkan dengan hasil menggarap sendiri lebih besar adalah 6,22, ketika hasil sewa sebanding dengan menggarap sendiri adalah 5,43, dan ketika hasil sewa lebih kecil dibandingkan dengan menggarap sendiri adalah 3,82. Karena perbedaan antarkategori ini signifikan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam bentuk uji beda pasangan antarkategori. Hasil uji beda pasangan antarkategori untuk penilaian keadilan distributif berdasarkan kategori distribusi sewa dapat dilihat pada Tabel 4.10. Dari hasil uji statistik tampak bahwa perbedaan penilaian keadilan distributif secara berpasangan antarkategori distribusi semuanya signifikan. Penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih besar daripada

hasil bila digarap sendiri (rata-rata = 6,22) berbeda sangat signifikan dengan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa sebanding dengan hasil digarap sendiri (rata-rata = 5,43) dan dengan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih kecil daripada ketika hasil sewa digarap sendiri (rata-rata = 3,82). Perbedaan yang signifikan terjadi antara penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa sebanding dengan hasil digarap sendiri (rata-rata = 5,43) dan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih kecil daripada ketika hasil sewa digarap sendiri (rata-rata = 3,82). Hasil-hasil uji beda pasangan kategori distribusi ini menguatkan hasil sebelumnya yang menyebutkan bahwa distribusi yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan penilaian keadilan distributif, makin favourable distribusi makin tinggi penilaian keadilannya.

Tabel 4.10
Perbedaan Penilaian Keadilan Distributif
Antarpasangan Distribusi dan Signifikansi Perbedaannya

Pasangan Distribusi	Perbedaan	p
Lebih besar – Sebanding	1,61	0,001
Lebih besar – Lebih kecil	2,39	0,001
Sebanding – Lebih kecil	0,79	0,015

Dari hasil analisis di atas ternyata perbedaan prosedur berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan perbedaan distribusi berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Pada prosedur yang adil penilaian keadilan proseduralnya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika prosedur tersebut tidak adil. Pada distribusi yang adil penilaian keadilan distributifnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketika distribusi tersebut tidak adil. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga** yang menyebutkan bahwa secara objektif prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan distribusi akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif; prosedur yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur yang tidak adil dan

distribusi yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang tidak adil **diterima**.

Untuk membuktikan hipotesis selanjutnya (hipotesis keempat dan kelima) dilakukan analisis lanjutan seperti yang disarankan oleh Van den Boss (1996). Pada prinsipnya analisis yang disarankan adalah melakukan analisis secara lebih rinci dengan memilah-milah variabel independen. Saran ini dapat dilakukan di sini karena hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur memiliki pengaruh, baik terhadap penilaian keadilan prosedural maupun distributif secara sangat signifikan (Tabel 4.8 dan 4.9). Dengan demikian, analisis yang dilakukan berikut ini juga berfungsi untuk melihat lebih lanjut pengaruh dari variabel prosedur dan perbedaan distribusi hasil sewa bila setiap urutan dianalisis tersendiri.

Analisis berikut ini memisahkan pengaruh prosedur dan distribusi hasil sewa pada tiap-tiap urutan pemberian informasi dan penilaian. Apabila teori keadilan heuristik terbukti sepenuhnya, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Pertama, ketika informasi tentang prosedur dan penilaian keadilan prosedural dilakukan terlebih dulu, prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif, distribusi hasil sewa akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif, serta ada interaksi antara prosedur dengan distribusi hasil sewa terhadap penilaian keadilan distributif. Kedua, ketika informasi tentang hasil sewa diperoleh lebih awal dan penilaian keadilan distributif dilakukan lebih dulu, distribusi hasil sewa akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan prosedural, prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural, dan interaksi antara hasil sewa dengan prosedur signifikan dalam menjelaskan penilaian keadilan prosedural.

Berikut ini adalah analisis pertama yang dikenakan khusus pada kelompok yang mendapat informasi tentang prosedur dan melakukan penilaian keadilan prosedural terlebih dulu. Rata-rata penilaian keadilan prosedural dan distributif

pada kelompok ini terdapat pada Tabel 4.11. Hasil analisis (Tabel 4.12) menunjukkan bahwa prosedur berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural (F prosedur = 219,79; $p = 0,001$). Sementara itu, perbedaan hasil sewa dan interaksinya dengan prosedur tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural (F distribusi = 0,94; $p = 0,391$ dan F interaksi = 1,27; $p = 0,282$). Di lain pihak, penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh distribusi hasil sewa (F distribusi = 13,80; $p = 0,001$) dan prosedur (F prosedur = 33,33; $p = 0,001$), serta interaksi antara prosedur dan distribusi yang signifikan (F interaksi = 3,05; $p = 0,050$).

Tabel 4.11
Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Prosedur Terlebih Dulu

Dependen Variabel	Hasil	n	Prosedur		
			Adil	Tidak	Total
Keadilan Prosedural	>	30	7,70	2,53	5,12
	=	30	7,17	3,13	5,15
	<	30	7,20	2,13	4,67
	Total	90	7,35	2,60	4,98
Keadilan Distributif	>	30	7,80	4,60	6,20
	=	30	5,57	4,63	5,10
	<	30	5,00	2,43	3,72
	Total	90	6,12	3,89	5,01

Tabel 4.12
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	1017,69	1	1017,69	219,79	0,001
Distribusi	8,744	2	4,37	0,944	0,391
Prosedur x Distribusi	11,811	2	5,91	1,27	0,282
Eror	805,67	174	4,63	-	-
Total	6304,00	180	-	-	-

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat** yang menyatakan bahwa ketika prosedur diketahui lebih dulu maka prosedur yang dimaksud akan berpengaruh terhadap penilaian distributif **diterima**. Bila analisis pertama dari penelitian skenario ini dilihat kembali, tampak juga bahwa pengaruh prosedur tidak hanya signifikan ketika prosedur diketahui lebih dulu, tetapi tanpa melihat pada variasi informasi awal efek prosedur terhadap penilaian keadilan distributif signifikan. Hasil analisis ini juga menegaskan kembali hasil analisis sebelumnya yang membuktikan hipotesis ketiga. Di sini tampak bahwa prosedur berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan perbedaan distribusi hasil sewa atau distribusi berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif
dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	224,45	1	224,45	33,33	0,001
Distribusi	185,811	2	92,91	13,80	0,001
Prosedur x Distribusi	41,03	2	20,52	3,05	0,050
Eror	1171,70	174	6,73	-	-
Total	6133,00	180	-	-	-

Selanjutnya adalah analisis untuk membuktikan hipotesis kelima. Hasil-hasil analisisnya dideskripsikan di bawah ini, sedangkan angka rata-ratanya ditampilkan pada Tabel 4.14 dan ringkasan hasil analisis statistiknya dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16.

Kelompok yang mendapat informasi tentang distribusi hasil sewa dan melakukan penilaian keadilan distributif terlebih dulu memiliki persebaran rata-rata penilaian keadilan seperti tercantum pada Tabel 4.14. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa untuk penilaian keadilan distribusi dipengaruhi oleh

distribusi hasil sewa (F distribusi = 17,83; p = 0,001), tidak dipengaruhi oleh prosedur (F prosedur = 0,46; p = 0,498), maupun interaksi keduanya (F interaksi = 0,87; p = 0,420). Senada dengan itu, penilaian keadilan prosedural hanya dipengaruhi oleh prosedur (F prosedur = 378,20; p = 0,001), tidak dipengaruhi oleh distribusi hasil sewa (F distribusi = 1,72; p = 0,182), dan interaksi antara distribusi dengan prosedur ternyata tidak signifikan (F interaksi = 0,58; p = 0,558).

Tabel 4.14
Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

Dependen Variabel	Hasil	n	Prosedur		
			Wajar	Keras	Total
Keadilan Distributif	>	30	6,07	6,40	6,23
	=	29	6,14	5,40	5,76
	<	30	4,07	3,79	3,93
	Total	89	5,42	5,21	5,31
Keadilan Prosedural	>	30	8,43	2,77	5,60
	=	30	8,52	2,57	5,49
	<	29	8,20	1,72	5,02
	Total	89	8,38	2,36	5,37

Tabel 4.15
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	1618,20	1	1618,20	378,20	0,001
Distribusi	14,73	2	7,37	1,72	0,182
Prosedur x Distribusi	5,00	2	2,50	0,58	0,558
Error	735,93	172	4,28	-	-
Total	7504	178	-	-	-

Tabel 4.16
 Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif
 dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

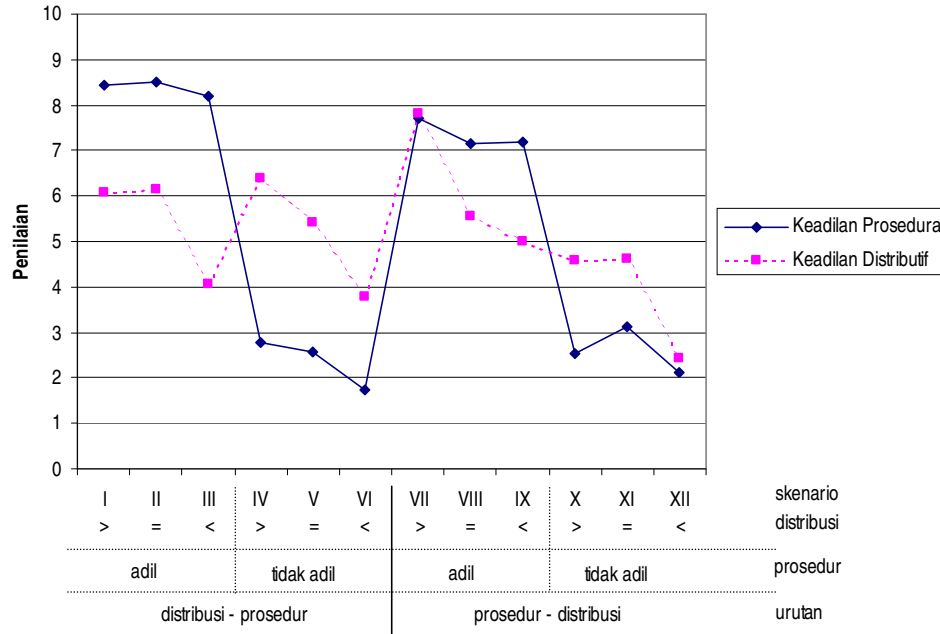
Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	2,27	1	2,27	0,46	0,489
Distribusi	175,92	2	87,96	17,833	0,001
Prosedur x Distribusi	8,59	2	4,29	0,87	0,420
Eror	848,34	172	4,93	-	-
Total	6062	178	-	-	-

Seluruh isi skenario yang digunakan dalam penelitian ini tidak memasukkan indikasi kepentingan pribadi seperti kontrol, intensi protes, atau kepuasan seperti yang dimanipulasi dalam penelitian lain (Van den Bos, 1996, 1999; Van den Bos dkk., 1997b). Hal ini dilakukan dalam rangka membuktikan hipotesis kelima. Berdasarkan hasil analisis penelitian skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kelima** yang menyebutkan bahwa bila tidak ada indikasi kepentingan pribadi yang menonjol maka distribusi dan penilaian keadilan distributif yang dilakukan sebelum mengetahui prosedurnya tidak akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural **diterima**.

Dari dua analisis yang terakhir dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural dipengaruhi oleh prosedur, penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh distribusi. Prosedur juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif, baik ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu maupun ketika informasi awal diabaikan. Ketika distribusi diketahui terlebih dulu maupun ketika informasi awal diabaikan, pengaruh distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural tidak signifikan. Elaborasi ini menunjukkan bahwa dari dua kaidah pokok tentang penyampaian informasi awal menurut teori keadilan heuristik yang diuji dalam penelitian ini, salah satu di antaranya sepenuhnya terbukti, sedangkan yang lainnya tidak terbukti. Kaidah

yang dimaksud menyebutkan bahwa informasi dan penilaian awal akan mempengaruhi penilaian berikutnya. Ketika informasi dan penilaian awal adalah prosedural, hal itu berpengaruh terhadap penilaian distributif, tetapi ketika informasi dan penilaian awalnya adalah tentang distribusi, ternyata hal itu tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural.

Pada paparan sebelumnya telah dicantumkan angka rata-rata penilaian keadilan berdasarkan kelompok variabel independen. Untuk melihat secara langsung keterkaitan antara dua variabel dependen dan tiga variabel independen ditampilkan juga gambar (grafik) rata-rata penilaian keadilan pada setiap skenario dengan penjelasan variasi variabel independen di bawah absis (Gambar 4.7). Hasil penelitian skenario, baik seperti pola dalam gambar maupun koefisien korelasi antara kedua variabel menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak begitu kuat meskipun sangat signifikan ($r = 0,22$; $p = 0,001$).



Gambar 4.7
Rata-Rata Penilaian Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif
pada Masing-Masing Skenario

Secara lebih spesifik hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif paling kuat terdapat pada skenario VII yaitu ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu, sementara prosedur wajar dan hasil sewa lebih tinggi ($r = 0,53$; $p = 0,001$) serta pada skenario XII yaitu ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu sementara prosedur tidak wajar dan hasil sewa lebih rendah ($r = 0,52$; $p = 0,002$). Di samping itu, korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif yang signifikan juga ditemukan ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu dan ketika prosedur tidak wajar ($r = 0,21$; $p = 0,023$). Tanpa melihat variasi prosedur maupun hasil sewa, hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif sangat signifikan bila informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu ($r = 0,38$; $p = 0,001$).

Hasil-hasil analisis yang dipaparkan ini memperkuat hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif cukup erat ketika prosedur diketahui terlebih dulu. Sebaliknya, ketika informasi tentang prosedur pada awalnya tidak diketahui, tetapi distribusi justru diketahui lebih awal, keterkaitan penilaian dua keadilan tersebut tidak jelas.

Dari gambar tersebut tampak bahwa pola penilaian keadilan prosedural ada dua, yaitu tinggi pada prosedur yang adil dan rendah pada prosedur tidak adil. Penilaian keadilan distributif juga membentuk pola dengan kecenderungan penilaian tertinggi pada distribusi hasil sewa yang lebih besar diikuti distribusi hasil sewa yang sebanding dan distribusi hasil sewa yang lebih kecil. Perkecualian muncul pada skenario pertama yang nilai rata-ratanya sedikit lebih rendah pada hasil sewa lebih besar dibandingkan dengan hasil sewa yang sama.

Apabila teori keadilan heuristik sepenuhnya terbukti dalam penelitian ini, pola yang dibentuk oleh kedua variabel dependen tersebut seperti pada Gambar 4.7 lebih searah. Secara hipotetis pula koefisien korelasi kedua variabel tersebut

seharusnya lebih besar. Pada kenyataannya, baik gambar maupun hasil analisis korelasi tidak menunjukkan pola yang searah dan korelasinya cenderung rendah (Tabel 4.17).

Analisis korelasi juga dilakukan dengan memisahkan subjek perempuan dan laki-laki. Analisis ini dilakukan secara terbatas karena jumlah subjeknya menjadi lebih kecil untuk masing-masing, yaitu 110 (31 persen) laki-laki, 241 (67 persen) perempuan, dan 7 tidak memberikan informasi tentang jenis kelaminnya. Analisis korelasi hanya dilakukan sampai pada kombinasi urutan dengan prosedur.

Tabel 4.17
Koefisien Korelasi antara Penilaian Keadilan Prosedural dengan Distributif
berdasar Variabel Independen dan Taraf Signifikasinya

Informasi awal	Prosedur	Distribusi	n	r	p
x	x	x	358	0,22	0,001
Distribusi	x	x	178	0,05	0,235
Prosedur	x	x	180	0,38	0,001
Distribusi	Adil	x	89	-0,02	0,444
Distribusi	Tidak adil	x	89	0,09	0,191
Prosedur	Adil	x	90	0,10	0,180
Prosedur	Adil	x	90	0,21	0,023
Distribusi	Adil	>	30	0,23	0,112
Distribusi	Adil	=	29	-0,01	0,487
Distribusi	Adil	<	30	0,17	0,179
Distribusi	Tidak adil	>	30	0,12	0,269
Distribusi	Tidak adil	=	29	0,04	0,416
Distribusi	Tidak adil	<	30	0,16	0,210
Prosedur	Adil	>	30	0,53	0,001
Prosedur	Adil	=	30	-0,11	0,282
Prosedur	Adil	<	30	-0,16	0,198
Prosedur	Tidak adil	>	30	0,12	0,273
Prosedur	Tidak adil	=	30	0,11	0,351
Prosedur	Tidak adil	<	30	0,52	0,002

Catatan: Tanda (x) berarti variasi pada variabel tersebut diabaikan

Pada kelompok perempuan, secara umum koefisien korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan distributif sebesar 0,22 ($p = 0,001$). Angka

korelasi ini sama dengan angka korelasi bila seluruh subjek digabung. Pada kelompok laki-laki hubungan kedua variabel tersebut tidak berkorelasi secara signifikan ($r = -0,066$; $p = 0,491$). Korelasi yang sangat signifikan juga ditemukan ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu. Pada kelompok perempuan koefisien korelasinya sebesar 0,42 ($p = 0,001$) dan pada kelompok laki-laki sebesar 0,31 ($p = 0,010$). Khusus pada perempuan masih ada korelasi yang signifikan ($r = 0,37$; $p = 0,007$), yaitu ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu dan prosedur tersebut tidak adil.

Dari hasil-hasil analisis korelasi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, lebih banyaknya korelasi yang signifikan pada kelompok perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa perempuan lebih konsisten dalam menilai keadilan dibandingkan dengan laki-laki. Kesimpulan ini diperkuat oleh koefisien korelasi yang lebih tinggi pada perempuan (0,42) dibandingkan dengan laki-laki (0,31) meskipun kedua korelasi itu signifikan. Kedua, dengan hanya ada satu korelasi yang signifikan pada kelompok laki-laki, sementara pada perempuan ada tiga korelasi yang signifikan, dapat disimpulkan juga bahwa penilaian yang dilakukan oleh perempuan lebih berperan dalam menjelaskan hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan keadilan distributif.

Dari beberapa analisis yang telah dilakukan ternyata hipotesis penelitian yang dibuktikan melalui penelitian skenario terbukti. Ada bagian-bagian dari teori heuristik yang terbukti, tetapi ada bagian darinya yang tidak terbukti. Secara rinci bagian-bagian teori penilaian keadilan heuristik dan kesimpulan pembuktiannya diuraikan di bawah ini.

Pertama, teori ini menyebutkan bahwa orang pada dasarnya peduli dengan keadilan karena menginginkan adanya kepastian sehingga kehidupannya terjamin. Sejauh ini teori heuristik penilaian lebih menekankan pada kepastian prosedural (Van den Bos, 1996; Van den Bos dkk., 1997; Van den Bos & Miedema, 2000).

Tampaknya pencetus teori ini menyadari benar bahwa pada umumnya suatu prosedur dilakukan mendahului distribusi hasil. Apabila prosedurnya jelas berarti ada kepastian. Maksudnya, bila prosedurnya adil, distribusi diharapkan adil, sedangkan bila prosedurnya tidak adil, distribusi tidak diharapkan akan adil. Sampai pada bagian ini teori keadilan heuristik terbukti.

Kedua, teori penilaian keadilan heuristik menyatakan bahwa secara objektif suatu prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan secara objektif pula suatu distribusi hasil akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Dari beberapa analisis variansi seperti dikemukakan terdahulu terlihat bahwa variasi prosedur (adil dan tidak adil) berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Prosedur yang adil dinilai adil dan prosedur yang tidak adil dinilai tidak adil. Sementara itu, penilaian terhadap distribusi yang secara objektif tinggi (lebih besar dengan pembanding yang wajar), sedang (sebanding dengan pembanding yang wajar) dan rendah (lebih rendah dibandingkan dengan pembanding yang wajar) secara berturut-turut adalah paling tinggi (6,22), sedang (5,43), dan rendah (3,82). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagian teori penilaian keadilan heuristik ini juga terbukti.

Ketiga, teori keadilan heuristik juga menyatakan bahwa penilaian keadilan prosedural lebih mudah dilakukan daripada penilaian keadilan distributif. Dari angka rata-rata penilaian keadilan perbedaan penilaian keadilan prosedural antara yang adil dan tidak adil sangat menonjol (7,87 dibanding 2,48), sedangkan perbedaan penilaian keadilan distributif terhadap distribusi yang tinggi, sedang, dan rendah tidak begitu mencolok (6,22 dibanding 5,43 dibanding 3,82). Dari gambaran hasil seluruh penelitian skenario tampak bahwa penilaian keadilan prosedural menunjukkan pola yang jelas, sedangkan penilaian keadilan distributif polanya kurang jelas. Fakta ini juga mendukung bagian pernyataan teori keadilan heuristik.

Keempat, teori keadilan heuristik menyebutkan bahwa informasi awal sangat berperan dalam menentukan penilaian berikutnya. Ditunjukkan oleh Van den Bos (1996) bahwa ketika prosedur diinformasikan dan dinilai terlebih dulu, hal ini berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Sebaliknya, ketika distribusi diinformasikan dan dinilai terlebih dulu, hal ini berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian informasi dan penilaian tentang prosedur dilakukan terlebih dulu maka efeknya terhadap penilaian keadilan distributif signifikan. Hal ini diperkuat dengan adanya interaksi antara prosedur dengan distribusi terhadap penilaian keadilan distributif. Ketika dilakukan hal yang sebaliknya, informasi dan penilaian keadilan distributif yang lebih awal tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural yang dilakukan sesudahnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagian dari teori penilaian keadilan heuristik tentang pentingnya informasi awal tidak sepenuhnya terbukti.

Mengapa sebagian dari teori keadilan heuristik tidak terbukti? Sebelum pertanyaan ini dijawab, ada satu catatan yang perlu disampaikan terlebih dulu. Dari empat hal yang diteliti untuk membuktikan teori penilaian keadilan heuristik, yang terakhir paling sulit dibuktikan. Pola berpikir heuristik untuk bagian ini telah terbukti pada konsep kesan awal dalam proses atribusi. Di samping itu, secara langsung atau tidak dan diakui atau tidak, bagian dari teori penilaian keadilan heuristik ini terkait dengan teori penilaian keadilan yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Berangkat dari pemikiran inilah tidak terbuktinya sebagian teori keadilan heuristik dibahas.

Orientasi kepentingan pribadi menekankan pada hasil yang tinggi, bahkan kalau memungkinkan hasil yang setinggi-tingginya. Ketika hal ini tercapai, hal-hal lain tidak begitu dipedulikan. Apabila ini terjadi pada penelitian ini, mereka yang mendapatkan hasil sewa (distribusi) yang tinggi akan menilai keadilan dengan skor tinggi dan cenderung menilai keadilan prosedural juga tinggi (skenario 1, 2, 4, dan 5). Ternyata rata-rata penilaian keadilan distributif pada

keempat skenario tersebut adalah 6,07 untuk skenario pertama, 6,14 untuk skenario kedua, 6,40 untuk skenario keempat, dan 5,40 untuk skenario kelima. Angka rata-rata yang demikian itu lebih tepat dikatakan cukup atau sedang daripada tinggi. Dengan demikian, subjek penelitian skenario tersebut tidak menunjukkan kepentingan pribadi.

Secara sengaja penelitian skenario-penelitian skenario yang dilakukan di sini tidak dirancang untuk menggunakan konsep interes pribadi. Hal ini dilakukan dengan tidak menggunakan kontrol seperti dalam model kepentingan pribadi untuk menggambarkan prosedur (lihat Tyler, 1994; Van den Bos, 1996), tetapi menggunakan model relasional seperti tampak dalam kata-kata **dimarahi** dan **dikenai sanksi** dalam skenario tersebut. Eliminasi kepentingan pribadi untuk prosedur dalam penelitian ini sesungguhnya hanya akan efektif ketika prosedur diketahui lebih dulu (skenario 7 sampai 12). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada semua skenario ternyata kepentingan pribadi tidak muncul yang diperkirakan ikut memperlemah pola berpikir heuristik yang merupakan landasan utama teori keadilan heuristik.

Secara metodologis penelitian ini telah dirancang untuk mengeliminasi kepentingan pribadi ini. Di samping itu, ada kaitan antara desain penelitian dengan kondisi subjek penelitian, yaitu mahasiswa, yang pada saat penelitian dilakukan akan sulit untuk melakukan manipulasi kepentingan pribadi. Ada tiga hal yang tampak menonjol dan perlu dikemukakan di sini. Pertama, subjek penelitian yang semuanya berstatus mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi moral. Menonjolkan kepentingan pribadi tidak sejalan dengan moralitas yang berkembang, terutama pada saat penelitian dilakukan. Mahasiswa adalah kelompok yang ikut memerangi praktik-praktik dari orientasi menonjolkan kepentingan pribadi seperti monopoli, korupsi, dan nepotisme. Agar konsisten dengan perjuangan mahasiswa, mereka berusaha untuk tidak menonjolkan kepentingan pribadi. Kedua, seperti disebutkan dalam teori

keadilan heuristik (Van den Bos & Miedema, 2000), keadilan diperlukan agar ada kepastian. Pada saat penelitian dilakukan terasa sekali adanya ketidakpastian yang menyangkut hampir semua aspek kehidupan sosial. Mahasiswa termasuk kelompok yang sangat kritis menghadapinya. Mereka tahu betul dengan permasalahan ini. Keadaan yang seperti ini dapat diartikan sebagai kondisi yang sangat tidak adil. Hal ini diperkirakan berpengaruh terhadap penilaian, khususnya penilaian keadilan distributif. Akibatnya, ketika mereka melakukan penilaian cenderung pada tingkat yang rendah. Ketiga, skenario dalam penelitian ini mengangkat masalah petani. Pada umumnya mereka adalah kelompok yang berpendapatan rendah, paling rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain (Faturochman, 1999; Fauzi, 1999; Wiradi, 2000). Mereka adalah orang yang mengalami deprivasi baik absolut maupun relatif (Corning, 2000; Faturochman, 1998). Mahasiswa yang pada umumnya sensitif dengan permasalahan sosial rupanya mengerti masalah yang dihadapi petani ini. Oleh karenanya, ketika mereka menilai distribusi hasil sewa, khususnya yang sebanding dengan hasil bila digarap sendiri, juga cenderung rendah. Rasa empati inilah yang kiranya berpengaruh terhadap rendahnya penilaian keadilan distributif yang bisa mencerminkan penonjolan kepentingan pribadi.

Beberapa penjelasan terakhir itu juga dapat dikaitkan langsung dengan tidak terbuktinya sebagian dari teori penilaian heuristik. Seperti disebutkan terdahulu, menurut teori referensi kognisi (Folger, 1987) orang bisa menilai keadilan bila ada justifikasi meskipun ini bukan satu-satunya faktor penting. Dengan sedikitnya informasi yang tersedia dalam skenario dan kompleksnya masalah keadilan dalam kehidupan nyata, subjek penelitian akan mengalami kesulitan dalam menilai keadilan, terutama untuk menilai keadilan distributif tanpa mengetahui prosedurnya. Secara moral prosedur yang tidak adil sulit dikatakan adil meskipun diketahui bahwa distribusinya adil. Justifikasi yang rendah seperti ini sulit untuk menilainya sebagai sesuatu yang adil. Masih

berkaitan dengan teori referensi kognisi, ketidakpastian hidup yang tinggi seperti disebutkan di atas akan menyebabkan kepastian pada masa mendatang menjadi rendah. Menurut teori ini pula, ketika kepastian rendah, orang juga cenderung menilai sesuatu kurang adil.

Salah satu hasil analisis juga menunjukkan bahwa efek prosedur lebih kuat dibandingkan dengan efek dari distribusi dan urutan informasi terhadap penilaian keadilan. Berkaitan dengan ketidakpastian hidup yang dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat itu, besarnya efek prosedur ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian. Hasil penelitian Van den Bos (2001) menunjukkan bahwa ketidakpastian menyebabkan pengaruh prosedur terhadap penilaian keadilan lebih jelas. Hal ini bisa terjadi karena prosedur lebih mudah dinilai dibandingkan dengan distribusi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa prosedur lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan hasil.

2. Perbedaan Kepuasan dan Indikasi Kepentingan Pribadi

Hipotesis keenam menyebutkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan keadilan distributif akan lebih kuat ketika tingkat kepuasan rendah atau sedang dibandingkan dengan ketika kepuasan tinggi. Untuk membuktikan hipotesis ini, data tentang kepuasan dikategorikan menjadi tiga untuk memperoleh kelompok responden dengan tingkat kepuasan rendah, sedang, dan tinggi. Karena persebaran data kepuasan cukup normal dengan rentang yang tidak terlalu lebar, digunakan indikator tendensi sentral (rata-rata dan deviasi standar) untuk membuat kategori yang dimaksud. Kategori tingkat kepuasan sedang adalah skor kepuasan sekitar nilai rata-rata. Hal ini dihitung dari angka rata-rata dikurangi satu deviasi standar hingga angka rata-rata ditambah satu deviasi standar. Dari perhitungan statistik diperoleh angka rata-rata sebesar 41,6 dan deviasi standar sebesar 6,0. Dengan demikian, kategori sedang adalah antara skor 36 (41,6 dikurangi 6 dengan pebulatan) hingga 48 (41,6 ditambah 6 dengan

pembulatan). Kategori tingkat kepuasan rendah adalah kelompok responden dengan skor kepuasan di bawah 36, sedangkan kategori tingkat kepuasan tinggi adalah kelompok responden dengan skor kepuasan di atas 48.

Hasil analisis dengan menggunakan teknik korelasi bivariat untuk setiap kelompok kepuasan menunjukkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif lebih tinggi ketika tingkat kepuasan rendah (0,582) dan sedang (0,604) dibandingkan dengan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.18. Secara statistik perbedaan korelasi tersebut juga dapat dianalisis. Meskipun tampak berbeda, perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui signifikansinya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan koefisien korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif ketika tingkat kepuasan rendah (0,582) dan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) tidak signifikan. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang menelorkan nilai Z sebesar 1,84. Angka ini lebih kecil daripada yang disyaratkan untuk mencapai taraf signifikan 5 persen, yaitu nilai Z harus sama atau lebih tinggi dari 1,96. Salah satu kemungkinan dari keadaan ini adalah karena jumlah sampel yang kecil untuk dua kategori yang dibandingkan tersebut sehingga dapat memperbesar terjadinya eror yang dihitung. Kemungkinan lainnya adalah adanya sikap apatis pada beberapa orang tidak puas sehingga persebaran penilaian keadilan pada kelompok ini melebar dan lebih lebar dibanding kelompok dengan kepuasan sedang.

Sementara itu, perbedaan koefisien korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif ketika tingkat kepuasan sedang (0,604) dan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) tergolong sangat signifikan. Uji perbedaan korelasi antara dua variabel terakhir ini menunjukkan angka Z sebesar 2,754. Dengan angka sebesar ini berarti ada perbedaan koefisien korelasi penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif yang sangat

signifikan antara kelompok yang memiliki kepuasan sedang dengan kelompok yang memiliki kepuasan tinggi.

Tabel 4.18
Korelasi antara Penilaian Keadilan Prosedural dengan Penilaian Keadilan Distributif dan Signifikansinya pada Tingkat Kepuasan yang Berbeda

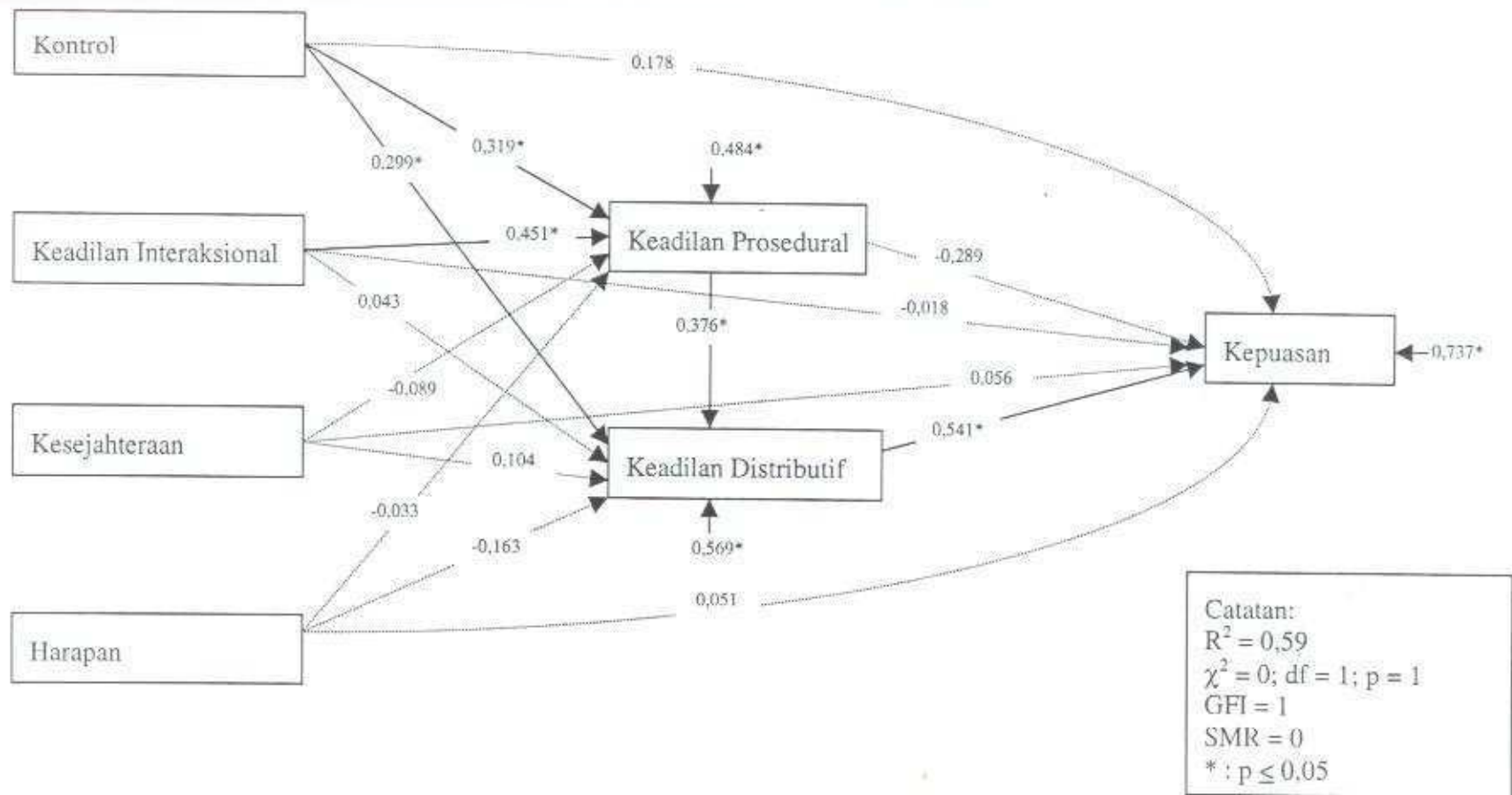
Tingkat kepuasan	Jml kasus (n)	Korelasi	p
Rendah	55	0,582	0,001
Sedang	347	0,604	0,001
Tinggi	69	0,267	0,001

Perbedaan peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif juga dapat diuji dengan menggunakan model persamaan struktural. Dari model tersebut dapat dilihat besarnya efek langsung penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif. Dengan membagi model menjadi tiga (Gambar 4.8, 4.9, dan 4.10) yaitu untuk kategori kepuasan rendah, sedang, dan tinggi seperti di atas, maka didapat efek langsung seperti terlihat pada Tabel 4.19. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa efek langsung penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif juga lebih besar ketika kepuasan rendah dan sedang daripada ketika kepuasan tinggi. Di sini terungkap pula bahwa ketika kepuasannya rendah dan sedang, efek langsung penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif tersebut signifikan, tetapi ketika kepuasannya tinggi, efeknya menjadi tidak signifikan.

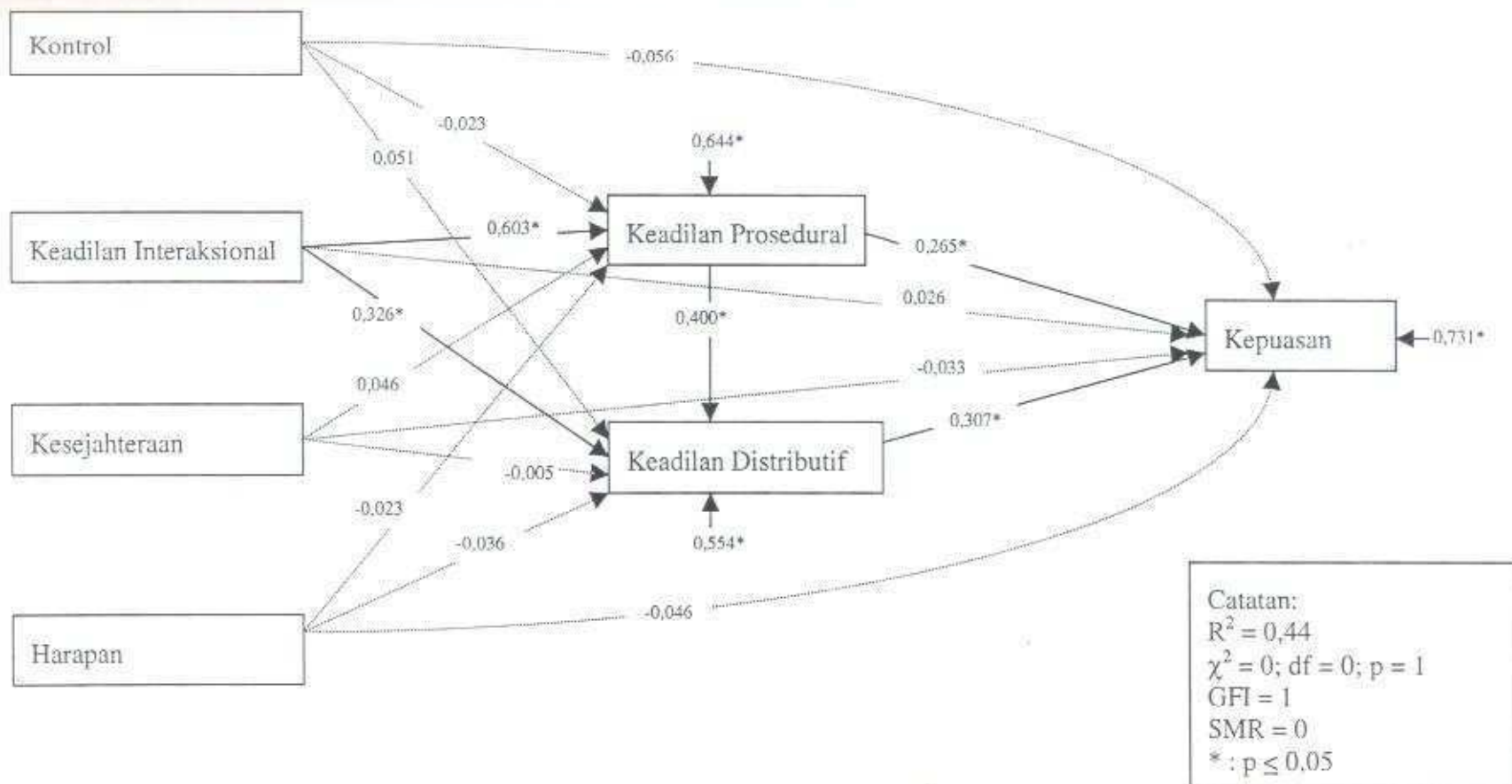
Tabel 4.19
Efek Langsung (Beta) pada Tingkat Kepuasan yang Berbeda

Tingkat kepuasan	Pros \square Dist	Pros \square Puas	Dist \square Puas
Rendah	0,376*	-0,289	0,541*
Sedang	0,400*	0,265*	0,307*
Tinggi	0,198	0,381*	0,166

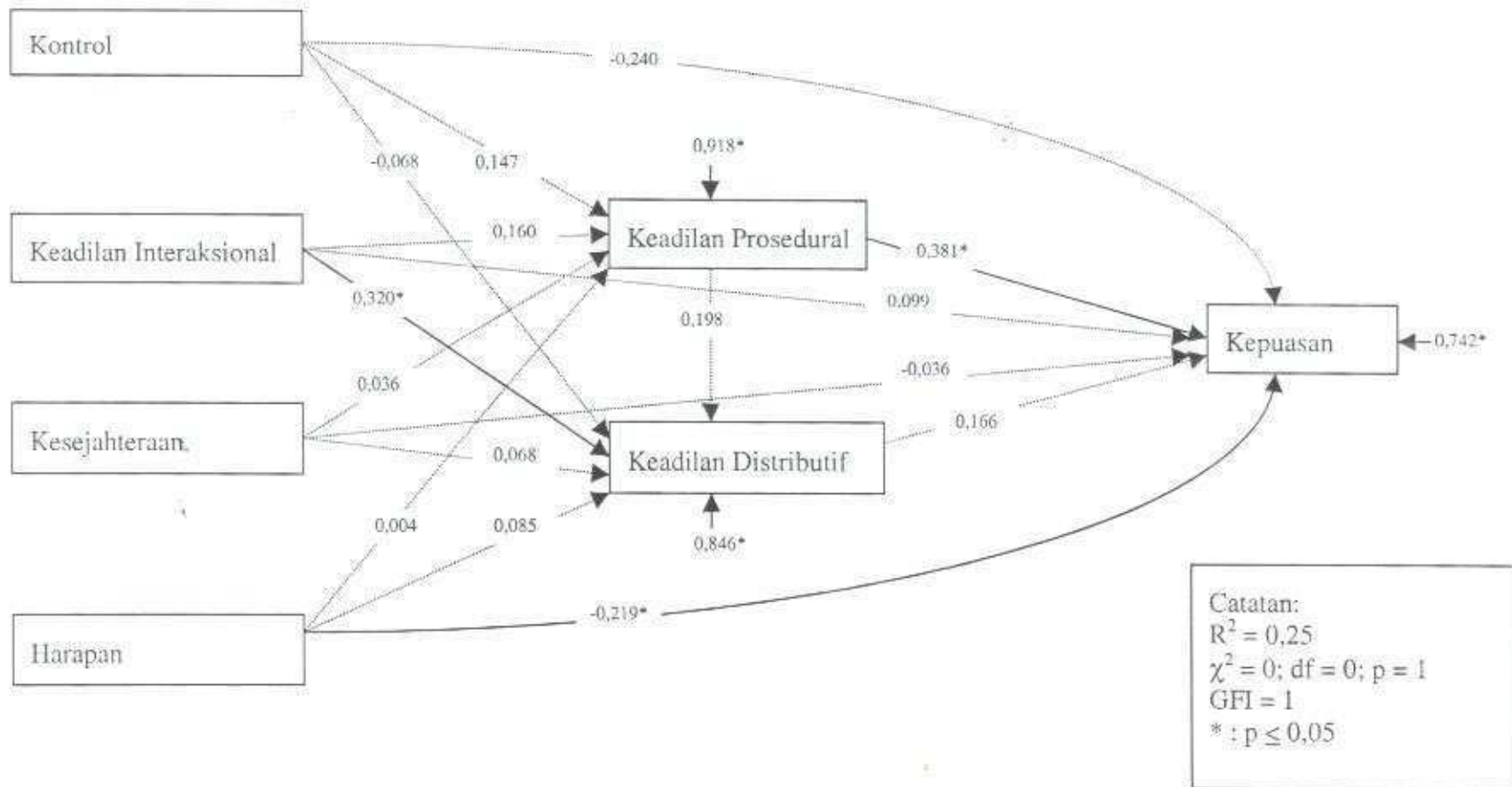
* berarti efek tersebut signifikan dengan $p \leq 0,05$



Gambar 4.8
 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Rendah



Gambar 4.9
 Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Sedang



Gambar 4.10
Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis Ketika Kepuasan Tinggi

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan adalah efek langsung keadilan prosedural dan distributif terhadap kepuasan pada kelompok kepuasan yang berbeda-beda. Di sini tampak bahwa efek penilaian keadilan prosedural terhadap kepuasan meningkat selaras dengan tingkat kepuasannya. Ketika kepuasannya rendah, efek tersebut negatif dan tidak signifikan. Ketika kepuasannya sedang, efeknya meningkat dan signifikan. Ketika kepuasannya tinggi, efeknya lebih tinggi lagi dan signifikan. Sebaliknya, efek langsung penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan menurun justru ketika kepuasan dikategorikan meningkat. Efek tersebut paling tinggi ketika kepuasan rendah, menurun ketika kepuasan sedang, dan menurun lagi hingga tidak signifikan ketika kepuasan tergolong tinggi.

Dari hasil-hasil analisis seperti yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keenam** yang menyatakan bahwa ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang atau rendah **tidak sepenuhnya diterima**. Perbedaan peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan tinggi dan sedang ternyata signifikan. Dengan kata lain, **hipotesis 6a diterima**. Sementara itu, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan rendah lebih tinggi bila dibandingkan dengan peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan tinggi, tetapi perbedaan keduanya tidak signifikan. Dengan demikian, **hipotesis 6b ditolak**.

Dengan menggunakan kepuasan sebagai indikator orientasi kepentingan pribadi dan dengan menggunakan cara atau model analisis lain ternyata dalam penelitian ini indikasi orientasi kepentingan pribadi muncul. Ketika kepuasan tergolong rendah, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif dapat dikatakan tinggi, demikian juga ketika kepuasan tergolong sedang. Pada saat kepuasan rendah, efek penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan paling tinggi. Artinya, pada saat itu kepuasan akan tercapai bila

distribusinya dinilai adil. Pada saat inilah orang sangat peduli dengan kepentingan pribadi seperti yang terlihat dalam model yang menunjukkan efek variabel kontrol terhadap ketiga variabel tergantung paling besar. Pada saat itu penilaian keadilan prosedural tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan, efeknya melalui penilaian keadilan distributif yang cukup besar dan signifikan. Ketika kepuasan tergolong rendah orang menjadi lebih peduli dengan kepentingannya atau kebutuhannya untuk dipenuhi. Caranya adalah dengan memperbesar peran kontrol terhadap proses-proses yang terjadi dan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat.

Sebaliknya, ketika kepuasan tergolong tinggi, efek penilaian keadilan prosedural terhadap kepuasan menjadi lebih tinggi sementara efek penilaian distributif terhadap kepuasan menjadi tidak signifikan, efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif menjadi tidak signifikan. Pada saat bersamaan efek kontrol justru berefek langsung secara signifikan terhadap kepuasan, tetapi efeknya negatif. Kondisi seperti ini dapat diinterpretasikan sebagai keadaan yang orientasi kepentingan pribadi menjadi tidak penting.

Salah satu hasil yang sangat menarik dari analisis-analisis yang dilakukan dengan menggunakan tiga model berdasarkan tingkat kepuasan adalah perbedaan koefisien determinasi dari ketiganya. Secara berturut-turut adalah 0,59 untuk kategori kepuasan rendah, 0,44 untuk kategori kepuasan sedang, dan 0,24 untuk kategori kepuasan tinggi. Uji terhadap ketiga model itu, seperti yang ditunjukkan oleh angka *kai* kuadrat dan indeks ketepatan (GFI), menunjukkan ketepatan yang tinggi. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa model penilaian keadilan menjadi lebih menonjol ketika kepuasan tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan hasil sebelumnya (lihat Cook & Curtin, 1987; Van den Bos, 2001) yang menyebutkan bahwa ketidakpastian menyebabkan orang menempatkan keadilan sebagai masalah yang penting. Di sini kepuasan yang rendah dapat dikatakan sebagai cerminan dari ketidakpastian tersebut. Meningkatnya koefisien determinasi tersebut yang arahnya berkebalikan dengan tingkat kepuasan dapat

diinterpretasikan sebagai peningkatan kepedulian dengan keadilan sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian.

E. Pembahasan Umum

Dari tiga pendekatan penelitian yang digunakan di sini hasilnya menunjukkan keterkaitan yang dapat didiskusikan dan disintesis sebagai berikut. Pertama, masalah keadilan bukan hanya sekedar isu, tetapi merupakan permasalahan yang secara objektif ada dan dirasakan oleh anggota masyarakat. Permasalahan keadilan sosial muncul pada relasi sosial yang bersifat baik vertikal maupun horizontal. Keadilan dalam relasi sosial vertikal akan menyangkut keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional, sedangkan dalam relasi sosial horizontal keadilannya sering disebut sebagai keadilan interaksional dan keadilan komutatif atau pertukaran. Untuk selanjutnya penelitian ini lebih memfokuskan pada keadilan dalam relasi sosial vertikal. Pada semua jenis keadilan selalu ada potensi munculnya ketidakadilan yang penyebabnya sangat kompleks, penyebabnya, tetapi dalam penelitian ini ditemukan dua penyebab pokok yaitu upaya untuk melakukan dominasi serta marginalisasi atas pihak lain dan upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Kedua dorongan tersebut sering menjadi satu dan sulit dipisahkan.

Kedua, ketidakadilan yang dirasakan baik oleh informan maupun responden penelitian menyebabkan ketidakpuasan, tetapi belum menimbulkan konflik terbuka. Penilaian ketidakadilan muncul bersama-sama dengan rendahnya kesejahteraan, harapan, dan rendahnya keterlibatan anggota masyarakat dalam menentukan nasib mereka. Dari tiga faktor ini, harapan biasanya akan menyebabkan munculnya penilaian tidak adil bila tarafnya tinggi. Di lapangan harapan cenderung rendah karena mereka telah lama diperlakukan tidak adil dan menilai rendahnya peluang keberhasilan untuk memperjuangkan keadilan.

Meskipun demikian, masih ada sekelompok orang yang terus memperjuangkannya. Hal ini tampak pada perubahan orientasi pengurus kelompok tani yang mulai kritis dan berani menyampaikan pendapat serta terus melakukan negoisasi dengan pihak PTPN.

Ketiga, baik dalam relasi sosial vertikal maupun horizontal perempuan lebih sering diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih sering menjadi korban ketidakadilan. Ada indikasi yang cukup kuat bahwa secara struktural dan kultural diperlakukan demikian yang menyebabkan mereka terpaksa menerimanya sebagai sesuatu yang *seharusnya begitu* (Desmairis & Curtis, 1997; Devasia & Devasia, 1990; Jackson dkk., 1992; Witt & Nye, 1992). Permasalahan yang menyedihkan ini berlanjut pada model penilaian keadilan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaan menunjukkan bahwa harapan masih menjadi faktor yang penting bagi perempuan sementara kesejahteraan lebih penting pada kelompok laki-laki. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa sementara laki-laki mempermasalahkannya dalam tataran realitas, perempuan masih berkuat pada harapan yang masih sulit diwujudkan.

Keempat, dalam relasi sosial vertikal peran interaksi sosial tetap penting, bahkan menjadi faktor terpenting dalam menjelaskan penilaian keadilan prosedural dan distributif. Dominasi peran penilaian keadilan interaksional ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat munculnya konflik terbuka (Ball dkk., 1994; Donovan dkk., 1998; Skarlicki & Folger, 1997). Variabel ini tidak secara langsung dapat menjelaskan dampak baik dari penilaian keadilan prosedural maupun distributif seperti kepuasan dan konflik karena orientasi akan kepentingan pribadi tidak cukup menonjol. Artinya, ada indikasi yang kuat bahwa model keadilan yang berkembang adalah model nilai-nilai kelompok (Tyler, 1989, 1994). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa meskipun pola relasi sosialnya bersifat vertikal dan responden penelitian dalam posisi subordinat, mereka masih berusaha menjaga nilai-nilai kelompok dan identitasnya sebagai satu bagian komunitas bersama-sama dengan PTPN. Terbentuknya orientasi seperti ini tidak lepas dari

pengalaman sejarah masyarakat setempat yang tidak bisa melupakan peran PTPN pada masa lalu. Perkembangan masyarakat di enam desa penelitian yang relatif lebih baik dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan yang sama pernah ditopang oleh tumbuhnya perkebunan tembakau di sana (Padmo, 1994, 1998). Pada sisi lain, pihak PTPN dengan keterbatasannya juga berusaha terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.

Kelima, kepentingan diri tampak dalam observasi penelitian lapangan, tetapi dalam model penilaian keadilan yang dikembangkan di penelitian ini menjadi tidak menonjol. Hasil ini menjadi bagian penting dalam mengembangkan penjelasan penilaian keadilan secara kognitif melalui penelitian skenario yang dilakukan. Skenario-skenario dalam penelitian ini dirancang untuk menonjolkan model penilaian keadilan interaksional dan kerangka berpikir heuristik dalam menilai keadilan. Hasil penelitian sebelumnya (Van den Bos, 1996) menunjukkan bahwa penilaian keadilan heuristik dipengaruhi oleh orientasi kepentingan pribadi. Ketika orientasi kepentingan pribadi menonjol, orientasi ini menjadi bagian dari penilaian keadilan. Sebaliknya, penelitian ini mengeliminasi orientasi kepentingan pribadi dan menonjolkan orientasi relasional. Hasilnya menunjukkan bahwa orientasi ini pun berpengaruh terhadap penilaian keadilan heuristik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara kedua penelitian. Dalam penelitian yang menonjolkan orientasi kepentingan pribadi, peran distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural menjadi signifikan. Sebaliknya, penelitian ini menonjolkan orientasi relasional dan hasilnya menunjukkan bahwa distribusi tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Hasil penelitian ini tidak menyanggah teori keadilan heuristik yang dikembangkan oleh Van den Bos (1996, 1999, 2001; Van den Bos dkk., 1997, 1998), tetapi mengelaborasinya lebih jauh. Teori keadilan heuristik tidak salah, tetapi belum lengkap. Hal ini dapat dimaklumi karena teori itu terus dikembangkan². Perkembangan teori ini akan

² Dalam kontak e-mail dengan Van den Bos diperoleh keterangan bahwa ia tengah menyiapkan penelitian lanjutan dan publikasi dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan teori heuristiknya. Beberapa manuskrip yang belum dipublikasikan telah ia kirimkan kepada penulis.

sangat menarik karena sesuai dengan sifatnya, proses berpikir heuristik dalam psikologi kognitif lebih menekankan pada pola-pola dari proses tersebut daripada ketentuan atau hukum-hukum yang ketat seperti dalam model algoritme.

Keenam, dalam penelitian ini kepentingan pribadi muncul pada kelompok dengan tingkat kepuasan tergolong rendah. Model penilaian keadilan berdasar kepentingan pribadi dalam penelitian ini memiliki dua indikasi yaitu besarnya peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif pada satu sisi, serta besarnya peran penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan pada sisi yang lain. Peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif pada satu peran penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan makin mengecil dan menjadi tidak signifikan dengan meningkatnya kepuasan. Perubahan ini mengarah pada model relasional. Perubahan ini mengindikasikan adanya arah yang berlawanan antara model kepentingan pribadi (Thibaut & Walker, 1975) dengan model nilai-nilai kelompok (Lind & Tyler, 1988). Hal ini berarti juga bahwa *saturated model* dan *dual model* yang dirancang Tyler (1994) akan sulit dibuktikan.

Akhirnya, penggunaan metode yang lebih dari satu dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif. Sejauh ini sering terjadi perbedaan dalam mengaplikasikan metode yang menyebabkan munculnya perdebatan berkepanjangan. Seperti dikatakan Hamel dkk. (1993) bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada sisi lain, di antara berbagai metode tersebut terdapat kaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Penelitian ini dirancang menggunakan tiga metode yang masing-masing saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan. Langkah ini sengaja diambil karena peneliti berpendapat bahwa kecenderungan mempertentangkan metode satu dengan lainnya secara ilmiah perlu, tetapi pada tatanan praktik hal itu sering menjadi hambatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode yang sama dapat dihasilkan sesuatu yang berbeda. Hal ini ditemukan pada waktu membuktikan hipotesis keenam. Hipotesis ini sejak awal dirancang untuk

membuktikan adanya indikasi kepentingan pribadi yang diharapkan pada bagian sebelumnya (hipotesis pertama) juga muncul. Ketika hasil analisis di bagian awal tidak menunjukkan indikasi kepentingan pribadi, eksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan data dan metode analisis yang sama ternyata muncul indikasi itu. Di sini perlu digarisbawahi bahwa setiap metode mempunyai kekuatan atau keunggulan dan pemanfaatan keunggulan-keunggulan metode tertentu seharusnya lebih ditekankan dibandingkan dengan mengorek-ngorek kelemahan yang seharusnya ditutupi dengan keunggulan dari metode lain.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan untuk menjawab permasalahan keadilan dan ketidakadilan ditinjau dari disiplin psikologi dengan mempertimbangkan konteks penelitian yang menggunakan tinjauan dari disiplin lain, khususnya secara sosiologis. Untuk keperluan itu, penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, survai, dan rancangan eksperimen. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk merangkai pemahaman permasalahan dari lingkup masyarakat ke permasalahan personal, dalam hal ini cara menilai keadilan. Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan permasalahan ketidakadilan di masyarakat dan menemukan model penilaian keadilan yang secara teoretis terus berkembang. Penelitian ini diupayakan agar komprehensif. Meskipun demikian, disadari juga bahwa masih ada kelemahan-kelemahannya, beberapa di antaranya dikemukakan di bawah ini.

Pertama, dalam studi kasus dikemukakan tiga permasalahan keadilan yang dianggap sebagai representasi dari permasalahan yang lebih luas. Pemaparan tiga masalah tersebut tidak dimaksudkan untuk mereduksi kenyataan yang ada karena peneliti menyadari bahwa ada kemungkinan permasalahan lain yang menonjol, tetapi tidak dipaparkan. Peneliti lain barangkali akan melihat permasalahan lain sebagai permasalahan yang lebih menonjol sebagai fokus kajian. Kelemahan ini disadari oleh peneliti karena suatu penelitian diupayakan untuk mendekati

kesempurnaan, tetapi tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Selanjutnya, dari ketiga permasalahan ketidakadilan yang ada diambil satu, dalam hal ini hubungan pemilik sawah dengan pihak PTPN X, untuk diteliti lebih lanjut dalam survai. Pemilihan ini didasarkan pada kesesuaian antara permasalahan dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam rancangan survai. Dengan demikian, hasil studi eksplorasi di lapangan ditindaklanjuti dengan penelitian yang diarahkan oleh teori (*theory driven*). Bagi peneliti lain, langkah ini mungkin dianggap sebagai ketidakkonsistenan dalam menggunakan pendekatan penelitian. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai kelemahan penelitian, tetapi bukan itu yang dimaksudkan peneliti. Dari seluruh penelitian ini, eksplorasi dalam studi kasus bertujuan untuk kontekstualisasi penelitian survai dan penelitian skenario. Maksud seperti ini mungkin dianggap sebagai penomorduaan studi kasus sebagai suatu metode sekaligus kelemahan penelitian ini. Harus diakui bahwa penelitian ini tidak dapat menerapkan semua pendekatan dalam porsi yang sama, tetapi tidak berarti bahwa suatu pendekatan lebih penting daripada pendekatan lainnya.

Kedua, model yang dibangun dalam penelitian survai menggunakan model yang dikembangkan oleh Tyler (1989, 1994). Model ini tidak mengadopsi semua teori dan hasil-hasil penelitian, misalnya tidak memasukkan semua anteseden penilaian keadilan distributif. Dua variabel yang diduga memiliki efek terhadap penilaian keadilan distributif yang dimasukkan dalam model terbukti, tetapi perannya relatif kecil. Tidak tertutup kemungkinan bahwa variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini berperan lebih besar sehingga secara keseluruhan koefisien determinasinya juga akan meningkat bila itu dimasukkan dalam model.

Ketiga, survai sebagai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelemahan. Ada dua kelemahan yang perlu disampaikan di sini. Kelemahan pertama ditemukan dalam pengukuran dan kelemahan kedua dalam hal pengambilan sampel. Meskipun skala-skala yang digunakan dalam penelitian telah diminimalisasi dengan cara menyusunnya berdasarkan konstruksi yang ada dan melalui seleksi item, skala-skala tersebut tidak sempurna. Hal ini

berakibat pada hasil analisis. Meskipun model yang diuji dapat diterima, model tersebut tidak dapat menjelaskannya secara maksimal karena koefisien determinasinya hanya sedikit di atas limapuluh persen. Di samping karena faktor pengukuran, faktor sampel diyakini ikut berperan terhadap hasil tersebut. Upaya untuk mendapatkan responden secara acak tidak tercapai karena kesulitan di lapangan menyebabkan rencana mencari sampel justru mengarah pada studi populasi. Dengan demikian, harus diakui bahwa dalam penelitian survai ini ada kesalahan penyampelan yang menyebabkan hasilnya tidak maksimal. Hasil-hasil penelitian menunjukkan besarnya eror dari variabel dependen yang, antara lain, disebabkan oleh kedua kelemahan atau eror itu.

Keempat, dalam penelitian skenario terdapat beberapa kelemahan meskipun juga terdapat keunggulan. Salah satu kelemahan muncul karena dalam penelitian skenario subjek penelitian harus paham benar dengan skenarionya. Meskipun skenario sudah dibuat sederhana, terbukti cukup banyak yang tidak memahaminya. Secara teknis masalah ini dapat diatasi, tetapi secara metodologis tetap memiliki pengaruh di antaranya adalah dalam hal pengambilan sampel yang juga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian seperti dikemukakan sebelumnya.

Kelima, menggunakan beberapa pendekatan penelitian dengan cara analisis yang berbeda-beda menimbulkan kerumitan tersendiri. Bukan maksud peneliti untuk menyajikan penelitian ini dalam bentuk yang tidak mudah dan secara cepat dapat dipahami. Peneliti telah berusaha untuk menyajikannya sesederhana mungkin, tetapi juga menyadari bahwa hal ini bukan cara yang mudah sehingga hasilnya belum memuaskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut. Secara umum, model penilaian keadilan yang sesuai dengan kondisi di lapangan adalah model penilaian keadilan yang didominasi orientasi relasional. Dalam model ini penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif sangat tergantung pada penilaian keadilan interaksional. Prosedur dan distribusi akan dinilai adil dan menghasilkan kepuasan bila ada interaksi sosial yang dinilai adil. Dengan menempatkan keadilan prosedural dan keadilan distributif sebagai komponen pokok keadilan, kesimpulan tersebut berarti pula bahwa keadilan dipengaruhi oleh relasi sosial yang berkembang. Keadilan akan tercapai bila dalam suatu masyarakat nilai-nilai sosial dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh anggota-anggota dan pemimpinnya. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi relasi yang saling menghargai, tingkat kepercayaannya tinggi, dan pemegang otoritas dalam kelompok dapat bersikap netral. Peran nilai-nilai tersebut dominan, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Menurut model yang ditemukan, kesejahteraan dan harapan juga menjadi bagian yang penting, meskipun tidak sebesar peran relasi sosial. Artinya, tanpa ada kesejahteraan maka keadilan sulit dioptimalkan dan harapan yang terlalu tinggi pada situasi saat ini akan menyulitkan optimalisasi keadilan. Hal-hal yang disebutkan itu didasarkan pada pandangan masyarakat sehingga model yang dimaksud merupakan model yang dikembangkan dari sisi masyarakat. Model ini juga sejalan dengan landasan dalam bidang hukum di mana kesejahteraan sosial selalu menjiwai hukum sehingga keadilan dalam bidang hukum juga tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan masyarakat.

Di samping kesimpulan umum tersebut, ada beberapa kesimpulan lain yang dapat dirinci berikut ini.

Pertama, keadilan dalam kajian psikologi sifatnya subjektif, dalam hal ini bentuknya adalah penilaian keadilan. Meskipun subjektif, penilaian tersebut terbukti konsisten dengan kondisi objektifnya. Konsistensi ini akan meningkat dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok. Ketika secara objektif keadaan tergolong adil maka akan dinilai adil dan ketika keadaan secara objektif tidak adil maka akan dinilai tidak adil juga. Hal ini berbeda dengan ketika kepentingan pribadi menonjol. Dalam keadaan yang demikian maka penilaian bisa tidak sesuai dengan kondisi objektifnya. Artinya, prosedur atau distribusi yang secara objektif adil dapat dinilai tidak adil karena ada kepentingan pribadi. Penilaian yang didasarkan kepentingan pribadi menggunakan prinsip-prinsip proses berpikir heuristik yang mengandalkan pada informasi yang tersedia. Pada penelitian ini prinsip proses berpikir heuristik ini terbukti kurang efektif digunakan dalam menilai keadilan yang didasarkan pada orientasi nilai-nilai kelompok. Informasi yang tersedia bukan satu-satunya dasar menilai keadilan, nilai-nilai sosial menjadi dasar utama dalam penilaian keadilan.

Kedua, kondisi yang dialami pada waktu penelitian berlangsung cenderung dinilai tidak adil, baik dalam hal prosedur, distribusi, maupun interaksi sosialnya. Ketidakadilan muncul dalam pola relasi sosial yang bersifat horizontal atau pada posisi sosial yang setara dan yang bersifat vertikal. Ketidakadilan secara horizontal, antara lain, ditemukan pada proses pemberian bantuan di antara sesama anggota masyarakat, yang menurut istilah setempat disebut *nyumbang*. Dalam hubungan ini prinsip kesetaraan (ekualitas) justru sering dirasakan sebagai ketidakadilan karena kemampuan untuk melakukannya antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Pola hubungan resiprokal dalam relasi horizontal ini juga dinilai tidak adil karena kesetaraan yang dimaksud berubah sesuai dengan perubahan waktu, sedangkan kemampuan orang untuk melaksanakannya sering

tidak sejalan dengan perubahan itu. Pada relasi sosial vertikal, yaitu pada posisi sosial yang tidak setara, ditemukan ketidakadilan antara pekerja dengan pemilik perusahaan (juragan) dan antara pemilik sawah dengan penguasa yang direpresentasikan oleh PTPN.

Ketiga, ketidakadilan yang berlangsung tersebut secara objektif lebih berat menimpa perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena perempuan dikondisikan secara kultural dan struktural untuk menerima ketidakadilan tersebut sebagai apa adanya atau justru sesuatu yang adil. Dengan demikian, perempuan mengalami ketidakadilan ganda, yaitu secara objektif diperlakukan tidak adil dan secara sosial kultural dikondisikan untuk merasakan ketidakadilan sebagai sesuatu yang adil.

Keempat, penilaian keadilan prosedural sangat ditentukan oleh penilaian keadilan interaksional. Artinya, prosedur dinilai adil manakala ada interaksi yang adil. Khusus pada kelompok laki-laki, anteseden penilaian keadilan prosedural ditambah dengan kesejahteraan dalam arti mereka yang merasa tingkat kesejahteraannya tinggi akan makin kritis terhadap prosedur yang ada. Bagi kelompok perempuan, anteseden penilaian keadilan prosedural yang penting selain penilaian keadilan interaksional adalah harapan. Artinya, perempuan yang memiliki harapan tinggi akan kritis terhadap prosedur yang ada.

Kelima, penilaian keadilan distributif memiliki anteseden yang lebih banyak dibandingkan dengan penilaian keadilan prosedural. Anteseden tersebut meliputi penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan interaksional, harapan, dan kesejahteraan. Pada kelompok laki-laki harapan tidak berperan secara signifikan, sementara pada kelompok perempuan peran kesejahteraan justru yang tidak signifikan.

Dari kesimpulan keempat dan kelima tersebut, satu hal lagi dapat disimpulkan berkaitan dengan posisi perempuan dan laki-laki dalam menilai keadilan. Dalam menilai keadilan laki-laki cenderung dipengaruhi oleh

kesejahteraan, sedangkan perempuan dipengaruhi oleh harapannya. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih beorientasi pada kesejahteraan dalam menilai keadilan. Fakta ini juga menjelaskan kesimpulan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan ganda yang dapat disebut juga deprivasi ganda. Dengan adanya peran harapan terhadap penilaian keadilan (ketidakadilan) pada perempuan berarti mereka mengalami juga deprivasi aspirasional.

Keenam, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok, penilaian keadilan prosedural berperan besar terhadap penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Peran yang besar tersebut juga ditemukan pada kelompok yang tingkat kepuasannya sedang dan rendah, sementara pada kelompok yang tingkat kepuasannya tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif tidak signifikan. Ketika orientasi kepentingan pribadi lebih menonjol, tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian lain.

Ketujuh, kontrol merupakan variabel yang paling rendah perannya terhadap penilaian keadilan prosedural dan distributif. Peran kontrol menjadi signifikan ketika kepuasan tergolong rendah. Pada saat kepuasan rendah, peran kontrol dalam model penilaian keadilan menjadi paling penting dibandingkan dengan ketika kepuasan sedang dan tinggi. Makin rendah tingkat kepuasan makin besar peran kontrol dalam model penilaian keadilan. Dengan menggunakan ketidakpuasan sebagai salah satu indikator dari ketidakpastian, maka ketidakpastian menyebabkan peningkatan kepedulian terhadap keadilan. Kepedulian terhadap keadilan ini berkaitan dengan upaya untuk menempatkan diri

agar lebih berperan dalam prosedur yang berlaku dan dalam mengupayakan agar secara pasti dirinya mendapatkan bagian yang adil dalam suatu sistem distribusi.

Kedelapan, penilaian keadilan prosedural dan distributif bermuara pada kepuasan. Secara umum efek penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan peran penilaian keadilan prosedural, tetapi bagi laki-laki justru sebaliknya. Pada kelompok laki-laki, prosedur yang adil akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang adil. Bagi kelompok perempuan, hanya penilaian keadilan distributif yang memiliki efek signifikan terhadap kepuasan.

B. Rekomendasi

Seperti penelitian-penelitian pada umumnya, penelitian ini dilakukan pada lingkup yang terbatas. Dengan melihat pada konteks permasalahan dan dinamika yang ada di wilayah penelitian dan membandingkannya dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, ada beberapa temuan penelitian ini yang dapat digeneralisasi, di antaranya adalah temuan model penilaian keadilan yang didominasi oleh orientasi relasional sebagai model yang dominan dan permasalahan gender sebagai masalah keadilan. Berdasarkan temuan-temuan itu, ada beberapa hal yang dapat disarankan seperti diuraikan di bawah ini.

1. Saran Umum

Pada saat ini ketidakadilan semakin tampak. Banyak indikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat ini seperti yang dipaparkan pada bagian awal, sementara hukum formal yang ada dinilai tidak dapat dijadikan pegangan untuk mencari keadilan. Dalam penanganan masalah sosial, juga banyak ditemukan ketidakadilan. Semua itu mencerminkan bahwa keadilan sebagai salah satu landasan kehidupan bersama tidak dibangun seperti yang semestinya.

Perubahan ke arah kehidupan yang lebih adil harus ada. Namun, ada kebingungan akan cara yang dapat ditempuh. Salah satu ide untuk ini adalah keadilan transisional (*transitional justice*). Sayangnya, bagi sebagian orang ide ini diinterpretasikan sebagai *menggunakan kesempatan dalam kesempitan*. Hal ini terjadi karena orientasinya adalah kepentingan pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa model keadilan yang cocok adalah model yang berorientasi relasional yang justru bertolak belakang dengan model kepentingan pribadi. Idealnya adalah model keadilan *saturated* dapat diterapkan. Dalam model *saturated* ini berbagai unsur dalam upaya penegakan keadilan diposisikan secara signifikan. Di antaranya adalah kontrol yang dalam penelitian ini belum signifikan perannya. Dengan temuan ini, transisi keadilan ini dapat dirumuskan berdasarkan model keadilan yang didominasi oleh orientasi relasional. Caranya adalah dengan membangun relasi sosial yang adil sebagai prioritas, tanpa mengabaikan kesejahteraan dan aspirasi masyarakat.

Hal ini tidak berarti bahwa hukum formal yang didasarkan pada ketetapan, undang-undang, keputusan pemerintah, dan lainnya diabaikan. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa ada kemacetan dalam proses penegakan keadilan. Penyelesaian persoalan keadilan ini dapat dilalui dengan menempatkan aspek-aspek relasional yang terdiri dari kepercayaan, penghargaan, dan netralitas sebagai prioritas. Artinya, ketiga hal ini perlu dibangun terlebih dulu.

Ketidakadilan banyak menimpa perempuan seperti halnya temuan penelitian ini. Ada anggapan yang cukup kuat bahwa perempuan tidak mempermasalahkan ketidakadilan yang menimpa mereka sehingga tidak perlu ada upaya perubahan perlakuan terhadap mereka. Menurut hasil penelitian, anggapan tersebut terbukti keliru. Aspirasi mereka berpengaruh terhadap penilaian keadilan. Artinya, mereka peduli dengan ketidakadilan yang menimpanya. Dengan dasar ini direkomendasikan juga kepada siapa pun untuk tidak beranggapan bahwa perlakuan terhadap perempuan sudah adil. Untuk mewujudkan kehidupan yang

adil, perlakuan terhadap perempuan harus lebih adil. Salah satu caranya, sesuai dengan hasil penelitian, adalah dengan mendengarkan aspirasi atau harapan mereka. Secara umum aspirasi ini telah banyak dikemukakan oleh berbagai elemen dari gerakan perempuan dan cukup banyak di antaranya berupa usulan yang dapat langsung dioperasionalisasikan. Dengan mempraktikkannya secara terus-menerus dan progresif maka ketidakadilan terhadap perempuan akan bisa berkurang dan harapan akan kehidupan yang lebih adil dapat terwujud.

2. Rekomendasi bagi Pemegang Otoritas

Untuk membangun kepercayaan dan penghargaan di antara elemen-elemen penyelenggara negara, pemegang otoritas perlu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Banyak indikasi yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan kepercayaan dan penghargaan seperti yang tertuang dalam konsep tentang nilai-nilai kelompok, tiga di antaranya dikemukakan di sini. Pertama, pemerintah harus menunjukkan kemampuannya dalam membangun dan menjaga identitas bersama. Meskipun beberapa ahli, di antaranya Anderson (2001), masih mempertanyakan identitas bangsa ini, Indonesia sebagai negara bangsa harus dipertahankan. Apabila pemerintah yang berkuasa gagal mempertahankan integrasi bangsa dan negara ini, kepercayaan dan penghargaan akan menyusut atau hilang. Kedua, pemegang otoritas, baik sebagai lembaga maupun sebagai individu, tidak melanggar *civic order* dalam arti melanggar aturan, menodai kehormatan, dan menyalahgunakan wewenang. Dituntut adanya pemerintahan yang bersih. Ketiga, kinerja pemerintah tidak cukup berarti bila tidak ada keberhasilan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat seperti yang tercermin dalam indikator sosial dan ekonomi yang meningkat. Oleh karena itu, kepercayaan dan penghargaan akan tumbuh bila penguasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga hal di atas merupakan bagian penting dalam membangun nilai-nilai bersama (kelompok), tetapi belum cukup tanpa ada perhatian terhadap posisi pemegang otoritas dalam menangani berbagai masalah. Sebagai satu bagian dari negara, pemegang otoritas tidak diharapkan untuk berpihak pada suatu kelompok tertentu. Keadilan tidak dapat dibangun bila masih ada keberpihakan dari pemegang kekuasaan terhadap suatu kelompok tertentu. Netralitas adalah bagian penting dari keadilan. Untuk menegakkan keadilan, pemegang kekuasaan harus selalu bersikap netral.

Upaya-upaya di atas sebagian besar berorientasi pada pemeliharaan citra penguasa. Di samping itu, harus ada upaya langsung yang menyangkut penegakan keadilan. Untuk tujuan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menciptakan sistem hukum yang benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip yang dimaksudkan terdiri dari enam aturan dasar, yaitu: etis, representatif, akurat, konsisten, minimal dari bias, dan dapat memperbaiki (korektif). Sejauh ini, sistem hukum yang ada sering tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Undang-undang yang satu dengan yang lain ada unsur pertentangan, peraturan pada tingkat pusat dan daerah tidak konsisten, pada tataran pelaksanaan peraturan terjadi berbagai bias dan terjadi pelanggaran etika. Hal ini semua menyebabkan masalah psikologis, khususnya dalam penilaian keadilan seperti yang dikenal dengan disonansi kognitif. Dalam bahasa awam, keadaan seperti itu menyinggung rasa keadilan, yang sumbernya tidak hanya peraturan, tetapi moral dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Reformasi hukum sebagai kunci perbaikan kehidupan harus terus berlanjut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian keadilan prosedural dan distributif pada dasarnya cukup objektif, tetapi tidak tertutup kemungkinan penilaian keadilan tersebut bias. Ada dua kemungkinan terjadinya bias yang dimaksud yaitu kepentingan pribadi dan pengondisian. Dua hal ini merupakan masalah psikologis yang sering dijadikan instrumen untuk merusak prinsip

keadilan. Oleh karena itu, kepentingan pribadi yang dikondisikan bukan merupakan cara yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan menegakkan keadilan. Sebaliknya, nilai-nilai kelompok (kebersamaan) harus menjadi dasar penanaman nilai-nilai keadilan dan menegakkan keadilan. Sejauh ini salah satu prosesnya adalah melalui pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu media pengondisian nilai-nilai keadilan akan berhasil bila bebas dari upaya menonjolkan kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Pada masa lalu pendidikan sering menjadi media untuk mengondisikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karenanya, tidak mengherankan bila pada saat ini sulit untuk mencari orang atau kelompok yang berorientasi keadilan. Pengkondisian keadilan melalui pendidikan dapat dilakukan dalam proses belajar-mengajar yang partisipatif dan interaktif. Dalam proses yang demikian anak didik tidak hanya aktif belajar, tetapi juga dapat berpikir lebih kritis sekaligus belajar menghargai orang lain. Sistem pendidikan yang berorientasi pada keadilan dapat dikembangkan juga dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam proses pendidikan. Dengan demikian, proses pendidikan, khususnya di sekolah, tidak hanya menjadi milik pemerintah atau yayasan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari usaha masyarakat luas seperti orang tua siswa, alumni, komunitas lingkungan sekolah, dan pemerhati pendidikan. Secara operasional, lembaga pendidikan seperti komite sekolah atau dewan pendidikan yang mengadopsi berbagai komponen masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi wacana merupakan wadah yang dapat mengembangkan keadilan dalam pendidikan.

Penilaian ketidakadilan bertambah karena rasa tidak aman dengan situasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini rasa tidak aman yang dimaksud justru berkaitan dengan masalah-masalah sosial psikologis daripada keamanan seperti yang dipahami selama ini (fisik dan material). Indikasinya, antara lain, adalah kesejahteraan dan kepuasan yang rendah. Pada tingkat kesejahteraan dan kepuasan tinggi, peranan keadilan prosedural meningkat dan menjadi lebih

penting daripada keadilan distributif. Sebaliknya, keadilan distributif lebih berperan ketika kesejahteraan dan kepuasan rendah. Untuk keperluan manajemen rasa aman, perbedaan kondisi tersebut perlu diperhatikan. Artinya, pada tahap awal atau ketika rasa aman relatif rendah, maka masalah distribusi menjadi prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur. Ketika rasa aman mulai meningkat, untuk selanjutnya prioritas dapat beralih pada prosedur. Rekomendasi ini juga didasarkan pada salah satu hasil penelitian ini yang menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan bertahan hidup (*survival*) seperti yang dialami oleh sebagian responden dan informan penelitian. Untuk kelompok ini, prioritas dapat difokuskan pada distribusi dan kelak ketika rasa aman meningkat, prioritas dapat dialihkan pada prosedur. Dengan demikian, penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali definisi tentang rasa aman dan cara penanggulangannya. Seperti kajian-kajian lain, peneliti menyarankan untuk tidak hanya memandang keamanan dan rasa aman hanya terkait dengan kriminalitas tetapi juga kesejahteraan, keadilan, dan kepuasan.

3. Rekomendasi bagi Praktisi Hukum

Dengan menggunakan model nilai-nilai kelompok, penilaian keadilan terbukti selaras dengan kondisi objektifnya. Hal ini menunjukkan bahwa subjektivitas tidak dapat diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi dikhotomi antara keduanya dan menelorkan perbedaan perspektif hingga mempertentangkannya. Hal ini dapat terjadi karena model interes pribadi diterapkan. Implementasi praktis dari temuan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi reaksi orang ketika menilai prinsip keadilan. Bila orientasi akan nilai-nilai kebersamaan tinggi, penilaian keadilan lebih mendekati kenyataan dibandingkan dengan ketika interes pribadi menonjol. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penggunaan penilaian keadilan sebagai dasar berbagai kebijakan ketika kondisi menunjukkan nilai-nilai kebersamaan tinggi. Sebaliknya,

penilaian keadilan yang sifatnya subjektif ini tidak direkomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan penting ketika kepentingan pribadi atau golongan menonjol. Rekomendasi ini ditujukan kepada para praktisi hukum ketatanegaraan yang sudah seharusnya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu bahwa model kepentingan pribadi cocok untuk hal-hal tertentu yang menyangkut hak individu. Dalam bidang hukum model kepentingan pribadi ini sejalan dengan hukum perdata yang bertujuan melindungi hak-hak individu. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat. Artinya, model nilai-nilai kelompok sejalan dengan asumsi dasar dan tujuan dalam hukum pidana. Permasalahannya, dalam kenyataan sering terjadi ketidakselarasan dengan tujuan bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana dimana para praktisi, lebih khusus lagi para pembela (pengacara) yang lebih berorientasi pada upaya kemenangan klien daripada menegakkan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok. Dalam proses hukum sesungguhnya peran utama pembela adalah mengupayakan agar keputusan hukum mendekati objektif. Keputusan hukum adalah produk dari penilaian. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian terbukti objektif bila model yang diterapkan adalah nilai-nilai kelompok. Nilai-nilai kelompok menjadi dasar dari hukum pidana. Oleh karena itu, orientasi kepentingan pribadi seharusnya tidak diterapkan di sini. Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar para pembela (pengacara) dalam kasus-kasus hukum pidana selalu berpegang pada asumsi yang sudah menjadi kesepakatan di antara ahli hukum itu.

Hasil akhir dari suatu proses peradilan dalam bentuk putusan perkara seperti menang-kalah, bebas-dihukum, besar-kecil dan lamanya hukuman, sering lebih disorot daripada prosesnya itu sendiri. Ini bisa dipahami karena keadilan distributif dipandang lebih substantif sehingga keadilan distributif sering disebut juga sebagai keadilan substantif. Di samping itu, proses-proses yang terjadi di

dalam pengadilan sering tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang diketahui lebih mudah dinilai keadilannya dibanding distribusi. Implikasinya, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang prosedur hukum ini perlu mendapatkan porsi yang besar. Di samping itu, masyarakat seharusnya paham dengan hukum-hukum yang berlaku beserta dengan prosedurnya. Dengan demikian, dalam rangka menegakkan keadilan praktisi hukum perlu lebih aktif lagi meningkatkan pengetahuan tentang hukum pada masyarakat.

Pentingnya peran keadilan prosedural terhadap keadilan distributif juga terbukti dalam penelitian ini. Artinya, dalam suatu proses hukum prosedur yang adil akan menghasilkan distribusi yang adil. Salah satu kriteria dari prosedur yang adil adalah terbuka. Di sini peran kontrol berfungsi. Keputusan hukum selalu terbuka untuk diuji. Bentuk-bentuk kontrol yang dimaksud ada dua, yaitu kontrol melalui tahapan-tahapan proses hukum dan kontrol di dalam suatu proses hukum. Maksudnya, naik banding, kasasi, peninjauan kembali, dan *judicial review* adalah kontrol dalam proses hukum secara bertahap. Kontrol yang dilakukan melalui proses-proses tersebut meliputi kontrol informasi (*voice*) dan kontrol keputusan. Artinya setiap informasi yang dijadikan sebagai landasan keputusan ditinjau kembali pada tahap peradilan yang lebih tinggi, demikian juga halnya dengan keputusan yang diambil. Kontrol di dalam proses peradilan tampak ketika masing-masing pihak yang berperkara dimintai dan memberi keterangan. Di sini yang terjadi sebatas pada kontrol informasi sedangkan kontrol keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim yang dipercaya sebagai pihak netral dan atau berkarakter independen. Dengan demikian hasil-hasil penelitian ini selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Implikasinya, proses-proses hukum yang ada perlu lebih cepat diketahui masyarakat sehingga rasa keadilan tumbuh dengan cepat pula, tidak seperti yang sekarang dimana rasa ketidakadilan lebih menonjol (*Kompas*,

24 Oktober 2001). Pada sisi lain, harapan masyarakat terhadap hukum akan lebih realistis.

4. Rekomendasi bagi Masyarakat dan Penguasa Lokal

Sesuai dengan hasil penelitian ini, baik dalam relasi sosial yang vertikal maupun horizontal, keadilan distributif, prosedural, dan interaksional menjadi faktor penentu bagi terwujudnya kondisi sosial psikologis yang ideal. Oleh karena itu, ketiganya harus menjadi dasar dalam relasi sosial. Secara kongkret, berkaitan dengan konteks wilayah penelitian ini yaitu di wilayah Wedi, dapat dikemukakan beberapa saran di bawah ini.

Dalam relasi sosial horizontal keadilan interaksional dan keadilan distributif tampak menonjol. Untuk mencapai tingkat kehidupan sosial yang serasi, pertimbangan yang berkaitan dengan kedua keadilan tersebut terintegrasikan dengan baik. Pola distribusi yang ekuwal dapat diterapkan pada masyarakat yang secara sosial ekonomis homogen. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti penduduk usia lanjut, orang cacat, dan orang miskin yang justru perlu diberi perlakuan, melalui distribusi, sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip ini telah berjalan dalam berbagai bentuk bantuan dan terbukti bermanfaat. Dalam proses pertukaran sosial, pertimbangan ini kurang diperhatikan. Dengan prinsip ekuwalitas, pertukaran akan menjadi berat bagi kelompok miskin karena mereka tidak dapat masuk proses pertukaran tersebut akibat keterbatasan alat tukar yang dimilikinya. Oleh karena itu, prinsip distribusi sesuai dengan kebutuhan dan prinsip pertukaran sesuai dengan kemampuan lebih tepat dikenakan bagi mereka. Secara relasional upaya ini didasarkan pada prinsip penghargaan. Akan lebih lengkap lagi bila dilandasi oleh netralitas sehingga dalam identifikasi kelompok yang membutuhkan maupun menghitung kebutuhan tidak terjadi bias dan pemihakan. Di samping itu, harus ada juga landasan kepercayaan bahwa pihak-

pihak yang terlibat dapat dipercaya. Para pemimpin formal dan nonformal setempat diharapkan dapat memprakarsai pelaksanaan atas ide-ide ini.

Dalam relasi sosial vertikal, seperti dalam hubungan petani dengan PTPN X dan antara buruh dengan pemilik perusahaan konveksi, keadilan prosedural meningkat perannya di samping dua keadilan yang sudah disebutkan. Buruh dan petani telah diperlakukan dengan penghargaan yang tidak memadai. Mereka seharusnya boleh mengekspresikan keinginan mereka yang merupakan bagian dari haknya. Dalam kurun waktu yang lama mereka adalah orang yang tidak diberi kesempatan untuk itu. Akibatnya, mereka tidak mudah melakukannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak perlu diberi kesempatan itu. Justru dalam rangka memberikan penghargaan pada mereka sehingga mereka akhirnya akan mendapatkan distribusi yang adil, perlu ada upaya agar mereka dapat melakukannya. Upaya untuk ini sudah mulai dilakukan, kelanjutan dan intensitasnya perlu diperhatikan.

Dari model keadilan yang dikaji ternyata yang paling menonjol adalah peran penilaian keadilan interaksional. Esensi dari keadilan yang bersumber pada nilai-nilai kelompok ini adalah kesejajaran dalam relasi sosial. Konsekuensinya, tuntutan akan relasi sosial yang dikembangkan sekarang dan pada masa-masa mendatang menekankan pada kesejajaran posisi di antara pihak-pihak yang terlibat. Implikasi dari tuntutan ini tidak hanya posisi yang lebih seimbang dan sejajar tersebut, tetapi juga makin kecilnya jarak sosial di antara mereka. Oleh karena itu, pandangan bahwa buruh atau petani merupakan kelompok marginal, misalnya, tidak dapat menyelesaikan masalah sosial yang sering muncul. Penghargaan terhadap mereka dalam bentuk kebijakan yang menyangkut posisi mereka harus lebih mengunggulkannya dibandingkan dengan keadaannya yang sekarang. Kebijakan yang menyangkut distribusi seperti upah buruh, harga sewa lahan, dan harga gabah milik petani masih belum memadai. Persoalan ini tidak akan pernah selesai selama dalam relasi sosial yang melibatkan mereka tidak

dirancang untuk menempatkannya pada posisi yang sejajar dan dengan jarak yang dekat.

5. Rekomendasi bagi Peneliti Lain

Secara metodologis penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Cara ini kurang ekonomis, tetapi pada sisi lain menunjukkan sofistikasi yang tinggi. Salah satunya adalah keberhasilan melakukan kontekstualisasi terhadap dinamika psikologis dalam penilaian keadilan yang pada akhirnya dapat diperoleh respesifikasi atas teori heuristik penilaian keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini juga merekomendasikan pada peneliti lain untuk benar-benar menemukan kaitan antara konteks sosial dengan substansi penelitian dengan jalan menerapkan metode yang bervariasi, demikian juga dalam analisisnya.

Berdasarkan pada teori-teori yang ada, satu variabel belum diuji efeknya terhadap penilaian keadilan distributif, yaitu karakteristik psikologis penilai. Penelitian-penelitian tentang ini sudah cukup banyak dilakukan di luar negeri, tetapi sepengetahuan peneliti belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, studi keterkaitan antara penilaian keadilan dengan karakteristik psikologis perlu dilakukan untuk memperkaya kajian keadilan dari sudut pandang psikologi.

Penelitian penilaian keadilan ini dilakukan dalam komunitas di wilayah pedesaan dengan permasalahan yang khas. Meskipun dalam konteks hubungan masyarakat dengan penguasa penelitian ini dapat digeneralisasi lebih jauh, penelitian ini perlu didukung oleh penelitian lain agar generalisasi lebih meyakinkan. Untuk itu, penelitian serupa perlu dilakukan dalam konteks yang lain seperti dalam hubungan kerja, manajerial, dan legal. Dalam rangka membangun keadilan, penelitian-penelitian dengan tema serupa ini dapat dilakukan di berbagai bidang lain.

Secara metodologis analisis data survai yang dilakukan dalam penelitian menempatkan semua variabel sebagai variabel *observed*. Pada kenyataannya hampir semua variabel psikologis adalah variabel laten. Meskipun pengukuran dalam penelitian ini telah diuji validitas dan dilakukan seleksi item skalanya, dalam analisis data hal itu tidak dipersoalkan lagi. Akibatnya, muncul eror yang angkanya cukup besar. Karena keterbatasan peneliti dan perangkat analisis yang ada, analisis data survai tidak menggunakan variabel laten. Secara teoretis pengujian dalam model persamaan struktural akan optimal bila variabel psikologis berupa variabel laten. Kesempatan melakukan hal ini sangat terbuka untuk dilakukan para peneliti lain dan perlu dilakukan pada masa mendatang.

Seperti disebutkan pada bagian tentang kelemahan penelitian, penelitian skenario memiliki kelemahan dan kurang canggih dibandingkan dengan eksperimen laboratorium. Untuk mengembangkan penelitian penilaian keadilan, eksperimen laboratorium termasuk metode yang paling andal. Teori Heuristik Penilaian Keadilan dan Teori Referensi Kognisi yang berbasis kognitif belum tuntas diteliti. Hal ini merupakan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian laboratorium tentang penilaian keadilan. Apabila hal ini bisa dilakukan, perkembangan penelitian dan upaya untuk memahami teori keadilan dari sudut pandang psikologi akan semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2001). Masalah Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan Nasional. Dalam Faturochman & Dwiyanto, A. (eds.). *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Anderson, B. (2001). *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Kerjasama Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arbuckle, J.L. & Wothke, W. (1999). *Amos 4.0 User's Guide*. Smallwaters Corporation, Chicago.
- Aritonang, S. (1992). Kesejahteraan Buruh Menuntut Demokratisasi dan Profesionalisme. *Prisma*, 21(3), 69-75.
- Badan Pusat Statistik (2000a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1999*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2000b). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (1993.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Klaten (1996). *Kecamatan Wedi dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Ball, G.A., Trevino, L.K. & Sims, H.P. (1994). Just and Unjust Punishment: Influences on Subordinate Performance and Citizenship. *Academy of Management Journal*, 37(2), 299-322.
- Berkowitz, L., Fraser, C., Treasure, F.P. & Cochran, S. (1987). Pay, Equity, Job Gratifications, and Comparisons in Pay Satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 72(4), 544-551.
- Bond, M.H. & Leung, K. (1992). Explaining Choices in Procedural and Distributive Justice Across Cultures. *International Journal of Psychology*, 27, 211-225.
- Brigham, J.C. (1991). *Social Psychology*. HarperCollins Publishers Inc., New York.
- Brockner, J. & Siegel, P. (1996). Understanding the Interaction between Procedural and Distributive Justice: The Role of Trust. In Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (eds.). *Trust in Organization: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Brockner, J. & Wiesenfeld, B.M. (1996). An Integrative Framework for Explaining Reactions to Decisions: Interactive Effects of Outcome and Procedures. *Psychological Bulletin*, 120(2), 189-208.

- Brockner, J., Konovsky, M., Cooper-Schneider, R., Folger, R., Martin, C. & Bies, R.J. (1994). Interactive Effects of Procedural Justice and Outcome Negativity on Victims and Survivors of Job Loss. *Academy of Management Journal*, 37(2), 397-409.
- Burgoyne, C., Swift, A. & Marshall, G. (1993). Inconsistency in Beliefs about Distributive Justice: A Cautionary Note. *Journal for Theory of Social Behaviour*, 23(4), 327-342, Desember.
- Cameron, L.A. (2001). The Impact of The Indonesian Financial Crisis on Children: An Analysis Using the 100 Villages Data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 43-64.
- Chen, C.C. (1995). New Trends in Rewards Allocation Preferences: A Sino-U.S. Comparison. *Academy of Management Journal*, 38(2), 408-428, April.
- Cialdini, R. (1994). *Influence: Science and Practice*. HarperCollins College Publisher, New York.
- Clayton, S. & Opatow, S. (1994). Green Justice: Conception of Fairness and the Natural World. *Journal of Social Issues*, 50(3), 1-12.
- Colquitt, J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(3), 386-400.
- Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H. & Yee Ng, K. (2001). Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(3), 425-445.
- Corning, A.F. (2000). Assessing Perceived Social Inequity: A Relative Deprivation Framework. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(3), 463-477.
- Crosby, F. (1982). *Relative Deprivation and Working Woman*. Oxford University Press, New York.
- Crosby, F. & Gonzales-Intal, A.M. (1984). Relative Deprivation and Equity Theory: Felt Injustice and Undeserved Benefits of Others. In Folger, R. (ed.). *The Sense of Injustice: Social Psychological Perspectives*. Plenum, New York.
- Cross, S.E. & Markus, H.R. (1993). Gender in Thought, Belief, and Action: A Cognitive Approach. In Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (eds.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- Daly, J.P. & Geyer, P.D. (1994). The Role of Fairness in Implementing Large-Scale Change: Employ Evaluations of Process and Outcome in Seven Facility Relocations. *Journal of Organizational Behavior*, 15(7), 623-638.
- Daniels, N. (1985). *Just Health Care*. Cambridge University Press, Sydney.

- Darwin, M. (1998). Tinjauan Politik Birokrasi di Tengah Krisis Nasional. Makalah disampaikan pada Seminar Krisis Nasional dan Perubahan Sosial, HIPIIS Cabang Yogyakarta, 29 Oktober, Gedung Pertemuan UGM.
- De Dreu, C.K.W., Giebels, E. & Van de Vliert, E. 1998. Social Motives and Trust in Integrative Negotiation: The Disruptive Effects of Punitive Capability. *Journal of Applied Psychology*, 83(3), 408-422.
- De Jong, G.F. & Fawcett, J.T. (1981). Motivation for Migration: an Assesment and a Value-Expectancy Research Model. In De Jong, G.F. & Gardner, R.W. (eds.) *Migration Decision Making Process: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries*. Pergamon Press, New York.
- Desmarais, S. & Curtis, J. (1997). Gender and Perceived Pay Entitlement: Testing of Effects of Experience with Income. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72, 141-150.
- Deutsch, M. (1975). Equity, Equality, and Need: What Determines Which Values Will be Used as the Basis of Distributive Justice? *Journal of Social Issues*, 31, 137-150.
- Devasia, L. & Devasia, V.V. (1990). *Women in India: Equity, Social Justice and Development*. Indian Social Institute, New Delhi.
- Dhanani, S. & Islam, I. (2001). Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: A Comment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37, 113-115.
- Dick, H. (2001). Survey of the Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 7-41.
- Diekmann, K.A., Samuels, S.M., Ross, L. & Bazerman, M.H. (1997). Self Interest and Fairness in Problems of Resource Allocation: Allocators Versus Recipients. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(5), 1061-1074.
- Dirks, K.T. (1999). The Effect of Interpersonal Trust on Work Group Performance. *Journal of Applied Psychology*, 84(3), 445-455.
- Donovan, M.A., Drasgow, F. & Munson, L.J. (1998). The Perception of Fair Interpersonal Treatment Scale: Development and Validation of a Measure of Interpersonal Treatment in the Workplace. *Journal of Applied Psychology*, 83(5), 683-692.
- Effendi, S. (1986). Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru. *Prisma*, 15(12), 13-21.
- Effendi, T.N. (1998). Krisis Nasional, Keadaan dan Arah Reformasi Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia. Makalah disampaikan pada Seminar Krisis Nasional dan Perubahan Sosial, HIPIIS Cabang Yogyakarta, 29 Oktober, Gedung Pertemuan UGM.

- Eiser, J.R. (1996). Social Judgment. In Manstead, A.S.R. & Hewstone, M. (eds.). *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*. Blackwell Publisher Ltd., Oxford.
- Ekeh, P.P. (1974). *Social Exchange Theory: The Two Traditions*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Elkins, T.J. & Philips, J.S. (2000). Job Context, Selection Decision Outcome, and Perceived Fairness of Selection Tests: Biodata as an Illustrative Case. *Journal of Applied Psychology*, 85(3), 479-484.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faturochman (1995). Penilaian dan Evaluasi terhadap Pembagian Upah. *Jurnal Psikologi*, 22(2), 36-48.
- Faturochman (1997). Decision to Give at Individual and Group Level. A paper presented at Workshop on Social Security and Social Policy in Java. Gadjah Mada University, Nijmegen University, and Amsterdam University. Yogyakarta, August 5-7.
- Faturochman (1998a). Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. *Jurnal Psikologi*, 25(2), 1-15.
- Faturochman. (1998b). Bertahan Hidup di Masa Krisis. Makalah seminar Social Security and Social Policy, Yogyakarta, 28-29 Desember, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Faturochman. (1999a). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, 7(1), 13-27.
- Faturochman (1999b). Krisis dan Nasib Buruh di Perdesaan. *Populasi*, 10(1), 27-42.
- Faturochman. (2000). Dinamika Psikologis dan Sosial Kepercayaan. Dalam Supratiknya, Faturochman, & Haryanto, S. (eds.). *Tantangan Psikologi Menghadapi Milenium Baru: Refleksi atas Peran dan Pendidikan Psikologi di Indonesia*. Yayasan Pembina Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Fauzi, N. (ed.) (1997). *Tanah dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Insist Press, Yogyakarta.
- Feather, N.T. (1990). Reactions to Equal Reward Allocations: Effects of Situation, Gender, and Values. *British Journal of Social Psychology*, 29, 315-329.
- Feather, N.T. (1992). An Attributional and Value Analysis of Deservingness in Success and Failure Situations. *British Journal of Social Psychology*, 31, 125-145.

- Feather, N.T. (1994). Human Values and Their Relation to Justice. *Journal of Social Issues*, 50(4), 129-151.
- Feather, N.T. (1996). Reactions to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism, Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness, and Deservingness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 571-587.
- Feist, G.J., Bodner, T.E., Jacobs, J.F., Miles, M. & Tan, V. (1995). Integrating Top-Down and Bottom-Up Structural Models of Subjective Well-Being: A Longitudinal Investigation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(1), 138-150.
- Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. *Human Relations*, 7, 117-140.
- Festinger, L. (1969). Cognitive Dissonance. *Scientific American: Science, Conflict, and Society*. W.H. Freeman & Co., San Fransisco.
- Fiske, S.T. & Taylor, S.E. (1991). *Social Cognition*. Second edition. McGraw-Hill, Inc., New York.
- Folger, R. (1987). Reformulating the Precondition of Resentment: A Referent Cognition Model. In Master, J.C. & Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical and Policy Perspectives*. Erlbaum, Hillsdale, N.J..
- Folger, R., Rosenfield, D. & Robinson, T. (1983). Relative Deprivation and Procedural Justifications. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45, 268-273.
- Garonzik, R., Brockner, J. Siegel, P.A. (2000). Identifying International Assignees at Risk for Premature Departure: The Interactive Effect of Outcome Favorability and Procedural Fairness. *Journal of Applied Psychology*, 85(1), 13-20.
- Geis, F.L. (1994). Self-Fulfilling Prophecies: A Social Psychological View of Gender. In Beall, A.E. & Sternberg. R.J. (eds.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- George, V. & Wilding, P. (1992). *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Gilliland, S.W. (1994). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to a Selection System. *Journal of Applied Psychology*, 79(5), 691-701.
- Gonzalez-Intal, A.M. (1990). Relative Deprivation Theory and Collective Political Violence in the Philippines. *Philippine Journal of Psychology*, 24, 22-38.
- Gorr, M. (1995). Justice, Self Ownership, and Natural Assets. *Social Philosophy & Policy*, 12(2), 267-291.

- Greenberg, J. (1987). Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Ends Justify the Means? *Journal of Applied Psychology*, 72(1), 55-61.
- Greenberg, J. (1990). Employee Theft as a Reaction to Underpayment Inequity: The Hidden Cost of Pay Cuts. *Journal of Applied Psychology*, 75(5), 561-568.
- Greenberg, J. (1996). *The Quest for Justice*. Sage, London.
- Guimond, S. & Dube-Simard, L. (1983). Relative Deprivation Theory and the Quebec Nationalist Movement: The Cognition-Emotion Distinction and Personal-Group Deprivation Issue. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(3), 526-535.
- Hagerty, M.R. (2000). Social Comparisons of Income in One's Community: Evidence from National Surveys of Income and Happiness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 764-771.
- Hamel, J., Dufour, S. & Fortin, D. (1993). *Case Study Methods*. Sage Publications, New Delhi.
- Harmon-Jones, E., Brehm, J.W., Greenberg, J., Simon, L. & Nelson, D.E. (1996). Evidence that the Production of Aversive Consequences is not Necessary to Create Cognitive Dissonance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 5-16.
- Hogg, M.A. & Abrams, D. (1988). *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. Routledge, London.
- Jackson, L.A., Gardner, P.D. & Sullivan, L.A. (1992). Explaining Gender Differences in Self-Pay Expectations: Social Comparison Standards and Perceptions of Fair Pay. *Journal of Applied Psychology*, 77(5), 651-663.
- Johnson, J.D., Whitestone, E., Jackson, L.A., Gatto, L. (1995). Justice is Still not Colorblind: Differential Racial Effects of Exposure to Inadmissible Evidence. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 21, 893-898.
- Joreskog, K.G. (1993). Testing Structural Equation Models. In Bollen, K.A. & Long, L.S. (eds.). *Testing Structural Equation Models*. Sage Publications, London.
- Joreskog, K.G. & Sorbom, D. (1989). *Lisrel 7 User's Reference Guide*. Scientific Software, Inc. Mooresville, In.
- Keraf, A.S. (1995). Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah. *Prisma*, 24(9), 3-19.
- Keraf, A.S. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Kanisius, Yogyakarta.
- Kompas (2000). Mengkaji *Corporate Farming* dengan Kepala Dingin. 14 Agustus, halaman 39.

- Kompas (2000). Wacana yang Perlu Dikaji Secara Komprehensif dan Jujur. 14 Agustus, halaman 40.
- Kompas (2000). Nasib Petani Tembakau BNO Tidak Seharum Asap Cerutu. 11 September, halaman 34.
- Kompas (2000). Jika Mutu Terjamin Pasar Tembakau BNO Masih Terbuka. 11 September, halaman 44.
- Kompas (2001). Jangan Biarkan Petani "Mogok". 19 Januari, halaman 15.
- Kompas (2001). Kartu Kuning Bagi Petinggi Negeri. 27 Maret, halaman 36.
- Kompas (2001). Sampit dan Palangkaraya, Sebulan Setelah Kerusuhan. 30 Maret, halaman 28.
- Kompas (2001). Jejak Pendapat Kompas: Saatnya Memenuhi Keinginan Rakyat. 30 April, halaman 8.
- Kompas (2001). Keadilan Belum Terjamah. 24 Oktober, halaman 8.
- Komter, A.E. (1996). *The Gift: An Interdisciplinary Perspective*. Amsterdam University Press, Amsterdam.
- Korabik, K. (1997). Applied Gender Issues. In Sadava, S.W. & McCreary, D.R. (eds.). *Applied Social Psychology*. Prentice-Hall, Inc., London.
- Korsgaard, M.A., Robertson, L. & Rymph, R.D. (1998). What Motivates Fairness? The Role of Subordinate Assertive Behavior on Managers' Interactional Fairness. *Journal of Applied Psychology*, 83(5), 731-744.
- Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (eds.) (1996). *Trust in Organization: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Lalonde, R.N. & Silverman, R.A. (1994). Behavioral Preferences in Response to Social Injustice: The Effects of Group Permeability and Social Identity Salience. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66(1), 78-85.
- Leung, K. & Kabanoff, B. (1995). Negotiation in Reward Allocations Across Cultures. A draft to be appear in Early, P.C. & Erez, M. (eds.) *New Perspectives on International Industrial/Organizational Psychology*. Josey-Bass, San Fransisco.
- Leung, K., Chiu, W-H., & Au, Y-F. (1993). Symphaty and Support for Industrial Actions: A Justice Analysis. *Journal of Applied Psychology*, 78(5); 781-787.
- Lewicki, R.J. & Bunker, B.B. (1996). Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. In Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (eds.). *Trust in Organization: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Lind, E. A. (1995). Social Conflict and Social Justice: Lessons from the Social Psychology of Justice Judgment. Inaugural Oration, Leiden University, Leiden.

- Lind E. A., Kulik, C.T., Ambrose, M. & De Vera Park, M.V. (1993). Individual and Corporate Dispute Resolution: Using Procedural Fairness as a Decision Heuristic. *Administrative Science Quarterly*, 38(2), 224-251.
- Lind, E. A. & Early, P.C. (1992). Procedural Justice and Culture. *International Journal of Psychology*, 27, 227-242.
- Lind, E. A. & Tyler, T.R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. Plenum Press, New York.
- Lomasky, L.E. (1995). Justice to Charity. *Social Philosophy & Policy*, 12(2), 32-53.
- Long, S. (1994). Covariance Structure Models: An Introduction to Lisrel. In Lewis-Beck, M.S. (ed.). *Factor Analysis and Related Techniques*. Sage Publications, London.
- Madenar. (1999). Melongok ke Belakang Menatap Masa Depan: Pengalaman Petani Tembakau Vorstenland dalam Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan Tembakau. Makalah dipresentasikan dalam *Stakeholders Workshop: Pemberdayaan Kelompok Petani dan Buruh Tani di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional*. Pusat Studi Asia Pasifik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Mei.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manning, C. (2001). Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: A Reply. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37, 117-118.
- Mardapi, D. (2000). Pengujian Hipotesis Nihil: Uji Signifikansi dan Interval Kepercayaan. *Buletin Psikologi*, 7 (2), 7-16.
- Mark, M.M. & Folger, R. (1984). Responses to Relative Deprivation: A Conceptual Framework. *Review of Personality and Social Psychology*, 5, 192-218.
- Margono, S.A. (1998). Mekanisme *Survival Strategy*: Studi Tentang Respons Petani Tembakau dalam Birokrasi Perkebunan di Kalitengah. Makalah Dipresentasikan pada Seminar *Social Security and Social Policy*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 28-29 Desember.
- Martin, S.E. & Jurik, N.C. (1996). *Doing Justice Doing Gender*. Sage Publications, London.
- Master, J.C. & Keil, L.J. (1987). Generic Comparison Processes in Human Judgment and Behavior. In Master, J.C. & Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Policy Perspectives*. Lawrence Erlbaum, London.

- Master, J.C. & Smith, W.P. (1987). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Policy Perspectives*. Lawrence Erlbaum, London.
- Masterson, S.S. (2001). A Trickle-Down Model of Organizational Justice: Relating Employees' and Customers' Perceptions of and Reactions to Fairness. *Journal of Applied Psychology*, 86(4), 594-604.
- Mas'udi, M.F. (1991). *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. P3M, Jakarta.
- Meyerson, D., Weick, .E. & Kramer, R.M. (1996). Swift Trust and Temporary Groups. In Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (eds.). *Trust in Organization: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Miceli, M.P., Jung, I., Near, J.P. & Greenberg, D.B. (1991). Predictors and Outcomes of Reactions to Pay-for-Performance Plans. *Journal of Applied Psychology*, 76(4), 508-521.
- Mishra, A.K. (1996). Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust. In Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (eds.). *Trust in Organization: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Minton, J.W., Lewicki, R.J. & Sheppard, B.H. (1994). Unjust Dismissal in the Context of Organizational Justice. *The Annals of The American Academy of Political and Social Sciences*, 536, 135-148.
- Moorman, R. (1991). Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citzenships? *Journal of Applied Psychology*, 76(6), 845-855.
- Mubyarto (1999). *Reformasi Politik Ekonomi*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Mummendey, A., Kessler, T., Klink, A. & Mielke, R. (1999). Strategies to Cope with Negative Social Identity: Predictions by Social Identity Theory and Relative Deprivation Theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(2), 229-245.
- Murphy-Berman, V., Berman, J., Singh, P., Pachauri, A. & Kumar, P. (1984). Factors Affecting Allocation to Needy and Meritorious Recipients: A Cross-Cultural Comparison. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46, 1267-1272.
- Murray, S.L., Holmes, J.G., MacDonald, G. & Ellsworth, P.C. (1998). Through the Looking Glass Darkly? When Self-Doubts Turn Into Relationship Insecurities. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(6), 1459-1480.
- Ohoitumur, Y. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Padmo, S. (1994). *The Cultivation of Vorstenland Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Peasant Economy and Society: 1860-1960*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Padmo, S. (1998). *Wedi Revisited*. Makalah Dipresentasikan pada Seminar *Social Security and Social Policy*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 28-29 Desember.
- Pangkahila, W. (2001). Bangsa yang Suka Kekerasan. *Kompas*, 19 Januari, halaman 4.
- Petta, G. & Walker, I. (1992). Relative Deprivation and Ethnic Identity. *British Journal of Social Psychology*, 31, 285-293.
- Peterson, R.S. (1994). The Role of Values in Predicting Fairness Judgments and Support of Affirmative Action. *Journal of Social Issues*, 50, 95-115.
- Platow, M.J., O'Connell, A., Shave, R. & Hanning, P. (1995). Social Evaluations of Fair and Unfair Allocators in Interpersonal and Intergroup Situations. *British Journal of Social Psychology*, 34, 363-381.
- Ployhart, R.E. & Ryan, A.M. (1998). Applicants' Reactions to the Fairness of Selection Procedures: The Effects of Positive Rule Violations and Time of Measurement. *Journal of Applied Psychology*, 83, 3-16.
- Pratikno. (1998). Akumulasi Krisis Politik Era Habibie. Makalah disampaikan pada Seminar Krisis Nasional dan Perubahan Sosial, HIPIIS Cabang Yogyakarta, 29 Oktober, Gedung Pertemuan UGM.
- Rahardjo. (1979). *Gotong Royong di Desa Kadilaju dan Desa Jambitan: Suatu Perbandingan*. Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahardjo, M.D. (1994). Ensiklopedia Al Qur'an: Adl. *Ulumul Qur'an*, 3, 38-47.
- Rasinski, K.A. (1987). What's Fair is Fair - Or Is It? Value Differences Underlying Public Views about Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(1), 201-211.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Reis, H.T. (1987). The Nature of the Justice Motive: Some Thoughts on Operation, Internalization, and Justification. In Masters, J.C. dan Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Policy Perspective*. Lawrence Erlbaum, London.
- Rohrbaugh, J., McClelland, G., & Quinn, R. (1980). Measuring the Relative Importance of Utilitarian and Egalitarian Values: A Study of Individual Differences about Fair Distribution. *Journal of Applied Psychology*, 65(1), 34-49.
- Roll, W. (1983). *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta Jateng*. Rajawali, Jakarta.

- Rosenberg, A. (1995). Equality, Sufficiency, and Opportunity in the Just Society. *Social Philosophy & Policy*, 12, 54-71.
- Ryff, C. (1989). Happiness is Everything, or is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081.
- Saris, W. & Stronkhorst, H. (1984). *Causal Modelling in Nonexperimental Research*. Sociometric Research Foundation, Amsterdam.
- Schmidt, V.H. (1991). Adaptive Justice: Local Distributive Justice in Sociological Perspective. Working Paper No. 1/91, Centre for Social Policy Research, University of Bremen, Bremen.
- Schroth, H.A. & Shah P. P. (2000). Procedures: Do We Really Want to Know Them? An Examination of the Effect of Procedural Justice on Self Esteem. *Journal of Applied Psychology*, 85(3), 462-471.
- Shapiro, D.L. & Brett, J.M. (1993). Comparing Three Processes Underlying Judgments of Procedural Justice: A Field Study of Mediation and Arbitration. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(6), 1167-1177.
- Sjahrir (1986). Pelayanan dan Jasa-Jasa Publik: Telaah Ekonomi serta Implikasi Sosial Politik. *Prisma*, 15(12), 3-11.
- Skarlicki, D.P. & Folger, R. (1997). Retaliation in the Workplace: The Roles of Distributive, Procedural, and Interactional Justice. *Journal of Applied Psychology*, 82(3), 434-443.
- Skarlicki, D.P., Ellard, J.H. & Kelln, B.R.C. (1998). Third Party Perception of a Layoff: Procedural, Derogation, and Retributive Aspects of Justice. *Journal of Applied Psychology*, 83(1), 119-127.
- Smith, H.J., Tyler, T.R., Huo, Y.J. Ortiz, D.J. & Lind, E.A. (1997). The Self-Relevant Implication of Group-Value Model: Group Membership, Self-Worth and Procedural Justice. Unpublished Manuscript.
- Soemardjan, S. (2001). Konflik antar Suku di Indonesia. *Kompas*, 22 Maret, halaman 4.
- Staudinger, U.M. (1996). Wisdom and the Social-Interactive Foundation of the Mind. In Baltes, P.B. & Staudinger, U.M. (eds.), *Interactive Minds: Life-Span Perspective on the Social Foundation of Cognition*. Cambridge University Press, New York.
- Staudinger, U.M. & Baltes, P.B. (1996). Interactive Minds: A Facilitative Setting for Wisdom-Related Performance? *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(4), 746-762.
- Stroessner, S.J. & Heuer, L.B. (1996). Cognitive Bias in Procedural Justice: Formation and Implications of Illusory Correlations in Perceived

- Intergroup Fairness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(4), 717-728.
- Subagyo, A. (2001). Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif. *Kompas*, 21 Februari, halaman 4.
- Sugiyanto (2000). Keterbatasan Uji Signifikansi: Ilustrasi pada Analisis Korelasi 2 Variabel. *Buletin Psikologi*, 7(2), 33-50.
- Sulistiyastuti, D.R. & Faturchman (2000). Strategi Bertahan Hidup di Tiga Wilayah. *Populasi*, 11(1), 59-82.
- Sumartana, Th. (1998). Upaya Meninjau Krisis Nasional dari Sisi Ideologi dan Moral. Makalah disampaikan pada Seminar Krisis Nasional dan Perubahan Sosial, HIPIIS Cabang Yogyakarta, 29 Oktober, Gedung Pertemuan UGM.
- Suratiah, K. (1990). *Wanita, Kerja, dan Rumah Tangga: Pengaruh Pembangunan Pertanian terhadap Peran Wanita Pedesaan di DIY*. Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, R. (1993). Demokrasi Ekonomi: Keadilan dan Kerakyatan. Dalam Siahaan, H.M. & Purnomo, T. (eds.). *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Surabaya Post dan Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya.
- Suryabrata, S. (2000). Pengujian Signifikansi Hipotesis Nol dalam penelitian Psikologis. *Buletin Psikologi*, 7(2), 23-32.
- Susilastuti, D.H. & Partini. (1990). *Sistem Borongan Wanita Pekerja di Pedesaan Jawa*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Sztomka, P. (1999). *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In Austin, W.G. & Worchel, S. (eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Brooks/Cole, Monterey, CA.
- Temkin, L.S. (1995). Justice and Equality: Some Question about Scope. *Social Philosophy & Policy*, 12(2), 72-104.
- Thibaut, J. & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Erlbaum, Hillsdale, NJ.
- Thomson, L., Peterson, E. & Brodt, S.E. (1996). Team Negotiation: An Examination of Integrative and Distributive Bargaining. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 66-78.
- Tim Prisma (1994). Laporan Khusus: Pasang Naik Gelombang Pemogokan dan Politik Perburuhan. *Prisma*, 23(4), 48-73.
- Tornblom, K.Y. (1977). Distributive Justice: Typology and Propositions. *Human Relations*, 30, 1-24.

- Turner, J.C. (1991). *Social Influence*. Brook/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.
- Tyler, T.R. (1989). The Psychology of Procedural Justice: A Test of the Group-Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(5), 830-838.
- Tyler, T. R. (1994). Psychological Models of Justice Motive: Antecedents of Distributive and Procedural Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(5), 850-863.
- Van den Bos, K. (1996). *Procedural Justice and Conflict*. Dissertation. Leiden University.
- Van den Bos, K. (1999). What are We Talking about When We Talk about No-Voice Procedures?: On the Psychology of the Fair Outcome Effect. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35(6), 560-577.
- Van den Bos, K. (2001). Uncertainty Management: The Influence of Uncertainty Salience on Reactions to Perceived Procedural Fairness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(6), 931-941.
- Van den Bos, K. Bruins, J., Wilke, H.A.M. & Dronkert, E. (1999). Sometimes Unfair Procedures Have Nice Aspects: On the Psychology of the Fair Process Effect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(2), 324-366.
- Van den Bos, K., Lind, E.A., Vermunt, R. & Wilke, A.M. (1997). How Do I Judge My Outcome When I Do Not Know the Outcome of Others? The Psychology of the Fair Process Effect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(5), 1034-1046.
- Van den Bos, K. & Miedema, J. (2000). Toward Understanding Why Fairness Matters: The Influence of Mortality Salience on Reaction to Procedural Fairness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(3), 355-366.
- Van den Bos, K., Vermunt, R. & Wilke, A.M. (1997a). Procedural and Distributive Justice: What is Fair Depends More on What Comes First Than on What Comes Next. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(1), 95-104.
- Van den Bos, K., Vermunt, R. & Wilke, A.M. (1997b). The Consistency Rule and the Voice Effect: The Influence of Expectations on Procedural Fairness Judgements and Performance. *European Journal of Social Psychology*, 26, 411-428.
- Van den Bos, K., Wilke, A.M. & Lind, E.A. (1998a). When Do We Need Procedural Fairness? The Role of Trust in Authority. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(6), 1449-1458.
- Van den Bos, K., Wilke, A.M., Lind, E.A. & Vermunt, R. (1998b). Evaluating Outcomes by Means of the Fair Process Effect: Evidence for Different

RINGKASAN

KETERKAITAN ANTARA ANTESEDEN, PENILAIAN KEADILAN PROSEDURAL, PENILAIAN KEADILAN DISTRIBUTIF, DAN DAMPAKNYA

1. Permasalahan

Begitu banyak masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang muncul, salah satu penyebab utamanya adalah kurang diperhatikannya keadilan sebagai salah satu dasar pembangunan. Buktinya, kemajuan yang dicapai pada masa Orde Baru tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sektor industri mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara sektor pertanian tumbuh sangat lambat (Dick, 2001). Kemajuan ekonomi di kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan di desa (Wiradi, 2000). Dari sisi wilayah, Jawa mengalami kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Segmentasi kemajuan ini juga terjadi antara kelompok pengusaha besar, menengah, kecil, dan pekerja, bahkan antara laki-laki dan perempuan (Dick, 2001; Cameron, 2001). Karenanya, tidaklah mengherankan bila dalam satu perusahaan ada seseorang yang berpendapatan puluhan bahkan ratusan juta rupiah sebulan, sementara ada sekelompok pekerja yang hanya diberi upah sekitar lima ribu rupiah per hari (Tim Prisma, 1992). Negara yang kaya raya dengan sumber alam ini ternyata telah dikuasai sekelompok kecil orang. Mereka menikmati begitu banyak aset negara dengan memonopoli begitu banyak kegiatan ekonomi. Kesenjangan dan ketidakadilan itu berakar pada praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Kondisi yang demikian ini jelas merapuhkan struktur pembangunan yang telah menyedot begitu banyak sumber daya.

Banyak orang menyadari bahwa permasalahan keadilan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu begitu banyak. Ketika Orde Baru masih berkuasa, secara sistematis ketidakadilan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomis, para pengusaha besar yang jumlahnya sangat sedikit menguasai modal atau aset yang sangat besar sementara ada jutaan rakyat miskin yang tidak memiliki modal secara berarti (Effendi, 1986; Sjahrir, 1986). Para pengusaha menjadi begitu kaya karena pemerintah pada waktu itu memberi fasilitas begitu banyak mulai dari kesempatan untuk monopoli, pengucuran modal yang begitu

besar dengan bunga yang ringan hingga jaminan akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Sebaliknya, penduduk miskin seperti pedagang sektor informal dan petani berlahan sempit kurang mendapat kemudahan atau bahkan tidak ada kemudahan sama sekali (Mubyarto, 1999; Wiradi, 2000). Begitu banyak cerita seperti itu yang mencerminkan ketidakadilan. Di sini tercermin juga bahwa kekuasaan pemerintah yang begitu besar menyebabkan rakyat menderita. Pemegang kekuasaan menjadi sumber ketidakadilan (Van den Bos, 2000; Van den Bos dkk., 1998).

Kini, meskipun upaya perubahan telah dilakukan, berbagai bentuk ketidakadilan masih terus terjadi. Lapisan atas dalam strata sosial, ekonomi, atau politik tetap mementingkan diri mereka sendiri dan hukum rimba berlaku (Dick, 2001). Lapisan bawah dibiarkan berjalan sendiri. Jarak antara kedua lapisan yang hidup dalam satu negara kesatuan dibiarkan begitu saja (Mubyarto, 1999). Upaya untuk menggandeng satu dengan lainnya tidak jelas antara ada dan tidak ada. Idealnya, dalam suatu negara atau masyarakat, tidak terjadi hal seperti itu, tetapi ini kondisi yang sangat sulit dicapai.

Ada faktor lain penyebab itu semua. Bagi sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan sering tidak tahu harus memulai dari mana dan bagaimana caranya. Mereka bergerak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, atau kepentingannya. Hal ini menyebabkan terjadinya euforia yang bila tanpa dilandasi pemikiran cermat dan kritis akan menyebabkan terjadinya anarki. Fenomena ini sudah terjadi dan tampaknya akan terus berlangsung di masa mendatang. Tujuan mewujudkan keadilan, demokrasi, pemerintahan yang bersih, kehidupan sosial yang harmonis, pertumbuhan ekonomi, atau lainnya justru menjadi tidak jelas. Artinya, ada masalah konseptual, yaitu tidak ada atau tidak jelasnya konsep yang dijadikan dasar untuk menetapkan sistem yang akan dianut dan diterapkan. Dari berbagai konsep keadilan yang ada, psikologi sosial berusaha memberikan kontribusi dalam bidang ini.

Dalam psikologi sosial pembahasan dan penelitian tentang keadilan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh reaksi individu berkaitan dengan prinsip yang diterapkan (Greenberg, 1996). Hal ini dibuktikan dengan munculnya teori *distributive justice* dari Homann dan *equity theory* dari Adams serta Walster dan kawan-kawan pada tahun enam puluhan dan awal tujuh puluhan (lihat kajian Colquitt, 2001; Thornblom, 1977). Dalam sosiologi, teori deprivasi relatif bahkan muncul lebih awal, pada akhir tahun empat puluhan, yang pertama kali dicetuskan

oleh Stouffer dan kawan-kawan (lihat kajian Crosby, 1982). Kajian-kajian tersebut berkaitan erat dengan reaksi terhadap sistem distribusi yang diterapkan. Belakangan, muncul kajian dan penelitian yang berkaitan dengan reaksi terhadap prosedur untuk menentukan prinsip keadilan yang diterapkan. Kajian dan penelitian itu terintegrasi dalam upaya menemukan model penilaian keadilan (lihat Lind & Tyler, 1988; Tyler, 1989, 1994).

Secara psikologis reaksi terhadap keadilan akan membawa dampak positif, sedangkan ketidakadilan menimbulkan reaksi psikologis negatif. Ketidakadilan sering didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak. Akibatnya akan timbul rasa seperti tidak senang dan marah. Perkembangan teori deprivasi relatif jelas mengarah pada tindakan destruktif pada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Namun, ketidakadilan tidak hanya sebatas itu. Apabila ada pihak yang tidak mendapatkan haknya, biasanya ada pihak yang diuntungkan. Mereka ini ternyata juga mengalami masalah psikologis. Reaksi yang muncul di antaranya adalah rasa bersalah. Reaksi psikologis akibat ketidakadilan tersebut tidak selamanya muncul dalam bentuk perilaku negatif atau destruktif. Banyak konsep dan model dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang muncul dari penerapan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak penerapan prinsip keadilan, terutama keadilan distributif, merupakan satu bagian penting dalam perkembangan penelitian tentang keadilan (lihat Berkowitz dkk, 1987; Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984; Feather, 1990; Gonzales-Intal, 1990; Greenberg, 1990; Guimond & Dube-Simard, 1983; Mark & Folger, 1984).

Berkembang juga penelitian-penelitian tentang penerapan prinsip distribusi yang dinilai adil. Secara garis besar penelitian tentang penerapan prinsip distribusi yang adil menekankan pada dua hal, yaitu gender dan orientasi kehidupan sosial seseorang. Menurut para peneliti, prinsip distribusi yang sesuai dengan laki-laki tidak selalu sesuai dengan perempuan (lihat Desmarais & Curtis, 1997; Faturochman, 1995; Jackson dkk., 1992; Martin & Jurik, 1996, Witt & Nye, 1992). Sementara itu, orientasi individualistis dan kolektivitas diyakini jelas-jelas berpengaruh terhadap penerapan prinsip distribusi yang dipilih (lihat Chen, 1995; Deutsch, 1975; Feather, 1992, 1994; Leung & Kabanoff, 1995; Murphy-Berman, dkk., 1984; Rohrbaugh dkk., 1980; Tornblom, 1977; Yamagishi, 1984). Selaras dengan penelitian-penelitian itu, banyak juga penelitian yang menganalisis latar belakang dan motivasi seseorang dalam menerapkan prinsip distribusi yang

mereka pilih (lihat Master & Smith, 1987; Reis, 1987; Vermunt & Steensma, 1991).

Di tengah-tengah perkembangan penelitian tentang penilaian keadilan distributif, muncul analisis tentang penilaian keadilan prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat terpisahkan dari penilaian keadilan distributif (Greenberg, 1996; Thibaut & Walker, 1975). Pola perkembangan penelitian penilaian keadilan prosedural tidak banyak berbeda dengan pola perkembangan penelitian penilaian keadilan distributif. Perkembangan kajian dan penelitian penilaian keadilan prosedural meliputi latar belakang dan motivasi penilaian keadilan prosedural (Tyler, 1994), kajian atas bentuk dan dinamika prosedur itu sendiri (Bond & Leung, 1992; Lind & Tyler, 1988; Thomson dkk., 1996; Tyler, 1989), dan dampak prosedur dan penilaian keadilan prosedural (Gilliland, 1994; Greenberg, 1987).

Pada awalnya, penelitian-penelitian tentang penilaian keadilan distributif terpisah dengan penelitian-penelitian tentang penilaian keadilan prosedural. Dalam salah satu tulisannya, Greenberg (1996) merekomendasi kepada peneliti lain untuk segera mengintegrasikan keduanya. Ada satu asumsi kuat bahwa alokasi atau distribusi pada umumnya ditentukan melalui prosedur tertentu. Berkaitan dengan itu, sering disimpulkan bahwa keadilan prosedural akan menentukan keadilan distributif (Brockner dkk., 1994). Dapat pula dikatakan bahwa secara psikologis keadilan prosedural dinilai lebih penting dibandingkan dengan keadilan distributif. Ternyata, beberapa hasil penelitian (lihat Folger dkk., 1983; Greenberg, 1996) menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Disimpulkan bahwa orang pada umumnya tidak peduli pada prosedur selama mereka mendapatkan bagian yang memuaskan. Artinya, keadilan prosedural tidak dipermasalahkan selama ada penilaian bahwa distribusinya sudah dinilai adil. Beberapa penelitian (Greenberg, 1996; Van den Bos dkk., 1997a, 1997b) justru mengindikasikan bahwa penilaian tentang keadilan prosedural dapat dipengaruhi oleh penilaian tentang keadilan distributif.

Tampaknya ketidakjelasan hubungan kausalitas antara kedua penilaian keadilan tersebut disebabkan keduanya dilihat secara eksklusif. Dengan kata lain, penelitian tersebut tidak mengintegrasikan anteseden dan efek dari kedua penilaian keadilan secara bersama dan komprehensif. Kemungkinan besar keterkaitan keduanya dipengaruhi baik oleh anteseden maupun efeknya, di samping secara natural prosedur akan mempengaruhi distribusi.

Untuk mengetahui pola hubungan antara keduanya, rasanya tidak cukup hanya dengan menganalisis hubungan keduanya itu saja. Setiap penilaian keadilan memiliki anteseden. Penilaian keadilan juga membawa dampak psikologis yang kemungkinan berbeda untuk setiap jenis keadilan. Oleh karena itu, relevan kiranya untuk melibatkan anteseden tersebut dalam mengkaji keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Ada kemungkinan bahwa keterkaitan keduanya ikut dipengaruhi oleh masing-masing antesedennya.

Seperti dikatakan sebelumnya, masalah ketidakadilan lebih banyak menimpa kelompok yang tergolong lemah, baik secara ekonomis, sosial, maupun politis. Dilihat dari sektor pekerjaan, pertanian adalah sektor yang tergolong lemah secara ekonomis, sosial, dan politis (Fauzi, 1997; Fauzi, 1999; Wiradi, 2000). Orang-orang yang bekerja di dalamnya, yaitu petani, secara ekonomi juga tergolong lemah (lihat Kompas, 14 Agustus 2000; 11 September 2000; 12 September 2000). Dilihat dari segi penghasilan, mereka adalah kelompok yang tergolong paling rendah. Sebagai produsen pangan, mereka justru yang sering mengalami kelaparan sementara kelompok yang bekerja di sektor lain, biasanya di perkotaan, tidak pernah tertimpa bencana kelaparan (Wiradi, 2000). Hasil kajian *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) seperti dikutip *Kompas* (19 Januari 2001) menyebutkan bahwa antara September 1999 hingga Agustus 2000 Indeks Nilai Tukar Petani Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan fakta itu dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan petani selama periode tersebut. Masih banyak lagi masalah yang dapat dipaparkan yang mencerminkan penderitaan petani (lihat Fauzi, 1999; Wiradi, 2000).

Lemahnya posisi petani dapat dilihat di berbagai tempat dengan berbagai permasalahannya. Salah satunya adalah di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di sana petani melakukan hubungan dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara X unit Tembakau Klaten (Faturochman, 1998; Padmo, 1998; Margono, 1998). Para petani, tepatnya pemilik sawah, dikatakan lemah posisinya karena mereka tidak dapat mengontrol miliknya sendiri. Secara periodik, mereka diharuskan menyerahkan lahannya untuk digunakan dalam penanaman tembakau yang dikelola PTPN X. Perusahaan milik negara ini menggunakan struktur birokrasi yang ada, mulai dari Bupati hingga perangkat desa, untuk menguasai lahan milik penduduk. Keberhasilan penguasaan lahan ini di masa Orde Baru didukung oleh lembaga lain, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan

kelompok tani. Begitu sistematisnya upaya penguasaan tersebut menyebabkan pemilik sawah tidak dapat berbuat banyak meskipun menyangkut nasibnya sendiri.

Sejak tahun 1998, ada perubahan hubungan antara kedua pihak tersebut. Penguasaan lahan yang dilakukan melalui cara koersif tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Sikap kritis dan keberanian masyarakat setempat mulai muncul. Negosiasi antara petani dengan PTPN X tampak mulai dinamis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bila sebelumnya tidak ada proses yang wajar sehingga tidak ada keadilan prosedural yang tentunya akan menyebabkan ketidakadilan distributif, maka sejak waktu itu prosedur dan distribusinya mulai terbuka untuk dinilai.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang diformulasikan berikut ini. Pertama, relasi sosial dalam masyarakat dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Permasalahan keadilan apasajakah yang muncul dalam relasi sosial horizontal dan vertikal di wilayah penelitian ini? Bagaimana dinamika keadilan dan ketidakadilan yang muncul tersebut?

Kedua, berangkat dari kajian awal tentang hubungan petani dengan PTPN X yang telah dipaparkan dalam bagian terdahulu, dapat diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana hubungan antara petani dengan PTPN X? Bagaimana proses-proses dalam hubungan tersebut dan ketentuan distribusi yang ada dinilai? Bagaimana reaksi pemilik sawah atas hubungan tersebut? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penilaian tersebut? Bagaimana dinamika hubungan antara berbagai faktor yang ada? Beberapa pertanyaan ini akan menjadi bahan untuk melakukan eksplorasi dalam penelitian ini sekaligus jawaban atasnya akan menjadi bagian dari kontekstualisasi penelitian disertasi ini. Selanjutnya, dengan menggunakan konteks yang sama dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik seperti berikut ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian keadilan distributif? Faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian keadilan prosedural? Bagaimana keterkaitan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif? Apa dampak penilaian keadilan prosedural dan distributif?

Ketiga, dari uraian terdahulu, telah disebutkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dan distributif bisa timbal balik dan besarnya pengaruh yang satu terhadap yang lain tidak konsisten. Dengan demikian, dapat

dirumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa hubungan kausalitas penilaian keadilan prosedural dan distributif tidak konsisten? Apakah ada pola hubungan yang lebih umum? Bila tidak, kapan satu pola hubungan berlaku sementara pola yang lain tidak?

Keempat, permasalahan ketidakkonsistenan hubungan sebab-akibat penilaian keadilan prosedural dan distributif sering memunculkan keraguan terhadap objektivitas dan konsistensi penilaian keadilan itu sendiri. Bila permasalahan ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, dapat berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana dinamika penilaian keadilan? Apakah bias selalu muncul dalam penilaian keadilan? Faktor apa yang berpengaruh terhadap munculnya bias dalam penilaian keadilan? Bagaimana mengendalikan bias yang muncul tersebut?

2. Tujuan Penelitian

Pada awalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pola hubungan yang jelas antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Untuk mengetahui pola yang jelas itu, perlu dilihat faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kedua penilaian keadilan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keduanya tidak terkait secara eksklusif, tetapi hubungan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif, terutama faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan dan keterkaitan berbagai konsep penilaian keadilan, tujuan awal tersebut dikembangkan untuk mendapatkan model yang komprehensif tentang penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif sebagai tujuan utama. Penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif itu sendiri memiliki dinamika. Sebagai salah satu proses kognitif, penilaian keadilan mempunyai dinamika yang spesifik. Berdasarkan asumsi ini, maka penelitian ini bertujuan pula untuk menemukan dinamika penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif sebagai suatu proses kognitif.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan utama dikemukakan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan teori, yaitu memberikan sumbangan bagi

perkembangan teori penilaian keadilan baik dari segi model penilaiannya maupun dari segi pemahaman tentang proses kognitifnya. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, seperti upaya untuk merumuskan keadilan dan menerapkan rumusan itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini diharapkan merupakan sumbangan psikologi dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil.

4. Keaslian Penelitian

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, penelitian tentang keadilan masih terus berkembang. Di antara para penggagas dan peneliti, baik tentang keadilan maupun penilaian keadilan, banyak yang justru melontarkan gagasan baru berkaitan dengan topik-topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Greenberg (1996) dan Van den Bos (1996) mendorong para peneliti untuk menemukan jawaban yang pasti tentang hubungan penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif. Tyler (1989, 1994) dan Colquitt (2001) mengembangkan dimensi keadilan secara psikologis. Lebih lanjut, Tyler mengembangkan model keadilan dan jenis-jenis atau spesifikasi dari model tersebut. Sementara itu, proses kognitif penilaian keadilan juga terus diteliti. Di antara mereka yang meneliti proses kognitif penilaian keadilan ini, Folger (1987) dan Van den Bos (1999) adalah orang-orang yang sangat intensif mengembangkannya. Penelitian ini secara prinsip didasari oleh topik-topik bahasan itu. Secara operasional, untuk mengembangkannya dalam penelitian ini, ketiganya disintesis dan disesuaikan dengan keadaan pada wilayah penelitian dengan melakukan studi kasus. Hasil studi kasus ini dikembangkan untuk survai, sedangkan hasil survai dikembangkan untuk penelitian skenario yang menggunakan konsep eksperimen. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat terjamin.

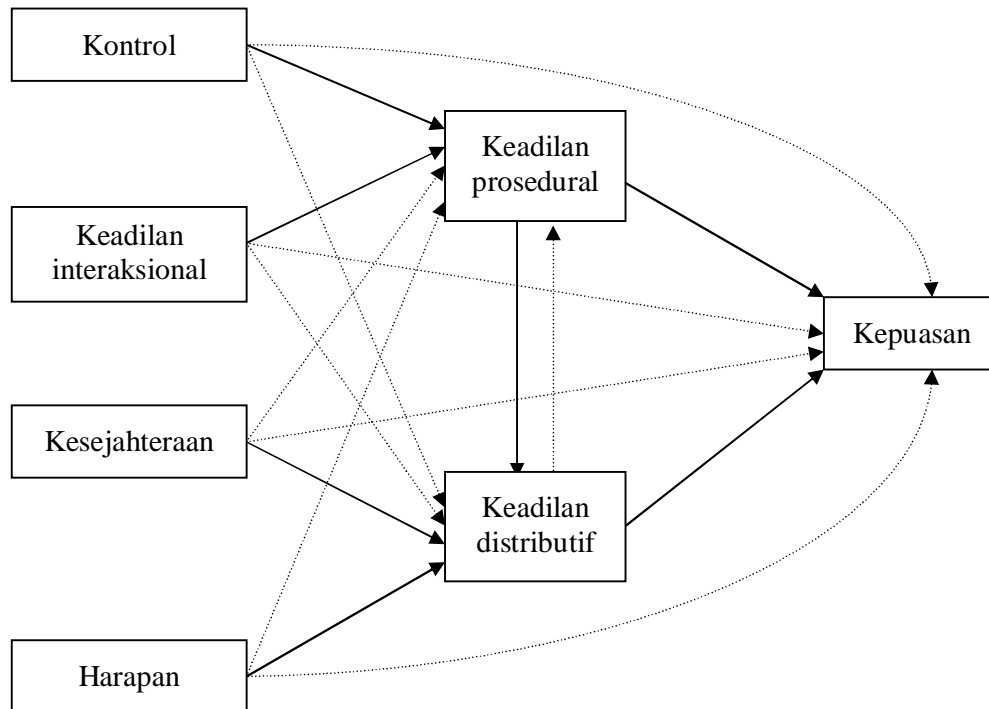
5. Dasar Teori dan Hipotesis

Salah satu teori penilaian keadilan yang komprehensif dikemukakan oleh Tyler (1989, 1994), namun teori yang berbentuk model tersebut belum mengaitkan secara langsung penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif seperti yang dipikirkan Gilliland (1994). Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mengaitkan kedua penilaian keadilan itu sebagai fokus analisis. Dengan demikian dasar-dasar teori yang digunakan dalam

penelitian merupakan modifikasi model dari Tyler tersebut (Gambar 1) sebagai sintesa dan modifikasi dari kajian, teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Dari kajian teori dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural tidak dapat lepas dari keterlibatan orang lain dan peran orang yang bersangkutan, terutama dalam melakukan kontrol. Sementara itu, penilaian keadilan distributif lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang didapatkan dan harapan. Dari kajian teori dan hasil-hasil penelitian seperti dikemukakan di bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif memiliki anteseden yang berbeda (dalam Gambar 1 ditandai dengan garis tebal), walaupun ada variabel yang berpengaruh pada kedua penilaian keadilan besarnya pengaruh tersebut akan berbeda dan cenderung lebih kecil (dalam Gambar 1 ditandai dengan garis putus-putus). Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis pertama (hipotesis 1):

Anteseden penilaian keadilan distributif berbeda dengan anteseden keadilan prosedural.



Gambar 1
Pengembangan Model Penilaian Keadilan
 (Sesudah Tyler, 1994, h.856)

Hipotesis di atas sifatnya masih umum. Salah satu teori keadilan prosedural menyebutkan bahwa faktor penting yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural adalah kontrol. Berbeda dengan teori yang berorientasi pada kepentingan pribadi tersebut, model nilai-nilai kelompok lebih menekankan pentingnya penilaian keadilan interaksional dalam penilaian keadilan prosedural. Dalam praktiknya (lihat Tyler, 1994), kedua faktor itu secara bersama-sama dapat mempengaruhi penilaian keadilan prosedural. Oleh karena itu, khusus yang berkaitan dengan anteseden penilaian keadilan prosedural, hipotesis pertama ini dapat dispesifikasi menjadi dua hipotesis di bawah ini.

Hipotesis 1a:

Kontrol sebagai anteseden mempunyai efek yang positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Hipotesis 1b:

Penilaian keadilan interaksional sebagai anteseden mempunyai efek yang positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Berbeda dengan penilaian keadilan prosedural yang dikaji dari dua sudut pandang dan menelorkan dua teori dan masing-masing mengemukakan anteseden yang berbeda, sejauh pengetahuan peneliti baru ada satu teori yang menjelaskan anteseden penilaian keadilan distributif, yaitu model yang berorientasi pada sumber daya. Menurut model ini ada satu faktor utama atau anteseden yang menjelaskan penilaian keadilan distributif, yaitu penilaian tentang sumber daya yang ada yang secara operasional dipecah menjadi dua variabel, yaitu kesejahteraan dan harapan (Tyler, 1994). Dengan demikian, masing-masing dari kedua variabel tersebut akan berperan terhadap penilaian keadilan distributif dengan arah pengaruh yang berbeda seperti yang dibahas dalam teori deprivasi relatif, kesejahteraan efeknya positif, sedangkan harapan efeknya negatif. Oleh karena itu, hipotesis pertama di atas, khususnya yang berkaitan dengan penilaian keadilan distributif, dapat juga dispesifikasikan seperti terlihat di bawah ini.

Hipotesis 1c:

Kesejahteraan merupakan anteseden yang efeknya positif dan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Hipotesis 1d:

Harapan merupakan anteseden yang efeknya negatif dan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Pada tingkat individu, pemberian atau distribusi apa pun akan didahului oleh proses-proses pengkajian, termasuk proses pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sosial, proses-proses tersebut identik dengan prosedur. Hal ini juga berlaku dalam penilaian keadilan. Penilaian terhadap prosedur pada umumnya dilakukan terlebih dulu dan penilaian terhadap distribusi dilakukan kemudian. Dengan demikian, penilaian keadilan distributif besar kemungkinannya dipengaruhi oleh penilaian keadilan prosedural. Kemungkinan ini dibenarkan dan dibuktikan oleh konsep berpikir heuristik (Van den Bos, 1996, 1999, 2001). Khusus berkaitan dengan penilaian keadilan, teori heuristik menambahkan bahwa penilaian terhadap prosedur lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penilaian terhadap distribusi. Penilaian yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan bila ada perbandingan. Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan psikologi tentang keadilan distributif seringkali dikaitkan dengan konsep-konsep perbandingan sosial (Folger dkk., 1983; Mark & Folger, 1984; Master & Smith, 1987). Lebih mudahnya menilai keadilan prosedural dibandingkan dengan menilai keadilan distributif memberikan peluang meningkatnya peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif sejalan dengan teori heuristik.

Pola hubungan antara penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif diyakini bukan merupakan hubungan yang satu arah (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Van den Bos dkk., 1999). Dari model interes pribadi dalam penilaian keadilan prosedural terbukti bahwa penilaian tersebut banyak dipengaruhi oleh upaya untuk mendapatkan keuntungan (Lind & Tyler, 1988). Dari sinilah muncul pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Kepentingan pribadi yang terpuaskan akan meningkatkan penilaian keadilan distributif. Peningkatan ini akan membawa imbas terhadap penilaian keadilan prosedural.

Bila keduanya berhubungan secara timbal balik, selanjutnya harus diketahui besarnya masing-masing pengaruh. Disebutkan di atas bahwa pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif setidaknya-tidaknya karena dua hal yaitu urutan kejadian yang umumnya menempatkan prosedur lebih dulu dan secara heuristik prosedur lebih mudah dinilai sehingga kemungkinan menjadi referensi untuk menilai keadilan distributif. Sementara itu,

pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural sesungguhnya hanya salah satu bagian dari orientasi pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif akan lebih besar daripada pengaruh sebaliknya. Dengan demikian dapat diajukan **hipotesis kedua** sebagai berikut.

Bila hubungan kedua keadilan ini dilihat secara timbal balik, efek penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar daripada efek penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural.

Pemberian penilaian merupakan proses kognitif. Untuk sampai pada penilaian itu, kaidah-kaidah pemrosesan informasi akan ikut berpengaruh. Dalam proses ini dibutuhkan banyak informasi untuk sampai pada suatu penilaian. Permasalahannya ialah informasi yang dibutuhkan tersebut tidak selalu tersedia, walaupun tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam keadaan demikian, menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan (Van den Bos dkk., 1997a, 1997b) dan teori perbandingan sosial (lihat Master dan Smith, 1987), orang biasanya akan mencari pembanding sebagai dasar penilaian. Bila informasi tentang pembanding ini pun tidak ada, penilai akan berusaha seobjektif mungkin dalam menilai meskipun menggunakan *norma* subjektifnya sebagai dasar menilai. Menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan, untuk mencapai hal ini, individu akan menggunakan referensi yang ada yaitu menilai keadilan prosedural berdasarkan prosedur objektifnya dan menilai keadilan distributif berdasarkan distribusi (hasil) objektifnya. Oleh karena itu, salah satu proposisi teori ini menyebutkan bahwa penilaian keadilan prosedural dipengaruhi oleh prosedur objektifnya dan penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh kondisi objektif distribusinya. Artinya, pada umumnya orang akan menilai adil suatu prosedur bila secara objektif prosedur tersebut adil dan menilai suatu distribusi adil bila secara objektif distribusinya adil, demikian juga bila keadaan objektifnya tidak adil, penilaiannya juga tidak adil.

Sesuai dengan penjelasan itu maka dapat dirumuskan **hipotesis ketiga** sebagai berikut.

Secara objektif prosedur akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural dan distribusi akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Prosedur yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur yang tidak adil dan distribusi yang

adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang tidak adil.

Teori Heuristik Penilaian Keadilan menyebutkan bahwa menilai keadilan prosedural lebih mudah dilakukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa prosedur yang adil lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan distribusi yang adil dan orang peduli dengan keadilan karena ingin mendapatkan kepastian (Van den Bos, 1996; Van den Bos & Miedema, 2000), termasuk kepastian dalam mendapatkan bagian (distribusi) yang adil. Masalah urutan penilaian menurut Teori Heuristik Penilaian Keadilan juga menjadi faktor yang penting. Pengaruh penilaian keadilan prosedural terhadap keadilan distributif tidak terjadi semata-mata karena baik sifat naturalistik maupun kepastian yang lebih besar diperoleh dari prosedur sehingga orang dapat mendiagnosis keadilan distributif berdasarkan keadilan prosedural, tetapi juga karena faktor urutan. Hal ini menjadi bagian penting dari proses kognitif yang cenderung mencerna informasi berdasarkan urutan masuknya informasi tersebut. Oleh karena itu, bila prosedur diketahui lebih dulu, prosedur yang dimaksud tidak hanya akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural, tetapi juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Kesimpulan ini dijadikan sebagai **hipotesis keempat** yang diformulasikan ulang sebagai berikut.

Ketika prosedur diketahui lebih dulu, prosedur yang dimaksud akan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan distributif. Prosedur yang adil akan menyebabkan distribusi dinilai lebih adil dibanding prosedur yang tidak adil.

Apakah urutan informasi seperti disebutkan di atas akan mempunyai efek bila distribusi diketahui lebih dulu dan penilaian keadilan distributif dilakukan lebih dulu? Teori Heuristik Penilaian Keadilan menyimpulkan bahwa ketika penilaian keadilan prosedural dilakukan lebih dulu daripada keadilan distributif, penilaian keadilan prosedural akan ikut terpengaruh (Van den Bos, 1996). Dugaan serupa dikemukakan dalam teori atribusi tentang penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000). Sayangnya pandangan ini belum banyak dibuktikan kecuali oleh satu hasil penelitian (Van den Bos, 1996). Di samping itu, kesimpulan tersebut juga mengandalkan konsep manajemen kesan (Greenberg, 1996) dan kesan awal (Van den Bos dkk., 1999). Lebih dari itu, hal serupa akan terjadi bila kepentingan pribadi menonjol (Lind & Tyler, 1988). Faktor terakhir inilah yang tampaknya paling berperan. Sebaliknya, bila ini

terjadi, secara kognitif akan terjadi disonansi (Festinger, 1954). Sementara itu individu pada umumnya berusaha untuk menghindari disonansi kognitif (Festinger, 1969; Harmon-Jones dkk., 1996). Senada dengan pendapat ini, menurut teori referensi kognitif (Folger, 1987; Folger dkk., 1983; Mark & Folger, 1984; Skarlicki, 1997) setiap individu berusaha untuk menilai keadilan seobjektif mungkin. Apabila referensi hasil untuk menilai keadilan prosedural dan distributif tidak cukup atau memadai, penilai dapat menjustifikasinya berdasarkan nilai-nilai atau moralitas yang ada dan orang tersebut berupaya agar penilaiannya membawa konsekuensi positif baginya pada masa depan. Hal ini semua berbeda dengan orientasi kepentingan pribadi yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan. Oleh karena itu, berbeda dengan proposisi teori heuristik penilaian keadilan hasil penelitian Van den Bos (1996) dan teori atribusi tentang penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000), penelitian ini menguji **hipotesis kelima** yang diformulasikan sebagai berikut.

Bila tidak ada indikasi kepentingan pribadi yang menonjol, distribusi dan penilaian keadilan distributif yang dilakukan sebelum mengetahui prosedurnya tidak akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural.

Penilaian keadilan merupakan konsep yang berbeda dengan kepuasan terhadap prosedur maupun distribusi. Keduanya memiliki korelasi yang tinggi (Tyler, 1994; Van den Bos dkk., 1997a). Kepuasan yang dimaksud juga tidak hanya sebatas kepuasan terhadap prosedur maupun distribusinya. Dalam relasi sosial yang formal, di antaranya disebut sebagai kontrak sosial seperti sewa lahan, maka kepuasan dari relasi sosial atau kontrak sosial secara lebih luas juga akan muncul. Kepuasan akan terdiri dari kepuasan terhadap prosedur, terhadap distribusi, dan terhadap relasi atau kontrak sosial.

Menurut orientasi kepentingan pribadi, individu mengutamakan kepentingannya sendiri dalam menilai keadilan prosedural maupun distributif. Ketika kepentingan pribadinya terpenuhi, ia akan menilainya sebagai sesuatu yang adil. Kepentingan pribadi ini sebagian besar terpenuhi melalui perolehan yang besar dari suatu distribusi. Dalam keadaan begini ia akan mendapatkan kepuasan yang tinggi. Pada sisi lain, interes pribadi yang tinggi pada umumnya mengarahkan pada kekurangpedulian terhadap hal lain, seperti prosedur, asalkan ia diuntungkan. Keuntungan-keuntungan ini akan tercermin dalam kepuasannya. Maka dari itu, diajukan **hipotesis keenam** sebagai berikut.

Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang atau rendah.

Seperti hipotesis pertama, hipotesis ini secara spesifik dapat dibagi lagi hingga menjadi dua bagian seperti berikut ini.

Hipotesis 6a:

Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang.

Hipotesis 6b:

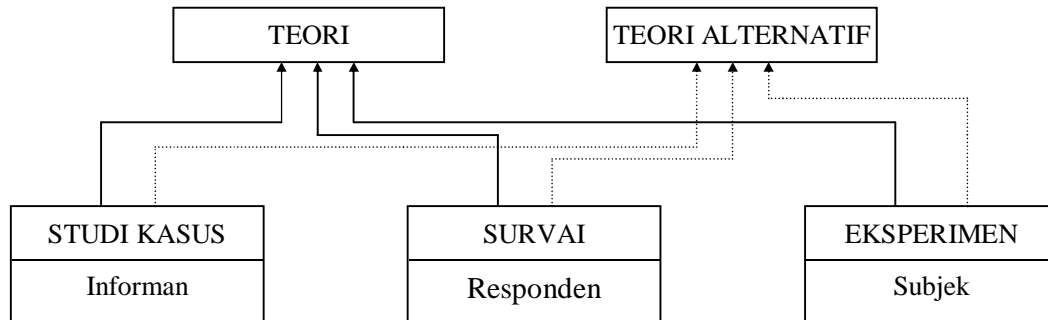
Ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut rendah.

Perlu digarisbawahi bahwa hipotesis-hipotesis di atas pada dasarnya merupakan bagian dari model penilaian keadilan. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ini yang merupakan pembuktian dari beberapa hipotesis bila dirangkai kembali dalam suatu model yang integratif, akan didapatkan model yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini akan sesuai dengan tujuan utama penelitian.

6. Metode Penelitian

a. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendapat Yin (1994) yang menyarankan penggunaan tiga jenis penelitian untuk menyusun atau membuktikan teori (Gambar 2). Studi ini akan menggunakan dua jenis penelitian lapangan, yaitu studi kasus dan survai, serta penelitian skenario yang berdisain eksperimen. Studi kasus akan dilakukan paling awal, disusul survai dan penelitian skenario. Studi kasus merupakan langkah awal untuk memberikan gambaran dan memetakan isu-isu yang berkaitan dengan kajian dan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian survai ditujukan untuk membuktikan hipotesis pertama, kedua, dan keenam, sedangkan penelitian skenario dilakukan untuk menguji hipotesis ketiga, keempat, dan kelima.



Gambar 2
Model-Model Penelitian untuk Pembuktian Teori
 (Sumber: Yin, 1994, h. 31)

Dalam penelitian skenario ini akan dilakukan manipulasi dalam hal urutan pemberian penilaian keadilan oleh subjek. Manipulasi ini terdiri dari dua urutan. Urutan pertama yaitu prosedur dan penilaian keadilan prosedural yang diikuti distribusi dan penilaian keadilan distributif. Urutan lain adalah distribusi dan penilaian keadilannya yang diikuti prosedur dan penilaian keadilannya. Untuk menguji besarnya pengaruh urutan terhadap penilaian keadilan prosedural dibanding kondisi senyatanya maka dilakukan juga manipulasi prosedur menjadi dua kategori yaitu adil dan tidak adil. Sementara itu, distribusi akan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu distribusi yang lebih rendah, sama, dan lebih tinggi dari ukuran normatif. Secara singkat penelitian skenario tersebut rancangannya dapat digambarkan seperti pada Tabel 1. Isi skenario dikembangkan dari temuan-temuan studi lapangan.

Tabel 1
 Ringkasan Rancangan Skenario

Urutan Penilaian	Prosedur	Kemungkinan hasil dibanding hasil normal		
		Lebih Besar	Sama	Lebih Kecil
Distributif-Prosedural	Adil	Skenario I	Skenario II	Skenario III
	Tidak adil	Skenario IV	Skenario V	Skenario VI
Prosedural-Distributif	Adil	Skenario VII	Skenario VIII	Skenario IX
	Tidak adil	Skenario X	Skenario XI	Skenario XII

b. Variabel Penelitian

Variabel anteseden penilaian keadilan adalah kesejahteraan, harapan, kontrol, dan penilaian keadilan interaksional. Variabel penilaian keadilan yang

dimaksud terdiri dari penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan prosedural. Dampak penilaian adalah kepuasan terhadap kerjasama yang dijalin.

Untuk penelitian skenario variabel bebasnya adalah urutan penilaian, prosedur, dan distribusi hasil. Variabel terikatnya terdiri dari penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif.

c. Teknik dan Alat Pengambil Data

Untuk mencapai tujuan di atas dilakukan pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara untuk studi kasus dan angket untuk survai. Wawancara yang dilakukan untuk studi kasus merupakan wawancara semi terstruktur dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Adapun fokus masalah yang ditanyakan berkaitan dengan berbagai hal yang terkait dengan permasalahan keadilan dalam kehidupan masyarakat setempat termasuk masalah kontrak sewa tanah tersebut dan aspek sosial psikologisnya, terutama penilaian tentang keadilan dalam kontrak.

Untuk keperluan survai data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan skala pengukuran psikologi. Teknik pengisian angket dan skala variabel-variabel psikologis tidak akan diserahkan kepada responden, tetapi pertanyaan-pertanyaannya akan dibacakan dan responsnya akan dicatat oleh asisten lapangan. Cara seperti ini diyakini sebagai cara yang akurat untuk mengumpulkan data.

d. Area, Informan, Responden, dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di enam desa dari wilayah kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, yaitu Sukorejo, Birit, Pandes, Gadungan, Canan, dan Kalitengah. Keenam desa tersebut adalah wilayah yang ditanami tembakau oleh PTPN X wilayah tembakau Klaten. Keenam desa tersebut sering disebut juga sebagai kota Kecamatan Wedi. Di kecamatan ini masih ada 13 desa lain yang lahannya tidak ditanami tembakau. Luas Kecamatan Wedi adalah 2 438 hektar. Keenam desa yang dijadikan wilayah penelitian luasnya adalah 726 hektar atau sekitar 30 persen dari wilayah kecamatan, yang terdiri dari 450 Ha tanah basah (sawah) dan 276 Ha tanah kering. Seluruh sawah di desa Kalitengah dan Gadungan menggunakan sistem pengairan teknis. Di desa Sukorejo, Birit, dan Canan sebagian besar sawahnya menggunakan sistem pengairan teknis, sementara di Pandes sebagian besar pengairannya adalah semi teknis.

Untuk wawancara dalam rangka studi kasus diperlukan 10 orang informan. Jumlah ini dinilai cukup sebagai sumber data kualitatif untuk menjawab baik tujuan penelitian yang bersifat deskriptif maupun dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan angket dan skala yang disusun untuk mengungkap data kuantitatif dari survai. Pada tahap pengambilan data survai dengan menggunakan angket didapatkan responden 471 orang. Kriteria yang paling pokok sesuai dengan fokus penelitian adalah memiliki sawah yang disewa oleh PTPN X setidaknya sekali dalam dua tahun terakhir.

Untuk keperluan penelitian skenario dibutuhkan 360 subjek yang akan dibagi menjadi 12 kelompok penelitian skenario sehingga masing-masing skenario akan diikuti oleh 30 subjek. Subjek adalah mahasiswa di dua Fakultas Psikologi yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Wangsa Manggala. Hasil pengumpulan data diperoleh 358 subjek yang datanya dianalisis dalam penelitian ini. Dari sejumlah subjek tersebut, subjek penelitian dari Universitas Gadjah Mada sebanyak 93 orang, Universitas Wangsa Manggala 264 orang, dan seorang subjek tidak memberi keterangan asal universitasnya. Subjek perempuan lebih banyak (241 orang atau 67,3 persen) dibanding laki-laki (110 orang atau 30,7 persen), dan 7 orang tidak mengisi identitas jenis kelaminnya. Rata-rata usia subjek penelitian adalah 19,9 tahun dengan kisaran antara 18 tahun (termuda) hingga 35 tahun (tertua).

e. Rancangan Analisis

Seperti disebutkan bahwa sebagian besar data wawancara adalah kualitatif. Data ini merupakan narasi, dalam bentuk transkrip hasil wawancara, yang akan dianalisis dengan teknik analisis isi. Sebagian data dari wawancara juga dapat dikuantifikasikan, namun karena tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena, data ini juga akan dideskripsikan secara kuantitatif sebagai fakta atau ilustrasi atas permasalahan yang dipaparkan.

Data dari angket survai dan skala pengukuran psikologis akan berupa data kuantitatif. Untuk menguji hipotesis pertama akan digunakan teknik analisis model persamaan struktural (*structural equation model*), khususnya analisis jalur, yang terdiri dari tiga variabel dependen (penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif, dan kepuasan) dan empat variabel independen (kesejahteraan, harapan, kontrol, dan penilaian keadilan interaksional). Untuk keperluan analisis

akan menggunakan perangkat lunak Lisrel versi 7 dengan menggunakan model hipotesis seperti pada Gambar 1.

Dalam penelitian skenario penilaian keadilan prosedural maupun distributif akan diukur melalui skala yang prinsipnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan "seberapa adilkah prosedur/distribusi tersebut?" Jawaban merupakan rentangan angka yang sekornya dibuat antara 0 hingga 10. Makin tinggi angkanya mencerminkan makin tinggi penilaian keadilannya. Untuk melihat efek prosedur dan distribusi pada penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distribusi digunakan teknik analisis variansi. Sesuai dengan hipotesis ketiga, keempat dan kelima rancangan analisis variansinya menggunakan dua variabel independen, yaitu prosedur dan distribusi.

7. Hasil dan Pembahasan

Di antara banyak masalah keadilan, ada tiga masalah keadilan dalam relasi sosial sehari-hari yang dapat diidentifikasi dengan jelas dari pengamatan di lapangan. Pertama adalah masalah hubungan kerja, khususnya antara pemilik perusahaan konveksi dengan pekerjanya atau buruh jahitnya. Kedua adalah pemberian bantuan sosial di antara penduduk setempat yang dikenal dengan istilah *nyumbang*. Masalah keadilan ketiga ditemukan dalam hubungan pemilik sawah dengan PTPN yang menyewa sawah mereka untuk ditanami tembakau. Di luar ketiga hal tersebut masih banyak ditemukan ketidakadilan, tetapi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ketiganya termasuk paling menonjol di samping pada ketiganya terdapat pola hubungan sosial yang berbeda. Ada satu masalah ketidakadilan yang persisten dalam kehidupan masyarakat setempat, yaitu masalah yang bersumber pada ketimpangan gender.

Masalah dalam hubungan kerja buruh-majikan ditemukan di mana-mana (lihat *Prisma*, Nomor 3, 1992). Di wilayah penelitian cukup lama majikan atau pemilik perusahaan konveksi memperlakukan buruh jahit mereka secara tidak adil (lihat Susilastuti dan Partini, 1990). Hubungan kedua pihak ini merupakan hubungan vertikal dengan majikan pada posisi di atas dan buruh pada posisi di bawah. Posisi majikan yang berada di atas itu bisa dilihat dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu pemberian pekerjaan bagi buruh dan penentuan upah.

Buruh jahit, dalam bahasa setempat disebut *gerji*, dipekerjakan atau tidak sangat tergantung pada juragan. Di tiga desa dari enam desa wilayah penelitian ini dengan Kalitengah sebagai pusatnya, pemilik perusahaan konveksi memberikan

kesempatan pada buruh jahit untuk mengerjakan tugas borongan (dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *order*) dengan sistem dikerjakan di rumah. Pengusaha memiliki bahan pakaian, memotong, dan menjual produknya. Buruh jahit mengambil bahan yang sudah dipotong, menjahitnya, dan setelah jadi diserahkan kembali ke perusahaan. Pekerjaan menjahit dilakukan di rumah masing-masing buruh jahit. Semua beban dan risiko yang berkaitan dengan proses menjahit ini ditanggung oleh buruh. Pemilik perusahaan hanya membayar ongkos jahit sesuai dengan jumlah pakaian yang diselesaikan oleh buruh jahit.

Pemilik perusahaan menentukan dua hal pokok yang sekaligus merupakan sumber masalah keadilan. Pertama, pemilik mempunyai wewenang penuh untuk memberikan pekerjaan kepada buruh jahit. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan produksi pakaian jadi yang cukup besar di daerah ini akibat permintaan pasar yang menurun. Akibatnya mudah diduga, volume pekerjaan berkurang dan buruh belum tentu mendapat *order* atau pekerjaan dari juragannya. Pada saat krisis seperti ini dan pada musim sepi *order* pada umumnya, buruh jahit hampir tidak mungkin mendapat pekerjaan dari pengusaha lain karena sebagian besar perusahaan yang ada di sana mengalami masalah yang sama. Sekalipun ada perusahaan yang masih memproduksi, mereka tidak memerlukan buruh baru. Nasib buruh jahit yang banyak ditentukan oleh majikan dalam hal mendapat pekerjaan ini diperburuk oleh tuntutan loyalitas buruh kepada majikannya. Artinya, pada umumnya buruh tidak boleh memiliki lebih dari satu juragan.

Persoalan kedua berkaitan dengan upah. Sistem borongan menjahit pakaian menempatkan posisi buruh untuk menyediakan modal dan menanggung risiko lebih besar. Dilihat dari sisi ongkos produksi, buruh harus menanggung biaya pembelian benang, jarum jahit yang sering patah, listrik sebagai tenaga penggerak mesin jahit, dan harus memiliki mesin jahit sebagai modal. Selama melakukan pekerjaan itu, semua risiko akibat pekerjaan ditanggung oleh buruh. Akibat dari pekerjaan seperti sakit dan kecelakaan bukan menjadi tanggungan pemilik perusahaan. Bila ada produk yang cacat, buruh juga harus menggantinya. Cukup banyak buruh yang harus mengganti bahan pakaian akibat kesalahan dalam proses pembuatannya.

Permasalahan keadilan kedua yang ditemukan di wilayah penelitian adalah bersumber pada hubungan sosial kemasyarakatan. Sudah menjadi fenomena umum bahwa dalam masyarakat terjadi mekanisme *menyumbang* yang merupakan salah satu bentuk jaminan sosial (*social security*) agar terjadi keharmonisan sosial.

Secara garis besar bantuan atau menyumbang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketika ia mengadakan hajatan.

Ada dua hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hal ini. Pertama, sejauh ini pengeluaran rumah tangga untuk memberikan bantuan kepada orang lain dirasakan cukup berat. Kedua, hampir semua orang merasakan kesulitan ekonomi sehingga sulit mencari sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk membantu. Meskipun demikian, kesulitan ekonomi rumah tangga pada umumnya mendapat bantuan dari keluarga luas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme bantuan lebih menonjol pada keluarga luas dibandingkan dengan komunitas sekitar tempat tinggal yang tidak ada hubungan keluarga. Salah satu indikatornya adalah besarnya jumlah uang yang disumbangkan. Sumbangan untuk famili selalu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan untuk tetangga atau kawan kerja, kurang lebih dua kali lipat. Indikator yang lain adalah tembusnya batas administratif seperti dusun, desa, atau kecamatan. Sumbangan untuk famili tidak mengenal batas wilayah, tetapi lebih menekankan pada kedekatan hubungan keluarga.

Secara umum bantuan bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Bila dicermati, ada pertimbangan yang lebih khusus daripada hal itu. Sumbangan untuk famili pada umumnya didasari oleh kewajiban. Sumbangan pada saat keluarga lain tertimpa kematian juga cukup besar pertimbangan kewajibannya, sementara sumbangan untuk kecelakaan di samping pertimbangan kewajiban, juga karena rasa iba atau kasihan. Sumbangan untuk tetangga yang meliputi peristiwa siklus hidup dan pembangunan rumah lebih banyak didasari oleh alasan resiprositas. Berbeda dengan pertimbangan kewajiban dan perasaan iba, pemberian sumbangan yang berasosiasi dengan pertimbangan resiprositas justru dirasakan berat. Kesimpulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa waktu antara menyumbang dan menerima sumbangan dalam proses pertukaran seperti itu sulit diketahui. Bagi rumah tangga muda akan lebih banyak memberikan daripada menerima sumbangan. Pada saat ia menerima sumbangan, nilainya kemungkinan sudah berbeda sama sekali dengan nilai ketika ia menyumbang. Logika seperti inilah yang tampaknya menjadi dasar penilaian berat ringannya serta penilaian keadilan dari proses pertukaran resiprositas.

Hal serupa ditemukan untuk pertukaran dan bantuan yang diwujudkan secara berbeda. Dalam kasus bantuan tenaga untuk membangun rumah, misalnya, sebagian besar yang terlibat adalah bukan orang kaya. Orang kaya yang

berpartisipasi dalam kegiatan itu memberikannya dalam bentuk benda atau uang. Secara ekonomis barang atau uang yang diberikan bisa setara dengan upah untuk tenaga bantuan itu. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu. Bantuan seperti ini tidak hanya bermakna meringankan beban dan pertukaran, tetapi juga kebersamaan. Penggantian tenaga dengan uang berarti menghilangkan makna kebersamaan. Di sini ada masalah keadilan dalam arti keadilan interaksional, yaitu penghargaan pada kelompok yang lebih miskin sekaligus penghargaan bagi adat istiadat yang berlaku.

Kenyataan seperti ini tampak lebih menonjol ketika pelakunya adalah perempuan. *Rewang* atau bantuan tenaga ketika ada hajatan atau musibah sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Waktu yang dicurahkan untuk melakukan pekerjaan ini pun tergolong lama, bisa lebih dari satu hari. Frekuensi melakukan kegiatan ini lebih banyak daripada frekuensi terlibat dalam *sambatan* pembangunan atau renovasi rumah yang melibatkan laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk tenaga lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Dalam analisis gender, isu yang menonjol di sini adalah marjinalisasi perempuan. Kata *rewang* berarti memosisikan perempuan pada peran sosial yang diatribusikan sebagai tempat yang tidak penting. Atribusi seperti ini mengingkari kenyataan bahwa yang mereka kerjakan adalah bagian penting dalam rangkaian kegiatan secara keseluruhan. Pada saat yang sama laki-laki menjalankan peran sosial yang lebih tinggi seperti menerima tamu atau duduk di bagian depan dalam suatu peristiwa hajatan.

Sumbangan juga dirasakan berat, dan merupakan ungkapan yang sesungguhnya mencerminkan ketidakadilan karena bagi penduduk yang kurang mampu seolah-olah harus memberikan sumbangan sebanding dengan jumlah yang diberikan oleh orang kaya. Prinsip pemerataan tidak tepat digunakan. Memang ada toleransi atau permakluman dari masyarakat bila orang yang kurang mampu memberikan sumbangan dalam jumlah yang lebih kecil atau tidak menyumbang sama sekali. Namun, masih dirasakan adanya tekanan sosial bila perkecualian ini dilakukan. Kenyataan ini menjadi sangat ironis karena sumbangan yang sering dipadankan sebagai toleransi dalam prakteknya justru memberlakukan intoleransi.

Permasalahan ketidakadilan lain ditemukan dalam kerja sama antara pihak PTPN dengan pemilik sawah yang merupakan kombinasi antara bagi hasil dan kontrak sewa. Kedua belah pihak mengatakan bahwa kerja sama itu merupakan bagi hasil, tetapi dalam implementasi di lapangan unsur kontraknya cukup besar.

Pola kerja sama yang berlangsung hingga saat penelitian berlangsung dikenal dengan istilah Intensifikasi Tembakau *Vorsten Landen* (ITVL) yang secara resmi dimulai sejak tahun 1983. Rupa-rupanya sistem sewa masih tampak dalam kerja sama itu karena sebelumnya mereka menggunakan sistem yang jelas-jelas merupakan pola sewa lahan. Sistem yang dimaksud dikenal dengan nama Sistem Sewa yang berlangsung antara tahun 1970--1979 dan Sistem ITV pada tahun 1979-1982 (Madenar, 1999).

Kerja sama antara pemilik sawah dengan PTPN dalam sistem ITVL setiap tahunnya diawali dengan adanya Surat Keputusan Bupati yang isinya mengharuskan pemilik menyerahkan sawahnya untuk ditanami tembakau. Karena proses ini telah berjalan bertahun-tahun, pemilik pada umumnya sudah tahu akan hal ini. Surat keputusan itu bagi pemilik sawah hanya merupakan tanda bahwa mereka diharuskan menyerahkan sawahnya atau tidak (dari pengalaman selama ini keharusan itu selalu ada). Mereka harus mempersiapkan sawahnya sebelum diserahkan kepada PTPN. Pada dasarnya persiapan yang dimaksud adalah mengosongkan lahan dari berbagai jenis tanaman pangan yang sengaja ditanam petani. Oleh karena itu, petani harus memperhitungkan betul kapan mereka menanam dan memetik hasilnya. Bila pada batas waktu tanam tembakau dimulai di sawah masih ada tanaman milik petani, mereka berisiko tidak mendapatkan hasil karena padi milik petani dibabat PTPN. Kasus pembabatan pernah terjadi beberapa kali. Untuk menghindari peristiwa itu, PTPN dan kelompok tani biasanya mengumumkan batas waktu mulai menanam, terutama padi, sehingga waktu panen nantinya jatuh sebelum mulai penanaman tembakau.

Waktu penyerahan lahan ini merupakan salah satu masalah penting bagi petani. Meskipun mereka telah mengetahui dan berpengalaman dalam kerja sama itu, penanaman komoditas pertanian masih sangat tergantung dengan musim dan cuaca. Awal musim tanam padi, misalnya, sering harus mundur karena curah hujan belum cukup, sementara irigasi juga tidak selalu lancar. Dalam keadaan demikian, petani tidak dapat mengerjakan sawah sesuai dengan jadwal dan kemungkinan besar bertabrakan dengan waktu penyerahan lahan kepada PTPN. Mereka berhadapan dengan risiko untuk merugi.

Selama lahan digarap oleh pihak PTPN, petani tidak berhak untuk mengelolanya sama sekali. Pada waktu itu pengelolaan tanah dilakukan oleh buruh dan diawasi oleh mandor yang bertanggung jawab kepada PTPN. Pemilik sawah, dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok tani, mulai terlibat lagi setelah

musim petik daun tembakau tiba. Daun tembakau yang dipetik dibawa ke los-los pengeringan sebelum dibawa ke pabrik yang terdapat di Desa Gadungan untuk diolah lebih lanjut. Setelah tembakau kering lalu dibawa ke gudang pabrik untuk ditimbang terlebih dulu. Pada waktu penimbangan, ketua kelompok tani ikut mencatat. Total produksi tembakau setiap wilayah akan menjadi pertimbangan pokok pada bagi hasil antara PTPN dengan pemilik sawah. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Dalam satu wilayah, hasil tembakau kering dijumlah. Setelah jumlah produksi ditemukan lalu dikalikan dengan harga tembakau yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, ditemukan produksi total pada satu wilayah dalam satuan rupiah. Angka ini kemudian dibagi dengan luas wilayah itu sehingga ditemukan angka produktivitas per satuan luas (meter persegi). Pemilik sawah akan menerima bagi hasil berdasarkan luas lahan yang dimilikinya.

Setelah panen tembakau selesai, tanah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Bentuk tanah yang telah berubah setelah ditanami tembakau harus dikembalikan seperti sediakala, tetapi ini tidak dilakukan oleh PTPN. Mereka hanya memberikan biaya 'pengembalian tanah' yang besarnya ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Pada waktu penelitian berlangsung, misalnya, besarnya biaya yang diberikan kepada petani adalah Rp15.000,00 per patok.

Dari permasalahan yang ada hasil kerjasama dalam bentuk uang dinilai sebagai aspek yang paling merugikan pemilik sawah. Tuntutan pemilik agar selama sawahnya digunakan untuk menanam tembakau menghasilkan sejumlah uang yang sama dengan ketika mereka menanam padi ternyata tidak mudah tercapai. Pada masa sebelumnya, hasil perhitungan antara dua jenis komoditi yang ditanam itu akan sesuai bila menggunakan patokan perbandingan produktivitas padi dibandingkan dengan tembakau adalah 4:1. Artinya, harga satu kilogram tembakau sebanding dengan harga empat kilogram gabah. Penentuan harga ini tampaknya berdasarkan pada asumsi bahwa harga gabah, sebagai patokan, tidak berubah-ubah secara mencolok dan pemerintah juga membeli gabah dengan sistematis. Pada kenyataannya, harga gabah di pasaran sering lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan yang ditentukan pemerintah. Dengan perubahan harga seperti ini, petani dirugikan. Anehnya, ketika harga gabah dinaikkan cukup tinggi, menjadi Rp1.000,00 per kilogram, dan petani menginginkan formulasi 4:1, PTPN menolak. Apalagi beberapa bulan sesudah itu terdengar lagi kenaikan harga gabah, negoisasi harga juga menjadi tersendat-

sendat. Hingga saat ini tampaknya penghasilan dari sawah bila ditanami tembakau dinilai mengecewakan oleh sebagian besar pemilik.

Langkah berikutnya adalah menguji hipotesis dan mencari model yang paling cocok dengan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang paling sesuai untuk data penelitian ini adalah model seperti pada Gambar 3. Dengan model ini diperoleh angka-angka hasil perhitungan sebagai indikasi kesesuaian model dengan data, yaitu derajat kebebasan 0, uji kai kuadrat tidak signifikan ($\chi^2 = 0$; $p = 1$), indeks ketepatan (GFI) sebesar 1, dan RMSR sama dengan 0.

Koefisien determinan model ini adalah sebesar 0,51 yang berarti bahwa variabel-variabel yang dilibatkan dalam model dapat menjelaskan 51 persen dari varian yang ada. Model ini juga dapat menjelaskan penilaian keadilan prosedural sebesar 45 persen, penilaian keadilan distributif sebesar 49 persen, dan kepuasan sebesar 52 persen. Hal ini berarti pula bahwa dalam model ini ditemukan eror penilaian prosedural sebesar 55 persen, eror penilaian keadilan distributif sebesar 51 persen dan eror kepuasan sebesar 48 persen. Besarnya eror-eror tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal (Arbuckle & Wothke, 1999), yaitu ketidaksempurnaan pengukuran dan adanya variabel-variabel lain yang berpengaruh, tetapi dalam analisis tidak dijadikan sebagai variabel pengaruh. Dari hasil uji konsistensi internal terhadap skala pengukur ketiga variabel tersebut ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengukuran. Oleh karena itu, harus diakui bahwa ketidaksempurnaan pengukuran tersebut memiliki kontribusi terhadap eror yang ada. Hal yang sama juga harus diakui berkaitan dengan peran faktor atau variabel pengaruh lain yang tidak dilibatkan dalam model ini. Sebagai ilustrasi, dalam model ini variabel kepuasan memiliki eror paling kecil di antara ketiga variabel dependen karena, antara lain, sebagai variabel dependen kepuasan memiliki paling banyak variabel penjas (pengaruh).

Dari model yang ditemukan ini, anteseden penilaian keadilan prosedural hanya satu yaitu penilaian keadilan interaksional, sedangkan anteseden penilaian keadilan distributif yang signifikan ada tiga yaitu kesejahteraan, harapan, dan penilaian keadilan interaksional. Efek penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural besarnya adalah 0,671 dan efek sebesar ini secara statistis sangat signifikan ($p = 0,001$). Sebagai anteseden, penilaian keadilan interaksional juga mempunyai efek terhadap penilaian keadilan distributif yang sangat signifikan dengan angka gamma sebesar 0,301, sedangkan efek

kesejahteraan yang besarnya 0,065 ($p = 0,048$) dan efek harapan sebesar $-0,083$ ($p = 0,013$) berperan signifikan terhadap penilaian keadilan distributif.

Dari analisis dengan menggunakan dua model di atas, bila dikaitkan dengan hipotesis pertama, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, **hipotesis pertama** yang menyatakan bahwa anteseden penilaian keadilan distributif berbeda dengan anteseden keadilan prosedural **diterima**. Bila dilihat secara lebih spesifik seperti yang diformulasikan ke dalam hipotesis 1a hingga hipotesis 1d, perbedaan anteseden antara hasil analisis dengan hipotesis terdapat beberapa perbedaan seperti yang dikemukakan pada poin berikut ini.

Kedua, **hipotesis 1a** yang menyebutkan bahwa kontrol sebagai anteseden mempunyai efek positif yang signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural **ditolak**. Peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural sangat kecil ($\gamma = -0,02$) dan tidak signifikan ($p = 0,541$).

Ketiga, **hipotesis 1b** yang menyebutkan bahwa penilaian keadilan interaksional sebagai anteseden mempunyai efek positif yang signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural **diterima**. Efek langsung penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural besar ($\gamma = 0,671$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$), bahkan dalam model tersebut efek langsung ini adalah yang terbesar.

Keempat, efek kesejahteraan terhadap penilaian keadilan distributif ($\gamma = 0,065$) cukup signifikan ($p = 0,048$). Dengan demikian, **hipotesis 1c** yang berbunyi kesejahteraan dapat dijadikan sebagai anteseden yang efeknya positif terhadap penilaian keadilan distributif **diterima**.

Kelima, harapan mempunyai efek yang signifikan terhadap penilaian keadilan distributif ($\gamma = -0,083$; $p = 0,013$). Efek harapan terhadap penilaian keadilan distributif ini negatif. Artinya, bila harapan meningkat, penilaian keadilan distributif akan menurun. Berdasarkan hasil analisis ini maka **hipotesis 1d** yang menyatakan bahwa harapan dapat dijadikan sebagai anteseden yang efeknya signifikan dan negatif terhadap penilaian keadilan distributif **diterima**.

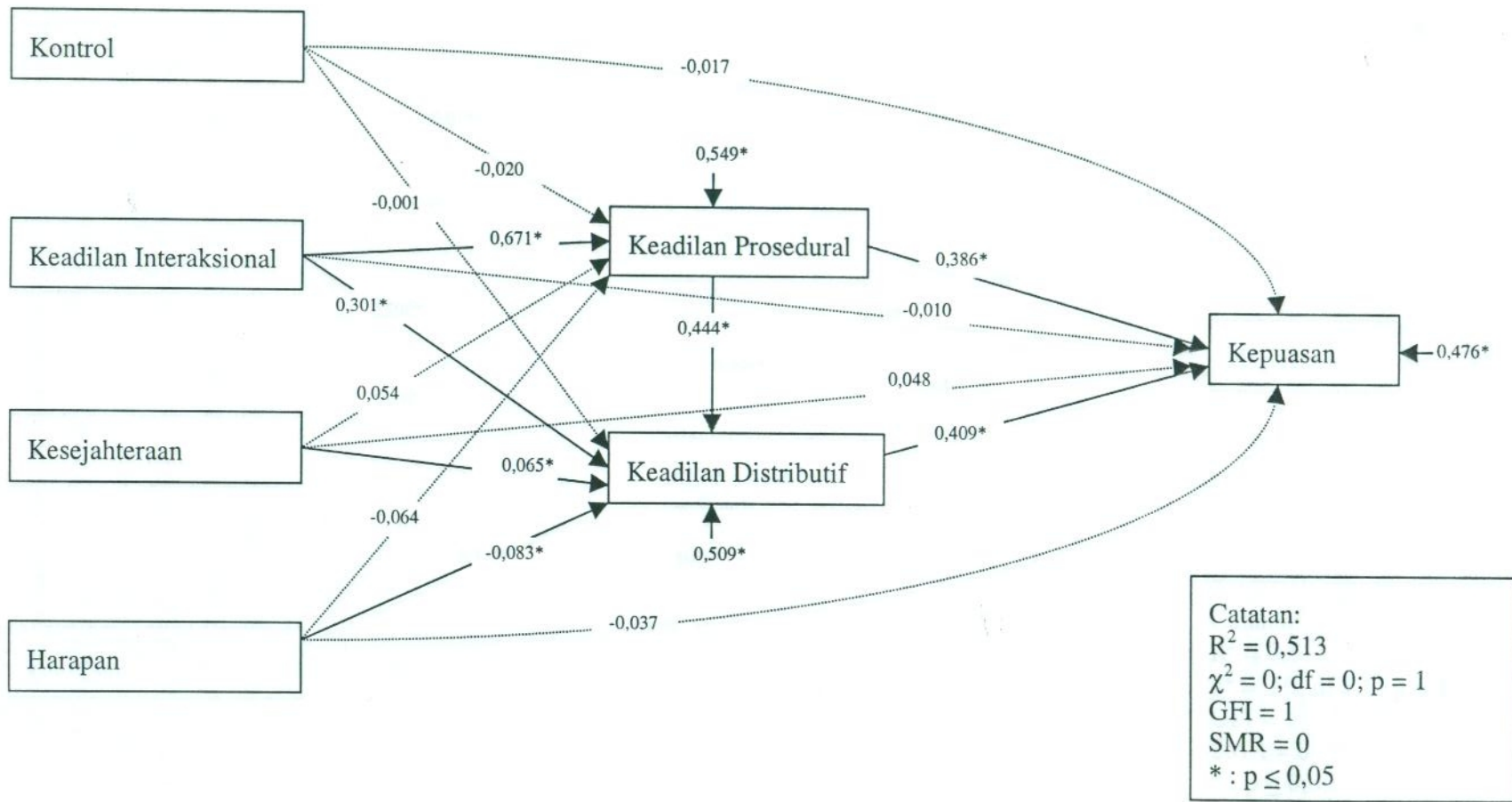
Hipotesis pertama yang berkaitan dengan anteseden penilaian keadilan prosedural dan distributif tidak sepenuhnya sesuai dengan data empiris penelitian ini. Dari empat hipotesis yang lebih spesifik, tiga di antaranya diterima dan satu ditolak. Di samping itu, dengan menguji peran semua variabel independen terhadap variabel dependen, ternyata ditemukan juga efek langsung penilaian

keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan distributif. Efek tersebut cukup besar dan sangat signifikan ($\gamma = 0,301$; $p = 0,001$).

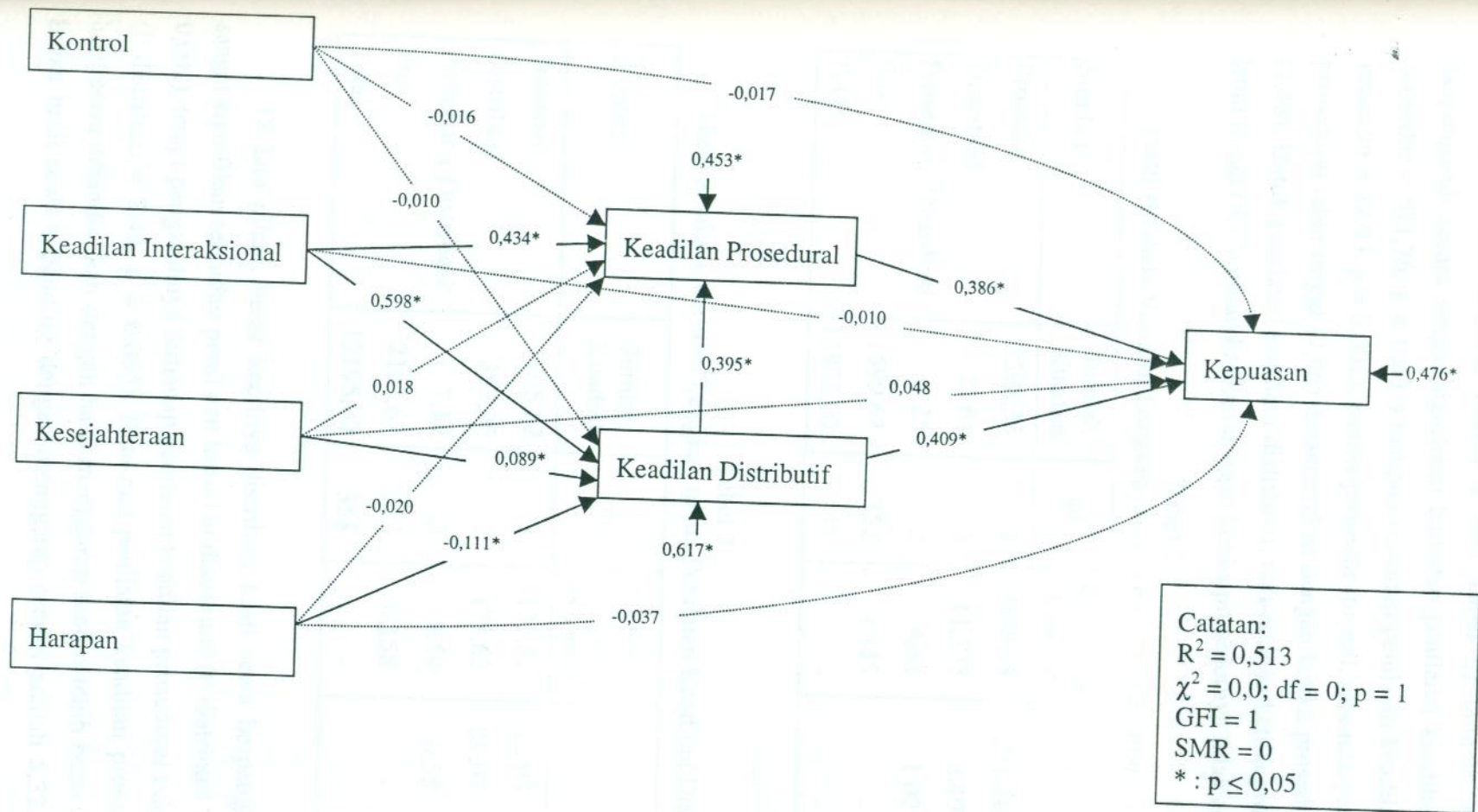
Analisis selanjutnya dilakukan untuk menguji model yang mirip dengan model sebelumnya (Gambar 3), tetapi penilaian keadilan distributif diasumsikan memiliki efek terhadap penilaian keadilan prosedural. Pengujian model ini merupakan salah satu upaya untuk membuktikan hipotesis tentang keterkaitan penilaian keadilan distributif dengan penilaian keadilan prosedural. Hasil analisis terhadap model ini (Gambar 4) menunjukkan bahwa secara statistik model ini juga dapat diterima. Efek variabel satu terhadap variabel lain polanya tidak berbeda jauh dengan model sebelum ini meskipun besarnya masing-masing efek berbeda dengan efek variabel-variabel tersebut pada model sebelum ini. Dengan tujuan untuk melihat besarnya efek penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural dibandingkan dengan efek yang sebaliknya pada model sebelum ini, hasilnya menunjukkan bahwa pada model ini efeknya lebih kecil ($\beta = 0,395$) dibandingkan dengan efek sebaliknya pada model sebelumnya ($\beta = 0,444$).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Dari hasil analisis dengan pengujian sendiri-sendiri terbukti bahwa efek langsung penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar ($\beta = 0,444$) dibandingkan dengan efek langsung penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural ($\beta = 0,395$). Dengan demikian, **hipotesis kedua** tersebut **diterima**.

Dalam rangka mengelaborasi model heuristik penilaian keadilan, dilakukan penelitian dengan menggunakan skenario dan vinyet yang dapat digolongkan sebagai penelitian skenario. Seperti dikemukakan dalam uraian tentang metode penelitian, untuk menguji hipotesis ketiga pertama-tama digunakan analisis variansi dua jalur dengan variabel independen prosedur dan distribusi (hasil sewa) serta ada dua variabel dependen, yaitu penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif. Prosedur dibagi menjadi dua juga yaitu melalui prosedur adil (tidak akan dimarahi dan tidak dikenai sanksi) dan prosedur tidak adil (dimarahi dan diberi sanksi bila tidak menurut). Sementara itu, ada tiga distribusi hasil sewa yaitu sewa yang lebih tinggi, sama, dan lebih rendah daripada hasil bila tidak disewa (lahan digarap sendiri).



Gambar 3
Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis
dengan Asumsi Keadilan Prosedural Berpengaruh terhadap Keadilan Distributif



Gambar 4
Model Penilaian Keadilan berdasarkan Hasil Analisis
dengan Asumsi Ada Efek Keadilan Distributif terhadap Keadilan Prosedural

Dari hasil analisis (Tabel 2 dan Tabel 3) tampak bahwa prosedur berpengaruh secara sangat signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural (F prosedur = 571,76; $p = 0,001$) maupun terhadap penilaian keadilan distributif (F prosedur = 22,05; $p = 0,001$). Ketika prosedur itu adil, rata-rata penilaian keadilan prosedural lebih tinggi (7,86) dibandingkan dengan ketika prosedurnya tidak adil (2,48). Untuk penilaian keadilan distributif, rata-ratanya ketika prosedur adil juga lebih tinggi (5,77) dibandingkan dengan ketika prosedurnya tidak adil (4,55).

Tabel 2
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	2598,38	1	2598,38	571,76	0,001
Distribusi	22,61	2	11,303	2,49	0,085
Prosedur x Distribusi	9,25	2	4,63	1,02	0,362
Eror	1599,67	352	4,545	-	-
Total	13808,00	358	-	-	-

Tabel 3
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	135,82	1	135,82	22,05	0,001
Distribusi	357,25	2	178,62	29,07	0,001
Prosedur x Distribusi	7,19	2	3,59	0,58	0,558
Eror	2167,67	352	6,158	-	-
Total	12195,00	358	-	-	-

Di lain pihak, besar kecilnya distribusi hasil sewa berpengaruh dengan sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif (F distribusi = 29,07; $p = 0,001$), tetapi pengaruhnya terhadap penilaian keadilan prosedural tidak signifikan (F distribusi = 2,49; $p = 0,085$). Rata-rata penilaian keadilan prosedural ketika hasil sewa dibandingkan dengan hasil menggarap sendiri lebih besar adalah 5,35, ketika hasil sewa sebanding dengan menggarap sendiri adalah 5,32, dan ketika

hasil sewa lebih kecil dibandingkan dengan menggarap sendiri adalah 4,84. Karena hasil uji-F terhadap perbedaan rata-rata ini tidak signifikan, tidak perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dalam bentuk uji pasangan antarkategori. Sementara itu, penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa dibandingkan dengan hasil menggarap sendiri lebih besar adalah 6,22, ketika hasil sewa sebanding dengan menggarap sendiri adalah 5,43, dan ketika hasil sewa lebih kecil dibandingkan dengan menggarap sendiri adalah 3,82. Karena perbedaan antarkategori ini signifikan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam bentuk uji beda pasangan antarkategori. Hasil uji beda pasangan antarkategori untuk penilaian keadilan distributif berdasarkan kategori distribusi sewa dapat dilihat pada Tabel 4. Dari hasil uji statistik tampak bahwa perbedaan penilaian keadilan distributif secara berpasangan antarkategori distribusi semuanya signifikan. Penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih besar daripada hasil bila digarap sendiri (rata-rata = 6,22) berbeda sangat signifikan dengan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa sebanding dengan hasil digarap sendiri (rata-rata = 5,43) dan dengan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih kecil daripada ketika hasil sewa digarap sendiri (rata-rata = 3,82). Perbedaan yang signifikan terjadi antara penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa sebanding dengan hasil digarap sendiri (rata-rata = 5,43) dan penilaian keadilan distributif ketika hasil sewa lebih kecil daripada ketika hasil sewa digarap sendiri (rata-rata = 3,82). Hasil-hasil uji beda pasangan kategori distribusi ini menguatkan hasil sebelumnya yang menyebutkan bahwa distribusi yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan penilaian keadilan distributif, makin favourable distribusi makin tinggi penilaian keadilannya.

Tabel 4
Perbedaan Penilaian Keadilan Distributif
Antarpasangan Distribusi dan Signifikansi Perbedaannya

Pasangan Distribusi	Perbedaan	p
Lebih besar – Sebanding	1,61	0,001
Lebih besar – Lebih kecil	2,39	0,001
Sebanding – Lebih kecil	0,79	0,015

Dari hasil analisis di atas ternyata perbedaan prosedur berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan perbedaan distribusi berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif. Pada prosedur yang adil penilaian keadilan

proseduralnya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika prosedur tersebut tidak adil. Pada distribusi yang adil penilaian keadilan distributifnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketika distribusi tersebut tidak adil. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga** yang menyebutkan bahwa secara objektif prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan distribusi akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif; prosedur yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur yang tidak adil dan distribusi yang adil akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang tidak adil **diterima**.

Untuk membuktikan hipotesis selanjutnya (hipotesis keempat dan kelima) dilakukan analisis lanjutan seperti yang disarankan oleh Van den Boss (1996). Pada prinsipnya analisis yang disarankan adalah melakukan analisis secara lebih rinci dengan memilah-milah variabel independen. Saran ini dapat dilakukan di sini karena hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur memiliki pengaruh, baik terhadap penilaian keadilan prosedural maupun distributif secara sangat signifikan (Tabel 2 dan 3). Dengan demikian, analisis yang dilakukan berikut ini juga berfungsi untuk melihat lebih lanjut pengaruh dari variabel prosedur dan perbedaan distribusi hasil sewa bila setiap urutan dianalisis tersendiri.

Analisis berikut ini memisahkan pengaruh prosedur dan distribusi hasil sewa pada tiap-tiap urutan pemberian informasi dan penilaian. Apabila teori keadilan heuristik terbukti sepenuhnya, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Pertama, ketika informasi tentang prosedur dan penilaian keadilan prosedural dilakukan terlebih dulu, prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif, distribusi hasil sewa akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif, serta ada interaksi antara prosedur dengan distribusi hasil sewa terhadap penilaian keadilan distributif. Kedua, ketika informasi tentang hasil sewa diperoleh lebih awal dan penilaian keadilan distributif dilakukan lebih dulu, distribusi hasil sewa akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan prosedural, prosedur akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural, dan interaksi antara hasil sewa dengan prosedur signifikan dalam menjelaskan penilaian keadilan prosedural.

Berikut ini adalah analisis pertama yang dikenakan khusus pada kelompok yang mendapat informasi tentang prosedur dan melakukan penilaian keadilan prosedural terlebih dulu. Rata-rata penilaian keadilan prosedural dan distributif

pada kelompok ini terdapat pada Tabel 5. Hasil analisis (Tabel 6) menunjukkan bahwa prosedur berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural (F prosedur = 219,79; $p = 0,001$). Sementara itu, perbedaan hasil sewa dan interaksinya dengan prosedur tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural (F distribusi = 0,94; $p = 0,391$ dan F interaksi = 1,27; $p = 0,282$). Di lain pihak, penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh distribusi hasil sewa (F distribusi = 13,80; $p = 0,001$) dan prosedur (F prosedur = 33,33; $p = 0,001$), serta interaksi antara prosedur dan distribusi yang signifikan (F interaksi = 3,05; $p = 0,050$).

Tabel 5
Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Prosedur Terlebih Dulu

Dependen Variabel	Hasil	n	Prosedur		
			Adil	Tidak	Total
Keadilan Prosedural	>	30	7,70	2,53	5,12
	=	30	7,17	3,13	5,15
	<	30	7,20	2,13	4,67
	Total	90	7,35	2,60	4,98
Keadilan Distributif	>	30	7,80	4,60	6,20
	=	30	5,57	4,63	5,10
	<	30	5,00	2,43	3,72
	Total	90	6,12	3,89	5,01

Tabel 6
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	1017,69	1	1017,69	219,79	0,0001
Distribusi	8,744	2	4,37	0,944	0,391
Prosedur x Distribusi	11,811	2	5,91	1,27	0,282
Eror	805,67	174	4,63	-	-
Total	6304,00	180	-	-	-

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat** yang menyatakan bahwa ketika prosedur diketahui lebih dulu maka prosedur yang

dimaksud akan berpengaruh terhadap penilaian distributif **diterima**. Bila analisis pertama dari penelitian skenario ini dilihat kembali, tampak juga bahwa pengaruh prosedur tidak hanya signifikan ketika prosedur diketahui lebih dulu, tetapi tanpa melihat pada variasi informasi awal efek prosedur terhadap penilaian keadilan distributif signifikan. Hasil analisis ini juga menegaskan kembali hasil analisis sebelumnya yang membuktikan hipotesis ketiga. Di sini tampak bahwa prosedur berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural dan perbedaan distribusi hasil sewa atau distribusi berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif.

Tabel 7
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif dengan Pemberian Informasi Prosedural Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	224,45	1	224,45	33,33	0,001
Distribusi	185,811	2	92,91	13,80	0,001
Prosedur x Distribusi	41,03	2	20,52	3,05	0,050
Eror	1171,70	174	6,73	-	-
Total	6133,00	180	-	-	-

Selanjutnya adalah analisis untuk membuktikan hipotesis kelima. Hasil-hasil analisisnya dideskripsikan di bawah ini, sedangkan angka rata-ratanya ditampilkan pada Tabel 8 dan ringkasan hasil analisis statistiknya dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 8
Rata-Rata Penilaian berdasarkan Perbedaan Prosedur dan Hasil Sewa dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

Dependen Variabel	Hasil	n	Prosedur		
			Wajar	Keras	Total
Keadilan Distributif	>	30	6,07	6,40	6,23
	=	29	6,14	5,40	5,76
	<	30	4,07	3,79	3,93
	Total	89	5,42	5,21	5,31
Keadilan Prosedural	>	30	8,43	2,77	5,60
	=	30	8,52	2,57	5,49
	<	29	8,20	1,72	5,02
	Total	89	8,38	2,36	5,37

Kelompok yang mendapat informasi tentang distribusi hasil sewa dan melakukan penilaian keadilan distributif terlebih dulu memiliki persebaran rata-rata penilaian keadilan seperti tercantum pada Tabel 8. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa untuk penilaian keadilan distribusi dipengaruhi oleh distribusi hasil sewa (F distribusi = 17,83; p = 0,001), tidak dipengaruhi oleh prosedur (F prosedur = 0,46; p = 0,498), maupun interaksi keduanya (F interaksi = 0,87; p = 0,420). Senada dengan itu, penilaian keadilan prosedural hanya dipengaruhi oleh prosedur (F prosedur = 378,20; p = 0,001), tidak dipengaruhi oleh distribusi hasil sewa (F distribusi = 1,72; p = 0,182), dan interaksi antara distribusi dengan prosedur tidak signifikan (F interaksi = 0,58; p = 0,558).

Tabel 9
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Prosedural dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	1618,20	1	1618,20	378,20	0,001
Distribusi	14,73	2	7,37	1,72	0,182
Prosedur x Distribusi	5,00	2	2,50	0,58	0,558
Eror	735,93	172	4,28	-	-
Total	7504	178	-	-	-

Tabel 10
Hasil Analisis Variansi Lengkap untuk Penilaian Keadilan Distributif dengan Pemberian Informasi Distribusi Terlebih Dulu

Sumber	Jumlah Kuadrat	db	Rata-Rata Kuadrat	F	p
Prosedur	2,27	1	2,27	0,46	0,489
Distribusi	175,92	2	87,96	17,833	0,001
Prosedur x Distribusi	8,59	2	4,29	0,87	0,420
Eror	848,34	172	4,93	-	-
Total	6062	178	-	-	-

Seluruh isi skenario yang digunakan dalam penelitian ini tidak memasukkan indikasi kepentingan pribadi seperti kontrol, intensi protes, atau kepuasan seperti yang dimanipulasi dalam penelitian lain (Van den Bos, 1996,

1999; Van den Bos dkk., 1997b). Hal ini dilakukan dalam rangka membuktikan hipotesis kelima. Berdasarkan hasil analisis penelitian skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kelima** yang menyebutkan bahwa bila tidak ada indikasi kepentingan pribadi yang menonjol maka distribusi dan penilaian keadilan distributif yang dilakukan sebelum mengetahui prosedurnya tidak akan berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural **diterima**.

Dari dua analisis yang terakhir dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian keadilan prosedural dipengaruhi oleh prosedur, penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh distribusi. Prosedur juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan distributif, baik ketika informasi tentang prosedur diketahui lebih dulu maupun ketika informasi awal diabaikan. Ketika distribusi diketahui terlebih dulu maupun ketika informasi awal diabaikan, pengaruh distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural tidak signifikan. Elaborasi ini menunjukkan bahwa dari dua kaidah pokok tentang penyampaian informasi awal menurut teori keadilan heuristik yang diuji dalam penelitian ini, salah satu di antaranya sepenuhnya terbukti, sedangkan yang lainnya tidak terbukti. Kaidah yang dimaksud menyebutkan bahwa informasi dan penilaian awal akan mempengaruhi penilaian berikutnya. Ketika informasi dan penilaian awal adalah prosedural, hal itu berpengaruh terhadap penilaian distributif, tetapi ketika informasi dan penilaian awalnya adalah tentang distribusi, ternyata hal itu tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural.

Hipotesis keenam menyebutkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan keadilan distributif akan lebih kuat ketika tingkat kepuasan rendah atau sedang dibandingkan dengan ketika kepuasan tinggi. Untuk membuktikan hipotesis ini, data tentang kepuasan dikategorikan menjadi tiga untuk memperoleh kelompok responden dengan tingkat kepuasan rendah, sedang, dan tinggi. Karena persebaran data kepuasan cukup normal dengan rentang yang tidak terlalu lebar, digunakan indikator tendensi sentral (rata-rata dan deviasi standar) untuk membuat kategori yang dimaksud. Kategori tingkat kepuasan sedang adalah skor kepuasan sekitar nilai rata-rata. Hal ini dihitung dari angka rata-rata dikurangi satu deviasi standar hingga angka rata-rata ditambah satu deviasi standar. Dari perhitungan statistik diperoleh angka rata-rata sebesar 41,6 dan deviasi standar sebesar 6,0. Dengan demikian, kategori sedang adalah antara skor 36 (41,6 dikurangi 6 dengan pembulatan) hingga 48 (41,6 ditambah 6 dengan pembulatan). Kategori tingkat kepuasan rendah adalah kelompok responden

dengan skor kepuasan di bawah 36, sedangkan kategori tingkat kepuasan tinggi adalah kelompok responden dengan skor kepuasan di atas 48.

Hasil analisis dengan menggunakan teknik korelasi bivariat untuk setiap kelompok kepuasan menunjukkan bahwa hubungan antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif lebih tinggi ketika tingkat kepuasan rendah (0,582) dan sedang (0,604) dibandingkan dengan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11. Secara statistik perbedaan korelasi tersebut juga dapat dianalisis. Meskipun tampak berbeda, perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui signifikansinya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan koefisien korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif ketika tingkat kepuasan rendah (0,582) dan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) tidak signifikan. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang menelorkan nilai Z sebesar 1,84. Angka ini lebih kecil daripada yang disyaratkan untuk mencapai taraf signifikan 5 persen, yaitu nilai Z harus sama atau lebih tinggi dari 1,96. Sementara itu, perbedaan koefisien korelasi antara penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif ketika tingkat kepuasan sedang (0,604) dan ketika kepuasan tergolong tinggi (0,267) tergolong sangat signifikan. Uji perbedaan korelasi antara dua variabel terakhir ini menunjukkan angka Z sebesar 2,754. Dengan angka sebesar ini berarti ada perbedaan koefisien korelasi penilaian keadilan prosedural dengan penilaian keadilan distributif yang sangat signifikan antara kelompok yang memiliki kepuasan sedang dengan kelompok yang memiliki kepuasan tinggi.

Tabel 11
Korelasi antara Penilaian Keadilan Prosedural dengan Penilaian Keadilan Distributif dan Signifikansinya pada Tingkat Kepuasan yang Berbeda

Tingkat kepuasan	Jml kasus (n)	Korelasi	p
Rendah	55	0,582	0,001
Sedang	347	0,604	0,001
Tinggi	69	0,267	0,001

Dari hasil-hasil analisis seperti yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keenam** yang menyatakan bahwa ketika kepuasan tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih rendah daripada ketika kepuasan tersebut sedang atau rendah **tidak**

sepenuhnya diterima. Perbedaan peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan tinggi dan sedang ternyata signifikan. Dengan kata lain, **hipotesis 6a diterima.** Sementara itu, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan rendah lebih tinggi bila dibandingkan dengan peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif pada kelompok dengan tingkat kepuasan tinggi, tetapi perbedaan keduanya tidak signifikan. Dengan demikian, **hipotesis 6b ditolak.**

Dari tiga pendekatan penelitian yang digunakan di sini hasilnya menunjukkan keterkaitan yang dapat didiskusikan dan disintesis sebagai berikut. Pertama, masalah keadilan bukan hanya sekedar isu, tetapi merupakan permasalahan yang secara objektif ada dan dirasakan oleh anggota masyarakat. Permasalahan keadilan sosial muncul pada relasi sosial yang bersifat baik vertikal maupun horizontal. Keadilan dalam relasi sosial vertikal akan menyangkut keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional, sedangkan dalam relasi sosial horizontal keadilannya sering disebut sebagai keadilan interaksional dan keadilan komutatif atau pertukaran. Untuk selanjutnya penelitian ini lebih memfokuskan pada keadilan dalam relasi sosial vertikal. Pada semua jenis keadilan selalu ada potensi munculnya ketidakadilan yang penyebabnya sangat kompleks, penyebabnya, tetapi dalam penelitian ini ditemukan dua penyebab pokok yaitu upaya untuk melakukan dominasi serta marginalisasi atas pihak lain dan upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Kedua dorongan tersebut sering menjadi satu dan sulit dipisahkan.

Kedua, ketidakadilan yang dirasakan baik oleh informan maupun responden penelitian menyebabkan ketidakpuasan, tetapi belum menimbulkan konflik terbuka. Penilaian ketidakadilan muncul bersama-sama dengan rendahnya kesejahteraan, harapan, dan rendahnya keterlibatan anggota masyarakat dalam menentukan nasib mereka. Dari tiga faktor ini, harapan biasanya akan menyebabkan munculnya penilaian tidak adil bila tarafnya tinggi. Di lapangan harapan cenderung rendah karena mereka telah lama diperlakukan tidak adil dan menilai rendahnya peluang keberhasilan untuk memperjuangkan keadilan. Meskipun demikian, masih ada sekelompok orang yang terus memperjuangkannya. Hal ini tampak pada perubahan orientasi pengurus

kelompok tani yang mulai kritis dan berani menyampaikan pendapat serta terus melakukan negoisasi dengan pihak PTPN.

Ketiga, baik dalam relasi sosial vertikal maupun horizontal perempuan lebih sering diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih sering menjadi korban ketidakadilan. Ada indikasi yang cukup kuat bahwa secara struktural dan kultural diperlakukan demikian yang menyebabkan mereka terpaksa menerimanya sebagai sesuatu yang *seharusnya begitu* (Desmairis & Curtis, 1997; Devasia & Devasia, 1990; Jackson dkk., 1992; Witt & Nye, 1992). Permasalahan yang menyedihkan ini berlanjut pada model penilaian keadilan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaan menunjukkan bahwa harapan masih menjadi faktor yang penting bagi perempuan sementara kesejahteraan lebih penting pada kelompok laki-laki. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa sementara laki-laki mempermasalahkannya dalam tataran realitas, perempuan masih berkuat pada harapan yang masih sulit diwujudkan.

Keempat, dalam relasi sosial vertikal peran interaksi sosial tetap penting, bahkan menjadi faktor terpenting dalam menjelaskan penilaian keadilan prosedural dan distributif. Dominasi peran penilaian keadilan interaksional ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat munculnya konflik terbuka (Ball dkk., 1994; Donovan dkk., 1998; Skarlicki & Folger, 1997). Variabel ini tidak secara langsung dapat menjelaskan dampak baik dari penilaian keadilan prosedural maupun distributif seperti kepuasan dan konflik karena orientasi akan kepentingan pribadi tidak cukup menonjol. Artinya, ada indikasi yang kuat bahwa model keadilan yang berkembang adalah model nilai-nilai kelompok (Tyler, 1989, 1994). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa meskipun pola relasi sosialnya bersifat vertikal dan responden penelitian dalam posisi subordinat, mereka masih berusaha menjaga nilai-nilai kelompok dan identitasnya sebagai satu bagian komunitas bersama-sama dengan PTPN. Terbentuknya orientasi seperti ini tidak lepas dari pengalaman sejarah masyarakat setempat yang tidak bisa melupakan peran PTPN pada masa lalu. Perkembangan masyarakat di enam desa penelitian yang relatif lebih baik dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan yang sama pernah ditopang oleh tumbuhnya perkebunan tembakau di sana (Padmo, 1994, 1998). Pada sisi lain, pihak PTPN dengan keterbatasannya juga berusaha terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.

Kelima, kepentingan diri tampak dalam observasi penelitian lapangan, tetapi dalam model penilaian keadilan yang dikembangkan di penelitian ini

menjadi tidak menonjol. Hasil ini menjadi bagian penting dalam mengembangkan penjelasan penilaian keadilan secara kognitif melalui penelitian skenario yang dilakukan. Skenario-skenario dalam penelitian ini dirancang untuk menonjolkan model penilaian keadilan interaksional dan kerangka berpikir heuristik dalam menilai keadilan. Hasil penelitian sebelumnya (Van den Bos, 1996) menunjukkan bahwa penilaian keadilan heuristik dipengaruhi oleh orientasi kepentingan pribadi. Ketika orientasi kepentingan pribadi menonjol, orientasi ini menjadi bagian dari penilaian keadilan. Sebaliknya, penelitian ini mengeliminasi orientasi kepentingan pribadi dan menonjolkan orientasi relasional. Hasilnya menunjukkan bahwa orientasi ini pun berpengaruh terhadap penilaian keadilan heuristik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara kedua penelitian. Dalam penelitian yang menonjolkan orientasi kepentingan pribadi, peran distribusi terhadap penilaian keadilan prosedural menjadi signifikan. Sebaliknya, penelitian ini menonjolkan orientasi relasional dan hasilnya menunjukkan bahwa distribusi tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Hasil penelitian ini tidak menyanggah teori keadilan heuristik yang dikembangkan oleh Van den Bos (1996, 1999, 2000; Van den Bos dkk., 1997, 1999), tetapi mengelaborasinya lebih jauh. Teori keadilan heuristik tidak salah, tetapi belum lengkap. Hal ini dapat dimaklumi karena teori itu terus dikembangkan¹. Perkembangan teori ini akan sangat menarik karena sesuai dengan sifatnya, proses berpikir heuristik dalam psikologi kognitif lebih menekankan pada pola-pola dari proses tersebut daripada ketentuan atau hukum-hukum yang ketat seperti dalam model algoritme.

Keenam, dalam penelitian ini kepentingan pribadi muncul pada kelompok dengan tingkat kepuasan tergolong rendah. Model penilaian keadilan berdasar kepentingan pribadi dalam penelitian ini memiliki dua indikasi yaitu besarnya peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif pada satu sisi, serta besarnya peran penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan pada sisi yang lain. Peran kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif pada satu peran penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan makin mengecil dan menjadi tidak signifikan dengan meningkatnya kepuasan. Perubahan ini mengarah pada model relasional. Perubahan ini mengindikasikan adanya arah yang berlawanan antara model

¹ Dalam kontak e-mail dengan Van den Bos diperoleh keterangan bahwa ia tengah menyiapkan penelitian lanjutan dan publikasi dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan teori heuristiknya. Beberapa manuskrip yang belum dipublikasikan telah ia kirimkan kepada penulis.

kepentingan pribadi (Thibaut & Walker, 1975) dengan model nilai-nilai kelompok (Lind & Tyler, 1988).

Akhirnya, penggunaan metode yang lebih dari satu dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif. Sejauh ini sering terjadi perbedaan dalam mengaplikasikan metode yang menyebabkan munculnya perdebatan berkepanjangan. Seperti dikatakan Hamel dkk. (1993) bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada sisi lain, di antara berbagai metode tersebut terdapat kaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Penelitian ini dirancang menggunakan tiga metode yang masing-masing saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan. Langkah ini sengaja diambil karena peneliti berpendapat bahwa kecenderungan mempertentangkan metode satu dengan lainnya secara ilmiah perlu, tetapi pada tatanan praktik hal itu sering menjadi hambatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode yang sama dapat dihasilkan sesuatu yang berbeda. Hal ini ditemukan pada waktu membuktikan hipotesis keenam. Hipotesis ini sejak awal dirancang untuk membuktikan adanya indikasi kepentingan pribadi yang diharapkan pada bagian sebelumnya (hipotesis pertama) juga muncul. Ketika hasil analisis di bagian awal tidak menunjukkan indikasi kepentingan pribadi, eksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan data dan metode analisis yang sama ternyata muncul indikasi itu. Di sini perlu digarisbawahi bahwa setiap metode mempunyai kekuatan atau keunggulan dan pemanfaatan keunggulan-keunggulan metode tertentu seharusnya lebih ditekankan dibandingkan dengan mengorek-ngorek kelemahan yang seharusnya ditutupi dengan keunggulan dari metode lain.

8. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut. Secara umum, model penilaian keadilan yang sesuai dengan kondisi di lapangan adalah model penilaian keadilan yang didominasi orientasi relasional. Dalam model ini penilaian keadilan prosedural dan penilaian keadilan distributif sangat tergantung pada penilaian keadilan interaksional. Prosedur dan distribusi akan dinilai adil dan menghasilkan kepuasan bila ada interaksi sosial yang dinilai adil. Dengan menempatkan keadilan prosedural dan keadilan distributif sebagai komponen pokok keadilan, kesimpulan tersebut berarti pula bahwa keadilan dipengaruhi oleh relasi sosial yang berkembang. Keadilan akan tercapai bila dalam suatu masyarakat nilai-nilai sosial dijunjung tinggi dan

dilaksanakan oleh anggota-anggota dan pemimpinnya. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi relasi yang saling menghargai, tingkat kepercayaannya tinggi, dan pemegang otoritas dalam kelompok dapat bersikap netral. Peran nilai-nilai tersebut dominan, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Menurut model yang ditemukan, kesejahteraan dan aspirasi, dalam bentuk harapan, juga menjadi bagian yang penting, meskipun tidak sebesar peran relasi sosial. Artinya, tanpa ada kesejahteraan maka keadilan sulit dioptimalkan dan harapan yang terlalu tinggi pada situasi saat ini akan menyulitkan optimalisasi keadilan.

Di samping kesimpulan umum tersebut, ada beberapa kesimpulan lain yang dapat dirinci berikut ini.

Pertama, keadilan dalam kajian psikologi sifatnya subjektif, dalam hal ini bentuknya adalah penilaian keadilan. Meskipun subjektif, penilaian tersebut terbukti konsisten dengan kondisi objektifnya. Konsistensi ini akan meningkat dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok. Ketika secara objektif keadaan tergolong adil maka akan dinilai adil dan ketika keadaan secara objektif tidak adil maka akan dinilai tidak adil juga. Hal ini berbeda dengan ketika kepentingan pribadi menonjol. Dalam keadaan yang demikian maka penilaian bisa tidak sesuai dengan kondisi objektifnya. Artinya, prosedur atau distribusi yang secara objektif adil dapat dinilai tidak adil karena ada kepentingan pribadi. Penilaian yang didasarkan kepentingan pribadi menggunakan prinsip-prinsip proses berpikir heuristik yang mengandalkan pada informasi yang tersedia. Pada penelitian ini prinsip proses berpikir heuristik ini terbukti kurang efektif digunakan dalam menilai keadilan yang didasarkan pada orientasi nilai-nilai kelompok. Informasi yang tersedia bukan satu-satunya dasar menilai keadilan, nilai-nilai sosial menjadi dasar utama dalam penilaian keadilan.

Kedua, kondisi yang dialami pada waktu penelitian berlangsung cenderung dinilai tidak adil, baik dalam hal prosedur, distribusi, maupun interaksi sosialnya. Ketidakadilan muncul dalam pola relasi sosial yang bersifat horizontal atau pada posisi sosial yang setara dan yang bersifat vertikal. Ketidakadilan secara horizontal, antara lain, ditemukan pada proses pemberian bantuan di antara sesama anggota masyarakat, yang menurut istilah setempat disebut *nyumbang*. Dalam hubungan ini prinsip kesetaraan (ekualitas) justru sering dirasakan sebagai ketidakadilan karena kemampuan untuk melakukannya antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Pola hubungan resiprokal dalam relasi horizontal ini juga dinilai tidak adil karena kesetaraan yang dimaksud berubah sesuai dengan

perubahan waktu, sedangkan kemampuan orang untuk melaksanakannya sering tidak sejalan dengan perubahan itu. Pada relasi sosial vertikal, yaitu pada posisi sosial yang tidak setara, ditemukan ketidakadilan antara pekerja dengan pemilik perusahaan (juragan) dan antara pemilik sawah dengan penguasa yang direpresentasikan oleh PTPN.

Ketiga, ketidakadilan yang berlangsung tersebut secara objektif lebih berat menimpa perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena perempuan dikondisikan secara kultural dan struktural untuk menerima ketidakadilan tersebut sebagai apa adanya atau justru sesuatu yang adil. Dengan demikian, perempuan mengalami ketidakadilan ganda, yaitu secara objektif diperlakukan tidak adil dan secara sosial kultural dikondisikan untuk merasakan ketidakadilan sebagai sesuatu yang adil.

Keempat, penilaian keadilan prosedural sangat ditentukan oleh penilaian keadilan interaksional. Artinya, prosedur dinilai adil manakala ada interaksi yang adil. Khusus pada kelompok laki-laki, anteseden penilaian keadilan prosedural ditambah dengan kesejahteraan dalam arti mereka yang merasa tingkat kesejahteraannya tinggi akan makin kritis terhadap prosedur yang ada. Bagi kelompok perempuan, anteseden penilaian keadilan prosedural yang penting selain penilaian keadilan interaksional adalah harapan. Artinya, perempuan yang memiliki harapan tinggi akan kritis terhadap prosedur yang ada.

Kelima, penilaian keadilan distributif memiliki anteseden yang lebih banyak dibandingkan dengan penilaian keadilan prosedural. Anteseden tersebut meliputi penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan interaksional, harapan, dan kesejahteraan. Pada kelompok laki-laki harapan tidak berperan secara signifikan, sementara pada kelompok perempuan peran kesejahteraan justru yang tidak signifikan.

Dari kesimpulan keempat dan kelima tersebut, satu hal lagi dapat disimpulkan berkaitan dengan posisi perempuan dan laki-laki dalam menilai keadilan. Dalam menilai keadilan laki-laki cenderung dipengaruhi oleh kesejahteraan, sedangkan perempuan dipengaruhi oleh harapannya. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih beorientasi pada kesejahteraan dalam menilai keadilan. Fakta ini juga menjelaskan kesimpulan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan ganda yang dapat disebut juga deprivasi ganda. Dengan adanya peran harapan terhadap penilaian keadilan

(ketidakadilan) pada perempuan berarti mereka mengalami juga deprivasi aspirasional.

Keenam, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif lebih besar dibandingkan dengan peran penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural. Dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok, penilaian keadilan prosedural berperan besar terhadap penilaian keadilan distributif dan penilaian keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural. Peran yang besar tersebut juga ditemukan pada kelompok yang tingkat kepuasannya sedang dan rendah, sementara pada kelompok yang tingkat kepuasannya tinggi, peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif tidak signifikan. Ketika orientasi kepentingan pribadi lebih menonjol, tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh penilaian keadilan distributif terhadap penilaian keadilan prosedural, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian lain.

Ketujuh, kontrol merupakan variabel yang paling rendah perannya terhadap penilaian keadilan prosedural dan distributif. Peran kontrol menjadi signifikan ketika kepuasan tergolong rendah. Pada saat kepuasan rendah, peran kontrol dalam model penilaian keadilan menjadi paling penting dibandingkan dengan ketika kepuasan sedang dan tinggi. Makin rendah tingkat kepuasan makin besar peran kontrol dalam model penilaian keadilan. Dengan menggunakan ketidakpuasan sebagai salah satu indikator dari ketidakpastian, maka ketidakpastian menyebabkan peningkatan kepedulian terhadap keadilan. Kepedulian terhadap keadilan ini berkaitan dengan upaya untuk menempatkan diri agar lebih berperan dalam prosedur yang berlaku dan dalam mengupayakan agar secara pasti dirinya mendapatkan bagian yang adil dalam suatu sistem distribusi.

Kedelapan, penilaian keadilan prosedural dan distributif bermuara pada kepuasan. Secara umum efek penilaian keadilan distributif terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan peran penilaian keadilan prosedural, tetapi bagi laki-laki justru sebaliknya. Pada kelompok laki-laki, prosedur yang adil akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang adil. Bagi kelompok perempuan, hanya penilaian keadilan distributif yang memiliki efek signifikan terhadap kepuasan.

9. Rekomendasi

Dari model keadilan yang dikaji ternyata yang paling menonjol adalah peran penilaian keadilan interaksional. Esensi dari keadilan yang bersumber pada nilai-nilai kelompok ini adalah kesejajaran dalam relasi sosial. Konsekuensinya, tuntutan akan relasi sosial yang dikembangkan sekarang dan pada masa-masa mendatang menekankan pada kesejajaran posisi di antara pihak-pihak yang terlibat. Implikasi dari tuntutan ini tidak hanya posisi yang lebih seimbang dan sejajar tersebut, tetapi juga makin kecilnya jarak sosial di antara mereka. Oleh karena itu, pandangan bahwa buruh atau petani merupakan kelompok marjinal, misalnya, tidak dapat menyelesaikan masalah sosial yang sering muncul. Penghargaan terhadap mereka dalam bentuk kebijakan yang menyangkut posisi mereka harus lebih mengunggulkannya dibandingkan dengan keadaannya yang sekarang. Kebijakan yang menyangkut distribusi seperti upah buruh, harga sewa lahan, dan harga gabah milik petani masih belum memadai. Persoalan ini tidak akan pernah selesai selama dalam relasi sosial yang melibatkan mereka tidak dirancang untuk menempatkannya pada posisi yang sejajar dan dengan jarak yang dekat.

Dalam relasi sosial vertikal, seperti dalam hubungan petani dengan PTPN X dan antara buruh dengan pemilik perusahaan konveksi, keadilan prosedural meningkat perannya di samping dua keadilan yang sudah disebutkan. Buruh dan petani telah diperlakukan dengan penghargaan yang tidak memadai. Mereka seharusnya boleh mengekspresikan keinginan mereka yang merupakan bagian dari haknya. Dalam kurun waktu yang lama mereka adalah orang yang tidak diberi kesempatan untuk itu. Akibatnya, mereka tidak mudah melakukannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak perlu diberi kesempatan itu. Justru dalam rangka memberikan penghargaan pada mereka sehingga mereka akhirnya akan mendapatkan distribusi yang adil, perlu ada upaya agar mereka dapat melakukannya. Upaya untuk ini sudah mulai dilakukan, kelanjutan dan intensitasnya perlu diperhatikan.

Dalam relasi sosial horizontal keadilan interaksional dan keadilan distributif tampak menonjol. Untuk mencapai tingkat kehidupan sosial yang serasi, pertimbangan yang berkaitan dengan kedua keadilan tersebut terintegrasikan dengan baik. Pola distribusi yang ekual dapat diterapkan pada masyarakat yang secara sosial ekonomis homogen. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti penduduk usia lanjut, orang cacat, dan orang miskin yang justru perlu diberi

perlakuan, melalui distribusi, sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip ini telah berjalan dalam berbagai bentuk bantuan dan terbukti bermanfaat. Dalam proses pertukaran sosial, pertimbangan ini kurang diperhatikan. Dengan prinsip ekualitas, pertukaran akan menjadi berat bagi kelompok miskin karena mereka tidak dapat masuk proses pertukaran tersebut akibat keterbatasan alat tukar yang dimilikinya. Oleh karena itu, prinsip distribusi sesuai dengan kebutuhan dan prinsip pertukaran sesuai dengan kemampuan lebih tepat dikenakan bagi mereka. Secara relasional upaya ini didasarkan pada prinsip penghargaan. Akan lebih lengkap lagi bila dilandasi oleh netralitas sehingga dalam identifikasi kelompok yang membutuhkan maupun menghitung kebutuhan tidak terjadi bias dan pemihakan. Di samping itu, harus ada juga landasan kepercayaan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat dipercaya. Para pemimpin formal dan nonformal setempat diharapkan dapat memprakarsai pelaksanaan atas ide-ide ini.

SUMMARY
THE ANTECEDENTS, PROCEDURAL JUSTICE,
DISTRIBUTIVE JUSTICE, AND THEIR EFFECTS

1. Background and Problems

There are many problems facing Indonesia today. Of all the prevailing various social, economic, and political problems, are attributed mainly to the little attention paid towards justice as one of the foundations of development. When the New Era government regime was still in control, injustice systematically occurred in various aspects of life. Economically, a few large-scale businessmen or conglomerates controlled the huge capital and assets while at the same time there was millions of poor people hardly possessed no capital at all (Effendi, 1986; Sjahrir, 1986). Businessmen became very rich because the government offered a lot of facilities such as giving the opportunity to practice monopoly and channeling of immense capital with low interest charges to providing guarantees that huge profits were to be recouped. On the contrary, facilities for poor people such as traders in the informal sector and farmers gradually declined even became entirely nonexistent (Mubyarto, 1999; Wiradi, 2000). There are many other stories such as the aforementioned that reflect injustice. What is also reflected here is that the wielding of a lot of political power by the government causes a lot of suffering for the people. Authorities become the source of injustice (Van den Bos, 2000; Van den Bos et al, 1998).

Today, despite many attempts to make changes have been made, various forms of injustice still occur. Those occupying high social, economic, or political strata continue to promote their own interests and the law of the jungle is very much in evidence (Dick, 2001). For those in the low social strata are left on their won. The distance between the two social strata living in the same unitary state is left to continue unattended to (Mubyarto, 1999). Efforts to forge links between the two can be almost non-existent.

Another problem related to the issue is conceptual understanding. For some groups of society who want the change often do not know from where and how to begin. They are moved into action basing on their knowledge, abilities, and interests. This leads to euphoria; a condition if not well underpinned by intelligent and critical thinking will be the harbinger of anarchy. This phenomenon has already

occurred and apparently will likewise recur in the future. The goal of implementing justice, democracy, good governance, social harmony, economic growth, and so forth, becomes unclear.

In social psychology discussion and research on justice was initially very much influenced by the reaction of the individual on the principle applied (Greenberg, 1996). The aforementioned studies deal with the reaction on the distribution system. Later, the studies on the reaction against the procedure are emerged.

A comprehensive theory of justice was proposed by Tyler (1989, 1994). However, such a model does not establish a direct link between procedural and distributive justice as suggested by Gilliland (1994). In that vein, therefore, the focus of the research is to establish a link between the two. It follows from the foregoing that the theoretical foundations used in this research constitute modification on Tyler's model (Figure 1) as a synthesis and modification of the studies, theories, and previous research findings.

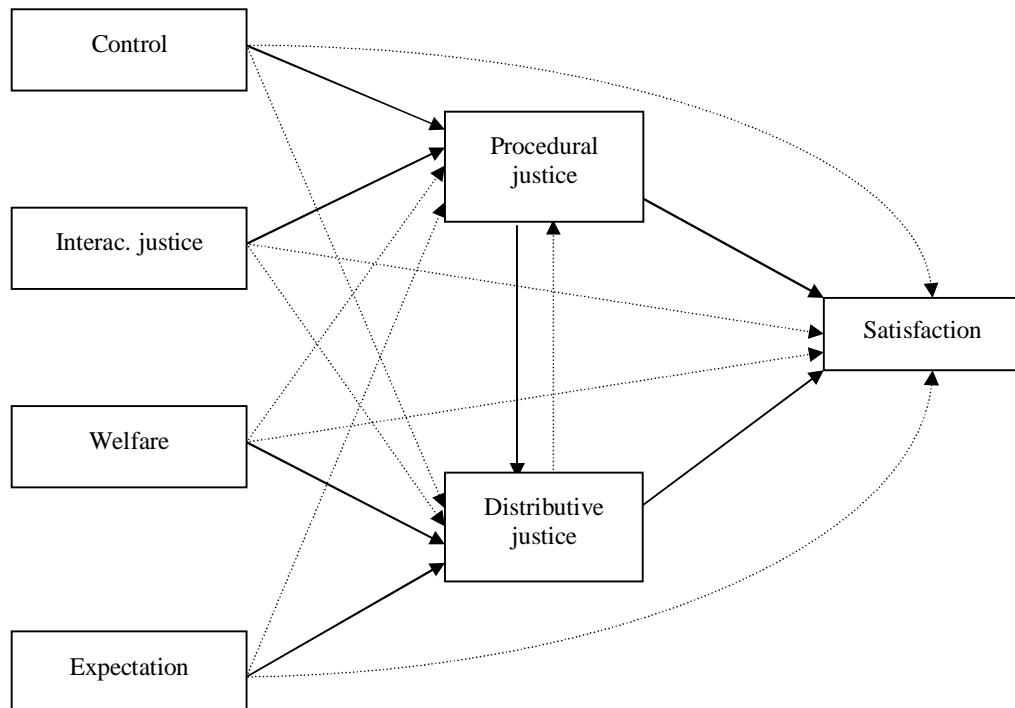


Figure 1
Modified Justice Model of Tyler's
 (1994, p.856)

Based on the earlier studies, it can be concluded that the procedural justice cannot be extricated from the involvement of other people as well as the role played by the person in question, especially in carrying out control. Meanwhile, the distributive justice is very much influenced by what is expected and obtained. From such theories and research findings as mentioned before, it can be concluded that procedural and distributive justice have different antecedents (in Figure 1 indicated by the bold arrows). Even if there are variables that influence both forms of justice, such influence is likely to be different and will tend to be small (in Figure 1 indicated by broken arrows). Thus, the first hypothesis (Hypothesis 1) states:

The antecedents of distributive justice differs from its of procedural justice.

The above hypothesis is general. One of the theories on procedural justice states that the important factor that influences procedural justice is control. Quite different from such a theory that has a self-interest orientation, the group values model puts more emphasis on the importance of interactional justice in evaluating procedural justice. In practice (see Tyler, 1994), both factors can jointly influence procedural justice. Therefore, particularly in connection with the antecedents of procedural justice, hypothesis number one can be made more specific by breaking it into two hypotheses as here under.

Hypothesis 1a:

Control as an antecedent affects procedural justice significantly.

Hypothesis 1b:

Interactional justice as an antecedent influences procedural justice significantly.

Different from procedural justice evaluation, which is studied from two viewpoints, there is a theory that explains antecedent of distributive justice, which is called the resource-based model. According to this model there is one factor or antecedent that explains distributive justice, which is the evaluation of the available resources, which are operationalized into two variables: welfare and expectation (Tyler, 1994). In that way, each of the two variables will play a role in the distributive justice with diametrically opposing influences as discussed in the relative deprivation theory. Welfare had a positive effect while expectation has a

negative influence. Accordingly, the first hypothesis, especially as regards distributive justice, can also be made more specific as here under:

Hypothesis 1 c:

Welfare constitutes an antecedent, which has positive effect on distributive justice.

Hypothesis 1 d:

Expectation constitutes an antecedent, which has a negative effect on distributive justice.

On the individual level, any distribution will be preceded by an analysis process, including the decision making process. In social life, such processes are synonymous with procedure. This also applies to the perceived justice. Generally, the procedure precedes distribution. In that case, distributive justice is to a great extent influenced by procedural justice. This possibility is proved and confirmed by heuristic theory of cognitive process (Van den Bos, 1996, 1999, 2001). Particularly in relation to perceived justice, heuristic theory adds that procedure evaluation is easier to do than distributive evaluation. The latter will be easy to do if there is some comparison. As such, explanations based on psychology about distributive justice are often associated with concepts on social comparisons (Folger et al., 1983; Mark and Folger, 1984; Master and Smith, 1987). Being easier to evaluate procedural justice than distributive justice provides an opportunity for increasing the role of procedural justice in evaluating distributive justice.

The pattern of relationship between procedural and distributive justice is proved not to be of one direction (Brockner and Wiesenfield, 1996; Van den Bos et al., 1999). Basing on the self-interest model on procedural justice it is proved that such an evaluation is to a large extent influenced by efforts to obtain benefits (Lind and Tyler, 1988). So, the influence of distributive justice on procedural justice emanates. The fulfillment of self-interest will increase distributive justice roles, which will influence on procedural justice.

If the relationship between procedural and distributive justice is reciprocal, it must then be found out the magnitude of the influence of one on the other. It has already been stated that the influence of procedural justice on distributive justice is in the mainly caused by two things, one being that the sequence of an event that generally puts procedure first, and the other that heuristically procedure is easier to

evaluate which raises the probability that procedural justice will serve as reference for distributive justice. Further more it can be said that the influence of distributive justice on procedural justice is actually just a part of self-interest orientation. Therefore, the influence of procedural justice on distributive justice will be larger than the influence of the reversed form. The **second hypothesis** can thus be stated as follows:

If these two relationships are viewed as reciprocal, the effect of procedural justice on distributive justice is bigger than the effect of the distributive justice on procedural justice.

Providing an evaluation constitutes a cognitive process. To conduct an evaluation, principles of processing information will have some influence too. This process requires a lot of information to be able to conduct an evaluation. The problem is that the information necessary is not always available, and even if it is available sometimes it is inadequate. In such a situation, according to heuristic theory of justice (Van de Bos et al., 1997a, 1997b) and social comparison theory (see Master and Smith, 1987), people will always look for a comparison as the basis for an evaluation. In case information on the comparison is not available, the evaluator will try to be as objective as possible in making the evaluation even though norms used as the basis for the evaluation are subjective. According to the heuristic theory of justice to be objective an individual will use any reference that is available that is he will evaluate procedural justice on the basis of the objectivity of the procedure and will evaluate distributive justice on the basis of the objectivity of the distribution. It means that generally people consider a certain procedure as just if the procedure is just as it is and will evaluate distribution as just if the distribution is just as it is.

Inline with the explanation, **the third hypothesis** can be formulated as follows:

In an objective sense procedure will influence procedural justice and distribution influence distributive justice. A just procedure will be regarded to be higher than an unjust one, and distribution that is just will be regarded as higher than unjust distribution.

The heuristic theory of justice states that evaluating procedural justice is easy to undertake. This is based on the assumption that a just procedure provides certainty the just distribution, and people pay attention to justice because of the

desire to obtain certainty (Van den Bos, 1996; Van den Bos and Miedema, 2000), including the certainty of getting one's share (distribution) that is just. The issue of the sequence of evaluation according to the heuristic theory on justice evaluation is considered an important factor. The influence of procedural justice on distributive justice does not only occur simply because of the nature and higher certainty obtained from the procedure which induces people to evaluate distributive evaluation on the basis of procedural justice, but also the factor of sequence. This issue becomes an important element in the cognitive process which tends to digest information on the basis of the sequence received. Hence, if the procedure is known before hand, such procedure will not only influence the procedural justice, but will also have influence on the distributive justice. This conclusion becomes **the fourth hypothesis**, which is formulated as hereunder:

When the procedure is known before hand, such a procedure will have an influence on distributive justice.

Will the sequence of information as stated above has an effect if the distribution is known before hand, and distributive justice evaluation is carried out first? The heuristic theory of justice concludes that when the procedural justice precedes distributive justice evaluation, the former will be influenced (Van den Bos, 1996). Similar expectation was propounded in the attribution theory (Brockner and Wiesenfeld, 1996; Schroth and Shah, 2000). Unfortunately, this view has not been proved with the exception of one research finding (Van den Bos, 1996). Besides that, the conclusion reached is based on the concept of impression management (Greenberg, 1996) and primacy effect (Van den Bos et al., 1999). Furthermore, the same thing will occur if self-interest becomes predominant (Lind and Tyler, 1988). The last seems to play the largest role. On the contrary, if this happens, there will be cognitive dissonance (Festinger, 1954). Meanwhile, individual will generally try to avoid cognitive dissonance (Festinger, 1969; Harmon-Jones et al., 1996). Having a similar opinion, according to the referent cognition theory (Folger, 1987; Folger et. al., 1983; Mark and Folger, 1984; Skarlichi, 1997), every individual tries to make an objective evaluation as far as possible. If the reference for evaluating procedural and distributive justice is inadequate, the evaluator will make justification on the basis of prevalent values or morality and such people will endeavor to ensure that their evaluation brings positive consequences for them in the future. All this is different from the

self-interest orientation, which influences the evaluation of justice. For that reason, different from the proposition of the heuristic theory of justice of van den Bos (1996) and attribution theory (Brockner and Wiesenfeld, 1996; Schroth and Shah, 2000), this research will estimate **the fifth hypothesis**, which is formulated as follows:

If there is not an indication of the predominance of self-interest, the distribution and distributive justice evaluation conducted before knowing the procedure will not have any influence on procedural justice.

The evaluation of justice constitutes a concept that is different from satisfaction with procedure and distribution. The two have a strong correlation (Tyler, 1994; Van den Bos et al., 1997a). Satisfaction that is referred here is not limited to mere satisfaction with either procedure or distribution. In formal social relationships, one of which is called the social contract, such as hiring land, will then induce the emergence of satisfaction from the social relationship or social contract in general. Satisfaction will consist of satisfaction with the procedure, distribution, and with the relationship or social contract.

According to the self-interest model, an individual prioritizes his own interest in making procedural and distributive evaluation. Whenever his private interest is fulfilled, the evaluation given is that the undertaking is a just one. Self-interest is to large extent fulfilled through obtaining a large share out of distribution. In such a situation he will obtain high satisfaction. On the other hand, high self-interest generally tends to ignore other issues such as procedure provided if the individual obtains some benefits, which will be reflected in his satisfaction. From the foregoing, therefore, **the sixth hypothesis** is stated as follows:

When satisfaction is high, the role of procedural justice to distributive justice is smaller than is the case when satisfaction is either moderate or low.

As was the case with the first hypothesis, hypothesis number six can be made more specific by breaking it into two parts as follows:

Hypothesis 6a:

When satisfaction is high, the role of procedural justice to distributive justice is smaller than the case when satisfaction is moderate.

Hypothesis 6 b:

When satisfaction is high, the role of procedural justice to distributive justice is smaller than is the case when satisfaction is low

It has to be noted that the above hypotheses basically constitute part of the psychological justice model. Accordingly, results from this research come out of a proving process of several hypotheses if it is drawn back into an integrated model to produce a model that suits the conditions in the field of research. This will be in line with the main objective of this research.

5. Method**a. Research design**

The design of this research uses the design suggested by Yin (1994) who recommends the use of three types of research in constructing or proving a theory (Figure 2). This study will use two types of field research, case study and survey, along with scenario study designed in form of an experiment. Case study will be conducted at the beginning, followed by survey and scenario study. The case study constitutes the initial step that provides the issues that are related to the already existing investigation and theory. The purpose of the survey is to prove hypotheses one, two, and six, while scenario study was conducted to test hypotheses number three, four, and five.

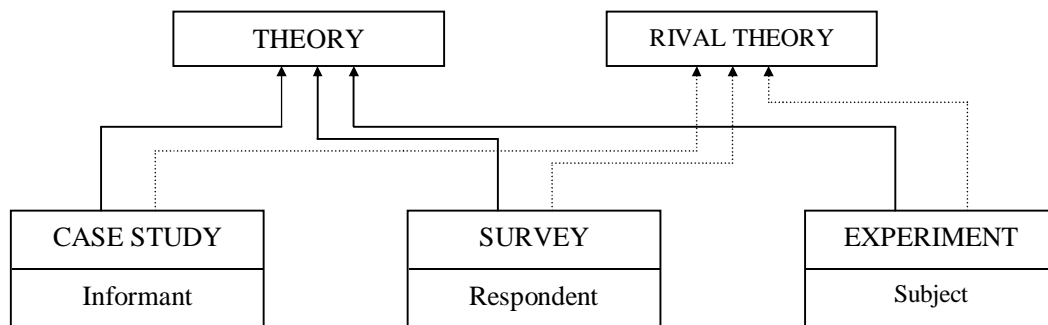


Figure 2
Research Models for Making Inferences
(Yin, 1994, p. 31)

of the conducting justice judgment by the subject. This manipulation consists of two sequences. The first sequence is where procedure and the procedural justice evaluation followed by distribution and distributive justice evaluation. The second

sequence will be distribution and distributive justice evaluation, which is followed by procedure and the procedural justice evaluation. To test the magnitude of the influence of the first sequence on procedural justice evaluation compared to the real life situation it is then deemed pertinent to carry out the manipulation of procedure into two categories-just and unjust. In the meantime, distribution will be categorized into three groups, which will be lower than, equal to, and higher than the normative size. Briefly the design for the scenario research is depicted as appears in Table 1. The components of the scenario was developed from the study findings in the field studies.

Table 1
Scenario Design

Presentation	Procedure	Distribution		
		Bigger	Equal	Smaller
Distributive-Procedural	Fair	Scenario I	Scenario II	Scenario III
	Unfair	Scenario IV	Scenario V	Scenario VI
Procedural-Distributive	Fair	Scenario VII	Scenario VIII	Scenario IX
	Unfair	Scenario X	Scenario XI	Scenario XII

b. Variables

Antecedent variables of the procedural and distributive justices are welfare, expectation, control, and interactional justice. The impact of evaluation is the satisfaction.

For the scenario study independent variable is the procedure and distribution of outcome. The dependent variables consist of procedural justice and distributive justice judgments.

c. Data collection

To attain the above stated objectives, data were collected by making use of the interview technique for the case study and questionnaire for the survey. The interview conducted in the case study was semi-structured initially, and then was followed by an in-depth one. Among the issues asked were cover various things were connected with problems of justice in local peoples' lives including land

hiring contracts and its social psychological aspect, especially the judgment of justice in contract.

For the survey, data collection was done using questionnaire and psychology measurement scales. The technique of filling in the questionnaire and the psychology variables was not be given to the respondents, instead, questions were be read to them, with their responses noted by field assistants. Such a method has been proved to be accurate for collecting data.

d. Area, Informants, Respondents, and Subjects of the Study

This research was conducted in six villages namely, Sukorejo, Birit, Pandes, Gadungan, Canan, and Kalitengah in the Wedi sub-district, Klaten district. The six villages are in an area where tobacco planting is carried out by PTPN X Klaten. The six villages are often called the town of Wedi sub-district. In this sub-district there are 13 other villages where tobacco is not planted. The area covered by Wedi Sub-district is 2,438 Ha. The six villages occupy an area of 726 Ha which is 30 per cent of the overall sub-district area that comprise of 450 Ha wet lands and 276 Ha dry land. All the fields in Kalitengah and Gadungan villages employ technical irrigation system. In sukorejo, Birit, and Canan villages a large proportion of fields also employ the technical irrigation system, while in the Pandes village most irrigation is semi-technical.

For conducting the interview in the case study 11 informants were involved. This number is considered sufficient both as a source of qualitative data for answering the qualitative research objectives and in the process of completing and perfecting the constructed questionnaire and scales necessary for deriving quantitative data from the survey. At the state of collecting data from the survey using the questionnaire, 471 respondents were employed. The basic criterion for one to qualify was that he or she has to own a field, which was hired by PTPN X at least once in the last two years.

To conduct the scenario study 360 subjects were needed, and were divided into 12 groups implying that each scenario has 30 subjects. The subjects were students form the faculty of psychology in Gadjah Mada University and Wangsa Manggal University. The outcome of the data collection process was the obtaining of data on 358 subjects, which was then analyzed in this research. Of all the subjects, 93 subjects were from Gadjah Mada University, 264 from Wangsa Manggal University, and one subject did not reveal the University he was from.

There were more female subjects (241 which is 67.3 per cent) than male (110 or 30.7 per cent). Seven subjects did not disclose their sex identities. The average age of the subjects was 19.9 years ranging from 18 years to 35 years.

e. Analysis Design

It has already been mentioned that most of the data from the interview is qualitative in nature. This data is a narration, in form of a transcript of the interview, which was analyzed using the content analysis. Some of the data obtained from the interview could be quantified, nonetheless as the main purpose of the data is to aid in describing phenomena, this data can also be used quantitatively as facts or illustration of the problem being handled.

Data from the survey questionnaire and psychological measurement scale was quantitative in nature. The structural equation model was used for testing the first hypothesis, especially in analyzing the direction, which comprises of three dependent variables (procedural justice, distributive justice, and satisfaction) and four independent variables (welfare, expectation, control, and interactional justice). The Lisrel version 7 was software employed to test the hypothesized model as depicted in Figure 1.

In the scenario study procedural and distributive justice were measured by the scale, which in principle was an answer to the question “To what extent is the procedure or distribution just?” The answer is ranged from 0 to 10. High number reflects high justice evaluation. To find out the influence of procedure and distribution on the procedural and distributive justice, analysis of variance was applied in the analyses.

6. Results and Discussion

Among a multitude of problems of justice, there are three issues on justice, which are connected with day-to-day social relationships, and can be clearly identified from observation in the field. The first is the problem of work relations, especially between the owner of the garment enterprise and the workers who carry out the sewing. The second is the granting of social assistance among the local population, which is called *nyumbang*. The third problem of justice was found in the relationship between field owners and PTPN, which hires such fields for tobacco planting. Besides the three problems above a lot of injustice was found, nonetheless the three seem to be the most outstanding. There is another problem of

injustice, which persistent in the local population's livelihood, that is the gender inequality.

The problem arising from the company owner - worker relationship is found to be pervasive (See *Prisma*, Number 3, 1992). In the area of research, owners of garment firms have for quite long unjustly treated their workers (see Susilastuti and Partini, 1990). The relationship between the two parties constitutes a vertical one with the owner of firm is in a high position while the workers are at the bottom. Such a high position of the boss can be seen from two key aspects, which is in the provision of work and determination of the wage.

Workers involved in sewing, who are called *gerji*, to be employed or not depends on the owner (*juragan*). In the three villages out of the six that comprise the area of this research with Kalitegah serving as the center, owners of garment enterprises offer opportunities to those who sew the garments in large quantities (locally known as *order*) working from their homes. The businessmen own the textile materials, do the cutting and do the selling of the garments. The sewers have to get the cut textile materials, sew it into garments and then take them back to the firm. Sewing is done in the home of those who do the sewing. All the risks and hardships that are connected with the sewing process are borne by those who sew. The owner of the firm merely pays the cost of sewing according to the number of units of garments completed.

The owner of the firm determines two things, which are fundamental, hence, the source of the problem of justice here. First, the owner has the authority to provide work to those who do the sewing. In the last two years, there has been a large reduction in the production of clothes in this area as a consequence of a decline in demand. The result was easy to predict, the volume of work plummeted with workers not certain of receiving work or orders from their bosses. During times of crisis such as this, and whenever there is a decline in demand in general, garment sewers can not get work from other enterprises since most of the firms in this area face similar problems. Even though there are still some firms that continue their operations, they do not need new workers. The fate of the garment workers, which to large degree determined by the boss in the context of job provision, is aggravated by the demand of loyalty to firm owners. Which means that garment workers are not supposed to belong to more than one firm.

The second problem is connected with wage. The system of *borongan* for sewing garments makes the workers to provide working capital and at the same

time bears most of the risk. Seen from the cost of production, workers have to bear the cost of purchasing threads, needles that often break, electricity used for driving the sewing machines, and must possess the sewing machine as capital to begin with. In the course of doing the work, all the risks relating to the work are borne by him/her. The effect from such work such as illness and accidents is not the responsibility of the owner of the garment firm. There are many workers who must replace the garment materials if they make mistakes in making the garments.

The second problem of justice found in the research area comes arises from the collective social relationships. There has emerged a general phenomenon among the population to make contributions, which is regarded as some form of social security, which is meant to ensure social harmony. Basically, contribution is made whenever someone experiences some difficulties or in the event of some celebration.

There are two things that must be noted regarding this issue. Firstly, the expense of the household on making contributions constitutes a heavy burden. Secondly, almost all people feel the burden of the economic crisis, which makes it difficult to find sources required. In spite of the immense economic hardships faced, the household can overcome them through the assistance of other relatives. As a whole it can be concluded that the mechanism of providing contribution is more predominant among relatives of the same family than with members of the local community without any family relationship. One of the indicators is the amount of money contributed. Contributions from family members are always more or less twice that made by neighbors and colleagues of work. Another indicator is area from which contributions originate. Family contributions transcend hamlets, village, and even sub-district boundaries. Family contributions are not limited by regional boundaries, rather tend to emphasize the closeness of the family relationship.

In general, assistance is meant to lighten the burden faced by another person. Nonetheless if analyzed further, there is another consideration. What underlies family contributions generally is the obligation. Contribution made at the time another family is afflicted by the death of a member has more to do with the obligation considerations, while that made in case of an accident besides considering it as an obligation, is also a let somebody see of sympathy. Contribution for a neighbor towards an event that has to do with life cycle and in construction a house is based more on reasons of reciprocity. Contributions made

for reciprocity reasons is felt more burdening than that made out of considerations of obligation and sympathy. This conclusion is based on the fact that the time between making some contribution and receiving one is hardly known. For households of young people they end up making more contributions than they ever receive. By the time they receive contributions, the real value is so much altered compared with the value at the time they make their contributions towards others. It is on the basis of such logic that underlies the evaluation of a contribution as either light or burdensome along with the way the evaluation of justice under reciprocal exchanges.

It also applies in cases of exchange and assistance that are made differently. In the case of providing labor for house construction, for example, most of the people involved are not rich people. Rich people who are involved make contributions in form of money or items. In economic terms, the item or money offered may be an equivalent of the wage for the labor. However, the issue is not that simple. This assistance is not merely meant to reduce the burden and for the sake of exchange, but underlying this is the spirit of togetherness. Replacing labor with money implies that the spirit of togetherness is lost. Underlying this is the issue of justice in terms of interactional, which has got to do with appreciating other people who are poorer, as well as paying due respect to relevant customs and traditions.

Such a reality seems to be more dominant when the person involved is a woman. Assistance in form of labor or *rewang* in the event of *hajatan* or some other difficulty to a great extent is done by women. The time taken in providing such labor is long and often takes more than a day. The frequency of such activities is higher than development *sambatan* or house renovations activities involving men. Facts indicate that social assistance in form of labor is done more by women than by men. In analyzing gender, what is outstanding is the marginalization of women. The word *rewang* puts women in a social role that is regarded as unimportant. Such attribution is in contravention of the reality that what women do is an important part of the overall series of activities. In the same vein men play high social role such as playing hosts to visitors or seating in the forefront at the *hajatan*.

Contribution is also felt to be burdensome, and thus is an expression that reflects injustice, for the poor have to make as much contribution as those who are wealthy. The principle of equality is not applied with accuracy. Indeed, there is some allowance or toleration for the poor to provide amounts that are smaller or

even not at all. Nonetheless, there is feeling of social pressure when such toleration is made. Such reality is very ironic for contribution, which is bandied about as a symbol of tolerance instead exudes intolerance in practice.

Another issue pertaining to injustice is found under the cooperation between PTPN and the owners of the fields, which is a combination between sharing output and hiring-contracting. The two parties state that this cooperation is an output sharing, but in its implementation in the field the element of a contract seems to be large.

The pattern of cooperation which has been underway for long and was still continuing by the time the research was done is known as the Tobacco Intensification *Vorten Landen* (ITVL) which was officially started in 1983. It seems the system of hiring is still apparent in the cooperation arrangement since originally the system used was unequivocally hiring land. The system is known as *Sistem Sewa*, which went on between 1970-1979 and ITV system during the 1979-1982 period (Madenar, 1999).

The cooperation arrangement between landowners and PTPN under the ITVL system every year begins when *Surat Keputusan Bupati* is announced, whose contents oblige landowners to surrender their land for tobacco planting. Since this process has been going on for years, landowners are well aware of this. This decision letter is only an indication that landowners are forced to surrender their land or not (from experience this is always the case). They are supposed to prepare their fields before they give in then to PTPN. Basically land preparation means that land is cleared of all types of food crops, which are deliberately grown by farmers. Farmers, therefore, have to put into consideration when to plant and when to harvest their crops. If by the time of tobacco planting, fields are still occupied by farmers' food crops, they face the risk of losing their harvest as their crops are cleared by PTPN. Cases of clearing farmers' crops have occurred several times. To avoid such cases, PTPN and farmers' groups announce the latest time for planting crops, especially rice, so that the harvesting period falls before the growing of tobacco commences.

The time when fields are relinquished by farmers is very important for farmers. Even though farmers are well aware and experienced in the cooperation arrangement, cultivating agricultural products still relies heavily on both season and weather. The start of the rice-planting season is often postponed due to the insufficiency of rainfall, and irrigation is not always flawless. In such conditions,

farmers find it hard to work of their field according to plan increasing the probability of not meeting the time for giving in the fields to PTPN. Under such circumstances farmers face the risk of losing out.

During the time field are worked up on by PTPN, farmers have no right to manage it at all. During such periods, fields are worked up only laborers under the supervision of the *mandor* (field supervisor) who is responsible to the PTPN. Field owners, who are represented by the head of the farmers group, become involve again when the season for picking tobacco leaves approaches. Harvested tobacco leaves are taken to drying places before they are taken to the factory, which is located in Gadungan village, for further processing. After tobacco leaves are dry they are then taken to the warehouse to be weighed. At the time of weighing the head of the farmer's group participates in taking note of the weights. The total production in each area becomes an important consideration at the time of sharing the output between PTPN and field owners. The process of calculating the output sharing is as follows: In one area, rice harvest is summed up, after which the quantity is multiplied by the prevailing tobacco price. In that way, total production in terms of *rupiah* in an area is obtained. This figure is then divided by the area to obtain productivity (tobacco per square meter). The field owner obtains the output according to the area covered by his field.

On completing harvesting tobacco, the land is then surrendered again to the farmers. The land that has been altered through the tobacco growing has to be restored to its initial state, and this is not done by PTPN. PTPN merely pays the cost for returning the land an amount determined at the time of signing the contract. At the time this reach was conducted for example farmers received Rp 15,000.00 per *patok*.

Looking at the prevailing problems, cooperation in form of money sharing is regarded by landowners as the most crucial problem. Demands of farmers to be given the same amount of money when their land is under tobacco plantation as when their land is under food crops have never been realized. In early times, the result of the calculation between the two commodities would be suitable if the basis of comparing productivity between rice and tobacco is 4:1. This means, the price of one kilogram of tobacco is equivalent to the price of four kilograms of unpolished rice. This determination of rice is based on the assumption that the price of un-threshed rice *gabah* does not fluctuate very much as well as the fact that the government also purchases unpolished rice in a systematic manner. In reality, the

price for unpolished rice in the market is commonly higher than the price set by the government. With such a change in the price of unpolished rice the farmer suffers losses. Paradoxically, when the price of unpolished rice is increased to around Rp.1000.00 per kilogram, and farmers want the formulation of 4:1 PTPN refuses to pay. This exacerbated by the fact that several months after that there was another increase in unpolished rice price, logjam in negotiations was unavoidable. Till now, according to most farmers, income from the their fields is still disappointing when planted with tobacco.

The second stage of study, the survey, is to test the hypothesis and the identification of the most suitable model for the data. Analysis results indicate that the most suitable model for the research data is as appears in Figure 3. With this model values are obtained from computing as an indication of the adaptation of the model with the data, which is the degree of freedom 0, Chi-square test of significance ($\chi^2=0$; $p=1$), goodness of fit index (GF1) equal to 1, and RMSR equal to 0.

The coefficient of determination in this model is .51, which means that variables included in the model can explain 51 per cent of the total variance. This model also explains procedural justice evaluation to the magnitude of 45 per cent, distributive justice evaluation with magnitude of 49 per cent, and satisfaction with a magnitude of 52 per cent. This implies that this model has an error of 55 per cent, 51 per cent, and 48 per cent for estimating procedural justice, distributive justice, and satisfaction respectively. The magnitude of the error is due to two things (Arbuckle and Wothke, 1999), which are mistakes in taking measurements as well as the existence of other variables, which influence the dependent variable, which were excluded from the model. Results from the internal consistence test on the measuring scale for the three variables an indication of inaccuracy carrying out measurements was found. Thus, it has to be acknowledged that inaccuracy in taking measurements contributed to the error available. The same thing can be said about the variables, which have influence on the dependent variables but were excluded from the model. As an illustration in this model, the variable of satisfaction has the smallest error of the three dependent variables because, among other reasons, satisfaction has the most independent variables.

Results from this model show that antecedent for procedural justice evaluation is only one, which is interactional justice, whereas there are significant antecedents for distributive justice, which are welfare, expectation, and

interactional justice. The impact of interactional justice on procedural justice has an effect of .671, which is statistically significant ($p=.001$). As an antecedent, interactional justice is also found to have a very significant effect on distributive justice with the gamma value of .301, whereas the effect of welfare with a magnitude of .065 ($p=.048$), and the effect of expectation with a magnitude of $-.083$ ($p=.013$) play significant roles on distributive justice.

Collaborating the results of the analysis, which employed the two models above, with first hypothesis, the following conclusion can be drawn. Firstly, **hypothesis number one** that states that antecedent for distributive justice is different from that of procedural justice **is accepted**. Looked at more specifically, as was made more specific in hypotheses 1a to 1d, there differences found in terms of antecedent between results of the analysis and the hypothesis, which are stated below.

Secondly, **hypothesis 1a**, which states that control as an antecedent has a significant effect on procedural justice, **is rejected**. The effect of control on procedural justice is very small ($\gamma=-.02$) which is not significant ($p=.541$).

Thirdly, **hypothesis 1b**, which states that interactional justice as an antecedent has a positive and significant influence on procedural justice, is accepted. The direct effect of interactional justice on procedural justice has gamma value of .671 which is very significant ($p=.001$), which in fact this constitutes the largest direct influence in the entire model.

Fourthly, the effect of welfare on distributive justice is significant ($\gamma=.065$; $p=.048$). It follows therefore, that **hypothesis 1c** which states that welfare can be made an antecedent with a positive effect on distributive justice **is accepted**.

Fifthly, expectation has a negative effect on distributive justice ($\gamma = -.083$; $p = .013$). Thus, if expectations are raised, distributive justice declines. Basing on the result of this analysis it can be concluded that **hypothesis 1d** that states that expectation can be made into an antecedent with a negative and significant influence on distributive justice evaluation **is therefore accepted**.

The first hypothesis, which deals with the antecedent of procedural and distributive justice, is not entirely in line with empirical data of this research. Of the four specific hypotheses, three are accepted and one is rejected. Besides testing the influence of independent variables on the dependent variable, it was found out that there is also a direct effect of interactional justice on distributive justice. The effect is large enough as well as significant ($\gamma = .301$; $p = .001$).

The analysis that follows that was done to test the model similar to the previous one (Figure 3), except that distributive justice is assumed to influence procedural justice. The testing of this model is an effort to prove the hypothesis on the interrelationship between distributive justice and procedural justice. Results of the model test (figure 4) show that statistically, this model is also accepted. The pattern of the effect on one variable on the other is not very different from the previous model even though there are slight differences in the magnitudes register between the two models. Testing the magnitude of effect of distributive justice on procedural justice as compared to the reverse effect, this model produces a smaller effect ($\beta = .395$) than the reverse effect in the previous model ($\beta = .444$). Thus, **the second hypothesis**, which states that the influence of procedural justice on distributive justice evaluation is larger than the influence of the latter on the former, **is accepted**.

In the framework of elaborating more on the heuristic justice evaluation model, research was conducted using scenarios and vignettes, which are classified as scenario study. As explained in the section on research method, in order to test the third hypothesis, the analysis of two-way analysis of variance was used to begin with, using procedure and distribution as independent variables, and procedural justice and distributive justice as the two dependent variables. The procedure was also categorized into two that is using a just procedure (not admonished and no sanctions imposed) and using an unjust procedure (reproached and sanctions imposed if not obedient). There are three types of distribution from contracting land to take note of which are larger than, equivalent to, and smaller than when the field is not hired out (field worked up on by farmer).

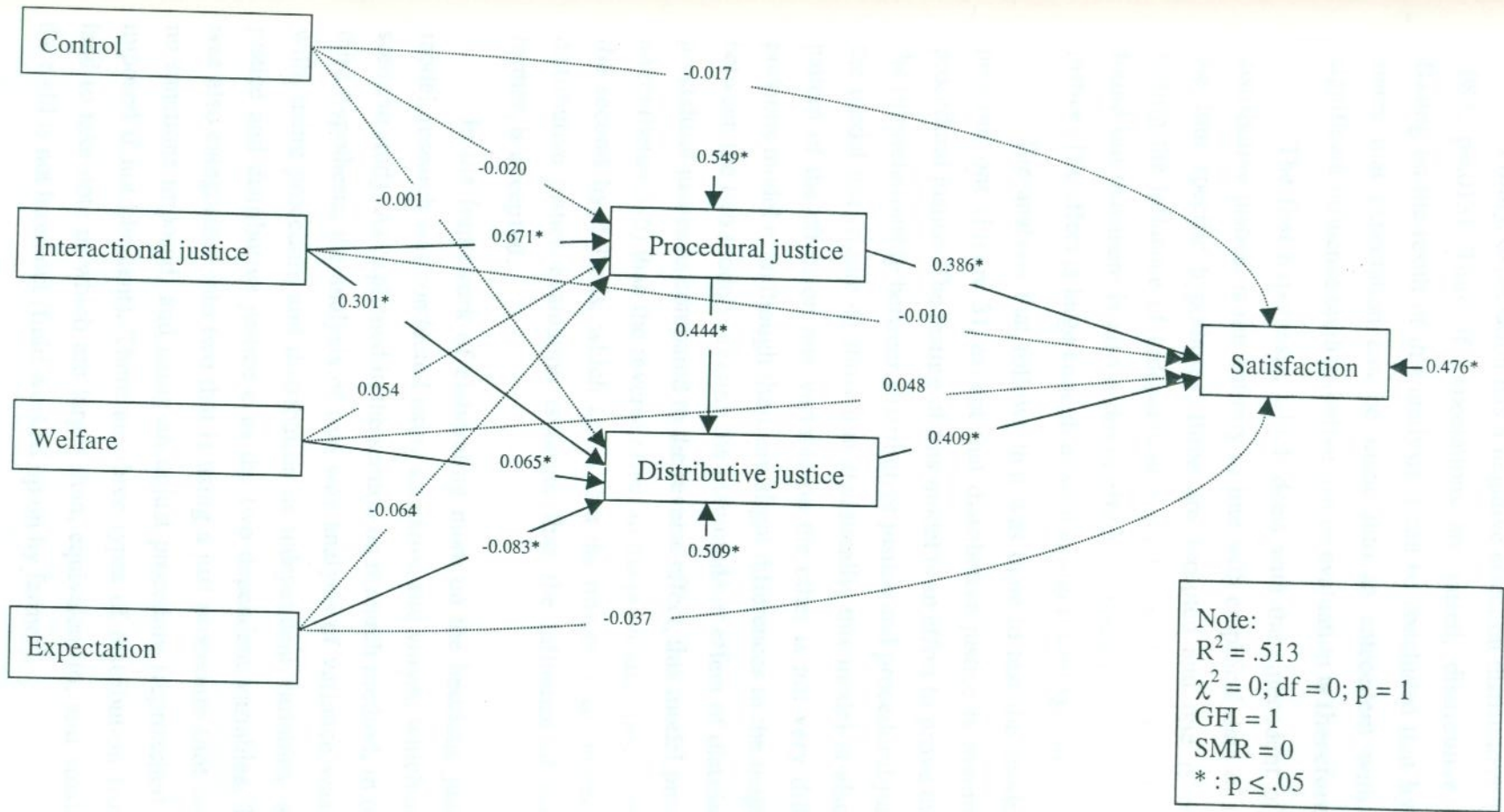


Figure 3
Justice Model With Direct Effect of Procedural Justice on Distributive Justice

From the results of the analysis it appears that procedure has a very large and significant influence on procedural justice ($F_{\text{procedure}}=571.76$; $p=.001$) as well as on distributive justice ($F_{\text{procedure}}=22.05$; $p=.001$). If the procedure is a just one, on average the evaluation of justice is higher than (7.86) the case if the procedure is an unjust one (2.48). For distributive justice, the average is higher if procedure is just (5.77) than when is not (4.55).

On the other hand, the amount of rent from hiring out fields (distribution) significantly influences distributive justice ($F_{\text{distribution}}=29.07$; $p=.001$). However, the influence of the amount of rent form hiring out fields (distribution) on procedural justice falls short of significant ($F_{\text{distribution}}=2.49$; $p=.085$). The average of procedural justice when rent from hiring fields is larger than, same as, and smaller than income earned when farmers operate their fields is 5.35, 5.32, and 4.84, respectively.

Since the F test on the difference between the means is not significant, there is no need to carry out further test inform of pair wise test among the categories. Results of the test of distributive justice when fields are rented out is higher than, similar to, and smaller than in conditions when fields are operated by farmers is 6.22, 5.43, and 3.82 respectively. As the difference among the categories is significant, further tests in form of pair wise tests among the categories are done. Results of the tests on the difference among categories for distributive justice basing on rent can be seen in Table 2. From the statistic test it is apparent that the difference of the distribution of rent among the categories is significant for all categories. The evaluation of distributive justice when rent is higher than income from being operated by farmers (mean = 6.22) is significantly different with situation when rent is equal to the income earned by farmers operating their own farms (mean=5.43), as well as when distributive justice when rent from hiring out fields is smaller than income earned when farmers operate their own farms (mean=3.82). The most significant difference is depicted between the category with distributive justice is equal to income earned (mean=5.43) when farmers operate their own farmers and that when rent from hiring fields is smaller than income earned by farmers operating their fields (mean=3.82).

The results from the pair wise tests (Table 2) among categories confirms the earlier results that indicated that distribution that is different causes differences in distributive justice, the more favorable the distribution, the higher it is judged as just.

Table 2
Means Differences between Distribution Categories

Pairs of categories	Difference	p
Bigger-equal	1.61	0.001
Bigger-smaller	2.39	0.001
Equal-smaller	0.79	0.015

Basing on analysis results it is shown that difference in procedure influences procedural justice and difference in distribution influences distributive justice. With a just procedure, it is judged as more just than in situation of an unjust procedure. If the distribution is just the evaluation made is that it is just is higher than when distribution is an unjust one. Basing on this analysis results it can thus be inferred that **hypothesis number three** which states that an objective procedure will have influence on procedural justice and that the distribution will have an influence on distributive justice; the procedure that is just will be judged higher than an unjust one, and just distribution will be judged higher than an unjust one **is accepted**.

To test the hypotheses number four and five, further analysis is carried out as recommended by Van den Bos (1996). The test that is recommended is in principle to conduct further analysis of the independent variable. Such an advice can be done here because procedure significantly has an influence both on procedural and distributive justice. The analysis that is conducted further aids in identifying the influence of procedure and difference in rent if each sequence is analyzed separately.

The following analysis separates the influence of procedure and distribution of rent at each sequence of providing information and evaluation. If the heuristic theory of justice is entirely proved, the result of the analysis should be as follows. Firstly, when information about procedure and procedural justice is done before distribution, then procedure will have an influence on procedural justice as well as on distributive justice, the distribution of rent will have an influence on distributive justice, and there will be an interaction between procedure and distribution towards distributive justice. Secondly, when information on distribution is obtained earlier so that distributive justice is done before hand, the distribution of rent will have an influence on distributive and procedural justice, procedure will influence procedural justice, and the interaction between distribution and procedure will

significantly explain procedural justice. Following is the first analysis, which is made on the group, which obtains information about procedure before hand, and will therefore make judgment on procedural justice before hand. On average, procedural and distributive justice is depicted in Table 3. Analysis results show that procedure significantly influences procedural justice ($F_{\text{procedure}} = 219.79$; $p = .001$). On the other hand, the difference between distribution and its interaction with procedure is not found to influence procedural justice ($F_{\text{distribution}} = 0.94$; $p = .391$ and $F_{\text{interaction}} = 1.27$; $p = .282$). On the contrary, distributive justice is influenced by the distribution of rent ($F_{\text{distribution}} = 13.80$; $p = .001$) and procedure ($F_{\text{procedure}} = 33.33$; $p = .001$), and the interaction between procedure and distribution is significant ($F_{\text{interaction}} = 3.05$; $p = .050$).

Table 3
Means of Justice Judgment When Procedure Informed Earlier

Variables	Distribu-tive	n	Procedure		
			Fair	unfair	Total
Procedural justice	>	30	7.70	2.53	5.12
	=	30	7.17	3.13	5.15
	<	30	7.20	2.13	4.67
	Total	90	7.35	2.60	4.98
Distributive justice	>	30	7.80	4.60	6.20
	=	30	5.57	4.63	5.10
	<	30	5.00	2.43	3.72
	Total	90	6.12	3.89	5.01

Basing on analysis results it can thus be concluded that **hypothesis number 4**, which states that if procedure is known before hand, procedure will have an influence on distributive justice, **is accepted**. If the first analysis of this scenario analysis is revisited, it is apparent that procedure will not only have influence, but even without knowing the information before hand, procedure has significant influence on distributive justice. This result confirms the results obtained earlier that proves the third hypothesis. It is apparent that procedure has an influence on procedural justice and the difference in rent from hiring out fields (distribution) has an influence on distributive justice.

The analysis that follows is tailored toward testing hypothesis number five. Results of the analysis are described hereunder, and as for the means they are presented in Table 4.

Table 4
Means of Justice Judgment When Distribution Informed Earlier

Variables	Distributive	n	Procedure		
			Fair	Unfair	Total
Procedural justice	>	30	6.07	6.40	6.23
	=	29	6.14	5.40	5.76
	<	30	4.07	3.79	3.93
	Total	89	5.42	5.21	5.31
Procedural justice	>	30	8.43	2.77	5.60
	=	30	8.52	2.57	5.49
	<	29	8.20	1.72	5.02
	Total	89	8.38	2.36	5.37

The results of the analysis of variance indicate that distributive justice is influenced by distribution ($F_{\text{distribution}}=17.83$; $p=.001$), is not influenced by procedure ($F_{\text{procedure}}=.46$; $p=.498$), as well as the interaction between procedure and distribution ($F_{\text{interaction}}=.87$; $p=.420$). Similarly, procedural justice is only influenced by procedure ($F_{\text{procedure}}=378.20$; $p=.001$), is not influenced by distribution ($F_{\text{distribution}}=1.72$; $p=.182$), and the interaction between distribution and procedure is found to be insignificant ($F_{\text{interaction}}=.58$; $p=.558$).

All the scenarios used in this research do not include any indication of self-interest such as control, protest intentions, or satisfaction as was done in other researches (Van den Boss, 1996,1999; Van den Bos et al., 1997b). This was done in order to test hypothesis number five. Basing on the scenario research results it can be concluded that **hypothesis number five** which states that if there is an indication of predominance of self interest then distribution and distributive justice which is done before knowing its procedure will not influence procedural justice evaluation **is accepted**.

Basing on the results from the last two analyses above it can be concluded that procedural justice is influenced by procedure; distributive justice is influenced by distribution. Procedure influences distributive justice, as well, either in the case

whereby information on procedure is known before hand, or even in case whereby initial information is ignored. On the other hand, both in the case whereby information about distribution is known before hand and in the case whereby such information is ignored, the influence of distribution on procedural justice is not significant. The elucidation can be induced that, of the two principles of heuristic theory pertaining to the conveyance of information before hand, one is proved and the other is not. The principles state that information and procedure possessed before hand influences subsequent evaluation. If the information and evaluation before hand is on procedure, it will influence distributive evaluation. On the contrary, if such information is about distribution, it does not influence procedural justice.

Hypothesis number six states that the relationship between procedural and distributive justice will be higher at either low or moderate level of satisfaction than in the case of high satisfaction. To test this hypothesis data on satisfaction was categorized into three to obtain respondents with low, moderate, and high levels of satisfaction. Since data on satisfaction is normally distributed and has low standard deviation, measures of central tendency is used to construct the three satisfaction level categories. The category of satisfaction level is that with the satisfaction score just about the average, which calculated by deducting and adding one standard deviation to the average satisfaction score. From such calculation results obtained are an average score of 41.6 and standard deviation of 6.0. It follows from the foregoing that the moderate score lies between 36 (41.6 minus 6 for rounding off) and 48 (41.6 plus 6 for rounding off). The low satisfaction category is the group with satisfaction score below 36, while high satisfaction level category is that group with satisfaction above 48.

Results from the analysis using the correlation technique for each satisfaction category show that the relationship between procedural and distributive justice evaluation is higher when the level of satisfaction is low (.582) and moderate (.604) than when satisfaction is high (.267) as seen in Table 5. The difference in correlation can also be analyzed statistically. The difference among the correlations is apparent from appearance, nonetheless analysis is deemed essential for finding out the level of significance.

Results of the analysis show that the difference in the correlation coefficient between procedural and distributive justice when satisfaction is low (.582) and when it is high (.267) is not significant. This result is based on the computation

results, which produces the Z value of 1.84. This value is lower than that recommended for the 5 per cent significant level, which is must either be the equal or higher than 1.96. On the other hand, the difference in correlation coefficient between procedural and distributive justice when the satisfaction level is moderate (.604) and when it is high (.267) is very significant. Testing the correlation coefficient difference between the two variables produces Z value of 2.754. With Z value having such magnitude is an indication of a significant correlation between procedural and distributive justice evaluation between the group with moderate satisfaction and that the one with high satisfaction.

Table 5
Correlations between Procedural and Distributive Justice by Satisfaction Level

Satisfaction	n	r	p
Low	55	0.582	0.001
Middle	347	0.604	0.001
High	69	0.267	0.001

Basing on the results of the analysis as indicated above it can be concluded that **hypothesis number six**, which states that when satisfaction is high, the influence of procedural justice evaluation on distributive justice evaluation is smaller than when satisfaction is low, **is not entirely accepted**. There is a significant difference in the influence of procedural justice on distributive justice for the high and moderate satisfaction groups. In other words, **hypothesis 6a is accepted**. On the other hand, the difference in the influence of procedural justice on distributive justice for low and high satisfaction groups is not significant. It thus follows that **hypothesis 6b is rejected**.

Form the three research approaches employed in this research, results can be discussed and synthesized as follows. Firstly, the problem of justice is not a trivial issue, rather is rampant and felt by members of the society. The problem of social justice arises in both vertical and horizontal relationships. Justice in vertical social relationship is about distribution, procedure, and an interaction between the two; where in horizontal social relationship justice has got to do with interaction and exchange. Henceforth, this research focuses on social justice in vertical relationships. In all forms of justice there is likelihood of the emergence of injustice, arising from extremely complicated causes. This research finds out two outstanding causes, which are: attempts to dominate and marginalize others, and

obtaining a lot of self benefits or advantages. The two motivations often fuse into one and are therefore inseparable.

Secondly, injustice felt by either research informer or respondent does cause dissatisfaction, but has not brought about an open conflict. The feeling of injustice crop ups alongside with low welfare, low expectation, as well as the little control. Of the three factors, high expectation often induces the feeling of injustice. In the field of research the expectations are low because injustice has been meted out to the people for so long time that the likelihood of succeeding in a struggle to improve justice is slender.

Despite such attitude of resignation, there is still section of the population that continues to struggle for justice. This is evident from the change in orientation of farmer groups' leaders who have become more critical and courageous to vent out their opinions as well as carrying out negotiations with PTPN.

Thirdly, both in vertical and horizontal social relationships women are less targets of justice than men. Women are often victims of injustice. There are moreover strong structural and cultural indications, that such mistreatment than women are exposed to forces them to accept it as normal (Desmairis and Curtis, 1997; Devasia and Devasia, 1990; Jackson et al., 1992; Witt and Nye, 1992). Such a distressing problem translates into the model of evaluating justice, which differs between women and men. One such difference is that for women expectation is very important factor whereas for men it is welfare. Such results can be interpreted that while men are more realistic as regards to what they probe into, women still foster expectations, which are difficult to realize.

Fourthly, in the vertical social relationship the role of social interaction is still important, and is even shown to be the most significant factor explaining both procedural and distributive justice. The predominance of the interactional justice role may be one of the factors that have prevented the eruption of an open conflict (Ball et al., 1994; Donovan et al. 1998; Skarlicki and Folger, 1997). This means that the group value model is the one emerging in this context (Tyler, 1989;1994). In addition, it can be inferred that though the pattern of the social relationship is vertical with respondents in a subordinate position, they are still trying to preserve the values and identity of the community vis-à-vis PTPN. The formation of such orientation cannot be separated from the historical experience of the people on the role of PTPN in the past. The social and economic in the six villages, which constituted the research area, which is relatively better than that of other villages in

the same sub district was caused by the plantation of tobacco in the area (Padmo, 1994, 1998). On the other hand, despite its constraints, PTPN tries to form a good relationship with people in the surrounding areas.

Fifthly, self-interest is apparent in the course of conducting observation in the field, but this does not appear predominant in the justice model developed in this research. This result plays an important part in explaining justice evaluation cognitively conducted through the scenario study. Scenarios employed in this research were designed to bring out the interactional justice and heuristic framework on evaluation of justice. Results from research conducted earlier (Van den Bos, 1996) shows that justice is influenced by self-interest orientation. When self-interest predominates, this orientation becomes part and parcel of justice evaluation. Yet the research eliminates such self-interest while emphasizes relational orientation. Research result indicates that self-interest orientation has an influence on heuristic justice evaluation. This is shown by the difference between the two researches. In a research that emphasizes self-interest, the influence of distribution on procedural justice is significant. On the contrary, this research emphasizes the relational orientation and the result shows that distribution does not influence procedural justice evaluation. Results of this research do not refute the heuristic theory on justice which was developed by Van den Bos (1996, 1999, 2000; Van den Bos et al., 1997, 1999), rather makes further elaboration on it. The heuristic theory of justice is not wrong, rather it is incomplete. This is understandable for the development of the theory still continues¹. The development of this theory will be very interesting because in accordance with its nature, heuristic thinking in cognitive psychology puts more emphasis on process patterns than rigid principles or laws as is the case in the algorithm model.

Sixthly, in this research self-interest arises in the group with the least satisfaction level. The justice model that is based on self-interest in this research has two indications, which are, level of influence of control on procedural and distributive justice on one hand, and the level of influence of distributive justice on satisfaction, on the other. The influence of control on procedural and distributive justice and the effect of distributive justice on satisfaction becomes smaller and then eventually insignificant as the level of satisfaction increase. This change

¹ In an email contact with Van de Bos, it transpired that he has been conducting advanced research and making arrangements to publish results of the research findings in connection with his theory of heuristic. A number of unpublished manuscripts were subsequently sent to the researcher.

indicates the existence of a relational justice model. This change also indicates the contradiction between the self-interest model (Thibaut and Walker, 1975) and group values model (Lind and Tyler, 1988).

The use of more than one model in this research is vindicated since it facilitates the more comprehensive picture. Protracted debates often ensue arising from the method applications. As argued by Hamel et al. (1993), each method has its weaknesses and strengths. After all, close overlaps exist among all such methods. This research was designed to use three methods, each of which complements the others, rather than to make contrasts among them. This step was deliberately taken because the researcher espouses the view that contrasting methods though scientifically necessary, obstacles hinder it practically. This research also shows that using the same method can lead to different results. This was encountered in the process of proving hypothesis number six. From the beginning, this hypothesis was designed to prove an indication of self-interest, which was to emerge in the section prior to that (hypothesis number one). Though results of the analysis in the first section didn't show the prevalence of self-interest, further exploration using the same data and method shows its existence. It has to be emphasized here that every method have their strengths and the making use of such strengths should be the focus, rather than overstating its weaknesses, which can be made good by strengths of other methods.

7. Conclusion

Basing on results of the research, several conclusions can be drawn as follows. In general, the psychological justice model, which is in accordance with conditions in the area of research, is the relational dominated justice model. In this model procedural and distributive justice very much depends on interactional justice. Both procedure and distribution will be judged just and satisfying if there is just social interaction. Incorporating procedural and distributive justice as basic components of justice, such conclusion also implies that justice is also influenced by social relations that emerge.

Justice will be ensured in society if social values are venerated and practiced by its members as well as the leaders. Values meant here encompass mutual respect, high level of trust, and applies of neutrality by those in authority. The role of such values is very dominant but it is not the only determinant. Basing on the model developed, welfare and expectations are also an important factors,

albeit with smaller role than social relations. What this means is that without welfare, justice is difficult to optimize, while expectations that are too high in this situation makes the optimization of justice difficult.

Besides the general conclusion, there are other conclusions, which are elaborated as follows.

First, justice in psychological context is subjective, and takes the form of justice judgment. Although subjective, such evaluation is proved to be consistent with the objective conditions. Consistence will increase in society, which cherishes group values. If the situation is judged, as just objectively, it will be evaluated as just, while if the situation is judged objectively as unjust, appraisal made will be that it is unjust. This differs from a situation when self-interest is predominant. Under such a situation evaluation made may be far from the objective one. This means that procedure or distribution, which is objectively just, may be judged as unjust because of self-interest orientations. Evaluation that is based on self-interest orientation uses heuristic principles conservatively in processing the information available. In these researches heuristic principles of thinking is proved to be ineffective in the evaluation of justice where there is group value orientation applied. It is not the available information that is the only basis for justice evaluation, but more important also are social values.

Second, during the research vivid injustice, both in terms of procedure and social interaction, came to light. Injustice was visible in both horizontal and vertical social relationship patterns. Injustice that emanated from horizontal social relationships, was found in, among others, making contributions among the members of the community, which to borrow the local term is known as *nyumbang*. In such a relationship the principle of equality is felt wanting and thus seen as an injustice since the capacity to help out differs from one person to the other. The pattern of reciprocity in such horizontal relationship is also judged as unjust because equality changes with time, whereas the capacity of an individual to help out may not necessarily change in the same way. In the context of a vertical social relationship, involving individual from different social strata, evidence of injustice between the blue collar workers and the owners of the firms (*juragan*), and between owners of the fields/farms and authority which in this case was represented by PTPN.

Third, injustice that prevails afflicts women more than men. This is the case because women are conditioned by both the structure and culture not only to accept

things the way they are, but also to consider such conditions as just. That makes women encounter double injustice for they are in an objective sense unjustly treated; yet socially and culturally, they are conditioned to believe that such injustice is just for them.

Fourth, procedural justice is very much determined by interactional justice. This means that the procedure is judged just if the interaction is just. Especially for men, the antecedent of procedural justice is added with welfare, while for women the antecedent of procedural justice evaluation, besides interactional justice, is expectation.

Fifth, distributive justice has more antecedents than procedural justice. Such antecedents include procedural justice, interactional justice, expectation, and welfare. For men, expectation does not play a significant role, while for women it is welfare that has no significant role.

From the fourth and fifth conclusions above, one other inference can be drawn in relation with the position of men and women in judging justice. In evaluating justice, men tend to be influenced by welfare, whereas women are influenced by their expectations. Compared to women, men are more oriented towards welfare in their evaluation of justice. This fact also explains the conclusion reached earlier that women experience of double injustice, which can also be called double deprivation. With the influence of expectation in carrying out justice evaluation in women, means that they also face inspirational deprivation.

Sixth, the influence of procedural justice on distributive justice is higher than the influence of the latter on the former. For communities with group value orientation, procedural justice plays a big role in distributive justice, while distributive justice does not influence procedural justice. Such strong influence is also found in groups with low and moderate levels of satisfaction, while for groups with high level of satisfaction, procedural justice has an insignificant influence on distributive justice. When the self-interest orientation is predominant, it is not unlikely that there will be an influence of distributive justice on procedural justice, as was indicated by other researches.

Seventh, control is variable with the least influence on both procedural and distributive justice. The influence of control becomes significant when satisfaction is low. At such a satisfaction level, the influence of control in the justice model is the most important compared with cases of moderate and high satisfaction. The

lower the satisfaction level, the higher the influence of control in the justice model. Using dissatisfaction as one of the indicators of uncertainty, it can thus be inferred that uncertainty causes an increase in awareness of justice. Justice awareness has got to do with efforts by an individual to participate in the existing procedure so that by doing so one obtains a fair and just share from distribution.

Eighth, procedural and distributive justices encapsulate satisfaction. Generally, the effect of distributive justice on satisfaction is higher compared to the influence of procedural justice, but for men the reverse is true. For men, a just procedure produces higher satisfaction than just distribution. For women, on the other hand, it is only distributive justice evaluation that significantly influences satisfaction.

8. Recommendation

Basing on models of justice that were studied, it was found out that the most dominant was the interactional justice model. The essence of justice, which originates from group values, is the standing and equality in social relationships. Consequently, equal social relation is demanded now and in the future. Demands are not only tailored toward making such positions more proportional and well balanced, but also the distance among such positions should be narrowed. It is thus apparent that the view that workers and farmers constitute as marginal groups, for example, cannot help in overcoming prevailing social problems. Respecting them in the form policies that concerns their lives must be more beneficial today. Policies on distribution such as wage, rent for hiring land, and price of farmer's unpolished rice (*gabah*) still far short of adequate. This problem will be solved as long as in relating with the efforts to place them closer as well as treating them equally.

In the vertical social relationship, such as that involving farmers and PTPN X and that between owners of conversion production units and workers, the role of procedural justice increases besides the two forms of justice already mentioned. Workers and farmers have not been treated with respect for befitting them. They should be allowed to express their desires and wants, which constitute their rights. For quite along time they were not offered any opportunity to do that. The result is that they find it difficult to express their needs. However, this does not mean that they should not be given that opportunity. In fact under the framework of respecting them, which will ensue if obtain just distribution, efforts have to be made to enable

them getting their rights. Efforts in that direction have already begun; sustaining as well intensifying such efforts must be the issue of concern.

In the horizontal social relationship, interactional and distributive justice appears to be dominant. In order to reach a high social life that is fair for all, there must some good integration of the two forms of justice above. Equal distribution can be applied on people who are homogenous socially as well as economically. There are certain groups such as the elderly, the disabled, and the poor, who must be given distribution in accordance with their needs. This principle has been employed in the provision of assistance and has proved to be beneficial. In the process of social exchange, this consideration apparently escapes the attention of many. Under the principle of equality, exchange will exclude such groups because it is hard for them to participate in the distribution process since they lack the instruments of exchange. In a relational context, such efforts can be based on the principle of respect. It will be more complete if such a principle is based in turn on the principle of neutrality so that in the process of identifying groups that require assistance as well as in calculating the quantity needed there is no bias and partiality. Besides that, trust must underlie the process too, so that the parties involved are trustworthy. Local leaders, formal and otherwise, are expected to take initiatives in implementing ideas that are recommended above.

LAMPIRAN A
Contoh Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara
Informan: Mas (Ketua Kelompok Tani) - Birit

- R : Informan
- N : Pewawancara
- R : Dalam krisis, kalau petani Klaten khususnya, kalau petani Klaten khususnya saya kira kalau masalah pangan itu saya tidak kekurangan pangan. Kalau *kenyataanipun babakan* penduduk atau petani Klaten itu menyediakan pangan untuk daerah Klaten itu cukup *turah malah*. Justru kan malah kebanyakan hasil produksi pertanian Klaten itu malah dibawa ke kota sehingga petani-petani itu sendiri itu yang berasnya dari luar negeri didropkan ke kota, otomatis kan enak beras sini dengan beras dari luar negeri. Masalahnya kan di situ. Tapi kalau Klaten, khususnya Klaten untuk memenuhi kebutuhan Klaten saya kira cukup.
- N : Terus anu , dengan buruhnya, buruh tani itu sendiri bagaimana pak.
- R : Buruh tani untuk sementara ini ya memang gimana ya belum begitu untung. Namun ya bagaimana memang ya semua harus mau menyadari. Dalam arti menyadari katakanlah buruh petani itu sendiri dengan buruh di kota itu sudah lain. Katakanlah sekarang di desa pengin mangan mung njupuk nyebut saja, tetapi kalau di kota ... wong ndeso ming njambut gawe ming entuk mangane thok ndilalah jangane godhong telo, utowo methik bayem utowo methik mbayung, kan ada, kalau di kota kan sulit mas. Untuk saat-saat sekarang meskipun krisis ini sudah berjalan lebih kurang satu tahun tapi belum kelihatan kegelisahan daripada mereka, yang penting kalau penduduk itu bisa bekerja ajeg saja tidak menjadikan kesulitan. Kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu saya kira justru lajon dari daerah-daerah lain. Kalau daerah sekitar sini saja tidak.
- N : Mungkin buruh taninya sendiri bagaimana, buruh tani, buruh tani yang ada disini, atau mungkin buruh konveksi yang dulu banyak bekerja sekarang
- R : Lha nek buruh konveksi itu kalau kemaren setelah konveksi itu tidak jalan dia juga terjun ke lapangan kerja ikut macul itu dsbnya. Ya sekarang sudah ndak ada kerjaan ya mereka banyak juga yang ikut penebas-penebas padi itu, ngerit, justru kalau dia itu ikut ngerit pari itu justru hasilnya malah banyak. Satu hari itu saya kira sepuluh ribu pasti. Tapi kalau buruh cuma paling banyak
- N : Kalau buruh petik *nopo meniko nopo nggih ibu-ibu*
- R : ya ibu-ibu itu kan sekarang sudah selesai, setelah selesai mereka beralih pada buruh yang lain. Dengan tetangganya apakah itu tanah apakah itu ani-ani, ngerit pari itu, jadi kalau sepanjang apa ya kira-kira kalau untuk daerah tanaman tembakau itu lenggangnya itu hanya sekitar tiga bulan. Kan desember, januari februari, maret nanti sudah bisa masuk lagi. Untuk tembakau yang jenis dbm, dbm belum selesai sudah beralih kepadajadi ini dalam waktu apa ya dalam waktu satu tahun ini penyediaan lahan pekerjaan ptp ini tersedia delapan bulan lebih delapan sampai sembilan bulan.

- N : Terus anu pak berkaitan dengan itu juga pak marsudi sendiri berapa luas tanah yang disewa pak
- R : kalau saya itu tidak nyewa
- N : enggak tanah yang disewa di ptp maksudnya
- R : o yang di tanami ptp, yang ditanami ptp untuk saat ini ya setengah hektar, 5000 lebih
- N : nah pada saat akan disewa itu proses penyewaan itu sendiri ada proses pemberitahuan atau bagaimana pak prosesnya
- R : prosesnya untuk penyewaan ini ada kesepakatan apalagi sekarang ini ada undang-undang pembudidayaan tanaman sekarang saja sekarang e pemberdayaan hak demokratis itu kan ada, kalau kemaren-kemaren memang seolah-olah ada tanaman wajib ini dikuatkan dengan sk bupati. Pada masa orde baru itu sk bupati itu kan seolah-olah semua jajaran atau bawahan harus mengamalkan sk bupati, pada hal pada saat itu kan sk bupati itu pada waktu pembuatannya ada kolusi mungkin dengan ... sehingga petani sudah tidak bisa merubah lagi karena terpuruk dalam sk itu, tapi kalau dalam era reformasi ini dengan undang-undang budidaya tanaman ini seolah-olah ada kemerdekaan.
- N : Undang-undang budidaya tanaman ini sudah berlaku disini atau baru akan dimulai
- R : Sebetulnya sudah berlaku, cuma kamaren itu sebelum reformasi itu kan kedudukan pemerintah orde baru itu kan pada saat itu seolah-olah dengan kekuasaan, siapa yang tidak mau mengamalkan (suara berteriak memanggil) dengan adanya sk bupati itu kan semua jajaran harus mengamalkan sk bupati dari camat sampa pada lurah, wedana, camat, lurah. Bagaimanapun juga yang namanya rakyat kecil itu nek bukan jiwane bukan jiwa pejuang, jiwanya bukan ahli politik mestinya ndak berani. Berani itukan birokrat-birokrat mereka-mereka ahli politik. Berjiwa berjuang untuk kepentingan umum, tapi kan pada saat itu kekuasaan itu seolah-olah adalah mutlak.
- N : Berarti pada saat tidak ada apa semacam penentuan atau semacam ketentuan kewajiban atau hak dari pihak masing-masing.
- R : Ada. Jadi ketentuan merupakan hak kewajiban daripada petani, dan hak kewajiban dari ptp merupakan suatu perjanjian.
- N : Nah yang sudah-sudah ini bagaimana pak pelaksanaannya itu.
- R : Pelaksanaannya ya seperti yang seperti saya utarakan tadi
- N : Seandainya ada pelanggaran dari satu pihak misalnya.
- R : Itu ada jaminan hukumnya jadi jaminan hukumnya itu, kalau bisa ya diselekasakan, atau kepala desa atau lurah kan, tapi kalau belum bisa menerima bimas kecamatan, kalau semua pihak belum bisa menerima itu kantor bimas kabupaten itu termasuk asisten diperta sama bupati toh kalau bupati dari semua pihak bupati belum bisa menerima, diajukan sampai di pengadilan. Memang ya hal yang semacam itu tidak mungkin terjadi permasalahannya kaitannya dengan pembiayaan dsbnya yang jelas itu permintaan daripada petani itu ya petugas-petugasnya ptp itu sendiri ada perasaan itu saja. Sekalipun ya tidak nuntut yang muluk-muluk hanya sekarang katakan itu sesuai dengan yang dibuat oleh ptp

mbok ya dikerjakan. Kan permintaannya cuma itu, tapi kalau ptpnya lho ptpnya bagus lho. Cuma oknumnya, masih banyak sekali kalau oknumnya yang masih mempunyai watak atau kejiwaan yang semacam itu. Jadi kalau didalam hal ini, petanipun masih ada kelemahannya bagaimana nanti pklnya kerja lapangannya dia tegas atau tidak. Kalau memang pklnya tidak tegas ya petaninya yang anu petaninya yang rugi. Padahal kerugian itu juga tidak ketegasan pkl. Padahal kalau semua itu diterapkan sesuai dengan peraturan dengan perjanjian saya kira semua itu berjalan dengan baik. Ptp sendiri itu oknumnya ya konsekwen dengan peraturan, pklnya konsekwen. Saya kira kerjasama itu sudah lumayan.

- N : Jadi selama ini sebetulnya aturan-aturan menurut Pak Marsudi sendiri sudah jelas ya. Tetapi
- R : cuma penentuan harga pada saat kemaren itu kemaren ini belum dilaksanakan di muka.
- N : Jadi selama ini juga seandainya ada pelanggaran belum ada sangsi apapun atau denda mungkin pak.
- R : O ndak ada. Tapi jaminan ada. Jaminan dalam aturan ada. Katakan kalau pnp yang melanggar, lha nanti dari pihak petani ini tidak bisa menerima, mengadu binmas desa, kecamatan, kabupaten, toh kalau tidak bisa menerima semuanya, sampai ke pengadilanpun ada jaminan. Hanya ini tidak mungkin terjadilah, permasalahannya ya itu tadi mungkin karena pembiayaan, mungkin karena pekewuh, mungkin karena bendino amor nyambut gawe.
- N : Selama ini petani kira-kira petani sudah mengetahui belum pak aturan-aturan yang sudah ada itu kira-kira.
- R : Lha memang gimana ya mas, petani itu pada umumnya adalah petani yang alam. Sebetulnya sejak kita mengadakan penyerahan tanah, ini peraturan ini sudah diberikan, diberikan dan disosialisasikan. Memang kalau seolah-olah para petani itu sendiri mengandalkan kepada perwakilannya. Lha nanti cuma perwakilannya itu bagaimana mengatasmamakan kami, betul-betul dia memperjuangkan petani atau tidak.
- N : Sosialisasi atau mungkin adanya rebug dari perwakilan itu sendiri.
- R : ya dari perwakilan itu biasanya sosialisasi
- N : yang tadi anu pak, bagaimana penentuan imbalan atau mungkin sewa dari ptp sendiri.
- R : yang dimaksud bagaimana
- N : Penentuan imbalan atau bagi hasil itu bagaimana
- R : sebetulnya tidak bagi hasil mas, ya versifikasi tapi peningkatan produksi petani. Untuk tahun-tahun yang dulu itu pada berdirinya ptp yang pertama tapi sebelum gestok th 57 60 itu sudah itu adalah merupakan kolekting, dalam arti penanaman langsung dari petani, ptp nanti yang membeli dengan catatan nanti dipinjami uang untuk biaya. Nah pada saat itu harga ditentukan oleh ptp bersama setelah sistem kolektif karena mungkin saja ruginya baik kualitasnya kurang baik itu diambil dengan sistem sewa, ptp menyewa dalam jarak waktu musim tanam per tahun, nah setelah sistem sewa pemerintah juga berusaha peningkatan petani akhirnya menjadi tpi jasa, jadi tanaman tambakau kerjasama, nah kerjasama itu

hasilnya itu nanti berapa nanti dibagi menjadi dua dengan harga kesepakatan. Dari kantor binmas maupun ptp berapa hasilnya itu dua ton satu hektar, lha nanti yang satu ton lha nanti yang satu ton diberikan petani yang satu ton diberikanha setelah tpi jasa merasa kurang menguntungkan bagi petani pemerintah membuat program itpn intensifikasi pem..... itu yang mana hasil keseluruhan itu milik petani, pembiayaannya ptp kalau pembiayaannya ptp tapi kalau dulu itu modelnya dengan kmp adalah kredit modal kerja permanen, nah itu dulu yang menjadi agunan adalah petani jadi agunannya adalah petani dipinjamkan pada bank bumi daya atas namanya petani, nah uang itu dikelola oleh ptp untuk menggarap lahan tanaman itu. Nah setelah pada saat itu, saat itu kamipun pernah mendapat tagihan dari bank bumi daya, padahal uang yang menggunakan ptp. Saat itu saya mendapat surat dari bank bumi daya, langsung saya Kok saya mendapat tagihan, katanya ptp yang mau melunasi, sebetulnya sudah saya lunasi kok, tapi cuma anunya belum sampai disini, tanda terimanya belum sampai disini nanti bisa setelah tiga hari tembusan sudah bisa diberikan pada langsung diberikan pada saya. Lha karena pada saat kemaren itu ptp tembakau di Klaten ini agaknya hampir gulung tikar para petani tidak memberikan agunan untuk kmp. Akhirnya ptp sendiri berusaha untuk pinjam uang bank itu untuk ... nah setelah ptp itu kan ptp sembilan belas namanya lantas dia nggabung kan ptp nusantara sepuluh. Lha ptp nusantara sepuluh itu kan satu kampung dengan ... mustinya tidak hanya mengurus tembakau saja (N: gabungan) nah gabungan, gabungan sekarang ptp tembakau ini sudah pulih kembali keberadaannya. Terus kalau saya lihat, satu-satunya ptp atau perkebunan yang mau memberikan jaminan ini ... lainnya saya kira ndak. Sekarang katakan saja kalau panen gagal, gagal panen itu ptp itupun kan menjamin tiap hektarnya itu kan sepuluh kwintal, dia membayar dengan harga kesepakatan. Sekarang satu contoh di musim saat ini ada yang gagal panen, itu ptp tetap membayar empat jutaratus, itu sebetulnya petani tidak dirugikan. Tapi kalau ditanami tebu kalau petaninya itu tombok ya tetep tombok.

- N : Terus keterlibatan petani sendiri dalam hal modal, tenaga kerja, atau mungkin waktu. Dsbnya itu bagaimana pak.
- R : Lha kalau modal, modal dalam hal ini petani dibebaskan. Tapi kalau tenaga kerja ini memang petani yang seharusnya melaksanakan. Cuma petaninya sendiri yang kurang menyadari. Jadi ptp sendiri menginginkan sekali mau bekerja. karena otomatis kalau petaninya mau kerja merupakan simbiosis mutualistik karena sama-sama menguntungkan kan. Dia bekerja musti baik, soalnya diakan metik hasilnya juga. tapi kebanyakan petani-petani ini gimana ya istilahnya pekewuh atau wegah. Sebetulnya kalau petaninya mau kerja di ptp ini lebih menguntungkan lagi. Satu musim tanam tembakau itu mesti dia mendapat uang enam ratus tujuh ratus ribu. Semusim tembakau, disamping itu kalau hasilnya baik hasilnya mutlak milik petani itu sendiri. Tapi petani ya belum menyadari dalam hal ini seolah-olah duwe duit neng PTN, dibalik itu kan ada manfaatnya juga bagi dia.
- N : Tapi seandainya terlibat tenaga kerja itu sendiri e bekerjanya di lokasi atau di lahannya sendiri atau mungkin umum
- R : Umum. Wong itu nanti merupakan anu satuan kok itu kan satuan hektar. Tapi kan sekarang umum sawah saya itu disini, kan tidak mungkin ptp ini saya hanya mengerjakan sawah saya sendiri. Tapi ya bisa satu kesatuan, lha nanti kalau

memang tiap petani itu mau keluar wis sakiki tandangono sawahmu dhewe-dhewe misalnya. Bisa saja, tapi kan itu nanti hasilnya berapa satuan, satuan hektar. Katakan sekarang mbakone si a remuk mbakone si b kuru otomatis nanti dibagi ... prosentase. Dengan prosentase luas tanah itu.

- N : Jadi kalau petani mau terlibat itu sebetulnya sangat efektif.
- M : Efektif, disamping hasil, dia juga bisa mendapatkan hasil dari ...
- N : Kemudian kira-kira keterlibatan yang lain pak, pemasaran atau mungkin keterlibatan yang berupa moril atau mungkin yang berupa keluhan-keluhan itu gimana pak
- M : nah sebetulnya dari ptp itu menghendaki sekali saran dari petani. Dan ptp juga merasakan atau merasa bahwa manusia ndak ada yang sempurna. Apalagi petugas-petugasnya, mestinya segala sesuatu kekurangan itu dimohon memberikan saran demi perbaikan. Sebetulnya aturannya dari PTP demikian. Lha disamping itupun dari PTP minta daripada segi keamanan, karena material dari PTP itukan banyak sekali to materal yang ada di lahan. Apalagi BPN toh kalau petani itu nanti itu juga mau sebagai keamanan atau mengamankan barang-barang PTP kan otomatis harganyapun ada peningkatan, sebab PTP dalam arti memberikan atau memutuskan harga ini sudah diperhitungkan dengan pengeluaran biaya yang lebih besar, katakan sekarang kalau bambu. Bambu itu kalau kan bisa digunakan lagi. Sehingga PTP kan untuk tahun berikutnya itu aku wis duwe inventaris semacam ini, saya berani untuk harganya sekian. Tapi petani sendiri juga belum sadar sampai disitu. Memang ini perlu kesadaran dari petani, perlu juga kesadaran dari petugas PTP.
- N : Jadi petani sendiri selama ini kurang begitu memperhatikan. Jadi misalnya dalam hal pemikiran bahwa semestinya hal seperti ini harusnya seperti ini
- M : ya . jadi itu nanti ya cuma, kalau petani itu ya anggapannya. Kalau sama saya itu ...tembakau saya sudah menyerahkan tanah saya sudah cukup, dan besuk hasilnya berapa kita menerima uang tambahan sekian sudah cukup, anggapannya petani cuma itu saja.
- N : Jadi tidak memikirkan apakah itu baik atau tidak.
- M : ya .tidak, tidak
- N : Tapi kira-kira pak seandainya mendapatkan imbalan maaf bukan imbalan dari sewa PTP dibandingkan dengan kalau disewa oleh industri, perorangan, itu gimana pak.
- M : lha kalau untuk akhir-akhir ini sudah membaik lah. Jadi sekarang katakan saja ya, kalau satu musim tanam tembakau ini waktunya satu setengah tanaman padi. Lha satu setengah tanaman padi kalau ditanami padi itu mestinya biaya itu apalagi kalau sekarang pupuk malah, mestinya diambil biaya perhitungan saya, perhitungan saya itu kalau satu hektarnya itu ya mestinya masih kalah sedikit dengan PTP, itu kalau dengan ditanami padi mestinya masih kalah sedikit, tapi kekalahan itu, itu sebagai apa ya perhitungan dari hak petani. Tapi kalau petaninya sadar bahwa pengangguran ini menjadi aset kita bersama mestinya sudah layaklah sebab dengan adanya tanaman tembakau itu saudara-saudara kita sebagai buruh ada lapangan kerja. Nah disamping itu mestinya PTPdan bumn itupun juga tidak lepas untuk memberikan kontribusi kepada daerah. Ini

saya kira juga sudah wajar. Kalau kita berfikir di dalam satu fihak masih rugi. Tapi kalau kita berfikir kepada saudara-saudara kita yang tidak mempunyai pekerjaan dan itu juga memberikan kontribusi kepada daerah kita saya kira sudah lain. Nggak mungkin katakan sekarang kita akan memberikan lapangan kerja kepada buruh-buruh, kan terbatas sekali. Tapi kalau PTP inikan selama tujuh bulan.

- N : Terus bagaimana dengan perhitungan hasil akhir dari penentuan
- M : yang dimaksud
- N : e perhitungan penghitungan sampai terjadinya kesepakatan harga itu lho pak.
- M : o itu memang tawar menawar. Tawar menawar, dari kemaren itu e memang permintaan kita ini didasarkan pada harga tahun 96 contohnya. 96 itu diberikan kesepakatan harga pada saat itu bukan petani sendiri yang nembung, itu hkti, hkti itu katanya wakil petani. Lha itu dulu dengan harga 1605 tahun 96, lha kalau 96 ini kita perhitungkan dengan kurs dolar maupun kurs mark dm ini seharusnya lipat tiga ternyata kemaren itu kita lipat tiga juga nggak bisa, karena dengan aturan mu itu di bawah dm (bicara dengan orang lain)
- N : Jadi ini anu juga berdasarkan harga dasar gabah kering
- M : Dulu, dulu itu memang ada aturan tapi praktiknya belum pernah. Sekarang satu contoh di daerah Klaten itu ada 5 desa termasuk Blumbanglinggi, Malanggiwang, itu pada saat kemaren menanam minta harga diputuskan, lha pada saat itu petaninya minta empat ribu harga dasar harga gabah pemerintah, itukan pada saat itu adalah seribu rupiah to, nah pada saat itu ptp nawarnya 3370 sehingga nggak ada perkembangan petani maupun ptp akhirnya tidak jadi tanam, tidak jadi tanam lha kemarin ini kita mengadakan rembukan padahal panennya ke sana to itu nanti, lha ternyata dari permintaan yang empat ribu kemarin itu ptp malah justru 4100 dengan keputusan musyawarah kemaren kan melebihi permintaan dari petani itu.
- N : Terus bagaimana pak dengan tanah setelah adanya pengelolaan dari ptp itu sendiri bagaimana pak. Baik dampaknya terhadap e tanaman padi atau mungkin tanaman-tanaman
- M : ya memang yang masih menjadi kendala adalah pemulihan tanah. Di dalam pemulihan tanah itu tahun-tahun kemarin ini istilahnya ptp hanya memberikan sumbangan, sumbangan itu besarnya 35 ribu kemarin ini setelah petani dilibatkan langsung dengan ptp permintaan itu juga telah disepakati 100 ribu, kan sudah lipat 3 kali to. 100 itu pun kalau ditrapkan secara hari kerja inipun belum mengena. Kalau yang memenuhi target atau sesuai dengan pembelian tanah itu adalah 60, katakan kalau 60 harga sini itu kalau untuk paling tidak 300 ribu. Pembelian tanah itu.
- N : Lumayan juga. selama ini pernah ada juga atau mungkin sudah terjadi kira-kira petani itu menolak untuk disewa gitu pak.
- M : Kalau untuk disini itu ya gimana ya kalau yang dulu-dulu memang terkurung dengan ... tapi kan sekarang dasarnya musyawarah. Jadi ptp pun tidak bisa memaksa, kalau kemaren sk bupati kepala desa tidak mau menyerahkan panggilan bupati. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang ptp tidak mau, tidak bisa. Harus nanam tembakau tidak bisa. Kalau memang cocok dengan apa yang diadakan

perjanjian ptp dengan wakil petani itu silahkan. Nanam boleh kalau tidak mau tidak nanam tidak menjadi apa. Makanya besok hari selasa akan mengawali pertemuan dalam bentuk pernjanjian yang komprehensif dalam arti menyeluruh, kalau kemaren kita berembug dengan PTP atau dialogis dengan PTP itu hanya kesepakatan masalah harga. Tapi untuk tahun yang akan datang ini semua akan dilibatkan dalam pernjanjian itu. Jadi perjanjian secara menyeluruh ya keikutsertaan pkl ya dalam kultur teknisnya juga dalam sampai masalah harganya. Ini untuk tahun yang akan datang musim tanam 99 ini akan diawali besok hari selasa.

- N : Untuk petani semua ikut atau
- M : Ndak perwakilan dari desa satu. Dan dari desa satu itu mereka yang dipilih dari petani, jadi desa mengumpulkan petani siapa yang anda tunjuk untuk mewakili anda dalam pembicaraan dengan ptp. Saya kira kalau mengumpulkan petani lebih dari 4000.
- N : o nanti seluruh kabupaten ya
- M : Ya jadi nanti mestinya adalah satu bahasa untuk satu kabupaten itu. Kalau klurahan milih desa A nantinya ya juga A. tidak kok milih b sukoharjo c pandes d tidak, itu satu bahasa. Monggo dipun sambi dik.
- N : Inggih pak.
- M : terus kira-kira kalau ada perjanjian lebih dulu tentang harga misalnya pak bagi petani itu sendiri bagaimana untuk jangka yang akan datang mungkin perkiraan apakah e diperkirakan harga ini akan lebih tinggi atau mungkin bahkan lebih
- M : ya memang itu resiko, resiko. Lha kalau tidak demikian berarti tidak ada bentuk kerja sama atau pernjanjian yang kerja sama itu harus ada perjanjian. Kan kemaren kan kalau dikatakan mitra kerja belum bisa karena ndak ada perjanjian, lha kalau sekarang untuk apa ya istilahnya untuk menerapkan betul-betul mitra itu kan ada pernjanjian dulu, memang nanti untung dan rugi diputuskan dimuka itu ya seperti yang saya katakan dimuka tadi hanya 4000 saja ndak berani, tapi pada saatnya 4100 kan juga menjadikan resiko lha itu demikian kalau itu nanti andaikan minta 6000 katakan demikian, ptp nyanggupi ndilalah saat besok itu saat desember itu kurs 6000 itu ndak artinya katakan ini ya menjadi resiko petani. Memang pergantian ya demikian ya kalau memang tidak mau menanggung resiko mestinya ya seperti yang sudah berjalan ini tadi. Tapi inikan tidak merupakan mitra kerja karena tidak ada perjanjian lebih dulu.
- N : Jadi sekarang lebih mengarah ke kemitraan
- M : Kemitraan
- N : Selama ini menurut Pak Marsudi ya kira-kira ada nggak satu lembaga atau satu kelompok atau satu organisasi yang merupakan sebagai hambatan sehingga semua aspirasi dari petani misalnya tidak akan tersampaikan ke ptp atau mungkin bahkan ptp itu e akan menyampaikan sesuatu terhalang ini atau mungkin dihambat oleh ini, sehingga petani berontak atau mungkin seperti yang dikatakan Pak Marsudi tadi e selama ini kayaknya belum ada komunikasi yang bagus begitu.
- M : Lha ini nanti yang kita mestinya membua forum, membuat forum petani tembakau. Ya mestinya sebagai anggota-anggota forum itu ya mereka-mereka

perwakilan petani itu. Forumnya itu nanti anu seolah-olah merupakan lembaga yang dipimpin yang langsung menjembatani ptp dengan petani. dan mestinya ptp sendiri berusaha bagaimana kita bisa langsung menerobos kepada petani. Dan nanti kalau kita itu sudah melampaui tahun 2000 mestinya era globalisasi itu kan petani menjadi obyek itu nanti. Sebab nanti untuk daerah-daerah perkotaan banyak tanah-tanah yang subur ditanduri watu, sehingga penghasilannya kurang.

- N : Terus peran HKTI itu sendiri bagaimana pak.
- M : HKTI itu timbulnya dari atas, zaman orde baru, jadi seolah-olah petani tidakhanya mestinya HKTI itu mengatasnamakan petani, dan kalau petani tidak mau mengakui adanya HKTI seharusnya petani mengajukan surat kepada bupati HKTI untuk dibubarkan. Tapi sampai sekarang HKTI pun juga masih ada keberadaan, jadi dari petani itu sendiri juga belum e apa ya istilahnya mengajukan surat kepada bupati kepala daerah untuk adanya pembubaran HKTI, itu sulitnya disitu. Dan bagaimanapun juga HKTI ini orang-orangnya juga orang-orang Binmas dan saka binmas itupun orang-orang asisten, asisten sekda sekretaris daerah. (Ada suara lain) PKL penelitian.
- N : Terus selama ini bagaimana pak, kira-kira aspirasi petani untuk bisa menanam jenis tembakau yang lain ataupun variasi itu gimana pak.
- M : Sebetulnya itu ada kebebasan, misalkan petani akan menanam tembakau jawa, tembakau boleh. Jadi kalau dulu ada ikatan, tapi sekarang tidak. Hanya pada umumnya petani-petani itu disarankan bahwa disini ... ini petani juga sadar tidak, sebab untuk tembakau rakyat Atau jowo ini bertentangan dengan PDN
- N : Jadi sebetulnya ada kebebasan, seolah-olah juga sekarang ini di kok di kok nggak N O kok mengapa tidak BPN, apa kira-kira karena bentuk tanahnya atau tingkat kesuburan
- M : Kalau menurut teknisnya itu mungkin tingkat kesuburan itu khususnya ptp namun di samping itu juga merupakan permohonan dari petaninya, sebab gini mungkin ada yang suka ditanami tpn, mungkin ada yang lebih sukasatu contoh untuk bibit itu memang sejak ada perjanjian kemaren itu ditari oleh ptp mbirit piye pak marsudi kok ipbn opo ... mbirit saya tetap milih N O, permasalahannya pada saat panen kalau pbn itu waktunya nanggung bulan sepuluh, bulan sepuluh itu biasanya larang-larange banyu. Kita ndak bisa menanam, menanam juga bulan dua belas itu yang pertama, yang kedua kali dalam waktu penyerahan itu lebih awal. Kalau N O kita menyerahkan Juni ini bisa menanam padi bulan tiga sampai bulan enam itu biasanya panen, bulan tiga sampai enam itu panen yang agak baik menurut musim, lha setelah N O itu habis sudah banyak hujan otomatis bisa nanam padi tapi juga ada resiko, sebetulnya kalau N O itu kalau musim hujan mungkin ada angin lha ini merupakan suatu musibah bagi petani tapi kalau TBN ini kalis dari musim sebab diambil marengan mongso marengan. Jadi mbako sudah habis belum ada angin belum ada hujan jadi keselamatan mestinya ini selama BPN, namun dilihat dari keuntungan segi penanaman padi maupun e setelah panennya ini lebih cepat dikerjakan N O, jadi kemaren itu memang dari N O atau dari BPN silahkan milih nggon tanduri N O atau BPN, dengan adanya pemilihan ini saya lebih memilih N O, dengan alasan apa yang saya kemukakan tadi. Lha kemaren ketika kita rapat di bpn kita juga dari petani-petani bpn ingin mengalirkan ke, suatu contoh kemaren itu Sukorejo, dari gondang dari njagalan, dari demakijo, ini minta

ditanami n o ini baru pengajuan intern perwakilan. Lha nanti bagaimana setelah hari selasa itu pembicaraan dengan PTP

- N : Tapi e saya dapat informasi juga, setelah ditanami e tembakau jenis N O seolah-olah ada anu tingkat kesuburan tanah menjadi tidak subur ada ... itu dibuktikan dengan ditanami dengan padi jelek begitu. Lha itu paling enggak berkaitan dengan pemilihan waktu juga karena mungkin waktu-waktu Itu bagaimana pak.
- M : Itu mungkin cuma masalah musim atau waktu. Sekarang katakan saja kalau bulan Januari itu panen ya, bulan Januari itu tanam nanti waktu panennya itu April dan Mei, lha April Mei itu kalau kita berdasarkan mongso itu kan mongso sepuluh sewelas lha mongso sepuluh sewelas itu biasanya timbulnya walang sangit gitu lho, lha kalau petaninya itu tidak apa ya tidak jeli dalam mengobati itu memang betul apa yang dikatakan itu. Lha kalau musimnya itu tidak hujan yang paling tepat itu setelah mbako itu polowijo dulu, apa jagung, apa kacang. Lha setelah panen jagung itu ditanami padi. Lha itu mestinya baik, tapi kan untuk daerah sini pada umumnya petani itu belum sadar sekali soal pola tanam. Jadi kalau mau mengkaji apa sebabnya itu ya apa yang saya utarakan tadi. Hanya petani juga belum mau mencoba, jadi seolah-olah petani sini ini masih tani yukum, petani yang pentil. Jadi belum menuju agrobisnis. Kalau nanti petani sudah maju mengarah ke agrobisnis sebetulnya bisa makin meningkat.
- N : Lha kadang-kadang dengan ini pak kejadian ini tadi e soal tanami tembakau ditanami padi jelek dengan adanya itu pemulihan tanah yang kurang mendapatkan biaya itu sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang selama ini dirasakan, menurut pak marsudi sendiri bagaimana pak.
- M : Sebetulnya anu kok mas itu bisa diupayakan kok mas, dengan jalan upayanya ya seperti yang saya utarakan tadi. Sebab petani sini itu seolah-olah kalau tidak menanam padi itu tidak ada hasilnya. Gitu lho, jadi kalau mau mengarah pada tanaman yang lain dulu istilahnya rak nyingkiri mongso itu tadi mas. Disini akan bisa diupayakan kalau petani itu mau mengupayakan, lha kurangnya suatu keadilan kurang adilnya pemulihan tanah dan apa yang dikatakan mas itu tadi termasuk panen itu sebetulnya bisa diupayakan, kalau petani itu mau mengupayakan. Itu yang pertama. Kedua kalinya sekarang kurangnya e adil ya ini rak kita berpikir sepihak. Kalau kita berpikir secara umum mestinya tidak demikian. Sebab kalau menurut saya, adil ini adil yang proporsional adil yang baik. Bukan adil yang sepihak.
- N : Menurut Pak Marsudi yang dimaksud proporsional sendiri bagaimana, apakah e memperhatikan keadilan dari orang lain juga atau mungkin dari petani sendiri.
- M : Ya kita juga melibatkan wong yang (bicara dengan orang lain)

Transkrip Wawancara
Informan: Mar - Gadungan

- P : Pewawancara
- R : Informan
- Catt : Sebagian besar wawancara dalam bahasa Jawa
- P : Namipun sinten mbah..
- R : Marto Sudarmo
- P : Mbah Marto Sudarmo.....niki anu mbah badhe tanglet...e kaitane kalih sewa sabin dateng PTP ngaten Mbah, nek menurut mbahe niku sewa napa bagi hasil...napa..napa Mbah..
- R : namine tembung asing kula mboten ngerti..niku PT niku... (putus)...digarap....monopoli tumbas.....dados tumbas kedah ditumbas PT ngaten..rega musyawarah...menawi perjanjian..niku namipun porskot..niku angsal pinjaman. Mangke bibaripun ...soto telas..ngelos...let seminggu napa sedasa dalu..bayaran..saben hektaripun dipun cangkul saking PT ...12 kuintal sak-hektar..sedoso kuintal...
- P : sedoso kuintal tanggungipun nggih
- R : menawi kirang saking sedoso PT nomboki...menawi 10 minggah punika dipun bayar...genep..ngaten..dados mbiten ngangge potongan...
- P : lha mbahe sampun pinten tahun sabine dipunsewa PTP...
- R : Oooo awit...jaman riye ajeg soto.saben tahun.....sabinipun punika A kalih B... Menawi mangsa soto...punika A petani nggarap B, mangke gantos tahun B dipun garap soto...A dipungarap petani..ngaten...
- P : ning mbahe saged mbandingaken..napa nggih...istilaha sing riyin-riyin kan..pun disewa napa taksih nggarap piyambak sotone niku...
- R : sewa...pun nglampahi...kolektif..nggarap piyambak pun nglampahi...sakniki kerjasama kalih PT nggih pun nglampahi..niki...
- P : lha nika saged pun criyosaken mboten ..Mbah..
- R : lha napa..
- P : napa masalah hasile..napa..pripun sedantene
- R : menawi hasilipun punika..cara etung ..punika menawi normal punika..sekitar sakpunika...sebab mboten nggarap..nampi wetah...menawi riyin rak nggarap...jaman kula taksih nggarap.....tampi ning..biaya petani.
- P : ning laminipun disewa PTP pinten wulan..mbah
- R : menawi anggaran..punika 8 wulan..nanging menawi bulan Januari sakpunika mbotan angsal nanem..nanging angsal ajon-ajon...

- P : o ajon-ajon
- R : sewulan 15
- P : ajon -ajon punika istilaha...
- X : penyerahan tanah..
- P : penyerahan tanah.nggih..dados..niku sing VBN nggih..
- R : nggih....sami mawon...menawi VBN...penyerahan Maret dumugi Oktober...menawi..NO..Mei dumugi Desember...
- P : lajeng miturut mbah...ajon-ajon..wau kangge mangsulaken sitine..nggih....
- R : mboten...
- P : Porskot-e niku
- R : mboten...
- X : ajon-ajon niku pra penyerahan tanah...
- R : penyerahan pancenipun Maret, punika Januari pun nyerahaken
- P : nyerahaken..diparingi..
- R : ajon-ajon niku namine...
- P : 15....15 ribu per bulan....
- : lajeng wiyaripun siti ingkang dipun sewa PTP pinten...wiyaripun
- R : menawi mriki...
- P : nggih njenengan
- R : rata-rata sakkuli punika 1800-an paling wiyar
- P : paling wiyar 1800..lajeng ..anu mbah pas menawi ajeng disewa punika wonten..pemberitahuan..mboten..Mbah...
- R : masalah...
- P : sing ajeng disewa niku..pun di aba-aba riyin..mboten...
- R : sampun saking kelurahan dipun dhawuhi...
- P : nggih..niku saking kelurahan..nggih...mboten saking fihak PTP
- R : PTP ndesek kelurahan...kelurahan lajeng kuli...
- P : kok istilaha ndesek niku priipun...
- R : lha..ngajok-ke ...dados punika kompromi medal kelurahan..
- P : menawi ngaten wonten mboten ketentuane..pas disewa niku..si ketentuan..hak-e petani..niku ngaten-ngaten..hak-e PTP niku ngaten-ngaten...wonten perjanjiane mboten..Mbah..
- R : wonten..
- P : priipun mbah..

- R : nggih soto sepindah..ing kang dipun tampi punika 30 minggu...wiyit Maret penyerahan punika..petani mboten angsal ganggu gugat..penggarapan..punika dados hak-ipun PT... Lha menawi sampun...soto telas..wonten penyerahan..lha punika petani..saweg angsal nggarap.....dados punika penerangan masalah punika...dados upami kirang saking 1 ton per hektar...punika PT ing kang nomboki....
- P : ing kang nutup...
- R : menawi langkung..punika hak-ipun petani sedoyo...
- P : dados hak-hak-ipun namung jaminan niku mawon nggih...saumpami wonten...istilaha pelanggaran..petani melanggar..lajeng mboten...disewa-aken..punika wonten sangsine mboten..Mbah...
- R : Lha punika..menawi mriki kados dene..peksan..kok...
- P : lha kok saged...
- R : lha mriki niku mung nggih wonten ajrih..ngaten.. pun lha mungal teng pemerintahan mangke trus tersangkut..mangke PKI trus sami ajrih
- P : ajrih ngaten nggih..dados istilahipun menawi mboten diserahkan..mangke...
- R : nggih...
- P : lha menawi pas penentuan imbalane... kerja sama kalawau ditentok-ke enggal...awal..napa..
- R : menawi ing kang sampun-sampun...menawi sampun telas soto...
- P : dados sampun telas soto..dados istilahipun...mboten wonten perjanjian...pas ajeng disewa nggih...lha niki perjanjiane menawi mangke hasil..ditumbas sak menten ngaten..mboten..
- R : mboten...
- P : dados akhir..malah..Mbah..nggih..
- R : inggih
- P : lajeng anu mbak...istilahipun kalawau mbahe anu nggih ngendika bilih namung disewa mawon...lha niku petani ajeng nderek cawe-cawe mboten....
- R : menawi medal tumut nggarap...punika dibayar harian... dados hak-ipun PT sampun... dados petani menawi badhe nggarap punika harian
- P : ning saumpami badhe nderek ngolah ngaten...pripun...Pak
- R : lha punika mboten saged..lha punika kados dene monopoli..keng ngginggil
- P : o monopoli..nggih. nggih nate mboten mbah njenengan kepengin napa gadhah pengarep-arep mboten sah ditanemi soto...mbah
- R : nek le saged ngaten nggih kepengin..sedoyo nggih kepengin
- P : Lha pripun
- R : lha cara etangan petani..digarap piyambak punika rugi..sakniki nggih...soto 8 bulan, Maret dumugi Oktober lak 8 bulan..cara pantun pun kaleh (2) panen tambahan sesasi mangka sakniki paling kathah niku soto angsal arto 800-900 (ribu)

niku 8 sasi nek ditanemi pantun piyambak, punika sak panenane men sok jutaan sakpunika

- P : lha punika sakpunika...lha kalawingi...
- R : lha punika sak oyot..nek ping kalih paling mboten 400 (ribu) lha rendengan... jutaan kalih 400 pun 1,5 juta. Niku dipendhet ragad.. 300 lak taksih 1juta punjul...
- P : ning.. pas disewa PTP kan wonten jaminane to mbah...
- R : jaminane napa
- P : lha punika menawi mboten saged hasil..
- R : lha niku men petani nggih rugi...
- P : ruginipun
- R : lha sakniki umpaminipun nggih..nek digarap pantun..niku normal..Lho tegese sakniki model hama... sakniki dihitung cara normal..
- P : leres
- R : niku nek panenane rendeng, niku paling mboten nggih 400.. nek ketiga gadhu..paling mboten nggih jutaan sakpunika..lho. Lha mangka nek ditanemi soto... mung 800-900 (ribu) pripun.. ampuna dipeksa niku jane petani niku.. mboten..angsal. Mung sakniki niku aparat kaleh PT ngaten..(isyarat?)..lha nggih mboten kejab(?) niku nggih ngaten niku...
- P : ning sakniki ketingale pripun..mbah... nek sakniki..
- R : nek sakniki nek nggen kula jatuh...
- P : jatuhipun...
- R : nak Januari dumugi Oktober.. nika mung angsal arta 700(ribu)..hasil soto merosot..menawi sak hektar ..11 kuintal..
- P : ning pas...menawi ditanemi soto nggih...pemilik napa saged cawe-cawe mboten amrih hasile sae..ngaten...
- R : lha sampun gadhah wakil.... kelompok... kelompok niku sing mbayar petani ...2 %
- P : ning miturut mbahe wakile niku pripun...
- R : nggih pun saged kerja...kula waune nggih wakil...kelompok
- P : dados sing ngoreksi..sing ningali teng sabin...ngaten nggih....Mbahe kan sing kagungan..nggih, nate mboten terlibat wonten modale, napa teng....mboten...?
- R : mboten...
- P : menawi pemikiran Mbah
- R : pemikiran nggih situasi soto kados pundi.. nek kirang sae nggih kantong aba..
- P : lha niku saking anu..
- R : mandor..
- P : saking mandor..nek petani..

- R : la..nggih petani mengke medal kelompok...
- P : ngaten Mbah petani kan mboten nate ningali sabine pas disewa soto niku...
- R : lha ningali niku nggih mung langkung... mboten kok ..wet..niku mboten...nggih mung kelompok sing ngurusi..
- P : masalahe anu to mbah..niku disewa nggih disewa..ning hasile kan taksih pertimbangane sae mbotene to... Lha petanine saged ningali..saged...
- R : ningali saged nanging menawi gadhah pemanggih...punika kedhah ngaten..punika medal kelompok... kelompok kalian mandor ngaten....niki kedhah didangir...ngaten medal kelompok....nggih mboten kenging langsung.Mangke menawi langsung...mangke sok sulaya..
- P : lha miturut mbah..pun sesuai napa dereng mbah...wonten terlibate mbahe sing diwakili kelompok niku wau....
- R : nggih dereng... nggih mung masalah rega niku dereng cocok.. nek kula niku..taksih rendah banget..
- P : pun nate ditanemi soto lintu mboten mbah..sak sanese VBN...?
- R : nggih NO.. Virginia nggih pun
- P : lha niku menawi pun bandingaken pripun Mbah
- R : menawi Virginia niku..anu kados dene..namine napa..ikatan....Sampean nanem Virgin...siti mang olah.. bibit kula sukani ...mbenjing menawi ngundhuh..kula tumbas..per kilo sakmenten...
- P : mboten perjanjian...
- R : lha peranjiane ..niku mboten kenging di dol sanes...
- P : o ngaten...lajeng menawi NO
- R : nek NO kula aturi niku wau nggih...teng kelurahan disukani penerangan..entene mung kantong cap jempol..tampi arta ngaten...
- P : dados perbandingan regine niku pripun ...mbah
- R : lha menawi regi.mangke .mriku musyawarah kalih HKTI niku..
- P : o lha kok HKTI mbah...
- R : la nggih mangke sing ngrembag nek jaman tahun 70 keng NU wonten..king Masyumi wonten..jaman riyin taksih Partai king PNI wonten..king PKI wonten niku. Lha niku mangke trus ngge waton, ngge dasar nopo... nek cara jaman tahun riyin cara dasare ..beras. hasil, masalah rega niku Wa-ILahu 'alam. tegese beras niku regane berubah..jaman riyin soto niku 8 bulan, nek pantun 2 oyot, 7 bulan. Niku 1 kilo soto..beras 2 kilo lhe sewulan di-ajeni ..2/5 (rong-proliman) sekilo...dados mangke regine beras pinten mung kantong manut niku... dadi mboten sah nggoleki napa...Ning..niku dijupuk payu-payune beras...larang-larange beras... direga duwur dhewe ..pasar.. nggih umpami soto pun ajeng telas mangke saking PT kalih saking petani..wakil niku wau dateng peken pados.. rega beras..Lha mangke pun kantong mbayar.. dadi pun mboten sah padu.. padu pun...kabeh nggih pun niku..Trus ganti bareng wonten model... PKI mboten wonten...Masyumi mboten wonten...entene GOLKAR niku...rega trus disaring

rega kudu sementen...mung ngaten... Lha niki enten lagek dereng...kalamangsa niki dirembug...waune..nggih mung rega sakmenten...

- P : trus dados sing rembagan reregen HKTI..malahan Mbah
- R : nggih
- P : HKTI kalih PNP..mboten kalih petani..
- R : mboten..
- P : dados kalawau nggih Mbah.saumpami petani pingin ajeng ningkataken hasil...niku mboten saged nggih Mbah nggih
- R : mboten saged...
- P : model..model..mboten sagede petani mboten saged langsung ngawasi...
- R : pun gadhah wakil kelompok niku wau...
- P : menawi badhe nyampai-aken..keluhan..protes..niku pripun mbah..sing kalawingi.. wingi
- R : lha petani dateng kelompok..mangke kelompok dateng pamong desa..lurah..ngaten..Lha lurah mangke dateng HKTI mesthine...
- P : ngaten thok mawon..dados mvboten langsung..
- R : mboten...mangke malah sulaya..pun wonten jalure piyambak-piyambak...
- P : mbahe kepingin mboten..terlibat nderek ngolah soto niku
- R : wah kula niku awit tahun64 ngantos 89 ..lha trus kula wakilke niku (anak kula niku) model Irak niku lho..nika trus kula taksih ngayahi....bubar niku trus kula wakilke anak kula niku...
- P : benten-bentene pripun niku mbah
- R : masalah
- P : nggih sembarange...kalih riyin dibandingke sing sakniki niki..sotone....napa...
- R : nek sotone ngaten niku...nek marak-ke niku...sulaya..nek petani butuh berat.nek PT butuh kualitas . Lho nek petani pados berat niku mbako kudune tuwa...nek petani enom diopek..dipendhet....lho niku ...lak bobote rak beda...lha ngaten nggih rumangsa rugi...
- P : anu sing petani
- R : nggih lha sakniki umpamane klaras kalih godhong biasa lak berat godhonge ngaten.... mangka regi biasa...sami
- P : niki wangsul malih saking PNP nggih...(PNP) napa nate maringi napa masyarakat ...napa petani ngaten...
- R : mboten nate.nggih sok kalamangsa sok..enten pacul...ning 5 tahun sepisan men dereng mesthi...ngaten
- P : sok nampi panguneg-uneg mboten
- R : mboten

- P : nggih saumpami dipun bandingaken..disewa tiyang kalih disewa PNP nika langkung remen pundi...njenengan mbah nek disewa lho mbah..sami-sami disewa
- R : wah niku mboten....PT niku mboten nyewa...nek butuh duit nyewa niku..lak arta kriyin...lha niku PT lak keru...lha niku. Lha nek kula-sampeyan nyewa niku..nek nyewa rak arta...mbayar...mangke kantung nggarap..lak ngaten. PT nggih purun nyewa ning pemerintah mboten angsal...niku setate metal(?) rak kolektif...., Ning gandheng kolektif niku PT rugi.. sebab soto ..napa jenenge...cuci daun...le ngandhap 2 lembar niku rak mbotrn digunak-ke..ngaten sebab nek disunduki ..pecah
- P : nek kaitane kaliyan musim..mbah
- R : musim...
- P : menawi dipun..soto pripun...menurut penggalihne ..mbahe
- R : menawi soto VBN..punika nyirik jawah..menawi NO punika kedah jawah..nika mula sok berate sok menang NO
- P : menang NO nggih ..nek gegandhengan kalh untung rugine mbah..
- R : kangge...
- P : kangge musime niku lho mbah...kanggene petani lho mbah..
- R : nek daerah kelurahan Gadungan nika sekeca NO..sebab nek VBN niku penyerahan siti nika..ketiga...awis toya..dados mboten saged nggarap...Lha nika mung mundur..antawis 2 bulan...sewulan kalih wulan agek tanem...nika bisa uga nek ketigane...panjang..sok 3 wulan ..pun 1 oyot..to niku empunan Cara etungane petani..rugi...Ning nek NO..soto dirampas pun saged nggarap...
- P : habis..penen..ketigen
- R : waktune rugi...rugi waktu... lha sakniki umpamane nggih. Januari pun mboten angsal nanem..entuk ajon-ajon..30.000...mangke Oktober diserahke mboten angsal jawah. November kalih Desember lagi nggarap..lak pun 2 wulan...pun 4 wulan entuk duit 30.000 niku lak rugi..
- P : niku sakbubaripun...dipun tanemi soto..
- R : nggih..
- P : ning saklebetipun ditanemi soto...mbah wekdalipun petani pripun niku mbah...
- R : nggih kedangon...etunge nggih rugi..
- P : ruginipun..
- R : lha kula aturke ..nek 10 wulan hasile pol-pole mung 1 juta..tur meh 10 sasi...nek digarap dewe..pari..rak pun 2 oyot. 3 wulan entuk duit...4 wulan paling rendhet...
- P : trus kalih tenagane pripun...
- R : Lha tenagane nek di-itungke..nek nggarap piyambak...mangke biaya pinten...ragad pinten ...mangke kan saged....Umpamane 1 juta ..ragade 300 (ribu), kantung 700 (ribu) lha mangke trus ping pindho (2) ..pun pinten..
- P : nanging ...gandengan kalih wau..kesempataipun petani..ajeng nanemi warni-warni..ngaten. saged mboten mbah..jenis-jenisipun..

- R : menawi saenipun...punika kedah seragam...Ning kabeh sadherek niku budidaya supados hasilipun ageng punika kados pundi..lha punika
- P : istilaha dados mboten enten sing kepengin NO, wonten sing kepengin VBN ngaten...
- R : punika pun diatur saking pabrik.. kelurahan niki..NO, kelurahan niki..VBN niku saking pabrik..
- P : miturut jenengan ..istilahipun ..sampun sreg dereng...?
- R : menawi kula ken milih niku..milih NO..
- P : ning..
- R : medale cepet....ning umpami bebas..pilih mboten nanem..
- P : o nggih menawi saumpami taksih nanem tembakau... kepengin bebas nentok-ke jenise..
- R : nggih..
- P : ning anu mbah sasampunipun ditanemi soto nggih, niku priipun istilahipun..produktivitasipun ..siti..
- R : punika menawi daerah mriki..punika sulaya.. sulayane priipun..saking PT pun sukani penghijauan orog-orog, ning priipun angger anu pun di...(makan) menda niku..hewan..dados percuma... nek sitine nggih awon..... kantung mangke rabuk-ke kudu kendel...
- P : lha miturut mbahe ..sampun-sampun niki wonten mboten mbah fihak lintu sing istilaha nderek-nderek cawe-cawe...kapurih anu petani niku hasile awon napa istilaha sing diraoske.mboten adil..ngaten lho mbah..
- R : masalah ..
- P : napa imbalane sing ditampi... napa masalah sewa...niku wonten mboten fihak-fihak HKTI..napa.
- R : nggih HKTI punika mandhape menawi ajeng masalah rega nika mubeng mangke priipun..mung dirembug..ngaten..niku
- P : lha niku. sing conto-contone..saumpami fihak...lintu sing diraoskaken ganjel ngaten..mbah...
- R : nek daerah Klaten menawi umpami wonten rakyat sing ajeng nyuwanten mboten anu niku...ajrih...pun entene mung ajrih thok.... Dadi kados dene ..tertekan..
- P : tertekan..tertekanipun saksawisipun(?) saking pemerintah mboten wantun teng PPN niku..lantaran wonten pemerintah..napa lintu-lintu..ngaten wonten mboten mbah..
- R : nggih mung saking pemerintah
- P : lha bentuke napa mbah...
- R : bentuke nggih sok-sok ngajak koramil..napa polisi..ngaten teng kelurahan.. niku pun maaf sajake angel..nggawa polisi siji.. koramil..
- P : niku pas wancine nanem kalawau nggih...

- R : porskotan niku
- P : porskotan niku...ning akibate.. teng petani miturut mbahe pripun...
- R : nggih pun mboten saged nyuwara..pun...entene mung ajrih..
- P : ajrih kemawon nggih..
- R : nek di-itung pemerintah nggih kurang adil...sak daerah Klaten niku pabrik soto niku kathah.... Kok kenging napa le di pun pokok..daerah tertentu.. thok..sanese pun bebas mboten nanem. Nek kudune adil sakniki kelurahan niki,tahun niki kalurahan nika..tahun niki rak gantenan..dadi merata, ning sakniki mboten..
- P : ning anu mbah..pertimbangane sitine mbah...
- R : mboten nggih pun riku pundi sekira sing disenengi kalih PT niku ditentok-ke...pun sakniki modele PT njaluk dana iki..iki niku teng kabupaten. Mangke kabupaten pun kantong nentok-ke SK...kelurahan kana kudu mbako...mrika mbako dadi sing kuasa pak Bupati..
- P : sing kuasa pak Bupati nggih...
- R : dadi umpama enten suara ngaten-ngaten.....Mangke di SK Bupati..mung ngaten...nggih pun mesthi padha mboten wani...
- P : ning sakniki pripun Mbah..
- R : nggih sami mawon entenen mung ajrih...
- X : saiki wis beda
- R : lha ning suwening suwe yo nekad
- P : ning enten mbah..criyose napa nggih..teng daerah Canan..napa niku...wonten..sing..istilaha napa nggih mboten purun menawi dipun sewa...mboten angsal...tolak tanam tembakau...
- R : pancen mriki niki soto mboten nyewa...
- P : bagi hasil.....sing jelas..
- R :intensif..napa jenenge..(ragu-ragu)
- P : Tanaman Perkebunan Rakyat Intensif..
- R : Lha nggih ..intensif ngaten niku... mula pabrik kathah rugine..pamane enten le suwek ditampa..mbako cilik 30 kudu ditampa...lho ngaten..Mongko dateng pabrik mboten digunak-ke.. lho..Mula sakniki sing 30 medhun diguwak-i...ngaten to bathine teng riku niku..Dadi mlebu ngelos niku pun mbako apik...mlebu pabrik niku..nek riyin mboten...terus mlebu elek-apik kudu ditampa...ning nek sing nggarap petani...
- P : ning sing sakniki taksih dimanfaat-ke to mbah.
- R : napa..
- P : sing soto sing taksih-taksih niku..misale kan sing dipendhet ming sing sae-sae..lha sing alit-alit nika dipendhet petani piyambak...mengke di olah..
- R : wah mriki padha mboten telaten...malah sedherek tebih..sok pados..enten...
- P : ning dipadosi pun mboten napa-napa niku..

- R : mboten. nek pun diserahke PT niku..petani pun dibedholi niku.. enten le padhos nggih mung methili...milihi...
- P : miturut mbahe reregen sakniki pun diraosaken adil..nopo pun cocok dereng mbah....
- R : dereng cocok..
- P : lha kok
- R : lha pripun sakniki nggih..beras kula etungke cara etungan beras...loro...rong proliman (2/5) beras sakniki lokal lho..apese 2,5 .Loro setengah niku nek ping pindho..5000. Rong proliman (2/5) kilo niku 2,5 (2500) diporo limo..500 ping pindho lak 1000 kudune 6000..mung dibayar 4000 pira kae dhek....lha mung dibayar 4300...Lho niku ngge waton beras...petani mboten njaluk duwur...pokoke hasile niku mboten rugi...lha nek dibayar 4000 niku trus.. metu beras pinten niku...Mangka mriki daerah Gadungan mriki nggih...saben sak musim gadhu niku..6 kuintal rata-rata medal...nek sing duwur 7-8 nyandak..ning nek le..asor sok mung 5 mula dijupuk tengah-tengah ...6 (enem) nek rendheng..niku 3-4-5 jupuk tengah papat (4), 4 kalih 6 lak 10(4+6=10) 10 niku nek sing nggarap 5 petanine 5 lho niku diparok-ke lho .Lha gangsal (5) nek niku cara beras sakniki 2,5- 250.000..5 niku pun pinten ..1.250.000 mangka niki mung entuk 800-900 (ribu) mangka ngenteni setahun ...Lha 10 sasi padha wae setahun...rugi....Ning nek metu 2/5 (rong proliman) petani mboten pati rugi...sebab ajeng nggoleki niku wau..kalih mbako neng pasar regane priye. Mudhun nggih mudhun cara dhisik niku ngaten niku. Dadi hasile petani niku mboten regi...masalah rega niku rak kahanan pasar...
- P : leres...
- R : ning nek cara niki mboten ngangge waton niku petani le rugi..ngaten, pun rega njaba muluk...dicocok-ke beras mboten cocok...lho
- P : Lha saklintunipun hasile niku wau mbah...wonten hasil lintu-lintune mboten...mbah..saking PNP
- R : mboten enten
- P : nggih.....pun kathah sanget nika...mbah

(PUTUS).....

- R :niku petani setate
- P : dados mboten secara kontrak ngaten Mbah...
- R : mboten
- P : saklaminipun mbahe nderek dateng PTP pripun coro-caranejenengan kan nderek dhateng wakile tani... Sing pun dingertosi napa mawon mbah...
- R : masalah napa...
- P : kontrak ...napa..sing
- R : kontrak....sulaya rembug..napa kontrak kerja..
- P : kontrak kerja

- R : kontrak kerja niku nek cara jaman dhisik kontrak kerja niku....Kula saguh ngayahi mbako..sak-entek-e mbako...bayarane sakmenten ..niku jenenge kontrak...
- P : nggih leres..
- R : cara jaman Landa niku...ngaten niku...
- P : Lha sakniki niki...
- R : sakniki-niki nggih niku wau diunek-ke bagi hasil...mboten..petani nggih pripun niku..Intensif tembakau niku wau nek jenenge model sakniki...lho niku..
- P : sing dimaksud kontrak sulaya...wau pripun mbah..
- R : kontrak sulaya niku pokoke rembuge mboten cocok niku lak kontrak ..(yang dimaksud KONTRA)
- P : o..pro kontra...kontrak sulaya...nggih pro kontra... dados istilahe mboten wonten perjanjian...dados..saumpami petani badhe melanggar...wonten sangsine mboten tho mbah..
- R : mboten enten...
- X :ditarik...
- R : Pokoke nek sedherek mriki niku, pokoke ajeng mangsa soto...mangke didhawuhi dateng kelurahan. Mangke disukani penerangan..lajeng dumukan ..porskotan niku...sambatan. Lha enten taneman sing bacut tanem niku ngentos sak sepuhe... Dados mboten enten sulaya...mboten entuk....Mboten entuk niku mboten wani...petani...
- P : sakbibaripun ditanemi soto mbah wujudipun siti pripun...mbah,,
- R : cengkar...
- P : maksudipun
- R : kathah...erosine ...sitine. Dados umpami sakniki soto nggih ndangir....kering...direp(?)..dibedhol trus jenenge napa niku...erosi....
- X : larut....
- R : larut niku ..niku rak dados...lemine katut..kantun lemah...napa jenenge..ampas....Sarine rak padha keli...ngaten....Mula sukani penghijauan. Penghijauan niku di set-A (ZA?) mboten angsal, kedhah orog-orog....ngaten saking PT
- P : orog-orog niku kan ben subur malih
- R : nggih...niku saking pertanian...kudu diorog-orog niku saking pertanian...ngaten..
- P : ning sok-sok orog-orog e niku diparingi...saking PTP..napa..
- R : diparingi...saking PTP mangke sing uluri nggih PTP
- P : lha niku...dietang pemulihan tanah...
- R : nggih...dadose penyuburan tanah...
- P : jenengan ngraosaken.piyambak .sampun cekap dereng

- R : nek kados wingi-wingi gangguan kewan niku..lho...umpami mboten gangguan kewan niku jane pun...sae....Nggih mung nek.ketigaawis toya niku mboten kalah...Lha ngantos kembang...awoh...dereng enten toya....lha punika....Lha nek NO lak saged trus digarap niku..toya saged..jawah...
- P : ning sakniki ming sing ngedun(? tak jelas)...sing wingi nika
- R : nggih
- P : sakniki pun ditanemi pantun...ditanemi palawija mboten mbah...
- R : nggih wonten sekedhik-sekhedik... nggih waune dereng wonten jawah, nggih miturut sing...kinten mboten angel nggih di...(tanem?) nggih palawija..nggih enten sing di ..jagung sedoyo nggih enten...mung kantong ningali etange....

Transkrip Wawancara
Informan: Ari (Aktivis) - Gadungan

A : Informan

F & N : Pewawancara

- A : Kami datang mau kemudian kami memasarkan kan ptp kan belum bisa mempelajari Jadi saat itu Bagaimana kami langsung ke polip atau kami ... lha ptp ingin mempelajari dulu tuntutan dari beberapa banyak itu ingin dipelajari lha monggo.
- F : Intinya apa boleh tahu
- A : Tapi ada perubahan kemaren
- F : Ini kalau yang point satu saya sudah sedikit banyak tahu yang laut ini kenapa minta satu titik gitu lho, apakah itu sudah ditunjukkan
- A : e begini kemaren itu kenyataan yang ada pokoknya di Gadungan ada tanaman tembakau di sini itu krosnya malah tidak ada disini, disana. Lha itu PKL untuk mengontrol agak kerepotan lha harus ngetutke mbakonya kemana. Tapi ptp sendiri setelah dirembug ya dengan ptp, kalau satu blok hasil los kost produk ptp akan membengkak, lha ini petani juga harus tahu karena kita manajemen ptp ... kita harus seirit-irit mungkin. Jadi kita punya los kita papankan seoptimal mungkin, kalau kami harus melayani satu blok los satu-satu itu biaya produksinya untuk nyewa lahan itu kan berapa juta
- F : sejauh ini bagaimana to, yang satu tahu itu di bawahnya itu teluk yang selo terus bukan los yang terdekat nampaknya. Ini mungkin saya salah
- A : Jadi begini, ambil contoh Gadungan ya tembakaunya kemaren tidak hanya di los Gadungan, di los tanam juga ada di los manam juga ada.
- F : Itu terdekat atau yang selo
- A : Yang dekat, yang masih dekat. Ya tetep nggak jauh sekali, tapi tidak di bloknya.
- N : Tapi ukurannya hanya yang terdekat atau sudah ada pembagian gitu lho. Wilayah Gadungan sebelah ini masuk sebelah sana
- A : Kalau masalah los setahu saya, kalau los di blok itu nggak nampung dicarikan los yang terdekat. Karena los itu ada yang los kosong. Seperti sekarang los Gadungan ini kan nggak dipakai, dipakai untuk N O, kan Kalitan kan nanam N O, lha itu mbakonya ditampung di los, Kalitan kan ndak muat. Kebalikan dengan Gadungan, Gadungan kan kosong. Jadi di luar wilayah tapi yang dekat. Jadi mau ndak mau tki nya repot, lha ini kan tkinya golek enake lah, tapi ptp juga mengatakan pertimbangan pak kalau kami Begitu post produk tinggi sekali, padahal sewa lahan pembiayaan los saya bisa mengerti itu. 20 juta lebih itu
- N : Lha terus gimana, sawah yang dipakai untuk los itu kemaren itu kalau mau dipakai semuanya itu disewa. Satu petak, satu patok itu. Tapi sekarang hanya e

sebatas ukuran dari los itu sendiri. Itu bagaimana pihak petani itu sendiri. Karena otomatis sisanya dari yang ndak disewa kan ndak bisa ditanami apa-apa kan kemaren kan sudah dihitung menjadi satu sewanya.

- A : E ... begini sebetulnya kalau masalah sewa los dengan ptp ya petani dengan ptp, itu sebetulnya negosiasinya petani dengan ptp itu sendiri. Jadi forum ini tidak bisa mencampuri harganya tidak mencampuri terserah negosiasinya antara ptp dengan petani, kalau mengacu pada sk bupati per meter hanya seratus enam puluh atau seratus tujuh puluh saya lupa, pokoknya murah sekali. Tapi ptp tidak harus memegang sk bupati tapi ada kebijaksanaan, negosiasi yang penting. Kerjasama antara ptp dengan petani. Jadi sk bupati hanya untuk formalnya saja.
- N : Masalahnya kita itu ada yang ngeluh, bahwa kemaren itu los itu disewa satu Tapi sekarang itu e hanya sebatas apa ukuran dari los itu sendiri aja. Sementara sisanya ndak bisa dipakai untuk apa-apa.
- A : Sebenarnya kalau kebijakannya begitu, sehingga petani bisa menolak karena sekarang kan los dengan petani kan negosiasi, kalau negosiasi nggak ada titik temu kan berarti yo berarti kan ndak ada kesepakatan batal. Negosiasinya bisa gugur. Tapi petani juga harus mempertimbangkan petani mbako tanpa didukung los juga tidak akan berhasil. Jadi dua-duanya ada kepentingan.
- F : kalau boleh...kecurigaan terhadap pemilik sawah atau karena jauh ketidak mampuan kontrol pkl terhadap
- A : tidak, tidak. Jadi hanya karena dari lahannya itu tidak di wilayah kemungkinan rusak di jalan hanya jatuh, karena pengusungan itu karena yo manusia nuwun sewu buruh karena yo capek le ngoncalke hanya itu, kalau kecurangan ndak. Petani ndak punya curiga apa pun. Hanya kalau jarak itu mungkin bisa jatuh, bisa rusak, itu kan mempengaruhi
- F : melihat cukup jelas E kelompok tani cukup ya pklnya memperjuangkan, cuma saya lihat ada hal yang saya bingung mengamati di lapangan pertama itu banyak desa ... lama pemilik sawah dengan keadaan... contohnya
- A : o sudah, sudah saya sudah masuk ke desa. Jadi waktu saya ngumpulkan di habis kelompok tadi, e habis masuk kelompok tani saya sudah nekan pak lurah kami mohon untuk Gadungan lahan dicek. Antara daftar yang masuk lama dengan lahan yang nyata harus diukur kembali. Itu sudah ternyata ada ketimpangan. Ho oh itu sudah, sudah kemaren itu Gadungan memasukkan 22 hektar, untuk daftar-daftar yang lama biasanya begitu. Kemaren mau sidang saya datangi lurahe berapa ukur yang fi, pak lurah mengatakan untuk sementara 18 tapi ada satu yang belum diukur material lha nanti fitnya berapa saya ndak tahu, berarti sudah. Sekarang Gadungan itu khususnya ukurnya fit. Jadi ndak ada yang dirugikan.
- F : Gadungan, tapi di tempat lain ini masalahnya barangkali kalau ada tambah nama yang itu tidak ada tidak dikeringkan tidak dialihkan, lha orang ini tidak mengupayakan ... bahkan tidak di tempat lain ketidak jujurannya sebab beberapa petak tanah tidak diambil tapi dalam daftar itu kok masuk inikan ada .. lebar tanah.
- A : Paling ndak petani menanggung mereka, mereka ndak nanam tapi ndak dapat.

- F : Uang itu lari kemana
- A : Ndak, uang itu bukan lari. Jadi begini katakanlah seperti program ini ya Gadungan ada program pengeringan itu kan sertifikatnya dulu penuh, kemudian katakanlah dikeringkan, lha ini anu masukkan data ke ptp masih gaya sertifikat lama, lupa ndak dipotong. Kaya los itu barang. Los itu kan ndak disewa ditanami mbako, harusnya kan yang dimasukkan data kan yang ditanami. Tapi sertifikatnya data luase, lha ini otomatis yang punya petak sawah untung ora ditanami mbako ning etuk dhit mbako kan gitu. Ini harus dipeta ulang, semua yang tidak ditanami dipeta ulang. Jadi yang diserahkan ke ptp adalah area yang ditanami. Semua harus dipotong semua, yang itu pengembangan jalan desa. Desa itu kan jalannya melebar, itu ndesak sawah pak. Lha itu padahal sertifikatnya yang masuk di ptp kan ukuran .. padahal jalane ndeso kan ngembang. Lha ini kan otomatis kan ra ditanduri kan.
- F : Itu berdasar sertifikat lahan ya
- A : Ya
- F : Saya lihat kalau ada kekurangan begitu agak turun seolah-olah.... Kalau yang terakhir ini ... dari kawan-kawan berapa pak.
- A : Untuk menawarkan lima kali gabah kering. Kering giling
- F : Jadi kalau kering giling itu, itu tarif pemerintah atau
- A : ho oh pemerintah, 1500 kali lima 7500
- F : Asumsinya gimana pak
- A : Wah kalau bisa memegang analisisnya nanti ini bocor ke ptp
- F : Ndak, ndak
- A : Nanti bocor ke ptp
- F & N : Ndak, ndak pernah kita ndak berhubungan dengan ptp
- A : ini untuk pribadi saya ya, mengapa saya setuju dengan tujuh setengah kalau yang lainnya saya ndak tahu. Jadi saya punya suatu analisa pakai saya kan petani Gadungan itu kan padi, saya mempunyai analisa padi saya itu dengan analisa yang bersih sekali. Itu fitnya itu ketemunya hanya 59
- F : lima ribu sembilan ratus
- A : lima ribu sembilan ratus. Jadi petani itu haknya dihargai hanya 5900. Saya pikir, inikan analisa padi saya pikir, saya kan memperjuangkan dimana saya pikir itu. Kalau hanya sebatas itu kan saya ndak punya nilai tambah. Saya ndak punya nilai tambah, lha njut saya pikir berarti kalau 59 itu saya bulatkan enam ribu berarti kan hanya empat kali gabah kering. Saya harus mempunyai nilai tambah berarti saya kalikan lima gabah kering. Saya berpikir toh saya lima kalikan gabah kering belum tentu ptp itu menuruti kan. Kan nanti masih tawar menawar, lha saya kan saya basis empat kali gabah kering plus sepuluh persen nilai tambah saya. Itu basis saya.
- F : Tapi itu sudah logis, karena kalau saya lihatkan Dengan skenario tadi saya kira nilai tambah lebih tinggi lagi dari satu kilo gabah ... per kilonya kan.
- A : Ya .

- F : Kasusnya kan susah itu untuk mengartikan
- A : Jadi saya sederhana jadi supaya daong negosiasinya sudah ada nilai tambah ya. Kalau ndak ada nilai tambah kan les. Jadi saya masukkan aja nilai tambah langsung sepuluh persennya di dalamnya. Jadi saya punya basis pada enam ribu empat sembilan puluh.
- F : Saya melihat keberadaan keberadaan ptpn ini dilihat dari kawan-kawan petani itu karena mereka itu menganggap biaya pertanian di .. seperti tenaga ... artinya hasil bersih dari gabah itu diturunkan dari perhitungan kawan-kawan petani karena pupuk ini yang mestinya segini. Tenaga yang ndak dihitung yang hilang segini artinya harga dengan gabah itu lebih rendah dibanding yang diajukan oleh petani.
- A : yang dari ptp. Jadi seolah-olah argumentasi yang saya ajukan adalah bohong-bohongan.
- F : Bukan-bukan. Saya menganggap menilai e hitungannya itu masih hitungan belum bersih. Ndak-ndak ini cuma itung-itungan satu
- A : Ini saya keluarkan kalau ptp sudah mulai tempur kan . kalau belum tempur belum saya keluarkan.
- F : ini itung-itungan dalam kotak sendiri aja kan
- A : benih. O saya punya data-data. Benih, jadi benih itu satu hektar ya acuannya satu hektar. Benih berapa kilo harganya berapa. Olah lahan berapa haka ketemunya berapa, bajak ketemunya berapa. Tanam biayanya berapa ketemunya sini, pupuk urea satu hektar butuh berapa kilo harganya berapa ketemu. Setap berapa kilo ketemu, sp 36 ketemu, njut kcl ketemu. Nanti anda akan ketemu. Njut perawatan, pengairan lep berapa haka biayanya ketemu. Sebar pupuk berapa haka biayanya, sorok garuk berapa haka biayanya berapa ketemu sini. Matun, matun ya tahu to matun, itu berapa haka ketemu disini. Ngrontog kalau udah panen ngrontog di traver itu biayanya berapa. Njut angkutan nek wis ngrontogan gowo mulih itu berapa biaya angkutannya. Njut tekan ngomah dipepe jadi kering berapa biayanya. Njut sewa lahannya ... karena itu sawah saya, tapi kalau analisa kan harus saya hitung. Sewa lahan berapa. Lha sekarang analisa hasil, saya mengacu pada data statistik. Satu hektar padi e sawah ditanam padi itu produksinya dari dinas pertanian klaten enam ton empat ratus kilogram jadi enam koma empat. Njut waktu kita methik kan satu hektar ditanami mendapatkan enam ton empat ratus kilo, tapi waktu dipetik kan gogrog, itu gogrokannya itu lima persen. njut waktu methik kan butuh biaya itu delapan persen, njut nandur yo dipangani omo eneng manuk dsbnya itu sepuluh persen. hingga disusut susut mung kari tiganan ton empat ratus ning tinggalannya empat sembilan ratus dua lapan kilo. Kemudian kami hitung angka-angkanya ini kost produknya sekian njut ini tadi gabah kering gilingnya ketemunya hanya empat ton tidak enam ton itu kalikan harga gabah kering sekarang berapa dikurangi kost produk ketemu bersihnya petani
- F : Berapa
- A : Bersihnya petani per apa per hektar semuanya empat juta tiga sembilan dua
- F : Kalau per pathok kira-kira dibagi
- A : A itu masing-masing

- F : Iya ini kasar-kasaran
- A : Anu aja
- F : Ini nggak punya contoh
- A : Kalau untuk Gadungan tapi petanya berbeda-beda mashektar itu nggak sama. Umpamanya Gadungan itu satu hektar itu lima setengah, mungkin Kalitengah mungkin daerah lor sana satu hektar hanya empat petak.
- N : Hasil bersih empat juta
- A : Kalau empat bulannya, empat bulannya empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu, ya kalau satu bulannya kan satu juta sembilan puluh delapan ribu. Kalau petani punya satu hektar itu pendapatannya itu satu bulan satu juta. Satu juta itu tadi kalikan tujuh kan diapaki mbako kan tujuh bulan, nah.... Tujuh bulan berarti pendapatan petani satu hektar dikalikan tujuh bulan ketemu tujuh juta ini kami bagi seribu tiga ratus kilo karena produc rata-rata Tiga belas kemaren juga tiga belas bahkan di daerah utara nggak ada hanya delapan, sembilan. Kami merata-rata tiga belas lha ketemunya lima sembilan lha inilah yang harus diganti oleh lha ini kan lima sembilan kan dibulatkan enam ribu. Lha berarti kan empat kali gabah kering lha kami nawarkan opo yo arep empat kali gabah kering nggak mungkin kan. Mestinya ditinggikan ngono lho
- F : Itu akibatnya nanti kalau negosiasi apes-apese
- A : Apes-apese ho oh. Jadi di bawah ini saya dicekik kasarane gitu lho. Sukur diatasnya itu memang yang dikehendaki.
- F : Jadi masalah tadi, kenapa ini suara yang tidak langsung karena seolah-olah memang ... agak merendahkan kemampuan petani ngitung. Kenyataannya yang mereka katakan itu cuma sebesar itu. Padahal saya juga e melihat analisisnya bahwa sering petani justru membuang atau tidak memperhitungkan kost pribadinya tenaga sendirian karena dianggap sebagai yang sudah selayaknya tapi itu malah masuk gitu lho.
- A : Tapi ini analisa saya ini petani tidak (F: belum masuk juga) o ndak tenaganya ndak dipakai ini. Dalam arti saya sebagai petani betul-betul duduk manis di rumah.
- N : O ini petani pemilik murni.
- A : Ini saya ngitung ini saya duduk manis.
- F : Pertanyaan saya kenapa ini ndak masuk ke ongkos produksi
- A : Lho masuk kost produk
- N : Tenaga kerja
- A : Iya inikan hk hk semua, hk semua ini kan pupuk pupuk hk jadi ndak ada pengairan, pupuk hk, sorok garuk hk jadi saya betul-betul duduk duduk manis di rumah.
- N : Ini siapapun yang mengerjakan.
- A : Bagaimana
- N : Siapun yang mengerjakan.

- F : Tapi disitu mas ari yang mengerjakan yang mengerjakan kongkongan orang lain jadi supervisor
- A : O ya paling tidak saya sebagai manajernya ada gajinya itu bisa menerima saya , belum masuk
- F : Tadisaya sendiri lihat kawan-kawan ini jangan lebih banyak yangstok sendiri itu
- N : Memang kan gitu meskipun hitungannya digarap sendiri kan biasanya membutuhkan tenaga lha ini mungkin yang tapi kadang-kadang dia nggak nyangkut sendiri ya mungkin ke sawah nyabiti atau galengan itu kan yang belum dihitung disitukan
- F : Kebanyakan yang dihitung disitukan, kadang-kadangtapi okelah. Sekarang saya sudah mempunyai gambaran format yang diperjuangkan mas ari dan kawan-kawan itu memang e
- A : Sebetulnya mas tadi masih masih yang jelas analisa saya itu saya sebagai manajer saya belum saya masukkan, tapi kalau sebelum saya tanam kita apa itu istilahnya menantingi itu nggalengi itu sudah saya itung olah lahan ini. Sebelum kita anu itukan olah lahan dulu. Olah lahan itu.
- F : O maksud saya kalau dia mengerjakan sendiri, mas ari sendiri macul ini jadi hilang
- A : O ya oh oh tapi ini kalau saya jadi manajer itu namanya kan olah lahan, kelemahan saya hanya saya sebagai manajer tidak saya gaji
- F : Mungkin ...diperjuangkan jadi
- A : sebagai manajer tidak saya masukkan
- F : Kira-kira persepsinya gimana perjuangan dari
- A : Karena ptp belum memberi tanggapan ya masih mempelajari jadi waktu kemaren kami membacakan tuntutan itu yang jadi revisi kemudian latar latar belakangnya permasalahannya ptp mendengar kemudian maju kami menyerahkan tuntutan kami dari kaum petani dan ini ada perubahan sedikit mendadak tapi ndak apa-apa, terus ptp memberi kesempatan wah ini kami belum bisa menanggapi hari ini, karena kan baru melihat teksnya kan dia nggak bisa berpikirlah hanya waktu satu minggu ... minggu depan kami sudah siap monggo silahkan
- N : Kalau yang ini ini yang akan diperjuangkan untuk musim tanam besuk ya kalau yang kemaren hampir sama nggak prosesnya yang sudah ditentukan kemaren
- A : Kemaren kami juga menggunakan ini, tapi kan kemaren juga ..berdiri sendiri-sendiri Jadi kemaren saya bpn menggunakan iniN O biasanya kayak orang jualan di pasar nyang-nyangan, kalau N O bilang delapan ribu petani untung ora, ...
- N : Nah kalau yang proses itu kemaren gimana mas ari mungkin bisa cerita sedikit paling tidak ini kan bisa dianalisa untuk yang akan datang itu bagaimana
- A : Kalau kemaren itu pertama kami mengadakan dengan analisa begini, ptp kelihatannya mengimbangi gaya ini, mereka kecolongan, kecolongan banyak sekali. Kecolongan apa, dia sewa lahan tidak dimasukkan. Lha kami diam wong berarti kami diuntungkan, itu satu kecolongannya disitu. Kedua masalah biaya

anau hama sepuluh persen tidak dimasukkan, saya diam ini keuntungan saya. Saya diam keuntungan saya, lho ini kan trik ...monggo trik trik untuk memperjuangkan kok. Dua itu yang tidak disinggung, kami diam saja silahkan saya tantang terus silahkan cari referensi minggu depan kami siap. Udah dihitung ketemunya lima ribu tigaratus dua puluh lima ganyang o ndak mau. Wah rugi, rugi kalau mbayar lima ribu tigaratus dua puluh lima kami rugi kami nggak berani, padahal kalau dia jeli bisa mbobol lagi bisa turun. Lha sewa lahan tidak dimasukkan njut hama nggak dimasukkan kan keuntungan saya

- N : tidak termasuk perhitungan biaya
- F : Dia negosiasi sendiri manajer ...hasil pemasaran
- N : Dia mengatakan rugi
- F : Rugi itu ptp yang bilang. Pertanyaannya kan sekarang kalau mau nego seperti itu apakah selama ini ptpn sudah cukup comtabel
- A : Lha ini saya belum bisa membaca kemaren kan saya
- F : Makanya saya kan tadi tanya, kalau mas ari menggunakan pada sisi mas ari, kemaren kan menggunakan pada sisi mereka saya rugi iya to, karena ini namanya kontrak kerja sama kan mas ari bagaimanapun juga ya mempertimbangkan dalam tanda petik ya entah ya entah tidak dipertimbangkan. Pertimbangan itu kan akan menjadi persetujuan kalau mas ari juga sekarang juga tahu comfobilitas atau keterbukaan daripada termaksud
- A : sekarang begini, kemaren waktu dia kalah argumentasi katakanlah lima kali pertemuan argumentasinya 5225 masalah mereka adalah mengapa ada point point yang jeli yang nggak dijebol kan kesalahan dia jadi katakanlah dia nggak jeli gitu aja. Sedangkan itu penemuan saya bayar 5325 kalau kami membayar ... kami rugi karena ptp gini gini njut biaya ongkos produk nanam mbako begini begini wah pokoke mbelit mbelit lah gitu dia. Dah seakarang gini, kalau anda bilang rugi mana saya percaya anda bilang rugi kami datang angkutan publik. Gitu dia menutup
- F : Artinya kan dia tidak comfotabel
- A : Ini ... rodo mungsuhan saya, ini karena kalau angkutan publik pajak akan ikut bicara otomatis kan.akan tahu o bukune konangan kami itu rahasia perusahaan, lho darimana kami percaya anda rugi bahwa anda mengatakan rugi. Mulai itu dek , sekarang begini aja pak, sekarang bapak akan menawar harga berapa sekarang mulai anu mulai bakul pasar yaitu 36 kami dihargai 3600 wah ndak bisa, kami akhirnya melakukan e suatu argumentasi diluar proposonal lha itu mulai itu saya udah mulai melepas buku saya itu jadi tidak pakai analisa wis asal bicara pokoke sing penting harga naik lha itu .
- F : Artinya kan sekarang itu naik tidak imbang bahwa mereka tidak tapi sekarang comfotable bisa dihitung mereka tidak bisa menghitung bagaimana itu kerjasama
- N : Yang dipertanyakan itu kan
- F : Paling tidak ada poin-poin pokok katakan harga tembakau, produktivitasnya sudah jelas, terus dikurangi kosnya aja, itu paling tidak kan. Sebetulnya itu, e mungkin detilnya terlalu detil e karena kita tahu bagaimanapun juga di dalam itu kan tidak bersih hampir pasti. Di semua perusahaan ...negeri itu kita sudah tahu

paling tidak kalau tahu ada upaya untuk menjelaskan kepada Kalau memang itu ditawarkan tapi tidak modal tadi, saya sendiri berusaha menghindarkan dalam otak saya bakul hubungan bakul karena bagaimanapun juga itu tidak mendidik petani iya to. Kalau memang ingin mendidik petani kan bagaimana mereka menjelaskannya ... secara comtable gitu.

- A : Tapi kan yang mendahului kan dia
- F : Nah itu
- A : Ptp, ptp kan mendahului tidak membayar seperti itu, saya tahu saya curang. Tapi curangkan bukan saya. Mengapa mereka nggak ngebol argumentasi saya.
- F : Sampai disitu bukan kesalahan petani.
- A : Lha iya to. ...padahal saya tahu sewa lahan belum dimasukkan.cari referensi saya tunggu.
- N : Yang belum dihitung. Ini kan sepihak ya mas fatur ya. Kesannya sepihak dari petani. Ya padahal yang namanya kemitraan itu kan harus sama-sama terbuka to. Kecuali kalau ptp itu jelas-jelas sebagai anu tengkulak itu kan bisa. Dia nggak mau karena dia perusahaan yang mencari untung. Meskipun sama-sama ya, kalau kemitraan itu sama-sama diuntungkan, tapi kan yang dari pihak ptp tidak mau terbuka e untuk pengeluaran dl sbnya itu kan yang satu sisi.
- A : Lha akhirnya mereka itu saya hantam begini dia kenceng pada Sekarang nggak proporsional ya pak iwan, karena saya mengajukan analisa usaha ternyata ndak membayar berarti ndak proporsional. Padahal pak iwan tadi bilang rugi saya mendatangkan ... publik karena ini untuk rahasia perusahaan. Saya bisa mengerti, tapi saya akan saya sampaikan kata-kata pak iwan tentang rugi tadi. Saya sebutkan pada tanggal sekian hari ini jam sekian mata saya melihat telinga saya mendengar berita di tvri tentang ptp 10 yang mengumumkan neraca keuangannya tahun 96 itu untung 90 milyar tahun tahun 97 kemaren untung 117 milyar. Ngapain bilang rugi aa itu. Dia wis kroso. Ngapain bilang rugi sekarang bicara. Benar ndak kata-kata saya tadi, benar pak memang keuntungannya demikian. Tapi kan itu tidak hanya ini, ptp 10 itu kan kebonyanya banyak, itu kan gabungan. Entah gabungan tidak tapi ... bisa saja menguntungkan, sekarang kami minta tambah. Lha tambah langsung 300 tadi. Udah saya kasih 300 dah 39 lha saya mau tanya lagi. Saya mau tanya pak iwan saya mendengar dari ptp 10 dari direksi, staf karyawan mantri mandor itu ada bonus. Saya dengar bonusnya ada 16 juta, njut staf itu 7 juta, mandor 2 juta, karyawan itu 150 ribu. Mana bonusnya petani, wah uwis ngawur saya, lho ptp tanpa petani ndak bisa hidup ngapain petani ndak dikasih bonus. Minta bonusnya, ya saya tambahi seratus, empat ribu. Mulai ngawur, mulai ngawur saya itu. Jadi sebetulnya sangat saya sayangkan, tapi dia yang mulai kok, mulai nggak proporsional kok. Jadi ini besuk saya keluarkan kalau sudah sangat mentok. Kalau belum mentok saya diam saja, karena berunding besuk saya ... saya bicara. Karena gabungan, kemaren kan bpn berdiri sendiri. Jadi kami punya kapasitas. Tapi setelah gabungan kan banyak orang. Kami sudah tidak masuk nominasi istilahnya tidak nominasi untuk bicara. Jadi saya paling muda sendiri paling bijak, yang masuk yang sudah tua-tua. Pak majenar yang tengah, terus pak heru, pak ... itu kan pinisepuh pinisepuh jadi ya, tapi gimana ya semua orang itu punya kelebihan kekurangan ya sebetulnya mereka memang banyak bicara ning tidak tajam. Wingi itu saya itu jeleh mangkel banget itu, jadi dua jam bicara itu kayak orang jual jamu. sampai ... keseleo, latar

belakang itu keseleo. Keseleo langsung saya break. Apa. Cabut kata-kata itu. Saya itu orangnya ... striker, kalau sepakbola striker langsung. Plas, plas gitu. Saya break, langsung. Apa. Cabut kata kata pak jenar. Apa. Pak jenar tadi mengatakan apa. Bilang latar belakang tawaran ... 300 mengapa bapak mengatakan 200 tidak apa-apa. Cabut kita bertempur. Wasalamualaikum langsung tutup. Wa saya gitu. Beliau banyak omong, intinya ambyar kabeh. Lha itu lho, wah saya repot.

- F : kalau apes apesnya, seandainya negosiasi itu macet itu gimana.
- A : Kami nanti akan melakukan informasi ke direksi. Jadi ini sudah saya rekap. Karena yang kemaren itu ada perubahan mendadak ...nanti tembusannya disamping ke hkti, ptp bupati sama direksi. Direksi ptp
- F : karena ini lain, ada penghubungnya. Bukab, bukan orangnyadiatasnya ada direksi ada ... masih ada. Kalau seandainya itu macet, paling tidak bertele-tele masa tanam sudah makin mendekat, gimana. Seandainya direksi tetep artinya paling tidak
- N : Proses bergaining ini tidak kesampaian sehingga waktu musim tanam sudah jatuh tempo.
- A : Kami tidak, paling kami akan menawar menembus ke direksi-direksi tetep ya kebijakan akhirnya petani ya tidak menanam gitu saja. Karena komitmen petani disini berunding dulu baru menyiapkan lahan.
- F : Tapi ini juga sepertinya apakah petani juga tidak rugi dalam artikan Kebanyakan petani Kalau disewa oleh ptp dengan harga yang sekarang ini
- N : Mas ari sendiri lebih senang kalau disewa ptp daripada disewa
- F : Dengan harga yang sekarang (43) ya harga 43
- A : Saya dipakai tanami mbako
- F : Ho oh kan lebih besar penghasilannya dibanding disewa petani o penggarap. Artinya apa ada tekanan secara tidak langsung pada petani, seandainya itu tidak jadi. Terus pertimbangan apa yang untuk mencari jalan keluar itu.
- A : Saya rasa walaupun saya itu lebih untung ptp, tapi tidak ditanami ptp saya rasa masyarakat petani itu ndak apa-apa. Seandainya kalau ditanami padi istilahnya rugi tapi petani tidak ndak masalah.
- F : Kalau begitu apakah hubungan dengan ptp itu apakah masalah otonomi tanah
- A : Ndak. Jadi itu begini. Jadi itu kalau semacam otonomi kita mengacu gaya lama memang ada semacam itu ya otonomi atau undernomeng itu kan begitu, tapi kan saat ini di dalam diri petani itu masih terbayang kaya gaya lama. Walaupun sekarang arusnya sudah berbeda. Tapi gaya seperti itu masih melekat di dalam diri mereka. Ambil contoh kemaren waktu saya ngumpulkan petani tgl 14 september saya pernah menggebrak. Bagaimana kalau negosiasi tidak berhasil pola tanam saya petani Gadungan ndak mau. Pngen tanami padi, saya sudah tebak. berarti aspirasinya pola tanam tetep nanam ini, ya. Berarti anda kalah. Sebagai tuan tanah berarti anda kalah dengan ptp. Ya sudah ini berarti kalau bapak percaya pada saya, saya nggak suka seperti itu. Kita tuan tanah, kita harus negosiasi yang baik. Kalau saya begitu. Tapi kan saya hanya wakil petani yang sekian jumlahnya sekian mosok harus melawan dengan kawan saya. Gitu lho.

- F : karena saya melihat. Jadi struktur, bukan masalah pemilik, jadi struktur e sawah petani e tidak seragam ada yang tadi pemilik penggarap, pemilik thok penggarap thok. Lha itu dimana sejauh ini memang kalau digarap oleh penggarap itu memang mereka mendapat keuntungna, itu ya wajar karena mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan nilai tambah pemilik. Kebetulan juga kebanyakan pemilik wedi secara umum kelompok yang strukturnya tadi termasuk kelompok orang yang tidak rendah menengah ke atas, malah sebagian atas, sehingga mereka pola pikirnya kalau saya tidak salah agak istilahnya yo uwislah. Daripada ora. Iya to. Ini menjadi titik lemah untuk bergaining. Kalau saya lihat karena dalam otak saya, petani adalah penggarap pemilik adalah penggarap. Dan itu membuat segalanya menjadi berubah. Ketika ada di lapangan ada itu minimal 3 struktur itu karena ditambah dulu. Ini gimana. Lihat struktur lho mas, struktur masyarakat ini yang menjadi, karena kalau kita lihat itu terjadi sejak sebelum jaman belanda. Lihat dari sejarahnya itu sebetulnya artinya posisi petani tidak menguntungkan dari sejarah. Sejak dari Menjadi penggarap kemudian ada ...dari belanda karena mengharuskan menanam pola tanam pola kerjasama mulai dari sewa thok itu kemudian mereka yang nggarap ada macem-macam ya. Petani kemudian juga menanam tembakau mereka jual tembakau ...semua itu tidak menguntungkan petani. Lha ini apakah ini
- A : Karena mungkin budayanya petani saya rasa. Budayanya petani jadi petani sejak dulu itu sudah merasa orang yang bawah jadi piye-piye itu nrimo begitu. Mungkin begitu. Saya rasa itu hanya budaya petani.
- F : Jadi ini nggak, artinya perjuangan bukan perjuangan untuk kenaikan saja....
- A : merupakan cakrawala
- F : ...membela petani ...katakanlah ini kebetulan
- A : Memang jadi gini lho. Ini kebetulan saya duduk di kelompok memang saya punya pola begini, nuwun sewu kebetulan saya dikelompok itu pintar sekali karena ketua kelompoknya itu nuwun sewu ya begitulah bapak sudah melihat. Itu dia mbacakan itu saja dia bacakan jadi dia memang pengalaman Memang nggak ada. Jadi saya memang ingin membawa petani Gadungan petani yang profesional. Tapi selama ini saya mesti di... oleh pak lurah disitu. Maaf pak saya ingin mandiri, saya sudah bilang. Kelompok tani ingin mandiri, semua saya ambil, stempel semua yang membuat undangan semua saya. Saya ingin mandiri saya akan, ya setiap saya mengajukan suatu bentuk-bentuk pola selalu ya silakan ...menghalang, oke tapi belakangnya ndak ada terwujudnya. Masalah pribadi
- F : Saya dengar Gadungan termasuk yang cukup baik untuk mensport petani. Ini kebanyakan
- A : Tapi saya merasa terhalang contoh ya. Saya dua tahun yang lalu mengajukan saya mengatakan saya ingin pilot projek saya minta petani merelakan korban lima lahan korban. Dijaikan pilot projek. Mau nanami opo, padi. Kita bentuk satu panitia kecil dengan pengolah lahan yang tepat. Hasilnya bagaimana disaksikan seluruh petani. Dari situ apa mendidik petani biar dia tahu bagaimana menggarap yang baik dengan hasil yang baik toh nanti uang itu diterima oleh petani masing-masing. Dia hanya dipinjam untuk pilot project. Tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan.

- F : kalau kembali ke padapemberdayaan petani ekonomi kerakyatan. Tidak hanya petani tapi juga pedagang karena kita ada punya kekaryaan pedagang. Jadi yang utama mereka itu tidak, budayanya tidak seperti yang mas ari katakan, dimana Sangat rendah padahal restiking itu menjadi rendah restiking tahu kan kemauan rendah mereka lebih baik slamet. Padahal kalau tadi budaya ...paling tidak bisa menjadi berubah tapi menyalahkandimana itu akan mengubahitu kan yang mas aritapi juga di pedagangkalau pedagang kulakan itu sama dikuasai oleh siapa cuma dengan pola yang berbeda kan sama. Itu kan dikuasai oleh siapa. .. jadi makanya perjuangan seperti ini perjuangan yangjadi saya sendiri masih belum tahu kapan berubah, karena berat itukan kalau kitadimana itu bergabung dengan ...industri kecil iya to dalam lingkup yang sama Gadungan atau kalitengah atau mana saja. Bergabung lagi dengan pedagang kecilpetani thok pedagang thok yo ndak bisa. Ini keuntungansehingga saya sendiri yamakanya saya pingin tahu sama sama lah tujuan kita sama pola kita yang berbeda
- N : Ya tingkat kepasrahan, tingkat kepasrahan tinggi petani itu. Yo wis arep pripun. Jane nggih mboten purun ning
- F : Ini tidak, mas ari sudah tahu fungsinya saya tidak me...saya sendiri termasuk orangtetapi oleh karena itu kalau saya menganjurkan ke mas ari pertanyaan yang agak mendalam ...pendek sasaran targetnya itu apa haha
- A : Sebetulnya saya begini ya, jauh sebelum saya menjadi wakilsaya kebetulan dekat dengan saya itu banyak meskipun saya itu banyak walaupun saya bukan petani penggarap ya saya itu banyak berurusan dengan petani. Jadi saya itu di Gadungan itu menjadi petani yang profesional, petani profesional itu dia itu mampu menjawab masa depan maksud saya itu begitu. Kalau petani di tempat saya kelihatannya klas bawah ya. Saya itu ingin petani itu punya masa depan. Pertama itu saya dulu ndobrak sama pak lurah itu pola tanam, tapi pola tanam orientasinya pola pasar tidak orientasi produral dia itu lange di kalurahan akhirnya kan pak lurah kalahkan argumentasi ya udah sekarang ikuti aja itu pendapatnya mas ari petani sekarang berorientasi pasar karena ini dengan orientasi pasar petani penghasilannya meningkat. Kalau petani orientasi produkkan nuwun sewu orde baru kan produkkan dikendalikan istilahnya dikendalikan kita ...pasar ya itu banyak yang kemudian mencoba melon tapi kok ...lagi ya sudah. Tapi ya bagaimanapun juga perubahan itu ada. Perubahannya perubahan evolusi bukan karena bangkit tapi karena proses evolusi atau regenerasinya berubah sehingga mereka berubah proses evolusinya. Kalau secara ndeso
- N : Selain kontribusi itu.
- A : Kontribusi itu banyak sekali, terutama untuk desa Gadungan. Seperti apa yang kecil-kecil ada. Seperti saya nanam sengan saya minta bantuan 500 pring . kemaren ini kami dari ..mesjid saya pasang tratag ...pring cari, njut seperti tujuhbelasan minta bantuan cair, njur ini saya mbangun irigasi 315 meter rencana saya mengajukan proposal 3 juta ke ptp insya allah lagi cair. Jadi kalau untuk Gadungankecuali kalau untuk desa lain saya ndak tahu. Besar, kontribusinya besar sekali.
- O bagus memang mengutamakan untuk wilayah Gadungan itu besar masuk. Saya sekarang sudah pengangguran kalau mereka mau mesti ada dispensasi mesti.

- F : Itu mengatakan bahwa ptp harus e buruh harus ditempat e apa selama ini memang begitu.
- A : Justru kendalanya kalau di tempat saya do pekewuh gengsi. Di situ kendalanya.
- F : Saya tahu. Lha Gadungan Kalitengah memang tidak banyak tenaga kerja.
- A : Padahal jane gajine banyak ya. Saya cek kemaren nggak umr ternyata 4350, padahal umr 47. Tetapi untuk ...sudah lumayanlah. Padahal saya tawar-tawar ya untuk lulusan baru-baru smp ...disana itu gajinya lumayan walaupun nggak umr tapi daripada di rumah bengong, tapi gengsi itu tadi.
- F : ya kalau kita bicara sedikit tadi mas ari mengatakan ptp sendiri punya hak e kalau begitu saya ingin membalik pertanyaannya kalau dibalik ya, seandainya ptp itu justru mengalami penurunan, itu apakah juga sebaliknya akan diganti kerugian.
- A : Jelas karena ...pengangguran. Soalnya dalam hal ini sebenarnya kami profesional menawarkan 5 kali gabah kering kan proporsional sekali. Ptp pasti ndak akan nuruti saya punya basis tadi ...plus 10% ini kan sangat proporsional ya saya berarti tidak hanya mencari keuntungan untuk petani saja. Tapi saya juga mengingat ptp itu juga perusahaan mencari keuntungan untuk devisa negara. Sekaligus dia membiayai karyawan dan buruhnya. Lha ini kan antara ptp, petani, buruh tiga komponen yang tidak bisa lepas.
- F : Ini pada pihak lain ptp sendiri melalui petani yang saya dengar berargumen. Besarnya peran ptp terhadap penyediaan lapangan kerja terutama membuat petani kurang berani bernegosiasi, apakah betul.
- A : Sebetulnya begini, seperti kemaren. Kemaren itu petani sebetulnya mau mempersiapkan, tapi ada semacam suatu argumentasi yangkami itu menyenggal 4 005 buruh argumentasi salah satu yang kami bayar 53 juta bisa rugi lagi. Kami itu tiap minggu mbayar setengah milyar lha itu, sehingga saat itu mental itu kaya dijlogke gitu. Sebagai manusia kan tahu empat ribu buruh dibiayai oleh ptp tiap minggu setengah milyar gaji, njur kok petani isih ngeyel banget ...jane itusekali gitu lho. Tapi yo wis, akhire terus saya gitu lho. Jadi kami punya perasaan seperti itu, tapi sebetulnya kalau mau proporsional sekali sebetulnya saya juga lebih senang ptp itu mau proporsional kami sudah siap. Dan kami menyadari bahwa yang namanya buruh petani ptp itu tiga komponen tidak bisa dilepaskan. Sekarang saya sudah mengatakan secara logis, misal ptp dengan petani negosiasi bagus, buruh boikot tiga hari semua hancur. Akhirnya petani hanya dibayar jaminan minimal. Akhirnya ptp juga rugi, ra ono mbakone masuk neng mbayar jaminan kan yo rugi. Makanya tiga komponen yang tidak bisa dilepaskan sebetulnya.
- F : Kalau boleh saya nyelo untuk pertanyaan. Sebetulnya kalau buruh cukup tahu persis
- A : point kos saja. Tapi ini point kos sudah dimasukkan
- F : Ya itu ini kan perjuangan tambahan. Oleh karena itu e sebaliknya perjuangan itu nanti bisakalau sadar betul nanti mogok tiga hari ikut rugi gitu. Tapi memang itu sebagai hak, artinya kita tidak bisa mengabaikan kepentingan ekonomi di satu pihak termasuk petani pemilik mereka mempunyai hak untuk menjalankan baik sama-sama. Ini saya juga melihatnya menarik, karena artinya fair.

Memperjuangkan yang pihak lain. Pertanyaannya, apakah kalau mereka tidak tahu apakah mereka itu tidak ada semacam gerakan yang

- A : Musim tanam 2000
- F : Mereka itu kan selama ini jadi alat, bukan sebagai person, bukan sebagai buruh, tapi sebagai instrumen itu lainnya. Kalau saya mengatakan sekarang ini.
- A : Untuk sementara musim tanam ini kami perjuangkan lewat ini. Lewat ini saja dulu. Kan dalam hal ini kan sifatnya kita gerakannya prosen jadi tidak langsung peserta ya. Jadi petani berunding dulu dengan ini buruh di...., lha nanti fe nya buruh di
- F : Jadi sudah ada langha untuk memasukkan mereka dalam kelompok. Komponennya tiga
- A : Kalau peserta dua ribu belum yang akan ...dalam arti petani sudah mandiri. Jadi begini, polanya begini caranya. Kan selama musim tanam 97 kami kan di belakang kami ada lembaga.... Nanti njut musim tanam masih didampingi. Nanti kan 2000 forum ini berdiri sendiri mendatangi sendiri ...dengan lembaga yang lainnya beralih ke buruh memperjuangkan buruh. Sehingga antara ptp petani buruh semua penghasilannya meningkat arahnya kesitu. Tapi semua pada batas proporsional tidak saling menjatuhkan.
- F : Ini ada satu hal ya yang saya sendiri tidak tahu kondisinya tahu begini tapi tidak tahu logika Ptp mengerahkan pemda denganbagaimana hubungan dengan bupati mengeluarkan sk duluyang terakhir saya tidak tahu, tapi nampaknya sedikit berubah. Walaupun disit di....nampaknya ada pilihan boleh atau ora. Kemudian kecamatan, kelurahan sangat terlibat yang itu suaranya satu padahal kepala desa atau perangkat desa itu posisinya juga mewakili masyarakat gitu lho.
- A : Sekarang pertanyaannya kok bisa begitu
- F : Iya
- A : Kembali ke kebudayaan petani nrimo tadi.
- F : Apakah cuma itu he he he karena mereka bukan mas arinya, petani mihak yang lain jadinya. Saya melihatnya itu lho. Kok mas ari ngene ternyata, menurut saya petani mihak yang lain. Petani bernegosiasi seolah-olah dengan perangkat tidak dengan ptp minder ...
- A : Sekarang gini kalau kita aspek budaya ya tadi kan petani nrimo. Paling-paling jejeli duwit kasarane. Tapi kalau kita mengacu pada e kelompok-kelompok tertentu ya dalam arti mereka punya pola pikir semuanya tahu ini adalah suatu istilahnya doktrin tangan besi ya tapi siapa berani melawan gaya orde baru kemaren. Kan mestinya melawan sialkan kena senjata mungkin atau mungkin diapain resikonya kan nyawa.
- F : Artinya itu strukturnya sangat ke atas ya. Karena kan saya melihat pada level pbanding dia mendapatkan apa.
- A : Itu kan saya mendengar ya buktinya saya nggak tahu ya. Seperti kepala desa itu dua setengah fe ya, camat itu kalau nggak salah setengah persen. feny . camat,
- F : jadi person. Bukan lembaga.

- A : O bukan. Jadi kepala desanya, dia berarti camatnya itu kalau ndak salah 0,3. Setengah persen. Berarti 0,3 ...karena apa karena mereka sebagai alat perhubungan. Kepala desa itu sama Bimas, camat itu sama bimas, bupati sama ... sehingga mereka bertanggung jawab tentang masalah pertanian. Jadi kalau mereka dapat fe mungkin sudah percaya atau ada hubungan dagang saya ndak tahu.
- N : Dengan posisinya dia
- A : Memang itu, jadi itu bukan suatu kolusi dosa
- F : Tapi fe itu berdasar harga tetangga harga negosiasi iya to. Tapi sebetulnya uang petani. Uang petani atau bukan kalau dia ikut berjuang kansebetulnya itukan. Oleh karena itu apakah mas ari itu sudah memasukkanini untuk menggalang kekuatan.
- A : Kalau masalah menggalang kekuatan itu belum. Tapi kan pernah melontarkan pada pak iwan kan, mengapa ptp tidak membayar 5, kalau bilang rugi saya mau tanya pak iwan, apakah selama ini dipres oleh pejabat, jangan-jangan ptp tidak membayar kayak gini uang ptp banyak diperasi oleh pejabat. Lha bilang saja sama petani biar petani yang protes sama pejabatnya. Pak iwan hanya senyum-senyum saja. Mas ari kok bisa tega gitu to. Petani terbuka saja. Jangan-jangan ruginya karena nggak punya uang, tapi karena uangnya banyak keluar ke pejabat pak. Saya bilang gitu. Bilang saja pada petani biar petani yang protes. Karena apa, petani kan punyayang besar jadi mungkin lebih diperhatikan. Kalau ptp mau protes pada pejabat takut.
- F :dengan undang itu ada komponen-komponen yang mohon diteliti. Kalau mereka ... dengan ptp iya to artinya paling tidak lebih netral petani juga sebagai Ini kan sebagai semacam jembatan dengan ptp melalui pejabat artinya dia dapat dihubungkan pada posisi apapun. Iya toh. Dan akan lebih diuntungkan kalau dia ada pihak-pihak yang memperjuangkan dengan menyangkut 2,5 persen dengan naik harga gitu lho. Iya toh, produktivitas otomatis jalan.
- A : Tapi kan mereka membela yang sebelah gitu lho.
- F : Pertanyaannya itu, saya masih bertanya-tanya.
- A : Ndak tahu kalau ada di luar, bisa ndak ha....haa..
- F : Ya ndak resmi itu
- A : Saya ndak tahu
- F : Saya sendiri adanaik
- A : Jadi saya malah bertanya-tanya pak iwan tentang masalah pemerasan pejabat itu waktu itu pas siang malah saya datang kesana. Bilang siapa nanti kalau memang ada bukan berarti saya mendata orang, tapi kami bisa menyuarakan lewat koran. Gitu lho pak maksud saya. Kalau memang sumber pak iwan bisa dipercaya saya korankan. Maksud saya begitu.
- F : tapi menarik.agak-agak sedikit ketinggal untuk mengejar, tapi nggak apa-apa.
- A : O ndak dulu itu bisa berubah
- F : Musim tinggi

- A : Ho oh jadi frekwuensinya pas padat
- F : Terus buruhnya nanti banyak.
- A : Kalau nanti pas mungkin mbakonya tinggal cilik ya dikurangi buruhnya.
- F : Sama dengan, seirama dengan pola tanam
- A : Iya betul. Pasitu nanti banyak itu nanti pas pada waktu itu dikurangi. Ndak...dikurangi itu berganti-ganti tapi biasanya ya orang-orang yang lama. Karena apa sudah punya ketrampilan.
- F : Frekuensinya gimana.
- A : Kalau.. yang lewat jaringan mereka karena mereka punya mandor punya karyawan tetap jaringan mereka membawa lingkungannya gitu lho.
- F : Karena kalau musiman itu kan gampang-gampang susah ya. Terus akhirnya dari pihak ketiga akan mencari karyawan yang sudah terbiasa, jaringan itu kan tidak mudah. Dari sekian masalah pokok kalau dilihat perjuangan ini tidak hanya masalah harga itu adalah salah satu yang penting tapi juga ada masalah waktu ada masalah pembagian masalah kompensasi yang ...apakah itu ada rangkingnya
- A : Ada.
- F : Yang paling pokok, saya hanya yang melihat yang paling pokok memang harga sesudah itu apa.
- A : Pengolahan pasca panen itu lho. Penyuburan kembali pasca panen. Oro-oro dsbnya. Terus tiga point itu sama pembagian petani dengan ptp langsung. Ada point satu. Itu harus ada. Kemudian tiga itu, kalau karo anu jaminan minimal 12 kwintal itu point. Yang lainnya bisaseandainya
- F : ini 12 kwintal itu ini yang baru atau yang diperjuangkan. Yang lama atau yang baru. 10 ya. Itu 10 itu sudah ada kenaikan?.
- A : Dulu 8, kalau nggak 8 ya 9.
- F : Dulu lagi katanya awalnya 4. Terakhir 10 mau 12.
- A : Jadi seperti los itu nggak begitu Karena kami juga mengerti bahwa dengan ptp dulu juga
- F : Saya ingin tahu kalau negosiasi ini masalah bargaining mana yang dilepas. Jadi
- A : Jadi seandainya mereka memilih los juga ndak apa-apa seperti mereka itu 5 persen e memberikan apa itu e memberikan nilai tambah itu justru kesulitan, karena butuh manajemen, tapi kontribusi disana tetap. Tapi ptp sudah memberikan walaupun ini tidak menambah 5 persen ya tapi kan sudah besok kan sudah memberikan ...jadi kemaren negosiasi yang kemaren itu 97 kemaren itu ini ada susulan ditambahi spre. Kalau 15 thok dikasih spre besar. Itulah sama halnya kalau ini 5 persen belum nilai tambah sudah
- F : Itu menurut kalau dipersensikan boleh. Kalau untuk
- A : boleh tidak ya. Itu istilahnya cuma bakulan aja. Sebetulnya arahnya kami cuma ingin 5 persen gitu.
- F : lebih baik gitu daripada .

- A : Ho oh uang yang 5 nya sehingga mungkin bisa ditambahkan ke uang mbako walau bagaimana pokoknya ada uang masuk. Tapi mungkin agak kesulitan
- F : Dulu itu sumur juga termasuk itu.
- A : Daerah itu kan ada sumur kering itu udah o belum pernah, sumur sedot belum pernah, itu begini.
- F : bukan ptp
- A : Bisa saja ptp tapi bukan membantu petani, jadi ptp waktu nanam tembakau kekurangan air. Sehingga kemudian dia membuat sawah, setelah dia dilepas buka tanah itukan biasanya bornya dicabut, petani nggondeli wah jangan dicabut biar itu untuk petani aja. Akhirnya ya tetap kan gitu. Diya ada pipa-pipa, tapi itu bukan ptp, dulu itu untuk kepentingan tembakau sebetulnya mau dicabut, tapi ptp tapi petani menghendaki biarin aja disitu. Besok kalau petani butuh biar bisa ngebut. Jadi itu setengahnya kalau dikasih bantuan yo nggak tapi yo dikatakan bantuan juga bisa. Jadi bantuan tidak disengajalah
- F : itulah tadi petani itukan lain-lain ada yang namanya bantuan ada bonus atau apa. Kadang-kadang orang persepsi lain-lain. Tapi masih sampai sekarang ya ini kasusnya yang saya temukan di desa lain, ada yang mengatakan ptp sangat tertutup sangat tertutup dengan upaya negosiasi. Apakah kenyataannya memang begitu setelah mas ari banyak ketemu dengan mereka. Karena kan begini tadi, ada ptp ada ptp yang paling bawah itu sinderlend, terus ada kelurahan ada petani, ada yang menganggap ptp sangat tertutup. Apakah memang begitu atau karena sebetulnya hanya karena oknum pada level kelurahan. Grisik dan Gadungan. Menurut mas ari kalau boleh saya tahu setelah banyak berhubungan dengan ptp.
- A : Kalau yang namanya tertutup dalam hal menejemen tetep tertutup soalnya saya sendiri belum ...soal menejemen ptp yang sebenarnya bagaimana saya belum tahu njut kalau masalah tertutupnya hubungan komunikasi selama ini saya selalu mengajukan proposal cair terus. Jadi terbuka sekali, baru kemaren mahasiswa juga mengajukan bantuan dana untuk sembako juga cair satu juta, jadi sebetulnya terbuka sekali komunikasinya dengan luar. Tapi kalau untuk menembus manajemennya tertutup. Saya bilang tertutup. Kalau manajemen internnya tertutup.
- F : Ya ya. Ini yang saya maksud komunikasi.
- A : O terbuka, kalau saya mengatakan. Tapi kalau karena saya orang Gadungan jadi saya
- F : Ya ya itu artinya pada level mas ari. Karena itu saya ingin tahu ada orang mengatakan begitu ada orang mengatakan begini, saya tahu posisinya adalah the way of comunication itu ada.
- A : Kalau saya rasa tidak
- N : Dan juga tergantung siapa yang mengatakan tadi banyak petani yang itu tadi mas fatur, suka trimo yo wis lah.
- A : Kalau komunikasi dengan padahal saya itu sering pokoknya nuwun sewu ya desa sama kampung saya itu sok titip-titip saya. Minta sumbangan ke ptp lha saya pikir saya sebagai ...kalau saya tidak mau masyarakat mengatakan saya sombong iya to wah mung dititipi ngono we ra gelem. Padahal kalau dititipi saya

beban moral. Saya bingung saya sebagai warga petani atau sebagai warga masyarakat. Kalau sebagai warga masyarakat saya harus bantu, padahal saya dikumpulkan punya kapasitas. Jadi saya kebingungan ya sudah saya bawa semuanya.

- F : Dengan peran mas ari di kampung, yang saya tanyakan yang tabrakan satu sisi itu berhubungan baik dengan ptp, di sisi lain perjuangan, itu bagaimana.
- A : Saya sangat profesional. Saya habis itu Lobi itu ngomongan ngobrol biasa aja. Gojekan.
- F : Jadi posisi mereka
- A : biasa. Saya itu sowan ke rumahnya minta bantuan kredit. Tapi sayalangsung. njut ngobrol gimana perkembangan peserta-peserta besuk. Pokoknya kesepakatan kita aja pak. Saling kontrol pak. Oke pokoknya kita ...jadi pas sekali ngrasanya. Jadi penak banget. Kemaren mas adi saya juga bilang pak ini desa Gadungan petani mau beli disel pak kekurangan dana pak. Bisa ndak pak bantu-bantu disel bekas pak. Iya pokoknya nanti diperhatikan. Jadi omongane seperti anak sama bapak itu.
- F : Ini kan untuk kondisi seperti itu yang bagi orang lain mungkin susah.
- A : Kebetulan saya dititipi kampung baik itu kampung maupun desa itu mudah sekali dengan pak iwan. Jadi kebetulan sekali pak iwan sendiri terbuka. Pak iwan juga bilang kamu lihat sama saya serem ya tapi sebetulnya nggak, wo nggak pak.
- F : Tapi tinggalnya pak iwan disini atau di ..
- A : sejak saya kecil belum sekolah pak iwan sudah jadi slinder di sini.
- F : Sekarang ...
- A : Sekarang adm administrasi. Kepala kebun.
- F : Yang menjadi ...jadi kebun perkebunan itu tembakau
- A : Tembakau yang klaten. Klaten jadi kebon arum, mbayangrit jadi sini itu ho oh pak iwan sendiri.
- F : kalau.....
- A : Pak iwan? Saya bisa sowan ke rumahnya. Tapi kan ada pos ... kita harus melalui prosedur. Kalau saya biasanya ...tetep laporan saya, seperti kemaren itu saya jam tuju saya pagi-pagi mau kesana mau memberikan surat kapan. Lha saya tanya anu ke surabaya, ah masa jam sekian sudah berangkat ke surabaya. Anu mobilnya disana. Biasa to ... atasannya. Lha itu mobilnya ada, betul itu mobil untuk kantor ibu, bukan untuk kantor pak iwan. ...mana kalau pak iwan betul pergi. Betul jam tiga pagi itu sudah pergi berangkat surabaya. ...jadi berangkat surabaya. Jadi nggak ngawur, ya udah.
- N : yang penting ...sabar kali. Haaa
- A : Lho kan saya tahu
- F : Kalau pendekatannya harus formal atau gimana pak iwan
- A : Pak iwan, saya kira orangnya terbuka. Saya itu seperti kemaren habis sidang ya, itu mesti guyon, mesti, saya pamitan. Lho opo ra kewalik le ngaturke pinarak

kowe opo aku, karena tetangga. Opo mungkin gini mas, mungkin karena saya penduduk Gadungan mungkin saya rasa itu mungkin. Kareana saya Gadungan jadi seolah-olah tetangga dekat, apalagi rumah saya berhadap-hadapan dengan kantor.

- F : Didekat sini
- A : Ini kan kantornya
- F : Kantornya dekat situ
- A : Ho oh
- F : Jadi kantor sebelahnya rumah
- A : O ndak rumahnya disana belakang
- F : Artinya di komplek sini.
- A : Ho oh disana rumah dinasnya. Kantornya disini, tapi sok sok di Klaten. Ya karena dia mencarijadi kalau menemui di kantor kesulitan. Mungkin di ...dia tinggal di sana di Klaten.
- F : ...dimana ya mas ya.
- A : o rumah pak iwan, kalau memang prosedur resmi ...
- F : Karena kita kan, saya ini apa penelitiannya ke petani ini informasi tambahan
- A : Kalau ke rumah paling ndak sore, karena dia jam kantor itu jam tiga.
- F : Mungkin disowani dulu di rumah.
- N : Iya disowani di rumah.
- F : Kalau gitu, kalau bisa memberikan keterangan yang taruhlah keterangan dasar aja.
- N : Iya paling tidak biasanya pada saat kita ...tanya-tanya tentang bagaimana nanti kalau sudah terang.
- A : Mungkin nanti bisa saja berubah ya. Jadi saya mengatakan saya menilai, menilai ya kan saya mengatakan ptp terbuka karena keberadaan saya di Gadungan itulah karena mungkin saya tetangga pak istilahnya begitu. Perasaan manusia, lain kalau mungkin kalau saya dari Karangnongko, mungkin saya muncul tanggapannya bagaimana saya ndak tahu. Semua staf itu semua tahu semua karyawan semua tahu saya semua. Jadi mungkin ada lain mungkin. ...karena saya pernah ya negosiasi tapi sudah selesai, tapi sudah ...saya meletakkan ide dari petani Gadungan, itu petani-petani yang lain itukan mendengar. Njur ada yang pokoknya kalau Gadungan minta apa-apa petani yang lainnya tidak akan cemburu. Karena ptp juga sudahsalah satu dari mereka juga sudah menyadari kalau Gadungan banyak maneko warno wis lumrah. Ya itu titipan-titipan, sok-sok dititipi pak lurahya saya sampaikan. Sebab kalau saya ndak mau kan dikira sombong, wah dititipi we wong ngendi. Saya itu sok-sok yo ra kepenak. Apalagi pak yang bisa saya bantu.
- F : Sementara kan itu, kemudian tentang karena saya juga belajar dari lapangan.
- F : Kalau begitu untuk tanah sendiri kan sangat rendah. Sekarang tadi proses pasar. Pasar 35 harganya yang baik, iya toh. Taruhlah 30 an, sewa tanahnya sendiri

cuma modalnya satu dolar kan. Kurang dari satu dolar, taruhlah satu dolar dengan biaya macam-macam. Tidak ada tiga persen.

- A : Saya hanya minta 22 kan wis ngalah gitu lho. Saya itu sudah. Saya anggap itu sudah bener. Ning dimata petani dua dolar kan sekarang sudah 15. Kan sudah woaah gitu lho. Kan sudah dolaran. Dulu petani dibawa kesini akhirnya jadi malah beban gitu lho. Ternyata pola saya nggak serempak.
- F : Artinya kalau kita mau ngitung gitu lho. Kost production untuk tembakau yang tadi saya katakan ...terpilih dengan ptpn. Kita tahu hanya ujungnya 35.
- A : Katakanlah 50 persen gitu aja. 50 persen kost producnnya. Katakanlah 35 le 15 dolar ki nggo produk jadi isih 15, lha 15 iki aku mung njaluk 2 dolar wae sisane kek no negoro. Ho oh to sisane kek no negoro Indonesia.mau mengarah ke sana. Gini asumsinya ya kalau saya berpikir. Sebuah perusahaan besar itukan produknya 50 persen 60 persen itu sudah tinggi sekali. Saya pikir 60 maksimal 60 persen itu kost producnnya. Berarti kan dia punya keuntungan 40 persen. taruh aja 35 (suara tidak jelas pita kaset rusak)... kami masih ragu internet sendiri kan datanya kan nggak tahu karena yang pasang di internet sendiring kan orang banyak tur kemampuannya yang membuka juga berpengaruh jadi kurang baik. Kami mencoba melalui wartawan. Kalau masuk ptp manajemen ptp bagaimana, pak iwan kucing-kucingan tiga hari itu dimasuki wartawan lari, akhirnya wartawan bisa menemui pak harjono. Pak harjono itu kapasitasnya adalah bagian pemasaran. Kapasitasnya di ptp itu adalah di bagian pemasaran. Wartawan mau tanya tentang Lunak, akhirnya dari situlah kami tahu harga. Berapakah harga tembakau dijual di Jerman. Yang baik 35 dolar yang jelek 5 dolar. Kan mbako itu ada yang jelek dari pantai cowek gitu lho itu 5 dolar.
- F : O itu harusnya berapa jadi rata-rata
- A : 20.
- F : Jadi semuanya yang baik yang jelek dibikin rata.
- A : wah nanti nggak tahu ya, yang baik dengan yang jelek itu dibikin rata. ...itu begini lho, seperti kita nandur ya kalau ptp yang diinginkan kan kualitas ya, kita kualitasnya bagus pak itu berarti tembakau baik. Kalau yang kemaren itu kena
- F : Kalau yang terakhir itu
- A : Kenaitu dianggap tembakau jelek. Harganya itu paling rendah 5 dolar. Kalau sobek, sobek-sobek itu masih dihargai 5 dolar. Mungkin kalau patek itu harganya berapa saya ndak tahu. Pokoknya paling rendah 5 dolar.
- F : Mas ari pernah, satu kilo itu berapa lembar. Saya hanya ingin tahu harga, saya agak tahu
- A : Wa itu yang bisa dijawab pkl. Itu satu dolog itu lho katanya. Saya pernah tanya sama pkl. Satu kilo itu kiro-kiro pirang dolog. Sak dolog itu kiro-kiro sak kilo. Lha sak dolog itu isine piro saya ndak, kalau pkl tahu. Pkl itu bisa menghitung kok. Bisa menghitung bahwa besuk dia kudu siap pirang hektar, dan dia ngitung dari dolog.
- N : Pak Sukro tahu nggak.
- A : Tahu itu.

- F : Karena saya kan ingin tahu pasaran internasional sampai dengan pasaran di toko-toko yang sudah iya itu kan namanya ketergantungan produk dari ujung
- A : Itu pkl tahu, jadi tolok ukur satu dolog itu berapa jadi itung habis dolog itu berapa, dia akan tercapai sekian kwintal. Jadi dia sudah ngitung dolognya.
- F : Karena sudah kulino.
- A : Iya kulino. Nangani di los itu deweke ...itu dolog.
- F : Tapi yang jelas itu ya seratusan
- A : Itu saya menyimpan arsipnya dari wartawan itu mengedarkan itu tiga kali, tiga kali terbit masalah tembakau. Tapi saya sempat ngarsip cuma satu.
- F : Saya lihat. Tiga kolom to. Dua kolom bisa.
- A : Ngarsip ini. Tidak terbit
- F : Dulu tapi yang keluar yang pertama.... Pernah tertarik agar dari sini terus keluar pasaran produk apa ndak jadi. Sudah punya pabrik langganan gitu.
- A : Ptp punya pabrik sendiri.
- F : Disini. Itu ekor langsung jadi, bukan tembakau.
- A : Jadi tembakaunya sendiri tidak dijual, berapa persen dijual ke luar negeri berapa persen dijual ke dalam negeri. Lha kelihatannya dia itu punya pabrik. Karena apa, karena saya dekat dengan ptp. Saya pernah ditari dulu itu. Mas ari sering ngrok ya. Iya. Nih cerutu itu. Wah saya itu .. halus kok cerutu. Ndka berani saya. Produknya bali. Gudang garam itu namanya bali. Produksinya ptp 10. Itu bali, apa petani. Apa kalau mungkin mau tanya pak lurah. Itu sing udud cerutu bali itu. Coba apa masih punya cerutunya dari ptp. Itu sering dikasihkan cerutunya itu kretek. Yang dari belanda juga pak lurah punya. Pas dolan sini nggowo kotak. Nyoh udud, wah ndak mau aku. Dari itu produk belanda.
- F : Sementara itu dulu mas ari.

LAMPIRAN B
Alat Pengumpulan Data Survei

A. Identitas Responden

1. Nomor responden :
2. Nama :
3. Alamat Desa :
- Dusun :
- RT/RW :
4. Jenis kelamin : 1. Perempuan
 2. Laki-laki
5. Status perkawinan : 1. Nikah
 2. Belum nikah
 3. Cerai/ditinggal mati
6. Tanggal lahir (umur) :
7. Pendidikan tertinggi : Sekolah, kelas/tingkat
8. Jenis pekerjaan utama :
9. Hasil pekerjaan utama : Rp..... (per bulan)
10. Pekerjaan lainnya
 Apakah punya? : 0. Tidak (KE B1) 1. Ya, punya (KE 11)
11. Bila punya, jenisnya : a.
 b.
 c.
12. Hasil pekerjaan lainya : Rp..... (per bulan)

B. Pasangan (suami/istri)

1. Tanggal lahir (umur) :
2. Status kerja : 0. Tidak bekerja (KE C1) 1. Bekerja
3. Jenis pekerjaan utama :
4. Hasil pekerjaan utama : Rp (per bulan)
5. Pekerjaan lainnya
 Apakah punya? : 0. Tidak 1. Ya, punya
6. Bila punya, jenisnya : a.
 b.
 c.
7. Hasil pekerjaan lainnya : Rp (per bulan)

C. Keluarga & rumah tangga

1. Jumlah anak :
2. Jumlah anak yang masih menjadi anggota rumah tangga (ART) :
3. Jumlah anggota rumah tangga :
4. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja :
5. Penghasilan ART yang bekerja : Rp (per bulan)
6. Pengeluaran untuk makan per bulan : Rp
7. Pengeluaran non makan per bulan : Rp
8. Pengeluaran total : Rp
9. Status rumah tinggal:
 1. Milik sendiri
 2. Milik keluarga (belum diwariskan)
 3. Milik orang lain (sewa, kontrak, numpang, dinas, dst.)
10. Kondisi rumah:
 1. Non permanen
 2. Semi permanen
 3. Permanen
 4. Permanen mewah

D. Pemilikan

1. Rumah jumlah : luasnya: m²
2. Sepeda : buah
3. Motor : buah
4. Kendaraan roda 4 : buah
5. TV : buah
6. Radio : buah
7. Kulkas : buah
8. Elektronik lain (sebut) : buah
9. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda) : ekor
10. Ternak sedang (kambing, domba) : ekor
11. Ternak kecil (ayam, itik, kelinci) : ekor
12. Tabungan uang/perhiasan : 0. Tidak punya 1. Punya
13. Nilai tabungan : rupiah
14. Tanah kering (pekarangan, ladang, kebun, dst) : m²
15. Tanah basah (sawah, kolam, empang, dst) : m²

Khusus pemilikan sawah

16. Berapakah luas sawah yang dimiliki di desa ini? patok atau m²
17. Bagaimana sawah tersebut digarap?
 1. Digarap sendiri
 2. Digarap pihak lain
 3. Sebagian digarap sendiri dan sebagian digarap pihak lain
18. Bila digarap sendiri, berapa penghasilan sawah sewaktu digarap sendiri? rupiah per patok per tahun.
19. Bila digarap pihak lain, siapa yang menggarap:
 1. Perseorangan
 2. PTPN
 3. Lainnya

Bila sawah digarap orang lain:

20. Berapa luasnya?
21. Berapa penghasilan sawah tersebut? rupiah per patok per tahun.
22. Berapa lama digarap orang lain?

Bila sawah digarap/disewa PTPN:

23. Berapa luasnya?
24. Jenis tembakau yang ditanam PTPN: 1. NO 2. VBN
25. Berapa penghasilan sawah tersebut yang disewa PTPN (terakhir kali)? rupiah per bulan.
26. Berapa lama digarap PTPN?

E. Kesejahteraan

Berikut ini akan saya tanyakan tentang keadaan rumah tangga ini menurut penilaian ibu/bapak sendiri. Mohon dijawab dengan menggunakan salah satu dari empat pilihan, yaitu: sangat kurang, kurang, cukup, atau sangat cukup (kode: 1=sangat kurang; 2=kurang; 3=cukup; 4=sangat cukup).

1. Pendapatan rumah tangga
2. Keadaan tempat tinggal
3. Kemampuan memenuhi konsumsi
4. Kemampuan memenuhi kebutuhan pakaian
5. Kemampuan membiayai kesehatan ART
6. Kemampuan membiayai transportasi
7. Kemampuan membiayai pendidikan ART[#]

8. Kemampuan mendapatkan informasi
9. Kemampuan membiayai rekreasi ART
10. Kemampuan memberi sumbangan
11. Keadaan rumah tangga secara keseluruhan

F. Harapan:

Menurut bapak/ibu, berapa besar mengharapkan hal-hal berikut ini terjadi pada diri bapak/ibu? Mohon jawaban berkisar antara kecil sekali, kecil, besar dan besar sekali. (kode pilihan: 1=kecil sekali; 2=kecil; 3=besar; 4=besar sekali)

1. Kesejahteraan secara umum meningkat.
2. Pendapatan saya dan keluarga bertambah.
3. Mampu memenuhi kebutuhan pokok.
4. Mampu mencukupi kebutuhan sekunder/bukan pokok.
5. Terpandang di masyarakat.
6. Cukup waktu untuk istirahat.
7. Meningkatkan ketrampilan.
8. Menambah pengetahuan.
9. Pendapatan dari sawah meningkat.
10. Bebas menggarap sawah setiap saat.

G. Kontrol

Hal-hal yang berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN berikut ini mungkin pernah dialami atau dapat terjadi di masa mendatang. Berapa besar hal-hal berikut ini berlaku di masa lalu atau saat ini? (kode pilihan: 1=kecil sekali; 2=kecil; 3=besar; 4=besar sekali)

1. Kesempatan yang diberikan kepada bapak/ibu untuk mengemukakan masalah yang dihadapi pemilik sawah sebelum keputusan kewajiban menyerahkan lahan dibuat.
2. Kesempatan bapak/ibu menyampaikan usul berkaitan dengan sewa tanah untuk tembakau.
3. Kesempatan untuk mengemukakan kepedulian bapak/ibu berkaitan dengan sewa tanah.
4. Kemauan pihak PTPN mendengarkan pandangan petani.
5. Permintaan pendapat oleh PTPN kepada anggota masyarakat berkaitan dengan sewa tanah.

6. Upaya PTPN minta pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan.
7. Keterlibatan petani pemilik dalam mengambil keputusan
8. Penjelasan pihak berwenang kepada pemilik sawah tentang latar belakang ketentuan sewa tanah.
9. Penjelasan rencana sewa tanah dan upaya meminta tanggapan petani.
10. Kemungkinan menolak ketentuan sewa tanah oleh petani/pemilik.
11. Pengaruh pemilik sawah dalam pengambilan keputusan sewa tanah.
12. Peran kelompok tani dalam mempengaruhi keputusan sewa tanah.
13. Kemungkinan adanya perubahan keputusan dalam sewa tanah.
14. Peran pemilik sawah dalam mengawasi pelaksanaan keputusan yang disepakati.

H. Keadilan Interaksional: Netralitas

Hal-hal berikut ini berkaitan dengan sewa sawah oleh PTPN yang mungkin pernah dialami atau dapat terjadi di masa mendatang. Apakah pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat bapak/ibu?

(kode pilihan: 1=sangat tidak sesuai; 2=tidak sesuai; 3=sesuai; 4=sangat sesuai)

1. Cara-cara menyewa tanah yang digunakan tidak memihak kepada seseorang.
2. Cara-cara menyewa tanah yang digunakan memihak kepada kelompok tertentu.*
3. Cara-cara menyewa tanah yang digunakan memihak kepada lembaga/organisasi tertentu.*#
4. Pihak PTPN tampak berat menerima usul yang disampaikan oleh pemilik sawah atau kelompok tani.*
5. PTPN berusaha menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam usaha tembakau termasuk sewa tanah yang dimiliki penduduk.

I. Keadilan Interaksional: Kepercayaan

Menurut bapak/ibu, berapa besar hal-hal berikut ini terjadi pada diri bapak/ibu?

Mohon jawaban berkisar antara kecil sekali, kecil, besar dan besar sekali.

(kode pilihan: 1=kecil sekali; 2=kecil; 3=besar; 4=besar sekali)

1. Kepercayaan anda terhadap PTPN dalam mengelola usaha tembakau.
2. Keberatan PTPN mempertimbangkan usul-usul masyarakat berkaitan dengan bagi hasil tembakau.*
3. Kemungkinan terjadinya manipulasi di PTPN yang merugikan pemilik sawah.*#

4. Kesempatan bagi pemilik sawah untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh PTPN.
5. Kesempatan bagi pemilik sawah untuk ikut menghitung biaya penanaman tembakau.
6. Kemungkinan PTPN dan pemerintah membicarakan masalah sewa tanah secara terbuka.
7. Kemungkinan setiap orang untuk mengetahui masalah sewa tanah itu.
8. Kemungkinan setiap orang meminta informasi yang ada pada PTPN berkaitan dengan sewa tanah.

J. Keadilan Interaksional: Penghargaan

Berikut ini ada beberapa pernyataan berkaitan dengan sewa sawah oleh PTPN. Sesuaikah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan keadaan yang dirasakan oleh bapak/ibu?

(kode pilihan: 1=sangat tidak sesuai; 2=tidak sesuai; 3=sesuai; 4=sangat sesuai)

1. Dalam kontrak, PTPN memperlakukan pemilik sawah secara arif.
2. PTPN kurang memperhatikan hak-hak pemilik sawah.*
3. PTPN tidak bertanggung jawab penuh bila ada kerusakan lahan sesudah ditanami tembakau.*
4. PTPN memberi jaminan akan hasil yang lebih baik bila dibanding disewa pihak/orang lain.
5. Jaminan akan hasil bila tanah disewa oleh PTPN lebih baik dibanding bila ditanami sendiri.#
6. Hak PTPN lebih besar dibanding pemilik sawah dalam menentukan harga atau bagi hasil penanaman tembakau.*

K. Keadilan Prosedural

Berikut ini ada beberapa pernyataan berkaitan dengan sewa sawah oleh PTPN. Sesuaikah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan keadaan yang dirasakan oleh bapak/ibu?

(kode pilihan: 1=sangat tidak sesuai; 2=tidak sesuai; 3=sesuai; 4=sangat sesuai)

1. Langkah-langkah yang diambil PTPN dalam hal menyewa tanah/sawah saya nilai adil.
2. Cara-cara membuat ketentuan sewa tanah oleh pemerintah/PTPN saya nilai adil.
3. Keharusan menyewakan tanah kepada PTPN tidak adil karena pemilik sawah tidak diberi kesempatan menolak.*
4. Prosedur dalam penyewaan sawah tidak adil karena ketentuan yang berlaku berubah-ubah.*

5. Dengan penjelasan yang selalu diberikan dalam proses sewa tanah selama ini, saya merasa diperlakukan secara adil.
6. Ketidakadilan dalam proses sewa tanah terjadi karena pihak PTPN tidak menggunakan pertimbangan yang benar.*
7. Sewa tanah oleh PTPN saya nilai adil karena mereka selalu mempertimbangkan masukan dari pemilik sawah.
8. Proses penentuan bagi hasil dengan menggunakan patokan harga beras dinilai adil.
9. Keharusan menyewakan sawah kepada PTPN merupakan langkah pemerintah yang tidak adil.*
10. Fakta bahwa ada pemilik sawah yang rugi bila disewa PTPN tidak dipertimbangkan untuk membuat peraturan yang mengharuskan pemilik menyewakan tanah.*
11. Keharusan menyewakan tanah kepada PTPN hanya menguntungkan pihak pemerintah.*
12. Ketentuan menyewakan tanah kepada PTPN merupakan proses untuk menjahterakan masyarakat.
13. Mewajibkan petani daerah ini untuk mengolah sawah yang sesuai dengan pola tanam tembakau merupakan tindakan yang kurang adil.*
14. Proses pengolahan tanah untuk ditanami tembakau tidak merugikan pemilik.
15. Cara-cara yang digunakan dalam proses sewa sawah oleh PTPN harus diubah.*

L. Keadilan Distributif

Berikut ini ada beberapa pernyataan berkaitan dengan sewa sawah oleh PTPN. Sesuaikan pernyataan-pernyataan berikut ini dengan keadaan yang dirasakan oleh bapak/ibu?

(kode pilihan: 1=sangat tidak sesuai; 2=tidak sesuai; 3=sesuai; 4=sangat sesuai)

1. Pembagian hasil penanaman tembakau yang anda terima selama ini cukup adil.
2. Dibandingkan dengan produktivitas lahan, pembagian hasil yang anda terima dari tembakau sudah sebanding.
3. Dibanding dengan hasil penanaman jenis tembakau yang lain, yang saya terima telah memadai.
4. Dibanding dengan hasil penanaman jenis tanaman lain (padi, melon, palawija, dll.), hasil dari tembakau lebih rendah.*
5. Dibanding dengan hasil sewa tanah oleh pihak lain, hasil sewa oleh PTPN memadai.#

6. Pembagian hasil dari penanaman tembakau oleh PTPN bagi saya tidak mencukupi.*
7. PTPN memperhatikan kebutuhan petani/pemilik dalam menetapkan pembagian.
8. Dibanding hasil pembagian di masa lalu yang sekarang diterima ini lebih adil.
9. Ketentuan pembagian telah mencerminkan tanggung jawab PTPN kepada pemilik sawah.
10. Pembagian hasil selama ini pilih kasih.* #
11. Dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh PTPN, bagi hasil penanaman tembakau yang diterima pemilik sawah jumlahnya kecil. *
12. Bagi hasil tanam tembakau mempertimbangkan kesejahteraan pemilik sawah.
13. Pemilik sawah bersedia menerima berapapun dari hasil tanaman tembakau agar PTPN mendapat keuntungan yang besar.* #
14. Hasil sewa tanah oleh PTPN mencukupi kebutuhan pemilik sawah.
15. PTPN seharusnya memberi uang sewa yang lebih besar dibanding yang diterima selama ini.
16. PTPN selalu menepati kontrak bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

M. Kepuasan: perasaan

Sekarang kami akan bertanya tentang perasaan-perasaan yang yang pernah muncul berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan salah satu dari empat kemungkinan jawaban yaitu: sangat jarang, jarang, sering, sangat sering.
(kode pilihan: 1=sangat jarang; 2=jarang; 3=sering; 4 sangat sering)

1. Apakah bapak/ibu pernah merasa senang berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?
2. Apakah bapak/ibu pernah merasa marah berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?
3. Apakah bapak/ibu pernah merasa kecewa berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?
4. Apakah bapak/ibu pernah merasa puas berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?
5. Apakah bapak/ibu pernah merasa benci berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?
6. Apakah bapak/ibu pernah merasa jengkel berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN?

7. Apakah bapak/ibu pernah merasa bersemangat ketika tanah disewa oleh PTPN?

N. Kepuasan: Umum

Kami ingin tahu lebih mendalam tentang kepuasan bapak/ibu berkaitan dengan sewa tanah oleh PTPN. Atas beberapa pernyataan di bawah ini, bapak/ibu dimohon memberi jawaban salah satu dari empat kemungkinan, yaitu: sangat mengecewakan, mengecewakan, memuaskan, atau sangat memuaskan. (kode pilihan: 1=sangat mengecewakan; 2=mengecewakan; 3=memuaskan; 4=sangat memuaskan)

1. Keharusan menyerahkan sawah setiap dua tahun sekali.
2. Ketentuan tentang waktu atau saat sawah harus diserahkan kepada PTPN.
3. Lama atau panjangnya waktu tanah digunakan untuk tanaman tembakau.
4. Kesuburan tanah setelah ditanami tembakau.
5. Bentuk tanah setelah ditanami tembakau.
6. Kompensasi biaya untuk pembenahan lahan setelah ditanami tembakau.
7. Jumlah uang bagi hasil penanaman tembakau.
8. Bonus yang diterima dari PTPN.
9. Kepastian mendapat hasil bila ditanami tembakau.
10. Jumlah uang yang diterima dari hasil tanah yang ditanami tembakau.

Catatan Pengambil Data

Pewawancara :

Tanggal wawancara

Kunjungan I :

Kunjungan II :

Kunjungan III :

Lama wawancara :

Hasil wawancara :

1. lengkap

2. tidak lengkap, alasan

Kesulitan item :

Kesulitan situasi :

Kesulitan lain :

Catatan khusus :

* item tersebut tergolong *unfavourable*

item tidak disertakan dalam survai hanya disertakan dalam uji coba

LAMPIRAN C
Hasil Uji Konsistensi Internal

SKALA KESEJAHTERAAN

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	30,6378	18,3648	4,2854	11

Item-total Statistics				
	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
E1	27,8520	15,4856	,5585	,6682
E2	27,8724	16,1408	,3970	,6870
E3	27,7092	16,0305	,5767	,6747
E4	27,8316	15,3451	,6058	,6633
E5	27,7194	16,1911	,5175	,6796
E6	27,9133	15,4486	,5559	,6680
E7	27,5000	14,0825	,0852	,8461
E8	28,0561	16,5870	,2517	,7041
E9	28,4031	14,9209	,4536	,6742
E10	27,7602	16,1713	,4798	,6814
E11	27,7602	15,3878	,6905	,6595

Alpha = ,7102

SKALA HARAPAN

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	26,7640	10,3641	3,2193	10

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
F1	23,8315	8,3463	,6192	,6543
F2	23,7640	8,1823	,6066	,6518
F3	23,8090	9,4972	,2906	,7009
F4	24,1348	8,3453	,5669	,6591
F5	24,2921	8,6182	,3393	,6938
F6	24,2809	9,4316	,1637	,7202
F7	24,4157	7,6320	,5026	,6615
F8	24,4831	8,0253	,3889	,6871
F9	23,8652	8,5953	,4376	,6776
F10	24,0000	9,9773	-,0160	,7549

Reliability Coefficients

N of Cases = 89,0 N of Items = 10

Alpha = ,7104

SKALA HARAPAN

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	21,5169	8,9344	2,9890	8

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
F1	18,5843	7,0411	,6268	,7204
F2	18,5169	6,9571	,5865	,7234
F3	18,5618	8,1353	,2840	,7677
F4	18,8876	7,0554	,5669	,7272
F5	19,0449	7,3843	,3118	,7709
F7	19,1685	6,2099	,5552	,7260
F8	19,2360	6,4323	,4754	,7449
F9	18,6180	7,3297	,4202	,7497

Reliability Coefficients

N of Cases = 89,0 N of Items = 8

Alpha = ,7669

SKALA KONTROL

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	31,6531	29,0537	5,3901	14
Item-total Statistics				
	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
G1	29,2755	24,4078	,6385	,8557
G2	29,2959	24,2517	,6339	,8558
G3	29,3163	24,8783	,6071	,8577
G4	29,2347	25,3567	,4937	,8637
G5	29,3265	24,9644	,5769	,8592
G6	29,0510	26,2757	,4377	,8661
G7	29,5000	25,4897	,5716	,8600
G8	29,1735	26,0624	,4679	,8648
G9	29,1633	25,2308	,5999	,8585
G10	30,0510	25,3685	,4190	,8689
G11	29,6224	25,0416	,5883	,8587
G12	29,2449	24,5992	,5417	,8614
G13	29,5816	25,5242	,5087	,8628
G14	29,6531	26,7650	,3440	,8703
Alpha = ,8704				

SKALA PENILAIAN KEADILAN INTERKASIONAL

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	41,8933	26,1504	5,1137	18

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
H1	39,0056	24,7074	,3117	,7629
H2	39,0281	24,8884	,2499	,7658
H3	39,0281	24,9566	,1864	,7695
H4	39,4213	23,8006	,2872	,7643
H5	39,4101	22,9123	,4772	,7496
I1	39,4213	22,6528	,4886	,7481
I2	39,2753	23,1989	,3234	,7622
I3	40,4888	24,7044	,1832	,7709
I4	40,5225	24,5109	,2742	,7643
I5	39,5449	22,3730	,4745	,7485
I6	39,8371	22,3851	,4975	,7468
I7	39,9607	22,5808	,4333	,7521
J1	39,2303	23,1083	,4630	,7510
J2	39,3652	23,7771	,3138	,7620
J3	39,5225	23,3063	,3391	,7603
J4	39,5225	23,2040	,3787	,7569
J5	39,7640	24,2505	,2379	,7676
J6	39,8371	24,2260	,2709	,7648

Reliability Coefficients

N of Cases = 89,0 N of Items = 18

Alpha = ,7699

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	35,4944	21,4574	4,6322	15

Reliability Coefficients

N of Cases = 89,0 N of Items = 15

Alpha = ,7659

SKALA PENILAIAN KEADILAN PROSEDURAL

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	36,3469	30,6207	5,5336	15

Item-total Statistics

	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
K 1	33,7857	26,8299	,6549	,8806
K 2	33,8367	26,3236	,7199	,8778
K 3	34,0510	27,3273	,4718	,8875
K 4	33,8673	27,9307	,4186	,8892
K 5	33,7245	27,0676	,5716	,8835
K 6	34,0102	27,3504	,5102	,8858
K 7	34,0606	26,7104	,6122	,8818
K 8	33,8469	27,8217	,4035	,8901
K 9	33,8469	26,4402	,6704	,8795
K 10	33,9694	26,3393	,6749	,8815
K 11	33,9592	26,4725	,5547	,8843
K 12	33,8163	26,3164	,6763	,8802
K 13	33,8673	26,8173	,5398	,8847
K 14	33,9592	26,4725	,4964	,8876
K 15	34,2857	27,0103	,5533	,8841

Alpha = ,8909

SKALA PENILAIAN KEADILAN DISTRUBUTIF

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	37,9898	24,2370	4,9231	16
Item-total Statistics				
	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
L 1	35,3878	20,1986	,6333	,7772
L 2	35,6837	20,6927	,6292	,7796
L 3	35,5102	22,2731	,2859	,8021
L 4	36,0306	21,0609	,4415	,7916
L 5	35,3878	22,6728	,1432	,8161
L 6	35,7959	20,4321	,5559	,7827
L 7	35,6122	20,9203	,4716	,7892
L 8	35,2653	22,3825	,2710	,8030
L 9	35,4490	20,7374	,7044	,7755
L 10	35,1327	23,7039	,0467	,8154
L 11	36,0408	21,4622	,4527	,7911
L 12	35,6327	21,4925	,3884	,7955
L 13	35,8469	23,3268	,0979	,8141
L 14	35,8265	20,2273	,5922	,7798
L 15	36,1122	21,2759	,5331	,7864
L 16	35,1327	22,6523	,3189	,7996
Alpha = ,8047				

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	30,3878	21,5388	4,6410	13
Alpha = ,8438				

SKALA KEPUASAN

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	41,1461	58,2398	7,6315	17

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
M1	38,9888	51,2385	,6439	,9063
M2	38,1236	50,7914	,5639	,9092
M3	38,4831	51,2071	,5733	,9086
M4	39,1348	50,1407	,6822	,9050
M5	38,2472	51,1655	,6327	,9066
M6	38,4045	51,0163	,6250	,9068
M7	39,0449	51,2480	,5227	,9106
N1	38,5955	53,0845	,5451	,9092
N2	38,4494	52,8639	,5841	,9082
N3	38,4045	53,3800	,5868	,9084
N4	38,6742	51,7676	,5705	,9085
N5	39,2135	53,2380	,4387	,9122
N6	39,1685	52,9372	,5262	,9096
N7	38,8315	50,2099	,7799	,9024
N8	39,2135	52,9198	,5493	,9090
N9	38,5169	54,2526	,4534	,9114
N10	38,8427	50,3386	,8154	,9017

Reliability Coefficients

N of Cases = 89,0 N of Items = 17

Alpha = ,9129

LAMPIRAN D
Skenario

SKENARIO I

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat > normatif
 Prosedur : adil

A-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

A-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **4 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

A-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sanksi apapun**.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO II

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : adil

B-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

B-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **3 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

B-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sanksi apapun**.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO III

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat < normatif
 Prosedur : adil

C-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

C-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **2 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

C-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sangsi apa pun**.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO IV

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat > normatif
 Prosedur : tidak adil

D-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

D-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **4 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

D-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harus menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO V

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : tidak adil

E-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

E-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **3 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

E-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harus menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO VI

Urutan penilaian : Distribusi – Prosedur
 Distribusi : yang didapat < normatif
 Prosedur : tidak adil

F-1

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi, satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun Anda bisa panen 3 kali.

Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

F-2

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **2 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 Sangat Adil

F-3

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut meinginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harus menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO VII

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat > normatif
 Prosedur : adil

G-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sangsi apapun**.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

G-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

G-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **4 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO VIII

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : adil

H-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sanksi apa pun**.

H-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

H-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **3 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO IX

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat < normatif
 Prosedur : adil

I-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN berdasarkan **kerelaan**. Bila BUMN tersebut menginginkan untuk menggunakan sawah tetapi pemiliknya keberatan, maka pemilik boleh menolaknya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, **maka tidak dikenai sangsi apapun**.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

I-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

I-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **2 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO X

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat > normatif
 Prosedur : tidak adil

J-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut meinginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harys menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

J-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

J-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **4 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO XI

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : tidak adil

K-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut meinginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harys menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

K-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

K-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **3 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

SKENARIO XII

Urutan penilaian : Prosedur - Distribusi
 Distribusi : yang didapat = normatif
 Prosedur : tidak adil

L-1

Penggunaan sawah milik petani untuk ditanami tembakau oleh BUMN merupakan **keharusan**. Bila BUMN tersebut meinginkan untuk menggunakan sawah, maka pemilik harus menyerahkannya. Bila ada sawah yang tidak boleh disewa oleh BUMN, maka **pemilik** akan **dimarahi** oleh petugas setempat.

ADILKAH PERLAKUAN TERHADAP PEMILIK SAWAH ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

L-2

Umpamakan Anda memiliki sawah seluas 2000 meter persegi. Bila ditanami padi satu musim tanam lamanya 4 bulan, sehingga dalam setahun sawah Anda bisa dipanen 3 kali. Setiap dua tahun sekali tanah Anda disewa untuk ditanami tembakau oleh salah satu BUMN. Lama penggunaan sawah untuk satu kali tanam tembakau adalah 8 bulan.

L-3

Apabila sawah tersebut digarap *sendiri*, maka penghasilan sekali panen padi rata-rata **1,5 juta rupiah** bersih (sudah dikurangi ongkos, biaya tenaga, bibit, pestisida, dan lainnya). Uang sewa yang didapat bila sawah digarap oleh BUMN adalah sebesar **2 juta rupiah** untuk satu kali tanam tembakau.

ADILKAH PEMBERIAN UANG SEWA SEBESAR ITU?

Sangat tidak adil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Adil

Kartu Kontrol Akurasi Pemahaman atas Setiap Skenario

Mohon pertanyaan di bawah ini dijawab sesuai dengan pemahaman anda dengan jalan melingkari pilahan jawaban yang anda anggap benar:

Untuk jangka waktu yang sama, yaitu selama 8 bulan, penghasilan sawah bila disewa untuk ditanami tembakau dibanding penghasilan sawah bila ditanami padi adalah:

- (a) Hasil menyewakan tanah **lebih besar** dibanding hasil tanam padi
- (b) Hasil menyewakan tanah **lebih kecil** dibanding hasil tanam padi
- (c) Hasil menyewakan tanah **sama** dibanding hasil tanam padi

LAMPIRAN E
Hasil-Hasil Analisis
Model Persamaan Struktural

ANALISIS LISREL UNTUK MODEL REGRESI

(Gambar 4.1)

DOS - L I S R E L 7.16

BY

KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.

1369 Neitzel Road

Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.

(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.

Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN

DA NI=6 NO=471 MA=KM

LA

Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan

KMATRIX

1

.040 1

.033 .048 1

.056 -.042 .518 1

.088 -.091 .326 .666 1

.118 -.133 .298 .603 .657 1

SE

5 6 1 2 3 4

MO NY=2 NX=4

OU SE TV EF

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN

NUMBER OF INPUT VARIABLES 6

NUMBER OF Y - VARIABLES 2

NUMBER OF X - VARIABLES 4

NUMBER OF ETA - VARIABLES 2

NUMBER OF KSI - VARIABLES 4

NUMBER OF OBSERVATIONS 471

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED

	PROSEDUR	DISTRIBU	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KESEJAHR	.088	.118	1.000			
HARAPAN	-.091	-.133	.040	1.000		
KONTROL	.326	.298	.033	.048	1.000	
INTERAKS	.666	.603	.056	-.042	.518	1.000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
PARAMETER SPECIFICATIONS

	GAMMA			
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1	2	3	4
DISTRIBU	5	6	7	8
	PSI			
	PROSEDUR	DISTRIBU		
PROSEDUR	9			
DISTRIBU	10	11		

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

	GAMMA					
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS		
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671		
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598		
COVARIANCE MATRIX OF Y AND X						
	PROSEDUR	DISTRIBU	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KESEJAHR	.088	.118	1.000			
HARAPAN	-.091	-.133	.040	1.000		
KONTROL	.326	.298	.033	.048	1.000	
INTERAKS	.666	.603	.056	-.042	.518	1.000
	PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU				
PROSEDUR	.549					
DISTRIBU	.244	.617				

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

PROSEDUR	DISTRIBU
.451	.383

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .508

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

	GAMMA					
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS		
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671		
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598		
COVARIANCE MATRIX OF Y AND X						
	PROSEDUR	DISTRIBU	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KESEJAHR	.088	.118	1.000			
HARAPAN	-.091	-.133	.040	1.000		
KONTROL	.326	.298	.033	.048	1.000	
INTERAKS	.666	.603	.056	-.042	.518	1.000

	PSI	
	PROSEDUR	DISTRIBU
PROSEDUR	.549	
DISTRIBU	.244	.617

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU
	.451	.383

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .508

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)
 GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000
 ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
 SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000
 MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000
 LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
 STANDARD ERRORS

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.034	.035	.040	.040
DISTRIBU	.036	.037	.043	.043

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU
PROSEDUR	.036	
DISTRIBU	.029	.040

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
 T-VALUES

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.559	-1.855	-.500	16.640
DISTRIBU	2.447	-3.035	-.223	14.007

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU
PROSEDUR	15.264	
DISTRIBU	8.337	15.264

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN

TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF Y ON Y

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.034	.035	.040	.040
DISTRIBU	.036	.037	.043	.043

THE PROBLEM USED 5448 BYTES (= 2.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)

TIME USED : .1 SECONDS

ANALISIS LISREL MODEL AWAL
(Gambar 4.2)

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.
Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.
All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
DA NI=7 NO=471 MA=KM
LA
Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.040 1
.033 .048 1
.056 -.042 .518 1
.088 -.091 .326 .666 1
.118 -.133 .298 .603 .657 1
.128 -.125 .225 .489 .650 .662 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FR BE(1,2) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2)
OU SE TV EF
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
                                NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
                                NUMBER OF Y - VARIABLES      3
                                NUMBER OF X - VARIABLES      4
                                NUMBER OF ETA - VARIABLES     3
                                NUMBER OF KSI - VARIABLES     4
                                NUMBER OF OBSERVATIONS       471
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
      PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN   KESEJAHR   HARAPAN   KONTROL
      _____   _____   _____   _____   _____   _____
PROSEDUR           1.000
DISTRIBU           .657           1.000
KEPUASAN           .650           .662           1.000
KESEJAHR           .088           .118           .128           1.000
  HARAPAN          -.091          -.133          -.125           .040           1.000
  KONTROL           .326           .298           .225           .033           .048           1.000
INTERAKS           .666           .603           .489           .056          -.042           .518

```

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS	1.000				
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN					
PARAMETER SPECIFICATIONS					
BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	0	1	0		
DISTRIBU	2	0	0		
KEPUASAN	3	4	0		
GAMMA					
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	5	6	7	8	
DISTRIBU	9	10	11	12	
KEPUASAN	13	14	15	16	
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	17	18	19		

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	.000	.395	.000		
DISTRIBU	.444	.000	.000		
KEPUASAN	.386	.409	.000		
GAMMA					
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	.018	-.020	-.016	.434	
DISTRIBU	.065	-.083	-.001	.301	
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010	

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.234					
DISTRIBU	1.004	1.262				
KEPUASAN	.882	.903	1.188			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000				
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	.453	.509	.476		

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.633	.597	.599
------	------	------

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .583
 ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.181	.000
DISTRIBU	.262	.000	.000
KEPUASAN	.386	.409	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.038	-.044	-.018	.563
DISTRIBU	.075	-.094	-.004	.423
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.481	.527	.476

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.519	.473	.524

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .558

CHI-SQUARE WITH -1 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX =1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
 SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL =	.000
MEDIAN FITTED RESIDUAL =	.000
LARGEST FITTED RESIDUAL =	.000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598
KEPUASAN	.106	-.107	-.029	.494

INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.016	-.020	-.002	.108
DISTRIBU	.014	-.017	-.005	.176
KEPUASAN	.057	-.070	-.012	.504

TOTAL EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.050	.190	.000
DISTRIBU	.275	.050	.000
KEPUASAN	.517	.502	.000

LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .367

INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.050	.009	.000
DISTRIBU	.013	.050	.000
KEPUASAN	.131	.094	.000

THE PROBLEM USED 8224 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)

TIME USED : .1 SECONDS

**ANALISIS LISREL MODEL PROSEDURAL → DISTRIBUTIF
(Gambar 4.3)**

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
DA NI=7 NO=471 MA=KM
LA
Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.040 1
.033 .048 1
.056 -.042 .518 1
.088 -.091 .326 .666 1
.118 -.133 .298 .603 .657 1
.128 -.125 .225 .489 .650 .662 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FR BE (2,1) BE(3,1) BE(3,2)
OU SE TV EF
```

```
NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
NUMBER OF Y - VARIABLES 3
NUMBER OF X - VARIABLES 4
NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
NUMBER OF OBSERVATIONS 471
```

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED

INTERAKS

```
INTERAKS 1.000
```

PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	16	17	18	

INITIAL ESTIMATES (TSLS)

BETA				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.444	.000	.000	
KEPUASAN	.386	.409	.000	
GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.065	-.083	-.001	.301
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X
INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.549	.509	.476

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.451	.491	.524

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .513

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.444	.000	.000	
KEPUASAN	.386	.409	.000	
GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS

PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.065	-.083	-.001	.301
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.549	.509	.476

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.451	.491	.524

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .513

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000

LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.045	.000	.000
KEPUASAN	.048	.045	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.034	.035	.040	.040
DISTRIBU	.033	.033	.039	.049
KEPUASAN	.032	.032	.038	.049

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.036	.033	.031

T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	9.952	.000	.000
KEPUASAN	8.125	9.123	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.559	-1.855	-.500	16.640
DISTRIBU	1.971	-2.478	-.015	6.140
KEPUASAN	1.500	-1.140	-.463	-.201
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	15.264	15.264	15.264	
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS				
TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598
KEPUASAN	.106	-.107	-.029	.494
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.034	.035	.040	.040
DISTRIBU	.036	.037	.043	.043
KEPUASAN	.040	.040	.047	.047
INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.024	-.028	-.009	.298
KEPUASAN	.057	-.070	-.012	.504
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.015	.016	.018	.035
KEPUASAN	.024	.024	.028	.042
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.444	.000	.000	
KEPUASAN	.567	.409	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .438				
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.045	.000	.000	
KEPUASAN	.047	.045	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.181	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				

	<u>PROSEDUR</u>	<u>DISTRIBU</u>	<u>KEPUASAN</u>
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.027	.000	.000

THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)
TIME USED : .1 SECONDS

ANALISIS LISREL MODEL DISTRIBUTIF → PROSEDURAL
(Gambar 4.4)

DOS - L I S R E L 7.16
 BY
 KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
 1369 Neitzel Road
 Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
 (317)-831-6336

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN
DA NI=7 NO=471 MA=KM
LA
Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.040 1
.033 .048 1
.056 -.042 .518 1
.088 -.091 .326 .666 1
.118 -.133 .298 .603 .657 1
.128 -.125 .225 .489 .650 .662 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FR BE (1,2) BE(3,1) BE(3,2)
FI BE (2,1)
OU SE TV EF
```

```
NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
NUMBER OF Y - VARIABLES 3
NUMBER OF X - VARIABLES 4
NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
NUMBER OF OBSERVATIONS 471
```

```
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN   KESEJAHR   HARAPAN   KONTROL
-----
PROSEDUR   1.000
DISTRIBU   .657      1.000
KEPUASAN   .650      .662      1.000
KESEJAHR   .088      .118      .128      1.000
HARAPAN   -.091     -.133     -.125     .040      1.000
KONTROL    .326      .298      .225     .033      .048      1.000
INTERAKS   .666      .603      .489     .056     -.042     .518
```

```
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS
-----
INTERAKS   1.000
```


PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	1	0
DISTRIBU	0	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	16	17	18

INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.395	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.386	.409	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.018	-.020	-.016	.434
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.453	.617	.476

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.547	.383	.524

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .513

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.395	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.386	.409	.000	
GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.018	-.020	-.016	.434
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598
KEPUASAN	.048	-.037	-.017	-.010

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.657	1.000				
KEPUASAN	.650	.662	1.000			
KESEJAHR	.088	.118	.128	1.000		
HARAPAN	-.091	-.133	-.125	.040	1.000	
KONTROL	.326	.298	.225	.033	.048	1.000
INTERAKS	.666	.603	.489	.056	-.042	.518

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.453	.617	.476

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.547	.383	.524

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .513

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000
 MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000
 LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.040	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.048	.045	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.031	.032	.037	.044
DISTRIBU	.036	.037	.043	.043
KEPUASAN	.032	.032	.038	.049

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.030	.040	.031

T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	9.952	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	8.125	9.123	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.585	-.637	-.448	9.954
DISTRIBU	2.447	-3.035	-.223	14.007
KEPUASAN	1.500	-1.140	-.463	-.201
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	15.264	15.264	15.264	
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS				
TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.054	-.064	-.020	.671
DISTRIBU	.089	-.111	-.010	.598
KEPUASAN	.106	-.107	-.029	.494
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.034	.035	.040	.040
DISTRIBU	.036	.037	.043	.043
KEPUASAN	.040	.040	.047	.047
INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.035	-.044	-.004	.236
DISTRIBU	.000	.000	.000	.000
KEPUASAN	.057	-.070	-.012	.504
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.015	.015	.017	.029
DISTRIBU	.000	.000	.000	.000
KEPUASAN	.024	.024	.028	.042
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.395	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.386	.561	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS				.416
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.040	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.048	.043	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.000	.152	.000	

STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y
PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.000	.024	.000

THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)
TIME USED : .1 SECONDS

**ANALISIS LISREL MODEL UNTUK PEREMPUAN
(Gambar 4.5)**

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - perempuan
DA NI=7 NO=121 MA=KM
LA
Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
-.058 1
-.012 .099 1
.141 -.185 .422 1
.178 -.279 .128 .632 1
.164 -.325 .221 .619 .671 1
.224 -.210 .159 .450 .538 .701 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FR BE (2,1) BE(3,1) BE(3,2)
OU SE TV EF
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - perempuan
                                NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
                                NUMBER OF Y - VARIABLES 3
                                NUMBER OF X - VARIABLES 4
                                NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
                                NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
                                NUMBER OF OBSERVATIONS 121

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
      PROSEDUR  DISTRIBUTU  KEPUASAN  KESEJAHR  HARAPAN  KONTROL
      _____  _____  _____  _____  _____  _____
PROSEDUR          1.000
DISTRIBU          .671          1.000
KEPUASAN          .538          .701          1.000
KESEJAHR          .178          .164          .224          1.000
HARAPAN          -.279          -.325          -.210          -.058          1.000
KONTROL          .128          .221          .159          -.012          .099          1.000
INTERAKS         .632          .619          .450          .141          -.185          .422

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
      INTERAKS
      _____
INTERAKS          1.000

```

PARAMETER SPECIFICATIONS

	BETA		
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	16	17	18	

INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.432	.000	.000
KEPUASAN	.127	.624	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.076	-.141	-.132	.651
DISTRIBU	.038	-.155	.061	.286
KEPUASAN	.106	.026	.018	-.034

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X						
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.671	1.000				
KEPUASAN	.538	.701	1.000			
KESEJAHR	.178	.164	.224	1.000		
HARAPAN	-.279	-.325	-.210	-.058	1.000	
KONTROL	.128	.221	.159	-.012	.099	1.000
INTERAKS	.632	.619	.450	.141	-.185	.422

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X	
INTERAKS	INTERAKS
INTERAKS	1.000

PSI			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.553	.463	.489

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.447	.537	.511

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .546

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.432	.000	.000
KEPUASAN	.127	.624	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS

PROSEDUR	.076	-.141	-.132	.651
DISTRIBU	.038	-.155	.061	.286
KEPUASAN	.106	.026	.018	-.034

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.671	1.000				
KEPUASAN	.538	.701	1.000			
KESEJAHR	.178	.164	.224	1.000		
HARAPAN	-.279	-.325	-.210	-.058	1.000	
KONTROL	.128	.221	.159	-.012	.099	1.000
INTERAKS	.632	.619	.450	.141	-.185	.422

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.553	.463	.489

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.447	.537	.511

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .546

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL =	.000
MEDIAN FITTED RESIDUAL =	.000
LARGEST FITTED RESIDUAL =	.000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL =	.000
MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL =	.000
LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL =	.000

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.085	.000	.000
KEPUASAN	.097	.095	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.070	.072	.078	.080
DISTRIBU	.064	.067	.072	.091
KEPUASAN	.066	.070	.074	.098

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.073	.061	.064

T-VALUES

BETA			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	5.089	.000	.000
KEPUASAN	1.316	6.543	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.093	-1.969	-1.691	8.176
DISTRIBU	.598	-2.329	.843	3.128
KEPUASAN	1.595	.376	.241	-.350
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	7.616	7.616	7.616	
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS				
TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.076	-.141	-.132	.651
DISTRIBU	.072	-.216	.004	.567
KEPUASAN	.160	-.127	.004	.403
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.070	.072	.078	.080
DISTRIBU	.071	.073	.079	.081
KEPUASAN	.082	.084	.091	.093
INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.033	-.061	-.057	.281
KEPUASAN	.054	-.153	-.014	.437
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.031	.033	.035	.065
KEPUASAN	.049	.053	.056	.084
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.432	.000	.000	
KEPUASAN	.397	.624	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS				.419
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.085	.000	.000	
KEPUASAN	.102	.095	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.270	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	

PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.067	.000	.000

THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)
TIME USED : .1 SECONDS

**ANALISIS LISREL MODEL PADA LAKI-LAKI
(Gambar 4.6)**

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - laki-laki
DA NI=7 NO=350 MA=KM
LA
Kesejahr Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.073 1
.051 .026 1
.027 .001 .554 1
-.062 -.025 .398 .678 1
.105 -.077 .326 .600 .654 1
.098 -.092 .251 .500 .678 .652 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FR BE (2,1) BE(3,1) BE(3,2)
OU SE TV EF
```

```
NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
NUMBER OF Y - VARIABLES 3
NUMBER OF X - VARIABLES 4
NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
NUMBER OF OBSERVATIONS 350
```

```
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
PROSEDUR   DISTRIBUTU   KEPUASAN   KESEJAHR   HARAPAN   KONTROL
-----
PROSEDUR   1.000
DISTRIBU   .654      1.000
KEPUASAN   .678      .652      1.000
KESEJAHR   -.062     .105     .098      1.000
HARAPAN    -.025     -.077    -.092     .073     1.000
KONTROL    .398     .326     .251     .051     .026     1.000
INTERAKS   .678     .600     .500     .027     .001     .554
```

```
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS
-----
INTERAKS   1.000
```

PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	16	17	18

INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.475	.000	.000
KEPUASAN	.486	.341	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.080	-.021	.037	.660
DISTRIBU	.134	-.074	-.029	.290
KEPUASAN	.100	-.059	-.053	-.007

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.654	1.000				
KEPUASAN	.678	.652	1.000			
KESEJAHR	-.062	.105	.098	1.000		
HARAPAN	-.025	-.077	-.092	.073	1.000	
KONTROL	.398	.326	.251	.051	.026	1.000
INTERAKS	.678	.600	.500	.027	.001	.554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000
----------	-------

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.533	.505	.450

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.467	.495	.550

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .545

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.475	.000	.000	
KEPUASAN	.486	.341	.000	
GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.080	-.021	.037	.660
DISTRIBU	.134	-.074	-.029	.290
KEPUASAN	.100	-.059	-.053	-.007

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.654	1.000				
KEPUASAN	.678	.652	1.000			
KESEJAHR	-.062	.105	.098	1.000		
HARAPAN	-.025	-.077	-.092	.073	1.000	
KONTROL	.398	.326	.251	.051	.026	1.000
INTERAKS	.678	.600	.500	.027	.001	.554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X
INTERAKS

INTERAKS	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
INTERAKS	1.000		
PSI			
	.533	.505	.450

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
.467	.495	.550

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .545

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000
 MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000
 LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.052	.000	.000
KEPUASAN	.055	.051	.000

GAMMA

	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.039	.039	.047	.047
DISTRIBU	.039	.038	.046	.058
KEPUASAN	.037	.036	.044	.056

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.041	.038	.034

T-VALUES

BETA			
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	9.062	.000	.000
KEPUASAN	8.818	6.705	.000

GAMMA				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-2.033	-.527	.788	13.974
DISTRIBU	3.456	-1.939	-.625	5.049
KEPUASAN	2.683	-1.633	-1.219	-.125
PSI				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	13.134	13.134	13.134	
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS				
TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.080	-.021	.037	.660
DISTRIBU	.095	-.084	-.011	.604
KEPUASAN	.093	-.098	-.039	.519
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.039	.039	.047	.047
DISTRIBU	.043	.043	.051	.051
KEPUASAN	.046	.046	.055	.055
INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	-.038	-.010	.018	.313
KEPUASAN	-.006	-.039	.014	.526
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAHR	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.019	.019	.023	.041
KEPUASAN	.030	.029	.034	.050
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.475	.000	.000	
KEPUASAN	.648	.341	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .528				
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.052	.000	.000	
KEPUASAN	.053	.051	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.162	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				

	<u>PROSEDUR</u>	<u>DISTRIBU</u>	<u>KEPUASAN</u>
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.030	.000	.000

THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)
TIME USED : .1 SECONDS

DIAPAKAI **ANALISIS LISREL UNTUK MODEL KEPUASAN RENDAH**
(Gambar 4.8)

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.
Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
DA NI=7 NO=55 MA=KM
LA
Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.040 1
-.082 .044 1
-.054 .013 .678 1
-.141 -.017 .630 .671 1
.018 -.151 .550 .491 .582 1
.095 -.016 .279 .172 .117 .455 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
OU SE TV EF
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
NUMBER OF Y - VARIABLES 3
NUMBER OF X - VARIABLES 4
NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
NUMBER OF OBSERVATIONS 55
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN   KESEJAH   HARAPAN   KONTROL
-----
PROSEDUR   1.000
DISTRIBU   .582      1.000
KEPUASAN   .117      .455      1.000
KESEJAH    -.141     .018      .095      1.000
HARAPAN    -.017     -.151     -.016     .040      1.000
KONTROL    .630     .550     .279     -.082     .044      1.000
INTERAKS   .671     .491     .172     -.054     .013     .678

```

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS 1.000
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	16	17	18

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.376	.000	.000
KEPUASAN	-.289	.541	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.089	-.033	.319	.451
DISTRIBU	.104	-.163	.299	.043
KEPUASAN	.056	.051	.178	-.018

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.582	1.000				
KEPUASAN	.117	.455	1.000			
KESEJAH	-.141	.018	.095	1.000		
HARAPAN	-.017	-.151	-.016	.040	1.000	
KONTROL	.630	.550	.279	-.082	.044	1.000
INTERAKS	.671	.491	.172	-.054	.013	.678

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.484	.569	.737

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.516 .431 .263

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .597
 ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
 LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

PROSEDUR .000 .000 .000
 DISTRIBU .376 .000 .000
 KEPUASAN -.289 .541 .000

GAMMA

KESEJAH HARAPAN KONTROL INTERAKS

PROSEDUR -.089 -.033 .319 .451
 DISTRIBU .104 -.163 .299 .043
 KEPUASAN .056 .051 .178 -.018

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN KESEJAH HARAPAN KONTROL

PROSEDUR 1.000
 DISTRIBU .582 1.000
 KEPUASAN .117 .455 1.000
 KESEJAH -.141 .018 .095 1.000
 HARAPAN -.017 -.151 -.016 .040 1.000
 KONTROL .630 .550 .279 -.082 .044 1.000
 INTERAKS .671 .491 .172 -.054 .013 .678

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.484 .569 .737

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.516 .431 .263

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .597

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000

LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.153	.000	.000
KEPUASAN	.185	.161	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.099	.099	.134	.134
DISTRIBU	.108	.107	.154	.161
KEPUASAN	.124	.125	.181	.183

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.097	.114	.147

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	2.455	.000	.000
KEPUASAN	-1.566	3.360	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.903	-.338	2.374	3.366
DISTRIBU	.967	-1.519	1.949	.270
KEPUASAN	.452	.408	.984	-.098

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	5.000	5.000	5.000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN RENDAH
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	-.089	-.033	.319	.451
DISTRIBU	.071	-.175	.419	.213
KEPUASAN	.120	-.034	.313	-.033

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.099	.099	.134	.134
DISTRIBU	.113	.113	.154	.154
KEPUASAN	.135	.135	.184	.183

INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	-.034	-.013	.120	.170
KEPUASAN	.064	-.085	.134	-.015

STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.040	.037	.070	.086
KEPUASAN	.063	.064	.108	.112
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.376	.000	.000	
KEPUASAN	-.086	.541	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .419				
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.153	.000	.000	
KEPUASAN	.193	.161	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.204	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.103	.000	.000	
THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)				
TIME USED : .1 SECONDS				

**ANALISIS LISREL UNTUK MODEL KEPUASAN SEDANG
(Gambar 4.9)**

DOS - L I S R E L 7.16

BY

KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.

1369 Neitzel Road

Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.

(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.

Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG

DA NI=7 NO=347 MA=KM

LA

Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan

KMATRIX

1

.085 1

.049 .110 1

.001 .013 .385 1

.044 -.014 .209 .594 1

.012 -.032 .256 .583 .605 1

-.016 .024 .092 .342 .453 .467 1

SE

5 6 7 1 2 3 4

MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI

OU SE TV EF

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG

NUMBER OF INPUT VARIABLES 7

NUMBER OF Y - VARIABLES 3

NUMBER OF X - VARIABLES 4

NUMBER OF ETA - VARIABLES 3

NUMBER OF KSI - VARIABLES 4

NUMBER OF OBSERVATIONS 347

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.605	1.000				
KEPUASAN	.453	.467	1.000			
KESEJAH	.044	.012	-.016	1.000		
HARAPAN	-.014	-.032	.024	.085	1.000	
KONTROL	.209	.256	.092	.049	.110	1.000
INTERAKS	.594	.583	.342	.001	.013	.385

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS 1.000
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	16	17	18

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.400	.000	.000
KEPUASAN	.265	.307	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.046	-.023	-.023	.603
DISTRIBU	-.005	-.036	.051	.326
KEPUASAN	-.033	.046	-.056	.026

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.605	1.000				
KEPUASAN	.453	.467	1.000			
KESEJAH	.044	.012	-.016	1.000		
HARAPAN	-.014	-.032	.024	.085	1.000	
KONTROL	.209	.256	.092	.049	.110	1.000
INTERAKS	.594	.583	.342	.001	.013	.385

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.644	.554	.731

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	.356	.446	.269	

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .442

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
 LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.400	.000	.000
KEPUASAN	.265	.307	.000

GAMMA

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.046	-.023	-.023	.603
DISTRIBU	-.005	-.036	.051	.326
KEPUASAN	-.033	.046	-.056	.026

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.605	1.000				
KEPUASAN	.453	.467	1.000			
KESEJAH	.044	.012	-.016	1.000		
HARAPAN	-.014	-.032	.024	.085	1.000	
KONTROL	.209	.256	.092	.049	.110	1.000
INTERAKS	.594	.583	.342	.001	.013	.385

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	<u> </u>
	1.000

PSI

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
PROSEDUR	.644	.554	.731

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	.356	.446	.269	

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .442

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000

LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.050	.000	.000
KEPUASAN	.063	.062	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.044	.044	.047	.047
DISTRIBU	.040	.041	.044	.053
KEPUASAN	.047	.047	.051	.064

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.049	.042	.056

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	7.989	.000	.000
KEPUASAN	4.227	4.948	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	1.066	-.531	-.483	12.816
DISTRIBU	-.133	-.880	1.161	6.142
KEPUASAN	-.700	.986	-1.100	.406

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	13.077	13.077	13.077

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN SEDANG
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.046	-.023	-.023	.603
DISTRIBU	.013	-.045	.042	.567
KEPUASAN	-.016	.026	-.049	.360

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.044	.044	.047	.047
DISTRIBU	.044	.044	.048	.048
KEPUASAN	.051	.051	.055	.055

INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.019	-.009	-.009	.242
KEPUASAN	.016	-.020	.007	.334

STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y				
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.018	.018	.019	.036
KEPUASAN	.021	.021	.023	.046
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.400	.000	.000	
KEPUASAN	.388	.307	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .269				
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.050	.000	.000	
KEPUASAN	.060	.062	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.123	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.029	.000	.000	
THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)				
TIME USED : .1 SECONDS				

**ANALISIS LISREL UNTUK MODEL KEPUASAN TINGGI
(Gambar 4.10)**

DOS - L I S R E L 7.16
BY
KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.
Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.
All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
DA NI=7 NO=69 MA=KM
LA
Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
-.013 1
-.057 .053 1
.055 .072 .710 1
.037 .015 .258 .266 1
.098 -.063 .202 .322 .267 1
.016 -.229 -.048 .065 .385 .261 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
OU SE TV EF
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
          NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
          NUMBER OF Y - VARIABLES 3
          NUMBER OF X - VARIABLES 4
          NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
          NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
          NUMBER OF OBSERVATIONS 69
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
          PROSEDUR      DISTRIBU      KEPUASAN      KESEJAH      HARAPAN      KONTROL
          -----      -----      -----      -----      -----      -----
PROSEDUR          1.000
DISTRIBU          .267          1.000
KEPUASAN          .385          .261          1.000
KESEJAH           .037          .098          .016          1.000
HARAPAN           .015          -.063         -.229         -.013          1.000
KONTROL           .258          .202         -.048         -.057          .053          1.000
INTERAKS         .266          .322          .065          .055          .072          .710

```


CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS 1.000
ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
PARAMETER SPECIFICATIONS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	0	0	0
DISTRIBU	1	0	0
KEPUASAN	2	3	0

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	4	5	6	7
DISTRIBU	8	9	10	11
KEPUASAN	12	13	14	15

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	16	17	18

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.198	.000	.000
KEPUASAN	.381	.166	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.036	-.004	.147	.160
DISTRIBU	.068	-.085	-.068	.320
KEPUASAN	-.036	-.219	-.240	.099

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.267	1.000				
KEPUASAN	.385	.261	1.000			
KESEJAH	.037	.098	.016	1.000		
HARAPAN	.015	-.063	-.229	-.013	1.000	
KONTROL	.258	.202	-.048	-.057	.053	1.000
INTERAKS	.266	.322	.065	.055	.072	.710

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.918	.846	.742

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	.082	.154	.258	

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .247

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
 LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.198	.000	.000
KEPUASAN	.381	.166	.000

GAMMA

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.036	-.004	.147	.160
DISTRIBU	.068	-.085	-.068	.320
KEPUASAN	-.036	-.219	-.240	.099

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.267	1.000				
KEPUASAN	.385	.261	1.000			
KESEJAH	.037	.098	.016	1.000		
HARAPAN	.015	-.063	-.229	-.013	1.000	
KONTROL	.258	.202	-.048	-.057	.053	1.000
INTERAKS	.266	.322	.065	.055	.072	.710

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	<u> </u>
	1.000

PSI

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.918	.846	.742

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
	.082	.154	.258	

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .247

CHI-SQUARE WITH 0 DEGREES OF FREEDOM = .00 (P = 1.00)

GOODNESS OF FIT INDEX = 1.000

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
 SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = .000
 MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000
 LARGEST FITTED RESIDUAL = .000

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
 LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .000

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.120	.000	.000
KEPUASAN	.115	.117	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.121	.120	.172	.172
DISTRIBU	.116	.115	.166	.166
KEPUASAN	.109	.108	.155	.160

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.162	.150	.131

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	1.652	.000	.000
KEPUASAN	3.321	1.416	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.301	-.032	.853	.932
DISTRIBU	.586	-.733	-.409	1.925
KEPUASAN	-.332	-2.020	-1.546	.616

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	5.657	5.657	5.657

ANALISIS DATA DISERTASI FATUROCHMAN - KEPUASAN TINGGI
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.036	-.004	.147	.160
DISTRIBU	.075	-.085	-.039	.352
KEPUASAN	-.010	-.235	-.191	.218

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.121	.120	.172	.172
DISTRIBU	.119	.118	.168	.168
KEPUASAN	.121	.120	.172	.172

INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.007	-.001	.029	.032
KEPUASAN	.026	-.016	.049	.119

	STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y			
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.024	.024	.038	.039
KEPUASAN	.054	.054	.078	.087
TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.198	.000	.000	
KEPUASAN	.414	.166	.000	
LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .207				
STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.120	.000	.000	
KEPUASAN	.114	.117	.000	
INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.033	.000	.000	
STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y				
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	
PROSEDUR	.000	.000	.000	
DISTRIBU	.000	.000	.000	
KEPUASAN	.031	.000	.000	
THE PROBLEM USED 8024 BYTES (= 3.1% OF AVAILABLE WORKSPACE)				
TIME USED : .1 SECONDS				

**HASIL ANALISIS LISREL RESPEKIFIKASI - PEREMPUAN
(Model 3P)**

DOS - L I S R E L 7.16

BY

KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.

1369 Neitzel Road

Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.

(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.

Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

MODEL 3P - PEREMPUAN
DA NI=7 NO=121 MA=KM
LA
Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
-.058 1
-.012 .099 1
.141 -.185 .422 1
.178 -.279 .128 .632 1
.164 -.325 .221 .619 .671 1
.224 -.210 .159 .450 .538 .701 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FI GA(1,1) GA(1,2) GA(1,3) GA(2,1) GA(2,3) GA(3,1) GA(3,2) GA(3,3) GA(3,4)
FI BE(3,1) GA(2,2)
FR GA(1,4) GA(2,4) BE(2,1) BE(3,2)
OU SE TV EF
MODEL 3P - PEREMPUAN
                                NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
                                NUMBER OF Y - VARIABLES 3
                                NUMBER OF X - VARIABLES 4
                                NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
                                NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
                                NUMBER OF OBSERVATIONS 121

MODEL 3P - PEREMPUAN
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
                                PROSEDUR      DISTRIBU      KEPUASAN      KESEJAH      HARAPAN      KONTROL
                                _____      _____      _____      _____      _____      _____
PROSEDUR      1.000
DISTRIBU      .671      1.000
KEPUASAN      .538      .701      1.000
KESEJAH      .178      .164      .224      1.000
HARAPAN      -.279      -.325      -.210      -.058      1.000
KONTROL      .128      .221      .159      -.012      .099      1.000
INTERAKS      .632      .619      .450      .141      -.185      .422

```

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS	1.000				
MODEL 3P - PEREMPUAN					
PARAMETER SPECIFICATIONS					
BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	0	0	0		
DISTRIBU	1	0	0		
KEPUASAN	0	2	0		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	0	0	0	3	
DISTRIBU	0	0	0	4	
KEPUASAN	0	0	0	0	
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	5	6	7		

MODEL 3P - PEREMPUAN
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	.000	.000	.000		
DISTRIBU	.853	.000	.000		
KEPUASAN	.000	.731	.000		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	.000	.000	.000	.632	
DISTRIBU	.000	.000	.000	.080	
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000	

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.903	1.396				
KEPUASAN	.660	1.021	1.256			
KESEJAH	.089	.087	.064	1.000		
HARAPAN	-.117	-.115	-.084	-.058	1.000	
KONTROL	.267	.261	.191	-.012	.099	1.000
INTERAKS	.632	.619	.453	.141	-.185	.422

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000				
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	.601	.576	.510		

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.399 .587 .594

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .403
 MODEL 3P - PEREMPUAN

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

PROSEDUR .000 .000 .000
 DISTRIBU .466 .000 .000
 KEPUASAN .000 .701 .000

GAMMA

KESEJAH HARAPAN KONTROL INTERAKS

PROSEDUR .000 .000 .000 .632
 DISTRIBU .000 .000 .000 .325
 KEPUASAN .000 .000 .000 .000

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN KESEJAH HARAPAN KONTROL

PROSEDUR 1.000
 DISTRIBU .671 1.000
 KEPUASAN .470 .701 1.000
 KESEJAH .089 .087 .061 1.000
 HARAPAN -.117 -.115 -.080 -.058 1.000
 KONTROL .267 .261 .183 -.012 .099 1.000
 INTERAKS .632 .619 .434 .141 -.185 .422

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.601 .486 .509

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.399 .514 .491

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .469

CHI-SQUARE WITH 11 DEGREES OF FREEDOM = 20.84 (P = .035)

GOODNESS OF FIT INDEX = .954

ADJUSTED GOODNESS OF FIT INDEX = .883

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .074

MODEL 3P - PEREMPUAN

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = -.210

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .163

STEMLEAF PLOT

```

- 2|1
- 1|6
- 1|43
- 0|
- 0|42000000000000000000
  0|2
  0|789
  1|
  1|6
    
```

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

```

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = -2.276
  MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
  LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = 1.759
    
```

STEMLEAF PLOT

```

- 2|3
- 1|85
- 1|4
- 0|
- 0|43000000000000000000
  0|2
  0|8
  1|01
  1|8
    
```

MODEL 3P - PEREMPUAN

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.084	.000	.000
KEPUASAN	.000	.066	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.072
DISTRIBU	.000	.000	.000	.084
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.079	.064	.067

MODEL 3P - PEREMPUAN

T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	5.575	.000	.000
KEPUASAN	.000	10.587	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	8.783
DISTRIBU	.000	.000	.000	3.884
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000


```

PSI
  PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN
  -----
    7.616     7.616     7.616
MODEL 3P - PEREMPUAN
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS
  TOTAL EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .632
DISTRIBU     .000     .000     .000     .619
KEPUASAN     .000     .000     .000     .434
  STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .072
DISTRIBU     .000     .000     .000     .073
KEPUASAN     .000     .000     .000     .066
  INDIRECT EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000     .294
KEPUASAN     .000     .000     .000     .434
  STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000     .063
KEPUASAN     .000     .000     .000     .066
  TOTAL EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .466     .000     .000
KEPUASAN     .327     .701     .000
  LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS      .491
  STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .084     .000     .000
KEPUASAN     .066     .066     .000
  INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000
KEPUASAN     .327     .000     .000
  STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEPUASAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000
KEPUASAN     .066     .000     .000
  THE PROBLEM USED      7832 BYTES (= 3.0% OF AVAILABLE WORKSPACE)
  TIME USED :          .1 SECONDS

```

**HASIL ANALISIS LISREL RESPEKIFIKASI MODEL - LAKI-LAKI
(Model 3L)**

DOS - L I S R E L 7.16

BY

KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by
SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.
1369 Neitzel Road
Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.
(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.

Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

```

MODEL 3L - LAKI-LAKI
DA NI=7 NO=350 MA=KM
LA
Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan
KMATRIX
1
.073 1
.051 .026 1
.027 .001 .554 1
-.062 -.025 .398 .678 1
.105 -.77 .326 .600 .654 1
.098 -.092 .251 .500 .678 .652 1
SE
5 6 7 1 2 3 4
MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI
FI GA(1,2) GA(1,3) GA(2,2) GA(2,3) GA(1,1)
FI GA(3,1) GA(3,3) GA(3,4) BE(2,1) GA(3,2)
FR GA(1,4) GA(2,4) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) GA(2,1)
OU SE TV EF
MODEL 3L - LAKI-LAKI
                                NUMBER OF INPUT VARIABLES 7
                                NUMBER OF Y - VARIABLES 3
                                NUMBER OF X - VARIABLES 4
                                NUMBER OF ETA - VARIABLES 3
                                NUMBER OF KSI - VARIABLES 4
                                NUMBER OF OBSERVATIONS 350
MODEL 3L - LAKI-LAKI
CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
                                PROSEDUR      DISTRIBU      KEPUASAN      KESEJAH      HARAPAN      KONTROL
                                _____      _____      _____      _____      _____      _____
PROSEDUR      1.000
DISTRIBU      .654      1.000
KEPUASAN      .678      .652      1.000
KESEJAH      -.062      .105      .098      1.000
HARAPAN      -.025      .000      -.092      .073      1.000
KONTROL      .398      .326      .251      .051      .026      1.000
INTERAKS      .678      .600      .500      .027      .001      .554

```

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS	1.000				
MODEL 3L - LAKI-LAKI					
PARAMETER SPECIFICATIONS					
BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	0	0	0		
DISTRIBU	1	0	0		
KEPUASAN	2	3	0		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	0	0	0	4	
DISTRIBU	5	0	0	6	
KEPUASAN	0	0	0	0	
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	7	8	9		

MODEL 3L - LAKI-LAKI
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	.000	.000	.000		
DISTRIBU	.476	.000	.000		
KEPUASAN	-.050	.893	.000		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	.000	.000	.000	.678	
DISTRIBU	.127	.000	.000	.274	
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000	

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.664	1.010				
KEPUASAN	.543	.868	1.393			
KESEJAH	.018	.143	.127	1.000		
HARAPAN	.001	.010	.009	.073	1.000	
KONTROL	.376	.337	.282	.051	.026	1.000
INTERAKS	.678	.600	.502	.027	.001	.554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000				
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	.540	.511	.645		

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

 .460 .494 .537

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .514
 MODEL 3L - LAKI-LAKI

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

PROSEDUR .000 .000 .000
 DISTRIBU .476 .000 .000
 KEPUASAN .440 .364 .000

GAMMA

 KESEJAH HARAPAN KONTROL INTERAKS

PROSEDUR .000 .000 .000 .678
 DISTRIBU .127 .000 .000 .274
 KEPUASAN .000 .000 .000 .000

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN KESEJAH HARAPAN KONTROL

PROSEDUR 1.000
 DISTRIBU .664 1.010
 KEPUASAN .682 .660 1.005
 KESEJAH .018 .143 .060 1.000
 HARAPAN .001 .010 .004 .073 1.000
 KONTROL .376 .337 .288 .051 .026 1.000
 INTERAKS .678 .600 .517 .027 .001 .554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

 .540 .511 .464

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

 .460 .494 .538

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .514

CHI-SQUARE WITH 9 DEGREES OF FREEDOM = 19.39 (P = .022)

GOODNESS OF FIT INDEX = .985

ADJUSTED GOODNESS OF FIT INDEX = .953

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .028

MODEL 3L - LAKI-LAKI

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = -.096

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .038

STEMLEAF PLOT

```

- 8 | 60
- 6 |
- 4 |
- 2 | 876
- 0 | 7100085400000000000000
  0 |
  2 | 28

```

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

```

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = -1.778
MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = .728

```

STEMLEAF PLOT

```

- 1 | 85
- 1 | 0
- 0 | 75
- 0 | 4333222100000000000000
  0 | 4
  0 | 7

```

MODEL 3L - LAKI-LAKI

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.052	.000	.000
KEPUASAN	.049	.049	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.040
DISTRIBU	.038	.000	.000	.052
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.041	.039	.035

MODEL 3L - LAKI-LAKI

T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	9.100	.000	.000
KEPUASAN	8.993	7.492	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	17.132
DISTRIBU	3.303	.000	.000	5.224
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	13.134	13.134	13.134

MODEL 3L - LAKI-LAKI

TOTAL AND INDIRECT EFFECTS

TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.678
DISTRIBU	.127	.000	.000	.597
KEPUASAN	.046	.000	.000	.516

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.040
DISTRIBU	.038	.000	.000	.043
KEPUASAN	.015	.000	.000	.038

INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000	.323
KEPUASAN	.046	.000	.000	.516

STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000	.040
KEPUASAN	.015	.000	.000	.038

TOTAL EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.476	.000	.000
KEPUASAN	.613	.364	.000

LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS .492

STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.052	.000	.000
KEPUASAN	.042	.049	.000

INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.174	.000	.000

STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.000	.000	.000
KEPUASAN	.030	.000	.000

THE PROBLEM USED 7832 BYTES (= 3.0% OF AVAILABLE WORKSPACE)

TIME USED : .1 SECONDS

**HASIL ANALISIS LISREL RESPEKIFIKASI MODEL - LAKI-LAKI
(Model 4L)**

DOS - L I S R E L 7.16

BY

KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM

This program is published exclusively by
SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc.

1369 Neitzel Road

Mooresville, Indiana 46158, U.S.A.

(317)-831-6336

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-89.

Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-1989.

All rights reserved.

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ :

MODEL 4L - LAKI-LAKI

DA NI=7 NO=350 MA=KM

LA

Kesejah Harapan Kontrol Interaks Prosedur Distribu Kepuasan

KMATRIX

1

.073 1

.051 .026 1

.027 .001 .554 1

-.062 -.025 .398 .678 1

.105 -.77 .326 .600 .654 1

.098 -.092 .251 .500 .678 .652 1

SE

5 6 7 1 2 3 4

MO NY=3 NX=4 BE=SD PS=DI

FI GA(1,2) GA(1,3) GA(2,2) GA(2,3) GA(1,1) GA(2,1)

FI GA(3,1) GA(3,3) GA(3,4) BE(2,1) GA(3,2)

FR GA(1,4) GA(2,4) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2)

OU SE TV EF

MODEL 4L - LAKI-LAKI

NUMBER OF INPUT VARIABLES 7

NUMBER OF Y - VARIABLES 3

NUMBER OF X - VARIABLES 4

NUMBER OF ETA - VARIABLES 3

NUMBER OF KSI - VARIABLES 4

NUMBER OF OBSERVATIONS 350

MODEL 4L - LAKI-LAKI

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	.654	1.000				
KEPUASAN	.678	.652	1.000			
KESEJAH	-.062	.105	.098	1.000		
HARAPAN	-.025	.000	-.092	.073	1.000	
KONTROL	.398	.326	.251	.051	.026	1.000
INTERAKS	.678	.600	.500	.027	.001	.554

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED
INTERAKS

INTERAKS	1.000				
MODEL 4L - LAKI-LAKI					
PARAMETER SPECIFICATIONS					
BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	0	0	0		
DISTRIBU	1	0	0		
KEPUASAN	2	3	0		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	0	0	0	4	
DISTRIBU	0	0	0	5	
KEPUASAN	0	0	0	0	
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	6	7	8		

MODEL 4L - LAKI-LAKI
INITIAL ESTIMATES (TSLs)

BETA					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
PROSEDUR	.000	.000	.000		
DISTRIBU	-.941	.000	.000		
KEPUASAN	-.050	.893	.000		
GAMMA					
	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS	
PROSEDUR	.000	.000	.000	.678	
DISTRIBU	.000	.000	.000	1.238	
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000	

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL
PROSEDUR	1.000					
DISTRIBU	-.102	2.422				
KEPUASAN	-.141	2.168	2.588			
KESEJAH	.018	.016	.014	1.000		
HARAPAN	.001	.001	.001	.073	1.000	
KONTROL	.376	.332	.278	.051	.026	1.000
INTERAKS	.678	.600	.502	.027	.001	.554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS	1.000				
PSI					
	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN		
	.540	1.584	.645		

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS
 PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.460 .346 .751

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .645
 MODEL 4L - LAKI-LAKI

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD)

BETA

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

PROSEDUR .000 .000 .000
 DISTRIBU .458 .000 .000
 KEPUASAN .440 .364 .000

GAMMA

KESEJAH HARAPAN KONTROL INTERAKS

PROSEDUR .000 .000 .000 .678
 DISTRIBU .000 .000 .000 .290
 KEPUASAN .000 .000 .000 .000

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN KESEJAH HARAPAN KONTROL

PROSEDUR 1.000
 DISTRIBU .654 1.000
 KEPUASAN .678 .652 1.000
 KESEJAH .018 .016 .014 1.000
 HARAPAN .001 .001 .001 .073 1.000
 KONTROL .376 .332 .286 .051 .026 1.000
 INTERAKS .678 .600 .517 .027 .001 .554

COVARIANCE MATRIX OF Y AND X

INTERAKS

INTERAKS 1.000

PSI

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.540 .527 .464

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS

PROSEDUR DISTRIBU KEPUASAN

.460 .473 .536

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS IS .503

CHI-SQUARE WITH 10 DEGREES OF FREEDOM = 30.13 (P = .001)

GOODNESS OF FIT INDEX = .977

ADJUSTED GOODNESS OF FIT INDEX = .935

ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = .034

MODEL 4L - LAKI-LAKI

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS

SMALLEST FITTED RESIDUAL = -.093

MEDIAN FITTED RESIDUAL = .000

LARGEST FITTED RESIDUAL = .089

STEMLEAF PLOT

```

- 8 | 30
- 6 |
- 4 |
- 2 | 56
- 0 | 7610000000000000000000
  0 |
  2 | 2
  4 |
  6 |
  8 | 49
    
```

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS

```

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = -1.718
MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = .000
LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = 1.650
    
```

STEMLEAF PLOT

```

- 1 | 75
- 1 |
- 0 | 75
- 0 | 410000000000000000000000
  0 | 4
  0 |
  1 |
  1 | 66
    
```

MODEL 4L - LAKI-LAKI

STANDARD ERRORS

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	.053	.000	.000
KEPUASAN	.048	.048	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	.040
DISTRIBU	.000	.000	.000	.053
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000

PSI

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
	.041	.040	.035

MODEL 4L - LAKI-LAKI

T-VALUES

BETA

	PROSEDUR	DISTRIBU	KEPUASAN
PROSEDUR	.000	.000	.000
DISTRIBU	8.605	.000	.000
KEPUASAN	9.066	7.516	.000

GAMMA

	KESEJAH	HARAPAN	KONTROL	INTERAKS
PROSEDUR	.000	.000	.000	17.132
DISTRIBU	.000	.000	.000	5.451
KEPUASAN	.000	.000	.000	.000

```

PSI
  PROSEDUR   DISTRIBU   KEMPUSAN
  -----
    13.134   13.134   13.134
MODEL 4L - LAKI-LAKI
TOTAL AND INDIRECT EFFECTS
  TOTAL EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .678
DISTRIBU     .000     .000     .000     .600
KEPUASAN     .000     .000     .000     .517
  STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .040
DISTRIBU     .000     .000     .000     .043
KEPUASAN     .000     .000     .000     .038
  INDIRECT EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000     .310
KEPUASAN     .000     .000     .000     .517
  STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF X ON Y
    KESEJAH   HARAPAN   KONTROL   INTERAKS
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000     .040
KEPUASAN     .000     .000     .000     .038
  TOTAL EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEMPUSAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .458     .000     .000
KEPUASAN     .606     .364     .000
  LARGEST EIGENVALUE OF B*B' (STABILITY INDEX) IS      .477
  STANDARD ERRORS FOR TOTAL EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEMPUSAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .053     .000     .000
KEPUASAN     .043     .048     .000
  INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEMPUSAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000
KEPUASAN     .167     .000     .000
  STANDARD ERRORS FOR INDIRECT EFFECTS OF Y ON Y
    PROSEDUR   DISTRIBU   KEMPUSAN
  -----
PROSEDUR     .000     .000     .000
DISTRIBU     .000     .000     .000
KEPUASAN     .029     .000     .000
  THE PROBLEM USED      7832 BYTES (= 3.0% OF AVAILABLE WORKSPACE)
  TIME USED :          .1 SECONDS

```

LAMPIRAN F
Hasil-Hasil Analisis Varians

Analisis Varians Tanpa Membedakan Informasi Awal

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	179
	2,00	tidak fair	179
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	120
	2,00	sama	119
	3,00	lebih kecil	119

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	8,0667	1,9033	60
	sama	7,8305	2,1103	59
	lebih kecil	7,7000	2,5399	60
	Total	7,8659	2,1939	179
tidak fair	lebih besar	2,6500	2,2461	60
	sama	2,8500	2,3780	60
	lebih kecil	1,9322	1,4126	59
	Total	2,4804	2,0862	179
Total	lebih besar	5,3583	3,4197	120
	Sama	5,3193	3,3571	119
	lebih kecil	4,8403	3,5487	119
	Total	5,1732	3,4411	358

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2627,595(a)	5	525,519	115,638	,000
Intercept	9574,132	1	9574,132	2106,747	,000
PROSED	2598,383	1	2598,383	571,763	,000
DISTRIB	22,607	2	11,303	2,487	,085
PROSED * DISTRIB	9,255	2	4,628	1,018	,362
Error	1599,667	352	4,545		
Total	13808,000	358			
Corrected Total	4227,263	357			

a R Squared = ,622 (Adjusted R Squared = ,616)

Analisis Varians Tanpa Membedakan Informasi Awal

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distribusi

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	179
	2,00	tidak fair	179
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	120
	2,00	sama	119
	3,00	lebih kecil	119

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	6,93	2,02	60
	Sama	5,85	2,67	59
	lebih kecil	4,53	2,63	60
	Total	5,77	2,63	179
tidak fair	lebih besar	5,50	2,90	60
	Sama	5,02	2,74	60
	lebih kecil	3,10	1,69	59
	Total	4,55	2,70	179
Total	lebih besar	6,22	2,59	120
	Sama	5,43	2,73	119
	lebih kecil	3,82	2,32	119
	Total	5,16	2,73	358

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distribusi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	498,258(a)	5	99,652	16,182	,000
Intercept	9514,433	1	9514,433	1545,016	,000
PROSED	135,819	1	135,819	22,055	,000
DISTRIB	357,247	2	178,623	29,006	,000
PROSED * DISTRIB	7,190	2	3,595	,584	,558
Error	2167,667	352	6,158		
Total	12195,000	358			
Corrected Total	2665,925	357			

a R Squared = ,187 (Adjusted R Squared = ,175)

Analisis Varians Bila Informasi Awal Adalah Distribusi

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	89
	2,00	tidak fair	89
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	60
	2,00	sama	59
	3,00	lebih kecil	59

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	8,4333	1,5906	30
	sama	8,5172	2,2300	29
	lebih kecil	8,2000	2,6444	30
	Total	8,3820	2,1769	89
tidak fair	lebih besar	2,7667	2,1922	30
	sama	2,5667	2,2542	30
	lebih kecil	1,7241	1,0986	29
	Total	2,3596	1,9613	89
Total	lebih besar	5,6000	3,4307	60
	sama	5,4915	3,7342	59
	lebih kecil	5,0169	3,8394	59
	Total	5,3708	3,6588	178

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1633,594(a)	5	326,719	76,360	,000
Intercept	5127,850	1	5127,850	1198,463	,000
PROSED	1618,202	1	1618,202	378,200	,000
DISTRIB	14,733	2	7,367	1,722	,182
PROSED * DISTRIB	5,004	2	2,502	,585	,558
Error	735,934	172	4,279		
Total	7504,000	178			
Corrected Total	2369,528	177			

a R Squared = ,689 (Adjusted R Squared = ,680)

Analisis Varians Bila Informasi Awal Adalah Distribusi

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distribusi

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	89
	2,00	tidak fair	89
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	60
	2,00	sama	59
	3,00	lebih kecil	59

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	6,07	1,53	30
	Sama	6,14	2,74	29
	lebih kecil	4,07	2,50	30
	Total	5,42	2,48	89
tidak fair	lebih besar	6,40	2,18	30
	Sama	5,40	2,74	30
	lebih kecil	3,79	1,11	29
	Total	5,21	2,36	89
Total	lebih besar	6,23	1,87	60
	Sama	5,76	2,74	59
	lebih kecil	3,93	1,94	59
	Total	5,31	2,42	178

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distribusi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	186,042(a)	5	37,208	7,544	,000
Intercept	5019,000	1	5019,000	1017,596	,000
PROSED	2,273	1	2,273	,461	,498
DISTRIB	175,917	2	87,959	17,833	,000
PROSED * DISTRIB	8,590	2	4,295	,871	,420
Error	848,340	172	4,932		
Total	6062,000	178			
Corrected Total	1034,382	177			

a R Squared = ,180 (Adjusted R Squared = ,156)

Analisis Varians Bila Informasi Awal Adalah Prosedur

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	90
	2,00	tidak fair	90
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	60
	2,00	sama	60
	3,00	lebih kecil	60

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	7,7000	2,1359	30
	sama	7,1667	1,7827	30
	lebih kecil	7,2000	2,3693	30
	Total	7,3556	2,1004	90
tidak fair	lebih besar	2,5333	2,3302	30
	sama	3,1333	2,5015	30
	lebih kecil	2,1333	1,6554	30
	Total	2,6000	2,2072	90
Total	lebih besar	5,1167	3,4202	60
	sama	5,1500	2,9620	60
	lebih kecil	4,6667	3,2608	60
	Total	4,9778	3,2095	180

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Prosedural

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1038,244(a)	5	207,649	44,846	,000
Intercept	4460,089	1	4460,089	963,246	,000
PROSED	1017,689	1	1017,689	219,790	,000
DISTRIB	8,744	2	4,372	,944	,391
PROSED * DISTRIB	11,811	2	5,906	1,275	,282
Error	805,667	174	4,630		
Total	6304,000	180			
Corrected Total	1843,911	179			

a R Squared = ,563 (Adjusted R Squared = ,551)

Analisis Varians Bila Informasi Awal Adalah Prosedur

Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distributif

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Variasi Prosedur	1,00	fair	90
	2,00	tidak fair	90
Variasi Distribusi	1,00	lebih besar	60
	2,00	sama	60
	3,00	lebih kecil	60

Descriptive Statistics

Variasi Prosedur	Variasi Distribusi	Mean	Std. Deviation	N
fair	lebih besar	7,80	2,09	30
	sama	5,57	2,62	30
	lebih kecil	5,00	2,72	30
	Total	6,12	2,75	90
tidak fair	lebih besar	4,60	3,28	30
	sama	4,63	2,74	30
	lebih kecil	2,43	1,89	30
	Total	3,89	2,86	90
Total	lebih besar	6,20	3,17	60
	sama	5,10	2,70	60
	lebih kecil	3,72	2,66	60
	Total	5,01	3,01	180

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: Penilaian Keadilan Distribusi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	451,294(a)	5	90,259	13,404	,000
Intercept	4510,006	1	4510,006	669,746	,000
PROSED	224,450	1	224,450	33,331	,000
DISTRIB	185,811	2	92,906	13,797	,000
PROSED * DISTRIB	41,033	2	20,517	3,047	,050
Error	1171,700	174	6,734		
Total	6133,000	180			
Corrected Total	1622,994	179			

a R Squared = ,278 (Adjusted R Squared = ,257)